



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 19);
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sumenep Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 serta dokumen perencanaan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) terdiri dari :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
BAB III	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV	:	Penutup

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terperinci dalam bentuk dokumen pada masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi Lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 4 September 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 4 September  
TAHUN : 2024

NOMOR : 45

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SUMENEP  
Tahun 2024**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada RKPDP Kabupaten Sumenep Tahun 2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 sampai dengan triwulan II untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2024 telah berlangsung 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana. Perubahan RKPDP Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2024. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Perubahan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) Pasal 18;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- n. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa I-5 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  - x. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  - y. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  - z. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
  - aa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
  - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017)
  - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
  - dd. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - ee. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025;

- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011—2031;
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D)
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 139-2/2021);
- ll. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);
- mm. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;
- nn. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021 - 2026
- oo. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024
- pp. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Sumenep tahun 2024;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Sistematika Penyusunan Ranwal Renja - OPD**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

#### **II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN**

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun berkenaan dan Capaian Renstra OPD
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- II.4. Tantangan dan Peluang

#### **III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- IV.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### **IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan II per 30 Juni 2024.

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN KEMAJUAN FISIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KEMAJUAN FISIK	SISA ANGGARAN
			(Rp)	(%)		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.410.096.059,00	5.842.218.115,00	31,73%	42%	12.567.877.944,00
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.139.050.881,00	2.904.396.958,00	47,31%	32%	3.234.653.923,00
2.13.01.2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.350.000,00	450.000,00	13,43%	11%	2.900.000,00
2.13.01.2.01.01	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.350.000,00	450.000,00	13,43%	11%	2.900.000,00
2.13.01.2.02	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.192.680.421,00	2.449.872.499,00	47,18%	21%	2.742.807.922,00
2.13.01.2.02.01	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.189.330.421,00	2.449.872.499,00	47,21%	42%	2.739.457.922,00
2.13.01.2.02.05	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.350.000,00	-	0,00%	0%	3.350.000,00
2.13.01.2.05	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.200.000,00	-	0,00%	0%	37.200.000,00
2.13.01.2.05.09	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.200.000,00	-	0,00%	0%	37.200.000,00
2.13.01.2.06	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.748.160,00	296.519.829,00	51,77%	24%	276.228.331,00
2.13.01.2.06.01	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.248.000,00	-	0,00%	0%	6.248.000,00
2.13.01.2.06.02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.464.460,00	52.609.100,00	40,02%	32%	78.855.360,00
2.13.01.2.06.04	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.581.700,00	76.532.000,00	40,37%	22%	113.049.700,00
2.13.01.2.06.05	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.450.000,00	-	0,00%	0%	15.450.000,00
2.13.01.2.06.06	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.668.000,00	1.380.000,00	18,00%	18%	6.288.000,00
2.13.01.2.06.09	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.336.000,00	165.998.729,00	74,66%	73%	56.337.271,00
2.13.01.2.07	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.783.500,00	35.400.000,00	93,69%	100%	2.383.500,00
2.13.01.2.07.06	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.783.500,00	35.400.000,00	93,69%	100%	2.383.500,00
2.13.01.2.08	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.665.000,00	73.326.330,00	50,34%	49%	72.338.670,00
2.13.01.2.08.02	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	145.665.000,00	73.326.330,00	50,34%	49%	72.338.670,00
2.13.01.2.09	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.623.800,00	48.828.300,00	32,63%	19%	100.795.500,00
2.13.01.2.09.02	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.483.800,00	46.173.300,00	40,69%	32%	67.310.500,00
2.13.01.2.09.06	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.140.000,00	2.655.000,00	7,35%	6%	33.485.000,00
2.13.02	Program Penataan Desa	25.004.800,00	9.492.000,00	37,96%	73%	15.512.800,00
2.13.02.2.01	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	25.004.800,00	9.492.000,00	37,96%	73%	15.512.800,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		KEMAJUAN FISIK	SISA ANGGARAN
			(Rp)	(%)		
2.13.02.2.02.06	1. Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	25.004.800,00	9.492.000,00	37,96%	73%	15.512.800,00
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	310.303.480,00	44.130.000,00	14,22%	24%	266.173.480,00
2.13.03.02.01	1. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa	310.303.480,00	44.130.000,00	14,22%	24%	266.173.480,00
2.13.03.02.01.01	1. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	160.303.500,00	41.944.000,00	26,17%	23%	118.359.500,00
2.13.03.02.01.0003	2. Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	149.999.980,00	2.186.000,00	1,46%	25%	147.813.980,00
2.13.04	Program Administrasi Pemerintah Desa	2.715.506.300,00	52.915.250,00	1,95%	71%	2.662.591.050,00
2.13.04.2.01	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.715.506.300,00	52.915.250,00	1,95%	71%	2.662.591.050,00
2.13.04.2.01.0003	1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.547.500.000,00	-	0,00%	0%	2.547.500.000,00
2.13.04.2.01.04	2. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	98.771.300,00	36.544.750,00	37,00%	56%	62.226.550,00
2.13.04.2.01.11	3. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	69.235.000,00	16.370.500,00	23,64%	31%	52.864.500,00
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.220.230.598,00	2.831.283.907,00	30,71%	12%	6.388.946.691,00
2.13.05.2.01	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.220.230.598,00	2.831.283.907,00	30,71%	12%	6.388.946.691,00
2.13.05.2.01.03	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9.220.230.598,00	2.831.283.907,00	30,71%	12%	6.388.946.691,00
JUMLAH		18.410.096.059,00	5.842.218.115,00	31,73%	42%	12.567.877.944,00

Dari Laporan Realisasi Anggaran 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 30 Juni 2024 sebesar 42,00%. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD per 30 Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024  
KABUPATEN SUMENEP**

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah (output) / Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026						Realisasi Kinerja pada Triwulan						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Pelaksana Daerah Penganggaran		
					6		7		8		9		10		11				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2	URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		109.737.321,66	14.920.174,00	18.410.096,05	2.251.737,913	4.882.625,298	-	-	6.934.393,11	37,67	20.514.744,79	18,69					
		2	URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		109.737.321,66	14.920.174,00	18.410.096,05	2.251.737,913	4.882.625,298	-	-	6.934.393,11	37,67	20.514.744,79	18,69					
		2	URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		83.137.430,475	10.183.326,95	6.139.050,881	915.530,939	1.988.868,019	-	-	2.904.396,95	47,31	12.484.575,65	15,02					
		2	URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		41.451.830	5.675.300	3.350.000	450.000	-	-	50	13,43	6.125.300	14,78						
		2	URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		41.451.830	5.675.300	3.350.000	450.000	-	-	1	13,43	6.125.300	14,78						
		2	URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		45.793.988,985	8.254.921,966	5.192.690,421	770.975,350	1.678.197,149	-	-	26,19	10.702.404,46	23,39						

No	Sasaran	Kode	Usahan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Peringkat Daerah Peningkat
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9-12				13-15		16-18		17		
			Perangkat Daerah	laporan kinerja OPD tepat waktu																	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45.704.788.852	8.247.228.916	5.189.330.421	770.875.350	1.679.187.149	2.449.872.499	159.000	10.697.102.315	66.25	23,40							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koordinasi Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59.087.733	3.350.000	1	1	1	1	1	5.392.150	41,67	9,12							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persenentase Kepegawaian Perangkat Daerah	685.783.857	33.973.000	37.200.000	0	0	0	0	7.000.000	0,25	1,02							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	685.783.857	7.000.000	37.200.000	0	0	0	0	7.000.000	7,02	1,02							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.504.535.012	702.275.152	572.748.160	85.504.932	211.014.897	285.518.829	155.24	988.795.591	155,24	23,17							

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemeliharaan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lulu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trihulian						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Peringkat Daerah Peningkatan Anggaran	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-9+10+11+12	14+13+8x100%	15-7+13	16+15+8x100%	17										
		2 1 0 2	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 8	67.658.364	3	6.248.000	19.949.160			0		5,00	7.759.400	27,78	11,57									
		2 3 1 0 0	Instalasi Listrik/Perencanaan bangunan Kantor	Jumlah Paket Perencanaan dan Perengkapan Kantor yang tersedia	1 8	905.514.912	3	131.464.460				1	52.809.100	33,33	40,02	33,33	33,36									
		2 3 1 0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	4 8	1.829.531.681	8	189.581.700	31.749.400						17,00	343.661.600	35,42	18,78								
		2 1 0 2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang tersedia	1 8	374.482.315	2	15.450.000							1,00	10.650.000	5,55	2,84								
		2 1 0 0 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	4 6	376.459.796	3	7.668.000							8,00	11.686.000	16,07	3,16								
		2 3 1 0 0	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 8 0	951.487.944	3 0	222.336.000	33.896.372				9	165.988.729	30,00	74,66	33,89	33,73								

No	Saesaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerimaan Daerah dan Progra Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Progra Kegiatan (output)	6			7			8			Realisasi Kinerja pada Trivulian						14=130x100%			15=14x13			16=150x100%			Unit Perangka Daerah Peningg Jawa b								
					Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2028			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp		K		Rp					
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	Konsultasi SKPD																											17					
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah dan Jenis barang milik daerah yang diadakan	0	912.259.857	6	62.450.000	10	37.783.500																											
			Pengadaan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	3	912.259.857	6	62.450.000	5	37.783.500																											
			Penyediaan Jasa Pengurusan Perumahan	Persentase Rayana yang dipenuhkan	1	1.516.784.071	0	264.780.610	75	145.685.000	3	36.064.357	3	37.261.973																							
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbor Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbor Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1.516.784.071	2	264.780.610	4	145.685.000	6	36.064.357	8	37.261.973																							
			Penelitian Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	1	28.712.728.393	0	285.375.088	97	148.823.800	5	22.836.300	5	25.992.000																							
			Penelitian dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaran, Dinas Operasional atau Leptang yang	3	1.104.150.671	0	230.668.193	88	113.483.800	4	21.081.300	1	25.092.000																							

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	6		7		8		Realisasi Kinerja pada Triwulan				14=130x100%		15=7x13		16=150x100%		Unit Pelaksana Daerah Penganggaran Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9-12				13=9+10+11+12		14=130x100%		15=7x13		16=150x100%		17	
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui Desa yang Mandiri dan Produktif	2 1 0 2 3 3 1	Perencanaan dan Pelaksanaan Dinas Operasi dan Pemeliharaan	Dipilih kendaraan dan dibayar oleh Pemilik	1 2 0 0 0 0 0 0	321.036.686		54.706.875		36.140.000		1.755.000		6.900.000		2.655.000		45,00		96,00		80,00		17,83
						8.965.391.000		1.039.079.080		310.303.480		12.774.600		31.355.400		44.130.000		14,22		104,07		746.566.993		
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui Desa yang Mandiri dan Produktif	2 1 0 2 3 3 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah BUMDes berkembang menjadi maju	Jumlah BUMDes berkembang menjadi maju	8.965.391.000		1.039.079.080		310.303.480		12.774.600		31.355.400		44.130.000		14,22		104,07		746.566.993		8,38
						8.965.391.000		1.039.079.080		310.303.480		12.774.600		31.355.400		44.130.000		14,22		104,07		746.566.993		
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui Desa yang Mandiri dan Produktif	2 1 0 2 3 3 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1.730.596.840		704.622.993		160.303.500		12.774.600		29.169.400		41.944.000		26,17		256,00		77,58		43,13
						1.730.596.840		704.622.993		160.303.500		12.774.600		29.169.400		41.944.000		26,17		256,00		77,58		
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui Desa yang Mandiri dan Produktif	2 1 0 2 3 3 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.174.394.760		334.456.087		148.999.980		0		2.186.000		2.186.000		0,00		2,00		0,61		4,69
						7.174.394.760		334.456.087		148.999.980		0		2.186.000		2.186.000		0,00		2,00		0,61		

No	Sasaran	Kode	Usuran / Bidang Usuran	Indikator Kinerja	6		7		8		Realisasi Kinerja pada Triwulan						14=13bX100%		15=1+13		16=16bX100%		Unit Peringkat Daerah Peringkat Tahun 2026 (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		5							9	10	11	12								17	
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang respon sif dan akurat		PROGR PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6	1,570,767,206	28,982,000	25,004,800	1, 3, 5, 8	25,004,800	0	9,492,000	0	9,492,000	0	9,492,000	0	37,86	22,13	38,454,000	162,88	2,51	
			Penyediaan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa	3, 0	1,570,767,206	28,982,000	25,004,800	2, 6, 5	25,004,800	0	9,492,000	0	9,492,000	0	9,492,000	0	37,86	90,00	38,454,000	27,27	2,51	
			Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang difasilitasi	1, 0, 0, 0, 0, 6	1,570,767,206	28,982,000	25,004,800	68, 0, 0, 8	25,004,800	0	9,492,000	0	9,492,000	0	9,492,000	0	37,86	88,00	38,454,000	68,00	2,51	
			PROGR ADMINISTRASI DESA	Persentase Desa yang diakreditasi	2, 1, 3, 2, 0, 0, 6	1,570,767,206	28,982,000	25,004,800	5, 0, 0, 7	27,15,508,300	0	16,194,500	0	16,194,500	0	52,915,250	0	1,95	108,01	2,870,141,588	214,29	22,65	
			Pembinaan dan Pengembangan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	3, 3, 0	12,673,747,146	2,817,226,308	2,715,508,300	3, 3, 0	2,715,508,300	0	16,194,500	0	16,194,500	0	52,915,250	0	1,95	330,00	2,870,141,588	100,00	22,65	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3, 3, 0	7,824,669,500	2,462,350,000	2,547,500,000	3, 3, 0	2,547,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	330,00	2,462,350,000	100,00	31,47	

No	Sasaran	Kode	Unsur / Bidang	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penganggaran Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12		17	
				Desa																		
			Fasilitasi Pengabdian Masyarakat ke Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengabdian Masyarakat ke Desa	330	2.837.012.021	330	289.134.208	330	98.771.300	10.889.700	25.655.050	0	36.544.750	330.000	325.678.958	100,00	11,48				
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	330	2.011.665.625	330	65.742.100	330	69.235.000	5.304.800	11.065.700	0	16.370.500	330.000	82.112.600	100,00	4,08				
			PROGRAMA PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT YANG TERBENTUK	Persentase Lembaga Adat yang terbentuk	5,3	3.448.985.240	4,49	450.577.682	6,59	9.220.230.688	1.307.237.774	2.616.191.128	4,49	3.923.228.903	8,98	4.374.006.585	168,80	128,78				
			Pembudayaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat	27	3.448.985.240	15	450.577.682	8,7	9.220.230.688	1.307.237.774	2.616.191.128	15	3.923.228.903	86,60	4.374.006.585	111,11	128,78				

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama / Program (outcome) / Output	Target Renstra Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Pelaksana							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
			Bidang Pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Adat yang berprestasi, berbudaya, berkeadilan, berkeadilan Per UU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, berbudaya, berkeadilan Per UU	8 7 3 3	36 84	7 0 3 5	3 6 9 4	3 6 9 4	3884	52,51	7.388,00	84,60	100,00	42,55	765,00	4.374.006.585	43,27	126,78	17										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, berbudaya, berkeadilan Per UU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, berbudaya, berkeadilan Per UU	1 8 1 0	67 5	9 0	9 0	2.616.191.129	1.307.237.774	3.923.428.903	90	3.923.428.903	100,00	42,55	765,00	4.374.006.585	43,27	126,78	17										

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Peringkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah sampai dengan Renja Peringkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Pelaksana Daerah Peninggalan Jawa Barat	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								

Untuk hasil Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, meliputi 5 (lima) program yang terdiri dari:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota target anggaran sebesar Rp 6.139.050.881 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 2.904.396.958 atau sebesar 47,31%.
- b) Program Penataan Desa target anggaran sebesar Rp 25.004.800 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp 9.492.000 atau sebesar 37,96%.
- c) Program Peningkatan Kerjasama Desa, target anggaran sebesar Rp 310.303.480, pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 44.130.000 atau 14,22%.
- d) Program Administrasi Pemerintah Desa, target anggaran sebesar Rp 2.715.506.300, pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 52.915.250 atau 1,95%.
- e) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, target anggaran sebesar Rp 9.220.230.598, pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 2.831.283.907 atau 30,71%

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Triwulan II yang ditampilkan adalah data realisasi per tanggal 30 Juni 2024, dikarenakan sedang dalam proses perhitungan sampai dengan Triwulan berjalan.

### **2.1.1 Faktor Pendorong**

- a. Adanya dukungan pemerintah kabupaten dalam memberikan kesempatan/ peluang kepada sumber daya manusia/aparatur guna meningkatkan kapasitas kemampuan.
- b. Optimalisasi potensi sumber daya alam di desa yang bisa dikerjasamakan untuk mempercepat dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dalam berbagai bidang.
- c. Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Partisipasi masyarakat yaitu kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan kehadiran masyarakat pada kegiatan gotong royong bersama dengan TNI dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Partisipasi masyarakat juga merupakan modal utama dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- e. Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam BUMDesa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep melakukan supervisi, koordinasi dan motivasi serta asistensi kepada Kecamatan, dan kepada Pemerintah Desa.
- g. Partisipasi lembaga LPM dalam kegiatan pembangunan desa berupa penyusunan dan perencanaan program, koordinasi dan musyawarah desa.
- h. SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan layanan sosial dasar terutama yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban.
- i. Partisipasi PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

### **2.1.2 Faktor Penghambat**

- a. Realokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. Belum terdapat basis data;
- c. Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi desa terkait kerjasama desa, mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik, menyusun/membuat peraturan-peraturan desa, masih kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan Siskeudes, sipades, profil desa, IDM;
- d. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dengan stakeholder/pihak terkait, sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- e. Kurangnya pengetahuan aparat tentang IT;
- f. Penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang belum tertib;

- g. Masih adanya Aparat Desa yang tidak ingin desanya naik status karna terkait Dana Desa;
- h. Kurangnya kebutuhan teknologi dan sarana prasarana dasar yang ada di desa seperti komputer atau laptop, sehingga data yang dibutuhkan menjadi lama, tidak update dan relevansinya diragukan.

### 2.1.3 Tindaklanjut

- a. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/aparatur dalam mengidentifikasi potensi desa;
- b. Meningkatkan koodinasi dan melakukan rapat koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sumenep dengan stakeholder/pihak terkait agar setiap tahapan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa berjalan dengan optimal;
- c. Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sumenep sekaligus melakukan pembinaan terkait cara penyusunan laporan keuangan yang tertib dan benar;
- e. Monitoring dan evaluasi baik itu oleh pihak kabupaten maupun kecamatan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan meminimalisir kesalahan pada saat input Data IDM, Siskeudes, Sipades dan Prodeskel;
- f. Terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi desa dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan agar desa terus aktif berkegiatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota.

## 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tentu akan dijumpai beberapa permasalahan, Untuk itu maka perlu dilakukan identifikasi dan perumusan

permasalahan perangkat daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja perangkat daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu hal ini juga bermanfaat dalam memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan perangkat daerah.

Ada 2 (dua) pokok masalah yang menjadi target dalam rencana strategis (Renstra) pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumenep yaitu :

1. Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat dalam Membangun Desa
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Belum optimal
  - Akar masalah Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat dalam Membangun Desa adalah :
    1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di perdesaan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
    2. Masih Belum Optimalnya Kelembagaan Masyarakat di Desa
    3. Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Pedesaan melalui Lembaga Ekonomi Desa yang belum optimal
    4. Belum optimalnya pengembangan potensi desa yang terdiri dari pengembangan Sumber Daya Desa, pengembangan / pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pengembangan kawasan perdesaan;
  - Dan akar masalah dari Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Belum optimal adalah :
    1. Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
    2. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib
    3. Ketidak tepatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran desa.
    4. Pengelolaan aset desa dan administrasi desa sebagian besar belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    5. Sistem Informasi desa belum dimanfaatkan secara optimal

Melihat akar masalah diatas pada kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju.

Ada beberapa tantangan dengan pokok persoalan, yaitu :

- 1) Belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah.
- 2) Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi oleh Kepala Desa.
- 3) Belum adanya Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terintegrasi dan terkoneksi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang disusun oleh Desa ;
- 4) Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka, Isu Strategis yang diangkat oleh Kabupaten Sumenep adalah ***“Memantapkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmonisasi Sosial”*** sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai Isu strategi yaitu ***“Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan aktifitas perekonomian serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik”*** melalui isu strategis tersebut diharapkan dapat mewujudkan:

- sinergiitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah
- Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terintegrasi dan terkoneksi antara program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang disusun oleh Desa

- Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana masyarakat dan pemerintahan desa.

## **2.3 TANTANGAN DAN PELUANG**

### **a. Peluang**

- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pemberdayaan masyarakat
- Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun daerah;
- Peraturan Bupati Sumenep tentang Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **b. Tantangan**

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Luas wilayah dan kondisi geografis.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN**  
**PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menjalankan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yakni:

**I. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. PROGRAM PENATAAN DESA**

1. Penyelenggaraan Penataan Desa
  - 1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## **III. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**

1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
  - 1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota
  - 2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## **IV. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - 1) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - 3) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - 4) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  - 5) Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
  - 6) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

## **V. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Kerangka Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang di usulkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAN MAJU RENCANA							
							TARGET 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.415.927,46	15.081.022,08	20.261.538,11	5.845.610.643,00							48.410.396.644,00	
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							14.415.927,46	15.081.022,08	20.261.538,11	5.845.610.643,00							48.410.396.644,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KABUPATEN/OTAKOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%		100%	5.297.438,710	5.567.476.885	6.496.371.033	1.711.565.876,00								7.009.004.586,00	
2.13.01.2.01		Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00								4.750.000,00	
2.13.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYTAHUN 2022	REALISASINYAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET NYAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARG E T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SAH	100 %	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			
1	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	5	6	7	100 %	9	100 %	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.448.058.250,00	4.617.756.425,00	5.068.488.488,00	620.430.238,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.083.811.101,00	
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.500.000,00	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	180.870.575,00	50.000.000,00
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	37.200.000,00	37.200.000,00	7.200.000,00	-30.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	130.870.575,00	0
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan yang dipenuhi				100 %	100 %	472.408.160,00	572.748.160,00	758.178.160,00	285.770.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	817.775.175,00	0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASICAPAIANRENJATAHUN2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PAGU INDIKATIF (Rp)					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET				
							SEBELUM	SAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.248.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	12.795.820,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	131.464.460,00	131.464.460,00	131.464.460,00	131.464.460,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	172.802.600,00	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	169.581.700,00	169.581.700,00	227.581.700,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	349.136.150,00	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.668.000,00	7.668.000,00	7.668.000,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	71.463.783,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASININSTRAOPD2022	PRAKIRANAN CAPAIANTARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)		Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			
1	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	30 Laporan	121.595.000,00	222.335.000,00	369.766.000,00	247.770.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	181.575.805,00			
	2.13.01.2.07	Penyediaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	37.783.500,00	37.783.500,00	155.352.258,00	117.568.758,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	174.089.735,00			
	2.13.01.2.07.0005	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6 Unit	7 Unit	37.783.500,00	37.783.500,00	155.352.258,00	117.568.758,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	174.089.735,00			
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	145.665.000,00	145.665.000,00	235.637.000,00	89.972.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	256.000.000,00			
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	74.925.000,00	74.925.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	6.000.000,00			
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24 Laporan	24 Laporan	145.665.000,00	145.665.000,00	160.712.000,00	15.047.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	250.000.000,00			
	2.13.01.2.09	Penelitian Barang Milk Daerah			100%	100%	149.623.800,00	149.623.800,00	264.815.127,00	115.191.327,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	491.708.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYTAHUN 2022	REALISASINYAHYTAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJARENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SAKUR	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana prasarana perkantoran														Masyarakat dan Desa		
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					54 Unit	54 Unit	113.483.800,00	113.483.800,00	153.803.800,00	40.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			210.708.000,00
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Periznannya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	36.140.000,00	36.140.000,00	36.140.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	74.871.327,00	74.871.327,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa				13,58 %	13,58 %	25.004.800,00	25.004.800,00	25.004.800,00	974.995.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUJAH AKHIR PERIODENSTRAKOR	REALISASICAPAIANREKOR	PRAKIRANCAPAIANREKOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SAKUR	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL				DAERAH
1	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							285 Desa	285 Desa	25.004.800,00	25.004.800,00	25.004.800,00	0,00					Desa Se Kabupaten Sumenep		1.000.000.000,00
	2.13.02.2.01.0006	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa					8 Unit	8 Unit	25.004.800,00	25.004.800,00	25.004.800,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		1.000.000.000,00
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase BUMDes Bersama yang terbentuk	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							7,27 %	93,55 %	101.303.500,00	100.303.500,00	310.303.480,00	18.955.196.500,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		19.057.500,00
	2.13.03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUMDes berkembang menjadi jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							24 BUMDes	24 BUMDes	101.303.500,00	100.303.500,00	310.303.480,00	208.999.980,00					Penguatan Kualitas Produk Unggulan dan Panwisata serta Penguatan-Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produk Unggulan dan Panwisata serta Penguatan-Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	BUMDES / BUMDESMA	19.057.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA	REALISASICAPAINRENJIAOPDTAHUN2022	PRAKIRANCAPAINRENJIAOPDTAHUN2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					2	2	101.303.500,00	100.303.500,00	160.303.500,00	59.000.000,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Pengualitan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Pengualitan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			5.115.000.000,00
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					2	2	0,00	0,00	149.999.980,00	149.999.980,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pengualitan Pemertataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Perdesaan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Wilayah Kepulauan yang benewasan Lingkungan Pemertataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis,			13.942.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi				50,87 %	50,87 %	5.071.983.260,00	168.006.300,00	2.945.106.600,00	10.025.226.740,00							15.097.220,00
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa				330 Desa	330 Desa	5.071.983.260,00	168.006.300,00	2.945.106.600,00	2.126.886.660,00							15.097.220,00
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				330 Dokumen	330 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene p. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI UMUM					330.000.000,00
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN			PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)				BERTAMBAH/BURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESAJAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH							
							8	9	10	11	12						13	14		
	2.13.04.2.01.0003		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			495.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0004		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 Dokumen	330 Dokumen		0,00	2.547.500.000,00	0,00	2.547.500.000,00	2.547.500.000,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Parwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			2.547.500.000,00		
	2.13.04.2.01.0005		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	330 Dokumen	330 Dokumen		100.046.300,00	98.771.300,00	98.771.300,00	98.771.300,00	-1.275.000,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			275.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTARA OPD	REALISASICAPAIN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.13.04.2.01.0009		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			330.000.000,00
							15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.000.000,00
	2.13.04.2.01.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				330 Dokumen	330 Dokumen	70.000.000,00	69.235.000,00	69.235.000,00	-765.000,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			250.000.000,00
	2.13.04.2.01.0012		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	4.901.946.960,00	0,00	0,00	4.901.946.960,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan an. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.769.720.000,00
	2.13.04.2.01.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTARA OPD	REALISASIN CAPAIAN RENJARENJATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJARENJATAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4 <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa</i>	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	330.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				330 Dokumen	330 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan. Semua Kari/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					
							200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	229.600.300,00	229.600.300,00	Kab. Sumene P. Semua Kecamatan. Semua Kari/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					440.000.000,00
	2.13.04.2.01.0017		Peaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kari/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Penguatan Kualitas Produksi Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan					1.000.000.000,00
	2.13.04.2.01.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				330 Dokumen	330 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					
5	2.13.05	PROGRAM PEMBUDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Proseniase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif Persepsi Lembaga Adat Desa yang terbentuk				80,76 %	80,76 %	3.920.187.198,00	9.220.230.598,00	10.484.752.198,00	2.326.484.860,00								6.246.672.068,00	
			Jumlah Lembaga Adat Desa terbentuk berdasarkan Per UU				22 LAD 7053 LKM	22 LAD 7053 LKM	3.920.187.198,00	9.220.230.598,00	10.484.752.198,00	6.564.565.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa				6.246.672.068,00
			Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Peakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.13.05.2.01.0002		Facilitasi Penilaian, Pembudayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				334 Dokumen	334 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					483.973.600,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASINRENJASTAHUN2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJASTAHUN2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				90 Lembaga	93 Lembaga	574.599.700,00	9.220.230.588,00	10.484.752.198,00	9.909.752.498,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			646.599.556,00
	2.13.05.2.01.0004		Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				45 Unit	45 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kotar/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			543.400.000,00
	2.13.05.2.01.0007		Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				248 Laporan	248 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan pengujian kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			392.698.900,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENYTAHUN 2022	REALISASINYATAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SAKTI	AKHIR	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024				NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	6	7	12	12	0,00	0,00	1.690.637.298,00	1.690.637.298,00	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.980.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	6	7	334	334	0,00	0,00	1.254.550.200,00	1.254.550.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan dan Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.200.000.000,00	
							<b>J U M L A H</b>			14.415.927,46	15.081.022,08	20.261.538,11	777.713.426,166,00						48.410.396,64	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2024, menjadi sebesar Rp. 20.261.538.111 (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sebelas Rupiah). Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 serta menunjang Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 .

Jika ketersediaan anggaran tersebut diatas berkurang atau tidak sesuai dengan Rencana Kerja semula maka anggaran akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang menunjang langsung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan RPJMD Kabupaten Sumenep. Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

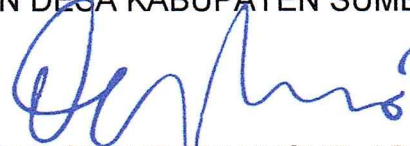
1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran (RPKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Perubahan Kinerja pada Tahun Anggaran 2024;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP

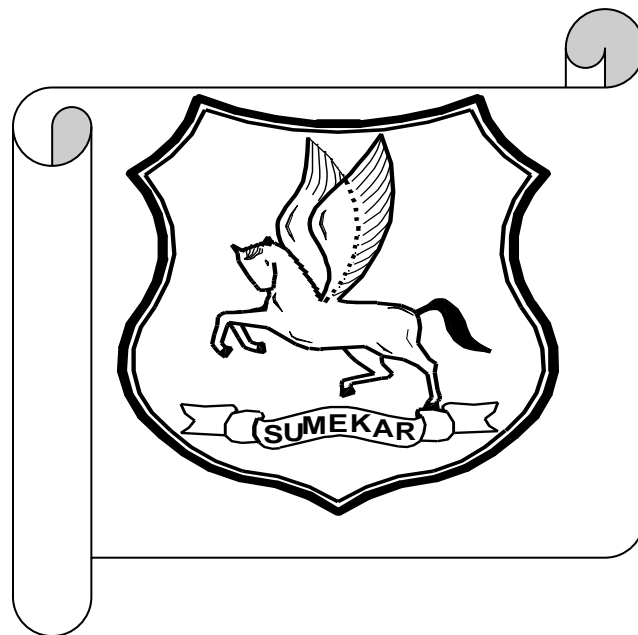


**ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741215 199311 1 001

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP Kabupaten Sumenep periode 2022 – 2026, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2024.

Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut.

Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMENEP



**Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, S.E., M.M.**

Revisi Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	78
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	81
	2.5 Penelaahan Usulan program Kegiatan Masyarakat	100
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	108
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	108
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	109
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	116
	4.1 Program dan Kegiatan	117
	4.2 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	132
	4.3 Prioritas Pembangunan	132
	4.4 Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)	134
	4.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	137
BAB V	PENUTUP	157

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2022 .....	10
Tabel 2.2	Belanja Langsung TA.2022 .....	11
Tabel 2.3	Realisasi Program dan Kegiatan .....	17
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Sumenep .....	34
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep .....	51
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sumenep .....	83
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sumenep .....	100
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran RENSTRA .....	110
Tabel 3.2.2	Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah .....	112
Tabel 3.2.3	Tujuan Perangkat Daerah .....	113
Tabel 3.2.4	Sasaran Perangkat Daerah .....	114
Tabel 3.2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	115
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sumenep .....	118
Tabel 4.2	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Target Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2022 .....	132
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan daerah dengan Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	133
Tabel 4.4	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) .....	134
Tabel 4.5	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	137
Tabel 4.5.1	Sasaran dan Program Kegiatan .....	139
Tabel 4.5.2	Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	141
Tabel 4.5.3	Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif .....	144



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep
26. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan renja OPD adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA OPD**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan dan garis besar isi dokumen

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (Tahun 2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan

(Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tujuan dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

- a. Berisikan mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

## **2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT**

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD**

#### **3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (RENJA OPD) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep itu sendiri. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024

#### ***2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.***

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada tahun 2022. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

a. Urusan Wajib Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 91,32% (per 31 Desember 2022).

b. Urusan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja,

3. Program Hubungan Industrial

4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

terdiri dari 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2022, sebagai berikut:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebesar **Rp. 7.343.944.895,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 6.832.892.503,- (93,04%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA. 2022

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2022	Realisasi Keuangan SPJ	%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.343.944.895</b>	<b>6.832.892.503</b>	<b>93,04</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.343.944.895</b>	<b>6.832.892.503</b>	<b>93,04</b>
I	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4.491.686.400</b>	<b>4.316.742.319</b>	<b>96,11</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.566.175.500	3.423.542.627	96,00
2	Tunjangan Keluarga	335.378.000	321.088.026	95,74
3	Tunjangan Jabatan	101.495.500	99.020.000	97,56
4	Tunjangan Fungsional	161.300.000	161.300.000	100
4	Tunjangan Fungsional Umum	115.675.000	108.850.000	94,10
5	Tunjangan Beras	200.124.000	193.433.820	96,66
6	Tunjangan PPh	11.489.400	9.463.913	82,37
7	Pembulatan Gaji	49.000	43.933	89,66
II	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.665.467.245</b>	<b>2.339.578.939</b>	<b>87,77</b>
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.665.467.245	2.339.578.939	87,77
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin	18.500.624	18.500.621	100,00

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2022	Realisasi Keuangan SPJ	%
	Mendirikan Bangunan			
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	4.106.252	4.106.250	100
4	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.700.000	147.100.000	93,44
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	7.115.624	7.115.624	100
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.368.750	1.368.750	100
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.846.250	2.846.250	100
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.343.944.895</b>	<b>6.832.892.503</b>	<b>93,04</b>

#### b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal terdiri dari 5 Program dan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.480.120.385,-** realisasi belanja **Rp. 1.294.118.420,- (87,43%)**
2. Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 3 (enam) Program dan 9 (sembilan) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 21.822.987.758,-** realisasi belanja **Rp. 19.793.091.714,- (90,69%)**
3. Urusan Administrasi terdiri dari 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 8.618.678.264,-** realisasi belanja **Rp. 8.063.623.807,- (93,56%).**

Dari ke 3 komponen diatas bahwa total pagu Belanja Langsung sebesar **Rp. 31.921.786.407,-** realisasi belanja **Rp. 29.150.833.941,- (91,32%)** dengan perincian berikut ini.

Tabel 2.2  
Belanja Daerah TA. 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>24.577.841.512</b>	<b>22.3147.941.438</b>	<b>90,80</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.274.733.369</b>	<b>1.230.731.304</b>	<b>96,55</b>
I.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.552.600</b>	<b>99,99</b>
I.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.553.000	5.552.600	99,99
I.2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>65.166.000</b>	<b>57.704.830</b>	<b>88,55</b>
I.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.046.000	45.093.550	97,93
I.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.120.000	12.611.280	65,96
I.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>150.512.615</b>	<b>132.459.780</b>	<b>88,00</b>
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.152.625	6.152.500	100
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.240.950	3.235.000	99,82
I.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.714.000	24.047.500	93,52
I.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.234.000	11.234.000	100
I.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.760.000	31.538.600	66,04
I.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.128.000	29.056.330	99,75
I.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27.283.040	27.195.850	99,68
I.4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>769.626.540</b>	<b>751.688.750</b>	<b>97,67</b>
I.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.172.000	2.158.000	99,36
I.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.056.000	122.389.060	88,01
I.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.398.540	627.141.690	99,80
I.5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>198.335.514</b>	<b>198.002.094</b>	<b>99,83</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.250.000	37.027.169	99,40
I.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.449.000	26.342.125	99,60
I.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.636.514	134.632.800	100
I.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>82.693.450</b>	<b>82.477.000</b>	<b>99,73</b>
I.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.693.450	82.477.000	99,73
	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.116.975.168</b>	<b>1.065.810.680</b>	<b>95,42</b>
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>90.620.650</b>	<b>88.787.438</b>	<b>97,98</b>
II.1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.234.000</b>	<b>189.200.480</b>	<b>97,40</b>
II.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	22.234.000	21.657.000	97,40
II.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>68.386.650</b>	<b>189.200.480</b>	<b>98,16</b>
II.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	68.386.650	67.138.438	98,16
III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>97.901.500</b>	<b>96.657.133</b>	<b>98,73</b>
III.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>97.901.500</b>	<b>96.657.133</b>	<b>98,73</b>
III.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	97.901.500	96.657.133	98,73
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>663.374.955</b>	<b>648.870.372</b>	<b>97,81</b>
IV.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>663.374.955</b>	<b>648.870.372</b>	<b>97,81</b>
IV.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	616.260.605	608.499.072	98,74
IV.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	41.345.950	34.616.300	83,72

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
IV.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.768.400	5.755.000	99,77
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>567.817.880</b>	<b>404.215.939</b>	<b>71,19</b>
<b>V.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>567.817.880</b>	<b>404.215.939</b>	<b>71,19</b>
V.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.820.000	21.160.479	41,64
V.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	224.494.985	177.209.884	78,94
V.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda	292.502.895	205.845.576	70,37
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>60.405.400</b>	<b>55.587.538</b>	<b>92,02</b>
<b>VI.1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.405.400</b>	<b>55.587.538</b>	<b>92,02</b>
VI.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60.405.400	55.587.538,00	92,02
	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>1.116.975.168</b>	<b>1.065.810.680</b>	<b>95,42</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>489.339.984</b>	<b>45.520.100</b>	<b>99,36</b>
<b>I.1</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>451.906.184</b>	<b>448.689.437</b>	<b>99,30</b>
I.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	451.906.184	448.689.437	99,30
<b>I.2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>37.433.800</b>	<b>45.520.100</b>	<b>96,22</b>
I.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	37.433.800	36.018.800	96,22
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>21.088.842.950</b>	<b>19.078.539.600</b>	<b>90,47</b>
<b>II.1</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.016.388.600</b>	<b>19.007.233.600</b>	<b>90,44</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	16.505.585.694	15.900.698.194	96,33
II.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	4,510,802,906	3.106.535.406	68,83
<b>II.2</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>55.647.100</b>	<b>55.182.100</b>	<b>99,16</b>
II.2.1	Job Fair/Bursa Kerja	55.647.100	55.182.100	99,16
<b>II.3</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.807.250</b>	<b>16.123.900</b>	<b>95,93</b>
II.3.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	16.807.250	16.123.900	95,93
<b>III</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>223.484.824</b>	<b>215.452.790</b>	<b>96,41</b>
<b>III.1</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.671.000</b>	<b>40.458.500</b>	<b>99,48</b>
III.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	40.671.000	40.458.500	99,48
<b>III.2</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>182.813.824</b>	<b>174.994.290</b>	<b>95,72</b>
III.2.1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	82.820.224	75.000.690	90,56
III.2.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	99.993.600	99.993.600	100
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>21.320.000</b>	<b>189.200.480</b>	<b>99,49</b>
<b>IV.1</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.320.000</b>	<b>189.200.480</b>	<b>99,49</b>
IV.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.320.000	189.200.480	99,49

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran (88,30%).

Tabel 2.3  
 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022  
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		<b>PENANAMAN MODAL</b>								
1		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								
		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>								
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Org	81	81	451.906.184	442.689.437		
		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta	Keg	40	40	37.433.800	36.018.800		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>								
	1			<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antarkerja	Prosentase	20	15	16.505.585.694	15.900.698.194	Jumlah proposal penerima Pokir yang masuk tidak sesuai dengan target penerima Pokir, sehingga realisasi menyesuaikan dengan jumlah Proposal yang masuk	Akan dilakukan penertiban penerima Pokir harus menyesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk pada tahun-tahun selanjutnya
		2		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	750	450	4.510.802.906	3.106.535.406	Jumlah proposal penerima Pokir yang masuk tidak sesuai dengan target penerima Pokir, sehingga realisasi menyesuaikan dengan jumlah Proposal yang masuk	Akan dilakukan penertiban penerima Pokir harus menyesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk pada tahun-tahun selanjutnya
	2			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>								
		1		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan pesertajob fair	Perusahaan	50	25	55.647.100	55.182.100	Jumlah perusahaan peserta Job Fair hanya 25 perusahaan yang berpartisipasi yang artinya hanya 25 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, akan tetapi animo pencari kerja sangat baik dengan dibuktikan jumlah	Untuk tahun selanjutnya akan dilakukan pendekatan melalui media social, cetak dan elektronik jauh sebelum pelaksanaan terutama bagi perusahaan di luar kota (jawa timur)

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											pencari kerja mencapai 1.200 orang	
	3			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Memfasilitasi Pra dan Purna PMI	Org	50	50	16.807.250	16.123.900		
	3			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>								
	1			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk</b>								
		1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	Perusahaan	20	20	40.671.000	40.458.500		
	2			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	Keg	21	21	82.820.224	75.000.690		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Org	1.984	1.984	99.993.600	99.993.600		
4				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota</b>								
	1			<b>Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>								
		1		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	4	4	5.553.000	5.552.600		
	2			<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>								
		1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	ASN	32	32	7.346.791.145	6.837.913.753	Gaji dan Tunjangan ASN di sediakan	
	3			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>								

No		Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1		2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	54	54	46.046.000	45.093.550		
	2		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	5	3	19.120.000	12.611.280	Diklat kepemimpinan untuk tahun 2022 DPMTSP dan Naker tidak ada, hanya Bimtek	
	4		<b>Administrasi umum Perangkat daerah</b>								
	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan dan komponen listrik yang disediakan	item	7	7	6.152.625	6.152.500		
	2		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	13	13	3.240.950	3.235.000		
	3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya ATK dan tersedianya mamim rapat	item	19	19	25.714.000	24.047.500		
	4		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang diadakan	item	5	5	11.234.000	11.234.000		
	5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan perundangan yang disediakan	exemplar	736	730	47.760.000	31.538.600	Terdapat rekening belanja yang tidak mencapai target karena pada rekening belanja tersebut merupakan kegiatan pendukung Job Fair, yang seharusnya dilakukan PAK	Akan dilakukan perencanaan yang tepat waktu terhadap rekening belanja yang akan dilakukan perubahan anggaran pada tahun berkenaan

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											terhadap perubahan belanja tersebut	
		6		Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelengaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	37	37	29.128.000	29.056.330.		
		7		Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah meter lari arsip yang disediakan	meter	6	6	27.283.040	27.195.850		
	5			<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>								
	1	1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	82.693.450	82.477.000		
	6			<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>								
		1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2187	2257	2.172.000	2.158.000		
		2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	139.056.000	122.389.060	Belanja Listrik dan Telepon disedian setiap tahunnya	
		3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya Tenaga kerja Non ASN	orang	10	10	628.398.540	627.141.690	Jumlah target sasaran tidak sesuai dengan jumlah yang ada	Target perlu penyesuaian dengan realitas kebutuhan Non

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												PNS yang ada
	7			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>								
		1		penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinss operasional /lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	16	16	37.250.000	37.027.169		
		2		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	unit	20	20	26.449.000	26.342.125		
		3		Pemeliharaan rehabilitasgedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah luasan gedung yang di rehab/ dipelihara	M2	1666,6	1666,6	134.636.514	134.632.800		
5				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>								
	1			<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PenanamanMod al	Perkada	1	1	22.234.000	21.657.000		

No		Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1		2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>								
		1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen	1	1	68.386.650	67.130.438		
6			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>								
	1		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	Kegiatan	4	4	97.901.500	96.657.133		
7			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>								
	1		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>								
		1	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	NIB	5958	6440	616.260.605	608.499.072		

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Pelaku usaha	27	27	41.345.950	34.616.300		
		3		Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non perizinan pelayanan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	Pengaduan	10	9	5.768.400	5.755.000	Dari target 10 pengaduan pada tahun 2022 hanya 9 pengaduan yang masuk dan dilakukan tindakan lanjut terhadap pengaduan tersebut	Setiap pengaduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh tim pengaduan perizinan
8				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>								
	1			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Dokumen	8	4	50.820.000	21.160.479	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2		koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	216	216	224.494.985	177.209.884	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
		3		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	dokumen	20	13	.292.502.895	205.845.576	Jadual pelaksanaan kegiatan DAK dan DAU TP3 hampir selalu bersama sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serapannya	Perlu perencanaan yang matang terhadap program kegiatan prioritas dengan kegiatan pendamping
9				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>								
	1			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	Data	4	2	60.405.400	55.587.538	Pelaksanaan Refocusing anggaran pada sub kegiatan ini membuat beberapa sub belanja tidak bisa dilaksanakan	Perlu penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan tersebut
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>								
10				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>								

No			Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1			2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1			<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		1		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi Identifikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi	Kepala Keluarga	15	15	21.320.000	20.391.087		



## **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023**

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melaksanakan 8 (delapan) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, sebagaimana terlampir. Alokasi Anggaran untuk tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp. 11.422.364.296,00. Diharapkan pada tahun 2023 keberhasilan kinerja mencapai 93%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu yaitu sebagai berikut:

### **1. Permasalahan terkait dengan pencapaian target kinerja :**

#### **A. Urusan Penanaman Modal**

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaa sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya kualitas publikasi data profil potensi/pejuang investasi.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.

- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.
- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- f. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.

#### B. Urusan Ketenagakerjaan

- 1. Banyaknya Pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup.
- 2. Lapangan Kerja yang Rendah.
- 3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah.

#### 2. **Permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran :**

- a) Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan);
- b) Kurang lengkapnya literatur tentang pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- c) Belum optimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan;
- d) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f) Adanya refocusing sampai untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 dan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan prioritas OPD dan Kabupaten Sumenep.

Adapun langkah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidak tercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

**1. Solusi pemecahan masalah terkait dengan pencapaian target kinerja, adalah :**

**A. Urusan Penanaman Modal**

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.
- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.

- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Penguasaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektivitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional.dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektivitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Penguasaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

B. Urusan Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan mutu tenaga kerja. dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Memperbaiki sistem pengupahan.
4. Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja.
5. Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

7. Mengembangkan Sektor Informal.
8. Program Transmigrasi.
9. Peningkatan Investasi.

**2. Solusi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan anggaran :**

- a) Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif, dan terpadu.
- b) Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan mencari melalui berbagai media yang memungkinkan.
- c) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif.
- d) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas perpustakaan daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan.
- e) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja SKPD sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel T-C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Sumenep**

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan				
				Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhansarana danprasarana kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	40,00	40,00			
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	12,00	40,00	40,00	
2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	100,00	4	12	60,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11
2	18	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	60	12,00	12,00	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	360	32	32	100,00	71	174	48,33	
2	18	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	25	5	2	40,00	5	10	60,00	
2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	846	54	54	100,00	71	125	14,77	
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	5	4	100,00	6	16	51,61	
2	18	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	252	49	48	97,75	50	99	39,28	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	132	7	7	100,00	26	33	25,00	
2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	13	13	100,00	12	25	41,66	
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	19	17	89,47	12	31	51,66	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2022	Realisasi RKPd Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.789	5	5	100,00	5	10	0,059	
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.750	736	736	100,00	546	1.282	46,61	
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657	37	37	100,00	131	168	25,57	
2	18	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	6	6	100,00	4	10	250,00	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>382</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>76</b>	<b>146</b>	<b>38,22</b>	
2	18	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	0	0	0,00	1	1	20,00	
2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	337	0	0	0,00	67	67	19,88	
2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	5	5	100,00	8	13	32,50	
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	15	3	3	100,00	3	6	40,00	

KODE						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan
									Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.587	2.187	2.617	119,66	2.617	4.804	23,33	
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	100,00	12	24	40,00	
2	18	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang yang dipelihara</b>	<b>4,00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75,00</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>200,00</b>	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	185	16	16	100,00	37	53	28,64	
2	18	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	436	0	0	0,00	0	0	00,00	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	322	20	20	100,00	64	84	26,08	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	1.666,6	1.666,60	100,00	2	1.668,6	16.686	
						Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	15	0	0	00,00	0	0	0,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)					Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPDP Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan	
								Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi RKPDP Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)		
1	2					3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11	
						<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>									
2	18	02				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	40,00	10,00	10,00	100,00	10,00	20,00	50,00	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	31	5	5	100,00	6	11	35,48	
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	1	1	100,00	1	2	40,00	
2	18	02	2	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	18	02	2	02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Profil Potensi Investasi</b>	18	1	1	100,00	1	6	100,00	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2022	Realisasi RKPd Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9=5+8	$10=(9/4)*100$	11					
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	18	02	2	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	5	1	1	100,00	1	2	40,00	
2	18	03				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,79</b>	<b>3,55</b>	<b>2,94</b>	<b>82,81</b>	<b>3,67</b>	<b>7,22</b>	<b>190,50</b>	
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	25	5	5	84,28	5	10	40,00	
2	18	03	2	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	5	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional	24	4	4	100,00	5	9	37,50	
2	18	04				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,79</b>	<b>3,55</b>	<b>2,67</b>	<b>75,21</b>	<b>3,67</b>	<b>7,22</b>	<b>190,50</b>	
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangn Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	32.060	6.173	6.440	104,32	6.400	12.573	39,21	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPd Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPd Tahun 2022	Realisasi RKPd Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11					
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.060	6.173	6.440	104,32	6.400	12.573	39,21	
2	18	04	2	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	134	22	23	104,54	27	49	36,56	
2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	61	10	8	80,00	12	22	36,06	
2	18	04	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	31	0	0	0,00	0	0	0,00	
2	18	05				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya</b>	<b>95,00</b>	<b>88,00</b>	<b>104.32</b>	<b>118,54</b>	<b>90,00</b>	<b>178.00</b>	<b>187,36</b>	
2	18	05	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	32.060	6.173	6.440	104,32	6.400	12.573	39,21	
2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	47	8	8	100,00	8	16	34,04	

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program RKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2026		Catatan					
				Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022 *)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9=5+8	10=(9/4)*100	11					
2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.451	216	220	108,85	287	503	34,66	
2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	87	20	18	90,00	17	232	56,17	
2	18	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>112,35</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
2	18	06	2	01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>112,35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	25	1	1	100,00	5	6	24,00	

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

### **2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep**

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas “Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 4 angka (2) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
- e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;

- f pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian, serta Kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### **KEPALA DINAS**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **SEKRETARIS**

- (1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat melaksanakan tugas:
  - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
  - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
  - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan, serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor,serta proses kedudukan hukum kegiatan;
  - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Dinas;
  - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabanpelaksanaannya;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat Dinas dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
  - c. menginventarisasi barang milik negara dan memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi pedalanan dinas;
  - d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  - b. penyusunan kajian kebijakan teknis dan administratif di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif dibidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. Pengoordinasian penerbitan pelayanan AK.1 dan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui sarana informasi dan media lainnya;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan mekanisme dan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Antar Kota (AKL), Tenaga Kerja Antar Kota Antar Daerah (AKAD) dan Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN);
  - d. Pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI/PMI;
  - e. Pengoordinasian pelayanan dan Verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI/PMI ke luar negeri;
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan tenaga kerja pola mandiri, penerapan teknologi tepat guna, padat karya suka rela atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan kerja;
  - g. Pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pendaftaran dan persiapan pemberangkatan calon transmigrasi; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikau oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
  - b. Pemverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

- disebarluaskan kepada lembaga pelatihan keda swasta;
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan keda swasta dan pemberian rekomendasi atas permohonan izin lembaga pelatihan kerja swasta;
  - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan dan usaha baru berbasis masyarakat;
  - e. Pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten / kota;
  - f. Pengoordinasian pemantauan (surveillance) tingkat produktivitas;
  - g. Pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit serta memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan;
  - h. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan dan penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
  - i. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten), evaluasi terhadap pelaksanaan UMK dan pengembangan kepesertaan program jaminan sosial serta fasilitasi bimbingan atau pembinaan sistem pengupahan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

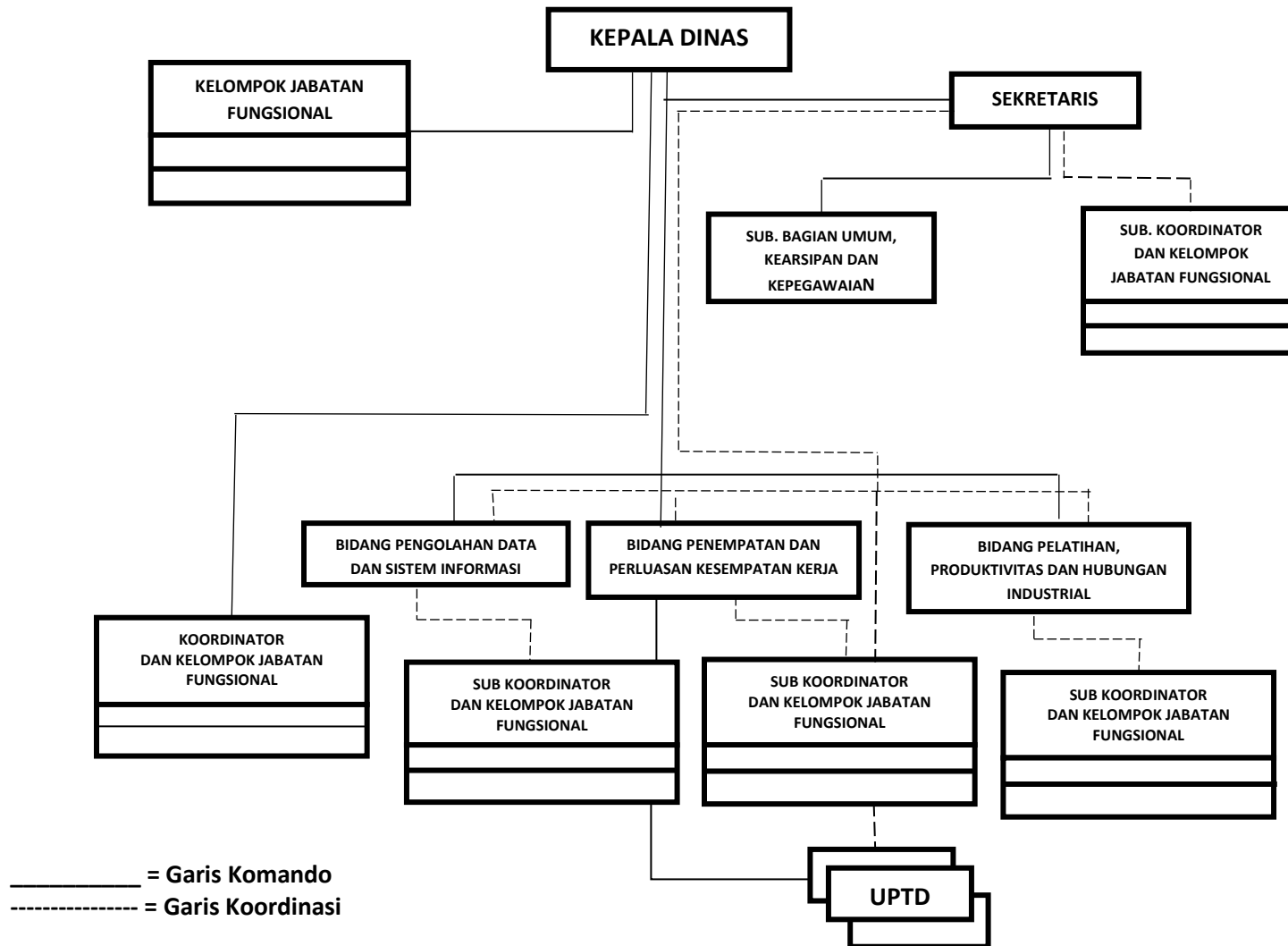
#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/ kekampilannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator dan/atau sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud, melaksanakan tugas membantu Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- (4) Koordinator dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama;
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 telah disediakan SDM melalui draft Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Jabatan Struktural**

Untuk mengisi jabatan struktural telah dilantik pejabat struktural sebanyak 6 (enam) pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep melalui Keputusan Bupati, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas dengan eselon II-B
2. 1 (satu) Sekretaris dengan eselon III-A
3. 3 (tiga) orang Kepala Bidang setara dengan eselon III-B
4. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Subbag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian setara dengan eselon IV-A

Sudah barang tentu pengisian penjabat struktural tersebut harus mengakomodasi PNS yang memenuhi syarat (kemampuan, senioritas, pendidikan dan kepangkatannya) baik yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, maupun yang berasal dari OPD lainnya.

### **2. Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai tugas dan fungsi, keahlian khusus melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep sesuai bidang dan kebutuhan.

Berikut penyajian pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah seperti pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Sumenep

NO.	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/NILAI TARGET/STANDART (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Sasaran											
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		75,05	75,01	75,15	75,21	75,25	75,03	75,12	75,01	75,15	
2.	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi		3,61	3,67	3,73	3,79	3,85	2,75	55,95	3,67	3,73	
3.	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat		85	86	87	87	88	82,81	86,25	86	87	
4.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan dan Non Perizinan		85	86	87	87	88	82,81	86,25	86	87	

Pencapaian Kinerja Dapat Disajikan seperti pada Tabel TC-30

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			20,00	20,00				20,00			
2	1801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,00	20,00				20,00			
2	1801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	12				20,00			
2	1801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	4				0			
2	1801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4	2				0			
2	1801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	4				4			
2	1801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	2				0			
2	1801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	12				20,00			
2	1801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			72	71				32			
2	1801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran			0	12				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Cata tan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD											
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			4	4				2			
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0	1				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			54	0				54			
2	1	0	2	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3	3				0			
2	1	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5	5				3			
2	1	0	2	0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			32	32				0			
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			1299	1083				20			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24	24				7			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	37				13			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12	12				19			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						jumlah paket item makan dan minum yang disediakan			245	3				245			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5	5				5			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			739	1				730			
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			257	121				257			
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			6	6				6			
2	1	0	2	0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>20</b>	<b>70</b>				<b>20</b>			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	1				0			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel			50	1				50			
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16	8				16			
2	1	0	2	0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>20</b>	<b>3</b>				<b>20</b>			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.187	3.846				3.187			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12				12			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Air dan Listrik yang Disediakan											
2	1 8 0 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17	12				17			
2	1 8 0 1 2 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			20	98				20			
2	1 8 0 1 2 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			32	35				32			
2	1 8 0 1 2 0 9 5	Pemeliharaan Mebel			0	30				0			
2	1 8 0 1 2 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			92	33				92			
2	1 8 0 1 2 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.668,60	2				1.668,60			
		Operasional UPTD			5	5				5			
2	1 8 0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					20,00	20,00			20,00	20,00	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana					20,00	20,00			20,00	20,00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						perkantoran											
2	1	0	2	0		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4	4			4	4		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2	2			2	2		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4	4			4	4		
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2	2			2	2		
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				71	71			71	71		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				12	12			12	12		
2	1	0	2	0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				4	4			4	4		
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				282	282			0	282		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)		Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)			
2.18.01.2.05.3																										
2.18.01.2.05.3																										
2.18.01.2.05.9																										
2.18.01.2.05.1																										
2.18.01.2.06																										
2.18.01.2.06.1																										
2.18.01.2.06.2																										
2.18.01.2.06.4																										
2.18.01.2.06.5																										
2.18.01.2.06.6																										
2.18.01.2.06.9																										

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD											
2	1	0	2	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7	7			6	7		
2	1	0	2	0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>76</b>	<b>76</b>			<b>70</b>	<b>76</b>		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel				1	1			1	1		
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8	8			8	8		
2	1	0	2	0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.111	4.111			3.187	3.506		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	12			12	12		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12	12			12	12		
2	1	0	2	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>190</b>	<b>190</b>			<b>187</b>	<b>190</b>		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35	35			35	35		
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel				33	33			30	33		
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36	36			33	36		
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2	2			2	2		
						Operasional UPTD				0	0			0	0		
						<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>											
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			10	10				0			
2	1	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5	6				5			
2	1	0	2	0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan			1	1				1			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal										
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			5	6			0			
2	1	0	2	0	2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>			3	3			3			
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			2	2			0			
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1	1			1			
2	1	0	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>			3,55	3,61			108,08			
2	1	0	3	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal			5	5			5			
2	1	0	3	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			0	1			0			
2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional			4	4			4			
2	1	0	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>			3,55	3,61			108,09			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						<b>Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>											
2	1	0	2	0	1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			5.958	6.173				6.440			
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			5.958	6.173				6.440			
2	1	0	2	0	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			22	24				22			
2	1	0	2	0	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			10	11				8			
2	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			5	6				0			
2	1	0				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>83</b>	<b>88</b>				<b>108,09</b>			
						<b>Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya</b>											

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.958	6.173				6.440			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			8	8				8			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			238	261				220			
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			14	16				18			
2	1	0				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			85	87				80			
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	100				80			
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			5	5				4			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN					SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis			
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)												Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)		Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)		Tahun 2024 (tahun n+1)		
1	2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>																		
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									10	10	10			10,00	10,00			
2	1	0	2		0	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									6	7	7			10	10			
2	1	0	2		0	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									1	1	1			1	1		
2	1	0	2		0	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									6	7	7			6	6		
2	1	0	2		0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									4	4	4			3	4		
2	1	0	2		0	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									2	2	2			2	2		
2	1	0	2		0	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota									1	2	2			1	2		
2	1	0					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																	
	8	3					Persentase Peningkatan Jumlah Investor																	
															3,67	3,73	3,79			3,61	3,67			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
	(PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)								Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 8 0 3 2 0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Media Promosi Penanaman Modal					5	5	5		5	5	
2 1 8 0 3 2 0 1 0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1	1		1	1	
2 1 8 0 3 2 0 1 0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					4	5	6		4	4	
2 1 8 0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)					3,67	3,73	3,79		3,61	3,67	
2 1 8 0 4 2 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan					6.400	6.639	6.890		6.173	6.400	
2 1 8 0 4 2 0 1 0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					6.400	6.639	6.890		6.173	6.400	
2 1 8 0 4 2 0 1 0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal					27	29	32		24	27	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21802003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					12	13	15		11	12	
21802004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					6	7	7		6	6	
21805	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya</b>					90	93	95		88	90	
21805201	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</b>					6.400	6.639	6.890		5.958	6.400	
218052011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					9	10	11		8	9	
218052012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					287	316	348		261	287	
218052013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					17	19	21		16	17	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 8 0 6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					89	91	93		88	89	
2 1 8 0 6	2 0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
2 1 8 0 6	2 0 1 0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					5	5	5		5	5	
		<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>											
2 1 1 0 1 5	1 5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja											
2 1 1 0 1 5	1 5 1	Penyebaran Informasi Pasar Kerja				0	0				0		
2 1 1 0 1 5	1 5 3	Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri				0	0				0		
2 1 1 0 1 6	1 6	Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi											
1 1 0 1 6	1 6 1	Pemberangkatan Calon Transmigran dan				0	0				0		

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati											
2 1 0 1	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>											
2 1 0 1 0	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan			32	81				81			
2 1 0 1 0	Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif			80	85				0			
2 1 0 1 0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan			30	40				40			
2 1 0 1	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>											
2 1 0 1 0	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak			100	100				0			
2 1 0 1 0	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan			40	40				0			
2 1 0 1 0	Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun			5	5				0			
2 1 0 1	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)</b>											

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 1 0 1 0 1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			1	0				0			
2 1 0 1 0 2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan			1	0				0			
2 1 0 1 0 5	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			20	20				0			
2 1 0 1 0 6	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan			20	20				0			
2 1 0 1 0 7	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			0	0				0			
2 1 0 1 0 8	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Las Listrik	Jumlah Bantuan Peralatan Las Listrik yang diberikan/dihibahkan			0	0				0			
2 1 0 1 1 3	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			25	50				0			
2 1 0 1 1 7	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih			3	0				0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelatihan Meubelair											
2 1 0 1 2		Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif			0	1				0			
2 1 0 1 2		Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif			0	0				0			
2 1 0 1 2		Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasn Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Penyuluhan Kerja			0	0				0			
2 1 0 1 2		Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)			40	40				0			
2 1 0 1 3		Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)			40	40				0			
2 1 0 1 3		Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan			1	0				0			
2 1 0 2 1		<b>Program Pelatihan Keterampilan Kerja</b>											
2 1 0 2 0		Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat			25	50				0			



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 3 2 0 0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n					2	3	3		2	2	
2 0 7 3 2 0 0 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja					6	7	7		6	6	
2 0 7 3 2 0 0 2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</b>					<b>90,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>		<b>85,00</b>	<b>90,00</b>	
2 0 7 3 2 0 0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					44	46	48		42	44	
2 0 7 3 2 0 0 3	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran</b>					<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>		<b>42</b>	<b>44</b>	
2 0 7 3 2 0 0 3	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					90	95	100		85	90	
2 0 7 3 2 0 0 4	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil</b>					<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>5,00</b>		<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	
2 0 7 3 2 0 0 4	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi peningkatan					84	86	108		82	84	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Produktivitas											
2	0 0 2 0 5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,50	2,50	2,78		2,50	2,50	
2	0 0 2 0 0 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					5	5	5		5	5	
2	0 0 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					76,11	76,71	77,31		75,51	76,11	
2	0 0 2 0 1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					41,86	42,46	43,06		41,26	41,86	
2	0 0 2 0 0 1 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja					20	20	20		20	20	
2	0 0 2 0 0 1 2	Pelayanan antar Kerja					60	65	70		55	60	
2	0 0 2 0 0 1 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					48	53	59		44	48	
2	0 0 2 0 0 1 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas					12	13	15		11	12	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ketenagakerjaan	yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD											
2 0 0 2 0 0 7 4 2 1 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					908	998	1098		825	908	
2 0 0 2 0 7 4 2 2	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>					<b>1,80</b>	<b>2,40</b>	<b>3,00</b>		<b>1,20</b>	<b>1,80</b>	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 2 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi					7	8	9		6	7	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 2 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku					7	8	9		6	7	
2 0 0 2 0 7 4 2 3	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>					<b>81,20</b>	<b>81,80</b>	<b>82,40</b>		<b>80,60</b>	<b>81,20</b>	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 3 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					4	4	4		4	4	
2 0 0 2 0 0 7 4 2 3 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					868	912	957		827	868	
2 0 0 2 0 0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan					61	67	73		55	61	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Cata tan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	002033	Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja											
2	00204	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>					90,00	95,00	100,00		85,00	90,00	
2	002041	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					69	73	77		66	69	
2	002042	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					20	20	20		20	20	
2	002043	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					24	27	29		22	24	
2	00205	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					85,00	87,50	90,00		82,50	85,00	
2	002051	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					5	5	5		5	5	
2	0075	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 5 2 0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB					29	32	34		27	29	
2 0 7 5 2 0 1 0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online					24	27	29		22	24	
2 0 7 5 2 0 1 0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					5	5	5		5	5	
2 0 7 5 2 0 1 0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					5.224	5.486	5.760		4.976	5.224	
2 0 7 5 2 0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan					88,20	92,61	97,24		84,00	88,20	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 0 7 5 2 0 0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					5	5	5		5	5	
2 0 7 5 2 0 0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan					5	5	5		5	5	
2 0 7 5 2 0 0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					23	24	26		22	23	
2 0 7 5 2 0 0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					23	24	26		22	23	
2 0 7 5 2 0 0 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					3.450	3.650	3.850		32	3.450	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2025 (tahun n+2)	Tahun 2026 (tahun n+3)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	0											
2	3						85,00	87,50	90,00		82,50	85,00	
3													
3	3	0	2	0									
2	3			1			3	3	3		3	3	
3	3	0	2	0									
2	3			1	4		6	8	8		6	6	
3	3	0	2	0									
2	3			1	5		3	4	4		2	3	
3	3	0	2	0									
2	3			1	6		3	4	4		3	3	

### 2.3. *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*

Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, maka tugas pokok DPMPTSP&NAKER adalah ***Membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.*** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP & NAKER mempunyai fungsi :

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
  - c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan publikasi, pengendalian dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan noperizinan, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal;
  - d. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktifitas kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial di bidang tenaga kerja;
  - e. pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan dibidang penanaman modal dan tenaga kerja;
  - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Ketenagakerjaan timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kesenjangan pembangunan sarana prasarana fisik antara daratan dengan kepulauan).
- b. Minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi / informatika untuk daerah daratan yang jauh dari ibu kota kecamatan dan kecamatan kepulauan..
- c. Rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah.
- d. Rendahnya konektivitas antar sektor sumber daya.
- e. Rendahnya daya saing dan daya tarik sektor UMKM unggulan.
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online oleh pelaku usaha.
- g. Kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar dan stakeholder lainnya untuk turut aktif mensukseskan pelaksanaan penanaman modal.
- h. Kurangnya sarana promosi publikasi data profil potensi/peleuang investasi yang seharusnya lebih masif dilakukan.
- i. Legalitas lahan tanah tempat usaha yang merupakan bagian penting dari peluang investasi belum clear and clean.
- j. Belum tersusunnya road map potensi investasi.
- k. Belum tersusunnya prospektus potensi investasi berdasarkan skala prioritas yang akan dikembangkan.
- l. Apriori masyarakat terhadap proses penerbitan perizinan.
- m. Tidak terpenuhinya kuantitas SDM untuk kebutuhan ideal dalam memberikan pelayanan perizinan.
- o. Potensi perizinan di kecamatan kepulauan belum tergarap secara optimal karena terkendala biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat kepulauan begitu besar dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan layanan perizinan.
- p. Adanya ketidak patuhan penggunaan izin oleh pelaku usaha.
- q. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk melegalkan usahanya.

- r. Masyarakat kurang responsif terhadap penyediaan pelayanan perizinan secara online.
- s. Kabupaten kurang dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKM.
- o. Kurangnya daya dukung anggaran terhadap MPP dalam memenuhi kebutuhan kelangsungan pelayanan di Mall Pelayanan Perizinan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya:

- a. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi/peluang/proyek investasi dan potensi perizinan.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi potensi/peluang/proyek investasi dan penciptaan kemudahan berinvestasi.
- c. Penyederhanaan syarat administrasi permohonan perizinan.
- d. Penyederhanaan input data pada permohonan perizinan online
- e. Peningkatan kuantitas jam pelayanan dan tempat pelaksanaan operasional mobil pelayanan keliling untuk menjemput bola permohonan perizinan.
- f. Tersedianya tenaga teknis dari OPD teknis yang ditempatkan di front office perizinan.
- g. Sinergitas program dan kegiatan antar OPD untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal.
- h. Menciptakan strategi publikasi yang pesannya sampai ke semua lapisan masyarakat.
- i. Menyediakan road map dan prospektus potensi investasi.
- j. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penanaman modal.
- k. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha tentang pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
- l. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam melegalkan usahanya.
- m. Sosialisasi, melaksanakan penerimaan permohonan dan penerbitan perizinan secara manual di kecamatan kepulauan.
- n. Pendampingan kepada masyarakat kepulauan dalam proses melegalkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) RBA.

- o. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaku usaha yang sudah memiliki izin.
- p. Pembinaan peningkatan mutu manajemen kepada pelaku usaha.
- q. Komunikasi yang intensif dengan Badan Pertanahan tentang prioritas penyelesaian pertimbangan teknis dan izin lokasi lahan peluang investasi.
- r. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program yang terintegrasi dalam mendukung tercapainya potensi/peluang/proyek investasi.
- s. Komunikasi yang intensif dengan OPD terkait tentang pengalokasian anggaran prioritas program dalam mendukung tercapainya penanaman modal UMKM yang menghasilkan produk unggulan yang kompetitif.
- t. Pengenaan kebijakan kepada pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pendampingan konektifitas antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pengembangan produk, aneka produk dan pangsa pasar.
- v. Pendampingan konektifitas antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan perusahaan menengah/besar skala regional dan nasional dalam pelaksanaan pemagangan peserta didik dan perolehan bantuan sarana prasarana praktek pembelajaran.
- w. Penyusunan PERDA tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.
- x. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SPP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelaksanaan pemberian insentif penanaman modal.
- y. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha yang menerima insentif penanaman modal.
- z. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2024 dibuat berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada rancangan awal tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun

2024 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun 2022 yang pencapaiannya melalui program dan kegiatan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2022, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan tahun 2024 yang lebih realistis untuk mencapai target - target tersebut. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel T-C. 31 berikut :

Tabel T-C. 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				38.344.033.531	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				38.344.033.531	
	BELANJA RUTIN				15.467.317.388					15.467.317.388	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	15.467.317.388	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	20,00	15.467.317.388	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	152.479.317	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	152.479.317	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	26.620.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.680.000	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	13.310.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	545.000	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	6.069.317	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	796.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	106.480.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
A.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>12</b>	<b>12.329.206.411</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>12</b>	<b>4.177.183.797</b>	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	12.315.896.411	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	4.177.183.797	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12	13.310.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	0	0	
A.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>5</b>	<b>258.793.890</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	9.317.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71	188.208.298	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	3	19.965.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	0	0	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Administrasi Kepegawaian					Administrasi Kepegawaian			
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	27.993.592	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	13.310.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
A.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>50</b>	<b>858.967.756</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>50</b>	<b>124.583.600</b>	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	23.824.957	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	3.179.600	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	116.532.523	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3.136.500	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	243.093.549	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	40.209.800	
			jumlah makan dan minum yang disediakan	3				jumlah makan dan minum yang disediakan	3		
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	25.550.203	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	6.449.200	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	133.447.923	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	5.280.000	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	201.049.280	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	52.172.000	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	115.469.321	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	14.156.500	
<b>A.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>76</b>	<b>574.584.450</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>10</b>	<b>69.341.145</b>	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	275.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67	183.779.806	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	115.804.644	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	69.341.145	
<b>A.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>3</b>	<b>759.266.628</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>3</b>	<b>759.266.628</b>	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.111	5.230.145	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.111	1.814.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	385.415.958	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	385.415.958	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	368.620.525	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	368.620.525	
A.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang yang dipelihara</b>	<b>4</b>	<b>534.018.936</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang yang dipelihara</b>	<b>4</b>	<b>534.018.936</b>	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37	158.556.174	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37	158.556.174	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	87	36.583.034	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	87	36.583.034	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	42.778.872	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	42.778.872	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	296.100.856	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	296.100.856	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>2.308.878.036</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>2.308.878.036</b>	
	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				<b>2.308.878.036</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				<b>2.308.878.036</b>	
I	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	<b>10,00</b>	<b>345.489.382</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	<b>10,00</b>	<b>345.489.382</b>	
I.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	<b>7</b>	<b>133.100.000</b>	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	<b>7</b>	<b>133.100.000</b>	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>1</b>	<b>66.550.000</b>	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>1</b>	<b>66.550.000</b>	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	<b>6</b>	<b>66.550.000</b>	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	<b>6</b>	<b>66.550.000</b>	
I.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>3</b>	<b>212.389.382</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>3</b>	<b>212.389.382</b>	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	<b>2</b>	<b>66.550.000</b>	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	<b>2</b>	<b>66.550.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	145.839.382	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	145.839.382	
II	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,67</b>	<b>240.482.817</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,67</b>	<b>240.482.817</b>	
II.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>6</b>	<b>240.482.817</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>6</b>	<b>240.482.817</b>	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	74.115.670	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	74.115.670	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	166.367.147	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	166.367.147	
III	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,67</b>	<b>1.312.255.509</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,67</b>	<b>1.312.255.509</b>	
III.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</b>	<b>6.400</b>	<b>1.312.255.509</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</b>	<b>6.400</b>	<b>1.312.255.509</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.400	1.210.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.400	1.210.000.000	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	27	60.534.848	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	27	60.534.848	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	12	8.445.661	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	12	8.445.661	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	33.275.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	33.275.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya</b>	<b>6.400</b>	<b>378.524.021</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi Sesuai Izin Usahanya</b>	<b>6.400</b>	<b>378.524.021</b>	
IV.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</b>	<b>6.400</b>	<b>378.524.021</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan</b>	<b>6.400</b>	<b>378.524.021</b>	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	74.115.670	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	74.115.670	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287	166.367.147	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287	166.367.147	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	17	138.041.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	17	138.041.204	
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>90,00</b>	<b>32.126.307</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>90,00</b>	<b>32.126.307</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100,00</b>	<b>32.126.307</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100,00</b>	<b>32.126.307</b>	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	32.126.307	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	32.126.307	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>				<b>20.555.738.107</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>				<b>20.555.738.107</b>	
	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU</b>				<b>20.555.738.107</b>	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU</b>				<b>20.555.738.107</b>	
I	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan</b>	<b>85,00</b>	<b>199.650.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan</b>	<b>85,00</b>	<b>199.650.000</b>	
I.1	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		<b>Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>2</b>	<b>199.650.000</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		<b>Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>2</b>	<b>199.650.000</b>	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	133.100.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	133.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1	66.550.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1	66.550.000	
II	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>4,71</b>	<b>1.378.482.902</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>4,71</b>	<b>1.378.482.902</b>	
II.1	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat</b>	<b>89</b>	<b>1.085.590.603</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat</b>	<b>89</b>	<b>1.085.590.603</b>	
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	93	925.870.603	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	93	925.870.603	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2	26.620.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2	26.620.000	
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	133.100.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	133.100.000	
II.2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</b>	<b>90,00</b>	<b>79.895.759</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</b>	<b>90,00</b>	<b>79.895.759</b>	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	44	79.895.759	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	44	79.895.759	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	44	66.550.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran	44	66.550.000	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	90	66.550.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	90	66.550.000	
II.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	4,00	79.896.540	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil	4,00	79.896.540	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	84	79.896.540	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	84	79.896.540	
II.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	66.550.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten	2,50	66.550.000	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	66.550.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	66.550.000	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76,11	18.327.999.007	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	76,11	18.327.999.007	
III.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,86	17.766.068.210	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase partisipasi angkatan kerja	41,86	17.766.068.210	
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang	20	14.368.211.550	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang	20	14.368.211.550	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi					Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	13.310.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	13.310.000	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	26.620.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	26.620.000	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	12	26.620.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	12	26.620.000	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	908	3.331.306.660	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	908	3.331.306.660	
III.2	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>	<b>1,80</b>	<b>79.860.000</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>	<b>1,80</b>	<b>79.860.000</b>	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	7,00	66.550.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	7,00	66.550.000	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	13.310.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	13.310.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.3	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>81,20</b>	<b>334.413.646</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>81,20</b>	<b>334.413.646</b>	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	53.240.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	53.240.000	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	868	114.798.646	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	868	114.798.646	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	61	166.375.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	61	166.375.000	
III.4	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase PMI yang dilayani</b>	<b>90,00</b>	<b>147.657.151</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase PMI yang dilayani</b>	<b>90,00</b>	<b>147.657.151</b>	
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	69	54.487.151	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	69	54.487.151	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20	66.550.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20	66.550.000	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	24	26.620.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	24	26.620.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.5	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya</b>	<b>85,00</b>	<b>12.100.000</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya</b>	<b>85,00</b>	<b>12.100.000</b>	
III.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	12.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	12.100.000	
IV	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan</b>	<b>100,00</b>	<b>475.396.769</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan</b>	<b>100,00</b>	<b>475.396.769</b>	
IV.1	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB</b>	<b>29</b>	<b>174.139.419</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB</b>	<b>29</b>	<b>174.139.419</b>	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	24	73.985.511	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	24	73.985.511	
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	26.620.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	26.620.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5.224	73.533.908	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5.224	73.533.908	
IV.2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</b>	<b>88,20</b>	<b>301.257.350</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</b>	<b>88,20</b>	<b>301.257.350</b>	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	74.025.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	74.025.001	
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5	26.620.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5	26.620.000	
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	23	26.620.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	23	26.620.000	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	23	147.372.349	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	23	147.372.349	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.450	26.620.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.450	26.620.000	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya</b>	<b>85,00</b>	<b>174.209.429</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya</b>	<b>85,00</b>	<b>174.209.429</b>	
<b>V.1</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi</b>	<b>3</b>	<b>174.209.429</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi</b>	<b>3</b>	<b>174.209.429</b>	
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	81.039.429	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	81.039.429	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	3	26.620.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	3	26.620.000	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3	66.550.000	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3	66.550.000	
<b>JUMLAH PAGU INDIKATIF</b>					<b>38.344.033.531</b>	<b>JUMLAH KEBUTUHAN DANA</b>					<b>38.344.033.531</b>

## 2.5. Penelahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Urusan Penanaman dan Ketenagakerjaan dalam katagori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Program dan Kegiatan DPMPTSP & NAKER bersifat top down dan Bottom Up, sebagaimana pada tabel T-C. 32 berikut ini.

.Tabel T-C. 32

### Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>BELANJA RUTIN</b>				
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>20,00</b>	
			<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>20,00</b>	
<b>A.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>12</b>	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	
A.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	
A.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	
<b>A.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>12</b>	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	
<b>A.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>5</b>	
A.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	
A.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71	
A.3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	
A.3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	
A.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	67	
<b>A.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>50</b>	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	12	
			Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	3	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.328	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	
A.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	
<b>A.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>76</b>	
A.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	
A.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	
<b>A.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>3</b>	
A.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.111	
A.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
A.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
<b>A.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis barang yang dipelihara</b>	<b>4</b>	
A.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	
A.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	87	
A.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	
A.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	
<b>A.8</b>	<b>Operasional UPTD</b>	Kab. Sumenep	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD</b>	<b>5</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>10,00</b>	
<b>I.1</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>6</b>	
I.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	
I.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	6	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>4</b>	
I.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	
I.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang	1	
II	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>3,67</b>	
II.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>5</b>	
II.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	
II.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regional / Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	
III	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	<b>3,67</b>	
III.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</b>	<b>6.400</b>	
III.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.400	
III.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	27	
III.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	12	
III.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6	
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya</b>	<b>90</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahanya</b>	<b>6.400</b>	
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9	
IV.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	287	
IV.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	17	
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>89,00</b>	
V.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>100,00</b>	
V.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>				
	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU</b>				
I	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan</b>	<b>85,00</b>	
I.1	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		<b>Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>2</b>	
I.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	1	
I.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Sumenep	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	1	
II	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>4,71</b>	
II.1	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		<b>Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat</b>	<b>89</b>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	93	
II.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2	
II.1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	6	
<b>II.2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Presentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</b>	<b>90,00</b>	
II.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44	
<b>II.3</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran</b>	<b>44</b>	
II.3.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	90	
<b>II.4</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Presentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil</b>	<b>4,00</b>	
II.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	84	
<b>II.5</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>2,50</b>	
II.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</b>	<b>76,11</b>	
<b>III.1</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase partisipasi angkatan kerja</b>	<b>41,86</b>	
III.1.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20	
III.1.2	Pelayanan antar Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60	
III.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48	
III.1.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	12	
III.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	908	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
III.2	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>	<b>1,80</b>	
III.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	7	
III.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Sumenep	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	
III.3	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>81,20</b>	
III.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4	
III.3.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	868	
III.3.3	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	61	
III.4	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase PMI yang dilayani</b>	<b>90,00</b>	
III.4.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	69	
III.4.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Sumenep	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20	
III.4.3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Sumenep	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	24	
III.5	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya</b>	<b>85,00</b>	
III.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	5	
IV	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan</b>	<b>100,00</b>	
IV.1	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB</b>	<b>29</b>	
IV.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	24	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
IV.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Sumenep	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	
IV.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Sumenep	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5.224	
<b>IV.2</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</b>	<b>88,22</b>	
IV.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	
IV.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5	
IV.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Sumenep	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	23	
IV.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	23	
IV.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.450	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya</b>	<b>85,00</b>	
<b>V.1</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi</b>	<b>3</b>	
V.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	6	
V.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	3	
V.1.3	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	3	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan

##### *Kebijakan Nasional dan Provinsi*

RKP Nasional pada 2024 mempunyai arah kebijakan yang diusung dengan tema adalah “ *Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong* “ dengan pertumbuhan produk domestik bruto antara 5,3–5,7 persen secara *year on year*, dengan Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024 dimana Salah satu sumber-sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, juga berharap tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit atau *enabler* dalam pertumbuhan ekonomi, sementara untuk tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110.

Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi.

Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang salah satu temanya sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dan Tenaga Kerja adalah “ *Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan* ” dan “ *Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur* “

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.2.1  
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana tabel berikut ini.

RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya pasokan tenaga kerja ( <i>Labor Supply</i> )	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat



Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Prioritas dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	a. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	a. Meningkatnya Iklim Investasi	a. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
3.	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	a.. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	a. Meningkatnya pasokan tenaga kerja ( <i>Labor Supply</i> )	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
6.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	a. Nilai IKM	a. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	a. Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat

Selanjutnya disajikan hubungan antara Tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah, seperti pada table berikut :

Tabel 3.2.3  
 Tujuan Perangkat Daerah  
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,66 %
2.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penambahan kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,20 %
3.	Meningkatnya layanan urusan perizinan dan ketenagakerjaan yang inovatif berbasis e-government	IKM layanan perizinan dan ketenagakerjaan	87 %

Tabel 3.2.4  
 Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1.	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,15 %
2.	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73 %
3.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat unit Layanan Perizinan dan Non Perizinan	98,89 %

Tabel 3.2.5  
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU Tahun 2024
1.	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,15 %
2.	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	3,73 %
3.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat unit Layanan Perizinan dan Non Perizinan	98,89 %

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja DPMPTSP dan Tenaga Kerja tahun 2024 telah menggunakan pendekatan money follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Artinya perencanaan dan penganggaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan arah kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah telah diarahkan sedemikian rupa agar mendukung sasaran prioritas pembangunan tahun 2024. Renja DPMPTSP dan Tenaga Kerja tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan

- pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
- top-down dan bottom-up

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2024.

Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap rancangan awal RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 direncanakan terdiri atas 11 (sebelas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, DBHCHT dan DAK Non Fisik.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel T-C.33 :

Tabel T-C. 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Sumenep

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN			38.498.535.758				42.320.579.337	
	<b>BELANJA RUTIN</b>			15.621.819.615				17.156.501.578	
2	18 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		20,00	15.621.819.615			20,00	17.156.501.578
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		20,00				20,00	
2	18121 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		12	152.479.317			12	167.727.249
2	181211 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Sumenep	3	26.620.000	APBD		3	29.282.000
2	181212 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumenep	4	13.310.000	APBD		4	14.641.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumenep	4	6.069.317	APBD		4	6.676.249
2	1	8	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	2	106.480.000	APBD		4	117.128.000
2	1	8	1	2	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>		<b>12</b>	<b>12.329.206.411</b>			<b>12</b>	<b>13.562.127.053</b>
2	1	8	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	71	12.315.896.411	APBD		71	13.547.486.053
2	1	8	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumenep	12	13.310.000	APBD		12	14.461.000
2	1	8	1	2	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>		<b>5</b>	<b>258.793.890</b>			<b>5</b>	<b>284.673.279</b>
2	1	8	1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sumenep	1	9.317.000	APBD		1	10.248.700
2	1	8	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sumenep	71	188.208.298	APBD		71	207.029.128
2	1	8	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumenep	3	19.965.000	APBD		3	21.961.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sumenep	6	27.993.592	APBD		6	30.792.951
2	1	8	1	2	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumenep	32	13.310.000	APBD		32	14.461.000
2	1	8	1	2	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>		<b>50</b>	<b>858.967.756</b>			<b>50</b>	<b>944.864.532</b>
2	1	8	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	26	23.824.957	APBD		26	26.207.453
2	1	8	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	116.532.523	APBD		12	128.185.775
2	1	8	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	243.093.549	APBD		12	267.402.903
								Jumlah item makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Sumenep	3				3	
2	1	8	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sumenep	5	25.550.203	APBD		6	28.105.224
2	1	8	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sumenep	365	133.447.923	APBD		365	146.792.716
2	1	8	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	131	201.049.280	APBD		131	221.154.208
2	1	8	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumenep	4	115.469.321	APBD		4	127.016.253

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan		76	574.584.450			82	604.542.895	
2	1	8	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sumenep	1	275.000.000	APBD		1	275.000.000
2	1	8	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sumenep	67	183.779.806	APBD		67	202.157.786
2	1	8	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sumenep	8	115.804.644	APBD		8	127.385.109
2	1	8	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan		3	759.266.628			3	835.193.289
2	1	8	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumenep	4.111	5.230.145	APBD		4.111	5.753.159
2	1	8	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	385.415.958	APBD		12	423.957.553
2	1	8	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sumenep	12	368.620.525	APBD		12	405.482.577
2	1	8	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara		4	534.018.936			3	587.420.831
2	1	8	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sumenep	37	158.556.174	APBD		37	174.411.791

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	1	8	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sumenep	87	36.583.034	APBD		87	40.241.338
2	1	8	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sumenep	64	42.778.872	APBD		64	47.056.760
2	1	8	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sumenep	2	296.100.856	APBD		2	325.710.942
							Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	Kab. Sumenep	5	154.502.227	APBD		6	169.952.450
							<b>URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU</b>				2.308.878.036				19.526.314.969
2	1	8	0				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		10,00	345.489.382			10,00	380.038.320
2	1	8	0	2	0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal		7	133.100.000			7	146.410.000
2	1	8	0	2	0	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	1	66.550.000	APBD		1	73.205.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 2 2 0 1 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kab. Sumenep	6	66.550.000	APBD		6	73.205.000
2 1 8 2 2 0 2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>		3	212.389.382			4	233.628.320
2 1 8 2 2 0 2 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	2	66.550.000	APBD		2	73.205.000
2 1 8 2 2 0 2 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	1	145.839.382	APBD		1	160.423.320
2 1 8 3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>		3,67	240.482.817			3,73	264.531.099
2 1 8 3 2 0 1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>		6	240.482.817			5	264.531.099
2 1 8 3 2 0 1 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	1	74.115.670	APBD		1	81.527.237
2 1 8 3 2 0 1 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	5	166.367.147	APBD		5	183.003.862
2 1 8 4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>		3,67	1.312.255.509			3,73	1.443.481.060

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 1 8 4 2 0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan		6.400	1.312.255.509			6.639	1.443.481.060
2 1 8 4 2 0 1 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sumenep	6.400	1.210.000.000	APBD		6.639	1.331.000.000
2 1 8 4 2 0 1 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	27	60.534.848	APBD		27	66.588.333
2 1 8 4 2 0 1 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	Kab. Sumenep	12	8.445.661	APBD		12	9.290.227
2 1 8 4 2 0 1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumenep	6	33.275.000	APBD		6	36.602.500
2 1 8 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi sesuai Izin Usahnya</b>		6.400	378.524.021			93	416.376.424
2 1 8 5 2 0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan		6.400	378.524.021			6.639	416.376.424

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	9	74.115.670	DAK Non Fisik	9	81.527.237	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumenep	287	166.367.147	DAK Non Fisik	287	183.003.862	
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Sumenep	17	138.041.204	DAK Non Fisik	17	151.845.325	
2	1	0				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>90,00</b>	<b>32.126.307</b>		<b>91,00</b>	<b>35.338.938</b>	
2	1	0	2	0		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>		<b>100,00</b>	<b>32.126.307</b>		<b>100,00</b>	<b>35.338.938</b>	
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Sumenep	5	32.126.307	APBD	5	35.338.938	
						<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU</b>								
										<b>20.555.738.107</b>			<b>22.419.681.547</b>	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan		85,00	199.650.000			87,50	219.615.000
2	0	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)		2	199.650.000			2	219.615.000
2	0	0	2	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	Kab. Sumenep	1	133.100.000	APBD		1	146.410.000
2	0	0	2	0	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kab. Sumenep	1	66.550.000	APBD		1	73.205.000
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja		4,71	1.378.482.902			4,94	1.516.331.193
2	0	0	2	0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat		89	1.085.590.603			93	1.194.149.664
2	0	0	2	0	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n-1	Kab. Sumenep	93	925.870.603	APBD		93	1.018.457.664
2	0	0	2	0	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Sumenep	2	26.620.000	APBD		2	29.282.000
2	0	0	2	0	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Sumenep	6	133.100.000	APBD		6	146.410.000
2	0	0	2	0	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi		90,00	79.895.759			95,00	87.885.335

Kode						Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Sumenep	44	79.895.759	APBD		44	87.885.335
2	0	0	2	0		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran		44	66.550.000			46	73.205.000
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Sumenep	90	66.550.000	APBD		90	73.205.000
2	0	0	2	0		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil		4,00	79.896.540			4,50	87.886.194
2	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	Kab. Sumenep	84	79.896.540	APBD		84	87.886.194
2	0	0	2	0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten		2,50	66.550.000			2,50	73.205.000
2	0	0	2	0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Sumenep	5	66.550.000	APBD		5,00	73.205.000
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		76,11	18.327.999.007			75,51	20.160.798.908
2	0	0	2	0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja		41,86	17.766.068.210			41,26	19.542.675.031
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	Kab. Sumenep	20	14.368.211.550	APBD		20	15.805.032.705

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Sumenep	60	13.310.000	APBD		60	14.641.000
2	0	0	2	0	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Sumenep	48	26.620.000	APBD		48	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab. Sumenep	12	26.620.000	APBD		12	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Sumenep	908	3.331.306.660	APBD		908	3.664.437.326
2	0	0	2	0	0	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>		<b>1,80</b>	<b>79.860.000</b>			<b>1,20</b>	<b>87.846.000</b>
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kab. Sumenep	7,00	66.550.000	APBD		7,00	73.205.000
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kab. Sumenep	7	13.310.000	APBD		7	14.641.000
2	0	0	2	0	0	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>81,20</b>	<b>334.413.646</b>			<b>82,60</b>	<b>367.855.011</b>
2	0	0	2	0	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Sumenep	4	53.240.000	APBD		4	58.564.000
2	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Sumenep	868	114.798.646	APBD		868	126.278.511
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Sumenep	61	166.375.000	APBD		61	183.012.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang dilayani		90,00	147.657.151			85,00	122.030.703
2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Sumenep	69	54.487.151	APBD		69	59.935.866
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangan	Kab. Sumenep	20	66.550.000	APBD		20,00	73.205.000
2	0	0	2	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Sumenep	24	26.620.000	APBD		24	29.282.000
2	0	0	2	0	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya		85,00	12.100.000			82,50	13.000.000
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	Kab. Sumenep	5	12.100.000	APBD		5	13.000.000
2	0	0			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan</b>		<b>100,00</b>	<b>475.396.769</b>			<b>100,00</b>	<b>522.936.446</b>
2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB		29	174.139.419			24	191.553.360
2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Sumenep	24	73.985.511	APBD		24	81.384.062

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	0	0	2	0	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Sumenep	5	26.620.000	APBD		5	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Sumenep	5.224	73.533.908	APBD		5.224	80.887.298
2	0	0	2	0	2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</b>		<b>88,20</b>	<b>301.257.350</b>			<b>84,00</b>	<b>331.383.086</b>
2	0	0	2	0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Sumenep	5	74.025.001	APBD		5	81.427.502
2	0	0	2	0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab. Sumenep	5	26.620.000	APBD		5	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Sumenep	23	26.620.000	APBD		22	29.282.000
2	0	0	2	0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Sumenep	23	147.372.349	APBD		23	162.109.584
2	0	0	2	0	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Sumenep	3.450	26.620.000	APBD		3.450	29.282.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	3	0				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya		85,00	174.209.429			82,50	191.630.371
3	3	0	2	0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi		3	174.209.429			3	191.630.371
3	3	0	2	0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Kab. Sumenep	6	81.039.429	APBD		6	89.143.371
3	3	0	2	0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Sumenep	3	26.620.000	APBD		3	29.282.000
3	3	0	2	0	0	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	Kab. Sumenep	3	66.550.000	APBD		3	73.205.000

#### 4.2. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep dan dijabarkan dalam Sasaran Renstra OPD seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2.  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pasokan tenaga kerja ( <i>Labor Supply</i> )	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	75,05	75,12	100,09
2	Meningkatnya iklim investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	82,82	55,95	67,55
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat	%	82,81	86,25	104,15
		Hasil survey kepuasan masyarakat unit layanan perizinan dan nonperizinan	%	82,81	86,25	104,15

#### 4.3. Prioritas Pembangunan

Keterkaitan Prioritas Pembangunan sesuai dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah terhadap program/kegiatan Perangkat Daerah seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.3.  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program/Kegiatan  
Perangkat Daerah Tahun 2024

Prioritas OPD	Uraian Kegiatan	Lokus	Sub Kegiatan Prioritas	Target	Sumber Dana	Prioritas Daerah
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Urusan Bidang Ketenagakerjaan</u></b>						
P1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Sumenep	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	99 orang	DAU APBD dan DBHCHT	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan Wirausahawan muda
P2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Sumenep	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	46 Lembaga	DAU PMK	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan Wirausahawan muda
P3	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3500 orang	DAU APBD	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan Wirausahawan muda
<b><u>Urusan Bidang Penanaman Modal</u></b>						
P1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6639 pelaku usaha	DAU APBD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis
P1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19 kegiatan usaha	DAU APBD	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
P2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 kegiatan Promosi	DAK Non Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis
P3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Kabupaten Sumenep	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	13 orang	DAU APBD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif,

	Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			lincah, dan dinamis
--	---	--	---	--	--	---------------------

#### 4.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Penanaman Modal. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Sebagai tolak ukur SPM di Kabupaten Sumenep disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4.  
Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>2</b>	<b>Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2.07</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>				
2.07.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,05	75,12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
					bekerja, ataupun yang menganggur. TPAK Sumenep pada tahun 2022 dilihat dari target sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, akan tetapi kalau dilihat dari Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan dari 75,63 persen pada tahun 2021 menjadi 75,12 persen di tahun 2022.
<b>2.18</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
2.18.1	Jumlah Investor	Investor	5.958	6.440	Capaian Target Kinerja Jumlah Investor dapat terpenuhi dari target yang akan dicapai, dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 6.440 investor sehingga dapat dimaknai adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor untuk melakukan penanaman modalnya di Kabupaten Sumenep
2.18.2	Jumlah Nilai Investasi	Rp	1.139.512.157.409	1.777.132.906.076	Jumlah Nilai Investasi yang meningkat menunjukkan bahwa potensi investasi / peluang investasi / proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep dapat memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal
2.18.3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	%	82,82	86,25	Capaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri belum terpenuhi, namun dibandingkan dengan Tahun 2021 ada peningkatan sebesar 3,43% sehingga dapat dimaknai bahwa potensi investasi / peluang

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
					investasi / proyek investasi yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penanaman modal dalam negeri.
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
<b>3.</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>				
3.3.	Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu	%	100	100	Capaian Target Kinerja Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu terpenuhi, sehingga bisa dimaknai bahwa tingkat profesionalisme dari petugas front/back office dan Tim Teknis semakin meningkat.

#### 4.5. Pecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada RENSTRA 2021-2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep telah ditentukan Sasaran dan Indikator Sasaranya, yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply) dengan indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Meningkatnya Iklim Investasi dengan indikator Persentase peningkatan realisasi investasi.
3. Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat dengan indikator Hasil SKM Perizinan dan Non Perizinan.

Capaian Kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 4.5.  
Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$TPAK = PK/PUK \times 100\%$	%	75,05	75,12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, ataupun yang menganggur. TPAK Sumenep pada tahun 2022 dilihat dari target sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, akan tetapi kalau dilihat dari Realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan dari 75,63 persen pada tahun 2021 menjadi 75,12 persen di tahun 2022.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
2	Persentase peningkatan Realisasi Investasi	$(RIT) - (RIT-1) / (RIT-1) \times 100\%$	%	3,61	55,95	Capaian Target Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Investasi terpenuhi, namun dibandingkan dengan Tahun 2021 ada peningkatan sehingga dapat dimaknai bahwa potensi investasi/peleluang investasi/proyek investasi yang ada di Kabupaten Sumenep masih dapat memberikan keuntungan yang besar bagi penanam modal
3.	Hasil survey kepuasan masyarakat Perizinan dan Non Perizinan	$(\text{Total nilai persepsi per pertanyaan} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$	%	82,81	86,25	Capaian Target Kinerja Persentase jenis layanan yang diterbitkan lebih cepat dan tepat dapat terpenuhi, diukur dengan tingkat indeks kepuasan masyarakat dari target 82,81 persen Tahun 2022 terealisasi 86,25 persen.
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	Katagori	BB	A	Indeks Reformasi Birokrasi pada katagori A atau MEMUASKAN dapat dipahami bahwa DPMPSTSP telah melakukan 6 (enam) unsur Reformasi Birokrasi dengan baik

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.5.1.  
Sasaran dan Program/Kegiatan  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya pasokan tenaga kerja (labour supply)	<p><b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>
2.	Meningkatnya Iklim Investasi	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p>

		<p><b>Program :</b> PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>
3.	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	<p><b>Program :</b> PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>

Tabel 4.5.2.

Rekapitulasi Program/Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Penetapan Pemberian</i> <i>Fasilitas/Insentif Dibidang</i> <i>Penanaman Modal yang</i> <i>Menjadi Kewenangan</i> <i>Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p><b>Program :</b> PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Penyelenggaraan Promosi</i> <i>Penanaman Modal yang</i> <i>menjadi Kewenangan Daerah</i> <i>Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p><b>60.500.000,-</b></p> <p>60.500.000,-</p> <p>60.500.000,-</p> <p><b>132.581.256,-</b></p> <p>132.581.256,-</p> <p>132.581.256,-</p>	
3.	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	<p><b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p><i>Kegiatan :</i> <i>Pelaksanaan Pelatihan</i> <i>berdasarkan Unit Kompetensi</i></p> <p>Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster</p>	<p><b>1.430.786.449,-</b></p> <p>1.351.400.918,-</p> <p>1.351.400.918,-</p>	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
		<p>Kompetensi Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>	<p>79.385.531,-</p> <p>79.385.531,-</p> <p><b>54.139.187,-</b></p> <p>54.139.187,-</p> <p>54.139.187,-</p>	
6	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	<p><b>Program :</b> PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p><b>Program :</b> PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p>	<p><b>808.230.921,-</b></p> <p>808.230.921,-</p> <p>808.230.921,-</p> <p><b>276.734.865,-</b></p> <p>276.734.865,-</p> <p>151.242.861,-</p>	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	125.492.004,-	

Tabel 4.5.3  
Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				<b>BELANJA RUTIN</b>		11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	11.780.292 .724	12.958.321 .996	14.226.654 .196	15.621.819. 616	17.156.501 .577	18.844.651 .735
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggulangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	114.559.96 8	126.015.96 5	138.617.56 1	152.479.31 7	167.727.24 9	184.499.97 4
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4.559.968	5.015.965	5.517.561	6.069.317	6.676.249	7.343.874
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.00 0	117.128.00 0	128.840.80 0
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>9.263.115. 260</b>	<b>10.189.426 .786</b>	<b>11.208.369 .465</b>	<b>12.329.206. 411</b>	<b>13.562.127 .053</b>	<b>14.918.339 .758</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	9.253.115.2 60	10.178.426. 786	11.196.269. 465	12.315.896. 411	13.547.486. 053	14.902.234. 658
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah</b>	<b>194.435.680</b>	<b>213.879.248</b>	<b>235.267.173</b>	<b>258.793.890</b>	<b>284.673.279</b>	<b>313.140.607</b>
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	7.000.000	7.700.000	8.470.000	9.317.000	10.248.700	11.273.570
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	141.403.680	155.544.048	171.098.453	188.208.298	207.029.128	227.732.041
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000	21.961.500	24.157.650
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	21.032.000	23.135.200	25.448.720	27.993.592	30.792.951	33.872.246
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>645.355.189</b>	<b>709.890.708</b>	<b>780.879.779</b>	<b>858.967.757</b>	<b>944.864.532</b>	<b>1.039.350.985</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	17.900.043	19.690.047	21.659.052	23.824.957	26.207.453	28.828.198
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	87.552.609	96.307.870	105.938.657	116.532.523	128.185.775	141.004.352
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	182.639.781	200.903.759	220.994.135	243.093.549	267.402.903	294.143.194
					jumlah makan dan minum yang disediakan						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang	19.196.246	21.115.871	23.227.458	25.550.203	28.105.224	30.915.746

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					disediakan						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	100.261.40 0	110.287.54 0	121.316.29 4	133.447.92 3	146.792.71 6	161.471.98 7
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	151.051.30 0	166.156.43 0	182.772.07 3	201.049.28 0	221.154.20 8	243.269.62 9
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	86.753.810	95.429.191	104.972.11 0	115.469.32 1	127.016.25 3	139.717.87 9
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang yang diadakan</b>	<b>475.082.23 1</b>	<b>522.590.45 4</b>	<b>547.349.50 0</b>	<b>574.584.45 0</b>	<b>604.542.89 5</b>	<b>637.497.18 4</b>
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	250.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0	275.000.00 0
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	138.076.48 8	151.884.13 7	167.072.55 0	183.779.80 6	202.157.78 6	222.373.56 5
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	87.005.743	95.706.318	105.276.94 9	115.804.64 4	127.385.10 9	140.123.61 9
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang yang diadakan</b>	<b>570.448.25 4</b>	<b>627.493.08 0</b>	<b>690.242.38 8</b>	<b>759.266.62 7</b>	<b>835.193.28 9</b>	<b>918.712.61 8</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	3.929.485	4.322.434	4.754.677	5.230.145	5.753.159	6.328.475
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	289.568.71 3	318.525.58 5	350.378.14 3	385.415.95 8	423.957.55 3	466.353.30 9
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	276.950.05 6	304.645.06 2	335.109.56 8	368.620.52 5	405.482.57 7	446.030.83 5

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang yang dipelihara	401.216.331	441.337.964	485.471.761	534.018.937	587.420.830	646.162.913
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.125.600	131.038.160	144.141.976	158.556.174	174.411.791	191.852.970
				Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	27.485.375	30.233.913	33.257.304	36.583.034	40.241.338	44.265.471
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32.140.400	35.354.440	38.889.884	42.778.872	47.056.760	51.762.436
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	222.464.956	244.711.452	269.182.597	296.100.856	325.710.942	358.282.036
				Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	116.079.810	127.687.791	140.456.570	154.502.227	169.952.450	186.947.695
				URUSAN PENANAMAN MODAL - REVIU		1.436.742.027	1.908.163.667	2.098.980.034	2.308.878.037	2.539.765.841	2.793.742.425
Meningkatkan daya tarik Investaasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan pelayanan penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	259.571.286	285.528.415	314.081.256	345.489.382	380.038.320	418.042.152
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERKADA Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan peruntukannya	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha</b>	<b>159.571.286</b>	<b>175.528.415</b>	<b>193.081.256</b>	<b>212.389.382</b>	<b>233.628.320</b>	<b>256.991.152</b>
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PERKADA RUPMD	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	109.571.286	120.528.415	132.581.256	145.839.382	160.423.320	176.465.652
				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>180.678.300</b>	<b>198.746.130</b>	<b>218.620.743</b>	<b>240.482.817</b>	<b>264.531.099</b>	<b>290.984.209</b>
				<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</b>	<b>180.678.300</b>	<b>198.746.130</b>	<b>218.620.743</b>	<b>240.482.817</b>	<b>264.531.099</b>	<b>290.984.209</b>
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rumusan Strategi Promosi Penanaman Modal	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	124.994.100	137.493.510	151.242.861	166.367.147	183.003.862	201.304.248

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	687.964.77 1	1.084.508. 685	1.192.959. 554	1.312.255.5 09	1.443.481. 060	1.587.829. 166
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	687.964.77 1	1.084.508. 685	1.192.959. 554	1.312.255.5 09	1.443.481. 060	1.587.829. 166
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku efektif	611.138.69 3	1.000.000.0 00	1.100.000.0 00	1.210.000.0 00	1.331.000.0 00	1.464.100.0 00
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	45.480.728	50.028.800	55.031.680	60.534.848	66.588.333	73.247.167
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	6.345.350	6.979.885	7.677.874	8.445.661	9.290.227	10.219.250
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	40.262.750
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi	284.390.70 0	312.829.77 0	344.112.74 7	378.524.02 2	416.376.42 4	458.014.06 6
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	284.390.70 0	312.829.77 0	344.112.74 7	378.524.02 2	416.376.42 4	458.014.06 6

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	55.684.200	61.252.620	67.377.882	74.115.670	81.527.237	89.679.961
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	124.994.10 0	137.493.51 0	151.242.86 1	166.367.14 7	183.003.86 2	201.304.24 8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.712.40 0	114.083.64 0	125.492.00 4	138.041.20 4	151.845.32 5	167.029.85 7
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>24.136.970</b>	<b>26.550.667</b>	<b>29.205.734</b>	<b>32.126.307</b>	<b>35.338.938</b>	<b>38.872.832</b>
				<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu</b>	<b>24.136.970</b>	<b>26.550.667</b>	<b>29.205.734</b>	<b>32.126.307</b>	<b>35.338.938</b>	<b>38.872.832</b>
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan	24.136.970	26.550.667	29.205.734	32.126.307	35.338.938	38.872.832
				<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN - REVIU</b>		<b>15.403.830 .283</b>	<b>16.944.213 .311</b>	<b>18.638.634 .642</b>	<b>20.502.498. 106</b>	<b>22.552.747 .917</b>	<b>24.808.022 .708</b>
Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja dan Ketenaga	Meningkatnya Kesempatan Berusaha	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase penggunaan Perencanaan Tenaga Kerja dalam perencanaan program / kegiatan / sub kegiatan	<b>100.000.00 0</b>	<b>110.000.00 0</b>	<b>121.000.00 0</b>	<b>133.100.00 0</b>	<b>146.410.00 0</b>	<b>161.051.00 0</b>

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Kerjaan									
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1.035.674.607</b>	<b>1.139.242.068</b>	<b>1.253.166.275</b>	<b>1.378.482.902</b>	<b>1.516.331.192</b>	<b>1.667.964.311</b>
				<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat</b>	<b>815.620.288</b>	<b>897.182.317</b>	<b>986.900.549</b>	<b>1.085.590.603</b>	<b>1.194.149.664</b>	<b>1.313.564.630</b>
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	695.620.288	765.182.317	841.700.549	925.870.603	1.018.457.664	1.120.303.430
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MOU dengan Sektor Swasta Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah unit/paket sarana yang disediakan	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000
				<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi</b>	<b>60.026.866</b>	<b>66.029.553</b>	<b>72.632.508</b>	<b>79.895.759</b>	<b>87.885.335</b>	<b>96.673.868</b>
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	60.026.866	66.029.553	72.632.508	79.895.759	87.885.335	96.673.868

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang difasilitasi dalam proses pendaftaran</b>	<b>50.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>66.550.000</b>	<b>73.205.000</b>	<b>80.525.500</b>
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Prosentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Kecil</b>	<b>60.027.453</b>	<b>66.030.198</b>	<b>72.633.218</b>	<b>79.896.540</b>	<b>87.886.194</b>	<b>96.674.813</b>
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan	60.027.453	66.030.198	72.633.218	79.896.540	87.886.194	96.674.813
				<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan skor Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>50.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>66.550.000</b>	<b>73.205.000</b>	<b>80.525.500</b>
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Skor Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</b>	<b>13.780.096</b>	<b>15.158.106</b>	<b>16.673.917</b>	<b>18.341.309.</b>	<b>20.175.439</b>	<b>22.192.983</b>
				<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase partisipasi angkatan kerja</b>	<b>13.347.910</b>	<b>14.682.701</b>	<b>16.150.971</b>	<b>17.766.068.</b>	<b>19.542.675</b>	<b>21.496.942</b>
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	10.795.050.000	11.874.555.000	13.062.010.500	14.368.211.550	15.805.032.705	17.385.535.976
				Pelayanan antar Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang terlayani	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	2.502.860.000	2.753.146.000	3.028.460.600	3.331.306.660	3.664.437.326	4.030.881.059

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)</b>	<b>60.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>72.600.000</b>	<b>79.860.000</b>	<b>87.846.000</b>	<b>96.630.600</b>
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Peningkatan kualitas sarana prasarana perizinan LPTKS	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>251.249.92<sub>2</sub></b>	<b>276.374.91<sub>4</sub></b>	<b>304.012.40<sub>5</sub></b>	<b>334.413.64<sub>6</sub></b>	<b>367.855.01<sub>1</sub></b>	<b>404.640.51<sub>2</sub></b>
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Updating sistem informasi Pasar Kerja	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	64.420.400
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	86.249.922	94.874.914	104.362.40 <sub>5</sub>	114.798.64 <sub>6</sub>	126.278.51 <sub>1</sub>	138.906.36 <sub>2</sub>
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair	125.000.00 <sub>0</sub>	137.500.00 <sub>0</sub>	151.250.00 <sub>0</sub>	166.375.00 <sub>0</sub>	183.012.50 <sub>0</sub>	201.313.75 <sub>0</sub>
				<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMI yang dilayani</b>	<b>110.937.00<sub>3</sub></b>	<b>122.030.70<sub>3</sub></b>	<b>134.233.77<sub>4</sub></b>	<b>147.657.15<sub>1</sub></b>	<b>162.422.86<sub>6</sub></b>	<b>178.665.15<sub>3</sub></b>
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir	40.937.003	45.030.703	49.533.774	54.487.151	59.935.866	65.929.453
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang bekerja kembali	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penggunaan IMTA sesuai peruntukannya</b>	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Presentase Pengesahan Peraturan Perusahaan</b>	<b>357.172.629</b>	<b>392.889.891</b>	<b>432.178.881</b>	<b>475.396.769</b>	<b>522.936.445</b>	<b>575.230.090</b>
				<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB</b>	<b>130.833.522</b>	<b>143.916.875</b>	<b>158.308.562</b>	<b>174.139.418</b>	<b>191.553.360</b>	<b>210.708.696</b>
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	55.586.409	61.145.050	67.259.555	73.985.511	81.384.062	89.522.468
				Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perjanjian kerja sama yang dicatat	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	55.247.113	60.771.825	66.849.007	73.533.908	80.887.298	88.976.028
				<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan</b>	<b>226.339.106</b>	<b>248.973.017</b>	<b>273.870.318</b>	<b>301.257.350</b>	<b>331.383.085</b>	<b>364.521.394</b>

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi penyelesaian perselisihan	55.616.079	61.177.687	67.295.456	74.025.001	81.427.502	89.570.252
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan Industrial yang masuk ke Pengadilan HI	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tersedianya data keanggotaan SP/SB yang terverifikasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	110.723.027	121.795.330	133.974.863	147.372.349	162.109.584	178.320.542
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase pekerja dan buruh peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya</b>	<b>130.886.122</b>	<b>143.974.734</b>	<b>158.372.208</b>	<b>174.209.429</b>	<b>191.630.371</b>	<b>210.793.409</b>
				<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi</b>	<b>130.886.122</b>	<b>143.974.734</b>	<b>158.372.208</b>	<b>174.209.429</b>	<b>191.630.371</b>	<b>210.793.409</b>

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	INDIKATOR OUTCOM / INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	PAGU INDIKATIF (Rp.)					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	60.886.122	66.974.734	73.672.208	81.039.429	89.143.371	98.057.709
				Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200
				Pelatihan Transmigrasi	Jumlah KK yang mendapatkan Pelatihan Transmigrasi	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500
JUMLAH						28.620.865.033	31.810.698.974	34.964.268.872	38.433.195.759	42.249.015.335	46.446.416.868

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

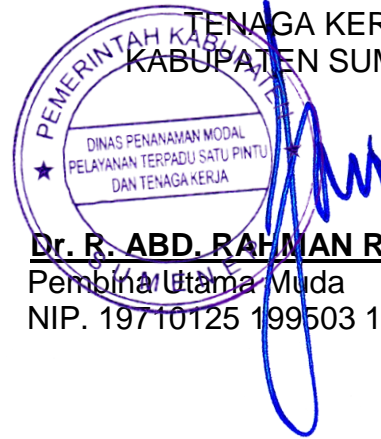
2. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.
3. Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Agar Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat ditetapkan tepat waktu, berikut ini jadwal penyelesaian dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Rancangan Awal Renja PD	<b>Minggu IV Desember 2022</b>	Bappeda
2.	Verifikasi Akhir Renja PD oleh Bidang Sektoral Bappeda	<b>Minggu I-II Juli 2023</b>	Bappeda
3.	Reviu APIP	<b>Minggu II-III Juli 2023</b>	Inspektorat
4.	Penetapan Renja PD	<b>Minggu I Agustus 2023</b>	Bagian Hukum Setda

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Matrik rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA IV  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP



**Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710125 199503 1 001



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

# **RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022**

**Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. (0328) 666923 - SUMENEP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada hakikatnya rencana kerja tahunan adalah satu kesatuan system perencanaan nasional dengan tujuan tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, penganggaran sampai dengan pengendalian perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dimana dalam proses penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karenanya Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra OPD.

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Renja OPD dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun mengacu pada arget kinerja rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026, Rencana Strategis Bappeda 2022-2026 serta Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### b. Tujuan

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB. II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- BAB. III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB. IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep (RENJA PERUBAHAN) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BAPPEDA. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) BAPPEDA Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah dicapai pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Secara umum pada tahun 2024, BAPPEDA pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan hingga triwulan II program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja BAPPEDA tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Pelaksanaan Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dilakukan kedalam 3 Program dan 13 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA PERUBAHAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	31.314.834.079	100	15.564.754.930	100	6.776.730.457	25	920.284.253	25	2.124.018.948	0	-	0	-	50	3.044.303.201	50,00	44,92	150	18.609.058.131	150	59,43	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	14	147.180.780	14	45.458.100	14	11.743.800	4	-	1	1.285.000	0	-	0	-	5	1.285.000	35,71	10,94	19	46.743.100	136	31,76	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu			3	5.615.300	3	2.569.400	0	-	0	640.000	0	-	0	-	0	640.000	0,00	24,91	3	6.255.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu			1	4.469.400	1	1.057.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	4.469.400	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu			1	3.944.500	1	925.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	3.944.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu			1	3.521.500	1	925.400	0	-	0	325.000	0	-	0	-	0	325.000	0,00	35,12	1	3.846.500	#DIV/0!	#DIV/0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7			16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu		1	4.435.500	1	925.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	4.435.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu		3	12.927.000	3	1.635.300	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-	100	0,00	6	12.927.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu		4	10.544.900	4	3.705.700	1	-	1	320.000	0	-	0	-	2	320.000	50	8,64	6	10.864.900	#DIV/0!	#DIV/0!		
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun</b>	<b>3</b>	<b>25.399.902.843</b>	<b>3</b>	<b>12.328.758.985</b>	<b>4</b>	<b>4.992.098.387</b>	<b>2</b>	<b>697.595.256</b>	<b>2</b>	<b>1.807.612.980</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2.505.208.236</b>	<b>100</b>	<b>50,18</b>	<b>7</b>	<b>14.833.967.221</b>	<b>233</b>	<b>58,40</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar		54	12.300.081.745	37	4.979.523.987	37	697.595.256	37	1.803.304.980	0	-	0	-	74	2.500.900.236	200	50,22	128	14.800.981.981	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun tepat waktu		1	9.294.320	1	1.721.700	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	100	0,00	2	9.294.320	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran disusun tepat waktu		2	19.382.920	2	10.852.700	0	-	1	4.308.000	0	-	0	-	1	4.308.000	50,00	39,70	3	23.690.920	#DIV/0!	#DIV/0!		

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Disiplin	50	79.062.366	54	364.747.850	54	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	54	364.747.850	108	461,34		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Batik Lapangannya disediakan			80	198.747.850	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	#DIV/0!	80	198.747.850	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek			0	166.000.000	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	166.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	5	2.373.553.534	5	1.583.617.100	6	959.190.087	1	98.087.846	3	178.848.802	0	-	0	-	4	276.936.648	66,67	28,87	9	1.860.553.748	180	78,39	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan			4	35.350.676	1	16.371.945	0	5.438.000	1	3.945.000	0	-	0	-	1	9.383.000	100,00	57,31	5	44.733.676	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli			4	120.332.190	9	58.948.016	2	7.336.000	2	10.032.000	0	-	0	-	4	17.368.000	44,44	29,46	8	137.700.190	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan			22	502.626.288	7	146.976.918	1	12.684.000	2	41.965.500	0	-	0	-	3	54.649.500	42,86	37,18	25	557.275.788	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan			77	33.427.094	4	15.650.340	1	1.075.000	1	9.675.000	0	-	0	-	2	10.750.000	50,00	68,69	79	44.177.094	#DIV/0!	#DIV/0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5																								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang disediakan			15	437.884.970	15	322.854.400	3	5.100.000	4	23.900.000	0	-	0	-	7	29.000.000	46,67	8,98	22	466.884.970	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri			120	294.879.788	30	185.494.000	7	60.454.846	7	85.331.302	0	-	0	-	14	145.786.148	46,67	78,59	134	440.665.936	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola			180	159.116.094	1	212.894.468	0	6.000.000	0	4.000.000	0	-	0	-	0	10.000.000	0,00	4,70	180	169.116.094	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	2	1.419.394.615	2	34.100.000	5	75.679.270	1	35.846.896	3	38.510.000	0	-	0	-	4	74.356.896	80,00	98,25	6	108.456.896	300	7,64		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan			1	46.055.187	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	46.055.187	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			34	34.100.000	5	75.679.270	2	35.846.896	3	38.510.000	0	-	0	-	5	74.356.896	100,00	98,25	39	108.456.896	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	3	925.603.409	4	408.621.999	4	232.304.550	1	51.703.997	1	52.154.382	0	-	0	-	2	103.858.379	50,00	44,71	6	512.480.378	200	55,37		

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar		16	408.621.999	4	232.304.550	1	51.703.997	1	52.154.382	0	-	0	-	2	103.858.379	50,00	44,71	18	512.480.378	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1	970.136.532	1	799.450.896	4	475.714.363	1	37.050.258	1	45.607.784	0	-	0	-	2	82.658.042	50,00	17,38	3	882.108.938	300	90,93	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34	389.014.281	16	292.847.768	4	24.300.258	4	28.112.784	0	-	0	-	8	52.413.042	50,00	17,90	42	441.427.323	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		46	104.323.487	78	49.258.894	19	6.750.000	19	13.495.000	0	-	0	-	38	20.245.000	48,72	41,10	84	124.568.487	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	306.113.128	1	133.607.701	0	6.000.000	0	4.000.000	0	-	0	-	0	10.000.000	0,00	7,48	1	316.113.128	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	100	9.066.162.668	100	2.301.498.602	100	1.630.081.504	25	24.228.000	25	425.744.719	0	-	0	-	50	449.972.719	50,00	27,60	150	2.751.471.321	150	30,35	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	4	5.959.658.722	4	893.883.448	4	816.683.210	1	9.366.500	1	238.801.567	0	-	0	-	2	248.168.067	50,00	30,39	6	1.164.057.565	150	19,53	
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaa n sesuai dengan ketentuan																							
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RK PD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			0	-	1	285.645.050	0	-	0	3.564.000	0	-	0	-	0	3.564.000	0,00	1,25	0	3.564.000	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1	22.006.050	1	11.258.800	1	-	0	3.817.000	0	-	0	-	1	3.817.000	100,0 0	33,90	2	25.823.050	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			1	15.121.150	1	7.203.300	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	100,0 0	0,00	2	15.121.150	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota			2	51.703.988	2	30.528.900	2	-	2	6.864.500	0	-	0	-	4	6.864.500	200,0 0	22,49	6	58.568.488	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			135	30.372.400	1670	76.038.500	16 70	-	0	19.078.500	0	-	0	-	167 0	19.078.500	100,0 0	25,09	1805	49.450.900	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD)			1	796.685.910	3	406.008.660	0	9.366.500	1	205.477.567	0	-	0	-	1	214.844.067	33,33	52,92	2	1.011.529.977	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9+10+11+12)	14 = 13/8x100%	15 = 13+7	16 = 15/6 x 100%	17											
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	1	303.476.814	1	100.318.444	1	77.660.294	0	4.805.000	0	2.000.000	0	-	0	-	0	6.805.000	0,00	8,76	1	107.123.444	100	35,30	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			51	80.201.144	51	55.448.494	51	4.805.000	0	2.000.000	0	-	0	-	51	6.805.000	100,00	12,27	102	87.006.144	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			1	20.117.300	1	22.211.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	1	20.117.300	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6	2.803.027.132	6	1.307.296.710	14	735.738.000	3	10.056.500	3	184.943.152	0	-	0	-	6	194.999.652	42,86	26,50	12	1.502.296.362	200	53,60	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			1	141.429.600	13	81.354.200	3	1.188.000	3	11.399.000	0	-	0	-	6	12.587.000	46,15	15,47	7	154.016.600	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			1	1.165.867.110	1	654.383.800	1	8.868.500	0	173.544.152	0	-	0	-	1	182.412.652	100,00	27,88	2	1.348.279.762	#DIV/0!	#DIV/0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD	100	9.327.015.483	100	1.279.586.774	100	830.444.306	25	79.356.021	25	128.199.650	0	-	0	-	50	207.555.671	50,00	24,99	150	1.487.142.445	150	15,94	
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	2	3.132.188.036	2	292.242.005	2	220.224.688	0	35.343.600	0	46.038.750	0	-	0	-	0	81.382.350	0,00	36,95	2	373.624.355	100	11,93	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	96.741.821	1	64.597.494	0	12.944.600	0	13.299.500	0	-	0	-	0	26.244.100	0,00	40,63	1	122.985.921	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1	33.429.250	1	38.693.200	0	5.905.000	0	6.236.000	0	-	0	-	0	12.141.000	0,00	31,38	1	45.570.250	#DIV/0!	#DIV/0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5			1	20.702.420	1	7.546.700	0	-	0	4.000.000	0	-	0	-	0	4.000.000	0,00	53,00	1	24.702.420	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1	20.702.420	1	7.546.700	0	-	0	4.000.000	0	-	0	-	0	4.000.000	0,00	53,00	1	24.702.420	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1	92.180.894	1	63.206.994	0	8.494.000	0	13.742.000	0	-	0	-	0	22.236.000	0,00	35,18	1	114.416.894	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1	27.636.500	1	38.724.200	0	8.000.000	0	8.761.250	0	-	0	-	0	16.761.250	0,00	43,28	1	44.397.750	#DIV/0!	#DIV/0!			

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5			1	21.551.120	1	7.456.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	21.551.120	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	2.751.907.015	2	467.203.988	2	189.162.788	0	19.712.600	0	40.710.500	0	-	0	-	0,00	31,94	2	527.627.088	100	19,17			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1	46.603.394	1	43.592.694	0	4.867.000	0	14.480.500	0	-	0	-	0,00	44,38	1	65.950.894	#DIV/0!	#DIV/0!			

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5			1	150.365.900	1	28.450.400,00	0	-	0	4.085.500	0	-	0	-	0	4.085.500	0,00	14,36	1	154.451.400	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1	150.365.900	1	28.450.400,00	0	-	0	4.085.500	0	-	0	-	0	4.085.500	0,00	14,36	1	154.451.400	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			1	11.840.000	1	6.516.400	0	1.000.000	0	231.500	0	-	0	-	0	1.231.500	0,00	18,90	1	13.071.500	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1	63.680.994	1	72.738.894	0	11.865.600	0	16.413.000	0	-	0	-	0	28.278.600	0,00	38,88	1	91.959.594	#DIV/0!	#DIV/0!			

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5			1	143.648.900	1	31.327.800	0	-	0	5.500.000	0	-	0	-	0	5.500.000	0,00	17,56	1	149.148.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1	143.648.900	1	31.327.800	0	-	0	5.500.000	0	-	0	-	0	5.500.000	0,00	17,56	1	149.148.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			1	51.064.800	1	6.536.600	0	1.980.000	0	-	0	-	0	-	0	1.980.000	0,00	30,29	1	53.044.800	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	2	3.442.920.432	2	520.140.781	2	421.056.830	0	24.299.821	0	41.450.400	0	-	0	-	0	65.750.221	0,00	15,62	2	585.891.002	100	17,02	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1	141.581.438	1	87.294.285	0	11.593.200	0	22.153.900	0	-	0	-	0	33.747.100	0,00	38,66	1	175.328.538	#DIV/0!	#DIV/0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	4	5			1	126.097.105	1	19.428.860	0	-	0	1.188.000	0	-	0	-	0	1.188.000	0,00	6,11	1	127.285.105	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1	126.097.105	1	19.428.860	0	-	0	1.188.000	0	-	0	-	0	1.188.000	0,00	6,11	1	127.285.105	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			1	34.121.900	1	2.635.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	34.121.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1	35.975.750	1	100.980.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	35.975.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunan nya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	125.230.988	1	87.546.535	0	12.706.621	0	18.108.500	0	-	0	-	0	30.815.121	0,00	35,20	1	156.046.109	#DIV/0!	#DIV/0!	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	4	5			1	22.429.300	1	19.277.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	22.429.300	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1	22.429.300	1	19.277.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	22.429.300	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			1	34.704.300	1	2.827.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	34.704.300	#DIV/0!	#DIV/0!					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			0	-	1	101.067.150	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA yaitu sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah = Rp. 282.081.050,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik = Rp. 11.258.800,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
3. Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah = Rp. 7.203.300,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
4. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota = Rp. 30.528.900,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
5. Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan = Rp. 76.038.500,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
6. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 558.458.524,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
7. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah = Rp. 55.448.494,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;

8. Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota = Rp. 22.211.800,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm 98\%$  pada bulan Desember 2024;
9. Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 87.354.200,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm 98\%$  pada bulan Desember 2024;
10. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah = Rp. 654.383.800,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm 98\%$  pada bulan Desember 2024;
11. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 84.128.494,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm 98\%$  pada bulan Desember 2024;
12. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan = Rp. 38.693.200,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm 98\%$  pada bulan Desember 2024;
13. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan = Rp. 7.546.700,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm 98\%$  pada bulan Desember 2024;
14. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 173.236.994,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan

pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;

15. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia = Rp. 38.724.200,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
16. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia = Rp. 7.456.100,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
17. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 52.792.694,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 97%;
18. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian = Rp. 28.450.400,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 97%;
19. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian = Rp. 6.516.400,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 97%;
20. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terdapat penambahan anggaran sebesar = Rp. 85.948.894,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 97%;
21. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA = Rp. 31.327.800,00 Sisa anggaran

- mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 97%;
22. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA = Rp. 6.536.600,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pd triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 97%;
23. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) = Rp. 87.294.285,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
24. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur = Rp. 19.428.860,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
25. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur = Rp. 2.635.100,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
26. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur = Rp. 100.980.400,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
27. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) = Rp. 87.546.535,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
28. Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan = Rp. 19.277.200,00 Sisa anggaran

mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;

29. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan = Rp. 2.827.300,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;

30. Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp. 101.067.150,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana sampai dengan akhir tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

## Usulan Pagu Indikatif Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan TA 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN AWAL 2024	ANGGARAN PAK 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (PD)	Persen	<b>100%</b>	7.425.434.326	8.099.636.102
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	14	11.743.800	11.743.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	Dokumen	<b>3</b>	2.569.400	2.569.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dokumen	<b>1</b>	1.057.200	1.057.200
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	<b>1</b>	925.400	925.400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dokumen	<b>1</b>	925.400	925.400
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	<b>1</b>	925.400	925.400
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Laporan	<b>3</b>	1.635.300	1.635.300
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Laporan	<b>4</b>	3.705.700	3.705.700
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	Dokumen	3	5.590.805.170	5.659.329.320
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS/ Bulan	<b>38</b>	5.578.230.770	5.646.754.920
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	<b>1</b>	1.721.700	1.721.700
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	<b>2</b>	10.852.700	10.852.700

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN AWAL 2024	ANGGARAN PAK 2024
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Disiplin	ASN	54	30.000.000	30.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.000.000	30.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	Laporan	6	1.009.187.173	1.129.187.173
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.371.945	16.371.945
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	58.948.016	58.948.016
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	196.974.019	221.974.019
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	15.650.340	15.650.340
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	322.854.400	322.854.400
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	185.494.000	275.494.000
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	212.894.453	217.894.453
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	Laporan	1	75.679.270	214.356.896
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	75.679.270	214.356.896
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Laporan	3	232.304.550	232.304.550
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Laporan	4	232.304.550	232.304.550
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Laporan	1	475.714.363	822.714.363

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN AWAL 2024	ANGGARAN PAK 2024
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	<b>34</b>	292.847.768	364.847.768
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	<b>78</b>	49.258.894	49.258.894
14	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	<b>1</b>	133.607.701	408.607.701
<b>2.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai</b>	<b>%</b>	<b>84%</b>	<b>1.765.681.368</b>	<b>1.788.531.368</b>
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Dokumen	<b>3</b>	952.283.074	969.133.074
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	<b>1</b>	285.645.050	285.645.050
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	<b>2</b>	11.258.800	11.258.800
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	<b>1</b>	7.203.300	7.203.300
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	<b>1</b>	30.528.900	30.528.900
4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	<b>135</b>	76.038.500	76.038.500
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	<b>3</b>	541.608.524	558.458.524
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	<b>1</b>	77.660.294	77.660.294
1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	<b>51</b>	55.448.494	55.448.494
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	<b>1</b>	22.211.800	22.211.800
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	<b>15</b>	735.738.000	741.738.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN AWAL 2024	ANGGARAN PAK 2024
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	<b>10</b>	81.354.200	87.354.200
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	<b>5</b>	654.383.800	654.383.800
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	<b>87%</b>	830.444.306	982.415.306
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	Dokumen	<b>2</b>	220.224.688	349.785.688
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	<b>1</b>	64.597.494	84.128.494
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	<b>1</b>	38.693.200	38.693.200
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	<b>1</b>	7.546.700	7.546.700
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	<b>1</b>	63.206.994	173.236.994
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	<b>1</b>	38.724.200	38.724.200
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	<b>1</b>	7.456.100	7.456.100
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	<b>2</b>	189.162.788	211.572.788
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	<b>1</b>	43.592.694	52.792.694

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN AWAL 2024	ANGGARAN PAK 2024
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	Laporan	1	28.450.400	28.450.400
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	Laporan	1	6.516.400	6.516.400
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	72.738.894	85.948.894
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	1	31.327.800	31.327.800
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	1	6.536.600	6.536.600
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	Dokumen	2	421.056.830	421.056.830
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	87.294.285	87.294.285
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	1	19.428.860	19.428.860
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	1	2.635.100	2.635.100
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	100.980.400	100.980.400
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Dokumen	1	87.546.535	87.546.535
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	1	19.277.200	19.277.200

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>		<b>ANGGARAN AWAL 2024</b>	<b>ANGGARAN PAK 2024</b>
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	<b>1</b>	2.827.300	2.827.300
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	<b>1</b>	101.067.150	101.067.150
<b>TOTAL</b>					<b>10.021.560.000</b>	<b>10.870.582.776</b>

## **BAB IV** **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Bappeda untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban terhadap tupoksi mengarah pada obyektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep, Juli 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**  
**ALY FIRMAN TO, S.TP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010







**TAHUN  
2024**



# **RENJA PERUBAHAN**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
JL. Dr. CIPTO 33 TELPON (0328) 662122  
SUMENEP**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang.....	2
1.2	Landasan Hukum.....	7
1.3	Maksud dan Tujuan.....	8
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
.		
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>159</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penetapan UU No. 23 tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan periode 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai merupakan rencana pembangunan tahunan.

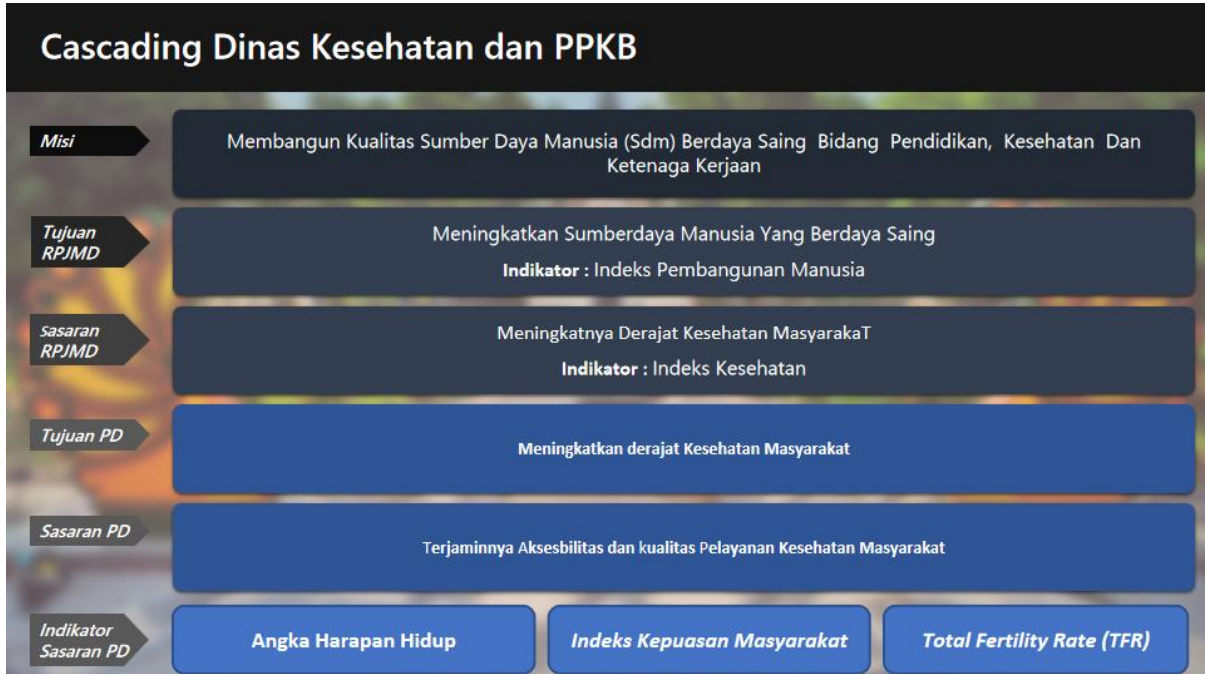
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dikaitkan dengan penyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 Renstra tersebut menjadi pedoman Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB dalam menyusun kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program / kegiatan prioritas pembangunan kesehatan beserta pendanaannya untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan tujuan misi 1 yaitu Meningkatkan Sumber daya Manusia Yang Berdaya Saing dan sasaran misi 1 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan. Pemahaman mengenai kerangka kinerja Pembangunan Misi ! RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



**GAMBAR I.1 CASCADING MISI 1 PADA RPJMD TAHUN 2021-2026**

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dengan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



**GAMBAR 1.2 CASCADING RENSTRA DINKES DAN PPKB TAHUN 2021-2026**

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Sasaran	TERJALINYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT							MENINGKATNYA LAPAAN KINERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB
Indikator Sasaran	Angka Harapan Hidup Indeks Kepuasan Masyarakat				Total Fertility Rate (TFR)			Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Program	PROGRAM PEMENUHAN UKM & UKP	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN & MAKANAN MINUMAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Program	Angka Kematian Ibu / 100.000 KH BOR	Persentase Desa Siaga PURI	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi	Rasio tenaga kesehatan	Persentase Kampung KB Mandiri	Persentase Kampung KB Mandiri	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga	Persentase terseleksi program penunjang urusan pemerintah daerah
Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah  Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi  Penerbitan Ijin/Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ kota  Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif/Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT)  Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga  Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan (DMM)  Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota  Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  Pembangunan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk  Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal  Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKB)  Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber KB  Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, RSUD Moh Anwar				Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Sekretariat	

**GAMBAR 1.3 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DINKES DAN PPKB TAHUN 2021-2026**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam proses penyusunan Renja, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB telah menyusun Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Kesehatan dan Rancangan Awal RKPd Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dokumen tersebut selanjutnya disempurnakan berdasarkan hasil masukan pada Forum Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPd Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah-atas (*Bottom Up Planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi.

Untuk memastikan adanya selarasan dengan dokumen perencanaan lain, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep. Pembahasannya mencakup :

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
- b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD terkait di Kabupaten Sumenep dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep.
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Tahun 2024 merupakan penjabaran program / kegiatan dari Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB dan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Provinsi Jawa Timur.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumenep untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019;
8. Peraturan Bupati Sumenep No 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep dan UPT-nya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumenep dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep dan Puskesmas Tahun 2024 untuk mengoperasionalkan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB dan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA SAMPAI  
DENGAN TW II TAHUN 2024**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN**  
**RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Tahun 2024 s/d TW 2**

Secara umum, tugas pokok Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dengan fungsi utama adalah perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1.

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		0,79	0,800	101%
1.1	Terjaminnya Aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	TAHUN	72	72,47	101%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	88,60	104%
		Total Fertility Rate (TFR)		2,03	2,12	96%

Uraian penjelasan tabel :

**1. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku. Angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebesar 72,47 tahun, angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 72 tahun. Angka Harapan Hidup Tahun 2023 naik dibandingkan AHH Tahun 2022 sebesar 71,99 tahun.

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai yang didapatkan dari penghitungan survey kepuasan masyarakat. Berisi data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar 85,82 menjadi 87,96% di tahun 2023 artinya masyarakat semakin puas terhadap kinerja RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep. pengukuran survei kepuasan masyarakat itu dilakukan secara periodik setiap semester jadi dari periode ke-1 januari hingga bulan Juni periode kedua Juli hingga Desember untuk Angka yang diperoleh untuk tahun 2023 merupakan rata-rata dari penilaian di dua semester tersebut untuk cara penghitungannya dari survei ke pasar masyarakat terdiri dari 9 indikator yang tertuang dalam kuesioner di mana masing-masing indikator memiliki range penilaian masing-masing untuk nilai tertinggi dari penilaian terbaik untuk masing-masing indikator nilainya adalah 4 untuk nilai terendahnya adalah 1. Adapun hasil akumulasi IKM pada penilaian semester 1 (januari-juni adalah 88,60%) dan hasil akumulasi IKM pada penilaian semester 2 (juli-desember adalah 87,32%). Sehingga IKM pada tahun 2023 adalah rerata IKM pada semester 1 dan semester 2 yaitu  $(88,60\%+87,32\%=87,96\%)$ .

## 3. Total Fertility Rate (TFR)

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan nomor 0120/RC.03/B1/2024 perihal Permintaan Data untuk pengusulan kebutuhan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk diminta untuk menyediakan data TFR, mCPR, dan unmet need tingkat kabupaten/kota tahun 2023.

Dalam penghitungan Indikator TFR dan ASFR 15-19 tahun tahun 2023 tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan catatan sebagai berikut:

1. Metode penghitungan menggunakan metode tidak langsung yaitu Metode Anak Kandung atau Own Children Method.
2. Data dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PK-23) tidak dapat secara mandiri digunakan untuk menghitung TFR dan ASFR 15-19 Tahun karena dua alasan :
  - Terdapat undercount yang cukup besar untuk kelompok usia 0-4 Tahun (nasional 26 persen; provinsi antara 12-75 persen)
  - Data PK-23 tidak dapat digunakan untuk menghitung UHH (Umur Harapan Hidup), karena jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup yang dihasilkan sangat identik sehingga menghasilkan UHH yang jauh lebih tinggi dari UHH yang dipublikasikan BPS.
3. Agar data PK-23 dapat digunakan untuk menghitung TFR dan ASFR 15-19 Tahun, maka diperlukan adjustment yaitu :

- Adjustment jumlah balita, anak dan wanita dengan menggunakan data dari Susenas 2023
  - Menggunakan umur harapan hidup yang telah dipublikasikan BPS Tahun 2023 untuk Indeks Pembangunan Manusia.
4. Secara umum, penghitungan TFR dan ASFR menggunakan pemutakhiran PK2023 dapat dihitung sampai tingkat kabupaten/kota (dengan metode yang sama seperti penghitungan TFR dan ASFR tingkat provinsi). Hanya saja, untuk beberapa kabupaten/kota yang perkiraan angka TFR terlalu tinggi atau rendah dari hasil perhitungan proyeksi BPS untuk tahun 2025 dan LF SP2020, estimasi TFR dan ASFR dilakukan dengan metode interpolasi data berdasarkan data proyeksi TFR tahun 2020 dan 2025 sesuai publikasi BPS. Provinsi dengan kabupaten/kota yang paling banyak dilakukan interpolasi adalah Provinsi Papua, dimana hanya tujuh kabupaten/kota yang dapat dihitung menggunakan Pemutakhiran PK2023, sisanya diestimasi dengan metode interpolasi.

Dengan slogan yang baru dari program KB yaitu “ Dua Anak Lebih Baik” saat ini lebih disosialisasikan di berbagai lapisan masyarakat. Sebagai program pencegahan ledakan penduduk KB akan lebih mendapat perhatian pemerintah.

Tabel 2.2.

## Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		0,79	0,800	101%

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

## a) Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia bidang kesehatan meski secara kuantitas telah tercukupi sesuai standar (jumlah, jenis tenaga), namun secara kualitas (kompetensi) masih perlu ditingkatkan keterampilannya dalam hal terkait dengan pelayanan, karena hal ini akan berperan dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB secara menyeluruh.

Selain itu kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan belum optimal, karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan (Kerangka Acuan Kegiatan) yang baik sehingga program/kegiatan terjadwal sesuai dengan tahapan-tahapannya agar dapat berjalan sesuai dengan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.

b) Faktor masyarakat

Peran serta masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, karena seolah pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Disamping itu mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga menyulitkan dalam penetapan data sasaran untuk rencana intervensi kegiatan.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Masih adanya puskesmas yang belum memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang terbatas dalam menunjang pelayanan kesehatan dan sebagai Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Disamping itu masih terbatasnya sarana tertentu terutama dalam menjangkau pelayanan di daerah perifer.

d) Faktor Lingkungan

Adanya perubahan Kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tertunda bahkan tidak dilaksanakan, disamping itu kebijakan terkait dinamika regulasi pengelolaan keuangan seperti pengaturan terkait dengan bantuan sosial dan hibah yang berefek pada pergeseran bantuan tersebut menjadi bagian dari tugas pokok dari fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB.

Dari beberapa identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB dalam pembangunan kesehatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang dilakukan secara sistematis baik secara internal organisasi maupun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai selama ini dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait baik intra dan sektor terkait serta pelibatan peran serta organisasi lain seperti PKK, KPAD, LSM, BPJS Kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan dan lain-lain sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep tahun 2021 – 2026, maka dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan untuk kedepan diambil langkah-

langkah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jejaringnya menuju Akreditasi Puskesmas yang Paripurna.
2. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Keuangan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
3. Peningkatan upaya pencegahan penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Termasuk kesiapsiagaan kegawatdaruratan, bencana, dan penanggulangan KLB/wabah serta peningkatan sistem surveilans masyarakat berbasis evidence base, sosialisasi, seminar, Home Visite (PHN), dll.
4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat dengan 10 Indikator PHBS, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum lainnya dengan survei STBM.
5. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui peningkatan capacity Building dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat managerial maupun teknis termasuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur.
6. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan, serta melindungi masyarakat dari bahan berbahaya.
7. Proaktif dalam advokasi untuk mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dan swasta sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan kesehatan. Serta membangun kemitraan dengan penyedia pelayanan swasta, organisasi profesi bidang kesehatan termasuk tenaga swasta.
8. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang tergolong rawan, atau kelompok miskin.
9. Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan secara terus menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi anak sekolah, dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, dan ibu hamil dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai target Nasional.
10. Percepatan Perbaikan gizi melalui penanganan pada 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK)

Pencapaian target renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja di tahun 2024 s/d Triwulan II tertuang dalam Tabel. **Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 s/d triwulan II Kabupaten Sumenep sebagai berikut**

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)										
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8x100%	15=7+13	16=15/6x100%										
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
		1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	84,78 %	1.462.587.562.689			91,3 %	119.774.561.253	25	23.117.632.103	25	40.947.339.621	0	0	50 %	64.064.971.724	50,00%	53,49%	50 %	64.064.971.724	29,49 %	1,50 %
		1 02 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60 dokumen	367.787.338			12 dokumen	59.041.300	3	6.146.100	3	10.366.000	0	0	6 dokumen	16.512.100	50,00%	27,97%	6 dokumen	16.512.100	3,33 %	0,00 %
		1 02 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17 Dokumen	24.295.000	0	0	2	2.191.250	0	0	2 Dokumen	2.191.250	28,57%	9,02%	2 Dokumen	2.191.250		
		1 02 01 2.01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	4.742.200	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00%	0 Dokumen			
		1 02 01 2.01 0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3 Dokumen	4.322.200	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00%	0 Dokumen			
		1 02 01 2.01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	3.784.800	2	3.507.100	0	0	0	0	2 Dokumen	3.507.100	100,00%	92,66%	2 Dokumen	3.507.100		
		1 02 01 2.01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen	3.713.400	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00%	0 Dokumen			
		1 02 01 2.01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	5.644.800	3	2.639.000	0	2.714.750	0	0	3 Laporan	5.353.750	100,00%	94,84%	3 Laporan	5.353.750		
		1 02 01 2.01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	12.538.900	0	0	1	5.460.000	0	0	1 Laporan	5.460.000	50,00%	43,54%	1 Laporan	5.460.000		
		1 02 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	50 laporan	635.597.808.936			10 laporan	117.514.784.172	2	22.742.440.007	0	40.259.954.207	0	0	2 laporan	63.002.394.214	20,00 %	53,61%	2 laporan	63.002.394.214	4,00 %	11,76%
		1 02 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					16404 Orang/bulan	117.464.784.172	16404	22.731.097.007	16.404	40.249.655.332	0	0	16404 Orang/bulan	62.980.752.339	100,00 %	53,62%	16404 Orang/bulan	62.980.752.339		
		1 02 01 2.02 0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					30 Dokumen	1.000.100	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00%	0 Dokumen			
		1 02 01 2.02 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3 Laporan	3.999.900	5	0	2	762.000	0	0	2 laporan	762.000	40,00%	19,05%	2 laporan	762.000		
		1 02 01 2.02 0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi					12 Laporan	45.000.000	3	11.343.000	3	9.536.875	0	0	6 laporan	20.879.875	50,00%	46,40%	6 laporan	20.879.875		
		1 02 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	35 jenis	38.801.481.142			7 jenis	1.563.265.835	4	213.988.504	0	493.707.712	0	0	4 jenis	707.696.216	57,14 %	45,27%	4 jenis	707.696.216	11,43 %	0,55 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)					
								I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/6x100%	15=7+13	16=15/6x100%									
		1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			50 Paket	11.772.000	40	10.387.000	0	0	0	0	0	0	40 Paket	10.387.000	80,00 %	88,23%	40 Paket	10.387.000		
		1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			19 Paket	20.962.700	13	12.870.000	0	0	0	0	0	0	13 Paket	12.870.000	68,42 %	61,39%	13 Paket	12.870.000		
		1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36 Paket	1.094.345.135	9	146.449.904	9	367.802.256	0	0	0	0	18 Paket	514.252.160	50 %	46,99%	18 Paket	514.252.160		
		1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	29.060.000	0	0	7	28.696.250	0	0	0	0	7 Paket	28.696.250	100,00%	98,75%	7 Paket	28.696.250		
		1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang			170 Dokumen	40.650.000	0	0	50	18.700.000	0	0	0	0	50 Dokumen	18.700.000	29,41%	46,00%	50 Dokumen	18.700.000		
		1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			560 Laporan	366.476.000	70	44.281.600	0	78.509.206	0	0	0	0	70 Laporan	122.790.806	12,50 %	33,51%	70 Laporan	122.790.806		
		1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	60 bulan	6.324.171.329	12 bulan	399.485.207	3	101.343.380	0	91.797.904	0	0	0	0	3 bulan	193.141.284	25,00 %	48,35%	3 bulan	193.141.284	5,00 %	1,60 %
		1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	399.485.207	3	101.343.380	0	91.797.904	0	0	0	0	3 Laporan	193.141.284	25,00 %	48,35%	3 Laporan	193.141.284		
		1 02 01 2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	235 unit	1.781.080.013	47 unit	237.984.739	6	53.714.112	0	91.513.798	0	0	0	0	6 unit	145.227.910	12,77 %	61,02%	6 unit	145.227.910	2,55 %	3,02 %
		1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kelembagaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan			3 Unit	143.338.140	1	38.514.112	0	33.310.798	0	0	0	0	1 Unit	71.824.910	33,33 %	50,11%	1 Unit	71.824.910		
		1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	30.460.000	5	15.200.000	0	15.210.000	0	0	0	0	5 Unit	30.410.000	50,00 %	99,84%	5 Unit	30.410.000		
		1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	64.186.599	0	0	2	42.993.000	0	0	0	0	2 Unit	42.993.000	66,67%	66,98%	2 Unit	42.993.000		
		1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	447 Orang	614.053.731.493	91 Orang	131.652.063.264	27,65	120.175.075		21.355.917.089	0		0	0	27,65/100.000 KH	21.476.092.164	325,90%	16,31%	27,65/100.000 KH	21.476.092.164	6,19 %	0,01 %
		1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di Fasilitas kesehatan sesuai standar	90 %	302.544.662.833	70 %	45.861.870.294	0	8.797.525	0	15.987.400	0		0	0	0 %	24.784.925	0,00 %	0,05%	0 %	24.784.925	0,00 %	0,00 %
		1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal			0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit		0,00 %	0,00%	0 Unit			
		1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			30 Unit	12.326.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit		0,00 %	0,00%	0 Unit			
		1 02 02 2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM			1 Unit	224.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit		0,00 %	0,00%	0 Unit			
		1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh			3 Unit	1.390.305.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit		0,00 %	0,00%	0 Unit			
		1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang			70 Unit	10.285.550.891	0	3.581.525	0	4.100.000	0	0	0	0	0 Unit	7.681.525	0,00 %	0,07%	0 Unit	7.681.525		
		1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20 Unit	58.960.000											0,00%	0,00%				
		1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar			1 Unit	12.127.975.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit		0,00 %	0,00%	0 Unit			



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)				
															I		II							III		IV	
															9	10	11	12						13=9+10+11+12	14=13/100%	15=7+13	16=15/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/100%	15=7+13	16=15/6x100%												
		1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			2 Dokumen	59.937.300	0	0	1	12.875.000	0	0	0	0	1 Dokumen	12.875.000	50,00%	21,48%	1 Dokumen	12.875.000					
		1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1 Dokumen	2.046.035.917	0	42.050.550	0	254.939.349	0	0	0	0	1 Dokumen	296.989.899	50%	14,52%	1 Dokumen	296.989.899					
		1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	177.492.900	1	13.508.000	5	10.181.000	0	0	0	0	6 Dokumen	23.689.000	50,00%	13,35%	6 Dokumen	23.689.000					
		1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen	68.103.453	1	0	0	6.019.200	0	0	0	0	1 Dokumen	6.019.200	100,00%	8,84%	1 Dokumen	6.019.200					
		1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			30 Unit	39.999.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit	.	0,00%	0,00%	0 Unit	.					
		1 02 02 2.02 0038	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)			12 Laporan	56.645.500	3	0	3	18.872.000	0	0	0	0	6 Laporan	18.872.000	50,00%	33,32%	6 Laporan	18.872.000					
		1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			12 Dokumen	19.126.400	3	0	3	12.526.840	0	0	0	0	6 Dokumen	12.526.840	50,00%	65,50%	6 Dokumen	12.526.840					
		1 02 02 2.02 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan			1 Unit	30.000.000	0	6.056.000	0	7.950.000	0	0	0	0	0 Unit	14.006.000	0,00%	46,69%	0 Unit	14.006.000					
		1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria kesehatan Malaria			5 orang	74.054.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang	.	0,00%	0,00%	0 Orang	.		tidak di			
		1 02 02 2.02 0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tanaman kewaspadaan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			7 Tatanan	79.999.800	3	0	0	0	0	0	0	0	3 Tatanan	.	42,86%	0,00%	3 Tatanan	.					
		1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak			4 Dokumen	409.406.400	1	22.182.000	1	0	0	0	0	0	2 Dokumen	22.182.000	50,00%	5,42%	2 Dokumen	22.182.000					
		1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK	80 %	0	80 %	96.114.800	100	0	100	6.660.000	0	0	0	0	100 %	6.660.000	125,00%	6,93%	100 %	6.660.000	125,00 %	0,00 %			
		1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	96.114.800	3	0	3	6.660.000	0	0	0	0	6 Dokumen	6.660.000	50,00%	6,93%	6 Dokumen	6.660.000					
		1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna	20 RS	789.870.263	4 RS	96.844.000	5	3.517.500	0	0	0	0	0	5 RS	3.517.500	125,00%	3,63%	5 RS	3.517.500	25,00 %	0,00 %				
		1 02 02 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan			5 Unit	20.000.000	5	3.517.500	5	0	0	0	0	5 Unit	3.517.500	100,00%	17,59%	5 Unit	3.517.500						
		1 02 02 2.04 0004	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				76.844.000	5	.	0	0	0	0	0	0	.	.	0%	0,00%	.	.	0,00%	0,00%				
		1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan di Wilayah	1:690 rasio	20.419.898.292	1:463 rasio	15.374.447.800	1:463	687.500	1:463	3.897.180.250	0	0	0	0	1:463 rasio	3.897.867.750	188,00%	25,35%	1:463 rasio	3.897.867.750	0,00 %	0,00 %			
		1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	75 %	51.239.431	75 %	12.897.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0,00 %	0,00%	0 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %				
		1 02 03 2.01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			1 Dokumen	12.897.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	.	0,00%	0,00%	0 Dokumen	.					
		1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP	Persentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan	100 %	0	100 %	13.554.301.100	25	687.500	25	3.895.738.750	0	0	0	0	50	3.896.426.250	50,00%	28,75%	50	3.896.426.250	0,00 %	0,00 %			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)										
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/6x100%	15=7+13	16=15/6x100%										
		1 02 03 2.02 0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia			1 Dokumen	67.927.900	0	0	0	6.538.750	0	0	0	0	0 Dokumen	6.538.750	0,00 %	9,63 %	0 Dokumen	6.538.750			
		1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			391 Orang	13.341.630.000	0	0	687.500	391	3.889.200.000	0	0	0	0	391 Orang	3.889.887.500	100,00 %	29,16 %	391 Orang	3.889.887.500		
		1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			12 Dokumen	144.743.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00 %	0 Dokumen			
		1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	100 %	214.220.246	100 %	1.807.248.800	0	0	25	1.441.500	0	0	0	0	0	25	1.441.500	25,00 %	0,88 %	25	1.441.500	0,00 %	0,00 %
		1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan			120 Orang	1.807.248.800	0	0	0	1.441.500	0	0	0	0	0	0 Orang	1.441.500	0,00 %	0,08 %	0 Orang	1.441.500		
		1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang	95 %	3.208.878.337	85 %	2.645.700	0	0	50	6.720.000	0	0	0	0	0	50 %	6.720.000	50,00 %	25,22 %	50 %	6.720.000	0,00 %	0,00 %
		1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produksi.	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain	50 Rekomendasi	0	10 Rekomendasi	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Rekomendasi		0,00 %	0,00 %	0 Rekomendasi		0,00 %	0,00 %
		1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat			1 Dokumen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00 %	0 Dokumen			
		1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain	50 Rekomendasi	0	10 Rekomendasi	11.458.400	0	0	0	1.855.000	0	0	0	0	0	0 Rekomendasi	1.855.000	0,00 %	16,19 %	0 Rekomendasi	1.855.000	0,00 %	0,00 %
		1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat			2 Dokumen	11.458.400	0	0	1	1.855.000	0	0	0	0	1	1 Dokumen	1.855.000	50,00 %	16,19 %	1 Dokumen	1.855.000		
		1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang Mendapatkan Stiker Lisensi Laik	30 %	14.415.599	30 %	5.187.300	0	0	0	4.865.000	0	0	0	0	0	0 %	4.865.000	0,00 %	93,79 %	0 %	4.865.000	0,00 %	0,00 %
		1 02 04 2.05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker			2 Dokumen	5.187.300	0	0	1	4.865.000	0	0	0	0	1	1 Dokumen	4.865.000	0,00 %	93,79 %	1 Dokumen	4.865.000		
		1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI	7,27 %	11.108.469.728	5,81	401.666.200	19,5	20.582.100	19,5	41.816.440	0	0	0	0	0	19,5 %	62.398.540	316,67 %	15,53 %	19,5 %	62.398.540	268,23 %	0,19 %
		1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	20 keg	10.323.122.030	4 keg	240.178.700	2	20.582.100	2 keg	41.816.440	0	0	0	0	0	2 keg	62.398.540	50,00 %	25,98 %	2 keg	62.398.540	10,00 %	0,20 %
		1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan			8 Dokumen	240.178.700	2	20.582.100	0	41.816.440	0	0	0	0	2	2 Dokumen	62.398.540	25,00 %	25,98 %	2 Dokumen	62.398.540		
		1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	Persentase Desa dengan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)	20 %	261.645.912	20 %	51.625.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %		0,00 %	0,00 %	0 %		0,00 %	0,00 %
		1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih			2 Dokumen	51.625.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00 %	0 Dokumen			
		1 02 05 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Rasio Posyandu	21 Jumlah penduduk	261.645.912	20 %	109.862.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %		0,00 %	0,00 %	0 %		0,00 %	0,00 %
		1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Masyarakat			2 Dokumen	109.862.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen		0,00 %	0,00 %	0 Dokumen			
		2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri	10 %	1.823.991.433	10 %	137.932.400	1,40	17.408.000	0	26.782.625	0	0	0	0	0	1,40 %	44.190.625	14,00 %	32,04 %	1,40 %	44.190.625	14,00 %	0,95 %
		2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Bumerdah Daerah	Jumlah kebijakan yang diusun	10 kebijakan	578.025.454	2 kebijakan	8.332.400	0	1.640.000	0	5.053.250	0	0	0	0	0	0 kebijakan	6.693.250	0,00 %	80,33 %	0 kebijakan	6.693.250	0,00 %	0,28 %



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan kesehatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB**

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kesehatan		√	0,788	0,789	0,79	0,791	0,793	0,789	0,79	0,791
2	Angka Harapan Hidup (AHH)		√	71,56	71,78	72	72,22	71,56	71,99	72	72,22
3	Total Fertility Rate (TFR)		√	2,23	2,13	2,03	1,93	2,32	2,32	2,03	1,93
4	Angka Kematian Ibu / 1000 KH			97,82	97,82	91,3	91,3	114,58	81	91,3	91,3
5	Persentase Desa Siaga PURI			3,20%	4,36%	4,94%	5,81%	5,54%	21,5	4,94%	5,81%
6	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi			70	75	80	85	89,3	75	80	85
7	Rasio tenaga kesehatan			1 : 690	1 : 690	1 : 690	1 : 690	1 ; 690	1 : 408	1 : 690	1 : 690
8	Persentase Kampung KB Mandiri			-	5,00%	5,00%	10,00%	-	0	5,00%	10,00%
9	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)			69,79	70,09	70,39	70,69	70,52	72,60	70,39	70,69
10	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga			75	75	80	80	-	65,02	80	80
11	Nilai SAKIP			BB	BB	A	A	A	A	A	A
12	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			95	95	95	95	95	97	95	95

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

- Memberikan pelayanan data, informasi dan promosi kesehatan
- Memberikan rekomendasi perizinan fasilitas, tenaga kesehatan, obat tradisional serta rekomendasi laik sehat terhadap usaha terkait bidang kesehatan
- Visitasi sarana kesehatan
- Bimbingan ke puskesmas
- Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, bidang usaha
- Perlindungan (protektif) terhadap kesehatan masyarakat melalui penerapan regulasi bidang kesehatan.
- Pembangunan fisik Puskesmas dan jaringannya dan penyediaan alat kesehatan agar semua Puskesmas memenuhi standar pelayanan.
- Peningkatan pelayanan terutama di daerah perifer.
- Regulasi Pelayanan Kesehatan
- Regulasi Jaminan Kesehatan
- Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang bersih Transparan, Akuntabel dan bebas KKN
- Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gratis

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumenep dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep. yaitu

**Tabel 2.1**  
**Isu- isu strategis**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB**

No	Permasalahan	Isu Strategis	Program
1	Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan	Penurunan AKI dan AKB yang lambat.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2	Angka Balita stunting masih tinggi	Prevalensi stunting yang masih tinggi	
3	Angka Penderita HIV di kabupaten Sumenep masih termasuk tinggi	Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak	
4	Peningkatan Penderita TBC di kabupaten Sumenep dan Penanganan TBC di	menular yang disebabkan oleh	

No	Permasalahan	Isu Strategis	Program
	kabupaten Sumenep masih belum optimal	pola hidup tidak sehat.	
5	Rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat		
6	8 Kecamatan di Kabupaten Sumenep merupakan kepulauan	Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal.	
7	Jumlah Laporan yang cukup banyak di bidang kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan yang belum terintegrasi menjadi satu	
8	Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata khususnya di wilayah kepulauan	Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga serta kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
9	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat	Pemberdayaan masyarakat akan kesehatan kurang optimal	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
10	Cakupan Akseptor KB Aktif dengan MKJP masih rendah	Pencapaian MKJP masih rendah	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
11	Keberimbangan SDM pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tenaga lini lapangan belum memadai	Tenaga PKB/ PLKB kurang memadai dibanding dengan jumlah Desa/ Kecamatan yang ada	
12	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga	Adanya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
13	Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program Bangga Kencana belum optimal	Pelaksanaan program Bangga Kencana belum merata di semua wilayah	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
14	Nilai SAKIB Dinas Kesehatan BB	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2024. Program dan kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Tahun 2024 yaitu

NO	PERMASALAHAN	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN PRIORITAS PD	PRIORITAS DAERAH
1	Kualitas SDM nakes masih belum merata	Insentif Pemenuhan Kebutuhan 4 Dokter Spesialis dasar (Sp. Bedah, Sp. Anak, Sp. Obgyn, Sp. Penyakit Dalam) dan 3 Dokter Spesialis Penunjang (Sp. Anestesi, Sp. melalui Program PDGS)	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan
		Pelatihan Teknis Fungsional oleh Badan Diklat Terakreditasi	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan	
2	Berdasarkan Permenkes RI NO. 23 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS dan IMS : 95% (sembilan puluh lima persen) ODHIV ditemukan dari estimasi, sehingga perlu adanya deteksi dini pada popuasi khusus (LSL, Waria, Penasun, WPS) dan Permenkes RI No. 21 tahun 2021 tentang pelayanan masa sebelum hamil, hamil, dan persalinan	Deteksi Dini kasus IMS-HIV/AIDS pada catin dan Popkun	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
3	Angka stunting masih tinggi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	

Melalui 2 program prioritas yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan suatu keharusan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diperoleh melalui peningkatan kompetensi dan memberikan pelatihan baik penjenjangan, teknis fungsional, maupun manajemen kesehatan. Disamping itu pemenuhan sarana dan prasarana unit pelayanan puskesmas dan jaringannya serta penunjang pelayanan kesehatan seperti

laboratorium sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta menyusun standar operasional prosedur pelayanan bidang kesehatan. Dengan upaya tersebut maka kinerja akan senantiasa mengalami peningkatan pada tahun kedepan.

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian program pada Tahun 2024 pada awal Renja terdiri atas 8 Program, saat Renja Perubahan 2024 tetap sebanyak 8 Program. Jumlah Program Baru dalam Renja perubahan tidak ada. Sedangkan Jumlah Kegiatan Renja Tahun 2024 sebanyak 23 kegiatan, saat APBD Tahun 2024 menjadi 23 dan dalam Renja perubahan 2024 sebanyak 23 kegiatan. Pagu Anggaran dalam renJa Tahun 2024 sebesar Rp. 392.238.533.341,00 dan mendapat Pagu saat APBD Rp. 361.820.476.483,00 sedangkan saat renja perubahan jumlah pagu APBD sebesar 461.458.285.245,00. Kegiatan yang bertambah dalam Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 terdiri dari :

1. Penyesuaian Alokasi Anggaran Dana BK Propinsi Jawa Timur;
2. Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten dan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas;
3. Alokasi Tambahan Anggaran Pajak Rokok dan DBHCHT;
4. Alokasi Tambahan Gaji Pegawai dikarenakan Gaji Pegawai RSUD dr. H. Moh Anwar menjadi satu di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
5. Retensi dan Hutang Pihak Ketiga;
6. Penyesuaian SILPA ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ) Tahun 2023 dan Penambahan Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2024.

Beberapa kegiatan tersebut guna untuk Pencapaian Target Kinerja RPJMD dan Restra Dinas Kesehatan, MDGs/SDGs, Pencapaian SPM serta pengentasan Kemiskinan dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah, secara rinci dapat dilihat dalam table sebagai berikut : **Usulan Renja Perubahan PD Tahun Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SUMENEP  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00								342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	61.599.000,00	59.041.300,00	59.041.300,00	-2.557.700,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Puskesmas serta Rumah Sakit		78.438.794,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	26.852.700,00	24.295.000,00	24.295.000,00	-2.557.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		41.326.802,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.742.200,00	4.742.200,00	4.742.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		4.487.176,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.322.200,00	4.322.200,00	4.322.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		4.001.422,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.784.800,00	3.784.800,00	3.784.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		4.023.375,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.713.400,00	3.713.400,00	3.713.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.992.032,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.644.800,00	5.644.800,00	5.644.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			6.896.440,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	12.538.900,00	12.538.900,00	12.538.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			13.711.547,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				10 laporan	10 laporan	112.193.773.961,00	90.052.602.811,00	129.937.975.334,00	17.744.201.373,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Puskesmas serta Rumah Sakit		90.057.736.161,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16404 Orang/bulan	16404 Orang/bulan	86.439.196.811,00	90.002.602.811,00	129.887.975.334,00	43.448.778.523,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			90.002.602.811,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.999.900,00	3.999.900,00	3.999.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			5.580.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			49.553.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi				7 jenis	7 jenis	1.457.444.635,00	1.563.265.835,00	1.750.929.233,00	293.484.598,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Puskesmas serta Rumah Sakit		1.912.266.950,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	11.772.000,00	11.772.000,00	11.772.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			40.455.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	20.962.700,00	20.962.700,00	20.962.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			32.712.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	1.089.323.935,00	1.094.345.135,00	1.179.393.533,00	90.069.598,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	29.060.000,00	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				170 Dokumen	170 Dokumen	40.650.000,00	40.650.000,00	60.465.000,00	19.815.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				560 Laporan	560 Laporan	265.676.000,00	366.476.000,00	449.276.000,00	183.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			481.099.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10000 Dokumen	10000 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang yang diadakan				20 unit	20 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Puskesmas serta Rumah Sakit		561.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			561.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan				12 bulan	12 bulan	399.485.207,00	399.485.207,00	457.468.976,00	57.983.769,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Puskesmas serta Rumah Sakit		399.083.047,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	399.485.207,00	399.485.207,00	457.468.976,00	57.983.769,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			399.083.047,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara				47 unit	47 unit	237.984.739,00	237.984.739,00	318.454.924,00	80.470.185,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Puskesmas serta Rumah Sakit		288.954.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	143.338.140,00	143.338.140,00	203.829.585,00	60.491.445,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			134.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30.460.000,00	30.460.000,00	30.460.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	64.186.599,00	64.186.599,00	84.165.339,00	19.978.740,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			129.554.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Ibu (per 10.000 kelahiran hidup)				91 Orang	91 Orang	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar				70 %	70 %	8.571.921.057,00	41.539.572.934,00	47.559.234.704,00	38.987.313.647,00			-	-	Puskesmas, Rumah Sakit, dan Masyarakat		23.897.510.121,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	-	0,00	11.364.975.978,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			10.512.556.311,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0006	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	30 Unit	0,00	12.238.950.000,00	12.326.450.000,00	12.326.450.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0007	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	-	0,00	170.000.000,00	229.385.000,00	229.385.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				-	1 Unit	0,00	0,00	317.364.410,00	317.364.410,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 0	0,00	1.408.175.000,00	1.385.305.160,00	1.385.305.160,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	2.499.999.992,00	10.285.550.891,00	12.922.550.891,00	10.422.550.899,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			11.059.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	30 Unit	0,00	0,00	58.960.000,00	58.960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			58.960.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	762.999.800,00	762.999.800,00	12.127.975.778,00	11.364.975.978,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Sambakati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	4.999.968.465,00	4.999.968.465,00	7.594.301.065,00	2.594.332.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	100 Keluarga	268.984.400,00	268.984.400,00	268.984.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan</i>				3 Layanan	3 Layanan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.036.570.210,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				12 Paket	12 Paket	39.968.400,00	39.968.400,00	227.958.000,00	187.989.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			230.423.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna</i>				10 %	10 %	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas, Rumah Sakit, dan Masyarakat		103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				14194 Orang	14194 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			382.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				13549 Orang	13549 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			534.760.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				13458 Orang	13458 Orang	0,00	0,00	109.405.935,00	109.405.935,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			29.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53238 Orang	53238 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			24.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150000 Orang	150000 Orang	39.801.600,00	39.801.600,00	39.801.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				158096 Orang	158096 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				184276 Orang	184276 Orang	14.220.800,00	14.220.800,00	14.220.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			12.099.819,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				302719 Orang	302719 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11998 Orang	11998 Orang	49.979.100,00	49.979.100,00	858.127.225,00	808.148.125,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1868 Orang	1868 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6250 Orang	6250 Orang	11.898.000,00	11.898.000,00	11.898.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			13.748.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18782 Orang	18782 Orang	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			545.736.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.280.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	26.172.000,00	26.172.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			209.190.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0016			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6.769.700,00	6.769.700,00	6.769.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.584.300,00	99.084.300,00	1.259.534.300,00	1.247.950.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	177.568.000,00	177.568.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			278.606.009,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			29.528.550,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.950.000,00	30.950.000,00	247.205.000,00	216.255.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			263.702.995,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	73.845.800,00	73.845.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0024		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			69.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	30.012.000,00	30.012.000,00	1.092.778.880,00	1.062.766.880,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			265.115.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	73.981.244.000,00	78.805.390.100,00	88.334.434.100,00	14.353.190.100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			83.517.651.578,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	12 Paket	0,00	0,00	45.625.000,00	45.625.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	59.937.300,00	59.937.300,00	59.937.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	2.046.035.917,00	2.046.035.917,00	5.809.225.668,00	3.763.189.751,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			4.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	177.493.000,00	177.492.900,00	177.492.900,00	-100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			274.418.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	52.728.453,00	52.728.453,00	68.025.285,00	15.296.832,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			92.775.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	39.999.900,00	39.999.700,00	39.999.700,00	-200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			52.900.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	59.957.500,00	56.645.500,00	56.636.000,00	-3.321.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			97.022.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	19.126.400,00	19.126.400,00	19.126.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			131.077.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			41.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2075 Orang	2075 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				59 Orang	59 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	0,00	74.054.460,00	74.054.460,00	Kab. Sumenep, Ambuntun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			74.054.460,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0043		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	79.999.800,00	79.999.800,00	79.999.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	4 Dokumen	149.998.400,00	146.598.400,00	709.380.400,00	559.382.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK				80 %	80 %	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	96.114.800,00	96.114.800,00	96.114.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna				4 RS	4 RS	20.000.000,00	20.000.000,00	179.736.000,00	159.736.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Rumah Sakit		712.003.316,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	159.736.000,00	159.736.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			679.003.316,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan				1: 690 rasio	1: 690 rasio	13.892.072.100,00	13.877.354.400,00	15.374.447.600,00	375.671.100,00							14.267.743.200,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				75 %	75 %	15.220.700,00	12.897.900,00	12.897.900,00	-2.322.800,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Kesehatan		42.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.220.700,00	12.897.900,00	12.897.900,00	-2.322.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			42.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan				100 %	100 %	13.530.631.600,00	13.527.457.900,00	13.554.301.100,00	23.669.500,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Tenaga Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit		13.725.243.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	71.101.600,00	67.927.900,00	67.927.900,00	-3.173.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				391 Orang	391 Orang	13.459.530.000,00	13.459.530.000,00	13.341.630.000,00	-117.900.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			13.555.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	144.743.200,00	144.743.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan			144.743.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM				100 %	100 %	346.219.800,00	336.998.600,00	1.807.248.600,00	1.461.028.800,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan	Puskesmas, Rumah Sakit, dan Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				120 Orang	120 Orang	346.219.800,00	336.998.600,00	1.807.248.600,00	1.461.028.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi				85 %	85 %	26.645.700,00	26.645.700,00	26.645.700,00	54.957.550,00							81.603.250,00	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan				10 rekomen dasi	10 rekomen dasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan	Industri Rumah Tangga dan Masyarakat		27.013.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan			27.013.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan				10 rekomen dasi	10 rekomen dasi	11.458.400,00	11.458.400,00	11.458.400,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan Kesehatan	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				2 Dokumen	2 Dokumen	11.458.400,00	11.458.400,00	11.458.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang Mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene				30 %	30 %	5.187.300,00	5.187.300,00	5.187.300,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.05.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.187.300,00	5.187.300,00	5.187.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			18.589.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			18.589.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga PURI				5,81 %	5,81 %	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor				4 keg	4 keg	336.329.200,00	336.329.200,00	240.178.700,00	-96.150.500,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		1.328.613.275,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kampanye dan Pemberdayaan Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	336.329.200,00	336.329.200,00	240.178.700,00	-96.150.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.328.613.275,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.01.0002			Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman																	
			Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	51.625.600,00	51.625.600,00	51.625.600,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	51.625.600,00	51.625.600,00	51.625.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.02.0002			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21 /jumlah penduduk	21 /jumlah penduduk	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	109.862.000,00	109.862.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							49.995.256,00	10.829.561.647,00	10.889.561.647,00	10.839.566.391,00							17.439.823.456,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							49.995.256,00	10.829.561.647,00	10.889.561.647,00	10.839.566.391,00							17.439.823.456,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Mandiri				-	10 %	8.332.400,00	137.932.400,00	197.932.400,00	686.815.600,00							695.148.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang disusun				-	2 kebijakan	8.332.400,00	8.332.400,00	68.332.400,00	60.000.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.332.400,00	8.332.400,00	68.332.400,00	60.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPK				16 kecamatan	16 kecamatan	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		595.148.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			65.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				26 Laporan	26 Laporan	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesehatan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			265.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				130 Dokumen	130 Dokumen	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			165.048.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				67 Unit	67 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)				70.69 %	70.69 %	8.880.000,00	4.893.446.491,00	4.893.446.491,00	6.967.973.712,00							6.976.853.712,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana				45 %	45 %	8.880.000,00	3.646.402.040,00	3.646.402.040,00	3.637.522.040,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		4.112.821.382,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				224 Laporan	224 Laporan	0,00	70.578.000,00	70.578.000,00	70.578.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				26 Laporan	26 Laporan	0,00	1.501.599.840,00	1.501.599.840,00	1.501.599.840,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.251.899.722,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	5 Laporan	0,00	579.149.800,00	579.149.800,00	579.149.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			518.627.560,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	133.794.600,00	133.794.600,00	133.794.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				-	-	0,00	1.202.400.000,00	1.202.400.000,00	1.202.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			133.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	8.880.000,00	158.879.800,00	158.879.800,00	149.999.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			43.494.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga PKB/ PLKB dan Kader IMP yang aktif				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB		1.603.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.0004	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				334 Orang	334 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			801.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				5 Organisasi	5 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			801.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregister yang difasilitasi				100 %	100 %	0,00	566.694.451,00	566.694.451,00	566.694.451,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang teregister		1.235.832.330,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				35 Laporan	35 Laporan	0,00	53.999.900,00	53.999.900,00	53.999.900,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			36.944.325,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1152 Orang	1152 Orang	0,00	479.194.751,00	479.194.751,00	479.194.751,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			561.455.101,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			583.148.541,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	0,00	33.499.800,00	33.499.800,00	33.499.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			29.221.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				90 Orang	90 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			25.062.863,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	680.350.000,00	680.350.000,00	680.350.000,00			-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	-	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	-	0,00	675.250.000,00	675.250.000,00	675.250.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga				80 %	80 %	32.782.856,00	5.798.182.756,00	5.798.182.756,00	9.735.038.888,00							9.767.821.744,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif				100 %	100 %	32.782.856,00	342.382.756,00	342.382.756,00	309.599.900,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Keluarga yang mempunyai balita, remaja, lansia dan UPPKA ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)		6.811.439.744,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	32.782.856,00	32.782.856,00	32.782.856,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		184.059.744,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	-	0,00	9.599.900,00	9.599.900,00	9.599.900,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		506.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				2598 Orang	2598 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		6.111.380.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	5.455.800.000,00	5.455.800.000,00	5.455.800.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		2.956.382.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				6 laporan	6 laporan	0,00	2.598.000.000,00	2.598.000.000,00	2.598.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		98.582.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	-	0,00	2.857.800.000,00	2.857.800.000,00	2.857.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.857.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>RSUD H. MOH. ANWAR</b>							<b>0,00</b>	<b>177.309.186.734,00</b>	<b>160.556.234.752,00</b>	<b>160.556.234.752,00</b>							<b>59.314.865.000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>0,00</b>	<b>177.309.186.734,00</b>	<b>160.556.234.752,00</b>	<b>160.556.234.752,00</b>							<b>59.314.865.000,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>0,00</b>	<b>177.309.186.734,00</b>	<b>160.556.234.752,00</b>	<b>160.556.234.752,00</b>							<b>59.314.865.000,00</b>	
1.	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-				-	-	<b>0,00</b>	<b>148.904.577.150,00</b>	<b>131.151.625.168,00</b>	<b>29.000.000.000,00</b>							<b>29.000.000.000,00</b>	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	25.704.577.150,00	6.603.239,00	6.603.239,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			29.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				418 Orang/bulan	418 Orang/bulan	0,00	25.704.577.150,00	6.603.239,00	6.603.239,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			29.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai hasil survei akreditasi oleh KARS				100 %	100 %	0,00	123.200.000.000,00	131.145.021.929,00	131.145.021.929,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	123.200.000.000,00	131.145.021.929,00	131.145.021.929,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-				-	-	<b>0,00</b>	<b>28.404.609.584,00</b>	<b>29.404.609.584,00</b>	<b>30.314.865.000,00</b>							<b>30.314.865.000,00</b>	
	1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar				-	70 %	0,00	28.404.609.584,00	29.404.609.584,00	29.404.609.584,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			30.314.865.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	135 Unit	0,00	26.750.840.000,00	27.750.840.000,00	27.750.840.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			27.750.840.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	0 0	0,00	1.653.769.584,00	1.653.769.584,00	1.653.769.584,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			2.564.025.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS PRAGAAN</b>								<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>						<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.031.474.681,00	6.935.979.498,00	6.568.141.348,00	1.536.666.667,00	Kab. Sumenep, Pragaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			4.734.768.434,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	295.440.000,00	295.440.000,00	Kab. Sumenep, Pragaan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.170.000,00	9.170.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	230.080.000,00	230.080.000,00	Kab. Sumenep, Pragaan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	226.424.000,00	226.424.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	2.075 Orang	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	19.180.000,00	19.180.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	115.035.000,00	115.035.000,00	Kab. Sumenep, Pragaan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.151.000,00	5.151.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS BLUTO							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.766.114.249,00	4.892.065.981,00	4.988.178.413,00	1.222.064.164,00	Kab. Sumenep, Bluto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			4.053.709.686,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17980 Orang	0,00	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17876 Orang	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	83.840.000,00	83.840.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	224.890.000,00	224.890.000,00	Kab. Sumenep, Bluto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.870.000,00	12.870.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	235.760.000,00	235.760.000,00	Kab. Sumenep, Bluto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	261.292.000,00	261.292.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	171.600.000,00	171.600.000,00	Kab. Sumenep, Bluto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS KALIANGET</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD			1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.993.121.275,00	3.654.177.976,00	3.806.385.547,00	813.264.272,00	Kab. Sumenep, Kaliangget, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.928.245.712,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17980 Orang	0,00	0,00	41.580.000,00	41.580.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17876 Orang	0,00	0,00	16.310.000,00	16.310.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	224.718.000,00	224.718.000,00	Kab. Sumenep, Kaliangget, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	16.960.000,00	16.960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.575.000,00	15.575.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	144.400.000,00	144.400.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	164.197.000,00	164.197.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.330.000,00	12.330.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	12 Dokumen	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.795.000,00	4.795.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS TALANGO							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.683.818.687,00	3.365.339.853,00	4.132.313.688,00	1.448.495.001,00	Kab. Sumenep, Talango, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.723.943.054,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	27.280.000,00	27.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	229.380.000,00	229.380.000,00	Kab. Sumenep, Talango, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	16.480.000,00	16.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	17.320.000,00	17.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	119.280.000,00	119.280.000,00	Kab. Sumenep, Talango, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	170.683.000,00	170.683.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	2.075 Orang	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	21.280.000,00	21.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	119.440.000,00	119.440.000,00	Kab. Sumenep, Talango, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.855.000,00	7.855.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS BATUAN</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.347.258.460,00	1.606.741.363,00	2.812.841.271,00	1.465.582.811,00	Kab. Sumenep, Batuan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.108.433.488,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	20.160.000,00	20.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	135.118.000,00	135.118.000,00	Kab. Sumenep, Batuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	22.080.000,00	22.080.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	137.600.000,00	137.600.000,00	Kab. Sumenep, Batuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	137.815.000,00	137.815.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	18.630.000,00	18.630.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	92.160.000,00	92.160.000,00	Kab. Sumenep, Batuan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
							-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.047.000,00	4.047.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
							-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS PANDIAN</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.561.396.377,00	1.889.333.104,00	1.833.462.249,00	272.065.872,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.409.891.526,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	136.268.000,00	136.268.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	143.360.000,00	143.360.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	149.255.000,00	149.255.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	99.280.000,00	99.280.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	33.270.000,00	33.270.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS RUBARU</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.843.659.594,00	3.439.151.819,00	3.617.127.612,00	773.468.018,00	Kab. Sumenep, Rubaru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.784.691.882,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	28.480.000,00	28.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	251.912.000,00	251.912.000,00	Kab. Sumenep, Rubaru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	17.790.000,00	17.790.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	134.960.000,00	134.960.000,00	Kab. Sumenep, Rubaru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	193.980.000,00	193.980.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.470.000,00	8.470.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	109.200.000,00	109.200.000,00	Kab. Sumenep, Rubaru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS LEGUNG																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.526.352.407,00	1.832.796.895,00	2.018.194.619,00	491.842.212,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.395.013.658,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	23.120.000,00	23.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	7.644.000,00	7.644.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	213.556.000,00	213.556.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.660.000,00	11.660.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	134.334.000,00	134.334.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.130.000,00	4.130.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	91.620.000,00	91.620.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	-							-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS DASUK							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.437.259.470,00	2.810.213.142,00	2.946.522.715,00	509.263.245,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.188.111.943,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	17980 Orang	0,00	0,00	55.800.000,00	55.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					-	17876 Orang	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	16.462 Orang	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					-	0 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-				0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	279.086.000,00	279.086.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	21.510.000,00	21.510.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	180.080.000,00	180.080.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	216.462.000,00	216.462.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	31.230.000,00	31.230.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	80.640.000,00	80.640.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.425.000,00	11.425.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS MANDING</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.133.907.709,00	2.724.570.459,00	3.054.616.418,00	920.708.709,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.990.897.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17980 Orang	0,00	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17876 Orang	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	42.240.000,00	42.240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	299.726.000,00	299.726.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	23.980.000,00	23.980.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	155.760.000,00	155.760.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	186.594.000,00	186.594.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	16.640.000,00	16.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	130.180.000,00	130.180.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS MONCEK																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.098.472.274,00	2.561.859.236,00	2.961.826.296,00	863.354.022,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.197.059.383,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	57.760.000,00	57.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	154.772.000,00	154.772.000,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	10.720.000,00	10.720.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	163.520.000,00	163.520.000,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	179.159.000,00	179.159.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	96.880.000,00	96.880.000,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.478.000,00	6.478.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS LENTENG</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	1. 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.430.805.773,00	3.063.430.525,00	3.600.119.616,00	1.169.313.843,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.442.053.682,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17980 Orang	0,00	0,00	40.480.000,00	40.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17876 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	43.520.000,00	43.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	137.624.000,00	137.624.000,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	161.840.000,00	161.840.000,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	179.059.000,00	179.059.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	21.360.000,00	21.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	119.200.000,00	119.200.000,00	Kab. Sumenep, Lenteng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS BATANG- BATANG																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.209.572.061,00	3.883.655.918,00	3.412.324.794,00	202.752.733,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.038.505.652,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	50.220.000,00	50.220.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	35.840.000,00	35.840.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	139.204.000,00	139.204.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.680.000,00	15.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	133.920.000,00	133.920.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	168.578.000,00	168.578.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	101.520.000,00	101.520.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	-							-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.216.000,00	3.216.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SARONGGI							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.820.316.361,00	5.075.465.118,00	4.945.094.642,00	2.124.778.281,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.727.105.878,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	17980 Orang	0,00	0,00	20.010.000,00	20.010.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					-	17876 Orang	0,00	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	0,00	56.640.000,00	56.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	16.462 Orang	0,00	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					-	0 Orang	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	136.832.000,00	136.832.000,00	Kab. Sumenep, Saronggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	30.940.000,00	30.940.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	196.160.000,00	196.160.000,00	Kab. Sumenep, Saronggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	196.982.000,00	196.982.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	89.670.000,00	89.670.000,00	Kab. Sumenep, Batang Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
			-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.183.000,00	12.183.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
			-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS PAMOLOKAN</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.216.722.358,00	2.453.328.933,00	2.998.112.361,00	781.390.003,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.037.485.689,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17980 Orang	0,00	0,00	33.480.000,00	33.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17876 Orang	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	15.680.000,00	15.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	149.830.000,00	149.830.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.280.000,00	11.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	27.160.000,00	27.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	190.720.000,00	190.720.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	178.018.000,00	178.018.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	139.840.000,00	139.840.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
			-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
			-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS DUNGKEK</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.674.503.895,00	3.401.013.757,00	4.182.377.350,00	1.507.873.455,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.585.987.601,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	355.100.000,00	355.100.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	26.710.000,00	26.710.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	223.963.000,00	223.963.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	190.500.000,00	190.500.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.415.000,00	4.415.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBUNTEN									392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00								
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00								
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.660.892.721,00	5.135.336.725,00	6.012.288.781,00	2.351.396.060,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.349.401.550,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	57.750.000,00	57.750.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	41.040.000,00	41.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	256.791.000,00	256.791.000,00	Kab. Sumenep, Ambuntan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.360.000,00	11.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.275.000,00	15.275.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	213.120.000,00	213.120.000,00	Kab. Sumenep, Ambuntan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	231.424.000,00	231.424.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	100.340.000,00	100.340.000,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS PASONGSONGAN																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.840.187.452,00	4.914.491.046,00	5.488.517.774,00	1.648.330.322,00	Kab. Sumenep, Pasongsongan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.633.894.032,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	79.040.000,00	79.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	203.970.000,00	203.970.000,00	Kab. Sumenep, Pasongsongan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	22.060.000,00	22.060.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	173.600.000,00	173.600.000,00	Kab. Sumenep, Pasongsongan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	194.110.000,00	194.110.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	88.200.000,00	88.200.000,00	Kab. Sumenep, Pasongsongan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	-							-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS BATU PUTIH							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.970.103.010,00	3.699.123.231,00	4.500.621.164,00	1.530.518.154,00	Kab. Sumenep, Batuputih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.122.846.978,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	17980 Orang	0,00	0,00	57.120.000,00	57.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					-	17876 Orang	0,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	0,00	35.520.000,00	35.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	16.462 Orang	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0,00	0,00	153.968.000,00	153.968.000,00	Kab. Sumenep, Batuputih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.760.000,00	7.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.520.000,00	6.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	215.200.000,00	215.200.000,00	Kab. Sumenep, Batuputih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	216.502.000,00	216.502.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.720.000,00	13.720.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	129.280.000,00	129.280.000,00	Kab. Sumenep, Batuputih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS GAPURA							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.979.383.742,00	3.541.639.499,00	3.993.493.928,00	1.014.110.186,00	Kab. Sumenep, Gapura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.707.657.851,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	54.060.000,00	54.060.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	32.960.000,00	32.960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	28.320.000,00	28.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	183.200.000,00	183.200.000,00	Kab. Sumenep, Gapura, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	215.680.000,00	215.680.000,00	Kab. Sumenep, Gapura, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	221.923.000,00	221.923.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	13.680.000,00	13.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	125.580.000,00	125.580.000,00	Kab. Sumenep, Gapura, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS GULUK-GULUK							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.804.063.659,00	4.559.889.132,00	5.061.934.183,00	1.257.870.524,00	Kab. Sumenep, Guluk-Guluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.676.812.660,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17980 Orang	0,00	0,00	51.480.000,00	51.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	17876 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 Orang	0,00	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	16.462 Orang	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	226.025.000,00	226.025.000,00	Kab. Sumenep, Guluk-Guluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	16.320.000,00	16.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	202.800.000,00	202.800.000,00	Kab. Sumenep, Guluk-Guluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	204.002.000,00	204.002.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Sumenep, Guluk-Guluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.206.000,00	5.206.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		<b>PUSKESMAS GANDING</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>		
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>		
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>		
	1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD			1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.895.183.193,00	3.780.836.207,00	4.571.874.710,00	1.676.691.517,00	Kab. Sumenep, Ganding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.065.834.501,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	64.680.000,00	64.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	21.680.000,00	21.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	153.268.000,00	153.268.000,00	Kab. Sumenep, Ganding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	27.445.000,00	27.445.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	151.280.000,00	151.280.000,00	Kab. Sumenep, Ganding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	208.942.000,00	208.942.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.040.000,00	12.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	0,00	109.760.000,00	109.760.000,00	Kab. Sumenep, Ganding, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS RAAS																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.463.027.800,00	6.155.136.908,00	6.458.957.186,00	2.995.929.386,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.880.287.625,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	41.580.000,00	41.580.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	216.590.000,00	216.590.000,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.640.000,00	12.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	163.520.000,00	163.520.000,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	156.556.000,00	156.556.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	132.360.000,00	132.360.000,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	-							-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS GILIGENTING							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.668.041.271,00	3.916.941.188,00	4.369.487.471,00	1.701.446.200,00	Kab. Sumenep, Giligenting, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.584.093.501,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	17980 Orang	0,00	0,00	35.520.000,00	35.520.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					-	17876 Orang	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	0,00	22.080.000,00	22.080.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	16.462 Orang	0,00	0,00	10.720.000,00	10.720.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0,00	0,00	127.584.000,00	127.584.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	159.840.000,00	159.840.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	152.237.000,00	152.237.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	12 Orang	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	109.760.000,00	109.760.000,00	Kab. Sumenep, GiliGinting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
			-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-	0,00	0,00	12.035.000,00	12.035.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
			-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS NONGGUNONG									392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00								
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00								
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00								
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.395.066.046,00	2.048.005.231,00	1.915.584.167,00	520.518.121,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			1.425.734.786,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	65.760.000,00	65.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	16.640.000,00	16.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	226.540.000,00	226.540.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	20.820.000,00	20.820.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	111.920.000,00	111.920.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	149.185.000,00	149.185.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	85.600.000,00	85.600.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	21.320.000,00	21.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS GAYAM							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.645.516.714,00	6.081.729.761,00	6.019.007.199,00	2.373.490.485,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.669.918.216,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	30.560.000,00	30.560.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	108.952.000,00	108.952.000,00	Kab. Sumenep, Gayam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.590.000,00	15.590.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Sumenep, Gayam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	175.559.000,00	175.559.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	Kab. Sumenep, Gayam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS ARJASA							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.637.564.078,00	9.174.333.564,00	8.857.761.215,00	2.220.197.137,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			6.758.509.624,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	70.680.000,00	70.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	41.280.000,00	41.280.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	21.680.000,00	21.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	209.618.000,00	209.618.000,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	211.280.000,00	211.280.000,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	0,00	253.806.000,00	253.806.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	12 Laporan	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	31.920.000,00	31.920.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	178.180.000,00	178.180.000,00	Kab. Sumenep, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS KANGAYAN																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.168.944.880,00	3.050.111.290,00	2.792.435.465,00	623.490.585,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.168.663.240,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	6.435.000,00	6.435.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	16.640.000,00	16.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	215.840.000,00	215.840.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	11.360.000,00	11.360.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	122.490.000,00	122.490.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	164.217.000,00	164.217.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	2.075 Orang	0,00	0,00	27.840.000,00	27.840.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					-	0 Orang	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	0,00	127.600.000,00	127.600.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	-							-					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PUSKESMAS SAPEKEN							392.238.533.341,00	361.820.476.483,00	461.458.285.245,00	69.219.751.904,00							342.681.831.448,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							392.188.538.085,00	350.990.914.836,00	450.568.723.598,00	58.380.185.513,00							325.242.007.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.645.023.054,00	8.279.320.926,00	8.541.153.286,00	2.896.130.232,00	Kab. Sumenep, Sapeken, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			5.673.894.607,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	17980 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					-	17876 Orang	0,00	0,00	22.320.000,00	22.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	0,00	25.440.000,00	25.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	16.462 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					-	0 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	0,00	166.324.000,00	166.324.000,00	Kab. Sumenep, Sapeken, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	0,00	154.560.000,00	154.560.000,00	Kab. Sumenep, Sapeken, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	161.059.000,00	161.059.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	147.840.000,00	147.840.000,00	Kab. Sumenep, Sapeken, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	66.286.000,00	66.286.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PUSKESMAS MASALEMBU</b>							<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>392.188.538.085,00</b>	<b>350.990.914.836,00</b>	<b>450.568.723.598,00</b>	<b>58.380.185.513,00</b>							<b>325.242.007.992,00</b>	
	1. 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				91.3 %	91.3 %	292.284.003.458,00	213.228.512.232,00	262.549.319.241,00	-110.875.358.685,00							181.408.644.773,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD				1 faskes	1 faskes	177.933.715.916,00	120.916.132.340,00	130.025.449.474,00	-47.908.266.442,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan Masyarakat		88.111.065.671,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.185.962.665,00	2.990.114.055,00	3.564.694.006,00	1.378.731.341,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.047.611.532,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	85.597.862.027,00	123.470.447.704,00	172.098.284.757,00	42.353.568.621,00							127.951.430.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.909.826.170,00	81.814.759.970,00	124.099.109.253,00	47.189.283.083,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			103.331.917.211,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17980 Orang	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17876 Orang	0,00	0,00	9.830.000,00	9.830.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	25.440.000,00	25.440.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	16.462 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	235.800.000,00	235.800.000,00	Kab. Sumenep, Masalembu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.040.000,00	15.040.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	17.190.000,00	17.190.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	0,00	109.280.000,00	109.280.000,00	Kab. Sumenep, Masalembu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	0,00	125.533.000,00	125.533.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2.075 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	87.840.000,00	87.840.000,00	Kab. Sumenep, Masalembu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	96.114.800,00	96.114.800,00	260.204.800,00	164.090.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.731.000,00	4.731.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	387.954.800,00	387.954.800,00	520.026.300,00	1.144.631.321,00							1.532.586.121,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	228.222.000,00	228.222.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			203.972.846,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>J U M L A H</b>									<b>392.238.533.341,00</b>	<b>361.820.476.483,00</b>	<b>461.458.285.245,00</b>	<b>69.219.751.904,00</b>							<b>342.681.831.448,00</b>	

## BAB V P E N U T U P

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tidak terlepas Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB yang telah disusun untuk periode 2021-2026, serta dari Visi dan Misi Kabupaten Sumenep. Renja ini disusun dengan tujuan untuk mengoperasionalkan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB dan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sumenep untuk tahun 2024. Renja Perubahan ini disusun berdasarkan pagu indikatif sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Tahun 2021 - 2026 dalam rangka pencapaian Kinerja sesuai dengan indikator SPM dan indikator ttdiusulkan dalam renja ini dengan Plafond Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan kesehatan sesuai dengan target pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya semua yang terlibat dalam penyusunan Renja ini dapat disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di kabupaten Sumenep.

Sumenep, Mei 2024

KEPALA DINAS

KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
SUMENEP



Dr. ELLYA FARDASAH, M. Kes  
Pembina

NIP. 197706022005012010

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERUBAHAN  
TAHUN 2024**



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dimana dalam proses penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Renja OPD dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah disusun mengacu pada target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026, Rencana Strategis BRIDA 2021-2026 serta Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Perubahan BRIDA Kabupaten Sumenep adalah untuk merumuskan rencana kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **b. Tujuan**

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja BRIDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB. II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
  - 2.1 Faktor Pendorong
  - 2.2 Faktor Penghambat
  - 2.3 Tindak Lanjut
- BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB. IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.**

Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep (RENJA PERUBAHAN) adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BRIDA. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) BRIDA Kabupaten Sumenep menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah dicapai pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Secara umum pada tahun 2024, pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan hingga triwulan II program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja BRIDA tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Pelaksanaan Renja Perubahan BRIDA Kabupaten Sumenep dilakukan kedalam 2 Program dan 17 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,
- sebagai berikut:

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian kinerja BRIDA hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan merupakan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja BRIDA tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1 capaian kinerja tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	21,58	21,58
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.2. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	35	35

Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 merupakan pencapaian sampai dengan Triwulan II dimana untuk memenuhi target kinerja sampai saat ini masih dalam proses bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pada target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian target indikator BRIDA Kabupaten Sumenep tahun 2024 dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 21,25 % dari target yang direncanakan mengindikasikan bahwa BRIDA Kabupaten Sumenep didalam melakukan Peningkatan Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan masih dalam proses berlangsung sesuai dengan perencanaan awal sehingga dokumen perencanaan yang telah disusun semakin terarah dan konsisten serta tetap melihat kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu inovasi dan koordinasi sangat dibutuhkan didalam menyempurnakan proses dan pola penyusunan dokumen perencanaan sehingga kedepan diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih sempurna dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan Renja Perubahan Renja BRIDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilakukan kedalam 2 Program dan 11 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Adapun rincian tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada table Tabel E-81 berikut ini :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA PERUBAHAN BRIDA KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13 + 7		16 = 15/6 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	8.504.777.794	100	-	100	3.095.345.522	10	191.182.631	25	679.219.443	0	-	0	-	35	870.402.074	35,00	28,12	135	870.402.074	135	10,23	BRIDA
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	12	35.028.520	-	-	12	8.986.000	5	1.069.000	3	240.000	0	-	0	-	8	1.309.000	66,67	14,57	8	1.309.000	66,67	3,74	BRIDA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu			-	-	1	1.868.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu			-	-	1	991.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu			-	-	1	490.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu			-	-	1	1.770.500	0	740.000	0	240.000	0	-	0	-	0	980.000	0,00	55,35	0	980.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu			-	-	1	420.600	0	156.000	0	-	0	-	0	-	0	156.000	0,00	37,09	0	156.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu			-	-	3	1.450.800	3	50.000	0	-	0	-	0	-	3	50.000	100,00	3,45	3	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu			-	-	4	1.993.500	1	123.000	0	-	0	-	0	-	2	123.000	50,00	6,17	2	123.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	3	6.986.275.218	-	-	3	1.812.041.057	1	182.337.631	1	498.176.384	0	-	0	-	1	680.514.015	33,33	37,56	1	680.514.015	33,33	9,74	BRIDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar			-	-	13	1.808.867.457	10	182.337.631	10	498.176.384	0	-	0	-	20	680.514.015	153,85	37,62	20	680.514.015	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Penang gung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
				13 = (9+10+11+12)																14 = 13/8x100%		15 = 13 +7		16 = 15/6 x 100%			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun disusun tepat waktu			-	-	1	1.976.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran disusun tepat waktu			-	-	2	1.197.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA			
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang Disiplin</b>	<b>10</b>	<b>70.671.810</b>	-	-	<b>13</b>	<b>21.351.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BRIDA</b>			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Setelan Seragam Olahraga Pria Wanita Muslimah			-	-	1	6.951.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek			-	-	1	14.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA			
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi umum Aparatur</b>	<b>5</b>	<b>610.785.120</b>	-	-	<b>5</b>	<b>301.821.700</b>	<b>2</b>	<b>7.776.000</b>	<b>2</b>	<b>38.648.380</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>46.422.380</b>	<b>80,00</b>	<b>15,38</b>	<b>4</b>	<b>46.422.380</b>	<b>80,00</b>	<b>7,60</b>	<b>BRIDA</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	3		-	-	1	10.004.500	0	-	1	4.610.500	0	-	0	-	1	4.610.500	100,00	46,08	1	4.610.500	33,33	#DIV/0!	BRIDA	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	9		-	-	9	21.468.600	0	-	3	2.428.000	0	-	0	-	3	2.428.000	33,33	11,31	3	2.428.000	33,33	#DIV/0!	BRIDA	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	7		-	-	7	114.063.400	1	4.536.000	2	6.610.500	0	-	0	-	2	11.145.500	28,57	9,77	2	11.145.500	28,57	#DIV/0!	BRIDA	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan	6		-	-	4	10.000.000	0	-	1	3.600.000	0	-	0	-	1	3.600.000	25,00	36,00	1	3.600.000	16,87	#DIV/0!	BRIDA	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang disediakan	15		-	-	15	88.785.200	0	-	4	2.800.000	0	-	0	-	4	2.800.000	26,67	3,15	4	2.800.000	26,67	#DIV/0!	BRIDA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	25		-	-	15	49.73.6000	3	3.240.000	3	11.597.380	0	-	0	-	6	14.837.380	40,00	29,83	6	14.837.380	24,00	#DIV/0!	BRIDA	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	4		-	-	1	7.764.000	0	-	1	7.000.000	0	-	0	-	1	7.000.000	100,00	90,16	1	7.000.000	25,00	#DIV/0!	BRIDA	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13 +7		16 = 15/6 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli	2	280.507.381	-	-	2	425.657.013	0	-	2	88.358.000	0	-	0	-	2	88.358.000	100,00	20,76	2	88.358.000	100,00	31,50	BRIDA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200		-	-	140	425.657.013	0	-	15	88.358.000	0	-	0	-	15	88.358.000	10,71	20,76	15	88.358.000	7,50	#DIV/0!	BRIDA
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	3	277.911.745	-	-	3	208.215.130	0	-	3	30.255.679	0	-	0	-	3	30.255.679	100,00	14,53	3	30.255.679	100,00	10,89	BRIDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar			-	-	3	208.215.130	0	-	3	30.255.679	0	-	0	-	3	30.255.679	100,00	14,53	3	30.255.679	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	3	243.598.000	-	-	1	317.273.622	0	-	7	23.543.000	0	-	0	-	7	23.543.000	33,33	7,42	7	23.543.000	33,33	9,66	BRIDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10		-	-	7	91.494.000	0	-	7	23.543.000	0	-	0	-	7	23.543.000	100,00	25,73	7	23.543.000	70,00	#DIV/0!	BRIDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15		-	-	10	26.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		-	-	1	199.729.622	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	8,17	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA
4	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti	100	5.328.304,450	100	1.128.926.397	100	1.429.577.494	25	29.445.862	25	29.907.000	0	-	0	-	50	59.352.862	50,00	4,15	150	1.188.279.259	150,00	22,30	BRIDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13 +7		16 = 15/6 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	6	874.080.980	2	156.198.397	2	187.737.347	1	29.445.862	1	18.211.000	0	-	0	-	2	47.656.862	100,00	25,38	4	203.855.259	66,67	23,32	BRIDA
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	106.933.397	1	143.231.947	1	143.231.947	1	29.445.862	1	18.211.000	0	-	0	-	2	47.656.862	200,00	33,27	3	154.590.259	300,00	16,88	BRIDA
		Pengelolaan Data Kelitbitan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbitan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	1	49.265.000	1	44.505.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	49.265.000	100,00	#DIV/0!	BRIDA		
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	22	3.238.964.050	11	801.891.000	8	814.670.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	11	801.891.000	50,00	24,76	BRIDA		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6	352.530.000	3	161.682.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	6	352.530.000	75,00	85,01	BRIDA		
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	50.175.000	2	101.494.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	50.175.000	33,33	#DIV/0!	BRIDA		
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4	399.186.000	7	551.494.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	4	399.186.000	50,00	#DIV/0!	BRIDA		
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	5	539.176.400	2	150.730.000	3	251.494.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2	150.730.000	40,00	27,96	BRIDA		
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang disusun					-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BRIDA		
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	150.730.000	3	251.494.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2	150.730.000	100,00	#DIV/0!	BRIDA		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13 +7		16 = 15/6 x 100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	8	676.083.020	2	20.107.000	2	175.675.647	0	-	1	11.696.000	0	-	0	-	1	11.696.000	50,00	7,23	2	31.803.000	100,00	4,70	BRIDA
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun			1	7.564.000	1	139.805.547	0	-	1	11.696.000	0	-	0	-	1	11.696.000	100,00	8,37	1	19.260.000	100,00	#DIV/0!	BRIDA
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan			1	12.543.000	1	35.870.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	12.543.000	100,00	#DIV/0!	BRIDA
<b>rata-rata capaian kinerja (%)</b>																		<b>21,25 %</b>								
<b>Predikat kinerja</b>																		<b>Sangat Rendah</b>								

### **2.1.1 Faktor Pendorong Kinerja Pelayanan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep**

- 1) Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah
- 2) Kerjasama yang baik dengan stakeholder penelitian (perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah lainnya)
- 3) Tersedianya anggaran bidang kelitbangan yang memadai

### **2.1.2 Faktor Penghambat Kinerja Pelayanan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep**

- 1) Implementasi dan pengembangan serta pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan masih rendah
- 2) Belum terbangunnya pemahaman dan pemanfaatan hasil kelitbangan
- 3) Tindaklanjut hasil penelitian dan inovasi sebagai dasar perumusan perencanaan daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan perangkat daerah
- 4) Kurangnya tenaga ahli peneliti dan perekayasa di Kabupaten Sumenep
- 5) Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan kajian

### **2.1.3 Tindak Lanjut Dari Beberapa Permasalahan Hasil Evaluasi**

Keterkaitan permasalahan/hambatan dan solusi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BRIDA Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

No.	Permasalahan	Hambatan	Solusi/tindak lanjut
1.	Masih rendahnya pemanfaatan kajian penelitian dan pengembangan Daerah	Kurangnya tenaga ahli peneliti	Mencari tenaga kerja ahli
2.	Kurangnya sinergi kebijakan kelitbangan	Lemahnya sinergi kebijakan kelitbangan	Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang
3.	Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat	Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai	Kegiatan kelitbangan tidak hanya kebijakan tetapi implementatif

No	Permasalahan	Hambatan	Solusi/tindak lanjut
4	Tidak ada keberlanjutan Inovasi yang diciptakan pada OPD	Tidak disediakan anggaran keberlanjutan Inovasi	Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel 3.1. penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
Prioritas dan Sasaran BRIDA Kabupaten Sumenep  
Cascading Perangkat Daerah

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
6	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	6.1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	2. Nilai SAKIP	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase hasil Penelitian Kajian yang menjadi bahan kebijakan

Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengantabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	51,88

Tabel 3.1.2

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan table sebagai berikut:

Tabel 3.1.3

No	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja Perubahan diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Brida untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban terhadap tupoksi mengarah pada obyektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja BRIDA Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep, Juli 2024

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**



**BENNY IRAWAN, ST. MT.**

Pembina

197908192006041014



# RENCANA KERJA

Tahun 2024

PERUBAHAN



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Perubahan disesuaikan dengan RKPD Perubahan. Renja Perubahan memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi kepala daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*. Fungsi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep yaitu menerjemahkan dan mengoperasionalkan Renja Pemerintah Kabupaten Sumenep ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada tujuan pencapaian program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
- 13) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2021 Nomor 01)
- 16) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep;

- 17) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
- 18) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga selanjutnya dapat dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Sejalan dengan maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tersebut, maka tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2024, meliputi:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2024 dan progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep melaksanakan program dan kegiatannya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep sampai dengan triwulan II tahun 2024 (tahun berjalan) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026				
					6		7			8		9		10		11				12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas 2. Terciptanya sistem tata kelola pertanahan yang memadai 3. Meningkatkan	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.240.125.560		5.345.846.221	3.149.244.506	46.827.718		50.327.300							97.155.018		3,09%		5.443.01.239		242,98%	
		1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.240.125.560		5.345.846.221	3.149.244.506	46.827.718		50.327.300								97.155.018		3,09%		5.443.01.239		242,98%
		1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau terdampak relokasi program kabupaten/kota	100%	139.300.003	0%	-	100%	49.998.000	0%	-	0%	1.390.000	0%	-	0%	-	0%	1.390.000	0%	2,78%	0%	1.390.000	0,00%	1,00%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026			
					6		7		8		9		10		11		12			13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	a Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan	1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah yang dilakukan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10	139.300.003	0	-	10	49.998.000	0	-	0	1.390.000	0	-	0	-	0	1.390.000	0%	3%	0	1.390.000	0%	1%	
		1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10	139.300.003	0	-	1	49.998.000	0	-	0	1.390.000					0	1.390.000	0%	3%	0	1.390.000	0%	1%	
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani	75%	1.700.825.557	65%	5.108.586.071	70%	3.069.999.906	65%	46.827.718	0%	42.110.300	0%	-	0%	-	65%	88.938.018	100%	2,90%	130%	5.197.524.089	173,33%	305,59%	

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026								
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,75	1.700.825.557	1,60	5.063.157.771	1,65	3.069.999.906	1,6	46.827.718	0	42.110.300	0	-	0	-	1,6	88.938.018	97%	2,90%	3,2	5.152.095.789	182,86%	302,92%		
					1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	500	1.700.825.557	224	5.063.157.771	128	3.069.999.906	0	46.827.718	0	42.110.300	0	-	0	-	0	-	0	88.938.018	0%	2,90%	224	5.152.095.789	45%	302,92%
					1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	77,2%	400.000.000	15%	237.260.150	15,44%	29.246.600	0%	-	0%	6.827.000	0%	-	0%	-	0%	6.827.000	0%	23,34%	15%	244.087.150	19%	61,02%		
					1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	405545	400.000.000	1000	237.260.150	81109,166	29.246.600	0	-	0	6.827.000	0	-	0	-	0	6.827.000	0%	23,34%	1000	244.087.150	2%	61,02%		
					1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10	400.000.000	1	43.883.500	10	29.246.600	0	-	0	6.827.000	0	-	0	-	0	6.827.000	0%	23,34%	1	50.710.500	10%	12,68%		

## Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026												
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			227.502	203.183		46.563.546.881	58.054.718.803		6.988.628.124		16.905.598.696																23.894.226.820	41,16%		70.457.773.701	30,97%	
			2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			51.780.421.451		3.394.720.183		12.399.847.555		25.468.000		2.769.890.250																2.795.358.250	22,54%		6.190.078.433	11,95%
			2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	593.473.817	100%	240.295.600		46.930.000	0%	1.779.000	0%	4.614.750	0%	-	0%	-	0%		0%	0%							6.393.750	13,62%	100%	246.689.350	100%	41,57%
			2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kasus yang ditangani	5	593.473.817	1	240.295.600		46.930.000	0	1.779.000	0	4.614.750	0	-	0	-	0		0%	13,62%	1						6.393.750	13,62%	1	246.689.350	20%	41,57%
			2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	593.473.817	1	240.295.600		46.930.000	0	1.779.000	0	4.614.750					0		0%	13,62%	1						6.393.750	13,62%	1	246.689.350	20%	41,57%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026						
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan	100 %	50.593.473.817	45 %	3.126.564.583	92%	12.305.987.555	45 %	17.129.000	0%	2.761.383.500	0 %	-	0 %	-	45 %	2.778.512.500	49 %	22,58 %	90 %	5.905.077.083	90%	11,67%
					2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Ganti Rugi yang Diselesaikan	5	50.593.473.817	1	3.126.564.583	1	12.305.987.555	0	17.129.000	0	2.761.383.500	0	-	0	-	0	2.778.512.500	0%	22,58 %	1	5.905.077.083	20%	11,67%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	593.473.817	5	3.126.564.583	1	1.230.988.500	0	17.129.000	0	52.514.500					0	69.643.500	0,0%	5,6%	5	3.196.208.083	100%	538,56%
					5	50.000.000.000	0	-	1	11.074.999.055	0	-	0	2.708.869.000					0	2.708.869.000	0,0%	24,46%	0	2.708.869.000	0%	5,42%
					70%	593.473.817	40%	27.860.000,00	50%	46.930.000	40%	6.560.000	0%	3.892.000	0%	-	0%	-	40%	10.452.000	80%	22,27%	80%	38.312.000	114%	6,46%
					5	593.473.817	1	27.860.000,00	1	46.930.000	0	6.560.000	0	3.892.000	0%	-	0%	-	0%	10.452.000	0%	22,27%	1	38.312.000	20%	6,46%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026					
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	5	593.473.817	1	27.860.000,00	1	46.930.000	0	6.560.000	0	3.892.000					0	10.452.000	0%	22,27%	1	38.312.000	20%	6,46%		
					2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		175.721.781.732		39.663.458.213		45.654.871.248		6.963.160.124		14.135.708.446		-				21.098.868.570		46,21%		60.762.326.783		34,58%
		2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	135.434.869.377	100%	13.569.396.336	100%	16.222.613.027	25%	2.356.571.130	25%	6.113.755.249	0%	-	0%	-	50%	8.470.326.379	50%	52,21%	150%	22.039.722.715	150%	16,27%		
		2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60	238.687.699,00	12	9.621.400	12	11.977.500	4	1.022.750	1	-	0	-	0	-	5	1.022.750	42%	8,54%	17	10.644.150	28,33%	4,46%		
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	59.580.183	3	2.672.000	3	4.290.100	0	-	0	-					0	-	0%	0%	3	2.672.000	25%	4,48%		

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026				
					6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	19.936.538	1	855.000	1	909.700	0	-	0	-					0	-	0%	0%	1	855.000	20%	4,29%			
																											2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
																											2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
																											2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD																											

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026					
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15	86.001.914	4	1.192.000	4	1.278.500	4	1.022.750	0	-					4	1.022.750	100%	80,00%	8	2.214.750	53,33%	2,58%		
			2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15	20.121.988	6	2.679.900	6	2.822.900	2	-	1	-					3	-	50%	0,00%	9	2.679.900	60,00%	13,32%	
			2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	65	58.090.387.517	13	10.812.195.983	13	11.989.953.169	3	1.881.159.255	3	3.932.005.671	0	-	0	-	6	5.813.164.926	46%	48,48%	19	16.625.360.909	29,23%	28,62%	
			2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	600	57.898.462.650	114	10.783.144.483	107	11.980.274.269	107	1.881.159.255	0	3.932.005.671					107	5.813.164.926	100%	48,52%	221	16.596.309.409	36,83%	28,66%	

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	20	68.967.544	4	2.874.600	12	5.469.900	3	-	3	-					6	-	50%	0%	10	2.874.600	50%	4,17%
					20	122.957.323	1	26.176.900	2	4.209.000	0	-	1	-					1	-	50%	0,00%	2	26.176.900	10%	21,29%
					20	59.324.956	2	2.151.250	4	2.941.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	20	2.151.250	10%	3,63%
					10	53.629.450	2	2.151.250	2	2.082.500	0	-	1	-					1	-	50%	0%	3	2.151.250	30%	4,01%
					5	5.695.506	0	-	1	859.400	0	-	0	-					0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026				
					6		7		8		9		10		11		12			13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1				Barang Milik Daerah SKPD																								
					2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	5	693.076.400	2	163.762.850	2	64.143.515	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	163.762.850	40%	0%	
					2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	346.538.200	4	154.052.850	1	25.903.515	0	-	0	-				0	-	0%	0%	4	154.052.850	0%	0%
					2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	346.538.200	2	9.710.000	5	38.240.000	0	-	0	-				0	-	0%	0%	2	9.710.000	0%	0%
					2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	550	3.539.760.766	110	849.729.234	110	1.274.848.916	30	206.683.836	30	325.469.838	0	-	0	60	532.153.674	55%	41,74%	170	1.381.882.908	30,91%	39,04%
					2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	70.490.543	4	10.682.000	3	11.598.200	1	1.696.000	1	3.546.000				2	5.242.000	67%	45,2%	6	15.924.000	60%	22,59%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026																	
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%													
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9+10+11+12)	14 = 13/8x100%	15 = 13+7	16 = 15/6 x 100%	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	54.139.954	5	130.911.350	3	12.434.800	0	-	0	-					0	-	0%	0,00%	5	130.911.350	33%	241,80%
																2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25	1.398.611.350	4	323.255.800	4	848.372.500	1	140.883.600	1	171.244.500					2	312.128.100	50%	36,79%	6	635.383.900	24%	45,43%
																2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	365.072.075	3	38.832.500	4	40.020.000	1	1.500.000	1	3.535.000					2	5.035.000	50%	12,58%	5	43.867.500	100%	12,02%
																2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10	535.390.750	2	167.588.451	108	113.551.416	27	13.920.000	27	39.080.000					54	53.000.000	50%	46,67%	56	220.588.451	560%	41,20%
																2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.116.056.094	12	178.459.133	60	248.872.000	15	48.684.236	15	108.064.338					30	156.748.574	50%	62,98%	42	335.207.707	70%	30,04%
																2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	217	142.337.513	117	481.976.550	30	1.504.914.992	0	-	26	1.483.137.500	0	-	0	-	26	1.483.137.500	87%	99%	143	1.965.14.050	66%	1381%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026																	
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%													
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9+10+11+12)	14 = 13/8x100%	15 = 13+7	16 = 15/6 x 100%	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	1.423.375.130	2	376.869.000	1	1.249.930.414	0	-	1	1.248.000.000					1	1.248.000.000	100%	100%	3	1.624.869.000	43%	114%
																2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25	142.337.513	4	29.555.400	29	254.984.578	0	-	25	235.137.500					25	235.137.500	86%	92%	29	264.692.900	116%	186%
																2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2	71.264.919.490	2	657.357.247	2	884.839.645	2	167.583.531	0	235.017.205	0	-	0	-	2	402.600.736	100%	45,50%	4	1.059.957.983	200%	1,49%
																2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	70.200.727.282	24	378.754.795	24	389.570.400	6	101.381.791	6	101.704.045					12	203.085.836	50%	52,13%	36	581.840.631	15,0%	0,83%
																2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.064.192.208	1	278.602.452	60	495.269.245	15	66.201.740	15	133.313.160					30	199.514.900	50%	40,28%	31	478.117.352	620%	44,93%
																2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	32	1.406.375.036	69	592.601.822	72	488.993.390	17	100.121.758	19	138.125.035	0	-	0	-	36	238.246.793	50%	48,72%	105	830.848.615	328,13%	59,08%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026																	
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%													
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9+10+11+12)	14 = 13/8x100%	15 = 13+7	16 = 15/6 x 100%	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	884.288.412	35	392.103.514	30	377.275.490	7	93.476.758	8	78.363.785					15	171.840.543	50%	46%	50	563.944.057	50%	63,77%
																2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	237.026.418	32	55.267.000	41	36.634.400	10	6.645.000	10	6.485.000					20	13.130.000	49%	36%	52	68.397.000	104%	28,86%
																2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10	285.060.206	3	145.231.308	1	75.083.500	0	-	1	53.276.250					1	53.276.250	100%	70,96%	4	198.507.558	40%	69,64%
																2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	65%	1.249.561.048	60%	559.904.121	60%	716.383.157	60%	40.810.000	0%	357.268.900	0%	-	0%	-	60%	72.199.000	100%	10,1%	12	632.103.121	184,62%	50,59%
																		b. Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	35	17.592.653.338	30	22.860.023.751	30	19.414.075.406	30	4.379.738.619	0	5.188.032.127	0	-	0	-	30	9.893.650.646	100%	50,96%	60	32.753.674.397	171,43%	186,18%
																2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan	26	11.393.380.512	5	20.759.417.716	5	17.534.437.390	1	4.079.940.919	1	4.504.764.137	0	-	0	-	2	8.584.705.056	40%	48,96%	7	29.344.122.772	27%	257,55%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026					
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	26	6.824.037.285	13	187.658.790	64	1.693.426.623	0	11.709.000	32	564.663.144					32	576.372.144	50%	34%	45	764.030.934	173%	11,20%		
					20	4.569.343.227	44	20.571.758.926	3500	15.841.010.767	50	4.068.231.919	12	3.940.100.993					17	8.008.332.912	50%	50,55%	61	28.580.091.838	308	625,70%	47%	
					100%	1.090.117.445	80%	559.904.121	83,1%	389.686.357	18,61%	38.823.000	17,2%	33.376.000	0%	-	0%	-	36%	72.199.000	43%	18,53%	11	632.103.121	115	57,9%	8%	
					400	283.850.883	34	98.974.900	8000	102.211.857	87	25.697.000	81	24.600.000					16	50.297.000	21,11%	49,21%	51	149.271.900	12,79%	52,59%		
					400	574.013.195	20	78.700.001	4723	177.499.700	0	13.126.000	0	7.824.000					0	20.950.000	0%	11,80%	20	99.650.001	5%	17,36%		
					53	232.253.367	13	382.229.220	11	109.974.800	0	-	0	952.000					0	952.000	0%	0,87%	13	383.181.220	24,53%	164,98%		

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026																	
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%													
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (9+10+11+12)	14 = 13/8x100%	15 = 13+7	16 = 15/6 x 100%	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	150	6.014.274.566	30	1.918.641.382	30	1.869.641.116	8	299.419.200	7	681.207.990	0	-	0	-	15	980.627.190	50%	52,45%	45	2.899.268.572	30%	48,21%
																2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10	501.995.172	2	31.285.726,00	1	9.999.400	0	2.421.200	0	375.000					0	2.796.200	0%	28%	2	34.081.926	20%	7%
																2.15.02.2.06.0016	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	290	1.365.133.269	37	400.738.856	3	415.700.338	0	9.530.000	3	374.323.790					3	383.853.790	100%	92,34%	40	784.592.646	13,79%	57,47%
																2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	150	4.147.146.125	6	1.486.616.800	3	1.443.941.378	1	287.468.000	1	306.509.200					2	593.977.200	67%	41,14%	8	2.080.594.000	5,33%	50,17%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026						
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	184.998.260	1	18.517.153	10	9.996.900	0	378.500	3	2.060.000	0	-	0	-	3	2.438.500	30%	24,39%	4	20.955.653	80%	11,33%			
					2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Andalalin	58	184.998.260	6	18.517.153	12	9.996.900	3	378.500	3	2.060.000					6	2.438.500	50%	24,39%	12	20.955.653	21%	11,33%
					2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi	1285	159.443.603	245	163.447.500	255	326.696.800	65	1.987.000	60	323.892.900	0	-	0	-	125	325.879.900	49,02%	100%	370	489.327.400	28,79%	306,90%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60	159.443.603	1	163.447.500	12	326.696.800	3	1.987.000	3	323.892.900					6	325.879.900	50%	100%	7	489.327.400	11,67%	306,90%
					70%	89.872.777	60%	-	65%	5.137.515.300	60%	87.680.375	0%	2.256.974.930	0%	-	0%	-	60%	2.344.655.305	92%	45,64%	120%	2.344.655.305	171%	260,86%
					85%	21.354.825.192	70%	2.674.134.005	80%	4.164.284.358	70%	98.360.000	0%	219.677.240	0%	-	0%	-	70%	318.037.240	88%	7,64%	140%	2.992.171.245	164,71%	14,01%

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026					
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	5	89.872.777	1	-	1	5.137.515.300	0	87.680.375	0	2.256.974.930	0	-	0	-	0	2.344.655.305	0%	45,64%	1	2.344.655.305	20%	2608,86%		
					2.15.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan																					
		2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	89.872.777	0	-	6	5.137.515.300	2	87.680.375	1	2.256.974.930					3	2.344.655.305	50%	45,64%	3	2.344.655.305	60%	2608,86%		

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026						
					6		7			8		9		10		11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%		15 = 13+7		16 = 15/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	5	21.354.825.192	3	2.674.134.005	7	4.164.284.358	0	98.360.000	0	219.677.240	0	-	0	-	0	318.037.240	0%	7,64%	3	2.992.171.245	60%	14,01%			
																											2.15.03.2.12	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional
																											2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun
																											2.15.03.2.12.02	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal																											
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					229.742.328.743	51.909.393.102	61.203.963.309	7.035.455.842	16.955.925.996	-	23.991.381.838	37,33%	29,10%																
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)</b>											Rata-rata capaian kinerja (%)				37,33%	29,10%													

Renja Perubahan TA. 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kab. Sumenep

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026					
					6				7		8		9		10			11			12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x100%	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)													Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerja sama dan koordinasi yang baik																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Rencana anggaran kas untuk sebagian besar program kegiatan berada pada triwulan III dan IV																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Semua kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																										

Dari tabel di atas, dapat diketahui target kinerja banyak yang belum terealisasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya rencana anggaran kas untuk pekerjaan fisik sebagian besar ada di triwulan III, dan IV. Semua kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan. Meski begitu, tindak lanjut yang bisa dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan pihak ketiga sehingga akselerasi (percepatan) pencapaian target kinerja bisa tercapai.

Selain itu, ada beberapa evaluasi terkait adanya perubahan kegiatan yang akan diakomodir dalam perubahan anggaran dan kinerja (PAK) tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pagu anggaran belanja tagihan listrik kantor dan PJU yang disediakan sebelumnya tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.
- b. Untuk menunjang kelancaran dan keselamatan lalu lintas maka perlu dilakukan penambahan anggaran penyediaan PJU dan marka jalan pada PAK 2024.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kapal maka perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.
- d. Pagu anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) yang disediakan sebelumnya tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.
- e. Pagu anggaran belanja Perdin Luar Daerah dan Dalam Daerah yang disediakan sebelumnya tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024 untuk meningkatkan kinerja ASN.
- f. Untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.
- g. Pagu anggaran belanja tiket mudik dan balik gratis yang disediakan sebelumnya tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024 untuk kekurangan pembayaran dan penyediaan transportasi darurat.
- h. Untuk memenuhi kebutuhan lahan sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024 terkait pengadaan tanah untuk tukar guling TKD lahan KIHT.
- i. Untuk memenuhi kebutuhan PSU Perumahan Marengan Indah maka perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.
- j. Untuk memenuhi kebutuhan RTLH maka perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.

- k. Dalam rangka Penataan Parkir dan Pembinaan Juru Parkir maka perlu dilakukan penambahan anggaran pada PAK 2024.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu RPJMN pertama tahun 2005-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2024 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMN. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2023 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2024. Tema RKP tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD Tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak”.

Berdasarkan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi Jawa Timur, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Sumenep secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2024. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan *stakeholders* yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam visi-misi kepala daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan. Tujuan dari Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada tahun 2024 yaitu *Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Merata serta Terkelolanya Lahan Milik Pemda*. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah *Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman yang Berkualitas, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan, serta Terciptanya Sistem Tata Kelola Pertanahan yang Memadai*.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.149.244.506		3.149.244.506	4.015.154.621		4.015.154.621	865.910.115	24.450.000.000
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.149.244.506		3.149.244.506	4.015.154.621		4.015.154.621	865.910.115	24.450.000.000
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			49.998.000		49.998.000	49.815.000		49.815.000	(183.000)	9.600.000.000
1	0	0	2,0		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			49.998.000		49.998.000	49.815.000		49.815.000	(183.000)	400.000.000
1	0	0	2,0	0	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	49.998.000		49.998.000	49.815.000		49.815.000	(183.000)	200.000.000
1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			3.069.999.906		3.069.999.906	3.926.056.021		3.926.056.021	856.056.115	7.750.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
1	0	0	2,0		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			3.069.999.906		3.069.999.906	3.926.056.021		3.926.056.021	856.056.115	7.000.000.000
1	0	0	2,0	0002	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	3.069.999.906		3.069.999.906	3.842.318.421		3.842.318.421	772.318.515	5.000.000.000
1	0	0	2,0	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep				83.737.600		83.737.600	83.737.600	2.000.000.000
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			29.246.600		29.246.600	39.283.600		39.283.600	10.037.000	2.100.000.000
1	0	0	2,0		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			29.246.600		29.246.600	39.283.600		39.283.600	10.037.000	2.100.000.000
1	0	0	2,0	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	29.246.600		29.246.600	39.283.600		39.283.600	10.037.000	200.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1					
								Sebelum			Sesudah									
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.131.705.103	15.030.650.312	55.162.355.415	45.538.341.195	14.391.664.271	59.930.005.466	4.767.650.051	79.377.400.000					
2	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1.933.152.700	10.356.703.000	12.289.855.700	4.446.368.055	8.180.000.000	12.626.368.055	336.512.355	18.944.000.000					
2	1	0	0	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			46.930.000		46.930.000	46.930.000		46.930.000	-	244.000.000					
2	1	0	0	4	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			46.930.000		46.930.000	46.930.000		46.930.000	-	244.000.000					
2	1	0	2,0	0	0	0	0	4	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	46.930.000		46.930.000	46.930.000		46.930.000	-	122.000.000
2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			1.839.292.700	10.356.703.000	12.195.995.700	4.352.508.055	8.180.000.000	12.532.508.055	336.512.355	17.200.000.000					
2	1	0	2,0	0	1	1	1	5	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah			1.839.292.700	10.356.703.000	12.195.995.700	4.352.508.055	8.180.000.000	12.532.508.055	336.512.355	17.200.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1			
				Sebelum			Sesudah							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)					
	Daerah Kabupaten/Kota													
2	0510002			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	1.500.995.700		1.500.995.700	738.662.000		738.662.000	(762.333.700)	8.600.000.000
2	0510005			Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Sumenep	338.297.000	10.356.703.000	10.695.000.000	3.613.846.055	8.180.000.000	11.793.846.055	1.098.846.055	8.600.000.000
2	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			46.930.000		46.930.000	46.930.000		46.930.000	-	150.000.000
2	082			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			46.930.000		46.930.000	46.930.000		46.930.000	-	100.000.000
2	08201			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	46.930.000		46.930.000	46.930.000		46.930.000	-	50.000.000
2	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			38.198.552.403	4.673.947.312	42.872.499.715	41.091.973.140	6.211.664.271	47.303.637.411	4.431.137.696	60.433.400.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.876.960.612	1.504.914.992	16.381.875.604	15.301.782.652	1.631.859.909	16.933.642.561	551.766.957	15.329.400.000
2	1	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.977.500		11.977.500	11.977.500		11.977.500	-	11.700.000
2	1	0	2,0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	4.290.100		4.290.100	4.290.100		4.290.100	-	2.700.000
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	909.700		909.700	909.700		909.700	-	1.000.000
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	818.900		818.900	818.900		818.900	-	1.000.000
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	881.900		881.900	881.900		881.900	-	1.000.000
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	975.500		975.500	975.500		975.500	-	1.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	1.278.500		1.278.500	1.278.500		1.278.500	-	2.000.000
2	1	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	2.822.900		2.822.900	2.822.900		2.822.900	-	3.000.000
2	1	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.225.127.351		12.225.127.351	12.055.591.418		12.055.591.418	(169.535.933)	12.834.500.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	12.215.448.451		12.215.448.451	12.045.912.518		12.045.912.518	(169.535.933)	12.800.000.000
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	5.469.900		5.469.900	5.469.900		5.469.900	-	3.500.000
2	1	0	2,0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	4.209.000		4.209.000	4.209.000		4.209.000	-	31.000.000
2	1	0	2,0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.941.900		2.941.900	2.941.900		2.941.900	-	4.200.000
2	1	0	2,0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	2.082.500		2.082.500	2.082.500		2.082.500	-	3.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0	2,0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumene p	859.400		859.400	859.400		859.400	-	1.200.000
2	1	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			38.240.000		38.240.000	102.994.053		102.994.053	64.754.053	125.000.000
2	1	0	2,0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumene p				64.754.053		64.754.053	64.754.053	100.000.000
2	1	0	2,0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumene p	38.240.000		38.240.000	38.240.000		38.240.000	-	25.000.000
2	1	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.274.848.916		1.274.848.916	1.440.198.616		1.440.198.616	165.349.700	683.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumene p	11.598.200		11.598.200	11.598.200		11.598.200	-	13.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumene p	12.434.800		12.434.800	12.434.800		12.434.800	-	14.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumene p	848.372.500		848.372.500	857.911.200		857.911.200	9.538.700	315.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	40.020.000		40.020.000	40.020.000		40.020.000	-	41.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	113.551.416		113.551.416	116.551.416		116.551.416	3.000.000	150.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	248.872.000		248.872.000	401.683.000		401.683.000	152.811.000	150.000.000
2	1	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.504.914.992	1.504.914.992		1.631.859.909	1.631.859.909	126.944.917	294.000.000	
2	1	0	2,0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep		1.249.930.414	1.249.930.414		1.311.930.594	1.311.930.594	62.000.180	250.000.000
2	1	0	2,0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep		254.984.578	254.984.578		319.929.315	319.929.315	64.944.737	24.000.000
2	1	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			884.839.645	884.839.645	939.838.753		939.838.753	54.999.108	770.000.000	
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana	- Kab. Sumenep	389.570.400		389.570.400	444.569.508		444.569.508	54.999.108	480.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
						Alokasi Umum									
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	495.269.245		495.269.245	495.269.245		495.269.245	-	290.000.000
2	1	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			438.985.300		438.985.300	748.240.412		748.240.412	309.255.112	607.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	327.267.400		327.267.400	396.528.290		396.528.290	69.260.890	317.000.000
2	1	0	2,0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	36.634.400		36.634.400	36.634.400		36.634.400	-	40.000.000
2	1	0	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	75.083.500		75.083.500	315.077.722		315.077.722	239.994.222	250.000.000
2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			18.080.839.251	1.217.252.297	19.298.091.548	19.220.720.901	1.572.639.744	20.793.360.645	1.495.269.097	39.194.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0	2,0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			15.882.827.267	945.940.608	16.828.767.875	16.927.946.417	1.121.422.555	18.049.368.972	1.220.601.097	31.900.000.000
2	1	0	2,0	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	41.816.500	945.940.608	987.757.108	779.935.650	1.121.422.555	1.901.358.205	913.601.097	9.900.000.000
2	1	0	2,0	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep	15.841.010.767		15.841.010.767	16.148.010.767		16.148.010.767	307.000.000	22.000.000.000
2	1	0	2,0	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			389.686.357		389.686.357	271.386.357	30.000.000	301.386.357	(88.300.000)	930.000.000
2	1	0	2,0	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	102.211.857		102.211.857	102.211.857		102.211.857	-	117.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	177.499.700		177.499.700	59.199.700	30.000.000	89.199.700	(88.300.000)	195.000.000
2	1	0	2,0	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	109.974.800		109.974.800	109.974.800		109.974.800	-	209.000.000
2	1	0	2,0		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1.598.329.427	271.311.689	1.869.641.116	1.684.694.427	421.217.189	2.105.911.616	236.270.500	2.165.000.000
2	1	0	2,0	0	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	9.999.400		9.999.400	9.999.400		9.999.400	-	55.000.000
2	1	0	2,0	0	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	144.388.649	271.311.689	415.700.338	175.753.649	421.217.189	596.970.838	181.270.500	160.000.000
2	1	0	2,0	0	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	- Kab. Sumenep	1.443.941.378		1.443.941.378	1.498.941.378		1.498.941.378	55.000.000	1.950.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
					Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tahun Sebelumnya									
2	1	0	2,0		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			9.996.900		9.996.900	9.996.900		9.996.900	-	29.000.000
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	9.996.900		9.996.900	9.996.900		9.996.900	-	19.000.000
2	1	0	2,0	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			199.999.300		199.999.300	326.696.800		326.696.800	126.697.500	20.000.000
2	1	0	2,0	0	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	199.999.300		199.999.300	326.696.800		326.696.800	126.697.500	20.000.000
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			5.240.752.540	1.951.780.023	7.192.532.563	6.569.469.587	3.007.164.618	9.576.634.205	2.384.101.642	5.910.000.000
2	1	0	2,0		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang			4.792.499.300		4.792.499.300	5.309.012.280		5.309.012.280	516.512.980	10.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
					Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	1	0	2,0	0	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	4.792.499.300		4.792.499.300	5.309.012.280		5.309.012.280	516.512.980	10.000.000
2	1	0	2,0		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal						75.000.000		75.000.000	75.000.000	
2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep				75.000.000		75.000.000	75.000.000	
2	1	0	2,1		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			448.253.240	1.951.780.023	2.400.033.263	1.185.457.307	3.007.164.618	4.192.621.925	1.792.588.662	5.900.000.000
2	1	0	2,1	0	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	53.498.600	1.951.780.023	2.005.278.623	74.013.100	2.997.350.810	3.071.363.910	1.066.085.287	5.000.000.000

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N						Bertambah/ (Berkurang)	Tahun N + 1
								Sebelum			Sesudah				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
2	1	0	2,1	0	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Sumenep				716.689.567	9.813.808	726.503.375	726.503.375	350.000.000
2	1	0	2,1	0	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Sumenep	394.754.640		394.754.640	394.754.640		394.754.640	-	550.000.000
<b>Jumlah</b>								<b>43.280.949.609</b>	<b>15.030.650.312</b>	<b>58.311.599.921</b>	<b>49.553.495.816</b>	<b>14.391.664.271</b>	<b>63.945.160.087</b>	<b>5.633.560.166</b>	<b>103.827.400.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya sebagai wujud nyata dan tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para *stakeholders* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. *Output* Rencana Kerja adalah program tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Sumenep, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran (RPKA) tahun 2024.

Demikian Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2024 kami susun sebagai wujud komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep.

Sumenep,      Juli 2024



**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

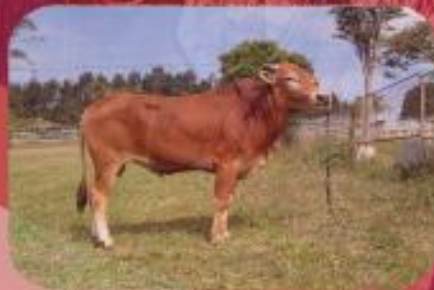
NIP. 19660129 198903 1 007



# RENJA OPD

## Perubahan

# 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SUMENEP**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
I.3 Maksud dan Tujuan .....	7
I.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD S/D TRIWULAN II 2024...	9
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Berdasarkan Urusan s/d Triwulan II Tahun 2024 .....	9
II.2 Faktor Pendorong .....	23
II.3 Faktor Penghambat .....	23
II.4 Tindak Lanjut .....	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PD .....	26
III.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2024 Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, Perubahan dan Lokasi Kelompok Sasaran. ....	26
BAB IV PENUTUP .....	83

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan prinsip sinergitas pembangunan pusat dan daerah, pemerintah dengan pemangku kepentingan, rencana tata ruang dengan perencanaan pembangunan serta dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Dengan adanya dinamika dalam penganggaran, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja PD yang telah disusun di awal pengalokasian anggaran Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan TA 2024 bertujuan untuk mengakomodir perubahan yang meliputi perubahan alokasi anggaran dan sasaran kegiatan. Disamping itu, perubahan Rencana Kinerja juga menyesuaikan dengan kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur yang ada dalam Keputusan Kementerian Dalam Negeri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

## **I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.**

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

- 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2021;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026
21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 23 Agustus 2024.
23. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Tanggal 26 Agustus 2024.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan atau pedoman terhadap perubahan kebijakan pembangunan yang disebabkan oleh factor internal dan eksternal.
2. Perubahan Rencana Kerja juga merupakan adaptasi terhadap perubahan pola kebijakan actual sehingga perlu dilakukan pergeseran pola perencanaan dan anggaran yang diperlukan.
3. Dokumen perubahan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah yang dilakukan sebelumnya.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penyusunan perubahan Renja PD ini dimaksudkan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan di bidang pertanian dengan berbagai dinamika yang terjadi maupun diproyeksikan akan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **I.1 LATAR BELAKANG**

##### **I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

- I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TRIWULAN II TAHUN 2024
  - II.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BERDASARKAN URUSAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024
  - II.2 FAKTOR PENDORONG
  - II.3 FAKTOR PENGHAMBAT
  - II.4 TINDAK LANJUT
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
  - III.1 KEGIATAN LANJUTAN TAHUN 2024, PERGESERAN, PENGHAPUSAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN, TARGET DAN PAGU, PERUBAHAN LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN
- BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II**  
**TAHUN 2024**

**II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II 2024**

Realisasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini

:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penerima Anggaran Jawab			
					6	7	7	8	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8x100%	15=7+13	16=15/6x100%													
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17			
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																									
1	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	2	09	02																										
		2	09	02	2.01																									
		2	09	02	2.01																									



		2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita per tahun yang dicapai	2,000	3,314,727,195	1,850	67256179	1,900	82,288,200	-	-	-	21,642,500	-	-	-	21,642,500	0.00%	2630%	2,770	88,898,679	138.50%	2.68%	
		2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	124,422,500	1	67,256,179	1	82,288,200	-	-	-	21,642,500	-	-	-	21,642,500	0.00%	2630.09%	1	88,898,679	20.00%	71.45%	
		2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100	1,413,032,898	100	12538600	100	40,971,300	-	7,968,000	-	6,551,500	-	-	-	14,519,500	0.00%	35.44%	100	27,058,100	100.00%	1.91%	DKP P
		2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun	5	340,000,000	1	12538600	1	40,971,300	-	7,968,000	-	6,551,500	-	-	-	14,519,500	0.00%	35.44%	1	27,058,100	20.00%	7.96%	
		2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	5	340,000,000	1	12,538,600	1	40,971,300	-	7,968,000	-	6,551,500	-	-	-	14,519,500	0.00%	35.44%	1	27,058,100	20.00%	7.96%	
		2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	95	282,606,580	87	33368900	90	53,859,450	-	-	-	10,710,499	-	-	-	10,710,499	0.00%	19.89%	87	44,079,399	91.58%	15.60%	DKP P
		2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	10	282,606,580	2	33368900	2	53,859,450	-	-	-	10,710,499	-	-	-	10,710,499	0.00%	19.89%	2	44,079,399	20.00%	15.60%	

		2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5	107,606,580	1	18,324,350	1	19,999,700	-	-	-	10,410,499	-	10,410,499	0.00%	52.05%	1	28,734,849	20.00%	26.70%			
		2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5	175,000,000	1	15,044,550	1	33,859,750	-	-	-	300,000	-	300,000	0.00%	0.89%	1	15,344,550	20.00%	8.77%			
		3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																						
		3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																						
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	111,541,876,890	100	25,449,014,376	100	32,024,984,589	-	3,903,422,758	-	7,413,446,089	-	-	-	11,316,868,847	0.00%	35.34%	100	36,765,883,223	100.00%	32.96%	DKP P
		3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	35	36,630,600	7	2499900	7	2,479,600	-	-	-	330,000	-	-	-	330,000	0.00%	13.31%	7	2,829,900	20.00%	7.73%	
		3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	7,326,120	1	500000	1	444,900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	500,000	20.00%	6.82%	

		3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	7,326,120	1	499900	1	444,900	-	-	-	165,000	-	165,000	0.00%	37.09%	1	664,900	20.00%	9.08%			
		3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	7,326,120	1	499900	1	444,900	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	1	499,900	20.00%	6.82%			
		3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	7,326,120	1	499900	1	444,900	-	-	-	165,000	-	165,000	0.00%	37.09%	1	664,900	20.00%	9.08%			
		3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	7,326,120	3	500200	3	700,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3	500,200	20.00%	6.83%			
		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	10	105,744,788,547	2	23661233375	2	30,723,005,388	-	3,667,140,870	1	7,022,928,554	-	-	1	10,690,069,424	50.00%	34.79%	3	34,351,302,799	30.00%	32.49%	
		3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	13,800	105,737,462,427	2640	23660744525	2760	30,722,516,588	690	3,667,140,870	690	7,022,567,554	-	-	1,380	10,689,708,424	50.00%	34.79%	4,020	34,350,452,949	29.13%	32.49%	



		3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	304,278,184	6	76284000	6	51,813,600	2	10,970,000	2	14,840,000					4	25,810,000	66.67 %	49.81 %	10	102,094,000	33.33 %	33.55 %	
		3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	450,794,479	75	147337560	40	140,498,000	10	16,948,113	10	48,017,082					20	64,965,195	50.00 %	46.24 %	95	212,302,755	31.67 %	47.10 %	
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	15	3,533,631,850	3	416,408,311	3	481,512,724	1	97,068,800	1	91,528,628		-	-		2	188,597,428	66.67 %	39.17 %	5	605,005,739	33.33 %	17.12 %	
		3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	1,582,205,652	36	416408311	36	481,512,724	10	97,068,800	10	91,528,628					20	188,597,428	55.56 %	39.17 %	56	605,005,739	31.11 %	38.24 %	
		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milk daerah yang dipelihara	20	453,991,841	3	123,164,742	3	77,139,240	1	27,865,575	1	37,034,625		-	-		2	64,900,200	66.67 %	84.13 %	5	188,064,942	25.00 %	41.42 %	
		3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	305,235,464	4	96474496	4	60,481,642	1	24,475,575	1	26,917,125					2	51,392,700	50.00 %	84.97 %	6	147,867,196	30.00 %	48.44 %	
		3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	73,487,089	26	16680000	10	6,930,000	3	2,690,000	1	1,090,000					4	3,780,000	40.00 %	54.55 %	30	20,460,000	60.00 %	27.84 %	

		3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	10	62,173,849	2	10010246	1	9,727,598	-	700,000	1	9,027,500					1	9,727,500	100.00%	100.00%	3	19,737,746	30.00%	31.75%			
3	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan		61,129,680,551		20618925746		8,590,923,995		464,000		819,276,075		-	-			1	819,740,075		9.54%		21,438,665,821		35.07%	DKP P	
								1. Tanaman Pangan :																									
								- Padi		979,869.00		193,025.00		195,930.00		82,653.98								82,654		-	42.19%		275,679		-	28.13%	
								- Jagung		2,291,213.00		448,457.30		458,043.00		256,642.80								256,643		-	56.03%		705,216		-	30.78%	
								- Kedele		509.03		96.62		101.55		22.24								22		-	21.90%		119		-	23.35%	
								- Kacang Hijau		112,314.00		22,439.00		22,463.00		-								-	-		0.00%		22,439		-	19.98%	
								- Ubi Kayu		804,375.00		158,779.00		160,848.00		-								-	-		0.00%		158,779		-	19.74%	
								2. Hortikultura :																									
								- Bawang Merah		351,703.00		69,449.00		70,136.00		27,927.00								27,927		-	39.82%		97,376		-	27.69%	
								- Cabe Besar		50,257.00		9,950.00		10,045.00		527.00								527		-	5.25%		10,477		-	20.85%	

							- Cabe Kecil	414,860.00		82,575.00		82,972.00		7,093.00				7,093	-	8.55%		89,668	-	21.61%				
																			-									
							3. Perkebunan :												-									
							- Kelapa	226,363.00		44,820.00		45,268.00		11,094.35				11,094	-	24.51%		55,914	-	24.70%				
							- Cabe Jamu	52,700.00		10,435.00		10,539.00		2,476.05				2,476	-	23.49%		12,911	-	24.50%				
							- Jambu Mete	28,269.00		5,597.00		5,653.00		1,392.03				1,392	-	24.62%		6,989	-	24.72%				
							- Siwalan	3,838.14		759.95		767.55		180.79				181	-	23.55%		941	-	24.51%				
							- Tembakau	30,184.00		5,960.00		6,079.00		-				-	-	0.00%		5,960	-	19.75%				
																			-									
							4. Peternakan												-									
							- Daging	25,776.00		5,135.00		5,155.00		587.56				588	-	11.40%		5,723	-	22.20%				
							- Telur	21,411.00		4,271.00		4,282.00		1,080.30				1,080	-	25.23%		5,351	-	24.99%				
		3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	600	40,000,000,000	100	19623858920	100	7,774,732,920	-	-	11	799,295,225	-	-	11	799,295,225	11.00%	10.28%	111	20,423,154,145	18.50%	51.06%	
		3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	50	20,000,000,000	12	14,711,224,520	5	4,683,933,120	-	-	-	357,465,225	-	-	-	357,465,225	0.00%	7.63%	12	15,068,689,745	24.00%	75.34%	



		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	80	82,224,577,111	77	57,249,873,373	78	48,075,312,141	13	5,306,192,000	30	3,864,670,500	-	-	43	9,170,862,500	55.13 %	19.08 %	70	66,420,735,873	87.50 %	80.78 %	DKP P
		3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang diperbaiki	250	17,309,680,000	42	5,340,074,618	26	7,265,884,141	26	5,306,192,000	-	6,790,500	-	-	26	5,312,982,500	100.00 %	73.12 %	68	10,653,057,118	27.20 %	61.54 %	
		3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	250	9,425,600,000	42	3,500,074,478	29	3,851,324,141	25	3,300,000,000	-	6,790,500			25	3,306,790,500	86.21 %	85.86 %	67	6,806,864,978	26.80 %	72.22 %	
		3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	5	3,052,550,000	1	1,840,000,140	1	3,414,560,000	1	2,006,192,000	-	-			1	2,006,192,000	100.00 %	58.75 %	2	3,846,192,140	40.00 %	126.00 %	
		3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang dibangun	375	62,178,897,111	225	51,466,322,400	152	40,809,428,000	-	-	30	3,857,880,000	-	-	30	3,857,880,000	19.74 %	9.45 %	255	55,324,202,400	68.00 %	88.98 %	
		3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	120	6,600,000,000	41	9,649,860,000	37	7,920,000,000	-	-	-	-			-	-	0.00 %	0.00 %	41	9,649,860,000	34.17 %	146.21 %	
		3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	240	15,228,525,510	64	10,161,462,400	50	14,029,428,000	-	-	30	3,857,880,000			30	3,857,880,000	60.00 %	27.50 %	94	14,019,342,400	39.17 %	92.06 %	
		3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	210	5,979,192,484	101	29,275,000,000	65	18,860,000,000	-	-	-	-			-	-	0.00 %	0.00 %	101	29,275,000,000	48.10 %	489.61 %	

		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penanganan kasus penyakit hewan	25	1,453,688,865	25	348,065,725	25	646,517,600	5	13,077,041	10	20,000,000	-	-	15	33,077,041	60.00 %	5.12%	40	381,142,766	160.00 %	26.22 %	DKP P
		3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan	100	308,112,145	20	56,521,600	20	14,990,600	4	3,077,041	8	-	-	-	12	3,077,041	60.00 %	20.53 %	32	59,598,641	32.00 %	19.34 %	
		3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20	308,112,145	4	56,521,600	2	14,990,600	-	3,077,041	1	-	-	-	1	3,077,041	50.00 %	20.53 %	5	59,598,641	25.00 %	19.34 %	
		3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah Kabupaten/Kota	100	419,385,771	100	141,000,000	100	60,000,000	20	10,000,000	20	20,000,000	-	-	40	30,000,000	40.00 %	50.00 %	100	171,000,000	100.00 %	40.77 %	
		3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60	150,000,000	12	141,000,000	12	60,000,000	3	10,000,000	3	20,000,000	-	-	6	30,000,000	50.00 %	50.00 %	18	171,000,000			



		3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	259	18,282,837,163	61	10,373,834,000	27	5,085,466,352	1	240,110,000	17	3,713,267,469				18	3,953,377,469	66.67 %	77.74 %	79	14,327,211,469	30.50 %	78.36 %	
		3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	256	3,052,550,000	116	2,517,476,425	12	348,441,400	-	-	-	36,738,500				-	36,738,500	0.00%	10.54 %	116	2,554,214,925	45.31 %	83.67 %	

## **II.2 FAKTOR PENDORONG.**

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih menjadi salah satu sektor yang mempunyai dampak terhadap kemajuan perekonomian di Kabupaten Sumenep, karena mayoritas mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sumenep adalah petani.

Beberapa aspek yang menjadi pendorong dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain :

1. Potensi lahan pertanian masih bisa terus dikembangkan dan dikelola untuk peningkatan produksi komoditas tanaman dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan wilayah.
2. Tersedianya teknologi di bidang pertanian/peternakan yang dapat di aplikasikan dalam pelaksanaan usaha pertanian/peternakan dari hulu ke hilir.
3. Tersedianya sumber daya manusia (poktan) di bidang pertanian yang tersebar di seluruh wilayah baik di wilayah daratan maupun kepulauan di Kabupaten Sumenep.
4. Ketersediaan produk hasil pertanian/peternakan dan potensi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas hasil pertanian/peternakan.
5. Tersedianya peluang pasar baik lokal, nasional maupun internasional terhadap komoditas hasil pertanian/peternakan.
6. Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang berkualitas.

## **II.3 FAKTOR PENGHAMBAT.**

Potensi pertanian di Kabupaten Sumenep sangat besar baik pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan, namun disisi lain data produksi menunjukkan pertumbuhan tingkat produksi yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan beberapa masalah mendasar yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian, seperti :

1. Secara umum lahan pertanian yang dimiliki petani sangat sempit.
2. Rendahnya tingkat pendidikan rata-rata petani.
3. Lemahnya kemampuan akses petani/peternak terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani.
4. Belum optimalnya pengetahuan kaum perempuan (ibu rumah tangga) dalam mengelola menu keluarga berbasis B2SA.

5. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian termasuk diantaranya sarana produksi (benih sumber).
6. Keterbatasan ketersediaan air dan kualitas lahan pertanian yang digunakan untuk melakukan usahatani
7. Masih terdapat daerah rawan pangan, mengindikasikan masih terdapat wilayah di Kabupaten Sumenep yang rentan terhadap akses dan konsumsi pangan.
8. Pengaruh iklim yang ekstrim terhadap tingkat produksi komoditas pertanian, yang berdampak juga terhadap peningkatan harga beberapa komoditas pertanian/peternakan dan memicu terjadinya inflasi.
9. Masih terdapat kelompok masyarakat yang tingkat konsumsi pangannya dibawah kebutuhan standart yang direkomendasikan untuk hidup sehat.

#### **II.4 TINDAK LANJUT.**

Menjadi tugas pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat sebagai upaya untuk memfasilitasi berbagai kendala yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, sebagi OPD teknis yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan urusan Pertanian, telah berupaya untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi para petani dan peternak yang ada di Kabupaten Sumenep. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

1. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung, pengeboran/sumur pompa) sebagai upaya untuk menunjang budidaya dan usaha pertanian/peternakan.
2. Fasilitasi berbagai sarana pertanian (alsintan, pupuk dan benih) untuk mendukung pelaksanaan budidaya dan usaha pertanian.
3. Fasilitasi pembuatan kandang, penyediaan bibit/ternak komoditas peternakan dan IB untuk meningkatkan populasi hewan ternak
4. Monitoring harga dan pelaksanaan pangan murah untuk mengurangi gejala harga komoditas pangan.
5. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber bahan pangan keluarga.
6. Peningkatan kompetensi petani/peternak melalui sosialisasi, bimbingan teknis, sekolah lapang dan demplot/percontohan budidaya komoditas.

7. Melakukan sinergi dengan stakeholder terkait (PKK, Dinas Kesehatan) dalam melaksanakan pembinaan keluarga berkaitan dengan konsumsi pangan yang sehat (berbasis B2SA).
8. Mempersiapkan regulasi cadangan pangan sebagai payung hukum dalam pengelolaan cadangan pangan khususnya untuk penanganan daerah rawan pangan.
9. Peningkatan kapasitas para penyuluh pertanian melalui pelatihan teknis dan non teknis untuk mendukung kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap para petani/peternak.
10. Peningkatan prasarana dan sarana kelembagaan penyuluhan pertanian untuk menunjang kinerja para penyuluh dalam pengembangan kompetensi dan melaksanakan tugas pendampingan terhadap para petani/peternak.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

**III.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran.**

Rencana kerja dan pendanaan perubahan Tahun 2024 menyesuaikan dengan dinamika yang ada dengan tetap memperhatikan prioritas program OPD dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Perubahan yang ada meliputi perubahan alokasi anggaran, pergeseran anggaran dan perubahan sasaran penerima kegiatan, sebagaimana table berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. SUMENEP TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN								78.377.932.774,00	98.751.959.783,00	92.856.594.545,00	14.478.661.771,00						62.820.210.869,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							848.810.850,00	848.562.850,00	848.562.850,00	-248.000,00							5.953.218.688,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							848.810.850,00	848.562.850,00	848.562.850,00	-248.000,00							5.953.218.688,00	

1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah				100 %	100 %	641.693.300,00	641.445.300,00	641.445.300,00	3.026.342.076,00							3.668.035.376,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia				4 unit	4 unit	641.693.300,00	641.445.300,00	641.445.300,00	-248.000,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		3.668.035.376,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	600.696.100,00	600.696.100,00	600.696.100,00	0,00	Kab. Sumene p, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan			3.118.035.376,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

															prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah					
2.09.02.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	2 Laporan	40.997.200,00	40.749.200,00	40.749.200,00	-248.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.02.2.01.006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			

			<i>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia</i>				1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene p, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukup an pangan di daerah Peningkata n sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukup an pangan di daerah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan				73.51 skor	73.51 skor	112.286.800,00	112.286.800,00	112.286.800,00	1.824.205.888,00							1.936.492.688,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten</i>				12 dokumen	12 dokumen	29.998.600,00	29.998.600,00	29.998.600,00	0,00			-	Peningkata n sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukup an pangan di daerah Peningkata n sarana dan prasarana pertanian dan	Masyarak at Petani		637.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene p, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOKA SI UMUM	-	Peningkata n sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukup an pangan di daerah Peningkata n sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukup an pangan di daerah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	15	1	17			2	
			<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>				3 Unit	3 Unit	14.998.600,00	14.998.600,00	14.998.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.001	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		

	5																			
			<i>Informasi Harga dan Pasokan Pangan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.001 6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah yang disediakan</i>				20 %	20 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		625.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.000 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				67 Ton	67 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara</i>				62 Ton	62 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita per tahun yang dicapai				1900 kkal/kapita/ tahun	1900 kkal/kapita/ tahun	82.288.200,00	82.288.200,00	82.288.200,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		674.492.688,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	82.288.200,00	82.288.200,00	82.288.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			27.225.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			647.267.688,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani				100 %	100 %	40.971.300,00	40.971.300,00	40.971.300,00	249.604.220,00							290.575.520,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun</i>				1 dokumen	1 dokumen	40.971.300,00	40.971.300,00	40.971.300,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	40.971.300,00	40.971.300,00	40.971.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah daerah rawan pangan dan ditangani</i>				2 desa	2 desa	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		220.575.520,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
		<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			120.575.520,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan				90 %	90 %	53.859.450,0 0	53.859.450,0 0	53.859.450,00	4.255.654, 00							58.115.10 4,00	
----	---------	---	--	--	--	--	------	------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota				2 dokumen	2 dokumen	53.859.450,00	53.859.450,00	53.859.450,00	0,00				-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Petani		58.115.104,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.700,00	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			

			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokuman	1 Dokuman	33.859.750,00	33.859.750,00	33.859.750,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			23.115.104,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								77.529.121.924,00	97.903.396.933,00	92.008.031.695,00	14.478.909.771,00							56.866.992.181,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								77.529.121.924,00	97.903.396.933,00	92.008.031.695,00	14.478.909.771,00							56.866.992.181,00	
1. 2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %		33.630.205.476,00	35.146.789.345,00	24.181.692.548,00	-11.405.990.526,00							22.224.214.950,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>				7 dokumen	7 dokumen		2.479.600,00	2.479.600,00	2.479.600,00	0,00			-	-	Aparatur		11.180.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			

			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	444.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	444.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	444.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	444.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>				3 Laporan	3 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
2.09.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan yang disusun				2 Laporan	2 Laporan	32.428.561.275,00	33.844.810.144,00	22.642.917.139,00	-9.785.644.136,00			-	-	Aparatur		21.367.770.038,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2760 Orang /bulan	2760 Orang /bulan	32.428.072.475,00	33.844.321.344,00	22.642.428.339,00	-9.785.644.136,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.366.172.838,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	488.800,00	488.800,00	488.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.597.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan				1 jenis	1 jenis	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00			-	-	Aparatur		7.388.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.388.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi				5 Jenis	5 Jenis	635.712.637,00	736.047.637,00	944.552.211,00	308.839.574,00			-	-	Aparatur		290.955.242,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.457.500,00	7.442.500,00	11.891.300,00	4.433.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.311.876,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.998.800,00	9.998.800,00	10.835.800,00	837.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		13.618.259,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	526.294.737,00	526.294.737,00	563.200.511,00	36.905.774,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		70.308.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	51.813.600,00	51.813.600,00	76.813.600,00	25.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		66.337.040,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	40.148.000,00	140.498.000,00	281.811.000,00	241.663.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		98.279.709,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				110 Dokumen	110 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-		12.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

			<i>pada SKPD</i>										Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM						PERTANIAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan</i>				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Aparatur		103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			101.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah layanan jasa yang disediakan</i>				3 jenis	3 jenis	481.512.724,00	481.512.724,00	445.511.252,00	-			-	-	Aparatur		344.943.690,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	481.512.724,00	481.512.724,00	445.511.252,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			344.943.690,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan</i>				3 jenis	3 jenis	77.139.240,00	77.139.240,00	141.432.346,00	64.293.106,00			-	-	Aparatur		98.976.780,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	60.481.642,00	60.481.642,00	94.780.522,00	34.298.880,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			66.545.741,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.854.995,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	10 Unit	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.021.247,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	9.727.598,00	9.727.598,00	39.721.824,00	29.994.226,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.554.797,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian				72 Klp	100 Klp	7.612.799.420,00	7.474.959.420,00	8.258.732.920,00	645.933.500,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		8.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	5 Laporan	4.521.999.620,00	4.384.159.620,00	4.583.933.120,00	61.933.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	D B H C U K A I H A S I L T E M	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercupan pangan			4.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

														B A K A U ( C H T ) D A N A T R A N S F E R K H U S U - D A N A A L O K A S I K H U S U S N O N F I S I K		di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah					
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																				
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				72 Laporan	72 Laporan	3.090.799.800,00	3.090.799.800,00	3.674.799.800,00	584.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana			4.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	



			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	226.500,00	- 299.773.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBHCUKAIHAA SILEMBAKAUA (CHT)	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercupan pangan di daerah			399.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	63.977.300,00	63.977.300,00	63.977.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercupan pangan			159.720.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

																di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah								
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	24.999.975,00	24.999.975,00	179.999.975,00	155.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		101.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																		

			<i>Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>			1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota	<i>Persentase peningkatan populasi ternak besar</i>			0.50 %	0.50 %	626.987.500,00	626.987.500,00	1.001.987.500,00	375.000.000,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani (Peternak)		3.708.736.191,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		

			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				99 Ton	99 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			3.308.736.191,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				12 Laporan	12 Laporan	626.987.500,00	626.987.500,00	1.001.987.500,00	375.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			230.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		

			<i>Jumlah benih/bibit ternak yang beredar</i>			12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			170.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik			78 %	78 %	29.398.384.690,00	47.705.312.141,00	51.941.043.700,00	-12.124.981.471,00							17.273.403.219,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah prasarana yang diperbaiki</i>			30 Unit	26 Unit	25.488.904.690,00	6.895.884.141,00	8.571.615.700,00	-16.917.288.990,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		3.600.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	

			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				30 Laporan	29 Laporan	3.925.820.101,00	3.851.324.141,00	5.157.055.700,00	1.231.235.599,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			1.936.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	21.563.084.589,00	3.044.560.000,00	3.414.560.000,00	-18.148.524.589,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah		665.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																				
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi		399.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

															Kerakyatan					
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																			
			<i>Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah prasarana yang dibangun</i>				30 Unit	152 Unit	3.909.480.000,00	40.809.428.000,00	43.369.428.000,00	39.459.948.000,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung	Masyarakat Petani		12.946.603.219,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	



																		ketercukupan pangan di daerah							
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																								
			<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah				1.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																								
			<i>Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan				736.603.219,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				

																	pangan di daerah			
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				30 Unit	50 Unit	3.909.480.000,00	14.029.428.000,00	16.589.428.000,00	12.679.948.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian			3.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	



			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			1.210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah kecamatan di Wilayah Sumber Bibit (Wilsumbit) yang dikelola</i>				4 kecamatan	4 kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani			242.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.03.002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																			

			<i>Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak</i>				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah		242.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	<i>Jumlah lokasi pengembangan lahan penggembalaan umum</i>				1 lokasi	1 lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani	484.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3.27.03.2.04.001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum																		

			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				3 Ha	3 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah		242.000. 000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.04.0 002	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola</i>				11 Ha	11 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			242.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kasus penyakit hewan				25 %	25 %	74.990.600,00	646.517.600,00	736.517.600,00	219.029.928,00							294.020.528,00	

3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan				20 lokasi	20 lokasi	14.990.600,00	14.990.600,00	104.990.600,00	90.000.000,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Petani (Peternakan)		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	14.990.600,00	14.990.600,00	104.990.600,00	90.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

															Ekonomi Kerakyatan					
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Petani (Peternakan)		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																			

			<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>				12 laporan	12 laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																			
			<i>Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya</i>				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

															Ekonomi Kerakyatan					
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner				175 sampel	175 sampel	0,00	571.527.000,00	571.527.000,00	571.527.000,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani (Peternakan)			84.020.528,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																			
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan				50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

																prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah					
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	0,00	571.527.000,00	571.527.000,00	571.527.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah		34.020.528,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha dan produk hewan yang memenuhi standart				13 unit	13 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani (Peternakan)	70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		

			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.04.010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																			
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik</i>				13 Unit Usaha	13 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		<i>Jumlah lokasi pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan</i>				5 lokasi	5 lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Petani		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																			

			<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi</b>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	1.541.720.879,00							1.541.720.879,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah bencana pertanian yang dikendalikan</i>				41 Ha	41 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		1.541.720.879,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				11 Ha	11 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
							8	9		11	12		14		15	16		17	18	19
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>				10 Ha	10 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah		230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>				20 Ha	20 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																		

			<i>Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis</i>				5 laporan	5 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			201.720.879,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan																		
			<i>Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>				12 laporan	12 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang difasilitasi				3 %	3 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	559.867.047,00							589.867.047,00	

3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina usahanya				4 Klp	4 Klp	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		589.867.047,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			133.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				33 Dokumen	33 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung kecukupan pangan di daerah			66.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH					RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			390.217.047,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut				2 %	2 %	5.766.776.963,00	5.883.853.652,00	5.613.853.652,00	-3.272.267.596,00							2.494.509.367,00	

3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas				50 Klp	50 Klp	5.766.776.963,00	5.883.853.652,00	5.613.853.652,00	-152.923.311,00			-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah	Masyarakat Petani		2.494.509.367,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	79.945.900,00	79.945.900,00	179.945.900,00	100.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			133.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		

			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				30 Unit	27 Unit	5.686.831.063,00	5.455.466.352,00	5.085.466.352,00	-601.364.711,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			1.429.709.367,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				12 Unit	12 Unit	0,00	348.441.400,00	348.441.400,00	348.441.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			665.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		

			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			133.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah			133.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
<b>J U M L A H</b>									<b>78.377.932.774,00</b>	<b>98.751.959.783,00</b>	<b>92.856.594.545,00</b>	<b>14.478.661.771,00</b>					<b>62.820.210.869,00</b>			

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan lanjutan implementasi program dan kegiatan di Tahun 2024. Dengan adanya perubahan rencana kerja ini diharapkan target capaian kinerja OPD dapat lebih terarah, efektif dan efisien serta tepat sasaran dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah penganggaran.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini disusun, dengan harapan dapat mensinergikan pelaksanaan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan

Sumenep, Agustus 2024

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SUMENEP

**CHAINUR RASYID, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691113 199503 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada hakikatnya rencana kerja tahunan adalah satu kesatuan system perencanaan nasional dengan tujuan tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, penganggaran sampai dengan pengendalian perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dimana dalam proses penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karenanya Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra OPD.

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Renja OPD dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep disusun mengacu pada target kinerja rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep 2021-2026 serta Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### b. Tujuan

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB. II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah
  - 2.3 Isu Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
  - 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
  - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB. V : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep hasil pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 Triwulan I s/d IV dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel capaian kinerja tahun 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>						
1	Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	72,15	74,28	76,9	83,16	83,16	84,11
2	Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum daerah	29.160	29.162	18.249	10.328	36.720	2.985
3	Jumlah Koleksi Buku/Bahan Pustaka di Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan jenjang	68.160	72.640	76.271	84.173	84.173	81.799
4	Lembaga Perpustakaan yang dibina	36	24	69	20	-	45
<b>B</b>	<b>KEARSIPAN</b>						
1	Persentase arsip yang dikelola	100,86	114,84	100,41	100	100	100
2	Persentase Unit Pencipta Arsip yang dibina	148,39	100	129,94	78	141	100
3	Persentase Petugas Pengelola Arsip yang ditingkatkan kompetensinya	139,83	141,06	221,94	230	150	100
4	Persentase SKPD yang Menerapkan Standar Pengelolaan arsip	2,5	3,75	5,10	6,80	6,80	16,67
5	Nilai pengawasan arsip internal	-	-	27,17	39,04	40,4	43,67

Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 merupakan gambaran bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pada target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian target indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Sumenep tahun 2024 dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target yang direncanakan mengindikasikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep didalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan telah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan top down and bottom up, sehingga dokumen perencanaan yang telah disusun semakin terarah dan konsisten serta tetap melihat kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu inovasi dan koordinasi sangat dibutuhkan didalam menyempurnakan proses dan pola penyusunan dokumen perencanaan sehingga kedepan diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih sempurna dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dilakukan kedalam 6 Program dan 15 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program pembinaan perpustakaan
3. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
4. Program pengelolaan arsip
5. Program perlindungan dan penyelamatan arsip
6. Program perizinan penggunaan arsip

Adapun rincian tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
 Tahun 2021 s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan)  
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep  
 TABEL T-C.29**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>95 %</b>				<b>95 %</b>	<b>43,74 %</b>	<b>46,04 %</b>
2	23	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	10 Laporan				2 Laporan	0	0 %
2	23	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					33 orang	33 orang	94,48%
2	23	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana</i>					2 Jenis	0	0%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2	23	01	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket					0	0	0
2	23	01	2,1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi</b>	<b>96 %</b>					<b>74 %</b>	<b>88,82 %</b>	<b>120,03 %</b>
2	23	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan						76 buah	55 buah	72,55%
2	23	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						19 unit	16 unit	90,78%
2	23	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan						65 OB	65 OB	99,60%
2	23	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan						6 macam	1 macam	6,64%
2	23	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan						20 jenis	11 jenis	59,29 %
2	23	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan						82 kali	64 kali	78,70%
2	23	01	2,1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola						m'	0	0
2	23	01	2,1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa Penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah selama 1 tahun</b>	<b>90 %</b>					<b>86 %</b>	<b>90%</b>	<b>100,65 %</b>
2	23	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet						7 rekening	7 rekening	90,35%
2	23	01	2,1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Sarana dan prasana perlengkapan serta peralatan dan Mesin yang dipelihara dalam 1 tahun</b>	<b>90 %</b>					<b>77 %</b>	<b>8,33 %</b>	<b>10,82 %</b>
2	23	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola						7 unit	6 unit	87,95%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2	23	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					60 unit	17 unit	28,36%
2	23	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					6 unit	2 unit	47,58%
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina</b>	<b>95 %</b>				<b>95 %</b>	<b>43,74 %</b>	<b>46,04 %</b>
2	23	02	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	464 lembaga				86 lembaga	45 embaga	52,94 %
2	23	02	2	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan berbasis informasi Teknologi					86 Lembaga	2 Lembaga	
2	23	02	2	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Lembaga yang dibina dan dikembangkan					86 Lembaga	45 embaga	52,33 %
2	23	02	2	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Lembaga Pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan					86 Lembaga	45 embaga	52,33 %
2	23	02	2	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang di kelola dan dikembangkan					1000 explar	1870	181,70%
2	23	02	2	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan yang dikembangkan dan diolah					1000 explar	1700 explar	170%
2	23	02	2	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan disusun					100 Lembaga	0	0%
2	23	02	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	55000 pengunjung				10000 pengunjung	2985 pengunjung	29,85 %
2	23	02	2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar serta masyarakat					90 Lembaga	90 Lembaga	100%
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki Sarana Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>80 %</b>				<b>80 %</b>	<b>25 %</b>	<b>31,25 %</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2	24	03	2		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan arsipnya	171 Pencipta Arsip					5 Pencipta Arsip	5 Pencipta Arsip	100%
2	24	03	2	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung yang diselamatkan arsipnya						20 Pencipta Arsip	20 Pencipta Arsip	200
2	24	03	2,1		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten yang dicari	70 series					5 series	5 series	100%
2	24	03	2,1	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman						10 Arsip	0	0%
2	24	04			<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Izin penggunaan arsip yang ditindaklanjuti</b>	<b>80 %</b>					<b>80 %</b>	<b>5 %</b>	<b>6,25 %</b>
2	24	04	2		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang ditetapkan dan diterbitkan	40 peraturan					2 peraturan	0	0%
2	24	04	2	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan						3 SOP	0	0%



## **2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUMENEP**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep disebutkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi :

1. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat;
2. Revitalisasi Perpustakaan;
3. Peningkatan Ketersediaan Layanan Perpustakaan secara merata baik berbasis Informasi dan teknologi;
4. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
5. Peningkatan gerakan gemar membaca, pemanfaatan perpustakaan dan literasi;
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan.
7. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

8. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
9. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia

Pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari :

1. Terselenggaranya Budaya Gemar membaca di setiap kalangan/maupun Tingkat daerah kabupaten yaitu mensosialisasikan Budaya Baca dan Literasi pada Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.
2. Terlaksananya Pelestarian Naskah kuno dan koleksi nasional yang mempunyai arti penting dalam proses pembangunan dimasa akan datang.
3. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Perda.
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
5. Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Kebijakan Umum APBD.
6. Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan PPAS Perubahan

Bappeda Kabuapten Sumenep dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabuapten Sumenep Tahun 2021-2026. Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan yang diampu Bappeda, dalam hal ini Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Pada Tabel 2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN KABUPATEN**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Pencapaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun					Tahun			Tahun			
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12			(13)	
	Persentase lembaga yang dibina			95%	95%	95%	95%	95%	47,37%	0%	0%	80%	86%	90%	
	Persentase koleksi daerah dan naskah kuno yang dilestraikan			85%	85%	85%	85%	85%	0%	0%	0%	80%	85%	85%	
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip dengan baik			80%	80%	80%	80%	80%	124,19%	0%	0%	80%	80%	80%	
	Persentase Opd Yang Memiliki Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip			80%	80%	80%	80%	80%	100%	0%	0%	78%	80%	86%	
	Persentase izin penggunaan arsip yang ditindaklanjuti			80%	80%	80%	80%	80%	0%	0%	0%	78%	80%	80%	

### **2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUMENEP**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perpustakaan dan kearsipan;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pengadaan, pengumpulan, pengolahan bahan dan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
4. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan masyarakat di bidang kearsipan;
5. pengelolaan arsip statis dan pelaksanaan perpustakaan keliling; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top down dan buttom up. Namun demikian, dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yangh semakin baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUMENEP**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>4.957.724.683</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>4.957.724.683</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>95 %</b>	<b>4,372,183,358</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>4,372,183,358</b>	
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi</b>	<b>80 %</b>	<b>3,340,686,245</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi</b>	<b>80 %</b>	<b>3,340,686,245</b>	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3,340,686,245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sumenep	Jumlah Gaji dan tunjangan lainnya ASN yang disediakan	33 Orang/bulan	3,340,686,245	
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>16,951,365</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dalam 1 tahun</b>	<b>2 jenis</b>	<b>16,951,365</b>	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16,951,365	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pegawai yang di fasilitasi pakaian dinas beserta perengkapannya Jumlah Pegawai yang di fasilitasi pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket	16,951,365	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sumenep	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4 Orang	12.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sumenep	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4 Orang	12.000.000	<b>Sesuai permintaan dan kebutuhan</b>
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi</b>	<b>86 %</b>	<b>692.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi</b>	<b>86 %</b>	<b>692.000.000</b>	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,602,668	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	1 paket	15.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah kebutuhan bahan / peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	14 Macam/orang	75,559,956	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah kebutuhan bahan / peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	14 Macam/orang	75,559,956	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi dalam menunjang kinerja kantor	65 OB	380,406,012	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi dalam menunjang kinerja kantor	65 OB	380,406,012	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sumenep	jumlah dokumen yang tercetak dan digandakan dalam 1 tahun	4/7 2 Macam/buah	3.491.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sumenep	jumlah dokumen yang tercetak dan digandakan dalam 1 tahun	4/7 2 Macam/buah	3.491.100	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sumenep	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terselenggaranya pameran pembangunan	20 jenis	18,013,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sumenep	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terselenggaranya pameran pembangunan	20 jenis	18,013,000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Rapat -rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	86 Kali	40,034,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Rapat -rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	86 Kali	40,034,000	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pemenuhan penunjang sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>72 %</b>	<b>136,430,211</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pemenuhan penunjang sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>72 %</b>	<b>136,430,211</b>	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumenep	Jumlah sarana dan prasarana peralatan dan mesin penunjang kerja kantor	44 unit	136,430,211	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumenep	Jumlah sarana dan prasarana peralatan dan mesin penunjang kerja kantor	44 unit	136,430,211	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemenuhan jasa penunjang perkantoran dalam 1 tahun</b>	<b>88 %</b>	<b>143.020.320</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemenuhan jasa penunjang perkantoran dalam 1 tahun</b>	<b>72 %</b>	<b>143.020.320</b>	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sumenep	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 Rekening	143.020.320	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sumenep	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 Rekening	143.020.320	
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemenuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun</b>	<b>80 %</b>	<b>209.988.481</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemenuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun</b>	<b>72 %</b>	<b>209.988.481</b>	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	19 Unit	94.826.345	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	19 Unit	94.826.345	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumenep	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	66 Unit	35.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumenep	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	66 Unit	35.160.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sumenep	jumlah gedung yang terpelihara	8 Unit	80.002.136	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sumenep	jumlah gedung yang terpelihara	8 Unit	80.002.136	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA YANG DIBINA</b>	<b>95 %</b>	<b>406.998.535</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA YANG DIBINA</b>	<b>95 %</b>	<b>406.998.535</b>	
a	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan</b>	<b>86 Lembaga</b>	<b>386,267,910</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan</b>	<b>50 nilai</b>	<b>386,267,910</b>	
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Perpustakaan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	86 Lembaga	90.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Perpustakaan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	50 Nilai	90.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina dan ditingkatkan	86 lembaga	105.670.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina dan ditingkatkan	50 Nilai	105.670.000	
<b>B</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan</b>	<b>105 00 pengujung</b>	<b>20.730.625</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan</b>	<b>105 00 pengujung</b>	<b>20.730.625</b>	
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kabupaten Sumenep	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	90 Lokus	20.730.625	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kabupaten Sumenep	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada	90 Lokus	20.730.625	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		dasar serta masyarakat			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		satuan pendidikan dasar serta masyarakat			
							<b>178,542,790</b>				<b>178,542,790</b>
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Kabupaten Sumenep	<b>PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK</b>	<b>80 %</b>	<b>178,542,790</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Kabupaten Sumenep	<b>PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK</b>	<b>80 %</b>	<b>178,542,790</b>	
	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis</b>	<b>31 Pencipta Arsip</b>	<b>88,686,400</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis</b>	<b>31 Pencipta Arsip</b>	<b>88,686,400</b>	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	31 Pencipta Arsip	34,832,400	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	31 Pencipta Arsip	34,832,400	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pencipta Arsip yang telah mendapatkan Pengawasan Kearsipan Internal	31 Pencipta Arsip	53,854,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pencipta Arsip yang telah mendapatkan Pengawasan Kearsipan Internal	31 Pencipta Arsip	53,854,000	
	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Arsip Statis yang dikelola</b>	<b>10 Series</b>	<b>50,443,000</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Arsip Statis yang dikelola</b>	<b>10 Series</b>	<b>50,443,000</b>	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kabupaten Sumenep	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	10 Series	50,443,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kabupaten Sumenep	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	10 Series	50,443,000	
	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Jumlah Arsip Statis yang dikelola melalui Simpul Jaringan Informasi</b>	<b>10 Series</b>	<b>39,413,390</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>	<b>Jumlah Arsip Statis yang dikelola melalui Simpul Jaringan</b>	<b>10 Series</b>	<b>39,413,390</b>	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
			<b>Kearsipan Nasional</b>					<b>Informasi Kearsipan Nasional</b>				
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Arsip Statis yang diserahkan oleh Unit Kearsipan (Unit Pencipta Arsip) ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	10 Series	39,413,390	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Arsip Statis yang diserahkan oleh Unit Kearsipan (Unit Pencipta Arsip) ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	10 Series	39,413,390		

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rancangan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Mengacu pada Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020- 2024, yaitu: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”. Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi: “Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”. Tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020- 2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah :

***“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi tahun 2024”.***

Arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial

bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter,

2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa,
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan.

Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sejalan dengan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan maka visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas dilaksanakan dengan Misi ***“Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa dan Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan Terpercaya”***. Sebagai Berikut:

1. Memperdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Memperdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memperdayakan arsip sebagai alat sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan Pemerintah, Pembangunan, Penelitian dan Ilmu Pengetahuan untuk kesejahteraan

rakyat sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan Bangsa.

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kearsipan dirumuskan atas dasar urgensi kearsipan bagi pembangunan bangsa dan negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan pokok perlunya kearsipan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Kebutuhan Praktis Administrasi dan Manajemen
  - a. Menjamin tersedianya arsip yang reliabel, autentik, lengkap dan dapat digunakan sepanjang dibutuhkan, melalui proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem kearsipan nasional;
  - b. Menyediakan sistem kearsipan yang andal baik untuk arsip analog maupun digital yang digunakan oleh K/L/D;
  - c. Membantu K/L/D dalam mengelola arsip untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, proteksi/mitigasi/sengketa hukum, dan kebutuhan lainnya.
2. Kebutuhan Kesenambungan Ilmu Pengetahuan Dalam konteks pemenuhan kebutuhan menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
  - a. Menjamin arsip hasil kinerja K/L/D dan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan dapat terkelola dan tersedia dalam mekanisme yang ideal untuk proses manajemen pengetahuan di K/L/D;
3. Kebutuhan Pemajuan Kebudayaan Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pemajuan kebudayaan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:

- a. menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif, jati diri dan identitas bangsa, serta menjaga arsip untuk kepentingan keberadaan dan keutuhan wilayah NKRI;
- b. mendiseminasikan informasi arsip kepada masyarakat agar memiliki rasa sejarah dan budaya Indonesia;
- c. mempersiapkan arsip sebagai bahan dan sumber diplomasi internasional di bidang budaya.

Sasaran pembangunan tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai *outcome* atau dampak, yaitu : “ **Terwujudnya Pembangunan Literasi, Kegemaran Membaca masyarakat serta aksesibilitas layanan dan Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan Terpercaya dan Mewujudkan Pengelolaan Arsip secara Baku serta Penyelenggaraan Kearsipan yang berkualitas sesuai Peraturan Perundangan**” .

Dalam menjalankan tugas urusan perpustakaan sejalan dengan kebijakan pembangunan Perpustakaan Nasional RI dan ANRI yang diarahkan pada peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, dengan strategi :

1. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat;
2. Revitalisasi Perpustakaan;
3. Peningkatan Ketersediaan Layanan Perpustakaan secara merata;
4. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
5. Peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan;

6. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas urusan kearsipan berbanding lurus dengan arah kebijakan dan strategi yang ditempuh Arsip Nasional RI berupa :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat;
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui :
  - a Peningkatan budaya literasi, mencakup:
    - pengembangan budaya gemar membaca;
    - pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi berbasis informasi teknologi;
    - peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
  - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup:
    - pengembangan mitra perpustakaan;

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep menyusun program dan perencanaan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut :

#### **A. URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

#### **4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **5. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

### **2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
- Pengembangan Bahan Pustaka.
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten.
- Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten Sesuai Standart Nasional Perpustakaan.

### **2.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.

- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

## **6. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**

### **3.1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah**

- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
- Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan didayagunakan

## **B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

### **1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

#### **1.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **1.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**

- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

#### **1.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**

- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

## **2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**

### **2.1. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

- Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung

### **2.2. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**

- Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### **1.1. Prioritas Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KABUPATEN SUMENEP**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>9.828.255.757</b>				<b>10.440.855.757</b>
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>2.360.000.000</b>				<b>2.460.000.000</b>
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina</b>		<b>95%</b>	<b>2.010.000.000</b>		P1	<b>95%</b>	<b>2.010.000.000</b>
<b>2.23.02.2.01.01</b>	<b>PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN</b>	<b>Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan</b>		<b>94 lembaga</b>	<b>2.010.000.000</b>		K1	<b>94 lembaga</b>	<b>2.010.000.000</b>
<b>2.23.02.2.01.03</b>	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>		86 perpustakaan	150.000.000	APBD		86 perpustakaan	165.000.000
<b>2.23.02.2.01.06</b>	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>		86 perpustakaan	70.000.000	APBD		86 perpustakaan	96.000.000
<b>2.23.02.2.01.07</b>	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		94 orang	50.000.000	APBD		94 orang	65.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2.23.02.2.01.09	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan		20000 Eksemplar	250.000.000	APBD		20000 Eksemplar	216.000.000
2.23.02.2.01.10	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		20000 Eksemplar	52.000.000	APBD		1000 Eksemplar	26.800.000
2.23.02.2.02	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		90 dokumen	65.000.000	APBD		90 dokumen	68.000.000
2.23.02.2.02.01	<b>PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan</b>		<b>1100 Pengunjung</b>	<b>197.432.000</b>		<b>K1</b>	<b>11000 Pengunjung</b>	<b>287.432.000</b>
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		90 Lokus	122.432.000	APBD		90 Lokus	212.432.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan		30 perpustakaan	75.000.000	APBD		30 perpustakaan	75.000.000
2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase Pengembangan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah</b>		<b>85%</b>	<b>350.000.000</b>		<b>P1</b>		<b>450.000.000</b>
2.23.03.2.01	<b>PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH</b>	<b>Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestarikan</b>			<b>245.375.000</b>		<b>K1</b>		<b>373.600.000</b>
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		5 orang	65.375.000	APBD		5 lokasi	173.600.000
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		3 explar	80.000.000	APBD		3 explar	100.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantarayang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi Budaya EtnisNusantara yang terhimpun dan dikembangkan		9 koleksi	100.000.000			9 koleksi	100.000.000
2.23.03.2.01.02	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya EtnisNusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		900 explar	100.000.000			900 explar	100.000.000
<b>2 24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>1.200.000.000</b>				<b>1.600.000.000</b>
<b>2 24 2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Dengan Baik</b>		<b>80%</b>	<b>900.000.000</b>		P1	<b>80%</b>	<b>1.200.000.000</b>
2 24 2 2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis</b>		<b>31 Pencipta Arsip</b>	<b>227.100.000</b>		K1	<b>31 Pencipta Arsip</b>	<b>246.000.000</b>
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Sumenep,	31 berkas	90.000.000	APBD		31 berkas	107.000.000
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip DinamisKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep,	31 laporan	137.100.000	APBD		31 laporan	139.000.000
<b>2 24 2 2.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip Statis yang dikelola</b>		<b>10 Series</b>	<b>150.000.000</b>	APBD		10 Series	<b>200.000.000</b>
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi danAkses Arsip Statis	Kab. Sumenep,	14 arsip	150.000.000	APBD		14 arsip	143.000.000
<b>2 24 2 2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip Statis yang dikelola melalui Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</b>		<b>5 Series</b>	<b>75.000.000</b>			<b>5 Series</b>	<b>82.000.000</b>
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan LembagaKearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep,	14 laporan	75.000.000	APBD		14 laporan	82.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2	24	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki Sarana Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>		80%	112.000.000	APBD		80%	120.000.000
2	24	3	2.03		<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan arsipnya</b>		5 Pencipta Arsip	150.000.000	APBD		5 Pencipta Arsip	200.000.000
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Sumenep,	5 Daftar	50.000.000	APBD		5 Daftar	55.000.000
2	24	03	2.01		<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan</b>	529 meter linier		62.000.000				65.000.000
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	Kab. Sumenep	529 arsip	62.000.000	APBD		529 arsip	65.000.000
2	23	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah</b>		76%	6.268.255.757			79%	6.380.855.757
2	23	1	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan yang terpenuhi</b>		2 laporan	3.268.505.757			2 laporan	3.968.505.757
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	Kab. Sumenep,	33 orang/bulan	3.268.505.757	APBD		33 orang/bulan	3.968.505.757
2	23	1	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana</b>		2 jenis	52.000.000			2 jenis	61.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan</i>	Kab. Sumenep,	1 paket	40.000.000	APBD		1 paket	41.000.000
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kab. Sumenep,	4 Orang	12.000.000	APBD		4 Orang	20.000.000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi</b>		<b>86%</b>	<b>692.000.000</b>			<b>86%</b>	<b>724.000.000</b>
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Sumenep,	1 paket	15.000.000	APBD		1 paket	16.000.000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan / peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Kab. Sumenep,	4 Orang 15 Unit	119.000.000	APBD		4 Orang 15 Unit	120.000.000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Sumenep,	7 paket	497.000.000	APBD		7 paket	498.000.000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan</i>	Kab. Sumenep,	3 paket	35.000.000	APBD		3 paket	36.000.000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan terselenggaranya pameran pembangunan	Kab. Sumenep,	20 jenis 1 Kali	43.000.000	APBD		20 jenis 1 Kali	44.000.000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD</i>	Kab. Sumenep,	46 laporan	100.000.000	APBD		46 laporan	117.000.000
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kab. Sumenep,	90 dokumen	50.000.000	APBD		90 dokumen	57.000.000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang perkantoran dalam 1 tahun</b>		<b>98%</b>	<b>144.000.000</b>			<b>98%</b>	<b>207.200.000</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sumenep,	7 Rekening	144.000.000	APBD	7 Rekening	207.200.000
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun</b>		<b>80%</b>	<b>441.000.000</b>		<b>84%</b>	<b>463.500.000</b>
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	Kab. Sumenep,	7 Mobil/4 kendaraan Roda 3/ 5 kendaraan roda 2	200.000.000	APBD	7 Mobil/4 kendaraan Roda 3/ 5 kendaraan roda 2	210.000.000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Sumenep,	60 Unit	41.000.000	APBD	60 Unit	43.500.000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang terpelihara	Kab. Sumenep,	7 Unit	200.000.000	APBD	7 Unit	210.000.000

**PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KABUPATEN SUMENEP**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						5.887.510.459,00							6.272.676.757,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.266.417.846,00							5.671.376.757,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.087.055.846,00							5.473.376.757,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor</i> <i>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</i>	95 % 95			95 % 95 %	4.754.111.906,00						95 % 95	4.668.905.757,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	-			2 Laporan	4.088.749.159,00			-	PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah	-	3.968.505.757,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				33 Orang/bulan	4.088.749.159,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		3.968.505.757,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana</i>	-			2 Jenis		36.569.010,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah	-	41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket		36.569.010,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	-			86 %	155.740.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah	-	199.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.170.900,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	9.961.600,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		12.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	13.731.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		36.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				22 Dokumen	18.030.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		18.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				46 Laporan	99.846.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		117.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemenuhan jasa Penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah selama 1 tahun</i>	-			88 %	217.181.101,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah	-	145.000.000,00	DINAS PERP USTA KAAAN DAN KEAR SIPAN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				7 Laporan	217.181.101,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		145.000.000,00	DINAS PERP USTA KAAAN DAN KEAR SIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemenuhan Sarana dan prasana perlengkapan serta peralatan dan Mesin yang dipelihara dalam 1 tahun</i>	-			84 %	255.872.636,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah	-	293.100.000,00	DINAS PERP USTA KAAAN DAN KEAR SIPAN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	119.525.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		135.600.000,00	DINAS PERP USTA KAAAN DAN KEAR SIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				72 Unit	23.501.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerinta h daerah		18.300.000,00	DINAS PERP USTA KAAAN DAN KEAR SIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	112.845.636,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerinta h daerah		139.200.000,00	DINAS PERP USTA KAAAN DAN KEAR SIPAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

	2.23.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	0,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	-	-	22.000.000,00	DINAS PERP USTA KKAAN DAN KEAR SIPAN
	2.23.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	-		22.000.000,00	DINAS PERP USTA KKAAN DAN KEAR SIPAN
2.	2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<i>Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina</i>	95 %			95 %	254.009.800,00						95 %	617.871.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan</i>	-			94 lembaga	233.336.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka	-	554.446.000,00	DINAS PERP USTA KKAAN DAN KEAR SIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)</i>				94 Layanan	50.093.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka		51.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>				86 Perpustakaan	183.243.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka		333.446.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				94 Orang	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan</i>				2000 Eksemplar	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan</i>	-			11000 pengunjung	20.673.800,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka	-	63.425.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat															
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan</i>				90 Lokus	20.673.800,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka		27.725,000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial															

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>				30 Perpustakaan	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lem bag a perp usta kaa n, mas yara kat dan Pem usta ka		35.700.000,00	DINA S PER PUS TAK AAN DAN KEA RSIP AN
3.	2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	-	-			-	78.934.140,00						-	186.600.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.934.140,00				PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-	-	86.600.000,00	DIN AS PER PUS TAK AAN DA N KEA RSI PAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			<i>Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno</i>				5 Orang	28.980.040,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-		30.600.000,00	DIN AS PER PUS TAK AAN DA N KEA RSI PAN
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</i>				3 Eksemplar	49.954.100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	-		56.000.000,00	DIN AS PER PUS TAK AAN DA N KEA RSI PAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terhimpun dan dikembangkan</i>	-			9 koleksi	0,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Masya rakat dan Pemus taka	-	100.000.000,00	DIN AS PER PUS TAK AAN DA N KEA RSI PAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan</i>				900 Eksemplar	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Masya rakat dan Pemus taka		100.000.000,00	DIN AS PER PUS TAK AAN DA N KEA RSI PAN
	2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>179.362.000,00</b>							<b>198.000.000,00</b>	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik	80 %			80 %	179.362.000,00					80 %	198.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	-			31 pencipta arsip	128.700.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip	-	140.000.000,00	DIN AS PE RP US TA KA AN DA N KE AR SIP AN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				31 Berkas	74.948.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip		85.000.000,00	DIN AS PE RP US TA KA AN DA N KE AR SIP AN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				31 Laporan	53.752.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip		55.000.000,00	B I D A N G A R S I P
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Arsip Statis yang dikelola</i> <i>Jumlah Arsip Statis yang dikelola</i>	-			12 series 14 series	50.662.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip	-	58.000.000,00	A R S I P
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis															
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				14 Arsip	50.662.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip		58.000.000,00	B i d a n g A r s i p

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

	X	NON URUSAN						621.092.613,00							601.300.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						621.092.613,00							601.300.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	95 % 95 %			95 % 95 %	621.092.613,00						95 % 95 %	601.300.000,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana	-			2 Jenis	6.000.000,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	-	-	6.500.000,00	D P K
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	6.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	-		6.500.000,00	D P K

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

X.XX.01.2.06	DPK	<i>Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi</i>	-			86 %	535.057.127,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-	-	499.800.000,00	D P K
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	535.057.127,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-	-	499.800.000,00	D P K
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			86 %	80.035.486,00			-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-	-	95.000.000,00	D P K
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>					80.035.486,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	-		95.000.000,00	D P K
<b>J U M L A H</b>								<b>5.887.510.459,00</b>							<b>6.272.676.757,00</b>	

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KABUPATEN SUMENEP**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelo mpo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							5.096.280.853,00	5.204.163.296,00	5.887.510.459,00							6.272.676.757,00			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																6.272.676.757,00			
	2 23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																6.074.676.757,00			
1	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor				95 % 95 %	95 % 95 %	4.334.605.929,00	4.442.548.172,00	5.438.796.519,00								5.270.205.757,00		
	2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			2 Laporan	2 Laporan	3.292.806.766,00	3.400.788.766,00	3.400.788.766,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		3.968.505.757,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																3.968.505.757,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.292.806.766,00	3.400.788.766,00	4.152.341.159,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				3.968.505.757,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana	-			2 Jenis	2 Jenis	36.572.800,00	36.569.010,00	36.569.010,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		47.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	36.572.800,00	36.569.010,00	36.569.010,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

												Sumudesa											
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sump, Semu Kemat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	NON URUSAN										5.096.280.853,00	5.204.163.296,00	5.887.510.459,00									6.272.676.757,00	
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										4.916.918.853,00	5.024.801.296,00	5.708.148.459,00									6.074.676.757,00
2	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			95% 95%	95% 95%	4.334.605.929,00	4.442.548.172,00	5.438.796.519,00					5.270.205.757,00					
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi kepegawaian yang terlaksana	-		2 Jenis	2 Jenis	36.572.800,00	36.569.010,00	36.569.010,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah	47.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							5.096.280.853,00	5.204.163.296,00	5.887.510.459,00									6.272.676.757,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										4.916.918.853,00	5.024.801.296,00	5.708.148.459,00									6.074.676.757,00	
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										4.916.918.853,00	5.024.801.296,00	5.708.148.459,00									6.074.676.757,00
3	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			95% 95%	95% 95%	4.334.605.929,00	4.442.548.172,00	5.438.796.519,00					5.270.205.757,00					

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	-			86 %	86 %	592.168.341,00	592.164.773,00	592.164.773,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		699.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.170.900,00	14.170.900,00	14.170.900,00	Kab. Sumenep, Semu a Kecamatan / Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	9.961.600,00	9.961.600,00	9.961.600,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	436.428.341,00	436.424.773,00	0,00	Kab. Sumenep, Semu a Kecamatan / Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2					NON URUSAN						5.096.280.853,00	5.204.163.296,00	5.887.510.459,00											
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.916.918.853,00	5.024.801.296,00	5.708.148.459,00											
4	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor				95 %	95 %	4.334.605.929,00	4.442.548.172,00	5.438.796.519,00										
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	-			86 %	86 %	592.168.341,00	592.164.773,00	592.164.773,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni	Aparatur Pemerintah		699.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN		



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

														esa									
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	86 %	86 %	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangs elok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2					NON URUSAN					5.096.280.853,00	5.204.163.296,00	5.887.510.459,00									6.272.676.757,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					4.916.918.853,00	5.024.801.296,00	5.708.148.459,00									6.074.676.757,00	
6	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor		95 %	95 %	4.334.605.929,00	4.442.548.172,00	5.438.796.519,00								5.270.205.757,00		
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	86 %	86 %	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.096.280.853,00	5.204.163.296,00	5.887.510.459,00									6.272.676.757,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.916.918.853,00	5.024.801.296,00	5.708.148.459,00									6.074.676.757,00	
7	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		95 %	95 %	4.334.605.929,00	4.442.548.172,00	5.438.796.519,00								5.270.205.757,00		
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa Penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah selama 1 tahun	-	88 %	88 %	144.983.400,00	144.955.501,00	144.955.501,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah			145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	144.983.400,00	144.955.501,00	217.181.101,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Sarana dan prasana perlengkapan serta peralatan dan Mesin yang dipelihara dalam 1 tahun	-			84 %	84 %	268.074.622,00	268.070.122,00	268.070.122,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah daerah		293.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	131.722.986,00	131.722.986,00	119.525.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			135.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	23.506.000,00	23.501.500,00	23.501.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			18.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	112.845.636,00	112.845.636,00	112.845.636,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			139.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

	2	23	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			0,00	0,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
8	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina			95 %	95 %	403.210.584,00	403.180.984,00	190.417.800,00							617.871.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	-		94 lembaga	94 lembaga	382.508.584,00	382.507.184,00	382.507.184,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lembaga perpustakaan, masyarakat dan Pemustaka		554.446.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				94 Layanan	94 Layanan	50.093.800,00	50.093.000,00	50.093.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			51.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				86 Perpustakaan	86 Perpustakaan	332.414.784,00	332.414.184,00	119.651.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			333.446.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				94 Orang	94 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan / Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			65.000.000,00	DINAS PERPUST AKAAN DAN KEARSIPA N
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka																	
					Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				2000 Eksem plar	2000 Eksem plar	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Kota Sume nep, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			105.000.000,00	DINAS PERPUST AKAAN DAN KEARSIPA N	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	-		11000 pengu jung	11000 pengu njung	20.702.000,00	20.673.800,00	20.673.800,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Lem baga perp ustak aan, masy arak at dan Pem ustak a			63.425.000,00	DINAS PERPUST AKAAN DAN KEARSIPA N
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				90 Lokus	90 Lokus	20.702.000,00	20.673.800,00	20.673.800,00	Kab. Sume nep, Kota Sume nep, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			27.725.000,00	DINAS PERPUST AKAAN DAN KEARSIPA N	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																	
					Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan / Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			35.700.000,00	DINAS PERPUST AKAAN DAN KEARSIPA N	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

9	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-													179.102.340,00	179.072.140,00	78.934.140,00												186.600.000,00					
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-													78.953.340,00	78.934.140,00	78.934.140,00				-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif							86.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																																	
						Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														5 Orang	5 Orang	28.999.240,00	28.980.040,00	28.980.040,00	Kab. Sumenep, Semu a Kecamatan / Semu a Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																																	
						Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														3 Eksemplar	3 Eksemplar	49.954.100,00	49.954.100,00	49.954.100,00	Kab. Sumenep, Semu a Kecamatan / Semu a Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					56.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terhimpun dan dikembangkan	-												9 koleksi	9 koleksi	100.149.000,00	100.138.000,00	100.138.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat dan Pemustaka					100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																																	
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan														900 Eksemplar	900 Eksemplar	100.149.000,00	100.138.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semu a Kecamatan / Semu a Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															179.362.000,00	179.362.000,00	179.362.000,00															198.000.000,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

10	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik			80 %	80 %	179.362.000,00	179.362.000,00	179.362.000,00							198.000.000,00												
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	-		31 pencipta arsip	31 pencipta arsip	128.700.000,00	128.700.000,00	128.700.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip			140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																											
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			31 Berkas	31 Berkas	74.948.000,00	74.948.000,00	74.948.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																											
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			31 Laporan	31 Laporan	53.752.000,00	53.752.000,00	53.752.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	-		-	12 series 14 series	50.662.000,00	50.662.000,00	50.662.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pencipta arsip			58.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																											
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			14 Arsip	14 Arsip	50.662.000,00	50.662.000,00	50.662.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan / Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				58.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
<b>J U M L A H</b>												<b>5.096.280.853,00</b>	<b>5.204.163.296,00</b>	<b>5.887.510.459,00</b>																		<b>6.272.676.757,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, disamping untuk mencapai tujuan yang diharapkan, juga dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban terhadap tupoksi mengarah pada obyektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SUMENEP**



**RUDI YUYIANTO, SE., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197003181998031005

# PERUBAHAN RENJA

**DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**

**TAHUN 2024**



**DEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah dapat menyajikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang akan dilakukan pada sekaligus sebagai bahan menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di era Otonomi Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan berpedoman dari hasil yang telah dicapai serta mengkaji dari adanya permasalahan dan bentuk-bentuk solusi yang dapat dilakukan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dapat semakin meningkat.

Semoga Laporan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah di urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Sumenep, 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	6
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>11</b>
3.1 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024 .....	11
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>16</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Dokumen Renja Perubahan**

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN 2024

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Relatif rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan :

1. Belanja honor pembantu REDES
  - a. Honor pembantu REDES yang tidak bisa cairkan karena ada beberapa desa yang honorinya sudah dimasukkan di APBDes sehingga tidak lagi di cairkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
  - b. Masih terjadi keterlambatan kelengkapan SPJ sehingga berimbas pada mundurnya periode realisasi.

2. Belanja Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.  
Proses pencairan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas karena masih proses distribusi hasil cetak buku profil.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir E. 81 berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : TRIMULAN I TAHUN 2024**

No	Saaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				8	9	10	I		II		13=9+10+11+12		14=130%*100%		15=7+13		16=15*100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	8	9	10																		
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.350.800.642	1.320.846.144		3.738.172.407																	
		2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.970.787.655	1.132.071.944	25	3.078.366.339	25	884.300	25	884.300	50	4.210.438.283	50	46.93	50	4.210.438.283	50	46.93	50	4.210.438.283	50	46.93	50
		2 12 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.079.800	884.300	3		3	884.300	3	884.300	6	884.300	6	21.68	6	884.300	6	21.68	6	884.300	6	21.68	6
		2 12 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.155.800		1		1		1		50,00												
		2 12 01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	951.100																				
		2 12 01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
		2 12 01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	885.000	410.400	1		1	410.400	1	410.400	100,00	410.400	1	46,37	1	410.400	1	46,37	1	410.400	1	46,37	1
		2 12 01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.087.900	473.900	1		1	473.900	1	473.900	50,00	473.900	2	43,56	2	473.900	2	43,56	2	473.900	2	43,56	2
		2 12 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.389.681.480	884.370.039	3	1.770.167.723	3	884.370.039	3	884.370.039	6	2.634.537.762	6	41,23	6	2.634.537.762	6	41,23	6	2.634.537.762	6	41,23	6
		2 12 01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.384.155.180	863.687.239	43	1.768.127.923	43	863.687.239	43	863.687.239	42	2.631.815.162	42	41,22	42	2.631.815.162	42	41,22	42	2.631.815.162	42	41,22	42
		2 12 01	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.163.700	682.800	1		1	682.800	1	682.800	100,00	1.019.400	1	87,60	1	1.019.400	1	87,60	1	1.019.400	1	87,60	1
		2 12 01	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/ Semester SKPD	4.342.600	1.703.200	3	1.703.200	3	1.703.200	3	1.703.200	6	1.703.200	6	39,22	6	1.703.200	6	39,22	6	1.703.200	6	39,22	6
		2 12 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.172.710																				
		2 12 01	02 Pengadaan Pakaran Dinas beserta Alibul Kelengkapannya	61.672.710																				
		2 12 01	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdesakan Tugas dan Fungsi	17.500.000																				
		2 12 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.144.193.034	204.922.274	5	612.015.750	5	204.922.274	5	204.922.274	12	816.938.024	12	71,40	12	816.938.024	12	71,40	12	816.938.024	12	71,40	12
		2 12 01	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	9.235.700	825.000	2		2	825.000	2	825.000	100,00	4.430.500	2	47,97	2	4.430.500	2	47,97	2	4.430.500	2	47,97	2
		2 12 01	02 Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	686.425.900	128.516.800	10	544.595.750	10	128.516.800	10	128.516.800	100,00	673.110.250	10	98,06	10	673.110.250	10	98,06	10	673.110.250	10	98,06	10
		2 12 01	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.542.950	15.623.950	2	29.146.500	2	15.623.950	2	15.623.950	100,00	44.770.450	2	34,30	2	44.770.450	2	34,30	2	44.770.450	2	34,30	2
		2 12 01	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.375.800	265.000	1		1	265.000	1	265.000	100,00	2.375.000	1	9,00	1	2.375.000	1	9,00	1	2.375.000	1	9,00	1
		2 12 01	06 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	39.480.000	5.275.000	3	8.000.000	3	5.275.000	3	5.275.000	50,00	13.275.000	3	33,62	3	13.275.000	3	33,62	3	13.275.000	3	33,62	3
		2 12 01	09 Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.205.000	54.426.924	3	24.550.000	3	54.426.924	3	54.426.924	50,00	78.976.824	3	43,34	3	78.976.824	3	43,34	3	78.976.824	3	43,34	3
		2 12 01	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.922.674																				
		2 12 01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	704.988.972																				
		2 12 01	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.700.000																				
		2 12 01	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	627.288.972		10		9	589.521.000	19	589.521.000	40,43	589.521.000	19	93,98	19	589.521.000	19	93,98	19	589.521.000	19	93,98	19
		2 12 01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.844.398	62.874.331	3	53.636.046	3	62.874.331	3	62.874.331	100,00	106.510.377	3	33,11	3	106.510.377	3	33,11	3	106.510.377	3	33,11	3
		2 12 01	08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.500.000	3.112.784	3		3	3.112.784	3	3.112.784	50,00	5.301.773	3	9,81	3	5.301.773	3	9,81	3	5.301.773	3	9,81	3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah id Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah id Tahun 2024 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	8		9				10				11				12				13				
2 12 01	2.08	04	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	269.830.232	3	35.461.547	3	39.147.857	6	74.689.604	6	37.16	6	74.689.604	6	37.16	6	74.689.604	6	37.16	6	74.689.604	16-156x100%	17	
2 12 01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	67.314.166	3	14.300.000	3	12.300.000	6	25.000.000	6	39.52	6	26.600.000	6	39.52	6	26.600.000	6	39.52	6	26.600.000			
2 12 01	2.09	01	Pemeliharaan Bazar Milik Daerah Penunjang Urusan	41 unit	327.047.261	13	9.621.000	15	53.025.820	28	62.045.820	28	18.97	28	62.045.820	28	18.97	28	62.045.820	28	18.97	28	62.045.820	103.41		
2 12 01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	2 unit	163.570.000	1	5.000.000	2	30.059.600	3	35.059.600	3	21.43	3	35.059.600	3	21.43	3	35.059.600	3	21.43	3	35.059.600			
2 12 01	2.09	06	Pemeliharaan/Perbaikan dan Mekanik Lainnya	50 unit	11.590.000	12	4.021.000	15	15.683.500	27	19.714.500	27	29.24	27	19.714.500	27	29.24	27	19.714.500	27	29.24	27	19.714.500			
2 12 01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rengunan Lainnya	5 gedung	111.927.261				7.272.720		7.272.720		6.50		7.272.720		6.50		7.272.720		6.50		7.272.720			
2 12 02	2.01	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	81 %	2.202.218.925	20	180.615.000	20	979.877.000	40	760.482.000	40	34.53	40	760.482.000	40	34.53	40	760.482.000	40	34.53	40	760.482.000	43.01	15.60	
2 12 02	2.01	05	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	63.000 dokumen	1.828.406.085	15.750	169.800.000	15.750	555.036.000	31.500	724.836.000	31.500	39.64	31.500	724.836.000	31.500	39.64	31.500	724.836.000	31.500	39.64	31.500	724.836.000	47.73	16.86	
2 12 02	2.01	05	Pencatatan, Pencatatan dan Penetiban Dokumen Atas Pelaporan Penduduk Kependudukan	46000 dokumen	1.869.766.785	11.250	169.800.000	15.583	545.412.000	28.813	715.212.000	28.813	38.52	28.813	715.212.000	28.813	38.52	28.813	715.212.000	28.813	38.52	28.813	715.212.000			
2 12 02	2.01	07	Penetiban Dokumen atas Hasil Pelaporan Penduduk Kependudukan	12 laporan	18.639.300	3		3	9.624.000	6	9.624.000	6	51.83	6	9.624.000	6	51.83	6	9.624.000	6	51.83	6	9.624.000			
2 12 02	02.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	12 kali	306.120.240	3		3						25.00				300.00					0.00			
2 12 02	02.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	20000 dokumen	306.120.240																					
2 12 02	02.03		Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kali	61.829.100	3	10.815.000	3	24.841.000	6	35.656.000	6	51.67	6	35.656.000	6	51.67	6	35.656.000	6	51.67	6	35.656.000	14,74		
2 12 02	02.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Tertentu Pendaftaran Penduduk	10000 dokumen	61.829.100	1.751	10.815.000	2.500	24.841.000	4.251	35.656.000	4.251	57.67	4.251	35.656.000	4.251	57.67	4.251	35.656.000	4.251	57.67	4.251	35.656.000			
2 12 02	02.04		Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kali	5.863.500																					
2 12 02	02.04	02	Pembinaan dan Penguasaan terkait Pendaftaran Penduduk	2 laporan	5.863.500																					
2 12 03	2.01		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	90 %	8.159.200	25	8.159.200	25	55.227.400	50	63.386.600	50	68.43	50	63.386.600	50	68.43	50	63.386.600	50	68.43	50	63.386.600	45,89		
2 12 03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	2 buah	81.757.062				48.946.000		48.946.000				48.946.000				48.946.000				48.946.000			
2 12 03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	20 paket	61.757.062				48.946.000		48.946.000				48.946.000				48.946.000				48.946.000			
2 12 03	2.02		Penyenggaraan Pencatatan Sipil	12 laporan	29.534.500	3	8.159.200	3	6.281.400	6	14.440.600	6	48.89	6	14.440.600	6	48.89	6	14.440.600	6	48.89	6	14.440.600	37,40		
2 12 03	2.02	04	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Tertentu Pendaftaran Sipil	12 laporan	29.534.500	3	8.159.200	3	6.281.400	6	14.440.600	6	48.89	6	14.440.600	6	48.89	6	14.440.600	6	48.89	6	14.440.600			
2 12 04	2.03		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	76 %	62.568.500				24.701.668		24.701.668				24.701.668				24.701.668				24.701.668	11,79		
2 12 04	2.03	04	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	2 kali	62.568.500				24.701.668		24.701.668				24.701.668				24.701.668				24.701.668	0,00		
2 12 04	2.03	04	Penyenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	5 dokumen	26.139.800				629.000		629.000				629.000				629.000				629.000			
2 12 04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	1 laporan	8.202.600																					
2 12 04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku	1 laporan	28.226.100				24.072.668		24.072.668				24.072.668				24.072.668				24.072.668			
2 12 05	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %	23.934.000	65		65							65.00				65.00				65.00	0,00		
2 12 05	2.01	01	Penyusunan Profil Kependudukan	2 dokumen	23.934.000																					
2 12 05	2.01	01	Penyusunan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	400 dokumen	23.934.000																					
				Rata-rata capaian kinerja (%)				51%				Rendah				Sangat Rendah										
				Predikat kinerja																						
				Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan sampai ke pelaksana dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat																						
				Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	8		9	10	14=138x100%	15=7+13	16=156x100%	17	
<p>Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan kebijakan terbaru dalam Kepengurusan dokumen kependudukan</p> <p>Tidak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya : mempercepat proses pelaksanaan dan pencairan dari seluruh sub kegiatan yang direncanakan</p>												

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Perubahan Belanja SKPD Tahun 2024**

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 11.788.252.260,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.607.296.489,- (16%) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.180.955.771,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 9.752.254.626,- atau bertambah sebesar Rp. 1.951.311.842,- (25%) dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.800.942.784,-.
- b. Program Pendaftaran Penduduk dianggarkan sebesar Rp. 1.848.123.572,- mengalami penurunan sebesar Rp. 354.095.353,- (16%) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.202.218.925,-.
- c. Program Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp. 101.371.562,- atau bertambah sebesar Rp. 10.080.000,- (11% ) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 91.291.562,-
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dianggarkan sebesar Rp. 62.568.500,- dan tidak mengalami perubahan.
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dianggarkan sebesar Rp. 23.934.000,- dan tidak mengalami perubahan.

### 3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :





NO	KODE	URAIAN/BLOK PROGRAM/KEGIATAN/SUB-REGISTRASI/SUB-REGISTRASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB-REGISTRASI/SUB-REGISTRASI	TARIC PERIODE PERENCANAAN	REVISI PERIODE PERENCANAAN	CAPAIAN HINDAK DAN HESORANGIA PERENCANAAN							KELONK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						TARIC 2024		REVISI PERENCANAAN 2024		BERBENTUK BERENTUK (10-12)							
						SEBELUM	SEBESAR	REVISI 2024	REVISI 2024	10	11	12					13
1	2	2.12.01.2.01.001	Penyediaan Jasa Kesehatan	Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL
				Jumlah Layanan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIKATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	MASEI / REALISASI / RENCANA OPD TAHUN 2022	PENCAPAIAN TARGET RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)				LUMBU	SUMBER DANA		PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRABANDA MAJU KECANA TAMAN 2025	PENCAPAIAN / PERSIAPAN / PEMBANGUNAN / JAWAB		
						SEBELUM	SEBESAR	PKPD 2022	PKPD 2023		APRO 2024	APRO 2024	KASIONAL	DAIRAH					
						8	9	10	11		12	13	14	15				16	17
2	2.12.02.2.01.005	Peningkatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, dan Keperawatan yang ditangani dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	4000	4000	1.829.752.752,00	1.829.752.752,00	1.829.752.752,00	1.829.752.752,00	1.829.752.752,00	1.829.752.752,00	DANA TRANSFER UMUM-KEMENDAGRI	1	17	18	19	20	21	
2.12.02.2.01.006	2.12.02.2.01.007	2.12.02.2.01.008	2.12.02.2.01.009	2.12.02.2.01.010	2.12.02.2.01.011	2.12.02.2.01.012	2.12.02.2.01.013	2.12.02.2.01.014	2.12.02.2.01.015	2.12.02.2.01.016	2.12.02.2.01.017	2.12.02.2.01.018	2.12.02.2.01.019	2.12.02.2.01.020	2.12.02.2.01.021	2.12.02.2.01.022	2.12.02.2.01.023	2.12.02.2.01.024	
2.12.02.2.01.025	2.12.02.2.01.026	2.12.02.2.01.027	2.12.02.2.01.028	2.12.02.2.01.029	2.12.02.2.01.030	2.12.02.2.01.031	2.12.02.2.01.032	2.12.02.2.01.033	2.12.02.2.01.034	2.12.02.2.01.035	2.12.02.2.01.036	2.12.02.2.01.037	2.12.02.2.01.038	2.12.02.2.01.039	2.12.02.2.01.040	2.12.02.2.01.041	2.12.02.2.01.042	2.12.02.2.01.043	2.12.02.2.01.044
2.12.02.2.01.045	2.12.02.2.01.046	2.12.02.2.01.047	2.12.02.2.01.048	2.12.02.2.01.049	2.12.02.2.01.050	2.12.02.2.01.051	2.12.02.2.01.052	2.12.02.2.01.053	2.12.02.2.01.054	2.12.02.2.01.055	2.12.02.2.01.056	2.12.02.2.01.057	2.12.02.2.01.058	2.12.02.2.01.059	2.12.02.2.01.060	2.12.02.2.01.061	2.12.02.2.01.062	2.12.02.2.01.063	2.12.02.2.01.064
2.12.02.2.01.065	2.12.02.2.01.066	2.12.02.2.01.067	2.12.02.2.01.068	2.12.02.2.01.069	2.12.02.2.01.070	2.12.02.2.01.071	2.12.02.2.01.072	2.12.02.2.01.073	2.12.02.2.01.074	2.12.02.2.01.075	2.12.02.2.01.076	2.12.02.2.01.077	2.12.02.2.01.078	2.12.02.2.01.079	2.12.02.2.01.080	2.12.02.2.01.081	2.12.02.2.01.082	2.12.02.2.01.083	2.12.02.2.01.084

... (continued text) ...

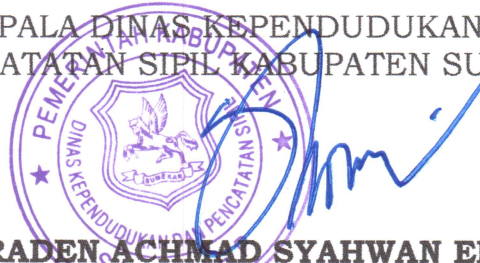
NO	KODE	URAIAN JUDUL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARHET ANKER PERIODE PERENCANAAN TAHUN 2022	REALISASI TARGET REKORD TAHUN 2022	PENCAPAIAN TARGET REKORD TAHUN 2022	CAPAIAN BERJAYA DAN KERANGKA PERDIAMANNI					PRARUBAN MAJU RENCANA TAHUN 2023			PENCAPAIAN PERENCANAAN PERANGKOTAN JANGSI						
							REKORD PERUBAHAN 2024		PAGU INKONATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			KELCUMPOK BAHAN	TARHET	PAGU INKONATIF (Rp)			
							REKORD 2024	REKORD 2024	APRIL 2024	APRIL 2024			NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.12.04.2.03.004		Penyenggaraan Pemakaian Dana Kependidikan					5 Dokumen	5 Dokumen	31.333.800,00	26.159.800,00	26.30.800,00	4.184.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-					30.339.700,00	UNDAK KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN SIPIL
2.12.04.2.03.005		Penyenggaraan Pemakaian Dana Kependidikan					1 Dokumen	1 Dokumen	104.800,00	23.000,00	8.227.000,00	7.973.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-					24.000,00	UNDAK KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN SIPIL
2.12.04.2.03.007		Kontribusi "Infrastruktur" dan "Mata Air" Pemukiman Masyarakat Desa Bangsal					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-					20.000,00	UNDAK KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN SIPIL
2.12.05		PROGRAM PENGALAMAN PROFIL BERKENDARAAN					100 %	100 %	23.894.000,00	23.894.000,00	23.894.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-				21.653.000,00	UNDAK KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN SIPIL	
2.12.05.2.01		Pemilihan Profil Kependidikan					400 buku dokumen	400 buku dokumen	23.894.000,00	23.894.000,00	23.894.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-				31.080.000,00	UNDAK KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN SIPIL	
2.12.05.2.01.001		Pemilihan Dana Kependidikan Kabupaten Kota					400 Dokumen	400 Dokumen	23.894.000,00	23.894.000,00	23.894.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	-				31.080.000,00	UNDAK KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN SIPIL	
<b>J U M L A H</b>										<b>9.200.800.000,00</b>	<b>10.180.853.771,00</b>	<b>11.088.232.200,00</b>	<b>1.887.407.735,00</b>							<b>12.084.232.066,00</b>	

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai dokumen perubahan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024.

Sumenep, 06 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 198809 1 001

# **RENCANA KERJA 2024 ( RENJA ) Perubahan**

**BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan, Program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dan berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Sumenep, 22 Mei 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP



R. TITIK SURYATI, SH., MH  
NIP. 19660409 199302 2 002  
Pembina Utama Muda

# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang..... 1
- 1.2. Landasan Hukum ..... 2
- 1.3. Maksud dan tujuan ..... 3
- 1.4. Sistematika Penulisan ..... 3

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja Tahun Lalu dan Capaian  
Renstra..... 5
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ..... 30
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd..... 37
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
..... 57

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi ..... 58
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD ..... 58
- 3.3. Program Dan Kegiatan..... 59

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan..... 64
- 4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas  
Provinsi..... 64
- 4.3. Prioritas Perangkat Daerah .....65

## BAB V PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumenep tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumenep tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi BKAD Kabupaten Sumenep tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam rencana strategis BKAD Kabupaten Sumenep yaitu Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Yang Akuntabel dan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Pelaksanaan disebutkan bahwa Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja OPD menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tugas pokok dan fungsi OPD serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum OPD.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

9. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP ini adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
2. Tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan ;
3. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I. Pendahuluan memuat; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, menjelaskan tentang hasil kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan review terhadap rancangan awal RKPD

- Bab III. Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah, menjelaskan telaah terhadap kebijakan , tujuan dan sasaran renja.
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Program dan Kegiatan.
- Bab V. Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BKAD Tahun 2024 didasarkan pada Renstra BKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) BKAD Kabupaten Sumenep untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2024 dan pencapaian Renstra BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2016 - 2021)**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2016-2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah ( 2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7(5/6)	8	9 = (4+6+8)	10 = (9/4)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEUANGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP Perangkat Daerah						A	A	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun						5 Dokumen	5 Dokumen	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4 Laporan	4 Laporan	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>						<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						79 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>						<b>4 Jenis</b>	<b>4 Jenis</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						5 Orang	5 Orang	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20 Orang	20 Orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>						<b>15 jenis</b>	<b>15 jenis</b>	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						10 Paket	10 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						20 Paket	20 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						10 Paket	10 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						2 Dokumen	2 Dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30 Laporan	30 Laporan	
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan						4 unit	4 unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan						4 Jenis	4 Jenis	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						90%	90%	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						4 Laporan	4 Laporan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>						<b>112 Unit</b>	<b>112 Unit</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						50 Unit	50 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						60 Unit	60 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi						2 Unit	2 Unit	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						<b>92%</b>	<b>92%</b>	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase Rencana anggaran yg disusun						100%	100%	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi						53 Dokumen ( Semua SKPD)	53 Dokumen ( Semua SKPD)	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi						53 Dokumen ( Semua SKPD)	53 Dokumen ( Semua SKPD)	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						2 Dokumen	2 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						2 Dokumen	2 Dokumen	
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>						<b>95%</b>	<b>95%</b>	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						6 Dokumen	6 Dokumen	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						183 Dokumen	183 Dokumen	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						12 Dokumen	12 Dokumen	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						12 Laporan	12 Laporan	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						1 Dokumen	1 Dokumen	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						72 orang	72 orang	
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>						<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						8 Laporan	8 Laporan	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						3 Laporan	3 Laporan	

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi						1 Laporan	1 Laporan	
Koordinasi dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						35 Orang	35 Orang	
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>						<b>95%</b>	<b>95%</b>	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						1 Laporan	1 Laporan	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1 Laporan	1 Laporan	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase kepatuhan OPD penyampaian laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>						<b>91%</b>	<b>91%</b>	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>						<b>91%</b>	<b>91%</b>	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						53 Dokumen ( Semua SKPD)	53 Dokumen ( Semua SKPD)	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	

Pelaksanaan Renja BKAD Kabupaten Sumenep diterapkan ke dalam 3 Program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 100% (Realisasi Wajar Tanpa Pengecualian) dengan indikator opini hasil pemeriksaan BPK-RI, dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, dari hasil Pemeriksaan BPK-RI atas target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan program diantaranya :

- 1) Tercapainya target tertib administrasi pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan adanya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Meningkatnya kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA) agar pengelolaan BMD menjadi lebih mudah, dapat dipahami serta dapat terinventarisasi dengan baik.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

BKAD Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	INDIKATOR	SPM/Standart Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				(Tahun n-2)	(Tahun n-)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n+2)	TAHUN n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>INDIKATOR SASARAN:</b>												
1	Nilai Opini atas audit BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK			80%	85%	87%	89%	90%	80%	85%	87%	89%	

## **2.2 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKAD KABUPATEN SUMENEP**

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyajikan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut telah mewujudkan tata kelola asset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan asset daerah sehingga data barang barang milik daerah yang akurat ;
4. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
5. Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1) Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat telah dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
- b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan forum komunikasi pengurus barang milik daerah;
- c. Dipergunakan SIVA dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
- d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;

- e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.
- 2) OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - c. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan dalam rangka pelaporan baik Bulanan, Triwulanan, ataupun Semesteran menggunakan Sistem yang sudah berjalan yaitu SIPD.
  - d. Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak Kemendagri mengenai perkembangan dan update terbaru mengenai fitur-fitur tambahan di Aplikasi Keuangan (SIPD).

### **2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan,

indicator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP Tahun 2024, adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 terlampir :

Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sumenep

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Hasil Analisa Kebutuhan			
	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				584.644.402.898	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				584.644.402.898
KEUANGAN				584.644.402.898	KEUANGAN				584.644.402.898
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	BKAD Kab. Sumen ep	SAKIP Perangkat Daerah	A	52.858.195.102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKAD Kab. Sumenep	SAKIP Perangkat Daerah	A	52.858.195.102
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kab. Sumen ep	Jumlah Dokumen perencanaan,p enganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Dokum en	2.662.720	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen perencanaan,penga nggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	2.662.720

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.366.720	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.366.720
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.296.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.296.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>49.309.826.406</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>49.309.826.406</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	49.300.016.406	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	49.300.016.406

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.810.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.810.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>9.000.000</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	9.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	<b>15 jenis</b>	<b>2.569.469.248</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	<b>15 jenis</b>	<b>2.569.469.248</b>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16.571.967	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16.571.967
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	21.840.580	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	21.840.580
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.144.086.851	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.144.086.851
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.388.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.388.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	116.373.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	116.373.600

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	89.797.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	89.797.000
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	169.410.750	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	169.410.750
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 unit	-	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	4 unit	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	4 Jenis	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	4 Jenis	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	90%	<b>575.701.722</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	90%	<b>575.701.722</b>

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	575.701.722	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	575.701.722
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>112 Unit</b>	<b>391.535.006</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>112 Unit</b>	<b>391.535.006</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	97.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	97.480.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 Unit	222.236.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 Unit	222.236.006
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	71.819.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	71.819.000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>92%</b>	<b>531.282.047.050</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>93%</b>	<b>531.282.047.050</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Persentase Rencana anggaran yg disusun	100%	<b>641.303.516</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Persentase Rencana anggaran yg disusun	100%	<b>641.303.516</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	68.623.724	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	68.623.724
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	45.541.112	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	45.541.112
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen ( Semua SKPD)	7.942.716	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen ( Semua SKPD)	7.942.716
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen ( Semua SKPD)	13.920.732	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen ( Semua SKPD)	13.920.732

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	274.244.020	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	274.244.020
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	231.031.212	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	231.031.212
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>	<b>95%</b>	<b>262.299.904</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>	<b>95%</b>	<b>262.299.904</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	35.179.800	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	35.179.800

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	10.045.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	10.045.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	34.430.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	34.430.000

<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>	<p><b>BKAD Kab. Sumenep</b></p>	<p>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>41.164.000</p>	<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>	<p><b>BKAD Kab. Sumenep</b></p>	<p>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>41.164.000</p>
---	---	--	-----------------------	-------------------	---	---	--	-------------------	-------------------

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	134.666.854	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	134.666.854
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	6.814.250	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang	6.814.250
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>301.297.200</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>301.297.200</b>
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	48.207.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	48.207.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	72.129.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	72.129.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	56.554.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	56.554.000
Koordinasi dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	1 Dokumen	97.290.000	Koordinasi dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	97.290.000

		APBD Kabupaten/Kota							
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumen ep</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Provinsi	35 Orang	27.117.200	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	35 Orang	27.117.200

<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>	<b>95%</b>	<b>530.077.146.430</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>	<b>95%</b>	<b>530.077.146.430</b>
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	525.077.146.430	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	525.077.146.430
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000.000	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000.000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase kepatuhan OPD penyampaian laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>91%</b>	<b>504.160.746</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Persentase kepatuhan OPD penyampaian laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>93%</b>	<b>504.160.746</b>
Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>91%</b>	<b>504.160.746</b>	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>91%</b>	<b>504.160.746</b>
Penyusunan Standar Harga	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Standart Harga yang Disusun	1 Dokumen	190.356.700	Penyusunan Standar Harga	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Standart Harga yang Disusun	1 Dokumen	190.356.700
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	53 Dokumen ( Semua SKPD)	12.854.496	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	53 Dokumen ( Semua SKPD)	12.854.496
Inventarisasi Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	61.829.550	Inventarisasi Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	61.829.550

Pengamanan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	136.328.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	136.328.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	umlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	102.792.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	umlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	102.792.000

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada BKAD Kabupaten Sumenep selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024  
Kabupaten Sumenep

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumenep

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Vol.	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
<b>NIHIL</b>						

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi**

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP merupakan OPD yang bertugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang administrasi keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan fungsi antara lain :

perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup keuangan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup administrasi keuangan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Sejak tahun 2021 Pemerintah menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Perencanaan, Penganggaran hingga Pengawasan secara terpusat yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan yang akan dicapai dalam renja ini antara lain :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan,efisien dan efektif ;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas - tugas dengan lebih baik.

#### **Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :**

1. Terwujudnya Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan lainnya ;
2. Tercapainya keseimbangan dalam penyusunan anggaran secara proposional antara belanja aparat dan pelayanan publik ;
3. Terlaksananya penganggaran yang berbasis kinerja ;
4. Terlaksananya pembukuan sesuai dengan norma yang berlaku ;
5. Memberikan informasi yang handal, mudah dipahami sehingga mampu menyajikan informasi keuangan dan aset yang berdaya guna ;

6. Tercukupinya pemenuhan aset untuk kepentingan Badan dan publik secara bertahap ;
7. Terlaksananya perubahan status hukum aset daerah dan terjaganya keamanan aset daerah ;
8. Terwujudnya inventarisasi aset daerah yang akurat ;

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Program yang mendukung Unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Satuan Perangkat Kerja Daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

##### **1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD

##### **1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Bimbingan Teknis Implementasi peaturan perundang-undangan

##### **1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

### **1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah memiliki Sub Kegiatan diantaranya:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

### **1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **1.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
13. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

### **1.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

### **1.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah diantaranya adalah :

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **1.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki Sub Kegiatan diantaranya :

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

### **3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **3.1 Pengelolaan barang Milik Daerah**

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik daerah memiliki Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Inventarisasi Barang Milik Daerah
3. Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

## **BAB 4**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BKAD Kabupaten Sumenep untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan BKAD Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

#### **4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi**

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu melaksanakan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah. BKAD Kabupaten Sumenep tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, BKAD berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran penatausahaan keuangan daerah, dan

mengelolah aset daerah kabupaten sumenep sehingga Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten yang tertib administrasi dan mandiri dalam perekonomian daerah.

#### **4.3 Prioritas Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas BKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					584.644.402.898			715.809.056.753	
	<b>KEUANGAN</b>					584.644.402.898			715.809.056.753	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>A</b>	52.858.195.102		<b>A</b>	70.520.001.534	

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>2.662.720</b>			<b>5 Dokumen</b>	<b>8.047.500</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	1.366.720			1 Dokumen	5.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	4 Laporan	1.296.000			4 Laporan	3.047.500
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>49.309.826.406</b>			<b>6 Laporan</b>	<b>63.807.793.414</b>

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	79 Orang/Bulan	49.300.016.406			79 Orang/Bulan	63.769.325.914
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	9.810.000			1 Dokumen	38.467.500
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>9.000.000</b>			<b>4 Jenis</b>	<b>30.762.500</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	5 Orang	9.000.000			5 Orang	30.762.500
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	20 Orang	-			20 Orang	-

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>15 jenis</b>	<b>2.569.469.248</b>			<b>15 jenis</b>	<b>4.753.890.570</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	10 Paket	16.571.967			10 Paket	42.875.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	20 Paket	21.840.580			20 Paket	38.980.780
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	10 Paket	2.144.086.851			10 Paket	3.765.980.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Paket	11.388.500			1 Paket	34.870.900
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	2 Dokumen	116.373.600			2 Dokumen	197.429.100

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	30 Laporan	89.797.000			30 Laporan	305.774.190
		Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	169.410.750			1 Dokumen	367.980.600
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	4 unit	-			4 unit	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	4 Jenis	-			4 Jenis	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	90%	<b>575.701.722</b>			90%	<b>578.960.800</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	4 Laporan	575.701.722			4 Laporan	578.960.800

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>112 Unit</b>	<b>391.535.006</b>			<b>112 Unit</b>	<b>1.090.546.750</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	50 Unit	97.480.000			50 Unit	330.670.540
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	60 Unit	222.236.006			60 Unit	498.985.450
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	2 Unit	71.819.000			2 Unit	260.890.760
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>92%</b>	<b>531.282.047.050</b>			<b>92%</b>	<b>641.409.055.219</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		Persentase Rencana anggaran yg disusun	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	100%	<b>641.303.516</b>			100%	<b>919.827.580</b>

		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	68.623.724			1 Dokumen	112.950.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	45.541.112			1 Dokumen	77.970.230
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	53 Dokumen ( Semua SKPD)	7.942.716			53 Dokumen ( Semua SKPD)	8.109.349
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	53 Dokumen ( Semua SKPD)	13.920.732			53 Dokumen ( Semua SKPD)	12.191.596
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	2 Dokumen	274.244.020			2 Dokumen	381.510.499
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	2 Dokumen	231.031.212			2 Dokumen	304.463.198

	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>95%</b>	<b>262.299.904</b>			<b>95%</b>	<b>462.200.457</b>
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	6 Dokumen	35.179.800			6 Dokumen	64.518.390
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	183 Dokumen	10.045.000			183 Dokumen	17.826.380

		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	12 Dokumen	34.430.000			12 Dokumen	56.279.850
--	--	--	--	----------------------------------	---------------	------------	--	--	---------------	------------

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	12 Laporan	41.164.000			12 Laporan	49.436.200
--	--	--	---	----------------------------------	------------	------------	--	--	------------	------------

		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	134.666.854			1 Dokumen	262.354.637
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	72 orang	6.814.250			72 orang	11.785.000
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>100%</b>	<b>301.297.200</b>			<b>100%</b>	<b>620.840.037</b>
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	8 Laporan	48.207.000			8 Laporan	97.879.000
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	3 Laporan	72.129.000			3 Laporan	205.678.900

		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Laporan	56.554.000			1 Laporan	61.033.022
--	--	--	---	----------------------------------	-----------	------------	--	--	-----------	------------

		Koordinasi dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	97.290.000			1 Dokumen	192.131.015
--	--	--	--	----------------------------------	-----------	------------	--	--	-----------	-------------

		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	35 Orang	27.117.200			35 Orang	64.118.100
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>95%</b>	<b>530.077.146.430</b>			<b>95%</b>	<b>639.406.187.145</b>
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Laporan	525.077.146.430			1 Laporan	617.647.832.145
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Laporan	5.000.000.000			1 Laporan	17.000.000.000
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Laporan	5.000.000.000			1 Laporan	4.758.355.000

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase kepatuhan OPD penyampaian laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>91%</b>	<b>504.160.746</b>			<b>91%</b>	<b>3.800.000.000</b>
		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	<b>91%</b>	<b>504.160.746</b>			<b>91%</b>	<b>3.800.000.000</b>
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang Disusun	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	190.356.700			1 Dokumen	290.000.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	53 Dokumen ( Semua SKPD)	12.854.496			53 Dokumen ( Semua SKPD)	60.000.000
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Laporan	61.829.550			1 Laporan	445.000.000

		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Laporan	136.328.000			1 Laporan	2.750.000.000
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<b>BKAD Kab. Sumenep</b>	1 Dokumen	102.792.000			1 Dokumen	335.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumenep merupakan sebagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sumenep.

Disamping itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat mengatur arah perkembangannya dalam pencapaian hasil yang diharapkan selain dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya yang maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BKAD Kabupaten Sumenep

Sumenep, 22 Mei 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP



R. TITIK SURYATI, SH., MH  
NIP. 19660409 199302 2 002  
Pembina Utama Muda

**TAHUN  
2024**

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	3
1.1.	Latar Belakang .....	3
1.2.	Landasan Hukum .....	4
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	6
1.4.	Sistematika Penulisan .....	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	8
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	18
BAB IV	PENUTUP .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Kerja ini harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disesuaikan dengan RKPD Perubahan Kabupaten Sumenep.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perubahan indikator serta target kinerja yang meliputi tujuan dan sasaran BPBD, serta indikator tujuan dan sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Perubahan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dokumen perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja triwulan pertama tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan perubahan renja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

(selama Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan / pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep ini meliputi 4 bab yaitu :

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN YANG BERKENAAN
- III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- IV. PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 hingga triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : SID TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3				4	5	6	7	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100\%$	$11 = 7 + 9$	$12 = \frac{11}{6} \times 100\%$	13
		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
		1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	97,57%	90 %	45,20%	50,22%	71,39%	71,39%	BPBD
		1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	65 dok	55 dok	28 dok	13 dok	46,43%	68 dok	104,62%	
		1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		12 dok	4 dok	2 dok	50%	14 dok	
		1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan		9 dok	12 dok	6 dok	50%	15 dok	
		1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah		34 kali	12 kali	5 kali	41,67%	39 kali	
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	10 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	8 jenis	80%

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10 = 9/8 x 100%	11 = 7 + 9	12 = 11/6 x 100%	13
		1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84 org	29 org	29 org	100%	113 org			
		1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	296 lap	30 lap	15 lap	50%	311 lap			
		1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	30 jenis	18 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	24 jenis	80%	
		1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan listrik / bangunan kantor yang disediakan	94 pkt	6 pkt	6 pkt	100%	100 pkt			
		1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	305 pkt	132 pkt	42 pkt	31,82%	347 pkt			
		1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	197 pkt	240 pkt	100 pkt	41,67%	297 pkt			
		1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	90 pkt	84 pkt	0 pkt	0%	90 pkt			

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6	7	8	9	$10 = \frac{9/8}{100\%}$	$11 = 7 + 9$	$12 = \frac{11/6}{100\%}$	13
		1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		75 dok	6 dok	6 dok	100%	81 dok		
		1	05	01	2.06	0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		346 kali	125 kali	64 kali	51,20%	410 kali		
		1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		0 dok	12 dok	6 dok	50%	6 dok		
		1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	30 unit	5 unit	4 unit	0 unit	0%	5 unit	16,67%	
		1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit		
		1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		4 unit	3 unit	1 unit	33,33%	5 unit		
		1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	10 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	9 jenis	90%	
		1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		36 lap	12 lap	6 lap	50%	42 lap		
		1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		144 lap	60 lap	30 lap	50%	174 lap		

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10 = 9/8 x 100%	11 = 7 + 9	12 = 11/6 x 100%	13
		1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0 lap	12 lap	6 lap	50%	6 lap		
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	230 unit	105 unit	63 unit	14 unit	22,22%	119 unit	51,74%	
		1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		60 unit	20 unit	8 unit	40%	68 unit		
		1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		39 unit	42 unit	6 unit	14,29%	45 unit		
		1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		6 unit	1 unit	0 unit	0%	6 unit		
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Mitigasi Bencana	100	100	100	68	68,00%	68	68,00%	
								Persentase kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	
								Persentase korban bencana yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10 = 9/8 x 100%	11 = 7 + 9	12 = 11/6 x 100%	13
		1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan	5 jenis	3 jenis	1 jenis	0 jenis	0%	3 jenis	60,00%	
		1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya		960 org	135 org	0 org	0%	960 org		
		1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan	45 jenis	13 jenis	4 jenis	2 jenis	50,00%	15 jenis	33,33%	
		1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya		478 org	36 org	0 org	0,00%	478 org		
		1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi		0 dok	7 dok	3 dok	42,86%	3 dok		
		1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		0 org	420 org	0 org	0,00 %	0 org		

o	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10 = 9/8 x 100%	11 = 7 + 9	12 = 11/6 x 100%	13
		1	05	03	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		42 kawasan	10 kawasan	1 kawasan	10,00%	43 kawasan		
		1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 jenis	5 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	7 jenis	70,00%	
		1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana		0 org	50 org	0 org	0,00%	0 org		
		1	05	03	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		705 org	500 org	138 org	27,60%	843 org		
		1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana	0 jenis	0 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00%	1 jenis	0,00%	

10	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6	7	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100\%$	$11 = 7 + 9$	$12 = \frac{11}{6} \times 100\%$	13
		1	05	03	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		40 dok	15 dok	7 dok	46,67%	47 dok		

## **2.2. Faktor Pendorong**

- a. Koordinasi dan kerjasama antar pegawai dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- c. Kerjasama dan bantuan dari stakeholder terkait;
- d. Upaya untuk terus meningkatkan kapasitas tim kebencanaan BPBD Kabupaten Sumenep.

## **2.3. Faktor Penghambat**

- a. Kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri atas daratan dan kepulauan sehingga kadang terjadi keterlambatan dalam penanganan maupun pemberian bantuan;
- b. Masih kurangnya tim kebencanaan baik dari segi kuantitas maupun kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan terkait bencana.

## **2.4. Tindak Lanjut**

- a. Peningkatan kapasitas tim kebencanaan secara rutin dalam hal mitigasi, penanganan saat bencana maupun pasca bencana;
- b. Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 di bawah ini :

TABEL 3.1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Tolok Ukur		Tar- get		
						Sblm	Ssdh	Sblm	Ssdh	Sblm	Ssdh									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>8.459.894.201</b>					
<b>05</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											<b>7.222.461.692</b>					
<b>05</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>90%</b>	<b>90%</b>			<b>5.274.472.914</b>	<b>6.280.401.472</b>				<b>14.707.192</b>	
<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>28 dok</b>	<b>28 dok</b>						<b>6.850.980</b>	
05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kabupaten Sumenep			4 dok	4 dok			5.957.374	5.957.374	APBD		4 dok		
05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan		Kabupaten Sumenep			12 lapo- ran	12 lapo- ran			2.328.336	2.328.336	APBD		12 lapo- ran		2.677.586
05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kabupaten Sumenep			12 dok	12 dok			4.503.153	4.503.153	APBD		12 dok		5.178.625
<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2.982.318.152</b>	<b>3.820.709.281</b>					<b>4.393.815.524</b>
05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Kabupaten Sumenep			29 orang	29 orang			2.975.499.533	3.813.890.662	APBD				4.385.974.261

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lap keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		Kabupaten Sumenep			30 laporan	30 laporan			6.818.619	6.818.619	APBD			7.841.411	
1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								6 jenis	6 jenis	343.764.971	384.358.040				442.011.746		
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		Kabupaten Sumenep			6 jenis	6 jenis			12.109.323	12.109.323	APBD			13.925.721	
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Kabupaten Sumenep			132 paket	132 paket			6.206.898	6.206.898	APBD			7.137.932	
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Kabupaten Sumenep			240 paket	240 paket			86.746.056	86.746.056	APBD			99.757.964	
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan		Kabupaten Sumenep			84 paket	84 paket			26.140.500	17.756.670	APBD			20.420.170	
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Kabupaten Sumenep			6 jenis	6 jenis			57.010.932	57.010.932	APBD			65.562.571	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		Kabupaten Sumenep			125 kali	125 kali			127.064.000	177.064.000	APBD			203.623.600		
1 05 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Kabupaten Sumenep			12 laporan	12 laporan			28.487.262	27.464.161	APBD			31.583.785		
<b>1 05 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>4 unit</b>	<b>4 unit</b>	<b>27.463.287</b>	<b>37.662.165</b>				<b>43.311.489</b>			
1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan		Kabupaten Sumenep			1 unit	1 unit			5.552.109	5.552.109	APBD			6.384.925		
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		Kabupaten Sumenep			3 unit	3 unit			21.911.178	32.110.056	APBD			36.926.564		
<b>1 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	<b>1.222.755.454</b>	<b>1.223.955.454</b>				<b>1.407.548.772</b>			
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Kabupaten Sumenep			12 laporan	12 laporan			2.991.006	2.991.006	APBD			3.439.656		
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Kabupaten Sumenep			60 laporan	60 laporan			90.442.500	90.442.500	APBD			104.008.875		
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Kabupaten Sumenep			12 laporan	12 laporan			1.129.321.948	1.130.521.948	APBD			104.008.875		
<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>63 unit</b>	<b>63 unit</b>	<b>685.382.187</b>	<b>800.927.669</b>				<b>921.066.819</b>			
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Kabupaten Sumenep			20 unit	20 unit			233.388.600	233.388.600	APBD			268.396.890		
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kabupaten Sumenep			42 unit	42 unit			32.580.809	32.580.809	APBD			37.467.930		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		Kabupaten Sumenep			1 unit	1 unit			419.412.978	534.958.460	APBD			615.202.229						
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>																1.076.028.268	1.076.028.268				1.237.432.508	
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</b>																						22.998.210
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)		Jml org yg mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab / kota (per jenis bencana) secara tatap muka kpd penduduk yg tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya		Kabupaten Sumenep			135 org	135 org			1 jenis	1 jenis	19.998.444	19.998.444	APBD							22.998.210
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>																						944.387.596
1	05	03	2.02	0008	Pengemba ngan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya		Kabupaten Sumenep			36 orang	36 orang					118.902.584	118.902.584	APBD							136.737.971
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi		Kabupaten Sumenep			3 dok	3 dok					166.500.000	166.500.000	APBD							191.475.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum								Sesudah
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		Kabupaten Sumenep			420 orang	420 orang			9.853.568	9.853.568	APBD			11.331.603	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		Kabupaten Sumenep			10 kawasan	10 kawasan			525.950.454	525.950.454	APBD			604.843.022	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>									<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>176.903.547</b>	<b>176.903.547</b>				<b>203.439.079</b>	
1	05	03	2.03	0002	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana		Kabupaten Sumenep			50 orang	50 orang			40.524.345	40.524.345	APBD			46.602.996	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kabupaten Sumenep			500 orang	500 orang			136.379.202	136.379.202	APBD			156.836.082	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									1 jenis	1 jenis	57.919.671	57.919.671				66.607.621
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Sumenep			15 dok	15 dok			57.919.671	57.919.671	APBD			66.607.621
<b>TOTAL</b>														<b>6.350.501.182</b>	<b>7.356.429.740</b>				<b>8.459.894.201</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep.

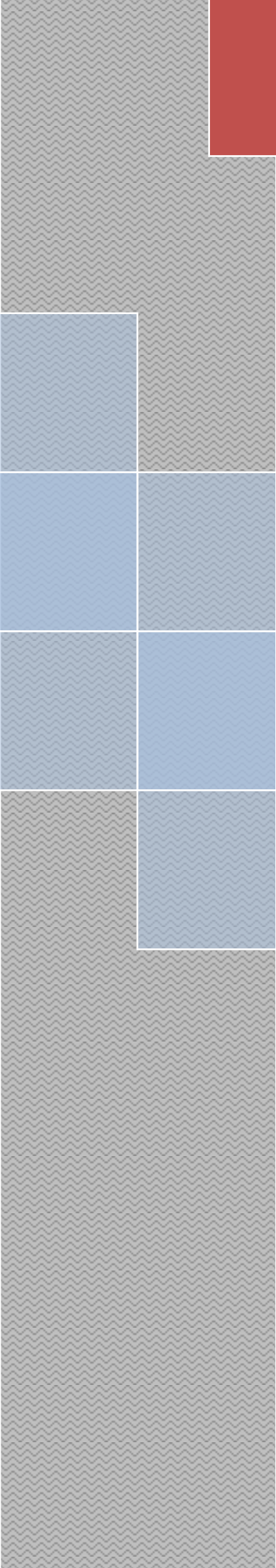
Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep, 28 Agustus 2024

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**



**Drs. ACH. LAILI MAULIDY, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730605 199302 1 002



# **Rencana Kerja (RENJA) Perubahan**

**Tahun Anggaran 2024**

**OPD  
KECAMATAN  
AMBUNTEN  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ambunten Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ambunten Tahun 2024 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Renstra dan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Diharapkan nantinya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024

Akhirnya besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ambunten ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kecamatan Ambunten.

Sumenep, 26 Juli 2024

  
**KECAMATAN AMBUNTEN**  
**SURYADI IRAWAN, S.IP., M.M.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880325 200701 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
BAB I .....	3
PENDAHULUAN .....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 DASAR HUKUM .....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II .....	8
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	8
2.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA .....	8
2.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	8
2.3 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA.....	9
BAB. III .....	24
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP.....	24
BAB IV.....	89
PENUTUP.....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan untuk perubahan renja disesuaikan dengan RKPD Perubahan.

### 1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ambunten Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Renja Kecamatan Ambunten Tahun 2024 disusun dengan maksud :

- a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kecamatan Ambunten khususnya di Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan perubahan renja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renja Kecamatan Ambunten Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi dan tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan Faktor Pendorong dan Penghambat serta Tindak Lanjut Pelaksanaan Triwulan / RKPD berikutnya

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Kecamatan Ambunten adalah penjabaran Perencanaan dan Rencana Strategis Kecamatan Ambunten. Tercapai tidaknya pelaksanaannya kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Ambunten ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ambunten selama tahun 2024 dan prakiraan tahun 2024.

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatannya meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### 2.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa faktor pendorong dalam rangka Pencapaian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan.
- b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Camat dengan Bupati Sumenep, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.
- c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

#### 2.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ambunten dalam rangka pencapaian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya konsistensi dalam menyusun perencanaan, yaitu judul kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta DPA sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- b. Kurang optimalnya penyerapan anggaran karena kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun DPA serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- d. Terbatasnya pengetahuan dan jumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang ada di Kelurahan sebagai pelaksana kegiatan Swakelola tipe IV pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lama.

### **2.3 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA**

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat seperti yang telah diuraikan di atas, maka tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan / RKPD berikutnya adalah :

- a. Melakukan penyesuaian antara dokumen renstra dengan RKPD / Renja Perubahan Kecamatan Ambunten.
- b. Melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik ketika menyusun RKA dan anggaran kas.
- c. Pembinaan tata kelola SDM untuk mengatasi keterbatasan SDM.
- d. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja.
- e. Permohonan pendampingan kepada perangkat daerah pengampu kebijakan.

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TH Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																
		7.1					KECAMATAN								K		RP						
1	Meningkatny a Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ambunten	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		100	%	100	%	100	%	34	%	34,00%	49,54%	134,00	%	134%	KECAMATAN AMBUNTEN
		7	01	01	2		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		70	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	7	Dokumen	70,00%	64,52%	17	Dokumen	24%	
		7	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat yang disusun sesuai ketentuan						2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	100,00%				
		7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan						1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%				

							Dokumen RKA-SKPD															
			7	01	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%				
			7	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%				
			7	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%				
			7	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4	Laporan	4	Laporan	100,00%	100,00%				
			7	01	01	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	80	Laporan	14	2.085.652.355	15	Laporan	9	Laporan	60,00%	48,20%	23	Laporan	2875%
			7	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20	Org/Bln	40	Org/Bln	100,00%	48,18%				

			7	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2	Laporan	2	Laporan	100,00%	100,00%				
			7	01	01	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					12	Laporan	6	Laporan	50,00%	50,49%				
			7	01	01	2,1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	5	Jenis	1	20.587.500	1	Jenis	1	Jenis	100,00%	99,81%	2	Jenis	4000%	
			7	01	01	2,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					26	Paket	26	Paket	100,00%	99,81%				
			7	01	01	2,1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	55	Jenis	6	20.587.500	6	Jenis	6	Jenis	100,00%	40,10%	12	Jenis	2182%	
			7	01	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	Paket	2	Paket	50,00%	41,72%				
			7	01	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	Paket	2	Paket	50,00%	50,00%				
			7	01	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4	Paket	2	Paket	50,00%	44,64%				

		7	01	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4	Paket	2	Paket	50,00%	33,33%													
		7	01	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12	Dokumen	6	Dokumen	50,00%	50,00%													
		7	01	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				183	Laporan	90	Laporan	49,18%	34,20%													
		7	01	01	2,1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	70	Unit	10	91.387.500	5	Unit	5	Unit	100,00%	98,59%	15	Unit										
		7	01	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5	Unit	5	Unit	100,00%	98,59%													
		7	01	01	2,1		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah layanan jasa yang disediakan	18	Jenis	2	68.646.870	2	Jenis	2	Jenis	100,00%	40,21%	4	Jenis										
		7	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	Laporan	6	Laporan	50,00%	42,26%													
		7	01	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24	Laporan	12	Laporan	50,00%	39,84%													
		7	01	01	2,1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	86	Unit	35	123.676.571	20	Unit	4	Unit	20,00%	70,07%	39	Unit										

			7	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	2	Unit	66,67%	27,37%				
			7	01	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15	Unit	0	Unit	0,00%	0,00%				
			7	01	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	2	Unit	100,00%	100,00%				
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik		7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	100	%	100	7.608.400	100	%	41,63	%	41,63%	27,96%	141,63	%	142%	KECAMATAN AMBUNTEN
			7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	Kali	0	0	12	Kali	5	Laporan	41,67%	42,82%	5	Laporan	14%	
			7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12	Laporan	5	Laporan	41,67%	42,82%				
			7	01	02	4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	72	Laporan	350	7.608.400	12	Laporan	203	Dokumen	1691,67%	0,00%	553	Dokumen	768%	

						7	01	02	4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan											400	Dokumen	203	Dokumen	50,75%	0,00%												
						7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rasio Desa/Kelurahan yang Berpartisipasi</b>	100	%	100	25.485.400	100	%	54	%	53,83%	85,49%	153,83	%	154%														<b>KECAMATAN AMBUNTEN</b>	
						7	01	03	2		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</b>	57	Laporan	2	25.485.400	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%	17	Laporan	30%															
						7	01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													15	Lembaga	15	Lembaga	100,00%	100,00%										
						7	01	03	6		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga ditingkat desa dan kelurahan</b>	60	Laporan	0	0	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	84,22%	6	Laporan	10%															
						7	01	03	6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													360	Keluarga	180	Keluarga	50,00%	49,77%										

			7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Penanganan Gangguan yang teratasi	100	%	100	129.929.600	100	%	100,3	%	100,33%	34,67%	200,33	%	200%	KECAMATAN AMBUNTEN
			7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	66	Laporan	12	129.929.600	3	Laporan	1	Laporan	33,33%	34,67%	13	Laporan		
			7	01	04	2	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3	Laporan	1	Laporan	33,33%	34,67%				
			7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100	%	100	54.662.000	100	%	100	%	100,00%	0,00%	200,00	%	200%	KECAMATAN AMBUNTEN
			7	01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15	Laporan	12	54.662.000	14	Laporan	14,28	Laporan	102,00%	0,00%	26,28	Laporan	175%	
			7	01	05	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Oranag yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan					200	Orang	0	Orang	0,00%	0,00%				

						dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
		7	01	05	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12	Dokumen	2	Orang	16,67%	17,52%						
		7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rasio Desa/Kelurahan yang Terfasilitasi</b>	100	%	100	18.605.600	100	%	0	%	0,00%	19,24%	100,00	%	100%	KECAMATAN AMBUNTEN
		7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Laporan	2	18.605.600	4	Laporan	0	Laporan	0,00%	19,24%	2	Laporan	2%	
		7	01	06	2	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%						
		7	01	06	2	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			15	Dokumen	15	Dokumen	100,00%	35,10%						

			7	01	06	2	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15	Dokumen	15	Dokumen	100,00%	47,41%				
			7	01	06	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					15	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		54,97%	36,15%				
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				

**BAB. III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ambunten Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Ambunten.

Seiring perkembangan situasi telah terjadi pergeseran anggaran yaitu sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LO KASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RK PD 2024	AP BD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KECAMATAN AMBUNTEN										2.641.335.750,00	2.641.322.617,00	2.651.892.518,00	10.556.768,00						695.540.404,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.641.335.750,00	2.641.322.617,00	2.651.892.518,00	10.556.768,00							695.540.404,00	
	7.01	KECAMATAN							2.641.335.750,00	2.641.322.617,00	2.651.892.518,00	10.556.768,00							695.540.404,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	2.448.748.150,00	2.460.172.017,00	2.475.941.918,00	-1.990.607.746,00							458.140.404,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan				14 Dokumen	14 Dokumen	4.699.700,00	3.619.700,00	3.619.700,00	-1.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Ambunten		11.976.004,00	KECAMATAN AMBUNTEN
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.075.700,00	1.075.700,00	1.075.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Ambunten Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.020.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
	7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	595.700,00	435.700,00	435.700,00	-160.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Ambunten Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			748.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	544.200,00	344.200,00	344.200,00	-200.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			715.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	544.200,00	344.200,00	344.200,00	-200.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			528.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	544.200,00	504.200,00	504.200,00	-40.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			715.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>			4 Laporan	4 Laporan	1.395.700,00	915.700,00	915.700,00	-480.000,00	Kab. Sumenep, Ambuntun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		8.250.004,00	KECAMATAN AMBUNTUN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>			16 Dokumen	16 Dokumen	2.047.633.150,00	2.047.633.150,00	2.048.203.051,00	569.901,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	9.075.000,00	KECAMATAN AMBUNTUN
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>			20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.041.335.750,00	2.041.335.750,00	2.041.905.651,00	569.901,00	Kab. Sumenep, Ambuntun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		2.750.000,00	KECAMATAN AMBUNTUN
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			2 Laporan	2 Laporan	704.400,00	704.400,00	704.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Ambuntun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		825.000,00	KECAMATAN AMBUNTUN
7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>			12 Laporan	12 Laporan	5.593.000,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		5.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>			1 Jenis	1 Jenis	7.561.764,00	7.021.638,00	7.021.638,00	-540.126,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Ambunten	39.600.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>			26 Paket	26 Paket	7.561.764,00	7.021.638,00	7.021.638,00	-540.126,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		39.600.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>			6 Jenis	6 Jenis	186.680.400,00	106.441.400,00	106.441.400,00	-80.239.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Ambunten	111.489.400,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	7.429.200,00	7.429.200,00	7.429.200,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			13.970.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	9.187.600,00	8.112.400,00	8.112.400,00	-1.075.200,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			9.955.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	26.743.600,00	39.031.600,00	39.031.600,00	12.288.000,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			39.600.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			6.270.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
7.01.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>			24 Dokumen	24 Dokumen	3.120.000,00	2.683.200,00	2.683.200,00	-436.800,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poluhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.194.400,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			200 Laporan	185 Laporan	133.120.000,00	42.105.000,00	42.105.000,00	-91.015.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			38.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			8 Unit	8 Unit	28.193.334,00	54.396.327,00	71.271.527,00	43.078.193,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Ambunten		49.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>			3 Unit	5 Unit	28.193.334,00	54.396.327,00	71.271.527,00	43.078.193,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			49.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	68.700.240,00	143.700.240,00	142.025.040,00	73.324.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Ambunten		88.000.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	21.900.240,00	21.900.240,00	20.225.040,00	-1.675.200,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			24.200.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	46.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	75.000.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			63.800.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	105.279.562,00	97.359.562,00	97.359.562,00	-7.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Ambunten		148.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	3 Unit	37.250.000,00	29.330.000,00	29.330.000,00	-7.920.000,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			55.000.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	15 Unit	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			5.500.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	60.189.562,00	60.189.562,00	60.189.562,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			88.000.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan			100 %	100 %	12.788.000,00	12.788.000,00	12.788.000,00	10.012.000,00							22.800.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11 Kali	11 Kali	8.352.000,00	8.352.000,00	8.352.000,00	0,00			-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif	Forkopimc am		8.800.000,00	KECAMATA N AMBUNTEN

	7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	8.352.000,00	8.352.000,00	8.352.000,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		8.800.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12 Laporan	12 Laporan	4.436.000,00	4.436.000,00	4.436.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Pengguna Layanan	14.000.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
	7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	360 Laporan	4.436.000,00	4.436.000,00	4.436.000,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		14.000.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
3,	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>				100 %	100 %	23.316.000,00	31.380.000,00	31.380.000,00	6.384.000,00						29.700.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				15 Laporan	15 Laporan	3.316.000,00	2.536.000,00	2.536.000,00	-780.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang	Pemerintah Desa di Kecamatan Ambunten	7.700.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN

																			harmoni dan adaptif											
	7.01.03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	3.316.000,00	2.536.000,00	2.536.000,00	-780.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.700.000,00		KECAMATAN AMBUNTEN									
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan			15 Laporan	15 Laporan	20.000.000,00	28.844.000,00	28.844.000,00	8.844.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	PKK Kecamatan Ambunten		22.000.000,00		KECAMATAN AMBUNTEN										
	7.01.03.2.06.007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			150 Keluarga	150 Keluarga	20.000.000,00	28.844.000,00	28.844.000,00	8.844.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			22.000.000,00		KECAMATAN AMBUNTEN										
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana			100 %	100 %	17.028.000,00	14.328.000,00	14.328.000,00	-8.228.000,00								8.800.000,00											

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	17.028.000,00	14.328.000,00	14.328.000,00	-2.700.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		8.800.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	17.028.000,00	14.328.000,00	14.328.000,00	-2.700.000,00	Kab. Sumenep, Ambuntun, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		8.800.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
5.	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>			100 %	100 %	96.551.600,00	95.670.600,00	95.670.600,00	11.948.400,00							108.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				13 Laporan	13 Laporan	96.551.600,00	95.670.600,00	95.670.600,00	-881.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pemerintah Desa di Kecamatan Ambuntun	108.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			45 Orang	80 Orang	51.359.600,00	50.478.600,00	50.478.600,00	-881.000,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			60.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
	7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	12 Dokumen	45.192.000,00	45.192.000,00	45.192.000,00	0,00	Kab. Sumene p, Ambunte n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			48.000.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
6,	7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>			100 %	100 %	42.904.000,00	26.984.000,00	21.784.000,00	24.696.000,00							67.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan			100 Persentase	100 Persentase	42.904.000,00	26.984.000,00	21.784.000,00	-21.120.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Pemerintah Desa di Kecamatan Ambunten		67.600.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
	7.01.06.2.01.001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	10.396.000,00	5.996.000,00	3.276.000,00	-7.120.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			13.000.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	7.396.000,00	7.396.000,00	2.596.000,00	-4.800.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			15.400.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	9.796.000,00	5.476.000,00	2.596.000,00	-7.200.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			16.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	15.316.000,00	8.116.000,00	3.316.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumenep, Ambunten, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.200.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN
7.01.06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-	15 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Ambuntun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN AMBUNTEN	
J U M L A H								2.641.335.750,00	2.641.322.617,00	2.651.892.518,00	10.556.768,00							2.955.630.495.634,00	

## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Perubahan Renja Kecamatan Ambunten ini disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Ambunten ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Ambunten.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh *stakeholder*.



Sumenep, 26 Juli 2024

**CAMAT AMBUNTEN**

**SURYADI IRAWAN, S.IP., M.M.**

Penata Tingkat I

NIP. 19880325 200701 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada hakikatnya rencana kerja tahunan adalah satu kesatuan system perencanaan nasional dengan tujuan tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, penganggaran sampai dengan pengendalian perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karenanya Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra OPD.

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Renja OPD dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kerja Kecamatan Batuputih disusun mengacu pada arget kinerja rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026, Rencana Strategis Kecamatan Batuputih 2021-2026 serta Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### b. Tujuan

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB. II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 Isu Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

- BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
  - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB. V : PENUTUP

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Capaian kinerja Kecamatan Batuputih hasil pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja Kecamatan Batuputih tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel capaian kinerja tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Kinerja 2021		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Batuputih	Indeks RB	-	B	B	100%
2.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	Persentase kelompok masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	-	80%	80%	100%
3.	Meningkatnya rencana pembangunan masyarakat berbasis	Persentase hasil musrembangcam disetujui di tingkat Kabupaten	-	80%	80%	100%
4.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	-	25%	20%	100%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diselesaikan	-	80%	80%	100%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	-	90%	95%	100%
		Persentase sarana dan	-	95%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Kinerja 2021		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
		prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sector				

Capaian target indicator Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tahun 2021 dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target yang direncanakan mengindikasikan bahwa Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep didalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan telah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan top down and bottom up, sehingga dokumen perencanaan yang telah disusun semakin terarah dan konsisten serta tetap melihat kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu inovasi dan koordinasi sangat dibutuhkan didalam menyempurnakan proses dan pola penyusunan dokumen perencanaan sehingga kedepan diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih sempurna dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pelaksanaan Renja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dilakukan kedalam 6 Program dan 12 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rincian tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :



**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
Tahun 2020 s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)  
Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	<b>KECAMATAN</b>													
7	01	01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	100 %	0	100 %	100 %	100%	0 %	100 %	100%	
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi yang dipenuhi</b>	100 %	0	100 %	100 %	100%	0 %	100 %	100%	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	6 dokumen	0	6 Dok	6 dok	100%	0	6 dokum en	100%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	6 dokumen	0	15 dok	6 dok	100%	0	6 dokum en	100%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	6 dokumen	0	15 dok	6 dok	100%	0	6 dokum en	100%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	6 dokumen	0	15 dok	6 dok	100%	0	6 dokum en	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	4 dokumen	0	4 dok	4 dok	100%	0	4 dokumen	100%
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	12 Bulan	100%
<b>7 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang diberikan fasilitas pakaian dinas	25 PNS	0	25 PNS	25 PNS	100%	0	25 PNS	100%
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik yang dibeli	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	12 Bulan	100%
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	12 Bulan	100%
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan Majalah dan Koran berlangganan	2 jenis	0	2 jenis	2 jenis	100%	0	2 jenis	100%
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi	100 kali	0	100 kali	100 kali	100%	0	100 kali	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi yang dipenuhi</b>	<b>95 %</b>	<b>0</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Peralatan yang dibeli	20 unit	0	20 unit	20 unit	100%	0	20 unit	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya tagihan Air, Listrik dan Internet	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0	12 Bulan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0	12 Bulan	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0	12 Bulan	100%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III dan IV yang dipelihara	7 Unit	0	7 Unit	7 Unit	100%	0	7 Unit	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Peralatan yang dipelihara	20 Unit	0	20 Unit	20 Unit	100%	0	20 Unit	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 lokasi	0	2 lokasi	2 lokasi	100%	0	2 lokasi	100%
7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	02	2.01		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Prosentase tercapainya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	02	2.01	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0	12 bulan	100%
7	01	02	2.01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen yang Direkomendasi	0 dokumen		500 dokumen	500 dokumen	100%	0	500 dokumen	100%
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase fasiltasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	03	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase tercapainya fasiltasi pembinaan dan pemberdayaan Desa	14 desa	0	14 desa	14 desa	100%	0	14 desa	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang melakukan Pelaksanaan Musdes	1 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	0	1 kegiatan	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Prosentase peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	0	12 kali	12 kali	100%	0	12 kali	100%
7	01	04	2.01	02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rakor Forum Ulama dan Umaroh	12 kali	0	12 kali	12 kali	100%	0	12 kali	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Prosentase Peningkatan pemantapan wawasan kebangsaan dan sosialisasi layanan publik</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 kegi	0	1 kegi	1 kegi	100%	0	1 kegi	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	05	2.01	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	Jumlah kegiatan atau pembinaan yang dilaksanakan	14 desa	0	14 de sa	14 de sa	100%	0	14 desa	100%
7	01	06			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas dan pengawasan aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>95 %</b>	<b>0</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>
7	01	06	2.01	01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	3 Kali	0	3 Kal i	3 Ka li	100%	0	3 kali	100%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Sosialisasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan		0				0		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang diberikan pendampingan SIKUIDES	14 Kali	0	14 Kal i	14 Ka li	100%	0	14 Kali	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pemilihan Kepala Desa	0				0		

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP**

Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan di tingkat Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di Kecamatan. Serta menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi, yang meliputi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari :

1. Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai perwujudan dari perencanaan yang partisipatif

yaitu perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

2. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan-urusan yang diampu Kecamatan Batuputih, dalam hal ini Urusan Kewilayahan sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Pada Tabel 2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP**

NO	INDIKATOR	SPM/Standar dan Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>INDIKATOR SASARAN:</b>										
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	82	85	85	81,20	82,05	83	85
2.	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP**

### **2.3.1 Permasalahan**

Permasalahan Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sama dengan sebelumnya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan :**

- 1). Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
  - Masih banyak Penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang belum terdata dengan baik;
  - Bahwa masih ada warga yang masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk habis;
  - Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai Akta Lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika melamar pekerjaan Formal;

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100% Warga Desa sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai identitas formal.

2) Peraturan Desa,  
Permasalahan :

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) Alokasi Dana Desa,  
Permasalahan :

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa banyak terjadi kesalahan Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Camat, namun secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tidak ada permasalahan.

4) Pembinaan Perangkat,  
Permasalahan :

- Masih perlu peningkatan Sumberdaya Manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai

agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

- Sistem administrasi Produk hukum, kependudukan dan urusan pemerintahan kurang tertata;

Upaya yang telah dilakukan :

- Perlu pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perangkat Pemerintah Desa;
- Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan Narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi Hukum;

**b. Bidang Ekonomi Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan**

- Bidang Ekonomi Pembangunan pada umumnya diKecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, tetapi kendala yang dihadapi adalah permodalan dan kemampuan manajerial
- Di Bidang Pemberdayaan Perempuan kurang adanya keterlibatan kelompok perempuan yang terdidik terlatih dan terampil dalam berbagai sektor;
- Pembangunan di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep pada Umumnya berjalan cukup baik terutama dalam bidang kemitraan.

Upaya yang telah dilakukan :

- Bidang Ekonomi Pembangunan diadakannya pelatihan kepada pengurus Koperasi dalam kurun waktu tertentu.

- Sering kali diadakan Sosialisasi bidang pembangunan sehingga bisa memaksimalkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
- Terus menerus diadakan pelatihan lewat wadah kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Koperasi Wanita, dan Jama'ah Tahlil Perempuan

**c. Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Kepemudaan :**

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasa kurang;
- Kurangnya kesadaran pemuda dalam perannya berpartisipasi ikut dalam upaya mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka;
- Peranan pemuda dalam berolah raga masih kecil, terbukti masih minimnya klub – klub olah raga yang ada. Upaya yang telah dilakukan;
- Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target Keluarga Berencana;

- Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan Masyarakat;
- Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- Meningkatkan peran Institusi Kepemudaan melalui berbagai lembaga baik Karang Taruna, klub-klub Olah raga yang ada untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan atau acara peringatan Hari Besar Nasional atau acara yang di buat dan diprakarsai oleh Pemuda;
- Mendukung dan mendorong tumbuh kembangnya kreasi pemuda baik melalui Kesenian Tradisional, Orkes Melayu atau Grup Band, serta tari-tarian dengan memberi motivasi dan arahan yang membangun;
- Meningkatkan tali Sillaturahmi kepada para pemuka Agama untuk mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan dengan mendatangi setiap undangan dan kegiatan yang ada;
- Mempermudah dan membantu percepatan Pembangunan tempat ibadah dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dengan pertimbangan koordinasi dengan lembaga terkait.

**d. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**

- Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- Mengadakan Rapat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana unit Operasional Penanggulangan Bencana di seluruh Desa se Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep;
- Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;
- Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

### **2.3.2 Peluang**

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan public;
- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan;
- Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.

### **2.3.3 Tantangan**

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023  
KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.619.139.757	UNSUR KEWILAYAHAN				2.750.096.744	
	KECAMATAN				2.619.139.757	KECAMATAN				2.750.096.744	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Batuputih	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan Penunjang perangkat daerah yang disediakan	100 %	4.666.900	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Batuputih	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan Penunjang perangkat daerah yang disediakan	100 %	4.900.245	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batuputih	Persentase Perencanaan dan Anggaran serta Laporan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi	100 %	4.666.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batuputih	Persentase Perencanaan dan Anggaran serta Laporan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi	100 %	4.900.245	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batuputih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.426.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batuputih	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.569.370	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	610.700	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	671.770	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 dok	542.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 dok	596.640	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 dok	542.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 dok	596.640	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaporkan	1 laporan	1.544.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	1 dok	1.699.170	

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dilaporkan			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Terpenuhinya Hak atss Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu Tahun serta Laporan Bulanan/Semesteran</b>	<b>100 %</b>	<b>2.030.715.619</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Terpenuhinya Hak atss Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu Tahun serta Laporan Bulanan/Semesteran</b>	<b>100 %</b>	<b>2.132.251.399</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batuputih	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 PNS	2.030.715.619	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batuputih	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 PNS	2.132.251.399	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara</b>	<b>100 %</b>	<b>28.771.500</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara</b>	<b>100 %</b>	<b>30.210.075</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Batuputih	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	25 stel	28.771.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Batuputih	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	25 stel	<b>30.210.075</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase layanan administrasi dan Sarana Prasarana yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>95.292.600</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase layanan administrasi dan Sarana Prasarana yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100.056.600</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batuputih	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	38 jenis	7.124.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batuputih	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	38 jenis	7.480845	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batuputih	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	36 kali	56.435.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batuputih	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	36 kali	59.257.485	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 jenis	31.732.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batuputih	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 jenis	33.318.600	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Kantor yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>37.690.904</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Kantor yang dipenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>39.575.449</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batuputih	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	37.690.904	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batuputih	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	39.575.449	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang</b>	<b>100 %</b>	<b>53.528.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang</b>	<b>100 %</b>	<b>53.528.400</b>	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		<b>Batuputih</b>	<b>Perangkat Daerah yang disediakan</b>				<b>Batuputih</b>	<b>Perangkat Daerah yang disediakan</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batuputih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3 jenis	19.443.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batuputih	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3 jenis	20.415.150	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batuputih	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	25 jenis	5.193.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kecamatan Batuputih</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	25 jenis	5.452.650	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batuputih	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	4 orang	28.892.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kecamatan Batuputih</b>	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	4 orang	30.337.020	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>100 %</b>	<b>175.944.634</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>100 %</b>	<b>174.944.634</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	44.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	44.777.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batuputih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	16 unit	4.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batuputih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	16 unit	5.228.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batuputih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	126.434.634	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batuputih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	132.756.365	
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>5.369.600</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>5.938.080</b>	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Prosentase tercapainya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>5.369.600</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Prosentase tercapainya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>5.938.080</b>	

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 kegiatan	5.369.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 kegiatan	5.938.080	
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>24.600.200</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>25.830.210</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Tercapainya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>24.600.200</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Tercapainya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>25.830.210</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 desa	4.520.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 desa	4.746.630	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.079.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.745.080	
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>115.579.800</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>	<b>121.358.790</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Tercapainya Peningkatan ketentraman dan ketertiban Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>115.579.800</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>Tercapainya Peningkatan ketentraman dan ketertiban Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>121.358.790</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	14 Kali	109.990.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	14 Kali	115.489.500	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan	2 Kali	5.589.800	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Batuputih	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan	2 Kali	5.869.290	

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Batuputih	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	100 %	30.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Batuputih	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	100 %	31.500.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Batuputih	Prosentase tercapainya Sarana Publikasi Terhadap Masyarakat serta Rakor Forpimka	100 %	30.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Batuputih	Prosentase tercapainya Sarana Publikasi Terhadap Masyarakat serta Rakor Forpimka	100 %	31.500.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Batuputih	Jumlah pelaksanaan bintek, sosialisasi yang diadakan	14 Kali	30.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Batuputih	Jumlah pelaksanaan bintek, sosialisasi yang diadakan	14 Kali	31.500.000	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batuputih	Persentase Pemerintahan Desa yang sudah diberi Pembekalan	100 %	16.979.600	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batuputih	Persentase Pemerintahan Desa yang sudah diberi Pembekalan	100 %	17.828.980	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batuputih	Tercapainya Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pemerintah Aparatur Pemerintahan Desa	100 %	16.979.600	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batuputih	Tercapainya Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pemerintah Aparatur Pemerintahan Desa	100 %	17.828.980	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Batuputih	Jumlah desa yang diberikan pendampingan SISKUIDES	14 desa	16.979.600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Batuputih	Jumlah desa yang diberikan pendampingan SISKUIDES	14 desa	17.828.980	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep di kecamatan.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah secara khusus tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Batuputih selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Dimana apabila terdapat usulan dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, tokoh pemuda di Desa, semua sudah tertuang dalam Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Desa masing-masing yang diketahui dan didampingi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan kemudian di akomodir dalam Musrenbangcam dengan OPD teknis Kabupaten yang merupakan pelaksana teknis program kegiatan tersebut yang terintegrasi dalam satu sistem yaitu SIPD, seperti yang tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024**  
**Kabupaten Sumenep**

### ***Kecamatan Batuputih***

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nihil			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2024 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP 2023 adalah " Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ".

##### *SASARAN PEMBANGUNAN :*

Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4% - 6,0%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,24 – 5,52%
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,44 – 73,48
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,8 – 27,1%

Berangkat dari hakikat system perencanaan nasional bahwa perencanaan pembangunan disusun atas dasar konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan lainnya dimana perencanaan disusun dengan menjamin konsistensi dan integrasi mulai dari perencanaan pembangunan nasional, provinsi sampai dengan kabupaten.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah

yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan kabupaten, dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan ini tertuang kedalam tema pembangunan daerah yang merupakan hasil penelaahan isu-isu strategis yang berkembang di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam setiap rencana kerja pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan, kualitas perencanaan pembangunan di daerah harus terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui berbagai mekanisme dan inovasi perencanaan pembangunan.

Sedangkan sasaran prioritas pembangunan perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagaimana tahun 2024 adalah Penguatan sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN BATUPUTIH**

Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

***“ Mewujudkan Kualitas Birokrasi yang Profesional dan Inovatif “***

Sedangkan sasaran dalam Rencana Kerja, yang selaras dengan visi dan misi Bupati Terpilih yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Batuputih;
2. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat Desa;
3. Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat;
4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep menyusun program dan perencanaan dalam Rencana Kerja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut :

A. URUSAN KEWILAYAHAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - 3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  - 3.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
    - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
    - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
    - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
    - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### **1.1. Prioritas Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KECAMATAN BATUPUTIH  
KABUPATEN SUMENEP**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>2.750.096.744</b>				<b>2.887.601.581</b>
7 01	<b>KECAMATAN</b>				<b>2.750.096.744</b>				<b>2.887.601.581</b>
7 01 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan Kebutuhan Penunjang perangkat daerah yang disediakan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>4.900.245</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>5.145.257</b>
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Anggaran serta Laporan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>4.900.245</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>5.145.257</b>
7 01 01 2.01 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Batuputih	1 dok	1.498.035	APBD		1 dok	1.572.936
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Batuputih	1 dok	641.235	APBD		1 dok	673.296
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Batuputih	15 dok	569.520	APBD		15 dok	626.346
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Batuputih	15 dok	569.520	APBD		15 dok	626.346
7 01 01 2.01 06	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaporkan	Kecamatan Batuputih	1 laporan	1.621.935	APBD		1 laporan	1.703.031
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Hak atss Gaji dan Tunjangan ASN dalam satu Tahun serta Laporan Bulanan/Semesteran</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>2.132.251.399</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>2.238.863.968</b>
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batuputih	25 PNS	2.132.251.399	APBD		25 PNS	2.238.863.968

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>30.210.075</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>31.720.578</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Batuputih	25 PNS	30.210.075	APBD		25 PNS	31.720.578
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi dan Sarana Prasarana yang dipenuhi</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>100.056.600</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>105.068.880</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Batuputih	38 Jenis	7.480845	APBD		38 Jenis	7.854.887
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kecamatan Batuputih	36 Jenis	59.257.485	APBD		36 Jenis	62.220.359
7	01	01	2.06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Batuputih	4 Jenis	33.318.600	APBD		4 Jenis	34.984.530
7	01	01	2.06	09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana Kantor yang dipenuhi</b>	Kecamatan Batuputih	<b>100 %</b>	<b>39.575.449</b>	APBD		<b>100 %</b>	41.554.221
7	01	01	2.06	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Batuputih	3 Unit	39.575.449	APBD		3 Unit	41.554.221
7	01	01	2.07		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>53.528.400</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>56.204.820</b>
7	01	01	2.07	06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Batuputih	3 Jenis	20.415.150	APBD		3 unit	21.435.907
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kecamatan Batuputih	25 jenis	5.452.650	APBD		25 jenis	5.725.282

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUPUTIH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	Kecamatan Batuputih	4 orang	30.337.020	APBD		4 orang	31.853.871
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>174.944.634</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>105.908.715</b>
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Batuputih	8 unit	44.777.500	APBD		8 unit	47.016.375
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Batuputih	16 unit	5.228.000	APBD		16 unit	5.489.400
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Batuputih	23 unit	132.756.365	APBD		23 unit	139.394.183
<b>7 01 02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>5.938.080</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>6.234.984</b>
<b>7 01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Prosentase tercapainya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>5.938.080</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>6.234.984</b>
7 01 02 2.01 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Batuputih	12 bulan	5.938.080	APBD		12 bulan	6.234.984

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Batuputih	100 %	25.830.210	APBD		100 %	27.121.720
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tercapainya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Kecamatan Batuputih	100 %	25.830210	APBD		100 %	27.121.720
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Batuputih	14 desa	4.746.630	APBD		14 desa	4.983.961
7	01	03	2.03		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batuputih	1 Laporan	21.745.080	APBD		1 laporan	22.832.334
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Batuputih	100 %	121.358.790	APBD		100 %	127.426.729
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Kecamatan Batuputih	100 %	121.358.790	APBD		100 %	127.426.729
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kecamatan Batuputih	14 Kali	115.489.500	APBD		14 Kali	121.263975

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Kecamatan)	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)							
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Batuputih	2 kali	5.869.290	APBD		2 kali	6.162.754
7	01	05			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>31.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>33.075.000</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase tercapainya Sarana Publikasi Terhadap Masyarakat serta Rakor Forpimka</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>31.500.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>33.075.000</b>
7	01	05	2.01	01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan bimtek, sosialisasi yang diadakan	Kecamatan Batuputih	14 desa	31.500.000	APBD		14 desa	33.075.000
7	01	06			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintahan Desa yang sudah diberi Pembekalan</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>17.828.980</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>18.720.009</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Tercapainya Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pemerintah Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Batuputih</b>	<b>100 %</b>	<b>17.828.980</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>18.720.009</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang diberikan pendampingan SISKUIDES	Kecamatan Batuputih	14 desa	17.828.980	APBD		14 desa	18.720.009

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Kecamatan Batuputih untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban terhadap tupoksi mengarah pada obyektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.



ZAENAL ARIFIN S.Sos.,M.Si

Pembina

Nip.19690302 199602 1 001



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**(RENJA )  
RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
BATUPUTIH**



# RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



## KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan 67, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Dasuk pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang .....	4
2. Landasan Hukum .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	9
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	15
BAB IV PENUTUP .....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	22
1. Keputusan Camat Dasuk, Nomor 188/07/KEP/435.315/2024, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.....	23
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk .....	27
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk .....	28
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Pembina Tingkat I masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Dasuk telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. untuk perubahan Rencana kerja disesuaikan dengan RKPD perubahan.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
  17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Dasuk dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Dearah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Dasuk Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tujuan perubahan renja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran

#### **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II   Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

##### **BAB III   Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

##### **BAB IV   Penutup**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target : 28 Dokumen      Realisasi : 14Dokumen      Capaian : 50 %

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target : 38 Laporan      Realisasi : 18 Laporan      Capaian : 47,36%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target : 109 Jenis      Realisasi : 54 Jenis      Capaian : 49,54%

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target : 16 Unit      Realisasi : 8 Unit      Capaian : 50 %

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target : 24 Laporan      Realisasi : 12 Jenis      Capaian : 50 %

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target : 15 Unit      Realisasi : 6 Unit      Capaian : 40 %

7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah.

Target : 20 stel      Realisasi 0      Capaian 0%

#### b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan

➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target : 41 Laporan      Realisasi : 20 Laporan      Capaian : 48,78%

#### c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target : 15 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 40 %

2. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
Target : 30 Laporan Realisasi : 14 Laporan Capaian : 46,66%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target : 15 Laporan Realisasi : 6 Laporan Capaian : 40%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target : 16 Laporan Realisasi : 8 Laporan Capaian : 50%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target : 15 Laporan Realisasi : 6 Laporan Capaian : 40 %

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Target : 4 Laporan Realisasi : 2 Laporan Capaian : 50 %

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Target : 8 Laporan Realisasi : 2 Laporan Capaian : 25 %

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENCANA KERJA KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan 2 Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Ket
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10=9/8x100%	11=7+9	12=11/6x100%	13
		7				UNSUR KEWILAYAHAN									
		7	01			KECAMATAN									
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	51 %	51,23 %	51 %	51,23 %	KECAMATAN DASUK	
		7	01	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	28 Dokumen	28 Dokumen	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%		
						Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %		
		7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen	0,00 %	

		7	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen		1 dokumen	100%	100%	100%	100%		
		7	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen		1 dokumen	0%	0,00 %	0%	0,00 %		
		7	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen		24 dokumen	0%	0,00 %	0%	0,00 %		
		7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	38 Laporan		38 Laporan	20 Laporan	65%	20 Laporan	65%		
		7	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai kecamatan yang dibayarkan atas gaji dan tunjangan lainnya.	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100 %	20 Orang	100 %		
		7	01	01	2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran yang tersusun	18 Laporan		18 laporan	4 laporan	25 %	4 laporan	25 %		
		7	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	20 Jenis		20 Jenis	0 Jenis	0,00 %	0 Jenis	0,00 %		
		7	01	01	2,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel		20 stel	0 stel	0,00 %	0 stel	0,00 %		
		7	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	109 Jenis		109 Jenis	10 Jenis	10%	10 Jenis	10%		
		7	01	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	12 Jenis		12 jenis	6 jenis	50 %	50.00%	50 %		
		7	01	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Unit		25 unit	12 unit	48,68 %	12 unit	48,68 %		

			7	01	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistic kantor yang disediakan	32 Unit		32 Unit	16 Unit	50%	16 Unit	50%		
			7	01	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Unit		12 Unit	3	25 %	3	25 %		
			7	01	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis		12 jenis	0	00,00 %	0 jenis			
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	25%	1 Laporan	25%		
			7	01	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 Kali		12 kali	6 kali	50 %	6 Kali	50 %		
			7	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	16 Unit		16 Unit	4 Unit	25%	4 Unit	25,00 %		
			7	01	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	16 Unit		16 Unit	4 Unit	25%	4 Unit	25,00 %		
			7	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	24 Layanan		24 Layanan	6 Layanan	25,00 %	6 Layanan	25,00 %		
			7	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan iuran yang terbayarkan sumberdaya listrik dan telfon	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00 %	6 rekening	50,00 %		
								Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		12 laporan	6 laporan	50,00 %	6 laporan	50,00 %		

		7	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 Unit		20 Unit	8 Unit	40 %	8 Unit	40 %	
		7	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	8 unit		8 unit	4 unit	50,00 %	4 unit	50,00 %	
		7	01	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit		7 unit					
		7	01	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit		5 unit	4 unit	80,00 %	4 unit	80,00 %	
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %		100 %	69 %	69,00 %	69 %	69,00 %	KECAMATAN DASUK
		7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali		4 Kali					
		7	01	02	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Kali		4 Kali					
		7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	8 Dokumen		8Dokumen					

		7	01	02	2	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	8 Dokumen		8 Dokumen					
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100 %		100 %	44 %	44,00 %	44 %	44,00 %	KECAMATAN DASUK
		7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	15Kali		15 Kali	6 Kali	40,00 %	40%	40,00 %	
		7	01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	15 Desa		15 Desa	0 Desa	0,00 %	0 Desa		
		7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksan	30 Lembaga		30 Lembaga	7 Lembaga	47,06 %	7 Lembaga	9,41 %	
		7	01	03	2	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	15 lembaga		15 lembaga	7 Kali	16,67 %	7 Kali	16,67 %	
		7	01	03	2	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi	15 lembaga		15 lembaga					
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %		100 %	80 %	80,00 %	80 %	80,00 %	KECAMATAN DASUK

		7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 kali		2 kali	2 Kali	100 %		100 %	
		7	01	04	2	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 kali		2 kali	2 kali	100,00 %	2 kali	100,00 %	
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %		100 %	20 %	20,00 %	20 %	20,00 %	KECAMATAN DASUK
		7	01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	112 Kali		112 Kali	4 Kali	50,00 %	4 Kali	9,76 %	
		7	01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	100 Kegiatan		100 Kegiatan	100 Kegiatan	0,00 %	0 Kegiatan		
		7	01	05	2	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali		12 Kali	4 Kali	33,33 %	4 Kali	33,33 %	

		7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %		100 %	47 %	47,00 %	47 %	47,00 %	KECAMATAN DASUK	
		7	01	06	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	41 Kegiatan		41 Kegiatan						
		7	01	06	2	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	15Kegiatan		15Kegiatan	16 Desa	100,00 %	16 Desa	100,00 %	
							Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan asset desa	Jumlah Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan asset desa	1 kegiatan		1 kegiatan					
		7	01	06	2	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	10 kali		10 kali	0 kali/buah	0,00 %	0 kali/buah		
		7	01	06	2	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	15 desa		15 desa	8 desa	50,00 %	8 desa	50,00 %	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>												<b>50,67 %</b>				
<b>Predikat kinerja</b>												<b>Sangat Rendah</b>				

2.1 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar pegawai cukup baik dan terstruktur sesuai dengan SOP

2.2 Faktor penghambat pencapaian kinerja: Dengan adanya mutasi pegawai maka butuh adanya pengadaptasian kinerja

2.3 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mengadakan monitoring & evaluasi yang berkelanjutan dan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat. Baik internal maupun eksternal



**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang naik jabatan dan tunjangan profesi. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPd) KAB.  
SUMENEP  
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>KECAMATAN DASUK</b>							2.185.235.484,00	2.183.962.484,00	2.315.919.892,00	130.684.408,00							2.900.278.273,00	
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							2.185.235.484,00	2.183.962.484,00	2.315.919.892,00	130.684.408,00							2.900.278.273,00	
	7.01	<b>KECAMATAN</b>							2.185.235.484,00	2.183.962.484,00	2.315.919.892,00	130.684.408,00							2.900.278.273,00	
1.	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</i>				100 %	100 %	1.976.193.584,00	1.975.708.684,00	2.097.666.092,00	580.685.589,00							2.556.879.173,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Yang Disusun</i>				100 %	100 %	4.070.000,00	3.506.300,00	3.506.300,00	-563.700,00							3.119.380,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	718.000,00	718.000,00	718.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Perangkat Kecamatan		507.716,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	718.000,00	530.500,00	530.500,00	-187.500,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			507.716,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	718.000,00	532.000,00	532.000,00	-186.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			507.716,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	718.000,00	527.800,00	527.800,00	-190.200,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			507.716,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				24 Laporan	24 Laporan	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.088.516,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun</i>				100 %	100 %	1.591.255.884,00	1.591.253.084,00	1.713.218.132,00	121.962.248,00							2.186.947.558,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.585.235.484,00	1.585.235.484,00	1.707.200.532,00	121.965.048,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.179.044.322,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	6.020.400,00	6.017.600,00	6.017.600,00	-2.800,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.903.236,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Jenis Layanan Kepegawaian Yang Dipenuhi</i>				100 %	100 %	8.742.000,00	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00							16.459.872,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan</i>				20 Paket	20 Paket	8.742.000,00	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			16.459.872,00	KECAMATAN DASUK

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				100 persentase	100 persentase	199.196.800,00	124.194.400,00	101.342.800,00	-97.854.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Perangkat Kecamatan		169.691.368,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.354.400,00	6.354.400,00	6.354.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.076.024,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	6.626.400,00	6.626.400,00	6.626.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.807.236,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	33.718.400,00	33.716.000,00	33.716.000,00	-2.400,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			40.486.116,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.091.400,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.631.600,00	2.631.600,00	2.500.000,00	-131.600,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.621.400,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.449.952,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.846.000,00	64.846.000,00	42.126.000,00	-97.720.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			95.159.240,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Didirikan				100 Persentase	100 Persentase	31.358.300,00	31.358.300,00	39.750.400,00	8.392.100,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Perangkat Kecamatan		35.292.045,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	31.358.300,00	31.358.300,00	39.750.400,00	8.392.100,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			35.292.045,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Langgan Jasa Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi Yang Dipenuhi				100 Persentase	100 Persentase	72.910.080,00	147.910.080,00	147.910.080,00	75.000.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		74.026.795,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.996.020,00	28.996.020,00	28.996.020,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.989.531,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.914.060,00	118.914.060,00	118.914.060,00	75.000.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			53.037.264,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara				100 Persentase	100 Persentase	68.660.520,00	68.744.520,00	83.196.380,00	14.535.860,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		71.342.155,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	30.530.000,00	30.614.000,00	30.614.000,00	84.000,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			33.759.000,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.719.000,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	33.540.520,00	33.540.520,00	47.992.380,00	14.451.860,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			32.864.155,00	KECAMATAN DASUK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan				100 %	100 %	12.052.500,00	11.536.900,00	11.536.900,00	-574.440,00							11.478.060,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 kali	4 kali	6.184.000,00	6.181.300,00	6.181.300,00	-2.700,00				Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Perangkat Desa		4.323.088,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	4 Laporan	6.184.000,00	6.181.300,00	6.181.300,00	-2.700,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.323.088,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan				70 dokumen	500 dokumen	5.868.500,00	5.355.600,00	5.355.600,00	-512.900,00				Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		7.154.972,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	5.868.500,00	5.355.600,00	5.355.600,00	-512.900,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.154.972,00	KECAMATAN DASUK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan				100 %	100 %	24.747.500,00	24.662.000,00	24.662.000,00	4.798.280,00							29.545.780,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				15 kali	15 kali	4.488.500,00	4.482.800,00	4.482.800,00	-5.700,00				Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		5.460.972,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	4.488.500,00	4.482.800,00	4.482.800,00	-5.700,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.460.972,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan				16 lembaga	16 lembaga	20.259.000,00	20.179.200,00	20.179.200,00	-79.800,00				Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		24.084.808,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	13.422.000,00	13.353.600,00	13.353.600,00	-68.400,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			15.873.264,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				15 Laporan	15 Laporan	6.837.000,00	6.825.600,00	6.825.600,00	-11.400,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.211.544,00	KECAMATAN DASUK
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana				100 %	100 %	21.922.500,00	21.844.000,00	21.844.000,00	-8.298.384,00							13.624.116,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				15 kali	15 kali	21.922.500,00	21.844.000,00	21.844.000,00	-78.500,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		13.624.116,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	21.922.500,00	21.844.000,00	21.844.000,00	-78.500,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			13.624.116,00	KECAMATAN DASUK
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan				100 %	100 %	118.186.600,00	118.079.000,00	118.079.000,00	119.885.014,00							238.071.614,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				8 kali	8 kali	118.186.600,00	118.079.000,00	118.079.000,00	-107.600,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Warga Masyarakat		238.071.614,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	48.364.600,00	48.325.400,00	48.325.400,00	-39.200,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			57.928.750,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	69.822.000,00	69.753.600,00	69.753.600,00	-68.400,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			180.142.864,00	KECAMATAN DASUK
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan				100 %	100 %	32.132.800,00	32.131.900,00	42.131.900,00	18.546.730,00							50.679.530,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan				100 %	100 %	32.132.800,00	32.131.900,00	42.131.900,00	9.999.100,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Perangkat Desa		50.679.530,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.138.400,00	5.138.400,00	5.138.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			6.146.316,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	5.754.800,00	5.754.800,00	5.754.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.058.172,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				10 Dokumen	10 Dokumen	6.534.800,00	6.534.800,00	6.534.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.189.280,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	14.704.800,00	14.703.900,00	14.703.900,00	-900,00	Kab. Sumenep, Dasuk, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			18.285.762,00	KECAMATAN DASUK
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	15 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DASUK
<b>J U M L A H</b>									<b>2.185.235.484,00</b>	<b>2.183.962.484,00</b>	<b>2.315.919.892,00</b>	<b>777.713.426.186,00</b>						<b>2.900.278.273,00</b>		



## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 02 Juli 2024

  
**CAMAT DASUK**  
**Drs. WISMADI LAKSONO, MH**  
Pembina Tingkat I

NIP. 196903261989111002

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**KECAMATAN DASUK**

Jl. Raya Dasuk Kabupaten Sumenep

**SUMENEP**

Kode Pos : 69461

KEPUTUSAN CAMAT DASUK KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/22 /KEP/435.308/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

CAMAT DASUK

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Dasuk Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 20243 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Dasuk

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 Juli 2024

-----  
**CAMAT DASUK**  
**Drs. WISMADI LAKSONO, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196903261989111002



Lampiran : Keputusan Camat Dasuk  
Nomor : 188/07/KEP/435.315/2024  
Tanggal : 02 Juli 2024

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Dasuk
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Dasuk
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Dasuk</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Dasuk;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Dasuk;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Dasuk</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Dasuk.</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Dasuk,</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Dasuk</li></ol>

Sumenep, 02 Juli 2024

**CAMAT DASUK**



**Drs. WISMADI LAKSONO, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196903261989111002



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN DASUK**  
Jl. Raya Dasuk Kabupaten Sumenep  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69454

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/08/BA/435.315/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Dasuk Kabupaten Sumenep, Tanggal 02 Juli 2024, Nomor : 188/07/KEP/435.315/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 02 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. WISMADI LAKSONO, M.H	Ketua	1.
2	MUHAMMAD IRHAMNI, S.E, M.Si	Sekretaris	2.
3	ZAINAL, S.E	Anggota	3.
4	LILIK LAILATI, S.Pd	Anggota	4.
5	Drs. CHAIRUL ISKANDAR	Anggota	5.
6	SUBAIRI, S.A.N	Anggota	6.
7	MAS ENDUNG, S.Sos	Anggota	7.
8	SRI HANDAYANI, S.A.P	Anggota	8.
9	ENDANG SRI WAHYUNI	Anggota	9.

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP**

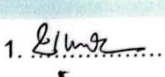




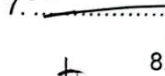



No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 02 Juli 2024

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. WISMADI LAKSONO, M.H	Ketua	1. 
2	MUHAMMAD IRHAMNI, S.E, M.Si	Sekretaris	2. 
3	ZAINAL, S.E	Anggota	3. 
4	LILIK LAILATI, S.Pd	Anggota	4. 
5	Drs. CHAIRUL ISKANDAR	Anggota	5. 
6	SUBAIRI, S.A.N	Anggota	6. 
7	MAS ENDUNG, S.Sos	Anggota	7. 
8	SRI HANDAYANI, S.A.P	Anggota	8. 
9	ENDANG SRI WAHYUNI	Anggota	9. 

## PHOTO DOKUMENTASI

PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 JULI 2024





# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
2024**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika; pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan komunikasi dan Informasi serta telekomunikasi dan aplikasi telematika; pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan komunikasi dan informatika; pelaksanaan hubungan kerja sama dengan insan pers, dan media dalam memperluas jaringan informasi; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan komunikasi dan informasi serta telekomunikasi, dan aplikasi telematika; pelaksanaan pengamanan informasi daerah dan penyediaan data statistik daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah dokumen perencanaan tahunan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan tahun keempat dalam pencapaian Visi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep), yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 dan diharapkan RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 akan berperan sebagai tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026. Maksud dari penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah selama lima tahun, sehingga dapat memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan Daerah. Dalam RPJMD juga dijelaskan tentang tujuan penyusunan RPJMD antara lain untuk memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tujuan ini yang menjadi penjabaran dalam rencana kerja tahun 2024 agar terwujud sinergitas, pembangunan terpadu dan berkesinambungan.

c. Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Rencana Kerja PD yang definitif. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Rencana Strategis (renstra) 2021-2026 PD yang digunakan sebagai acuan perumusan program kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja PD tahun 2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026.
2. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran

renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
4. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja PD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan Provinsi maupun Pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dana kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional yang mencakup semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sumenep selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, disesuaikan dengan Visi Kabupaten Sumenep yaitu “**Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera**” dan Misi Kabupaten ke-3 “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat**”.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
11. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembarangan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Nomor : 188/220/KEP/435.106/2022 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan atau pedoman terhadap perubahan kebijakan pembangunan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal;
2. Perubahan Rencana Kerja ini juga merupakan adaptasi terhadap perubahan pola kebijakan aktual sehingga perlu dilakukan pergeseran pola perencanaan dan anggaran yang diperlukan;
3. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah yang dilakukan sebelumnya;

Dari hal tersebut diatas bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai maksud pencapaian kinerja pembangunan dapat dilaksanakan dalam koridor dokumen perencanaan pembangunan yang ada sehingga hasil yang didapatkan mempunyai korelasi terhadap indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan

#### **b. Tujuan**

- Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dengan mempertimbangkan data yang telah diinventarisir, permasalahan dan potensi yang ada sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di Kabupaten Sumenep.

- Dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD dalam rangka mencapai perubahan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD, Renstra PD, dengan Renja KIL, dan Renja PD provinsi, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD, landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD, sistematika penulisan susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD S/D**

##### **S/D TRIWULAN II TRIWULAN II 2024**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Berdasarkan Urusan Hingga Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan urusan dan realisasinya hingga Triwulan II Tahun 2024..

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap rencana kerja dan pendanaan perubahan baik dari segi kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, maupun Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran.

## BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**S/D TRIWULAN II 2024**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan Urusan  
Hingga Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 sampai dengan triwulan II digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan urusan hingga triwulan II tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														I		II		III		IV											
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
		2										23.062.658.341		1.993.120.538										7.119.179.823				23.195.027.510			Diskominfo
		2	16									22.915.396.101		1.993.120.538										7.113.594.823		31%		23.062.274.143			Diskominfo
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2	16	0	1			100 %	39.590.440.063			12.690.572.091		1.320.706.516		2.332.980.299		-						3.653.686.815		29%		9.560.720.822		24,15 %	Diskominfo

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.16.01.200.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.546.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.16.01.200.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan			9 Laporan	5.546.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-		
		2.16.01.200.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.992.454.242	48 orang per bulan	6.248.652.841	48 Orang Per Bulan	1.128.434.347	48 Orang Per Bulan	1.521.549.462					48 Orang Per Bulan	2.649.983.809	100,00 %	42%	7.642.438.051							
		2.16.01.200.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		4.992.454.242	48 orang per bulan	6.248.652.841	48 Orang Per Bulan	1.128.434.347	48 Orang Per Bulan	1.521.549.462	-	-	-	-	48 Orang Per Bulan	2.649.983.809	100,00 %	42%	7.642.438.051							
		2.16.01.200.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			763.221.759		6.160.613.438		134.602.908		772.384.327						906.987.235			1.670.208.994							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8x100 %	15=7+13	16=15/6x100 %	17												
		2 16 0 2 0 1 . 0 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		53.104.500	1 Paket 69.595.367	-	-	-	-	-	-	0%	53.104.500													
		2 16 0 2 0 1 . 0 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan		529.744.400	5 Paket 5.824.539.867	1 Paket 78.749.000	1 Paket 647.266.500	-	-	2 Paket 726.015.500	40,00 % 12%	1.255.759.900														
		2 16 0 2 0 1 . 0 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan		46.782.600	2 Paket 51.493.404	1 Paket 10.870.000	-	-	-	1 Paket 10.870.000	50,00 % 21%	57.652.600														
		2 16 0 2 0 1 . 0 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		29.520.000	17 Dokumen 31.330.800	4 Dokumen 5.180.000	4 Dokumen 10.360.000	-	-	8 Dokumen 15.540.000	47,06 % 50%	45.060.000														
		2 16 0 2 0 1 . 0 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		104.070.259	250 Laporan 183.654.000	39.803.908	114.757.827	-	-	154.561.735	84%	258.631.994														

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV			13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13			16=15/6x100 %
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							dan Konsultasi SKPD																								
		2	16	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91.439.006	3 Laporan	134.623.944		23.637.761		22.503.010							46.140.771		34%		137.579.777				
		2	16	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		91.439.006	3 Laporan	134.623.944	1 Laporan	23.637.761	1 Laporan	22.503.010		-		-	2 Laporan	46.140.771	66,67%	34%		137.579.777					
		2	16	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240.183.000		141.135.768		34.031.500		16.543.500						50.575.000		36%		110.494.000					

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
		2	16	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25	139.066.173	6	34.031.500	6	16.543.500		-		-			12	50.575.000	0,48	36%		110.494.000			
		2	16	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			6	2.069.595		-		-		-		-					0%						
	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Menerapkan Sistem Elektronik	2	16	0	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>	95 %	18.047.475.820			85 %	3.819.901.500		607.500.000							1.328.440.000		35%		5.829.919.000		32%	Diskominfo	

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
													I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %											
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		2	16	0	2	0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		4.501.479.000	75	Do	ku	me	n	3.819.901.500		607.500.000		720	.94	0.0	00		-		-		1.328.440.000		35%		5.829.919.000									
		2	16	0	2	0		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang dikelola oleh Perangkat Daerah	95	Do	ku	me	n	18.047.475.820		-	65	Do	ku	me	n	19.920.000		-	16	Do	ku	me	n	1.440.000		24,62 %	7%	16	Do	ku	me	n	1.440.000		16,84 %	0,01%
									Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	50	Do	ku	me	n	5.628.754.382			40	Do	ku	me	n																					
									Jumlah Layanan Hubungan Media	45	Me	dia		1.187.050.605			30	Me	dia																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50	995.765.953		40																				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50	925.000.000		40																				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	95	7.500.000.000		85																				
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	95	6.400.000.000		85																				
		216020007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	45	1.187.050.605	30	150	2.999.981.500	7	182.500.000	8	719.500.000	-	-	15	902.000.000	10	30%	45	4.401.479.000	100	371%					

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
				Jumlah Konten yang Dikelola oleh Perangkat Daerah					65																			
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					40																			
				Jumlah Layanan Hubungan Media					30																			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					40																			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan					40																			

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														I		II		III		IV												
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
								n Media Komunikasi Publik																								
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				85																				
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah				85																				
		2	16	0	2	0	Penguatan Tata Kelola Informasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	95	6.400.000.000	100%	750.000.000	75	750.000.000	37	375.000.000	-	-	-	37	375.000.000	49,33%	50%		1.125.000.000		18%					
								Jumlah Konten yang Dikelola oleh Perangkat Daerah				65																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					40																			
				Jumlah Layanan Hubungan Media					30																			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					40																			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					40																			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan					85																			

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
		2	16	0	2	0	0	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	50	5.628.754.382	40	252.000.000	75	50.000.000	37	50.000.000	-	-	-	-	37	50.000.000	49,33 %	100%	77	302.000.000	154,00 %	5%			
								Jumlah Konten yang Dikelola oleh Perangkat Daerah					65																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					40																			
				Jumlah Layanan Hubungan Media					30																			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					40																			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					40																			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan					85																			

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
							Informasi Publik					n																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah					85																			
	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	2	16	0	3		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	98 %	33.508.077.367	5.540.166.313	87 %	6.404.922.510	64.914.022		2.066.553.986								2.131.468.008		33%		7.671.634.321		23%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2160201	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	12.285.000.000	85 Instansi 1.394.659.508	87 Instansi 1.452.000.000	85 Instansi 2.197.622	85 Instansi 593.367.208	-	-	85 Instansi 595.564.830	98 %	41,02 %	170 Instansi 1.990.224.338	16 %												
		2160300013	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12.285.000.000	72 Instansi 1.394.659.508	75 Unit 1.452.000.000	27 Kecamatan 2.197.622	27 Kecamatan 593.367.208	-	-	27 Kecamatan 595.564.830	100 %	41,02 %	99 Instansi 1.990.224.338	16 %												
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		72 Instansi	55 Instansi	72 Instansi				72 Instansi	131 %															
				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah		85 Instansi	60 Instansi	85 Instansi				85 Instansi	142 %															

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
								an Daerah kabupaten/ Kota																									
		2	16	03	20	20	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		21.223.077.324	4.145.506.805	87%	4.952.922.510		62.716.400		1.473.186.778		-		-		1.535.903.178		31%		5.681.409.983		27%				
		2	16	03	20	20	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	80%	283.922.250	1 Unit 65 Data	549.880.000	3 Aplikasi	60.750.000	3 Aplikasi	34.500.000		-		-		3 Aplikasi	95.250.000		17%		379.172.250						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2	Dokumen			35	Dokumen															
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			2	Dokumen			35	Dokumen															
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah			72	Instansi			55	Instansi															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			76	Instansi			65	Instansi															
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			2	Dokumen			35	Dokumen															
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City			2	Dokumen			25	Dokumen															

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
													I		II		III		IV												
													9		10		11		12										13=9+10+11+12		14=13/8x100 %
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	16	0	2	0	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			75%	378.600.369	2	Dokumen	455.634.188	1	Dokumen	1.966.400	101.286.800	-	-	1	Dokumen	103.253.200		23%		481.853.569			
							Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola			3	Data		65	Data																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2	Dokumen		35	Dokumen																	
							Jumlah Dokumen Pengolaa n Government Chief Information			2	Dokumen		35	Dokumen																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
								I		II		III		IV																								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %									
1	2	3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17					

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
															I		II		III		IV												
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17		
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City			2	Dokumen	25	Dokumen																				
		2	16	0	2	0	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			80%	3.482.984.186	76	Layanan	3.947.408.322	70	OPD	-	70	OPD	1.337.399.978	-	-	-	70	OPD	1.337.399.978	92,11 %	34%	4.820.384.164			
							Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			3	Data	65	Data																				
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan			2	Dokumen	35	Dokumen																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
								I		II		III		IV																			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %				
1	2	3				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV										
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
		2	20	0	2			95 %	423.909.869	86%	59.737.068		79.555.590	0	-		4.000.000		-		-		4.000.000		5%		63.737.068		15%	Diskominfo	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi	2	20	0	2			95 %	423.909.869	86%	59.737.068		79.555.590	0	-	150 Dokumen	4.000.000		-		-		4.000.000		5%		63.737.068		15%	Diskominfo	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %						
1	2	3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
	Statistik Daerah																																
		2	20	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150 Dokumen	423.909.869	86%	59.737.068	150 Dokumen	79.555.590	-	-	150 Dokumen	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	5%	63.737.068	15%	Diskominfo						
		2	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	150 Dokumen	423.909.869	150 Dokumen	59.737.068	150 Dokumen	79.555.590	-	-	150 Dokumen	4.000.000	-	-	-	-	150 Dokumen	4.000.000	5%	300 Dokumen	63.737.068	15%					
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		95%	565.213.159	87,73%	67.431.299		67.706.650	-	-	1.585.000	-	-	-	-	1.585.000		69.016.299	12%	Diskominfo							

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Daerah Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		6	7						8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %					
1	2	3					4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	
	Meningkatnya Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi	2	21	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara dengan Baik	95 %	565.213.159	87,73 %	67.431.299																	Diskominfo	
		2	21	0	2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			565.213.159	87,73 %	67.431.299																	Diskominfo	
		2	21	0	2	0002	Operasionalisasi Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	72 Perangkat Daerah	565.213.159	72 Perangkat Daerah	67.431.299	62 Perangkat Daerah	67.706.650	74 Perangkat Daerah	-	74 Perangkat Daerah	1.585.000	-	-	-	74 Perangkat Daerah	1.585.000	119 %	2%	146 Perangkat Daerah	69.016.299		12%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I			II		III		IV		13=9+10+11+12			14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	450 Dokumen	565.213.159	600 Dokumen	67.431.299	350 Dokumen	67.706.650	135 Dokumen	-	135 Dokumen	1.585.000		-		-	270 Dokumen	1.585.000	77%	2%	870 Dokumen	69.016.299		12%	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 untuk memenuhi apa yang sudah ditargetkan dalam Renstra maupun RPJMD Kabupaten Sumenep sebagaimana pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;  
Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah tidak ada karena program dan kegiatan yang realisasinya belum tercapai pada triwulan 1 dan 2 akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan ada beberapa sub kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya baru bisa tercapai 100% pada triwulan 4.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;  
Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah:
  - a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  
Kegiatan/Sub Kegiatan
    - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - a) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 100% (pagu anggaran)
3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;  
Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan yaitu :
  - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
    - 1) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
      - a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 119% (kinerja)

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024;
  - Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk tahun 2024 adalah belum terlaksananya semua kegiatan pada tahun 2024 dimana target pelaksanaan kegiatannya akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4.
  - Faktor tepenuhinya target Kinerja program / kegiatan adalah kekompakan, kreatifitas dan inovasi SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep serta adanya jaring komunikasi sandi daerah.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024;
  - Faktor yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah force majeure berupa kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;  
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah melaksanakan koordinasi dengan PD terkait secara cepat dan berkelanjutan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pada era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, Good Government tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu dengan semakin ketatnya persaingan global, menuntut semua institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan Good Governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep selalu melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good governance melalui e-Government. Melalui e-government, masyarakat akan semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan e-government yang sangat erat kaitannya dengan konsep keterbukaan atau transparansi.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep**

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai Target/ Standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>			<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1	Indeks SPBE		2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,05	3,18	2,4	2,5	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya target realisasi nilai SAKIP sebesar 82,00 dengan kategori A (Memuaskan);
2. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah kurangnya fasilitas Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan dan menyegarkan pengetahuan manajerial dan ketrampilan teknis SDM;
3. Dampak menurunnya target kinerja tersebut mengakibatkan:
  - a. Belum meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada masyarakat sehingga tidak dapat mengetahui dan memahami serta tidak ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
  - b. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang belum memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok PD yang merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program;
  - c. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang masih kurang terhadap teknologi informasi sehingga kurang mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat.
4. Tantangan untuk tetap memaksimalkan capaian kinerja adalah memaksimalkan sumber daya berupa jaringan digital dan meningkatkan pengetahuan warga masyarakat untuk tetap ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep melalui media sosial.
5. Program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyediaan wi-fi gratis yang termuat pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari:

- a. Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, yaitu karena masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.
- b. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sumenep serta RPJMD 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu:
  - 1) Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
  - 2) Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program;
  - 3) Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
- c. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran
  - 1) Tujuan  
Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government.
  - 2) Sasaran
    - a) Meningkatnya Jumlah kebijakan tata kelola Keamanan Informasi dan operasional Jaring komunikasi sandi;
    - b) Meningkatnya jumlah layanan publik yang menerapkan sistem berbasis elektronik;

- c) Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
  - d) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik daerah.
- 3) Indikator Sasaran
- a) Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
  - b) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
  - c) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik;
  - d) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
  - e) Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
  - f) Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - g) Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan;
  - h) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - i) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
  - j) Jumlah konten yang dikelola oleh perangkat daerah;
  - k) Jumlah Layanan Hubungan Media;
  - l) Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - m) Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola;
  - n) Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - o) Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - p) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);

- q) Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- r) Jumlah perangkat daerah yang sudah memiliki nama domain;
- s) Jumlah perangkat daerah yang sudah mempunyai admin dalam menunjang one data kabupaten;
- t) Jumlah perangkat daerah yang sudah terhubung layanan pemerintah;
- u) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2024**

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dimana didalam program dan kegiatan terdapat target indikator yang harus dicapai selama satu tahun.

Pendanaan Perubahan Renja TA. 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan besar beban target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun program dan kegiatan, indikator serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.1  
Pendanaan Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasiona l	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Dinas Komunikasi dan Informatika				17.659.750.675,00		22.741.931.165,00	24.767.902.542,00								23.743.710.227,00		
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.659.750.675,00		22.741.931.165,00	24.767.902.542,00								23.743.710.227,00		
	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.505.155.637,00		22.594.668.925,00	24.620.640.302,00								21.000.310.227,00		
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	7.530.264.427,00	12.369.844.915,00	12.698.086.006,00							9.415.310.227,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8.405.455,00	5.546.100,00	5.546.100,00			-	-	-		2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9 Laporan	9 Laporan	8.405.455,00	5.546.100,00	5.546.100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.715.561.665,00	5.927.925.665,00	5.927.925.665,00			-	-	-		6.236.750.00,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.715.561.665,00	5.927.925.665,00	5.893.884.519,00	Kab. Sump, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.236.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		206.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Sump, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sump, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sump, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPDP	Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
												Semua Kel/Desa									
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumelep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.530.537.595,00	6.160.613.438,00	6.160.613.438,00			-	-	-		903.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumelep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							1 Paket	1 Paket	69.595.367,00	69.595.367,00	69.595.367,00	Kab. Sumelep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							5 Paket	5 Paket	1.185.780.924,00	5.824.539.867,00	5.990.638.172,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pajak Rokok	-	-			325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A			
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
							2 Paket	2 Paket	60.151.404,00	51.493.404,00	51.493.404,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A			
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							17 Dokumen	17 Dokumen	31.330.800,00	31.330.800,00	31.330.800,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A			
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							250 Laporan	250 Laporan	183.679.100,00	183.654.000,00	283.854.000,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPDP Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
												esa										
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00						18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		0,00	0,00	0,00								1.444.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00							14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00							80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			1.350.000.0 00,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A				
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	134.623.944,00	134.623.944,00	134.623.944,00			-	-	-		286.060.22 7,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A				
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							3 Laporan	3 Laporan	134.623.944,00	134.623.944,00	134.623.944,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A				
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			61.060.227, 00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A				
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPDP			Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	APBD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09			-	-	141.135.768,00	141.135.768,00	141.135.768,00			-	-	-		337.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	139.066.173,00	139.066.173,00	182.953.605,00	Kab. Sume nep, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				6 Unit	6 Unit	2.069.595,00	2.069.595,00	54.166.095,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000, 00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A
2	2 16 02		PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik			85 persen	85 persen	3.819.968.700,0 0	3.819.901.500,0 0	5.567.634.086,0 0							4.785.000.0 00,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah konten yang dikelola oleh perangkat daerah Jumlah Layanan Hubungan Media	-			30 media 40 dokumen	30 media 40 dokumen	3.819.968.700,00	3.819.901.500,00	3.819.901.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-	4.785.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				75 Dokumen	75 Dokumen	19.987.200,00	19.920.000,00	19.920.000,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Pajak Rokok	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				-	0 Dokumen	0,00	0,00	459.365.780,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DBH Cukai Hasil Tembak au (CHT)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				150 Layanan	150 Layanan	2.999.981.500,00	2.999.981.500,00	4.199.981.506,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			3.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				75 Dokumen	75 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																	
							75 Dokumen	75 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	138.366.800,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan - Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			185.000.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A				
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLA AN APLIKASI INFORMATIK A	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				87 %	87 %	6.154.922.510,0 0	6.404.922.510,0 0	6.354.920.210,0 0					6.800.000.0 00,00			
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Penatalaksa naan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Ko ta Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-			55 instansi 60 instansi 87 instansi	55 instansi 60 instansi 87 instansi	1.452.000.000,0 0	1.452.000.000,0 0	1.452.000.000,0 0			-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif	-	2.000.000.0 00,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				75 Unit	75 Unit	1.452.000.000,0 0	1.452.000.000,0 0	1.452.000.000,0 0	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan		2.000.000.0 00,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
												matan , Semu a Kel/D esa			yang harmoni dan adaptif					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2 16 03 2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		25 dokumen 35 dokumen 55 instansi 65 data 65 instansi	25 dokumen 35 dokumen 55 instansi 65 data 65 instansi	4.702.922.510,00	4.952.922.510,00	4.952.922.510,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-		4.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																	
							1 Unit	1 Unit	299.880.000,00	549.880.000,00	499.877.700,00	Kab. Sumpene, Kecamatan Sema Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																	
							2 Dokumen	2 Dokumen	455.634.188,00	455.634.188,00	455.634.188,00	Kab. Sumpene, Kecamatan Sema Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Pematanaan infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RakPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024												
							8	9	10	11	12										
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				76 Layanan	76 Layanan	3.947.408.322,00	3.947.408.322,00	3.947.408.322,00	Kab. Sume nep, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan			4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								79.555.590,00	79.555.590,00	79.555.590,00						995.500.000,00		
4	2	20	02						-	-	79.555.590,00	79.555.590,00	79.555.590,00						995.500.000,00		
	2	20	02	2.01					-	-	79.555.590,00	79.555.590,00	79.555.590,00			-	-	-	995.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasiona l	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				51 Dokumen	51 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			126.500.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				57 Orang	57 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			198.000.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral													
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				51 Dokumen	51 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			165.000.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				51 Orang	51 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			198.000.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur																	
																				110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																	
																				198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				75.039.448,00	67.706.650,00	67.706.650,00								1.747.900.000,00			
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	75.039.448,00	67.706.650,00	67.706.650,00									1.747.900.000,00			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	0,00	0,00									1.542.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			225.500.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			1.316.700.0 00,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.039.448,00	67.706.650,00	67.706.650,00			-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif	-		205.700.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				62 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	75.039.448,00	67.706.650,00	67.706.650,00	Kab. Sume nep, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningk atkan Tata Kelola Pemerint ahan yang harmoni dan adaptif			205.700.00 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	
							J U M L A H			17.659.750.675, 00	22.741.931.165, 00	24.767.902.542, 00						23.743.710. 227,00		



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pada 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian pada tahun 2024 mendatang.

Rencana Kerja ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

#### **4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran**

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep atau sumber dana lain yang dapat memacu terjalannya koordinasi dalam mengendalikan kebijakan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

#### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Secara umum kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku:

1. Sustainable Development Goals (SDGs);
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep serta dukungan dari pimpinan eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan rencana kerja untuk melaksanakan kewenangan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Adanya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

(Sustainable Development) di Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

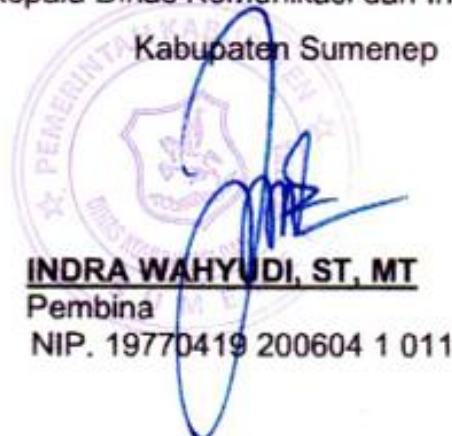
1. Diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja;
2. Diperlukan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga dapat terwujud mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya yang makin intens dapat dilakukan melalui Pendidikan formal, pembinaan teknis, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih signifikan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi dan teknis dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
5. Perlu peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan hal-hal teknis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai sarana evaluasi peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sumenep

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sumenep government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name 'INDRA WAHYUDI, ST, MT' is printed in bold, followed by the title 'Pembina' and the NIP number 'NIP. 19770419 200604 1 011'.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP

# **RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perubahan ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan acuan bagi perangkat daerah kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perubahan yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implemmentasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyusunan rencana kerja ini.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2024.

Sumenep, Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMENEP**



**Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721123 199201 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024.....</b>	<b>5</b>
2.1 Faktor Pendukung .....	5
2.2 Faktor Penghambat .....	19
2.3 Tindak Lanjut.....	21
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>





# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Dokumen perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan kedua Tahun 2024. Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan perubahan renja tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Bab ini memuat :

- 2.1. Faktor Pendorong;
- 2.2. Faktor Penghambat;
- 2.3. Tindak Lanjut

#### **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

#### **BAB IV : PENUTUP**

## BAB II



# EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep mulai tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dibawah ini terlampir :

## 2.1 Evaluasi RENJA Triwulan II

**Tabel 2.1**  
**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	17.570.163.478			100%	4.042.632.100,00	17,09%	690.886.580,00	45,18%	1.135.533.644,00	0,00%		0,00%		62%	1.826.420.224,00	0,62	45,18%			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	70 Dokumen	77.057.414			14	7.781.400,00	4	400.000,00	6	4.097.000,00				10	4.497.000,00	0,71	57,79%				
		8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan					10	543.100,00	0	-	0	-				0	-	0,00	0,00%				
		8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan					3	776.900,00	0	-	1	78.000,00				1	78.000,00	0,33	10,04%				
		8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan					1	543.500,00	1	205.000,00	0	-				1	205.000,00	1,00	37,72%				
		8 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan					1	628.800,00	1	195.000,00	0	317.000,00				1	512.000,00	1,00	81,42%				
		8 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan					1	649.200,00	0	-	0	-				0	-	0,00	0,00%				
		8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan					3	627.300,00	0	-	0	-				0	-	0,00	0,00%				

8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah				3	4.012.600,00	0	-	1	3.702.000,00								1	3.702.000,00	0,33	92,26%			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA dan LO) yang disusun	15 Dokumen	14.789.056.149			3	3.337.953.762,00	1	452.082.079,00	1	940.733.093,00								2	1.392.815.172,00	0,67	41,73%		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan perubahannya pembayaran gaji dan tunjangan ASN					25	3.335.399.762,00	6	450.891.079,00	6	939.633.093,00								12	1.390.524.172,00	0,48	41,69%		
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan					1	1.141.200,00	1	480.000,00	0	550.000,00								1	1.030.000,00	1,00	90,26%		
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun					2	1.412.800,00	1	711.000,00	1	550.000,00								2	1.261.000,00	1,00	89,26%		
8	01	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket				1	-	0	-	0	-								0	-	0,00	#DIV/0!		
8	01	01	2.01	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1	-	0	-	0	-								0	-	0,00	#DIV/0!		
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	15 Jenis	323.287.017			3	185.967.600,00	1	66.863.050,00	1	58.558.490,00									2	125.421.540,00	0,67	67,44%	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan					2	11.296.400,00	1	5.010.000,00	0	-								1	5.010.000,00	0,50	44,35%		
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					2	39.439.700,00	1	12.158.700,00	1	4.749.800,00									2	16.908.500,00	1,00	42,87%	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6	20.909.100,00	2	5.874.000,00	0	-									2	5.874.000,00	0,33	28,09%	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan					40	10.645.400,00	10	175.000,00	10	3.075.000,00									20	3.250.000,00	0,50	30,53%	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan					38	103.677.000,00	10	43.645.350,00	13	50.733.690,00									23	94.379.040,00	0,61	91,03%	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peggadaan yang di beli	25 Unit	307.577.048			6	11.643.234,00	0	-	6	10.880.000,00									6	10.880.000,00	1,00	93,44%	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan					6	11.643.234,00	0	-	6	10.880.000,00									6	10.880.000,00	1,00	93,44%	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang di sediakan	20 Orang	1.108.307.467			4	242.501.900,00	1	57.377.451,00	1	44.254.211,00										2	101.631.662,00	0,50	41,91%
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat					2000	1.082.300,00	0	-	0	-									0	-	0,00	0,00%	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, telepon dan Internet					3	66.426.800,00	1	14.629.251,00	1	14.780.411,00										2	29.409.662,00	0,67	44,27%
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					1	174.992.800,00	0	42.748.200,00	0	29.473.800,00										0	72.222.000,00	0,00	41,27%
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	100 Unit	779.999.436			20	256.784.204,00	5	114.164.000,00	5	77.010.850,00										10	191.174.850,00	0,50	74,45%
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas labatan yang dikelola					13	156.007.500,00	4	61.215.000,00	3	59.974.850,00										7	121.189.850,00	0,54	77,68%
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					4	37.550.000,00	1	18.345.000,00	1	5.161.500,00										2	23.506.500,00	0,50	62,60%
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara					1	63.226.704,00	0	34.604.000,00	0	11.874.500,00										0	46.478.500,00	0,00	73,51%

2	Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif	8	01	02	PROGRAM PENGUJATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	4.926.529.780					100%	1.454.046.392,00	3%	39.456.000,00	10,44%	112.396.900,00			13%	151.852.900,00	0,13	10,44%						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 Kegiatan				3	1.454.046.392,00	1	39.456.000,00	1					2	151.852.900,00	0,67	10,44%						
			8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			16	115.998.200,00	0	0		4					4	1.030.000,00	0,25	0,88%						
			8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			800	736.174.800,00	0	0		200					200	72.444.400,00	0,25	9,84%						
			8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1200	41.866.000,00	0	0		600					600	20.900.000,00	0,50	49,92%						
			8	01	02	2.01	8	Pembentukan Pasdikbra	Jumlah Pasdikbra			150	560.007.392,00	30	39.456.000,00		20					50	57.478.500,00	0,33	10,26%						
3	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Toleransi dan Pembangunan	8	01	03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdaftar	100 %	6.512.442.288					100%	68.458.067.800,00	0%	56.569.000,00	3,05%	2.034.182.500,00				3%	2.090.751.500,00	0,03	3,05%						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerkanan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemerkanan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang berlaku	5 Kegiatan			1	68.458.067.800,00	0	56.569.000,00		0					0	2.090.751.500,00	0,00	3,05%						



					8	01	06		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100 %	3.598.039.629					100%	1.244.462.100,00	9%	114.625.000,00	24,12%	185.505.000,00								33%	300.130.000,00	0,33	24,12%				14,49 %	2,96 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
					8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 Kegiatan	3.598.039.629				3	1.244.462.100,00	0	114.625.000,00	1	185.505.000,00									1	300.130.000,00	0,33	24,12%																															
					8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					20	223.637.800,00	5	9.135.000,00	5	5.280.000,00									10	14.415.000,00	0,50	6,45%																															
										Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					800	233.991.100,00	200	1.420.000,00	200	13.726.000,00									400	15.146.000,00	0,50	6,47%																															
					8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					12	786.833.200,00	3	104.070.000,00	3	166.499.000,00									6	270.569.000,00	0,50	34,39%																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																												36%	31%																																			
Predikat kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah																																			

Berdasarkan tabel Evaluasi terhadap hasil renja BAKESBANGPOL TW II tahun 2024 yaitu:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan Indikator Kinerja Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 45,18%, hal ini dapat di kategorikan kurang baik pelaksanaan kinerjanya, hal ini dikarenakan beberapa sub Kegiatan anggaran Kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Dengan Indikator Kinerja Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 10,44%, yang dapat di kategorikan kurang baik dalam pelaksanaan kinerjanya. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan berisikan kegiatan dan sub kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan peringatan Hari Besar Nasional dan paskibraka, dan dalam pelaksanaannya ada pada triwulan III dan IV, sehingga pada triwulan II ini belum maksimal realisasinya.

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Dengan Indikator Kinerja Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdaftar dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 3.05%, yang dapat dikategorikan sangat kurang baik dalam pelaksanaan kinerjanya. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik berisikan kegiatan dan sub kegiatan Sosialisasi tentang pemahaman masyarakat dalam etika budaya politik dan peningkatan demokrasi serta pemberian hibah keuangan kepada partai politik, dan dalam pelaksanaannya ada pada triwulan III dan IV, sehingga pada triwulan II belum maksimal realisasinya.

**4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Dengan Indikator Kinerja Persentase Organisasi Masyarakat yang di Berdayakan dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 54,29%, di kategorikan baik. Program Pemberdayaan Dan

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan berisikan kegiatan dan sub kegiatan monitoring kepada ormas yang telah terdaftar dan sosialisasi kepada masyarakat tentang ormas. Pada triwulan II ini untuk pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan.

#### **5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

Dengan Indikator Kinerja Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terfasilitasi dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 51,71%, bisa dikategorikan baik. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya berisikan kegiatan dan sub kegiatan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama, hibah keuangan kepada lembaga FKUB, dan fasilitasi narkoba. Pada triwulan II untuk hibah kepada BNN untuk rehabilitasi narkoba sudah terealisasi dan untuk sosialisasi ada pada triwulan III dan IV.

#### **6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 24,12%, di kategorikan kurang baik dan pelaksanaan kerjanya. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk deteksi dini yang ada di daerah dan penanganan konflik sosial, dan FORKOPIMDA, dalam pelaksanaannya ada pada triwulan III dan IV, sehingga pada triwulan II ini belum maksimal realisasinya.

Secara Keseluruhan capaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep sampai dengan triwulan II sudah mencapai 31%, hal ini merupakan capaian yang Kurang baik karena sampai dengan Triwulan II. Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat mencapai Target kinerja yang telah di tentukan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024









## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 dibawah ini/terlampir :

**Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPd 2024	APBD 2024	RKPd PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.739.641.166,00	3.847.623.366,00	4.281.875.714,00	-172.480.068,00								3.567.161.098,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang di susun				14 Dokumen	14 Dokumen	7.781.400,00	7.781.400,00	7.781.400,00	0,00					Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		33.169.769,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	543.100,00	543.100,00	543.100,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			3.840.859,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	776.900,00	776.900,00	776.900,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			4.027.246,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	543.500,00	543.500,00	543.500,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			4.073.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	628.800,00	628.800,00	628.800,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			2.808.756,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	649.200,00	649.200,00	649.200,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			3.011.776,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	627.300,00	627.300,00	627.300,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			10.442.513,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4.012.600,00	4.012.600,00	4.012.600,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			4.965.304,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA dan LO) yang di susun				3 Dokumen	3 Dokumen	3.042.654.493,00	3.150.636.693,00	3.247.187.462,00	204.532.989,00		-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		2.751.728.659,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	3.040.100.493,00	3.148.082.693,00	3.244.633.462,00	204.532.989,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			2.747.815.256,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.141.200,00	1.141.200,00	1.141.200,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			1.622.539,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.412.800,00	1.412.800,00	1.412.800,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			2.290.864,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN mengikuti pelatihan Jumlah Pemenuhan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3 Orang 3 Paket	3 Orang 3 Paket	35.024.150,00	35.024.150,00	0,00	-35.024.150,00				Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		41.212.040,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	35.024.150,00	35.024.150,00	0,00	-35.024.150,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			41.212.040,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi Jumlah Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				3 Laporan 3 Orang	3 Laporan 3 Orang	185.967.600,00	185.967.600,00	289.236.600,00	103.269.000,00				Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		200.020.308,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.06.0001	Perediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2 Paket	2 Paket	11.296.400,00	11.296.400,00	11.296.400,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			9.131.455,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2 Paket	2 Paket	39.439.700,00	39.439.700,00	39.439.700,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			37.626.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Perediaan Bahan Logistik Kantor					6 Paket	6 Paket	20.909.100,00	20.909.100,00	20.909.100,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			20.430.251,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Perediaan Barang Cetak dan Penggandaan					40 Paket	40 Paket	10.645.400,00	10.645.400,00	14.538.400,00	3.893.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			16.187.471,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					38 Laporan	38 Laporan	103.677.000,00	103.677.000,00	203.053.000,00	99.376.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			105.875.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			10.768.706,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan yang di beli Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5 Unit	5 Unit	11.643.234,00	11.643.234,00	11.643.234,00	0,00	-		-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		75.104.513,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	11.643.234,00	11.643.234,00	11.643.234,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			75.104.513,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang di sediakan Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan 4 Orang	4 Laporan 4 Orang	242.501.900,00	242.501.900,00	245.741.900,00	3.240.000,00	-		-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		215.102.946,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	2000 Laporan	1.082.300,00	1.082.300,00	1.082.300,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			1.854.542,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	66.426.800,00	66.426.800,00	69.666.800,00	3.240.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			66.436.693,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	174.992.800,00	174.992.800,00	174.992.800,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			146.811.711,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara				20 Unit	20 Unit	214.068.389,00	214.068.389,00	480.285.118,00	266.216.729,00				Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah		250.822.863,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	141.768.895,00	141.768.895,00	230.599.500,00	88.830.605,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			161.900.881,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	37.550.000,00	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			59.559.640,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.749.494,00	34.749.494,00	212.135.618,00	177.386.124,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			29.362.342,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100 %	100 %	1.409.646.592,00	1.454.046.392,00	1.740.505.792,00	311.688.967,00					1.097.957.625,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan peraturan yang berlaku			3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.409.646.592,00	1.454.046.392,00	1.740.505.792,00	330.859.200,00			Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah	1.097.957.625,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			16 Dokumen	16 Dokumen	115.998.200,00	115.998.200,00	211.439.000,00	95.440.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			950 Orang	950 Orang	691.775.000,00	736.174.800,00	828.851.400,00	137.076.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1200 Orang	1200 Orang	41.866.000,00	41.866.000,00	140.208.000,00	98.342.000,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		47.957.625,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasikbraka															
			Jumlah Pasikbraka			150 Orang	150 Orang	560.007.392,00	560.007.392,00	560.007.392,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.	8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdaftar			100 %	100 %	112.059.587.800,00	68.458.067.800,00	68.797.477.360,00	-110.740.374.941,00					1.319.212.859,00		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sesuai peraturan yang berlaku			1 Kegiatan	1 Kegiatan	112.059.587.800,00	68.458.067.800,00	68.797.477.360,00	-43.262.110.440,00			Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah	1.319.212.859,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			660 Orang	660 Orang	112.059.587.800,00	68.458.067.800,00	68.797.477.360,00	-43.262.110.440,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		1.319.212.859,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan			100 %	100 %	73.354.000,00	72.154.000,00	72.154.000,00	77.211.150,00					150.565.150,00		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat sesuai peraturan yang berlaku			2 Kegiatan	2 Kegiatan	73.354.000,00	72.154.000,00	72.154.000,00	-1.200.000,00			Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Seluruh Perangkat Daerah	150.565.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			600 Orang	600 Orang	55.217.400,00	54.017.400,00	54.017.400,00	-1.200.000,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		125.565.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			4 Laporan	4 Laporan	18.136.600,00	18.136.600,00	18.136.600,00	0,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terfasilitasi			100 %	100 %	1.368.785.400,00	618.785.400,00	618.785.400,00	545.780.782,00					1.914.566.182,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan yang berlaku			2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.368.785.400,00	618.785.400,00	618.785.400,00	-750.000.000,00					1.914.566.182,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			900 Orang	900 Orang	132.508.800,00	132.508.800,00	132.508.800,00	0,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			957.283.091,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			725 Orang	725 Orang	1.236.276.600,00	486.276.600,00	486.276.600,00	-750.000.000,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			957.283.091,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial			100 %	100 %	1.244.462.100,00	1.244.462.100,00	1.144.987.100,00	-515.614.160,00					728.847.940,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku			3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.244.462.100,00	1.244.462.100,00	1.144.987.100,00	-99.475.000,00					728.847.940,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			20 Dokumen	20 Dokumen	223.637.800,00	223.637.800,00	195.237.800,00	-28.400.000,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA			101.923.970,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				800 Orang	800 Orang	233.991.100,00	233.991.100,00	203.491.100,00	-30.500.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		101.923.970,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	786.833.200,00	786.833.200,00	746.258.200,00	-40.575.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik		525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>J U M L A H</b>								<b>119.895.477.068,00</b>	<b>75.695.139.058,00</b>	<b>76.655.785.366,00</b>	<b>777.713.428.186,00</b>			<b>8.778.310.854,00</b>		

## BAB IV



# PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. ACHMAD ZULKARNAIN, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 197211231992011001



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2024



**SATPOL PP KABUPATEN SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, telah selesai disusun.

Renja perubahan ini memuat tentang Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024, dapat dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam SAKIP tahun 2024 nanti.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten sumenep khususnya dan umumnya untuk Negara dan Bangsa Indonesia, serta mengampuni segala kesalahan kita semua, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Sumenep, Juni 2024  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sumenep**

**WAHYU KURNIAWAN PRIBADI, A.P., M.Si.**  
**NIP. 19750619 199311 1 001**

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI**..... ii

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 4

1.3. Maksud Dan Tujuan ..... 5

1.4. Sistematika Penulisan ..... 5

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 ..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..... 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD ..... 9

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Sumenep..... 10

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ..... 19

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 20

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD ..... 22

3.3 Program Dan Kegiatan ..... 23

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah ..... 26

**BAB V PENUTUP** ..... 38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sumenep yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep merupakan pelaksana otonomi daerah dimana berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi juga sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Sumenep dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan

proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Kabupaten Sumenep menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Sumenep . Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Sumenepg Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan

- persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melandasi penyusunan Perubahan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2024 , yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
- c. Undang-Undang No. 26 Tahun
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) ;
  - k. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi ,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah ;
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sumenep ( Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
  - o. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 89 Tahun 2021 tentang kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep;
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dimaksudkan dan ditujukan untuk:

1. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satutahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan perodesatu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan untuk periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
5. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas tugas PD sertaindikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2024

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan garis besar isi dokumen Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenp tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep serta sistematika penulisan Renja.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, serta analisis kinerja pelayanan, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan sasaran target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sumenep.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2024)

#### 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , meliputi kegiatan :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 67,91%. Daerah Kabupaten/Kota

- **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** meliputi kegiatan
  - Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertibna Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
    - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
    - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
    - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka

### Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / KOta dan Peraturan Bupati/Walikota
  - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
  - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 19,83%.

- **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
  - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 42,90%.

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00								15.872.711.315,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00							15.872.711.315,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00							15.872.711.315,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor				90 %	90 %	7.382.153.704,00	7.921.191.691,00	9.663.888.415,00	1.496.513.517,00							8.878.667.221,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan				7 Dokumen	7 Dokumen	3.053.500,00	3.053.500,00	3.053.500,00	0,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Internal OPD	5.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	598.100,00	598.100,00	598.100,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sumenep ( Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Aparatur Sipil Negara dan atau aparatur lainnya;
- d. Penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Tabel C-T - 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Sumenep

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 ( thn n-2 )	Tahun 2018 ( thn n-1 )	Tahun 2019 ( tahun n )	Tahun 2020 ( tahun n+1 )	Tahun 2018 ( Thn n-2)	Tahun 2019 ( thn n-1)	Tahun 2020 ( tahun n)	Tahun 2021 ( thn n+1 )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Standart IKK											
A.	Aspek Pelayanan Umum											
1	Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
	a) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1: 10.000	1: 10.000	1: 10.000	1: 10.000	1: 10.000	1: 10.000	1	1	50%	50%	
	b) Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 penduduk	50 org / 10.000	50 org / 10.000	50 org / 10.000	50 org / 10.000	50 org / 10.000	50 org / 10.000	30 org / 10.000	30 org / 10.000	40 org / 10.000	40 org / 10.000	
	c) Rasio Pos Siskamling per Jumlah desa / kelurahan	1 pos/RW	1 pos/RW	1 pos/RW	1 pos/RW	1 pos/RW	1 pos/RW	0,0015	0,0015	15%	15%	Data pos kamling tiap desa belum sesuai IKK
II	SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI											
A	Pelayanan Dasar Pemeliharaan Keamanan											

	dan Ketertiban Masyarakat											
	d) Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100 %	100 %	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
	e) Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	5 kali sehari	5 kali sehari	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
	f) Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT	1 orang tiap RT

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tenang dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep yaitu dengan adanya pandemi covid 19 yang mana Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi yustisi. Pelaksanaan operasi yustisi menjadi isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep karena dikhawatirkan pada pelaksanaan operasi yustisi tersebut dapat terjadi gangguan ketentraman, ketertiban. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Perda dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara rasio membutuhkan personil sebanyak 400 orang anggota dibandingkan dengan

- kondisi saat ini yang baru memiliki anggota 225 orang;
2. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah ;
  3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah ;
  4. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep adalah :

1. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 ( tiga ) kali dalam sehari.
2. Aspek Pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024**

Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumenep. Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumenep membutuhkan personil sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumenep melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi terkait.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) mengacu kepada 3 program dan kegiatan 9 kegiatan serta sub kegiatan 33 sub kegiatan . Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C. 31.

**Tabel T-C.31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMENEP**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.536.814.751					14.536.814.751		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.188.455.251					8.188.455.251		
	PERENCANAAN											
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah yang disediakan			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah yang disediakan				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>6.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>6.000.0000</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sumenep	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sumenep	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen RKA di susun Tepat Waktu	2	Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen RKA di susun Tepat Waktu	2	Dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Perubahan RKA disusun Tepat Waktu	2	Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Perubahan RKA disusun Tepat Waktu	2	Dokumen	1.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen DPA di susun sesuai ketentuan	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen DPA di susun Tepat Waktu	2 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Perubahan DPA disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sumenep	4	Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan ( LKJiP,LKPJ ,LPPD dan Perjanjian Kinerja)	4 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan ( LKJiP,LKPJ dan LPPD )	4 Laporan	1.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sumenep	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 kali	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sumenep	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 kali	5.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>6.556.325.251</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>6.556.325.251</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sumenep	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	76 PNS	6.554.325.251	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sumenep	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS	76 PNS	6.554.325.251	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Kabupaten Sumenep</b>	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Kabupaten Sumenep</b>	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran disusun tepat waktu	4 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran disusun tepat waktu	4 Laporan	1.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Sumenep	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	4 Laporan	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Sumenep	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	4 Laporan	1.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>330.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>330.000.000</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sumenep	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	255 Stell	300.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sumenep	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	255 Stell	300.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 orang	30.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>678.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>678.000.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	2 Item	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	2 Item	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah Jenis ATK Jumlah Makan dan Minum yang disediakan Jumlah Tenaga Kerja Non Pegawai yang disediakan	16 Item 2 Paket 15 orang	400.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sumenep	Jumlah Jenis ATK Jumlah Makan dan Minum yang disediakan Jumlah Tenaga Kerja Non Pegawai yang disediakan	16 item 2 Paket 15 orang	400.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sumenep	jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Jenis	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sumenep	jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Jenis	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumenep	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumenep	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	150.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah Arsip yang dikelola	60 Meter	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sumenep	Jumlah meter lari arsip yang dikelola	60 Meter	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Sumenep	jumlah sistem informasi yang dikelola	2 unit	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Sumenep	jumlah sistem informasi yang dikelola	2 unit	200.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>110.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>110.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sumenep	Jumlah mebel yang dibeli	5 Jenis	80.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sumenep	Jumlah mebel yang dibeli	5 Jenis	80.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	5 Jenis	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	5 Jenis	30.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>91.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			<b>91.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sumenep	jumlah jasa pengantar surat	24 kali	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sumenep	Jumlah Surat yang diadministrasikan	24 kali	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Tagihan	89.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Tagihan	89.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>			<b>417.130.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>			<b>417.130.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sumenep	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	1 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sumenep	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	1 unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sumenep	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	26 Unit	347.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sumenep	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	26 Unit	347.130.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Sumenep	jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel		jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	20.000.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	20.000.0000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Sumenep	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Sumenep	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	50.000.000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kabupaten Sumenep			4.891.464.500	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kabupaten Sumenep			4.891.464.500	
2.	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>			<b>3.441.464.500</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Kabupaten Sumenep</b>			<b>3.441.464.500</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah kegiatan patroli insidental yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pengamanan Unjuk rasa yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pengawalan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum	<b>160 Kali</b> <b>12 Kali</b> <b>60 Kali</b> <b>70 orang</b>	<b>2.000.000.000</b>	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah kegiatan patroli insidental yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pengamanan Unjuk rasa yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pengawalan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman,Ketertiban Umum	<b>160 Kali</b> <b>12 Kali</b> <b>60 Kali</b> <b>70 orang</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Sumenep	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan	<b>48 kali</b>	<b>200.000.000</b>	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kabupaten Sumenep	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan	<b>48 kali</b>	<b>200.000.000</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	<b>48 Kali</b>	115.264.500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	<b>48 Kali</b>	115.264.500	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pembinaan Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan, Jumlah Penyuluhan terhadap Linmas Desa yang dilaksanakan ,Jumlah Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum danm Perlindungan Masyarakat	<b>100 Orang 48 kali 32 orang</b>	800.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Sumenep	Jumlah Kegiatan Penyuluhan terhadap Linmas Desa yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>100 Orang 48 kali 32 orang</b>	800.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamongpraja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pelatihan Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas yang dilaksanakan	<b>2 kali</b>	300.275.000	Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamongpraja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pelatihan Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas yang dilaksanakan	<b>2 kali</b>	300.275.000	
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Sumenep	Jumlah Kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan	<b>48 kali</b>	225.925.000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Sumenep	Jumlah Kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan	<b>48 kali</b>	225.925.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kabupaten Sumenep	Jumlah Ketertiban Umum dan etentraman Masyarakat yang disusun sesuai dengan SOP	<b>6 Dokumen</b>	100.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kabupaten Sumenep	Jumlah Ketertiban Umum dan etentraman Masyarakat yang disusun sesuai dengan SOP	<b>6 Dokumen</b>	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan daerah dan Perkada	Kabupaten Sumenep	Jumlah Layanan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sesuai aturan yang berlaku	<b>2 Layan an</b>	200.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan daerah dan Perkada	Kabupaten Sumenep	Jumlah Layanan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sesuai aturan yang berlaku	<b>2 Layan an</b>	200.000.000	
	<b>Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota</b>	Kabupaten Sumenep			<b>1.350.000</b>	<b>Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota</b>	Kabupaten Sumenep			<b>1.350.000</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan , Jumlah Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum	<b>2 kali  13 oran g</b>	400.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Anggota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Jumlah Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum	<b>2 kali  13 oran g</b>	400.000.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan :Peraturan Bupati/Walikota	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah Pengawasan yang dilakukan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	<b>48 kali</b>	<b>400.000.000</b>	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan :Peraturan Bupati/Walikota	<b>Kabupaten Sumenep</b>	Jumlah Pengawasan yang dilakukan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	<b>48 kali</b>	<b>400.000.000</b>	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	<b>Kabupatren Sumenep</b>	Jumlah Penertiban Media Luar yang dilaksanakan , Jumlah Penertiban PKL yang dilaksanakan, Jumlah Penyidikan dan Penyelidikan yang dilaksanakan , Jumlah Tenaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>48 Kali  48 Kali  48 Kali  20 oran g</b>	<b>550.000.000</b>	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	<b>Kabupatren Sumenep</b>	Jumlah kegiatan Penertiban Media Luar Ruang yang dilaksanakan ' Jumlah Kegiatan Penertiban PKL yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Penyidikan dan Penyelidikan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>48 Kali  48 Kali  48 Kali  20 oran g</b>	<b>550.000.000</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kabupaten/Kota</b>			<b>90 %</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kabupaten/Kota</b>			<b>90 %</b>	<b>100.000.000</b>	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kabupaten Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PPNS	<b>3 Orang</b>	<b>100.000.000</b>	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kabupaten Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PPNS	<b>3 Orang</b>	<b>100.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Kabupaten Sumenep	Persentase Penanggulangan Kebakaran		<b>1.156.895.000</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Kabupaten Sumenep	Persentase Penanggulangan Kebakaran		<b>1.156.895.000</b>	
	<b>Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	Persentase upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran yang dilakukan.		<b>956.895.000</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Sumenep	Persentase upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran yang dilakukan.		<b>956.895.000</b>	
	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan	<b>48 kali</b>	206.895.000	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan	<b>48 kali</b>	206.895.000	
	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pemadaman yang dilaksanakan, Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>72 Kejadian</b> <b>29 Orang</b>	600.000.000	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pemadaman yang dilaksanakan, Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>72 Kejadian</b> <b>29 Orang</b>	600.000.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kabupaten Sumenep	Jumlah korban kebakaran dan Non Kebakaran yang diselamatkan	<b>50 orang</b>	150.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kabupaten Sumenep	Jumlah korban kebakaran dan Non Kebakaran yang diselamatkan	<b>50 orang</b>	150.000.000	
	<b>Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan</b>		<b>100.000.000</b>	<b>Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran</b>	Kabupaten Sumenep	<b>Jumlah Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan</b>		<b>100.000.000</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pendataan sarana Prasarana proteksi kebakaran	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	48 kali	50.000.000	Pendataan sarana Prasarana proteksi kebakaran	Kabupaten Sumenep	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	48 kali	50.000.000	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 3 peran yaitu :

- a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. menegakkan Peraturan Daerah
- c. Perlindungan Masyarakat

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang. Dari misi yang telah ditetapkan maka tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat .
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan lainnya..

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Perencanaan ,Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  
 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD  
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum**

**Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 ( satu) daerah Kabupaten / Kota**

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan

Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan  
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/walikota  
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  
Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**PROGRAM PENCEGAHAN ,PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

**Pencegahan Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan  
bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah  
kabupaten/Kota**

Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota  
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep telah menetapkan program , kegiatan dan Sub kegiatan untuk dilakukan perubahan Rencana Kerja sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SUMENEP TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00						15.872.711.315,00		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00							15.872.711.315,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00							15.872.711.315,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor					90 %	90 %	7.382.153.704,00	7.921.191.691,00	9.663.888.415,00	1.496.513.517,00					8.878.667.221,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan				7 Dokumen	7 Dokumen	3.053.500,00	3.053.500,00	3.053.500,00	0,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Internal OPD		5.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	598.100,00	598.100,00	598.100,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	422.600,00	422.600,00	422.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			1.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	535.400,00	535.400,00	535.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	530.200,00	530.200,00	530.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		



RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi				8 Jenis	8 Jenis	398.190.876,00	397.924.476,00	397.924.476,00	-266.400,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Internal OPD		520.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.838.420,00	6.838.420,00	6.838.420,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			23.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.100.500,00	5.036.500,00	5.036.500,00	-64.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	259.914.756,00	259.914.756,00	259.914.756,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.145.800,00	6.145.800,00	6.145.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.460.400,00	7.266.000,00	7.266.000,00	-194.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			18.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	112.731.000,00	112.723.000,00	112.723.000,00	-8.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan				10 unit	10 unit	95.702.216,00	95.702.216,00	95.702.216,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Internal OPD		1.320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07.005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	95.702.216,00	95.702.216,00	95.702.216,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	90.587.000,00	90.587.000,00	90.587.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</i>				95 unit	95 unit	367.509.700,00	366.899.700,00	366.899.700,00	-610.000,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	Internal OPD		349.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	38.610.000,00	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			49.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	14 Unit	287.050.000,00	287.050.000,00	287.050.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			185.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel																		



RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	23.169.700,00	23.169.700,00	23.169.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas				90 %	90 %	4.616.439.208,00	3.999.242.919,00	3.742.742.034,00	934.604.886,00							5.551.044.094,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.791.383.855,00	1.787.913.455,00	1.787.913.455,00	-3.470.400,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	masyarakat		3.338.752.879,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			46.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.400,00	59.999.200,00	59.999.200,00	-1.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			385.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Orang	82 Orang	274.994.400,00	271.525.200,00	271.525.200,00	-3.469.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				10 Dokumen	10 Dokumen	99.986.600,00	99.986.600,00	99.986.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			86.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				300 laporan	300 laporan	79.892.100,00	79.892.100,00	79.892.100,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			999.752.879,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				40 Laporan	40 Laporan	1.276.510.355,00	1.276.510.355,00	1.276.510.355,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			97.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keterseragaman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda yang ditegakkan				90 %	90 %	2.825.055.353,00	2.211.329.464,00	1.904.829.464,00	-920.225.889,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	masyarakat		1.972.291.215,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 laporan	12 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 dokumen	2 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan</i>				6 laporan	6 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda</i>				3 Dokuman	3 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.601.304.672,00	1.036.488.213,00	316.988.101,00	-1.284.316.571,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			276.291.215,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	650.007.981,00	601.098.551,00	1.014.098.663,00	364.090.682,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			396.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		



RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	49.999.115,00	49.999.115,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran				90 %	90 %	1.025.367.009,00	1.025.759.609,00	1.025.759.609,00	417.632.991,00							1.443.000.000,00	

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran yang dilakukan</i>				80 %	80 %	1.025.367.009,00	1.025.759.609,00	1.025.759.609,00	392.600,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	masyarakat		1.330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>				20 Dokumen	20 Dokumen	138.202.800,00	138.596.800,00	138.596.800,00	394.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				36 Laporan	36 Laporan	887.164.209,00	887.162.809,00	887.162.809,00	-1.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			430.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	masyarakat dan seluruh perangkat daerah		32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.02.001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran				90 %	90 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	masyarakat		16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.03.001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN T.A 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Relawan Kebakaran dibawah binaan dinas				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	masyarakat		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			<b>J U M L A H</b>						13.023.959.921,00	12.946.194.219,00	14.432.390.058,00	1.408.430.137,00							15.872.711.315,00	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja tahunan merupakan implementasi dan operasionalisasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja Perubahan dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi guna mencapai target kinerja program dan kegiatan PD.

Renja Perubahan Satpol PP Kabupaten Sumenep dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan yakni dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp. **11.924.675.576,00**. menjadi setelah perubahan Rp. **14.577.353.047,00** dengan penambahan anggaran sebesar Rp. **2.652.677.471,00**. Besaran anggaran perubahan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep selama Tahun Anggaran 2024, serta sebagai alat pengukur pencapaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan oleh tim, individu, dan institusi organisasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Selain itu, RENJA ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas dengan disiplin.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Output dari RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan sasaran yang telah ditentukan. RENJA ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024, yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya RENJA Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Juni 2024  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Sumenep**

**WAHYU KURNIAWAN PRIBADI, A.P., M.Si.**  
**NIP. 19750619 199311 1 001**





# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PERIKANAN**

Jl. Raung 5A Sumenep Telp. (0328) 662891 Fax. (0328) 672484  
SUMENEP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya rencana kerja pembangunan disusun dengan tujuan memberikan ulasan dan gambaran tentang program kegiatan prioritas pembangunan perangkat daerah di dalam menjabarkan visi, misi, indikator serta target kinerja. Disamping itu menjamin pula konsistensi dan sinergitas perencanaan, penganggaran sampai pada pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan prinsip sinergitas pembangunan pusat dan daerah, pemerintah dengan pemangku kepentingan, rencana tata ruang dengan perencanaan pembangunan serta dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja

Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sebagai Instansi teknis dalam pembangunan perikanan, disesuaikan dengan Visi Kabupaten Sumenep yaitu “**Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera**” dan Misi Kabupaten ke-2 “**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir**”

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupateh Sumenep Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
  17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

18. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor : 188/04/435.114.1/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan atau pedoman terhadap perubahan kebijakan pembangunan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal;
2. Perubahan Rencana Kerja ini juga merupakan adaptasi terhadap perubahan pola kebijakan aktual sehingga perlu dilakukan p[ergeseran poola perencanaan dan anggaran yang diperlukan;
3. Dokumen ini merupakan tindaklanjut dari evaluasi kinerja organisasi pernagkat daerah yang dilakukan sebelumnya;

Dari hal tersebut diatas bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep mempunyai maksud pencapaian kinerja pembangunan dapat dilaksanakan dalam koridor dokumen perencanaan pembangunan yang ada sehingga hasil yang didapatkan mempunyai korelasi terhadap indicator capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang bertujuan untuk mencapai perubahan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2.1. Faktor Pendukung
- 2.2. Faktor Penghambat
- 2.3. Tindak Lanjut

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2024

#### 2.1. Faktor Pendorong

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2023 dengan rata-rata capaian kinerja yang dikategorikan sebagai capaian sangat baik. Ini tidak terlepas dari hasil kerja OPD yang telah merencanakan, melaksanakan serta mengawasi jalannya program dan kegiatan yang ada sehingga sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah direncanakan.

Adapun realisasi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel : 2.1  
Realisasi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2023				Keterangan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.1	Pertumbuhan Nilai Tambahn Sub Sektor Perikanan	%	4	9.55	238,75	

Faktor pendorong tercapainya target kinerja Dinas Perikanan terutama pada program pengelolaan perikanan budidaya dimana program ini dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya dengan target 15% dengan capaian pertumbuhan produksi pada triwulan 2 mencapai 3,38% dimana pada tahun 2023 indikator kinerja ini mengalami penurunan produksi sebesar 14%. Capaian ini didukung oleh koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan tentang penanganan kerusakan lingkungan akibat aktifitas pembudidayaan udang vanamei.

Tabel : T-C. 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024 Triwulan II

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				6			7			8				9				10		13=9+10+11+12			14=13/8x100%		15=7+13
1	2	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	3.555.060.708	100 %	4.901.849.595	100 %	5.452.779.776		942.955.068			942.955.068	17,29 %		5.844.804.663,00							164,41%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	10 Laporan	2.466.620.708	1 Laporan	4.018.754.035	1 Laporan	4.587.553.393		792.483.350			792.483.350	17,27 %		5.844.804.663,00							164,41%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan	2.445.020.708	1 Kegiatan	4.014.482.035	37 Orang	4.585.145.193	37	791.386.350	39	1.656.013.021	2.447.399.371	53,38 %		5.844.804.663,00							164,41%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	3 Laporan	21.600.000	3 Laporan	4.272.000	3 Laporan	2.408.200	1	1.097.000		0	1.097.000	45,55 %		5.844.804.663,00							164,41%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	11 Kegiatan	528.440.000	kegiatan	290.943.439	kegiatan	244.206.985		33.061.555			33.061.555	13,54 %		5.844.804.663,00							164,41%	

PERUBAHAN RENCANA KERJA D/MAS PERIKAMAN 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	4	5	6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rekening 31.000.000,00	1	Kegiatan 10.087.110	1	Kegiatan 12.388.022	1	Rp 2.905.425	1	Rp 4.817.400	1	Rp 7.722.825	1	Rp 62,34%	1	Rp 5.844.804.663,00	1	Rp 164,41%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Kegiatan 100.000.000,00	1	Kegiatan 68.492.400	1	Kegiatan 16.170.800	1	Rp 2.017.200	1	Rp 8.706.098	1	Rp 10.723.298	1	Rp 66,31%	1	Rp 5.844.804.663,00	1	Rp 164,41%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Kegiatan 85.000.000,00	1	Kegiatan 40.111.645	1	Kegiatan 44.712.798	1	Rp 6.287.970	1	Rp 15.156.760	1	Rp 21.444.730	1	Rp 47,96%	1	Rp 5.844.804.663,00	1	Rp 164,41%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1	Kegiatan 45.000.000,00	1	Kegiatan 44.486.000	1	Kegiatan 28.383.365	1	Rp 200.000	1	Rp 5.608.000	1	Rp 5.808.000	1	Rp 20,46%	1	Rp 5.844.804.663,00	1	Rp 164,41%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Kegiatan 267.440.000,00	1	Kegiatan 127.766.284	1	Kegiatan 142.552.000	1	Rp 21.650.960	1	Rp 24.949.938	1	Rp 46.600.898	1	Rp 32,69%	1	Rp 5.844.804.663,00	1	Rp 164,41%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kegiatan 445.000.000	4	Jasa 485.593.076	4	Jasa 514.496.710	4	Rp 108.042.063	4	Rp	4	Rp 108.042.063	4	Rp 21,00%	4	Rp 5.844.804.663,00	4	Rp 164,41%	

PERUBAHAN RENCANA KERJA D/MAS PERIKAMAN 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				6		7		8		9		10				13=9+10+11+12		14=13/8x100%			15=7+13		16=15/6x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	4	5	2	Rekening	265.000.000,00	3	Rekening	275.099.576	3	Rekening	282.927.552	3	67.626.513	3	65.209.014	132.835.527	46,95%	5.844.804.663,00	164,41%	17			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Kegiatan	180.000.000,00	1	Laporan	210.493.500	1	Laporan	231.569.158	1	40.415.550	1	56.899.050	97.314.600	42,02%	5.844.804.663,00	164,41%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Kegiatan	115.000.000	2	Kegiatan	106.559.045	2	Kegiatan	106.522.688		9.368.100			9.368.100	8,79%	5.844.804.663,00	164,41%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Unit	55.000.000,00	3	Unit	86.186.145	3	Kendaraan	89.510.400	3	9.368.100	3	23.076.900	32.445.000	36,25%	5.844.804.663,00	164,41%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Gedung	60.000.000,00	1	Gedung	20.372.900	1	Unit	17.012.288	1		1	7.457.205	7.457.205	43,83%	5.844.804.663,00	164,41%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi														#DIV/0!		5.844.804.663,00	164,41%				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DI MAS PERIKANAN 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		8		9		10				13=9+10+11+12		14=13/8x100%			15=7+13
1	2	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya nilai tambah sub sektor perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1 %	65.000.000	1,5 %	2.364.123.333	1,5 %	222.069.900		9.835.000	-11,8	79.669.600	9.835.000	4,43%		5.844.804.663,00		164,41%		
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Sumber Daya Ikan		Jumlah nelayan yang dibina/dilatih	60 Komopok	65.000.000,00	26 Komopok	2.364.123.333	2 Kompok	222.069.900		9.835.000	60	79.669.600	89.504.600	40,30 %		5.844.804.663,00		164,41%		
														-							
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	15 %	80.000.000	%	2.152.630.986	%	1.890.829.693			3,4	485.904.456	-	0,00%		5.844.804.663,00		164,41%		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah pembudidaya yang dibina	112 Komopok	80.000.000	Pe mbu dida ya	2.152.630.986	2 Kompok Pembudidaya	1.890.829.693		160.212.379	0	485.904.459	160.212.379	8,47%		5.844.804.663,00		164,41%		
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Komopok	20.000.000,00	10 Pembudidaya	1.469.590.766	20 Orang	1.555.995.087	0	128.534.839	20	355.120.120	483.654.959	31,08 %		5.844.804.663,00		164,41%		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	12 Komopok	60.000.000,00	70 Komopok	683.040.220	4 Kompok	334.834.606	0	31.677.540	1	130.784.336	162.461.876	48,52 %		5.844.804.663,00		164,41%		

## **2.2. Faktor penghambat**

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 antara lain :

- a. Cuaca yang tidak menentu pada bulan Januari sampai bulan Februari menyebabkan nelayan tidak dapat melakukan aktifitas penangkapan ikan sehingga produksi perikanan tangkap menurun.
- b. Kerusakan lingkungan akibat aktifitas budidaya ikan terutama pada komoditas udang vanamei menghasilkan limbah yang dapat merusak kualitas air sehingga menyebabkan penurunan kualitas dan penyakit ikan.

## **2.3. Tindak Lanjut**

Dengan adanya analisa faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, Dinas Perikanan melakukan langkah – langkah dalam rangka melakukan tindaklanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja, antara lain :

- a. Melakukan pelatihan perawatan alat tangkap ikan kepada nelayan saat musim cuaca buruk sehingga pada nelayan siap melakukan aktivitas penangkapan ikan pada saat cuaca kembali membaik.
- b. Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan sosialisasi antar pemangku kepentingan dalam mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2024**

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 mengacu Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dimana didalam program dan kegiatan terdapat target indicator yang harus dicapai selama satu tahun. Adapun program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana dijabarkan didalam table berikut.

Tabel 3.1  
Rencana program dan indikator kinerja tahun 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Laporan Administrasi PD</b>
3	25	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD</b>
3	25	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3	25	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	25	01	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan dan Penyediaan Administrasi Umum PD</b>
3	25	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
3	25	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3	25	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
3	25	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
3	25	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
3	25	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	25	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan PD</b>
3	25	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3	25	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
3	25	01	205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian</b>
3	25	01	205		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	25	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>
3	25	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
3	25	01	209	0004	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>
3	25	03	202		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina</b>
3	25	03	202	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>
3	25	04	204		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Produksi Budidaya Ikan</b>
3	25	04	204	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
3	25	04	204	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendanaan Perubahan Renja TA. 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan besar beban target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun program dan kegiatan serta pendanaan Dinas perikanan Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel : 3.2

## Program dan kegiatan disertai dengan rencana pendanaan

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Laporan Administrasi PD</b>	<b>6.052.917.635</b>
3	25	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD</b>	<b>5.067.629.704</b>
3	25	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.065.221.504
3	25	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.408.200
3	25	01	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan dan Penyediaan Administrasi Umum PD</b>	<b>301.600.534</b>
3	25	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.388.022
3	25	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40.264.349
3	25	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44.712.798
3	25	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	61.683.365
3	25	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.552.000
3	25	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>514.496.710</b>
3	25	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	282.927.552
3	25	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	231.569.158
3	25	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>169.190.687</b>
3	25	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	89.510.400

PERUBAHAN RENCANA KERJA DIMAS PERIKANAN 2024

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	
3	25	01	209	04	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	79.680.287
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>340.062.419</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>202</b>		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina</b>	<b>340.062.419</b>
3	25	03	202	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	340.062.419
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya</b>	<b>4.477.944.562</b>
3	25	04	204		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Produksi Budidaya Ikan</b>	<b>4.477.944.562</b>
3	25	04	204	000 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2.925.829.943
3	25	04	204	000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.552.114.619

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen perencanaan tahunan yang tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen Renja 2024 yang telah disusun oleh Dinas Perikanan merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi antar dokumen perencanaan baik pusat maupun provinsi dan partisipatif baik itu top down maupun bottom up, sehingga konsistensi di dalam perencanaan pembangunan terwujud. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 disinkronisasikan dengan tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yaitu Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi dan Produk Unggulan melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan dan isu- isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Diharapkan Rencana Kerja yang telah disusun dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja tahun 2024, sekaligus apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud.

Sumenep, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN SUMENEP

**Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660808 198603 1 005



**KABUPATEN  
SUMENEP**



# 2024 **RENJA PERUBAHAN**

---

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

 0328-662268

 sekretariatdinsosp3asumenep@gmail.com

 Jl. Asoka No. 10

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat daerah	7
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	19
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	25
2.4 Daerah	26
2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V     PENUTUP	102

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### a.1 PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan (*Permendagri No. 86 Tahun 2017*). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didefinisikan juga sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangka Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dengan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu dan sistematis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD).

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan

keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA-OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## a.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023, adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep;
21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.

### a.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep adalah :

- a. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra dan RKPD Kabupaten Sumenep.

**a.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep di susun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### HASILEVALUASIPELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2022 diarahkan kepada penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Hal tersebut dapat dilihat dalam pencapaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang terpenuhi sesuai harapan, bahkan untuk realisasi kinerja melampaui target, namun demikian tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa program dan kegiatan prioritas yang realisasi anggaran dan target fisiknya yang masih belum tercapai maksimal atau tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun realisasi program dan kegiatan yang telah tercapai dan yang belum tercapai baik dari sudut pandang kinerja maupun keuangan pada tahun anggaran 2022, dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

**TableT-C29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat**  
**Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun**  
**2022**

Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep

Nama Perangkat Daerah: DINASSOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1										
1	06									
1	06	01						100 %	100 %	100
1	06	01	2,02							
1	06	01	2,02	01				12 bulan	12 bulan	100

1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan													20 jenis	20 jenis	100
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan													10 unit	10 unit	100
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan													20 jenis 100 orang	68 jenis	340
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan													10 paket	10 paket	100
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan													10 jenis	10 jenis	100
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan													50 kali	50 kali	100
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan													10 unit	10 unit	100
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet													12 rekening	12 rekening	100
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola													5 unit	13 unit	260

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						20 unit	20 unit	100
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara						3 unit	3 unit	200
1	06	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Peningkatan PSKS yang Dibina</b>	4 %					4 %	4 %	100,00 %
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	84 %					70 %	70 %	100
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina						27 Orang	27 Orang	100
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga /perintis kemerdekaan yang diberdayakan						50 Orang	39 Orang	78
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat/LKSA yang dibina						400 Organisasi	445 Organisasi	111,25
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS yang mendapat rehabilitasi</b>	2 %					2 %	2 %	100,00 %
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	1 %					1 %	1 %	100,00 %
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas berat / Lansia terlantar yang mendapat permakanan						135 Orang	262 Orang	142
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						120 Orang	120 Orang	200

1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	1 %						1 %	1 %	100,00 %
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	terjaminnya Kesejahteraan Eks Pasung/PMKS							10 Orang	13 Orang	76,92307692
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelaksanaan sosial / Bimbingan							188 Orang	188 Orang	100
1	06	04	2,02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Mahasiswa Kurang Mampu yang Mendapat Beasiswa							150 Orang	188 Orang	125,3333333
1	06	04	2,02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Operasional RPS							12 Bulan	12 Bulan	100
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial</b>	<b>87 %</b>						<b>82 %</b>	<b>82 %</b>	<b>94,25 %</b>
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase meningkatnya akurasi ketepatan sasaran (Keluarga Penerima Manfaat (KPM))	90 %						85 %	85 %	100
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	meningkatnya realisasi penerimaan KPM							11.799 orang	11.799 orang	100
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	meningkatnya realisasi penerimaan KPM BPNT Masyarakat							50.988 orang	50.988 orang	
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Terhadap Total Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100 %</b>						<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00 %</b>
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %						100 %	100 %	100,00 %

1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Tersedianya makanan bagi Korban Bencana					75 Paket	71 Paket	94,66666667
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Ketersedian Sandang bagi Korban Bencana					50 Paket	79 Paket	158
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana	50 %				30 %	30 %	60,00 %
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana dan Masyarakat yang dilatih					100 Orang	100 Orang	100
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan Makam yang Layak bagi Perintis Kemerdekaan dan Veteran</b>	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00 %</b>
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pemeliharaan TMP	100 %				100 %	100 %	100,00 %
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara					1 Lokasi	1 Lokasi	100
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	08				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</b>	<b>1 % 0,653 %</b>				<b>1 % 0,651 %</b>	<b>1 % 0,65 %</b>	<b>100,00 % 99,54 %</b>
2	08	02	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Lembaga/ OPD yang mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan PUG					51 Lembaga	44 Lembaga	86,2745098



RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						14 Layanan	0 Layanan	0	
2	08	03	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	08	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						40 Orang	0 Orang	0	
2	08	03	2,03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik						10 Orang	0 Orang	0	
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Strata Kabupaten Layak Anak</b>							<b>Pratama Strata</b>	<b>0 Strata</b>	<b>100 %</b>
2	08	06	2,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah , Non pemerintah ,Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA						4 Lembaga	4 Lembaga	100	
2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan						4 Kali	4 Kali	100	



2	08	07	2,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang tertangani							19 Orang	18 Orang	100
2	08	07	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							4 Layanan	4 Layanan	100
2	08	07	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus							4 Media	4 Media	100
2	08	07	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dengan lembaga penyedia layanan anak							5 Lembaga	5 Lembaga	100
2	08	07	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	08	07	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							2 Dokumen	2 Dokumen	100

## 2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1.1. Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU)

- 3 Berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan Kepala Dinas Sosial Kab. Sumenep maka target kinerja Dinas Sosial Kab. Sumenep tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**(IKU Eselon II) Tahun 2022**  
**Dinas Sosial Kabupaten Sumenep**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase PPKS penerimabantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS		%	0,90	7,21	801,11 %

**Tabel 2.2.2**  
**Data Permasalahan Sosial 2018-2022**  
**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Sumenep**

No	Permasalahan Sosial	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak terlantar	498	498	2700	2700	2700
2	Pengemis/Gelandangan	37	86	31	45	68
3	Wanita Tuna Susila	0	0	2	0	8
4	Korban Narkotika	0	0	0	0	0
5	Anak Nakal	0	0	0	0	0
6	Mantan Napi	0	0	0	0	0
7	Penyandang Cacat	2.053	2.053	488	827	1.283
8	Korban Bencana Alam	238	62	74	119	48
9	Wanita Rawan Sosial Ekonomi/	0	0	0	0	0
10	Keluarga Fakir Miskin	199.298	199.948	197.465	197.465	273.403

11	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0
12	Lanjut Usia Terlantar	17.714	17.714	812	988	3.276
13	Anak Balita Terlantar	0	0	3	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>219.838</b>	<b>220.361</b>	<b>201.575</b>	<b>202.145</b>	<b>280.787</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Persentase penanganan PMKS

Indikator ini menggambarkan persentase PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026, target kinerja tahun 2022 untuk indikator prosentase PMKS yang ditangani 0,90%. Dengan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 298.590 KK dan jumlah PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial tahun 2022 sebanyak 280.787 KK yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- Untuk tahun 2022, jumlah keseluruhan penyandang cacat di kabupaten sumenep sebanyak 1.283 Orang. Pada tahun 2022 dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Perumahan sebanyak 138 orang yang terdiri dari Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebanyak 88 orang dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat sebanyak 32 orang.
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sebanyak sebanyak 188 orang (bantuan beasiswa)
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebanyak 273.403 KK berdasarkan data bayar bulan desember 2022 (program sembako/bantuan dari pemerintah pusat) dari jumlah total 298.590 KK

yang masuk dalam data DTKS, Sehingga prosentase realisasi sebesar 91,56 %.

Keberhasilan melebihi target tahun 2022 disebabkan perubahan metode pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial yang diharapkan mempercepat proses pengentasan Fakir Miskin/PMKS dan adanya program dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program sembako.

b. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha diturunkan secara kuantitas. Pada tahun 2022 target kinerja untuk indikator jumlah PMKS sebanyak 298.590 KK dengan realisasi berdasarkan hasil pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 280.787 KK sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2022 hanya tercapai sebesar 94,03 % hal ini disebabkan karena pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan social secara langsung.

**Tabel 2.2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**  
**Kabupaten Sumenep ( IKU Bupati ) Tahun 2022**

No	IKU Daerah	Satuan	Capaian awal	Target 2022	Realisasi 2022	interpelasi Capaian IKU
1	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	66,43	67,7	67,87	100,25
2	Prosentase Penduduk Miskin	%	20,18	18,7	18,76	100,32
3	Indeks Kesalehan Sosial	nilai		80,96	82,30	101,66

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep memiliki indikator yang mendukung secara langsung indicator kinerja utama daerah ( IKUD ) Kabupaten Sumenep yaitu Indeks

Pembangunan Manusia dimana pada tahun 2022 target yang dicanangkan sebesar 67,7 % dan terealisasi sebesar 67,87 %. Data tersebut selaras dengan data yang telah diberikan oleh BPS Sumenep.

Untuk Prosentase Penduduk Miskin dimana pada tahun 2022 target yang dicanangkan sebesar 18,7 % , terealisasi sebesar 18,76 %. Data tersebut selaras dengan data yang telah diberikan oleh BPS Sumenep.

Indeks Kesalehan Sosial dimana pada tahun 2022 target yang dicanangkan sebesar 80,96 % dan terealisasi sebesar 82,30 %sewlaras dengan data yang telah diberikan oleh BAPPEDA kabupaten Sumenep.

### **3.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimal Urusan Bidang Sosial**

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar pada Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pencapaian capaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumenep tahun 2021 dapat dihitung sebagai sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sasaran/indikator kinerja	CaraMenghitung	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosialdasarpenyandangdisabilitastelantar,anaktelantar,lanjutusiatelantarsertagelandanganpengemisdiluarpanti	Terpenuhinyakebutuhandasarpenyandangdisabilitastelantar, anak telantar, lanjutusiatelantarsertagelandanganpengemisdiluarpanti	$X \times 100\%Y$ X:Jumlah penyandangdisabilitas telantar,anaktelantar,lanjutusiatelantarsertagelandanganpengemis yangterpenuhikebutuhanadarnyadiluarpanti Y: Populasi penyandangdisabilitastelantar,anaktelantar, lanjutusia telantar	100%	$\frac{250}{250} \times 100\% = 100\%$

			sertagelanda nganpengem isdidaeraha bupaten/kota yangmembut uhkanrehabil itasisocialda sardi luarpanti		
2	Perlindungan sosialKorbanBe ncanaAlam dan Sosial	Terpenuhiyak ebutuhdasar korban benca naalamdanci aldarahkabup aten/kota	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <b>X</b> :Jumlahkorban bencanaala mdansosiald aerahkabupa ten/kotayang terpenuhikeb utuhdasar nya. <b>Y</b> : Populasikorbanb encanaalamdansi aldarahkabu paten/kotayangm ebutuhkanperli ndungandanjami nansosialpada atdangsetelahtang gapdaruratbenca nadaerah kabupaten/kota	100%	$\frac{133}{100} \times 100\%$ 133

Pencapaian kinerja pelayanan pada dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten sumenep dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian kinerja pelayanan  
pada dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten sumenep  
Tahun 2024

NO	INDIKATOR ( IKU, SPM, IKK )	ANGKA / NILAI TARGET / STANDART ( IKU, SPM, IKK )	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Indeks Pembangunan Gender	81,17	81,54	81,9	82,27	82,63	83	81,88	81,9	82,27	
2	Indeks Perlindungan Anak	58,1	59,87	61,68	63,51	65,36	67,23		61,68	63,51	
3	Indeks Pemberdayaan Gender	58,62	59,02	59,42	59,82	60,22	60,62	60,81	59,42	59,82	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	1%	1%	1%	1%	1%	1%	94,03	1%	1%	
5	Persentase PPKS penerima bantuan dan jaminan sosial terhadap total jumlah PPKS	0,80%	0,90%	1,00%	1,20%	1,25%	1,30%	7,21	1,00%	1,20%	
6	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	50%	55%	60%	65%	70%	75%	65	60%	65%	

7	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berakreditasi terhadap total jumlah PSKS	40%	44%	48%	52%	56%	60%	93,33	48%	52%	
8	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sedangkan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada table TC. 32 di bawah ini :

**Tabel T-C.32.**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sumenep  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMENEP**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	Kab. Sumenep			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu dan sarana prasarana perangkat daerah	100%	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Sumenep	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dok	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Sumenep	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumenep	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumenep	Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dok	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Sumenep	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 lap	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	55 org	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Sumenep	jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	55 org	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 org	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Sumenep	jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	20 item	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	jumlah jenis ATK yang disediakan	20 jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sumenep	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Sumenep	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang- undangan yang disediakan	10 jenis	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60 kali	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Sumenep			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Sumenep			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 bulan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Sumenep			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	4 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 gedung	

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kab. Sumenep	<b>Persentase peningkatan PSKS yang dibina</b>	<b>4%</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	73%	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	27 orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah keluarga /perintis kemerdekaan yang diberdayakan	50 orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah lembaga masyarakat/LKSA yang dibina	450 orsos	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kab. Sumenep	<b>persentase PMKS yang mendapat rehabilitasi</b>	<b>2%</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kab. Sumenep	persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	1,00%	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Sumenep	Jumlah Penyandang Disabilitas berat / Lansia terlantar yang mendapat permakanan	135 orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaksanaan sosial / Bimbingan	1 kali	
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Kab. Sumenep	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	1,00%	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Sumenep	Terjaminnya Kesejahteraan Eks Pasung/PMKS	10 orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Sumenep	Jumlah Pelaksanaan sosial / Bimbingan	1 kali	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sumenep	Jumlah Mahasiswa Kurang Mampu yang Mendapat Beasiswa	150 orang	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Waktu Operasional RPS	12 bulan	

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kab. Sumenep	<b>persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial</b>	<b>85%</b>	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	persentase meningkatnya akurasi ketepatan sasaran KPM	<b>88%</b>	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	jangka waktu pengelolaan data fakir miskin	12 bulan	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sumenep	meningkatnya realisasi penerimaan KPM BPNT	98%	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sumenep	meningkatnya realisasi penerimaan KPM PKH	98%	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kab. Sumenep	<b>Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan sosial terhadap total populasi korban bencana alam dan sosial</b>	<b>100%</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerahkabupaten/kota	100%	
	Penyediaan Makanan	Kab. Sumenep	Tersedianya makanan bagi Korban Bencana	75 paket	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	persentase peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana	16,67%	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sumenep	Jumlah Anggota Tagana dan Masyarakat yang dilatih	100 orang	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kab. Sumenep	persentase ketersediaan makam yang layak bagi perintis kemerdekaan dan veteran	<b>100%</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	persentase pelaksanaan pemeliharaan TMP	100%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah TMP yang Dipelihara	1	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	Kab. Sumenep			

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Kab. Sumenep			
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kab. Sumenep	<b>Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender</b>	<b>100%</b>	
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD	20,0%	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga/ OPD yang mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan PUG	51	
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase kelompok dan organisasi perempuan yang diberdayakan	70%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Sumenep	Jumlah Organisasi Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan Kebijakan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kab. Sumenep	<b>Persentase rasio kekerasan perempuan termasuk TPPO</b>	<b>4,24</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	3,39	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	4 kali	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase desa yang memiliki satgas perlindungan perempuan	12,57	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Jumlah fasilitasi Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	13	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan rujukan lanjutan yang dilakukan	13	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi	1	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM Penyedia Layanan perlindungan perempuan	40 Orang	

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan	Ada	
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kab. Sumenep	<b>Strata Kabupaten Layak Anak</b>	<b>Pratama</b>	
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase Desa Layak Anak	19,16%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Pemerintah , Non pemerintah ,Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	4 lembaga	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase peningkatan jumlah pelapor dan pelapor	0,24%	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah anak yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas hidup	75 orang	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak	2 media	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Kab. Sumenep	<b>Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif</b>	<b>100%</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase penurunan angka kekerasan terhadap anak	5,68%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Peserta yang Mengikuti Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	150 orang	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	4 kali	
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumenep	Persentase Jenis Layanan yang Tersedia	83,33%	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tertangani	18 anak	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pendampingan anak	4 kali	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak yang terstandarisasi	3 lembaga	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM penyedia layanan khusus anak	40 Orang	

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2021 – 2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui peningkatan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) daerah atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) daerah
2. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk meminimalisir terjadinya inclusion error dan exclusion error.
3. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) jalanan seperti Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik, dan Anak Jalanan
4. Meningkatkan sistem mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam melalui pendampingan psikososial dan pemberian bantuan sosial baik berupa barang atau uang secara non-tunai dalam rangka pemulihan ekonomi.
5. Implementasi perencanaan dan penganggaran responsive gender pada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
6. Pemenuhan hak hak anak meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, pengasuhan melalui kolaborasi antar perangkat daerah

#### 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Rancangan awal rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep tahun 2020 merupakan kelanjutan dari rencana kerja tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana strategis (*renstra*) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				43.297.093.764,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				43.297.093.764,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.579.280.073,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.579.280.073,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				32.579.280.073,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				32.579.280.073,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				15.625.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				15.625.000.000,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	50.000.000,00
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.575.000.000,00</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.575.000.000,00</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	500.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	500.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga				

	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota				
		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Keluarga	100.000.000,00		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Keluarga	100.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Lembaga	14.800.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Lembaga	14.800.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	75.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	75.000.000,00
	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				<b>250.000.000,00</b>

	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				<b>250.000.000,00</b>
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	250.000.000,00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	250.000.000,00
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>6.975.000.000,00</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>6.975.000.000,00</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>4.600.000.000,00</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>4.600.000.000,00</b>

	Penyediaan Permakanan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	2.575.000.000,00	Penyediaan Permakanan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	2.575.000.000,00
	Penyediaan Sandang	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	225.000.000,00	Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	225.000.000,00
	Penyediaan Alat Bantu	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	625.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	625.000.000,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45.000.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1.100.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1.100.000.000,00

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	30 Orang	30.000.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	30 Orang	30.000.000,00
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>2.375.000.000,00</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>2.375.000.000,00</b>
	Penyediaan Permakanan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000,00	Penyediaan Permakanan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000,00
	Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00	Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Penyediaan Alat Bantu	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	650.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	650.000.000,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	1.100.000.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	1.100.000.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000,00
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>7.700.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>7.700.000.000,00</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>7.700.000.000,00</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>7.700.000.000,00</b>

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	274000 Orang	100.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	274000 Orang	100.000.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	273403 Keluarga	100.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	273403 Keluarga	100.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11000 Keluarga	6.000.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11000 Keluarga	6.000.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52000 Orang	1.500.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52000 Orang	1.500.000.000,00
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>1.975.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>1.975.000.000,00</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>875.000.000,00</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>875.000.000,00</b>

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Penyediaan Makanan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	600.000.000,00	Penyediaan Makanan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	600.000.000,00
	Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	125.000.000,00	Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	125.000.000,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00

	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>1.100.000.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>1.100.000.000,00</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	100.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	100.000.000,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.000.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.000.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>50.000.000,00</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>50.000.000,00</b>

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	38 Makam	50.000.000,00		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	38 Makam	50.000.000,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>9.171.936.443,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>9.171.936.443,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>4.280.073,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>4.280.073,00</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.280.073,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.280.073,00

		Kel/Desa								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				1.700.157.321,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				1.700.157.321,00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				1.700.157.321,00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				1.700.157.321,00
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				77.835.089,00	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				77.835.089,00
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				46.179.089,00	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				46.179.089,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Dokumen	10.000.000,00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Dokumen	10.000.000,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	10.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	10.000.000,00
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	16.179.089,00	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	16.179.089,00

	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>21.656.000,00</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>21.656.000,00</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.656.000,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.656.000,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	10.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	10.000.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.000,00</b>

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	10.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	10.000.000,00
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>194.320.206,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>194.320.206,00</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>79.320.206,00</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>79.320.206,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.320.206,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.320.206,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	40.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	40.000.000,00

	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>20.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>20.000.000,00</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	51 Orang	10.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	51 Orang	10.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	10.000.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>95.000.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>95.000.000,00</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan				

Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota				
		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	15.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	15.000.000,00
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	25 Orang	15.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	25 Orang	15.000.000,00

								Spesifik		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>138.484.866,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>138.484.866,00</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>118.484.000,00</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>118.484.000,00</b>

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	25.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	25.000.000,00
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	53.484.000,00	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	53.484.000,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.866,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah</b>				<b>10.000.866,00</b>

						Kabupaten/Kota				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	0,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	0,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.866,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.866,00
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.000,00</b>
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Layanan	10.000.000,00	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Layanan	10.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>48.762.098,00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>48.762.098,00</b>

	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>48.762.098,00</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>48.762.098,00</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25.000.000,00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.762.098,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.762.098,00
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>224.869.575,00</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>224.869.575,00</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>91.935.575,00</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>91.935.575,00</b>

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	50.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	50.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	41.935.575,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	41.935.575,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>132.934.000,00</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>132.934.000,00</b>
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	30.000.000,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	30.000.000,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.934.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.934.000,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>865.885.487,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>865.885.487,00</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</b>				<b>233.468.487,00</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</b>				<b>233.468.487,00</b>

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	133.468.487,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	133.468.487,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>357.417.000,00</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>357.417.000,00</b>

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA – PERUBAHAN )

2024

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	57.417.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	57.417.000,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00

								Kabupaten/Kota		
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				275.000.000,00	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				275.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>9.171.936.443,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>9.171.936.443,00</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>557.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>557.000.000,00</b>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00

		Kel/Desa								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00
					<b>9.017.656.370,00</b>					<b>9.017.656.370,00</b>
	-				<b>9.017.656.370,00</b>	-				<b>9.017.656.370,00</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.805.656.370,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.805.656.370,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	7.801.656.370,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	7.801.656.370,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>10.000.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>10.000.000,00</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>125.000.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>125.000.000,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	25.000.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>557.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>557.000.000,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	210.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	210.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>250.000.000,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	150.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	150.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	100.000.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>160.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>160.000.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.000.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>260.000.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>				<b>260.000.000,00</b>

	Daerah					Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	150.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75.000.000,00
					<b>43.297.093.764,00</b>					<b>43.297.093.764,00</b>

## 2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai lembaga di daerah dan membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat telah diakomodir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten yang dikoordinasikan bersama dengan Bappeda Kabupaten Sumenep. Dari tahapan- tahapan perencanaan tersebut di harapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang sosial.

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5

## PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				
	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Keluarga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Lembaga	

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	
	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>				
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>				
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				
	Penyediaan Permakanan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	
	Penyediaan Alat Bantu	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	

<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>					
Penyediaan Permakanan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
Penyediaan Alat Bantu	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang		
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pabian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	274000 Orang		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	273.403 Keluarga		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000 Keluarga		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52000 Orang		
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					

	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Makanan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	
	Penyediaan Sandang	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	38 Makam	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Dokumen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan	51 Perangkat Daerah	

			Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	51 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	25 Orang	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk	51	

			Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Layanan	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				

	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
	-				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>				

Daerah				
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan Komponen Instalasi	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>				

Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Misi yang dikenal juga sebagai nawacita ke dua antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Misi yang dikenal juga sebagai nawacita kedua antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Strategi dalam mencapai arahan utama terutama tentang

**Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu:**

1. Layanan Dasar dan Perlindungan sosial
  - a) Tata Kelola Kependudukan
  - b) Perlindungan Sosial
    - **98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial**
  - c) Kesehatan
  - d) Pendidikan
  - e) Pengentasan Kemiskinan
    - **40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki asset produktif**
  - f) Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
2. Produktivitas
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
  - b) Pendidikan Tinggi
  - c) Iptek dan Inovasi
  - d) Prestasi Olahraga
3. Pembangunan Karakter
  - a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
  - b) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
  - c) Moderasi Beragama
  - d) Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

Prioritas dan sasaran pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten sumenep untuk tahun 2024 yang sesuai dengan cascading perangkat daerah tersaji pada tabel 3.1 dibawah ini :

TABEL 3.1

## PRIORITAS DAN SASARAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMENEP

NO	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan anak
				2. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan gender
2	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan komoditas dan stabilitas sosial dan politik	menurunkan kesenjangan	Indeks GINI	1. Meningkatnya Bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS	% PPKS penerima bantuan dan jaminan sosial terhadap total jumlah PPKS

3	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan komoditas dan stabilitas sosial dan politik	Meningkatnya solidaritas sosial di masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	1. Meningkatnya Jumlah PSKS yang berakreditasi	% PSKS berakreditasi terhadap total jumlah PSKS
				2. Terpeliharanya nilai - nilai kepahlawanan	% Peningkatan Pengelolaan Taman makam Pahlawan
				3. Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan sosial	% Kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Meningkatnya layanan publik yang inovati berbasis E-Government	Nilai SAKIP	Meningkatnya capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat daerah

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bidang sosial yang mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi dan misinya terutama dalam penyelenggaraan kewenangan bidang sosial berpedoman terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2026, disampaikan bahwa Visi Kabupaten Sumenep adalah :

**“ SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA ”**

Dalam visi kabupaten sumenep dijabarkan dalam konteks sebagai berikut :

#### **1. UNGGUL**

1. Kualitas Pendidikan
2. Kualitas Kesehatan
3. Penyerapan Tenaga Kerja
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pelayanan Publik
6. Penataan Ruang
7. Infrastruktur

#### **2. MANDIRI**

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Meningkatkan jumlah Desa Mandiri
3. Meningkatkan Investasi

#### **3. SEJAHTERA**

1. Peningkatan Pendapatan Perkapita
2. Penurunan Kemiskinan
3. Peningkatan Daya Beli
4. Aksesibilitas Pelayanan Dasar
5. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

6. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Pernyataan misi yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, antara lain :

- |        |   |
|--------|---|
| Misi 1 | : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan ketenagakerjaan |
| Misi 2 | : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir         |
| Misi 3 | : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat       |
| Misi 4 | : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal  |
| Misi 5 | : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan  |

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan seperti dimaksud di atas telah dirumuskan 5 Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep ikut mendukung misi Bupati Sumenep di :

misi (1) **Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan;**

Misi (2) **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir;** dan

Misi (3) **Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal**

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dengan memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep pada Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1  
 Tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak  
 Kabupaten Sumenep  
 tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PD TAHUN 2024
1	2	3	4
1	Meningkatkan partisipasi perempuan terhadap pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	82,27
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )	persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	1%
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	55%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	A

Tabel 3.2.2  
 Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak  
 Kabupaten Sumenep  
 tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN TUJUAN PD TAHUN 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	59,82%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	63,51%
3	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS penerima bantuan dan jaminan sosial terhadap total jumlah PPKS	1,20%
4	Meningkatnya Jumlah PSKS yang terakreditasi	Persentase PSKS berakreditasi terhadap total jumlah PSKS	75%
5	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%
6	Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persentase kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani	100%
7	Meningkatnya capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat daerah	100%

Tabel 3.2.3  
 IKU ( indikator kinerja utama )  
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak  
 Kabupaten Sumenep  
 tahun 2024

<b>NO</b>	<b>IKU DAERAH</b>	<b>INDIKATOR IKU</b>	<b>TARGET KINERJA IKU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatkan Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender	82,27
2	Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	% PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	1%
3	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sosial	% PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	55%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	<b>A</b>

### 3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep telah disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Adapun proses penyusunan rencana kerja ini telah melampaui berbagai macam tahapan antara lain proses usulan Perangkat Daerah yang di input melalui E-Planning (Sistem Informasi Pemerintah Daerah/SIPD), Musrenbang sampai dengan Forum Perangkat Daerah. Usulan-usulan tersebut juga mengakomodir amanat dari kementerian untuk mendampingi program- program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang, dalam hal ini bidang sosial.

Usulan-usulan program dan kegiatan tersebut merupakan gabungan dari perencanaan Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra, Usulan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang maupun amanat dari kementerian untuk program-program yang digulirkan dari pusat, maupun untuk memenuhi indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan masing-masing bidang yang diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

4. Program Pemberdayaan Sosial

**Indikator Kinerja** : Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

**Indikator Kinerja** : Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

6. Program Rehabilitasi Sosial

**Indikator Kinerja** : Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Indikator Kinerja :** Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial dan peningkatan validitas data terpadu kesejahteraan sosial
- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penanganan Bencana
- Indikator Kinerja :** Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan Bencana sosial
- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Indikator Kinerja :** Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kabupaten
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
10. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Indikator Kinerja:** Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender
- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

## 11. Program Perlindungan Perempuan

**Indikator Kinerja :** Persentase rasio kekerasan perempuan termasuk TPPO

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## 12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

**Indikator Kinerja :** Strata Kabupaten Layak Anak

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

## 13. Program Perlindungan Khusus Anak

**Indikator Kinerja :** Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Faktor – aktor yang mempengaruhi dan menjadi baha pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Prioritas pembangunan
3. Pengurangan kemiskinan
4. Pencapaian IKU

Berdasarkan hal tersebut maka dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten sumenep untuk tahun 2024 merumuskan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Sasaran dan program

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Kabupaten Sumenep

tahun 2024

<b>NO</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>1</b>		<b>2</b>
		<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>
	Meningkatnya Jumlah PSKS yang terakreditasi	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>

		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
		<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>
		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>

		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
	Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Sosial	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>
		Penyediaan Makanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Pelayanan Dukungan Psikososial
		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan perlindungan terhadap perempuan	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya capaian Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--

Untuk tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 6 ( enam ) Prioritas Pembangunan sebagaimana tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 6 ( enam ) Prioritas Pembangunan  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak  
Kabupaten Sumenep  
tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENJ OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						21.795.48 2.110,00							44.722.34 6.998,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN						21.355.74 0.140,00							43.124.99 0.773,00	

		PELAYANAN DASAR														
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.355.740.140,00							43.124.990.773,00		
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</i>	100%			100%	7.113.371.902,00					100%	9.294.990.773,00		
				100%									100%			
				100%									100%			
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			7 Dokumen	4.221.884,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.280.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

															Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik							GAN ANAK
	1.06.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	1.06.0 1.2.02	Administ asi Keuanga n Perangka	<i>Jumlah Laporan keuang an perangk</i>	-				12 Lapo ran	6.105.739 .664,00			-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi	-	-	7.805.710. 700,00	DINA S SOSI AL, PEMB					

	t Daerah	at daerah									kan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.06.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					52 Oran g/bul an	6.105.739 .664,00	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete ragaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan	-		7.801.710. 700,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

											penguat an kondu sif itas dan stabil itas sosial dan politik				
1.06.0 1.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Keuang an Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kordin asi Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun SKPD</i>				1 Lapo ran	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski	-		4.000.000, 00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

																nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			
1.06.0 1.2.03	Administ asi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	<i>Jumlah laporan administ rasi barang milik daerah</i>	-			1 Lapo ran	0			-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n	-	-	10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YUAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK				

serta Pen gentsa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik

1.06.0 1.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencan a Kebutu han Barang Milik Daerah				1 Doku men	0	Kab . Su me nep , Se mu	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an,	-		10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE

SKPD

a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

1.06.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah</i>	-			55	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusif	-	-	125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
--------	---	---	---	--	--	----	---	--	--	---	--	---	---	----------------	--

itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

1.06.0 1.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an</i>			1 Pake t	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n	-			100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK



									Kel/ Des a		serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 1.2.06	Administr asi Umum Perangka t Daerah	<i>jumlah pemenu han penyedi aan administ rasi umum perangk at daerah</i>	-			100 %	404.537.2 88,00			-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vitas dan	-	-	665.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN

											Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			PERLINDUNGAN ANAK
1.06.0 1.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						20	10.413.60	Kab	DAN	-	PP3 -	-		40.000.00	DINA
						Pake	0,00	.	A		Peni			0,00	S
						t		Su	TRA		ngkatan				SOSI
								me	NSF		Kualitas				AL,
								nep	ER		Pendidi				PEMB
								,	UMU		kan,				ERDA
								Se	M-		Kesehat				YAAN
								mu	DAN		an,				PERE
								a	A		Produkti				MPUA
								Kec	ALO		vita s				N
								am	KASI		dan				DAN
								ata	UMU		Daya				PERLI
								n,	M		Saing				NDUN
								Se			Kete				GAN
								mu			nagaker				ANAK
								a			jaa n				
								Kel/			serta				
								Des			Pen				
								a			gentasa				
											n				
											Kemiski				
											nan				
											Peningk				
											ata n				
											penang				
											an an				
											masalah				
											sosial				
											dan				
											penguat				
											an				
											kondusif				

												itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
1.2.06. 0002																
			<i>Jumlah Paket Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disedia kan</i>				10 Pake t	9.933.100 ,00	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n	-		100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

																penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			
1.06.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	144.568.188,00	Kabupaten, Kecamatan, Semua	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan	-			310.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

									Kel/Desa		an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	28.670.000,00	Kab . Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penangan an	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

								Desa			masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	76.162.40 0,00	Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan an masalah	-	75.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

								a									sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
1.2.06.0009																					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	134.790.000,00	Kabupaten, Kecamatan, Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial	-		100.000.000,00		DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik

1.06.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
1.2.06.0010															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Desa	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	PP4 - Peni ngkatan Kepedul ian Sosial dan Pelestar ian Nilai- Nilai Budaya Lokal Peningk ata n penang an an masalah sosial dan	-	20.000.000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

											penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 1.2.07	Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	<i>terpenu hinya sarana prasara na kantor</i>	-			100 %	64.617.76 2,00			-	PP4 - Peni ngkatan Kepedul ian Sosial dan Pelestar ian Nilai- Nilai Budaya Lokal Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif	-	-	250.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YUAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

1.06.0  
1.2.07.  
0002  
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

*Jumlah  
Unit  
Kendara  
an  
Dinas  
Operasi  
onal  
atau  
Lapang  
an yang  
Disedia  
kan*

5  
Unit

0

Kab  
. Su  
me  
nep  
, Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

DAN  
A  
TRA  
NSF  
ER  
UMU  
M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

-

PP4 -  
Peni  
ngkatan  
Kepedul  
ian  
Sosial  
dan  
Pelestar  
ian  
Nilai-  
Nilai  
Budaya  
Lokal  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondu  
sif  
itas dan

-

150.000.0  
00,00

DINA  
S  
SOSI  
AL,  
PEMB  
ERDA  
YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

													stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
1.2.07.0006																	
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	64.617.762,00	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

											s sosial dan politik				
1.06.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>terpenuhi hanya jasa penunjang sarana prasarana kantor</i>	-			100 %	153.130.176,00			-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	-	-	160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.06.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyur at</i>				1 Lapo ran	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP4 - Peni ngkatan Kepedul ian Sosial dan Pelestari an Nilai- Nilai Budaya Lokal Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik	-		10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
1.06.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

	1.2.08.0002															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	153.130.176,00	Kab . Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.06.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	-			100 %	381.125.128,00			-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	-	-	275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			<i>Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			4 Unit	111.318.968,00	Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			20 Unit	20.100.000,00	Kabupaten Sempu Kecamatan, Sempu Kel/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	249.706.160,00	Kabupaten Sumenep, Kecamatan, Semu a Kel/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN	<i>Persentase Peningkatan</i>	4%			4%	7.441.412.500,00						4%	15.675.000.000,00	

		SOSIAL	PSKS yang Dibina												
1.06.0 2.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase meningkatnya jumlah pengumpulan sumbangan sesuai aturan</i>	-			2%	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Penanganan masalah sosial dan	Seluruh Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

penguatan  
konduktivitas dan  
stabilitas sosial  
dan politik

1.06.0  
2.2.02.  
0001

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*

1  
Dokumen

0

Kabupaten, Kecamatan, Desa  
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

-

PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penguatan Kemiskinan

Seluruh Masyarakat

50.000.00  
0,00

DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 2.2.03	Pengemb angan Potensi Sumber Kesejaht eraan Sosial Daerah Kabupate n/Kota	<i>Prosent ase Potensi dan Sumber Kesejah teraan Sosial (PSKS) yang dibina</i>	84%			76%	7.441.412 .500,00			-	PP4 - Peni ngkatan Kepedul ian Sosial dan Pelestari an Nilai- Nilai Budaya Lokal Peningk ata n penang	Seluruh Elemen Sumber Kesejaht eraan Sosial Kabupat en Sumene p	84%	15.625.00 0.000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

																an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik
1.06.0	2.2.03.	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			50	0	Se mu a Kot a/K ab, Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP4 - Peni ngkatan Kepedul ian Sosial dan Pelestari an Nilai- Nilai Budaya Lokal Peningk ata n penang an an	Seluruh Elemen Sumber Kesejaht eraan Sosial Kabupat en Sumene p		100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK	

								Des a Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a			masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 2.2.03. 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejah teraan Sosial Kecama tan Kewena</i>				27 Oran g	104.839.2 00,00	Kab . Su me nep , Se mu a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN	-	PP4 - Peni ngkatan Kepedul ian Sosial dan Pelestar	Seluruh Elemen Sumber Kesejaht eraan Sosial Kabupat en	500.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE

			<i>ngan Kabupat en/Kota yang Meningk at Kapasit asnya Kewena ngan Kabupat en/Kota</i>						a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	A ALO KASI UMU M		ian Nilai- Nilai Budaya Lokal Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik	Sumene p		MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
1.06.0 2.2.03. 0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarg a yang Meningk at Kapasit asnya Kewena ngan</i>			39 Kelu arga	29.467.40 0,00	Kab . Su mene p , Se mu a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti	Seluruh Elemen Sumber Kesejaht eraan Sosial Kabupat en Sumene		100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA

		<i>Kabupaten/Kota</i>							Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		vitalitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	p			N DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.0 2.2.03. 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															



														itas dan stabilitas sosial dan politik			
1.06.0	2.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)															
			<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Sertifikat	0	Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Seluruh Elemen Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumenep		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

											penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
3	1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<i>Persentase Tertanggungnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	100%			100%	0					100%	250.000.000,00		
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<i>Persentase pemulangan warga negara migran korban</i>	-			100%	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PERE

		n dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>tindak kekerasan an ke desa asal</i>								Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
1.06.0 3.2.01. 0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													

						10	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeras an	250.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	----	---	---	--	---	--	--	--------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
4	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat rehabilitasi	2%			2%	1.946.999.972,00					2%	7.180.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	<i>persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar</i>	1%			1%	465.000.000,00		-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pen	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	1%	4.655.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Panti Sosial	<i>Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi</i>								gentasan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			
1.06.0 4.2.01. 0001	Penyediaan Permakanan													
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permak</i>			800 Orang	420.000.0 00,00	Se mu a Kot a/K ab, Se mu a Kec	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar	2.575.000. 000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MPUA N

		<p><i>anan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewena ngan Kabupat en/Kota</i></p>							<p>am ata n, Se mu a Kel/ Des a</p>	<p>KASI UMU M</p>	<p>dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik</p>	<p>r dan Gelanda ngan Pengem is</p>			<p>DAN PERLI NDUN GAN ANAK</p>
<p>1.06.0 4.2.01. 0002</p>	<p>Penyediaan Sandang</p>														

						200	0	Kab	DAN	-	PP3 -	Penyan	225.000.0	DINA
						Oran		.	A		Peni	dang	00,00	S
						g		Su	TRA		ngkatan	Disabilit		SOSI
								me	NSF		Kualitas	as		AL,
								nep	ER		Pendidi	Terlanta		PEMB
								,	UMU		kan,	r, Anak		ERDA
								Se	M-		Kesehat	Terlanta		YAAN
								mu	DAN		an,	r, Lanjut		PERE
								a	A		Produkti	Usia		MPUA
								Kec	ALO		vita s	Terlanta		N
								am	KASI		dan	r dan		DAN
								ata	UMU		Daya	Gelanda		PERLI
								n,	M		Saing	ngan		NDUN
								Se			Kete	Pengem		GAN
								mu			nagaker	is		ANAK
								a			jaa n			
								Kel/			serta			
								Des			Pen			
								a			gentasa			
											n			
											Kemiski			
											nan			
											Peningk			
											ata n			
											penang			
											an an			
											masalah			
											sosial			
											dan			
											penguat			
											an			
											kondusif			

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	Penyediaan Alat Bantu														
4.2.01.0003															
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				160 Orang	0	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	625.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
4.2.01.0004															
						30	0	Kab	DAN	-	PP3 -	Penyan		90.000.00	DINA
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			Orang		. Sumenep, Semarang, Semarang	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagaker	dang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis		0,00	SOSIAL, PEMBINAAN DAN PERLUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

								a Kel/ Des a			jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 4.2.01. 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbing an Fisik, Mental, Spiritual dan</i>			0 Oran g	45.000.00 0,00	Se mu a Kot a/K ab, Se	DAN A TRA NSF ER UMU M-	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat	Penyan dang Disabilit as Terlanta r, Anak Terlanta		1.100.000. 000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN

*Sosial  
Kewena  
ngan  
Kabupat  
en/Kota*

mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

r, Lanjut  
Usia  
Terlanta  
r dan  
Gelanda  
ngan  
Pengem  
is

PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

1.06.0  
4.2.01. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

0009																
			Jumlah Orang yang Mendap atkan Layana n Data dan Pengad uan Kewena ngan Kabupat en/Kota				30 Oran g	0	Kab . Su me nep , Kot a Su me nep , Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat	Penyan dang Disabilit as Terlanta r, Anak Terlanta r, Lanjut Usia Terlanta r dan Gelanda ngan Pengem is		40.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

											an kondu sif itas dan stabil itas sosial dan politi k				
1.06.0 4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi</i>	1%			1%	1.481.999.972,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan	Semua Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1%	2.525.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

														an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik		
1.06.0 4.2.02. 0003	Penyediaan Perumahan															
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewena</i>				50 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi di kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta	Semua Jenis Penyan dang Masalah Kesejaht eraan Sosial (PMKS) Lainnya		200.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK	

			<i>ngan Kabupat en/Kota</i>					Des a			Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 4.2.02. 0004	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah orang yang Meneri ma pakaian dan kelengk apan</i>			50 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti	Semua Jenis Penyan dang Masalah Kesejaht eraan Sosial Sosial (PMKS)		75.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA

			<p><i>lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i></p>						<p>Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	<p>ALOKASI UMUM</p>	<p>vitasi dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik</p>	<p>Lainnya</p>		<p>N DAN PERLINDUNGAN ANAK</p>
<p>1.06.0 4.2.02. 0005</p>	<p>Penyediaan Alat Bantu</p>													

						50 Orang	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Semua Jenis Penyan dang Masalah Kesejaht eraan Sosial (PMKS) Lainnya	200.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	-------------	---	---	--	---	--	---	--------------------	--

																		itas dan stabilitas sosial dan politik			
1.06.0	4.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				140	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk	Semua Jenis Penyan dang Masalah Kesejaht eraan Sosial (PMKS) Lainnya		750.000.000,00			DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK			

ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

1.06.0  
4.2.02.  
0010

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

*Jumlah  
Orang  
yang  
Mendap  
atkan  
Akses  
ke  
Layana  
n  
Pendi  
kan dan  
Kesehat  
an  
Dasar*

400  
Oran  
g

1.307.000  
.000,00

Kab  
. Su  
me  
nep  
, Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se

DAN  
A  
TRA  
NSF  
ER  
UMU  
M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

-

PP3 -  
Peni  
ngkatan  
Kualitas  
Pendi  
kan,  
Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete

Semua  
Jenis  
Penyan  
dang  
Masalah  
Kesejaht  
eraan  
Sosial  
(PMKS)  
Lainnya

1.100.000.  
000,00

DINA  
S  
SOSI  
AL,  
PEMB  
ERDA  
YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN

			<i>Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					mu a Kel/ Des a			nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			ANAK	
1.06.0 4.2.02. 0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi dan Kerja</i>			2 Doku men	174.999.9 72,00	Kab . Su me nep ,	DAN A TRA NSF ER UMU	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan,	Semua Jenis Penyan dang Masalah Kesejaht		200.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA

*Sama  
antar  
Lembag  
a dan  
Kemitra  
an  
dalam  
Pelaksa  
naan  
Rehabili  
tasi  
Sosial  
Kabupat  
en/Kota*

Kot  
a  
Su  
me  
nep  
,  
Pab  
ian

M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

eraan  
Sosial  
(PMKS)  
Lainnya

YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

5	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial</i>	87%			85%	4.435.000.000,00					87%	8.700.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase meningkatnya akurasi ketepatan sasaran (Keluarga Penerima Manfaat (KPM))</i>	90%			88%	4.435.000.000,00		-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Fakir miskin	90%	8.700.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

1.06.0  
5.2.02.  
0001

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

*Jumlah  
Fakir  
Miskin  
Cakup  
an  
Daerah  
Kabupat  
en/Kota  
yang  
Didata*

2740  
00  
Oran  
g

0

Kab .  
Su me  
nep  
, Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,

DAN  
A  
TRA  
NSF  
ER  
UMU  
M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

-

PP3 -  
Peni  
ngkatan  
Kualitas  
Pendi  
kan,  
Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing

Fakir  
miskin

100.000.0  
00,00

DINA  
S  
SOSI  
AL,  
PEMB  
ERDA  
YAA  
N  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN



Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

arga

menep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMUM

Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial

AL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											dan politik				
1.06.0	5.2.02.	0003													
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10000	3.035.000.000,00	Kabupaten Sumenep, Semuam Kecamatan, Semuam Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM, DBH HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Penanganan masalah	Fakir miskin	7.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PERDA YAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
1.06.0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat															
5.2.02.0004																
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				52000 Orang	1.400.000.000,00	Kabupaten, Kecamatan, Selurah Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penguatan	Fakir miskin		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											n Kemisk nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			
6	1.06.06	PROGRA M PENANG ANAN BENCAN A	<i>Persentase Penangan Korban Bencana Alam dan Sosial Terhadap Total Populasi</i>	100%			100 %	369.000.0 00,00					100 %	1.975.000. 000,00

			<b>Korban Bencana alam dan Sosial</b>												
1.06.0 6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</i>	100%			100 %	369.000.000,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penangan masalah	korban bencana alam dan sosial	100 %	875.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik

1.06.0  
6.2.01.  
0001

Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggapan Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

200  
Orang

369.000.0  
00,00

Kabupaten Sumenep, Kecamatan Seputih, Desa

DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

-

PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan

korban bencana alam dan sosial

600.000.0  
00,00

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

															n Kemisk nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 6.2.01. 0002	Penyediaan Sandang																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendap atkan Pakaian dan Kelengk apan Lainnya yang</i>				200 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan	korban bencana alam dan sosial		125.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MPUA N DAN			

			<p><i>Tersedia pada Masa Tanggapan Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i></p>						<p>ata n, Se mu a Kel/ Des a</p>	<p>UMU M</p>		<p>Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik</p>				<p>PERLINDUNGAN ANAK</p>
<p>1.06.0 6.2.01. 0003</p>	<p>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</p>															

						1 Unit	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	korban bencana alam dan sosial	50.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	-----------	---	--	--	---	--	--	-------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	6.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	0	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	korban bencana alam dan sosial	#####	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	Pelayanan Dukungan Psikososial														
6.2.01.0005															
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	0	Kabupaten, Kecamatan, Kota	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan	korban bencana alam dan sosial	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

									Kel/ Des a		serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 6.2.02	Penyelen ggaraan Pemberd ayaan Masyarak at Terhadap Kesiapsia gaan Bencana Kabupate	<i>persent ase peningk atan kemam puan masyar akat dalam penang anan</i>	-			40%	0			-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan	masyara kat tanggap bencana	-	1.100.000. 000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN

	n/Kota	<i>bencana</i>										Daya Saing Ketahanan Pembangunan dan Peningkatan Penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					PERLINDUNGAN ANAK
1.06.0 6.2.02. 0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																

						1 Kam pung	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	masyara kat tanggap bencana	100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	------------------	---	--	--	---	--	--------------------------------------	--------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
1.06.0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
6.2.02.0002															
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	0	Kabupaten, Kecamatan, Desa	DAN TRANSUM-DAN ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	masyarakat tanggap bencana	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
7	1.06.0	PROGRA M PENGEL OLAAN TAMAN MAKAM PAHLAW AN	<i>Persent ase Keterse diaan Makam yang Layak bagi Perintis Kemerd ekaan dan Veteran</i>	100%			100 %	49.955.76 6,00					100 %	50.000.00 0,00	
.	7			100%									100 %		

1.06.0 7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>persentase pelaksanaan pemeliharaan TMP</i>	-			100 %	49.955.76 6,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusif	Area Taman Makam Pahlawan Sumenep	-	50.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
------------------	---	--	---	--	--	----------	-------------------	--	--	---	--	-----------------------------------	---	-------------------	--

												itas dan stabilitas sosial dan politik					
1.06.0	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
7.2.01.0001																	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0		Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSUMER DAN ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Area Taman Makam Pahlawan Sumenep		0	DINAS SOSIAL, PEMERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

1.06.0  
7.2.01.  
0002

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

*Jumlah  
Makam  
yang  
Terpenu  
hi  
Pemelih  
arannya  
pada  
Taman  
Makam  
Pahlaw  
an  
Kabupat  
en/Kota*

38  
Mak  
am

49.955.76  
6,00

Kab  
. Su  
me  
nep  
, Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu

DAN  
A  
TRA  
NSF  
ER  
UMU  
M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

-

PP4 -  
Peni  
ngkatan  
Kepedul  
ian  
Sosial  
dan  
Pelestar  
ian  
Nilai-  
Nilai  
Budaya  
Lokal  
Peningk  
ata n

Area  
Taman  
Makam  
Pahlawa  
n  
Sumene  
p

50.000.00  
0,00

DINA  
S  
SOSI  
AL,  
PEMB  
ERDA  
YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

									a Kel/ Des a		penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
1.06.0 7.2.01. 0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengam anan Taman Makam Pahlaw an Nasiona l Kabupat en/Kota</i>				0 Lapo ran	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n	Area Taman Makam Pahlawa n Sumene p		0	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

								Kel/ Des a			serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik		
2	URUSAN PEMERI NTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAI TAN DENGAN PELAYA NAN						439.741.9 70,00						1.597.356. 225,00

		<b>DASAR</b>													
	<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>439.741.970,00</b>							<b>1.522.356.225,00</b>	
1	<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<i>Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender Persentase Partisipasi Angkat an Kerja Perempuan</i>	<b>1%</b> <b>1%</b> <b>0.653%</b>			<b>74.999.484,00</b>						<b>1%</b> <b>1%</b> <b>0.653%</b>	<b>77.590.775,00</b>	

2.08.0	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD</i>	-			20,50%	49.999.684,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusif	Seluruh Perangkat Daerah	-	46.179.775,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
--------	--	---	---	--	--	--------	---------------	--	--	---	--	--------------------------	---	---------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
2.2.01.0001															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengaruh Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				51 Dokumen	0	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSUM-DAN ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Seluruh Perangkat Daerah	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

2.08.0  
2.2.01.  
0002

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

*Jumlah  
Dokume  
n Hasil  
Kordin  
asi dan  
Sinkroni  
sasi  
Pelaksa  
naan  
Pengaruh  
stamaa  
n  
Gender  
(PUG)  
Kewena*

51  
Doku  
men

0

Kab  
. Su  
me  
nep  
, Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n, Se  
mu

DAN  
A  
TRA  
NSF  
ER  
UMU  
M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

-

PP3 -  
Peni  
ngkatan  
Kualitas  
Pendi  
kan,  
Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker

Seluruh  
Perangk  
at  
Daerah

10.000.00  
0,00

DINA  
S  
SOSI  
AL,  
PEMB  
ERDA  
YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

			<i>ngan Kabupat en/Kota</i>					a Kel/ Des a		jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
2.08.0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													
2.2.01. 0003			<i>Jumlah Perangk at Daerah yang Mendap at</i>			51 Pera ngka t Daer ah	49.999.68 4,00	Kab . Su me nep , Se	DAN A TRA NSF ER UMU M-	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat	Seluruh Perangk at Daerah	10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN

		<p><i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengaruh Perempuan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i></p>						<p>mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a</p>	<p>DAN A ALO KASI UMU M</p>	<p>an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik</p>			<p>PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK</p>	
2.08.0 2.2.01.	<p>Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG</p>													

0004						51	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi di kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an	Seluruh Perangk at Daerah	16.179.775,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
------	--	--	--	--	--	----	---	--	--	---	--	---------------------------	---------------	--

			en/Kota								kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0 2.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase kelompok dan organisasi perempuan yang diberdayakan</i>	-			75%	24.999.800,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penangan	Organisasi Wanita	-	21.411.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

												masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			
2.08.0 2.2.02. 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>				1 Dokumen	0	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pen	Organisasi Wanita	11.411.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			<i>Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					a			gentasan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			
2.08.0 2.2.02. 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan</i>			3 Organisasi	24.999.80 0,00	Kab . Sume nep , Se mu a Kec	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	Organisasi Wanita	##### #####	DINA S SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPURAN



2.08.0 2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang telah terstandarisasi</i>	-			1 Lembaga	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusif	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPURAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
------------------	--	--	---	--	--	--------------	---	--	--	---	--	---	---	---------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
2.2.03.0002															
			<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				20 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngk atan Kualit as Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n	Lembag a Penyed a Layanan Pember dayaan Peremp uan	10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

											penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk TPPO</i>	1.69 %			2,54 %	104.623.552,00					1.69 %	193.710.262,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	<i>Persentase penurunan angka kekerasan terhadap</i>	-			2,54 %	74.624.752,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produkti	Perempuan Korban Kekerasan	-	78.710.262,00	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN

		Kabupaten/Kota	<i>perempuan</i>									vita s dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					N DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.0 3.2.01. 0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															

						1	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Peremp uan Korban Kekeras an	38.710.26 2,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--	-------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0	3.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Perangkat Daerah	74.624.752,00	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0 3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah fasilitas Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan</i>	-			12 Lembaga Rujukan	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Lembaga Rujukan	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											n Kemisk nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
2.08.0 3.2.02. 0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Peremp uan Korban Kekeras an Tingkat Kabupat en/Kota yang Mendap</i>				51 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan	Lembag a Rujukan		10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MPUA N DAN

		<i>atkan Layana n Pengad uan</i>							ata n, Se mu a Kel/ Des a	UMU M	Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			PERLI NDUN GAN ANAK
2.08.0 3.2.02. 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													

						1	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Lembag a Rujukan	10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	------------------------	-------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi</i>	-			1 Lembaga	29.998.800,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penangan	Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	-	95.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

																		masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik						
2.08.0	3.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan</i>				1	0	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketagakerjaan serta Pen	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		#####									DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			<i>Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						a		gentasan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			
2.08.0 3.2.03. 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan</i>			20 Orang	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	15.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEM ERDA YAA N PERE MPUA N

			<i>Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>						am ata n, Se mu a Kel/ Des a	KASI UMU M	dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				DAN PERLI NDUN GAN ANAK
2.08.0 3.2.03. 0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														

						25 Oran g	29.998.80 0,00	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an konduusif	Lembag a Penyed a Layanan Perlindu ngan Peremp uan	##### #####	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------------	--	--	---	--	--	----------------	--

itas dan stabilitas sosial dan politik

2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen

0

Kabupaten Semarang, Kecamatan, Semu a Kel/Des a

DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM

-

PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan

Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

15.000.000,00

DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											ata n penangan an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik					
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Persentase Menurunnya Kasus KDRT</i>	0.0035 %			0.0052 %	99.999.150,00					0.0035 %	153.595.307,00		
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	-	-			-	99.999.150,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	keluarga dan anak	-	133.595.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN

	(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															

						51	49.999.950,00	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif	keluarga dan anak	25.000.000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	----	---------------	--	---	---	--	-------------------	---------------	--

												itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0 4.2.01. 0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE) Kesetar aan Gender (KG) dan Perlindu ngan Anak bagi Keluarg a Kewena ngan Kabupat en/Kota yang				0 Doku men	0	-	-	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Penguat	keluarga dan anak		68.595.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

			Tersedia									an Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan				
2.08.0 4.2.01. 0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan				1 Dokumen	49.999.20 0,00	Kabupaten	DANA TRANSFERR UMU	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan,	keluarga dan anak		40.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDA

*n  
Masyar  
akat  
untuk  
Peningk  
atan  
Kualitas  
Keluarg  
a  
Kewena  
ngan  
Kabupat  
en/Kota*

Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

2.08.0 4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusif	keluarga	-	10.000.307,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
------------------	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	----------	---	---------------	---

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0	4.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
		<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				0	0	Kabupaten, Kecamatan, Desa	DAN TRANSFER M-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	keluarga		0	DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUN DAN PERLIANDUNGAN ANAK

											penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.0 4.2.02. 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat</i>				0 Orang	0	Kabupaten, Kecamatan, Semua	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan	keluarga		0	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			<i>Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						Kel/Desa		serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga</i>			1 Dokumen	0		Kabupaten, Sumatera	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	keluarga	10.000.307,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PERE

			<p><i>a Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i></p>						<p>a Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	<p>A ALOKASI UMUM</p>	<p>Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik</p>			<p>MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------	--	--	--	------------------------------------

2.08.0 4.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah jenis layanan keluarga</i>	-			5 Jenis	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusif	keluarga dan anak	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
------------------	---	--------------------------------------	---	--	--	------------	---	--	--	---	--	-------------------	---	---------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik			
2.08.0 4.2.03. 0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah</i>			15	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vitas dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n	keluarga dan anak	10.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

			<i>Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>								penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
4	2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b><i>Persentase Kualitas Data Gender dan Anak yang Disediakan OPD</i></b>	<b>0.3 %</b>			<b>0.30 %</b>	<b>0</b>					<b>0.3 %</b>	<b>49.890.187,00</b>		
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	<i>persentase perangkat daerah yang menyediakan</i>	-			50%	0			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	Seluruh Perangkat Daerah	-	49.890.187,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PERE

		Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>data gender dan anak</i>									Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.0 5.2.01. 0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota															

						1 Doku men	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Seluruh Perangk at Daerah	26.128.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	------------------	---	--	--	---	--	------------------------------------	-------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik			
2.08.0 5.2.01. 0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
		<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0	Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa	DAN TRANSFORMASI KASIM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	Seluruh Perangkat Daerah	23.762.187,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik					
5	2.08.0 6	PROGRA M PEMENU HAN HAK ANAK (PHA)	<i>Strata Kabupa ten Layak Anak</i>	Mady a Strat a			Mad ya Strat a	77.442.28 4,00					Mad ya Stra t a	228.016.4 48,00		
	2.08.0 6.2.01	Pelemba gaan PHA pada Lembaga Pemerint ah, Nonpeme rintah, dan Dunia	<i>Persent ase desa layak anak</i>	-			22,1 5%	36.119.80 0,00			-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan	kabupat en layak anak	-	91.935.44 8,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN

		Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik			PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.0	6.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Organisasi</i>				20	36.119.800,00	Kab . Su	DAN A TRA	-	PP3 - Peni ngkatan	kabupat en layak anak	##### #####	DINA S SOSI

*Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha*

i

menepi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NSF ER UMU M-DAN A ALO KASI UMU M

Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial

AL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dan politik

2.08.0  
6.2.01.  
0002

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*

6  
Doku  
men

0

Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a

DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M

-

PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidid kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah

kabupat en layak anak

41.935.44  
8,00

DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

														social dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			
2.08.0 6.2.02	Penguata n dan Pengemb angan Lembaga Penyedia Layanan Peningka tan Kualitas Hidup Anak Kewenan gan Kabupate n/Kota	<i>persent ase peningk atan jumlah pelapor dan pelopor</i>	-			0,24 %	41.322.48 4,00			-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan	pelopor dan pelapor	-	136.081.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK		

Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik

2.08.0  
6.2.02.  
0001

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan*

75  
Orang

41.322.484,00

Kabupaten, Semarang, Semarang

DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

-

PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Kete

pelopor dan pelapor

30.000.000,00

DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPULAN DAN PERLINDUNGAN

		Kabupaten/Kota						mu a Kel/ Des a		nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				ANAK
2.08.0 6.2.02. 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokume n Hasil Koordin asi dan Sinkroni				4 Doku men	0	Kab . Su me nep ,	DAN A TRA NSF ER UMU	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan,	pelopor dan pelapor	50.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA

*sasi  
Pelaksa  
naan  
Peningk  
atan  
Kualitas  
Hidup  
Anak  
Kewena  
ngan  
Kabupat  
en/Kota*

Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

2.08.0 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

	6.2.02.0003	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<p><i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i></p>				1 Dokumen	0	Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan	pelopor dan pelapor		31.081.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

														an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik	
2.08.0 6.2.02. 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Dokume n Hasil Penguat an Jejaring Antar Lembag a Penyedi a Layana n Peningk atan Kualitas Hidup Anak Kewena ngan Kabupat en/Kota</i>				1 Doku men	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete ragaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan	pelopor dan pelapor		25.000.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

											Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif</i>	100%			100%	82.677.500,00					100%	819.553.246,00		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	<i>persentase penurunan angka kekerasan</i>	-			6,01%	22.677.500,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan,	anak-anak yang rentan terhadap	-	237.136.246,00	DINAS SOSIAL, PEMB ERDA

	yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>an terhadap anak</i>										Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik	kekerasan				YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.0	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan																

	7.2.01.0003	layak Anak, dan DRPPA														
			<i>Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu</i>				1 Kegiatan	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi di kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat	anak - anak yang rentan terhadap kekeras an		100.000.000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

														an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			
2.08.0 7.2.01. 0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																
			<i>Jumlah SDM yang memper oleh advokas i dan Pendam pingan dalam pelaksa naan kebijaka n</i>				3 Oran g	22.677.50 0,00	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendidikan, Kesehat an, Produkti vitas dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan	anak - anak yang rentan terhada p kekeras an			137.136.2 46,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

											Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	<i>persentase jenis layanan yang tersedia</i>	-			66,66%	60.000.000,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	157.417.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Kabupaten/Kota									Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				
2.08.0 7.2.02. 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah AMPK yang mendap atkan layanan pengad uan</i>			20 Oran g	60.000.00 0,00	Kab . Su me nep , Se mu a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti	Anak yang Memerlu kan Perlindu ngan Khusus		100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA

									Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	ALO KASI UMU M	vi ta s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik				N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
2.08.0 7.2.02. 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

						20 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Anak yang Memerlu kan Perlindu ngan Khusus	57.417.00 0,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	-----------------	---	--	--	---	--	--	-------------------	--

											itas dan stabilitas sosial dan politik				
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang terstandarisasi</i>	-			3 Lembaga	0			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Keteknagakerjaan serta Peningkatan Kemiskinan Peningkatan penangan	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	-	425.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

											masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
2.08.0	7.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasana layanan sesuai</i>				1 Lem baga	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	Mem per kua t Stabi litas Polh ukha nk am Dan Tra nsfor masi Pela yana n Publi k	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen	Lembag a Penyedi a Layanan bagi Anak		125.000.000,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK

			<i>standar</i>						a		gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik					
2.08.0 7.2.03. 0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota															
			<i>Jumlah kegiatan kerjasa ma antar lembag a penyedi a layanan</i>			1 Kegi atan	0		Kab . Su me nep , Se mu a Kec	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s	Lembag a Penyedi a Layanan bagi Anak		100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAA N PERE MPUA N

AMPK

am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

KASI  
UMU  
M

dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n  
penang  
an an  
masalah  
sosial  
dan  
penguat  
an  
kondusif  
itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

2.08.0  
7.2.03.  
0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

						1 Oran g	0	Kab . Su me nep , Se mu a Kec am ata n, Se mu a Kel/ Des a	DAN A TRA NSF ER UMU M- DAN A ALO KASI UMU M	-	PP3 - Peni ngkatan Kualitas Pendi kan, Kesehat an, Produkti vita s dan Daya Saing Kete nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondu sif	Lembag a Penyedi a Layanan bagi Anak	100.000.0 00,00	DINA S SOSI AL, PEMB ERDA YAAN PERE MPUA N DAN PERLI NDUN GAN ANAK
--	--	--	--	--	--	----------------	---	--	--	---	--	--	--------------------	--

itas dan  
stabilita  
s sosial  
dan  
politik

2.08.0  
7.2.03.  
0007

Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

*Jumlah  
KIE  
Perlindu  
ngan  
khusus  
anak*

1  
Doku  
men

0

Kab  
. Su  
me  
nep  
, Se  
mu  
a  
Kec  
am  
ata  
n,  
Se  
mu  
a  
Kel/  
Des  
a

DAN  
A  
TRA  
NSF  
ER  
UMU  
M-  
DAN  
A  
ALO  
KASI  
UMU  
M

-

PP3 -  
Peni  
ngkatan  
Kualitas  
Pendi  
kan,  
Kesehat  
an,  
Produkti  
vita s  
dan  
Daya  
Saing  
Kete  
nagaker  
jaa n  
serta  
Pen  
gentasa  
n  
Kemiski  
nan  
Peningk  
ata n

Lembag  
a  
Penyedi  
a  
Layanan  
bagi  
Anak

100.000.0  
00,00

DINA  
S  
SOSI  
AL,  
PEMB  
ERDA  
YAAN  
PERE  
MPUA  
N  
DAN  
PERLI  
NDUN  
GAN  
ANAK

												penangan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik					
-	-						0									75.000.000,00	
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedi</i>				1 Dokumen	0	Kabupaten, Kecamatan, Se	DAN TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Kete	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBAYARAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

			<i>a Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					mu a Kel/ Des a		nagaker jaa n serta Pen gentasa n Kemiski nan Peningk ata n penang an an masalah sosial dan penguat an kondusif itas dan stabilita s sosial dan politik			ANAK	
<b>J U M L A H</b>							<b>21.795.48</b>					<b>44.722.34</b>	<b>6.998,00</b>	
							<b>2.110,00</b>							

## BAB V

### PENUTUP

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, salah satu urusan pemerintahan konkuren bersifat wajib pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep tidak terlepas dan selalu mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep yang diimplementasikan pada Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) yang merupakan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Sumenep.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah kemiskinan kultural yaitu kurangnya kesadaran dari dalam diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Mereka sudah tidak punya semangat untuk maju/berhasil. Selain itu perlunya kita merubah pola pikir masyarakat secara umum bahwa pembangunan sosial (social development) sebagai pembangunan manusia yang tidak dapat kita lihat keberhasilannya dalam waktu yang singkat, tetapi butuh waktu dan proses yang panjang (investasi sosial) secara terus menerus dan harus didukung dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan ( saint and knowlodge ) masyarakat khususnya PMKS, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial khususnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja melainkan juga tergantung dan terkait dengan keberhasilan program pembangunan sektor lain serta dengan kemampuan anggaran pemerintah yang sangat terbatas, maka diperlukan peran serta para pihak (stakeholder) dan masyarakat secara umum.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMENEP

**Drs. MUSTANGIN, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730713 199302 1 002

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**Jl. Trunojoyo, No. 53 Sumenep 69417  
Email : [bapenda@sumenep.go.id](mailto:bapenda@sumenep.go.id) Website : [bapenda.sumenepkab.go.id](http://bapenda.sumenepkab.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja Perubahan dibuat berdasar pada Rencana Strategis, dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai dasar panduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perubahan Tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Agustus 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP

**FARUK HANAFI, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770321 199602 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN</b>	<b>7</b>
<b>TRIWULAN II TAHUN 2024</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	7
<b>BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>14</b>
3.1    Program Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	14
3.2    Rencana Kerja dan Pendanaan .....	15
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>18</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Periode Pelaksanaan s/d Triwulan II Tahun 2024 .....	8
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 .....	14
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 .....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian target, pagu anggaran dan nomenklatur pada program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi SIPD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan bahan penyusunan Rencana Perubahan Kegiatan dan Anggaran (RPKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2024 untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 41);

14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 19).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah:

- 1) Merealisasikan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3) Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
- 4) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep diukur terhadap prakiraan realisasi capaian target program kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, yang meliputi target kinerja dan realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP PERIODE PELAKSANAAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13
1	2	3	4	5	8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
KEUANGAN																							
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	6,125,785,661		591,780,355	75	1,547,420,917					75	2,139,201,272	75%	35%					BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen	981,204									0		0%	0%					
		5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	395,604									0		0%	0%					
		5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	585,600									0		0%	0%					
		5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	3,601,511,071	0	417,623,048	1	1,057,961,027					1	1,475,584,075	50%	41%					

		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	3,594,133,071	22	417,623,048	28	1,057,961,021					50	1,475,584,075	58%	41%												
		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	7,378,000			0								0	0%	0%											
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	4 Jenis	9,000,000			0								0	0%	0%											
		5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	9,000,000			0								0	0%	0%											
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Keperluan Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi	10 Paket	1,652,294,785		117,675,406	8	267,893,190							8	385,568,596	80%	23%										
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7,264,355			5	4,877,500							5	4,877,500	50%	67%										
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	9,900,400			10	5,287,000							10	5,287,000	50%	53%										
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,495,300,710	3	99,480,000	2	234,282,500							5	333,762,500	50%	22%										

						5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9,917,840			2	5,000,000					2	5,000,000	50%	50%								
						5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	38,511,480	0	150,000	2	450,000						2	600,000	50%	2%							
						5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	91,400,000	5	18,045,406	10	17,996,190						15	36,041,596	50%	39%							
						5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Paket	69,375,200			1	69,375,200						1	69,375,200	100%	100%							
						5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		1 Paket	49,800,200			1	49,800,200						1	49,800,200	100%	100%							
						5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	19,575,000			1	19,575,000						1	19,575,000	100%	100%							
						5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	4 Jenis	254,727,270			4	97,300,000						4	97,300,000	100%	38%							
						5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	254,727,270			6	97,300,000						6	97,300,000	50%	38%							
						5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	537,896,131		56,481,901	6	54,891,500						6	111,373,401	40%	21%							
						5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	101,419,500	2	3,731,901	10	10,201,500							12	13,933,401	60%	14%						
						5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	195,125,590	3	16,750,000	6	29,690,000							9	46,440,000	75%	24%						

		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	241,351,041	0	36,000,000	1	15,000,000	1	51,000,000	100%	21%						
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	92 %	5,000,000,000			0				0%	0%						BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumentasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola	95 %	5,000,000,000							0%	0%						
		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	5,000,000,000			0			0	0%	0%						
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	5 %	2,414,475,504	25,218,301		3	860,877,040	3.0	886,095,341	60%	37%						BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 %	2,414,475,504	25,218,301		3	860,877,040		886,095,341	60%	37%						
		5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	20,456,000	0.25	5,117,539	3	1,778,461	3.25	6,896,000	46%	34%						
		5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	196,111,500	0.2	3,400,000	0.25	16,720,000	0.45	20,120,000	45%	10%						
		5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	74,772,720	0.4	3,262,700	0.6	2,270,030	1	5,532,730	100%	7%						



Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja masih sangat rendah, dengan uraian masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.125.785.661,00 terealisasi sebesar Rp. 2.139.201.272,00 dengan persentase sebesar 35%. Pada program ini, sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dialihkan ke kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sesuai petunjuk dari TAPD Kabupaten Sumenep, untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00, dialihkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.414.475.504,00 sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi belum menunjukkan hasil capaian kinerja yang optimal. Pelaksanaan semua sub kegiatan akan dimaksimalkan pada triwulan III dan triwulan IV.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Sumenep sejak tahun 2021 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota</b>	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1	Pengadaan Mebel
		4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
		1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		1.8	Penagihan Pajak Daerah
		1.9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		1.10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

### 3.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dibawah ini:

**Tabel 3.2 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
	5	02				KEUANGAN																
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		Kabupaten Sumenep			100 %	100 %		6.125.785.661	6.473.933.138	Dana Transfer Umum-DAU		100%	6.473.933.138	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kabupaten Sumenep			14 Dokumen	14 Dokumen		981.204	981.204	Dana Transfer Umum-DAU		14 Dokumen	981.204	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kabupaten Sumenep			4 Dokumen	4 Dokumen		395.604	395.604	Dana Transfer Umum-DAU		4 Dokumen	395.604	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kabupaten Sumenep			4 Laporan	4 Laporan		585.600	585.600	Dana Transfer Umum-DAU		4 Laporan	585.600	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		Kabupaten Sumenep			2 Laporan	2 Laporan		3.601.511.071	3.644.752.629	Dana Transfer Umum-DAU		2 Laporan	3.644.752.629	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Sumenep			86 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan		3.594.133.071	3.637.374.629	Dana Transfer Umum-DAU		86 Orang/ Bulan	3.637.374.629	
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kabupaten Sumenep			1 Dokumen	1 Dokumen		7.378.000	7.378.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	7.378.000	

5	02	01	2.05		Administrasi Kpegawain Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan kepegawain yang disediakan	Kabupaten Sumenep			4 Jenis	0 Jenis		9.000.000	0	Dana Transfer Umum-DAU		0 Jenis	0
5	02	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Sumenep			2 Orang	0 Orang		9.000.000	0	Dana Transfer Umum-DAU		0 Orang	0
5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	Kabupaten Sumenep			10 Paket	10 Paket		1.652.294.785	1.560.207.685	Dana Transfer Umum-DAU		10 Paket	1.560.207.685
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sumenep			10 Paket	10 Paket		7.264.355	12.705.202	Dana Transfer Umum-DAU		10 Paket	12.705.202
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Sumenep			20 Paket	20 Paket		9.900.400	12.934.500	Dana Transfer Umum-DAU		20 Paket	12.934.500
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sumenep			10 Paket	10 Paket		1.495.300.710	1.403.700.710	Dana Transfer Umum-DAU		10 Paket	1.403.700.710
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Sumenep			4 Paket	4 Paket		9.917.840	10.355.793	Dana Transfer Umum-DAU		4 Paket	10.355.793
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Sumenep			4 Dokumen	4 Dokumen		38.511.480	38.511.480	Dana Transfer Umum-DAU		4 Dokumen	38.511.480
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumenep			30 Laporan	30 Laporan		91.400.000	82.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		30 Laporan	82.000.000
5	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Kabupaten Sumenep			1 Paket	1 Paket		69.375.200	333.037.692	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	333.037.692
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Sumenep			1 Paket	1 Paket		49.800.200	49.800.200	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	49.800.200
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kabupaten Sumenep			1 Unit	1 Unit		19.575.000	283.237.492	Dana Transfer Umum-DAU		1 Unit	283.237.492
5	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Jasa yang disediakan</b>	Kabupaten Sumenep			4 Jenis	4 Jenis		254.727.270	254.727.270	Dana Transfer Umum-DAU		4 Jenis	254.727.270

	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Sumenep			12 Laporan	12 Laporan		254.727.270	254.727.270	Dana Transfer Umum-DAU		12 Laporan	254.727.270
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kabupaten Sumenep			15 Unit	15 Unit		537.896.131	680.226.658	Dana Transfer Umum-DAU		15 Unit	680.226.658
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kabupaten Sumenep			20 Unit	20 Unit		101.419.500	101.419.500	Dana Transfer Umum-DAU		20 Unit	101.419.500
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	Kabupaten Sumenep			12 Unit	12 Unit		195.125.590	205.539.010	Dana Transfer Umum-DAU		12 Unit	205.539.010
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kabupaten Sumenep			1 Unit	1 Unit		241.351.041	373.268.148	Dana Transfer Umum-DAU		1 Unit	373.268.148
	5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			95%	0		5.000.000.000	0	Dana Transfer Umum-DAU		0	0
	5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola	Kabupaten Sumenep			95%	0		5.000.000.000	0	Dana Transfer Umum-DAU		0	0
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kabupaten Sumenep			1 Laporan	0		5.000.000.000	0	Dana Transfer Umum-DAU		0	0
	5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	Kabupaten Sumenep			5%	5%		2.409.245.504	2.538.203.897	Dana Transfer Umum-DAU		5%	2.538.203.897
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Sumenep			5%	5%		2.409.245.504	2.538.203.897	Dana Transfer Umum-DAU		5%	2.538.203.897
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep			7 Dokumen	7 Dokumen		20.456.000	20.456.000	Dana Transfer Umum-DAU		7 Dokumen	20.456.000
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep			1 Laporan	1 Laporan		196.111.500	219.932.880	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	219.932.880

5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		1 Unit	1 Unit			74.772.720	74.772.720	Dana Transfer Umum-DAU		1 Unit	74.772.720
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		7 Laporan	7 Laporan			103.580.000	147.680.000	Dana Transfer Umum-DAU		7 Laporan	147.680.000
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		1 Laporan	1 Laporan			1.508.233.470	1.580.233.472	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	1.580.233.472
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kabupaten Sumenep		10 Objek Pajak	10 Objek Pajak			213.421.000	263.371.000	Dana Transfer Umum-DAU		10 Objek Pajak	263.371.000
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		2 Layanan	2 Layanan			70.030.150	70.030.150	Dana Transfer Umum-DAU		2 Layanan	70.030.150
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		1 Dokumen	1 Dokumen			99.298.784	72.885.795	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	72.885.795
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		1 Dokumen	1 Dokumen			8.940.000	18.540.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	18.540.000
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Sumenep		24 Dokumen	24 Dokumen			114.401.880	70.301.880	Dana Transfer Umum-DAU		24 Dokumen	70.301.880
JUMLAH TOTAL													13.540.261.165	9.012.137.035				

## **BAB IV PENUTUP**

Atas berkat rahmat Allah SWT, maka Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini dapat disusun.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, sehingga hasil capaian kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024, kami sampaikan terima kasih dan semoga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan lebih baik, terarah dan terukur.

Untuk itu, dibutuhkan dedikasi, kerja keras serta kerja cerdas seluruh aparatur dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep. Semoga semua upaya yang telah dirintis untuk mencapai kondisi ideal sebagaimana diharapkan, meskipun dalam segala keterbatasan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep dapat diwujudkan.

Sumenep, Agustus 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**FARUK HANAFI, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770321 199602 1 001

Perubahan

# Rencana Kerja Tahun 2024



Dinas Pendidikan  
kabupaten Sumenep



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan Kehadirat Allah Subhanawata'alah, karena hanya rahmat dan hidayah Nya semata, kami dapat menyusun dokumen **“Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024”** ini dapat kami susun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Dokumen Renja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen ini disusun karena adanya perubahan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 27 Agustus 2024

Kepala



**AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos.M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197210021992011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	28
BAB IV PENUTUP .....	37

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu :

1. Perkembangan keadaan tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan pagu anggaran, dan target kinerja kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlu dilakukan pergeseran uraian kegiatan, berdasarkan evaluasi kinerja hingga triwulan II;
3. Adanya penambahan sub kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2022;
4. Keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atas penurunan lebih besar dari 50%.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini sebagai pedoman dalam menyusun anggaran perubahan setelah evaluasi triwulan II.

Tujuannya adalah mendiskripsikan arah penyusunan RKA dan DPA Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Dinas Pendidikan 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan, serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

**BAB I**   Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

**BAB II**   Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

**BAB III**   Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

**BAB IV**   Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Laporan triwulanan dilaksanakan setiap tiga bulan sebagai kontrol atas perencanaan kinerja dan anggaran dengan harapan pelaksanaan kegiatan tercapai sesuai target pada setiap tahapan triwulan. Laporan evaluasi kinerja dan anggaran hingga triwulan II baik pendapatan ataupun belanja merupakan gambaran untuk menjadi dasar pertimbangan perubahan. Pertengahan tahun anggaran dapat menjadi indikasi terhadap suatu program/kegiatan/sub kegiatan akan terlaksana dengan baik, atau perlu dilakukan intervensi, bahkan perlu dihapus.

Dinas Pendidikan melaksanakan 3 Program 13 Kegiatan dan 56 sub kegiatan. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep awal sebesar Rp.792.620.877.577,00 realisasi sebesar Rp.246.674.122.554,00 atau 31,12%. Beberapa sub kegiatan di 3 program telah dilaksanakan, namun untuk kegiatan yang lainnya masih dalam proses.

Anggaran setelah Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebesar Rp.816.844.342.812,00 Realisasi sebesar Rp.260.033.017.974,00 atau 31,83% Selain karena alasan diatas, perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya surat dari Provinsi Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Khusus, sumber dana DAK Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep serta pergeseran-pergeseran dalam rangka perbaikan anggaran dan kegiatan.

Secara lengkap laporan evaluasi kinerja dan anggaran hingga triwulan II sebagaimana table berikut:

Tabel 2.1. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
												I		II						
												K	Rp	K	Rp					K
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		
		01:01	01	01				DINAS PENDIDIKAN												
	Meningkatkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	01:01:01	01	01		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	93,75	570.883.543.007,00	23,44	96.028.833.150,00	23,44	147.096.164.870,00	46,88	243.124.998.020,00	50,01	42,59	
		1.01.0	1	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	36	14.190.330,00	-	-	12	10.979.500,00	12,00	10.979.500,00	33,33	77,37	
		1.01.0	1	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	18	9.186.300,00	-	-	6	9.146.000,00	6,00	9.146.000,00	33,33	99,56
		1.01.0	1	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	18	5.004.030,00	-	-	6	1.833.500,00	6,00	1.833.500,00	33,33	36,64

No	Sasaran	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)			
							I		II							
							6		7						8	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.0 1.2.02	1 01 01 2 02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	29	569.326.632.077,00	7	95.753.947.680,00	7	146.725.150.448,00	14,00	242.479.098.128,00	48,28	42,59
		1.01.0 1.2.02. 01	1 01 01 2 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan	4555	569.306.579.477,00	1.139	95.753.947.680,00	1.139	146.719.740.448,00	2.278,00	242.473.688.128,00	50,01	42,59
		1.01.0 1.2.02. 07	1 01 01 2 02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12	20.052.600,00	-	-	4	5.410.000,00	4,00	5.410.000,00	33,33	26,98
		1.01.0 1.2.03	1 01 01 2 03	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi barang milik daerah	16	45.777.400,00	3	2.880.000,00	3	19.717.000,00	6,00	22.597.000,00	37,50	49,36
		1.01.0 1.2.03. 06	1 01 01 2 03 06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	45.777.400,00	3	2.880.000,00	3	19.717.000,00	6,00	22.597.000,00	50,00	49,36
		1.01.0 1.2.05	1 01 01 2 05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		1.01.0 1.2.05.	1 01 01 2 05 02		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
												I		II					
												6		7					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		02						beserta Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan										
		1.01.0 1.2.05. 09	1	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 1.2.06	1	01	01	2	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang di penuhi	3651	1.070.551.520,00	187.608.167,00	246.922.731,00	-	434.530.898,00	-	40,59	
		1.01.0 1.2.06. 01	1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	18.283.100,00	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 1.2.06. 02	1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	33.779.000,00	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 1.2.06. 04	1	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	711.643.140,00	4 169.287.000,00	4 135.317.800,00	8,00	304.604.800,00	53,33	42,80	
		1.01.0 1.2.06. 05	1	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	31.926.280,00	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)			
											I		II							
											6		7						8	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
								yang Disediakan												
		1.01.0 1.2.06. 06	1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45	96.120.000,00	9	6.000.000,00	10	31.900.000,00	19,00	37.900.000,00	42,22	39,43
		1.01.0 1.2.06. 09	1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310	178.800.000,00	22	12.321.167,00	102	79.704.931,00	124,00	92.026.098,00	40,00	51,47
		1.01.0 1.2.07	1	01	01	2	07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		1.01.0 1.2.07. 06	1	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		1.01.0 1.2.07. 09	1	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		1.01.0 1.2.08	1	01	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2027	278.859.680,00	2.303	67.693.088,00	3	59.587.647,00	2.306,00	127.280.735,00	113,76	45,64

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		1.01.0 1.2.08. 01	1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2300	5.000.000,00	2.300	4.992.000,00	0	-	2.300,00	4.992.000,00	100,00	99,84
		1.01.0 1.2.08. 02	1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	273.859.680,00	3	62.701.088,00	3	59.587.647,00	6,00	122.288.735,00	50,00	44,65
		1.01.0 1.2.09	1	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	120	147.532.000,00	4	16.704.215,00		33.807.544,00	4,00	50.511.759,00	3,33	34,24
		1.01.0 1.2.09. 02	1	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	67.200.000,00	4	16.704.215,00	4	14.952.544,00	8,00	31.656.759,00	57,14	47,11
		1.01.0 1.2.09. 06	1	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	28.100.000,00	-	-	94	10.555.000,00	94,00	10.555.000,00	94,00	37,56
		1.01.0	1	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/	Jumlah Gedung	6				1					

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
												I		II					
												6		7					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		1.2.09.09						Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		52.232.000,00	-	-		8.300.000,00	1,00	8.300.000,00	16,67	15,89
	Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	01:01:02	01	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga yang berakreditasi A	10,60	205.600.437.265,00	10,4	169.327.284,00	10,4	815.388.350,00	20,80	984.715.634,00	196,23	0,48
		1.01.02.2.01	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio siswa dengan rombongan SD	17:1	115.059.918.215,00	16:1	164.427.284,00	16:1	279.858.200,00	1,33	444.285.484,00	188,25	0,39
								APK SD/MI/PAKET A		103,75		103,70			103,70	207,39	-	199,89	
								APM SD/MI/PAKET A		92,8		92,75			92,75	185,51	-	199,90	
								Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS		106,04		106,02			106,02	212,04	-	199,96	
								Rasio siswa dengan guru SD		11,5:1		11:1		11:1		0,92	-	0,92	
								Persentase Angka Putus Sekolah SD		0,34		0,36		0,36		0,36	-	0,72	
		1.01.02.2.01.03	1	01	02	2	01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	8	1.165.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
												I		II					
												6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1.01.0 2.2.01. 04	1	01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	8	3.527.000.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.01. 05	1	01	02	2	01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	30	1.486.000.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.01. 06	1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun SD	36	2.001.532.195,0 0	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.01. 08	1	01	02	2	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0		-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.01. 09	1	01	02	2	01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30	2.303.500.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.01. 10	1	01	02	2	01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	638.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.01. 11	1	01	02	2	01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30	1.491.000.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
												I		II						
												6		7						8
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		1.01.0 2.2.01. 12	1	01	02	2	01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0		-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.01. 17	1	01	02	2	01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0		-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.01. 22	1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Jumlah penerma kegiatan	1	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.01. 23	1	01	02	2	01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0		-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.01. 24	1	01	02	2	01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0		-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.01. 25	1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	35	199.839.970,00	2	8.640.000,00	11	78.952.000,00	12,75	87.592.000,00	36,43	43,83

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
												I		II						
												6		7						8
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
								dan Non Akademik												
		1.01.0	1	01	02	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300	518.871.250,00	9	14.042.584,00	3	2.190.000,00	12,00	16.232.584,00	4,00	3,13
		1.01.0	1	01	02	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75	250.000.000,00	29	98.979.700,00	13	8.325.250,00	42,25	107.304.950,00	56,33	42,92
		1.01.0	1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	579	38.233.700,00	203	13.227.000,00	164	2.192.000,00	366,65	15.419.000,00	63,32	40,33
		1.01.0	1	01	02	2	01	29	Pengelolaan	Jumlah Sekolah	579									

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
												I		II					
												6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		2.2.01.29						Dana BOS Sekolah Dasar	Dasar yang Mengelola Dana BOS		60.428.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.01.30	1	01	02	2	01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0		-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.01.31	1	01	02	2	01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	14	7.797.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.01.32	1	01	02	2	01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	298.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.01.38	1	01	02	2	01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	479.997.900,00	-	19.812.000,00	-	36.443.950,00	-	-	
		1.01.0 2.2.01.39	1	01	02	2	01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di	4	275.000.000,00	-	-	-	130.015.000,00			

No	Sasaran	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)			
						I		II			9		10	
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pendidikan	bidang Pendidikan yang dilaksanakan										
		1.01.0 2.2.01. 45	1 01 02 2 01 45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	9	210.000.000,00	-	-	-	-			
		1.01.0 2.2.01. 46	1 01 02 2 01 46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3	3.000.000.000,00	-	-	-	-			
		1.01.0 2.2.01. 47	1 01 02 2 01 47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	2.610.000.000,00	-	-	-	-			
		1.01.0 2.2.01. 48	1 01 02 2 01 48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65	4.077.787.000,00	-	-	-	-			
		1.01.0 2.2.01. 50	1 01 02 2 01 50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	579	1.606.146.200,00	143	9.726.000,00	148	21.740.000,00			
		1.01.0 2.2.01. 51	1 01 02 2 01 51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	86	20.058.710.000,00	-	-	-	-			
		<b>1.01.0</b>	<b>1 01 02 2 02</b>	<b>Pengelolaan</b>	<b>APK</b>	<b>105,1</b>		<b>105,04</b>		<b>10</b>				

No	Sasaran	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
							I		II						
					1	2	3	4	5	6		7		8	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.2.02		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMP/MTS/PAK ET B	0	51.674.127.250,00		-	5,04	88.876.750,00	210,08	88.876.750,00	199,89	0,17
					APM SMP/MTS/PAK ET B	76,50		76,435		76,435		152,88		199,84	
					Persentase Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA	94,38		94,35		94,35		188,70		199,94	
					Persentase Angka Putus Sekolah SMP	0,34		0,36		0,36		0,72		211,76	
					Rasio siswa dengan guru SMP		11,5:1	11:01		11:01		0,92		#VALUE!	
					Rasio siswa dengan rombel SMP		25:1	24:1	24:1		2,00			192,01	
		1.01.0 2.2.02. 04	1 01 02 2 02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.02. 06	1 01 02 2 02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	75	1.902.099.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.02. 12	1 01 02 2 02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
									Dibangun											
		1.01.0 2.2.02. 13	1	01	02	2	02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	-	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.02. 14	1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	2.821.920.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.02. 16	1	01	02	2	02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	93.931.000,00	-	-	-	-	-	-		
## ##		1.01.0 2.2.02. 17	1	01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	778.932.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.02. 18	1	01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	1.818.947.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.02. 24	1	01	02	2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57	13.743.426.000,00	-	-	4	8.390.000,00	4,00	8.390.000,00	7,02	0,06

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		1.01.0 2.2.02. 35	1	01	02	2	02	35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	270.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.02. 36	1	01	02	2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.02. 37	1	01	02	2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.02. 38	1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	55	250.000.000,00	-	-	3	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	5,45	1,20
		1.01.0 2.2.02. 39	1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
								Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		1.01.0 2.2.02. 40	1	01	02	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	280	506.128.350,00	-	-	6	5.112.500,00	6,0 0	5.112.500,00	2,14	1,01
		1.01.0 2.2.02. 41	1	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	43	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.02. 42	1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	43	27.427.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.02. 43	1	01	02	2	02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
								Sekolah Menengah Pertama	dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
		1.01.0	1	01	02	2	02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	179.125.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0	1	01	02	2	02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	54.754.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0	1	01	02	2	02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	648.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0	1	01	02	2	02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	450.000.000,00	-	-	1	72.374.250,00	1,00	72.374.250,00		
		1.01.0	1	01	02	2	02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti	43	599.999.900,00	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
												I		II						
												6		7						8
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp						
								Peserta Didik	Proses Belajar											
		1.01.0 2.2.02. 61	1	01	02	2	02	61	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3	78.750.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.03	1	01	02	2	03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase Angka partisipasi kasar PAUD Formal</b>	<b>71,94</b>	<b>23.099.284.900, 00</b>	<b>61,03</b>	<b>4.900.000, 00</b>	<b>61, 03</b>	<b>135.545.400, 00</b>	<b>122, 06</b>	<b>140.445.400, 00</b>	<b>169,67</b>	<b>0,61</b>
									<b>Persentase Rasio ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun</b>	<b>18,12</b>		<b>18,11</b>		<b>18, 11</b>		<b>36, 22</b>	<b>-</b>	<b>199,89</b>		
		1.01.0 2.2.03. 01	1	01	02	2	03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0		-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.03. 02	1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7	3.768.606.180,0 0	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.03. 03	1	01	02	2	03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi	0		-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
									Sedang/Berat											
		1.01.0 2.2.03. 12	1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	7	244.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0 2.2.03. 13	1	01	02	2	03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar	2750 0	63.333.100,00	-	-	9.2 46	22.978.000,0 0	9.2 46, 00	22.978.000,0 0	33,62	36,28
		1.01.0 2.2.03. 14	1	01	02	2	03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0		-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.03. 16	1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70	24.999.800,00	6	4.900.000,00	26	8.812.000,00	32, 00	13.712.000,0 0	45,71	54,85
		1.01.0 2.2.03. 17	1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan	991	410.000.000,00	-	-	14	55.435.400,0 0	14, 00	55.435.400,0 0	1,41	13,52

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
													I		II					
													6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
									dan Manajemen											
		1.01.0 2.2.03. 18	1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	991	16.860.600.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.03. 25	1	01	02	2	03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	317.057.400,00	-	-	-	4.194.000,00	-	4.194.000,00		
		1.01.0 2.2.03. 26	1	01	02	2	03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	250.000.000,00	-	-	1	44.126.000,00	1,00	44.126.000,00		
		1.01.0 2.2.03. 28	1	01	02	2	03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	931.689.420,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.03. 30	1	01	02	2	03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	228.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
		1.01.0 2.2.04	1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	845.595	15.767.106.900,00	-	-		311.108.000,00	-	311.108.000,00	-	1,97

No	Sasaran	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
							I		II						
							6		7						8
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Lembaga PNF berizin	76		0	-				-	-	-	-
		1.01.0 2.2.04. 04	1 01 02 2 04 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.04. 11	1 01 02 2 04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.04. 12	1 01 02 2 04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.04. 13	1 01 02 2 04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.0 2.2.04. 16	1 01 02 2 04 16	Pembinaan Kelembagaan dan	100	40.115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	
												I		II					
												6		7					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
								Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	aan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen										
		1.01.0	1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	540	10.855.560.000,00	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0	1	01	02	2	04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	600.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
		1.01.0	1	01	02	2	04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17	4.025.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
		1.01.0	1	01	02	2	04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6984	46.431.900,00	-	-	2.451	11.108.000,00	2.451,00	11.108.000,00	

No	Sasaran	KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		
												I		II						
												6		7						8
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		01:01:04	01	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep	98,30	16.136.897.300,00	24,58	1.108.800.000,00	1.455.608.900,00	24,58	2.564.408.900,00	25,01	15,89		
		1.01.04.2.01	1	01	04	2	01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	50,00	16.136.897.300,00	12,50	1.108.800.000,00	1.455.608.900,00	12,50	2.564.408.900,00	25,00	15,89		
		1.01.04.2.01.01	1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	12	8.190.497.300,00	-	-	4	8.915.400,00	4,00	8.915.400,00	33,33	0,11
		1.01.04.2.01	1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Hasil	Jumlah Laporan Hasil	12	7.946.400.000,00	3	1.108.800.	3	1.446.693.50	6,0	2.555.493.50	50,00	32,16

No	Sasaran	KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)			
													I		II							
													6		7						8	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3							4	5	6		7		8		9		10			
		02							Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		0		000,00		0,00		0		0,00		

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Adalah yang wajar dan sering terjadi, bahwa di perjalanan pelaksanaan kegiatan akan banyak ditemui kenyataan yang menjadi alasan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Diantaranya adalah perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan pagu anggaran dan target kinerja kegiatan. Selain itu kegiatan dan anggaran yang bersifat top down seperti Dana Alokasi Khusus maupun Bantuan Keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sangat berpengaruh untuk diadakan perubahan.

Beberapa alasan perubahan sebagai berikut:

1. Efisiensi
2. Pergeseran Dau Spesifik
3. Tambahan Silpa BOP
4. Hibah
5. Perubahan biaya pengawasan DAK fisik
6. BKK Provinsi
7. Tambahan TPG/TKG/Tamsil (DAK Non Fisik)
8. Pemeliharaan gedung kantor

Sebagaimana table berikut:

**Tabel 3.1. RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>782.062.517.256,00</b>		
<b>05:01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>700.953.254.059,00</b>		
05:01:01	Belanja Pegawai		556.593.577.159,00		
05:01:02	Belanja Barang dan Jasa		77.959.390.820,00		
05:01:05	Belanja Hibah		65.842.286.080,00		
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial		558.000.000,00		
<b>05:02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>81.109.263.197,00</b>		
05:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		17.602.341.000,00		
05:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		63.218.172.197,00		
05:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		288.750.000,00		
<b>Dinas Pendidikan</b>		<b>792.620.877.572,00</b>	<b>782.062.517.256,00</b>	<b>(10.558.360.316,00)</b>	
<b>01:01:01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>570.883.543.007,00</b>	<b>558.721.864.689,00</b>	<b>(12.161.678.318,00)</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.190.330,00</b>	<b>14.190.330,00</b>	<b>-</b>	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.186.300,00	9.186.300,00	-	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.004.030,00	5.004.030,00	-	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>569.326.632.077,00</b>	<b>556.613.629.759,00</b>	<b>(12.713.002.318,00)</b>	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	569.306.579.477,00	556.593.577.159,00	(12.713.002.318,00)	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.052.600,00	20.052.600,00	-	
<b>1.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>45.777.400,00</b>	<b>45.777.400,00</b>	-	
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.777.400,00	45.777.400,00	-	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	30.000.000,00	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.070.551.520,00</b>	<b>1.230.091.520,00</b>	<b>159.540.000,00</b>	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.283.100,00	18.283.100,00	-	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.779.000,00	33.779.000,00	-	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	711.643.140,00	747.643.140,00	<b>36.000.000,00</b>	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.926.280,00	31.926.280,00	-	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96.120.000,00	96.120.000,00	-	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.800.000,00	302.340.000,00	<b>123.540.000,00</b>	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	<b>47.411.000,00</b>	<b>47.411.000,00</b>	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	47.411.000,00	<b>47.411.000,00</b>	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>278.859.680,00</b>	<b>278.859.680,00</b>	-	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.859.680,00	273.859.680,00	-	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.532.000,00</b>	<b>461.905.000,00</b>	<b>314.373.000,00</b>	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00	92.200.000,00	<b>25.000.000,00</b>	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.100.000,00	28.100.000,00	-	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.232.000,00	341.605.000,00	<b>289.373.000,00</b>	
<b>01:01:02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>205.600.437.265,00</b>	<b>207.203.755.267,00</b>	<b>1.603.318.002,00</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>115.059.918.215,00</b>	<b>115.494.236.217,00</b>	<b>434.318.002,00</b>	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.165.000.000,00	1.165.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.527.000.000,00	3.527.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.486.000.000,00	1.486.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.001.532.195,00	2.001.532.195,00	-	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.303.500.000,00	2.303.500.000,00	-	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	638.000.000,00	638.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.491.000.000,00	1.491.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	600.000.000,00	600.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	199.839.970,00	199.839.970,00	-	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	518.871.250,00	518.871.250,00	-	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	38.233.700,00	58.233.700,00	<b>20.000.000,00</b>	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.428.300.000,00	60.428.300.000,00	-	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	7.797.000.000,00	7.797.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	298.000.000,00	298.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	479.997.900,00	479.997.900,00	-	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	275.000.000,00	275.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	210.000.000,00	210.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Didik				
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	-	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.077.787.000,00	4.492.105.002,00	<b>414.318.002,00</b>	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.606.146.200,00	1.606.146.200,00	-	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.058.710.000,00	20.058.710.000,00	-	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>51.674.127.250,00</b>	<b>51.494.127.250,00</b>	<b>(180.000.000,00)</b>	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.902.099.000,00	1.902.099.000,00	-	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.821.920.000,00	2.821.920.000,00	-	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	93.931.000,00	93.931.000,00	-	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	778.932.000,00	778.932.000,00	-	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.818.947.000,00	1.818.947.000,00	-	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.743.426.000,00	13.548.426.000,00	<b>(195.000.000,00)</b>	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	270.775.000,00	270.775.000,00	-	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	506.128.350,00	506.128.350,00	-	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27.427.340.000,00	27.427.340.000,00	-	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b>	
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	179.125.000,00	179.125.000,00	-	
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	54.754.000,00	54.754.000,00	-	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	648.000.000,00	648.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	599.999.900,00	599.999.900,00	-	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	78.750.000,00	78.750.000,00	-	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>23.099.284.900,00</b>	<b>23.508.284.900,00</b>	<b>409.000.000,00</b>	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.768.606.180,00	4.162.606.180,00	<b>394.000.000,00</b>	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	244.999.000,00	244.999.000,00	-	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	63.333.100,00	78.333.100,00	<b>15.000.000,00</b>	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	24.999.800,00	24.999.800,00	-	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	410.000.000,00	410.000.000,00	-	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.860.600.000,00	16.860.600.000,00	-	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	317.057.400,00	317.057.400,00	-	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	931.689.420,00	931.689.420,00	-	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	228.000.000,00	228.000.000,00	-	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>15.767.106.900,00</b>	<b>16.707.106.900,00</b>	<b>940.000.000,00</b>	
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40.115.000,00	40.115.000,00	-	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.855.560.000,00	10.855.560.000,00	-	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	600.000.000,00	600.000.000,00	-	
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.025.000.000,00	4.965.000.000,00	<b>940.000.000,00</b>	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	46.431.900,00	46.431.900,00	-	
<b>01:01:04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>16.136.897.300,00</b>	<b>16.136.897.300,00</b>	<b>-</b>	

Kode Rekening	Uraian	AWAL	PERUBAHAN	Kurleb	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>16.136.897.300,00</b>	<b>16.136.897.300,00</b>	-	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.190.497.300,00	8.190.497.300,00	-	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.946.400.000,00	7.946.400.000,00	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>792.620.877.572,00</b>	<b>782.062.517.256,00</b>	<b>(10.558.360.316,00)</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berdasarkan amanat perundang-undangan yang berlaku, harus disusun secara sistematis. Adapun penting melihat laporan 6 (enam) bulan pertama adalah untuk menentukan perencanaan kinerja 6 (enam) bulan selanjutnya. Hal ini merupakan salah satu manajemen risiko dalam rangka mencapai target sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dan merupakan salah satu dokumen yang menjadi penilaian akuntabilitas kinerja instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Demikian kami sajikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 agar mudah dipahami dan dilakukan proses penganggaran selanjutnya.

**Kepala**



**US DWI SAPUTRA, S.Sos.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210021992011001



# RENCANA KERJA PERUBAHAN

---

## TAHUN 2024

**BKPSDM  
KABUPATEN SUMENEP**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan demikian rencana kerja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, rencana kerja perubahan disusun sebagai dasar panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 31 Juli 2024



**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMENEP**

**ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19780518 200501 1 010**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN     TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....</b>	<b>6</b>
2.1 Faktor Pendukung .....	6
2.2 Faktor Penghambat .....	7
2.3 Tindak Lanjut .....	8
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2	Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 .....	28

# BAB I



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian target, pagu anggaran dan nomenklatur pada program/kegiatan/sub kegiatan melalui aplikasi SIPD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2024 untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 26).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya perubahan Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya perubahan Renja adalah :

- 1) Merealisasikan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3) Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
- 4) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Faktor Pendukung
- 2.2 Faktor Penghambat
- 2.3 Tindak Lanjut

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**



# **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

### **2.1 Faktor Pendorong**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Sumenep 2021-2026 terdapat beberapa faktor pendorong antara lain :

- 1) Program Kepegawaian Daerah
  - Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka;
  - Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian;
  - Meningkatnya ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian;
  - Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEG dalam menunjang manajemen kepegawaian;
  - Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan data base, seperti fiber optic Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian;
  - Menurunnya persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai.
  
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi;
  - Meningkatnya SDM aparatur yang lulus Diklat.

- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan kesekretariatan.
  - Sumber dana anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sumenep.

## 2.2 Faktor Penghambat

Selain Faktor pendorong, juga terdapat beberapa Faktor Penghambat untuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- 1) Program Kepegawaian Daerah
  - Belum diberlakukannya sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara;
  - Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan SI-ASN;
  - Pelaksanaan Pengadaan ASN tergantung kepada Pemerintah Pusat;
  - Belum optimalnya penerapan dan pemberdayaan pemetaan jabatan dan dukungan pengawasan oleh instansi yang berwenang, sehingga di dalam perencanaan, pendistribusian, dan penataan belum dapat terealisasi sesuai dengan hasil pemetaan;
  - Masih belum optimalnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai.
  
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Terbatasnya ketersediaan SDM Aparatur terutama jabatan fungsional yang terkait dengan Asesor;
  - Terbatasnya jumlah dan kesempatan peningkatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.
  - Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai.
  
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan kesekretariatan.

### 2.3 Tindak Lanjut

Terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya tindak lanjut di masa yang akan datang adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan Koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN terkait Pengadaan ASN serta melaksanakan seleksi rekrutmen dengan objektif, transparan dan terbuka melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN;
2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi;
3. Melaksanakan verifikasi dan update data kepegawaian di sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN);
4. Meningkatkan Kompetensi ASN melalui kegiatan assessment, tugas belajar, dan ijin belajar;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
6. Mempersiapkan inovasi-inovasi dalam layanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik BKPSDM Kabupaten Sumenep.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 diukur dari realisasi program dan kegiatan tahun 2024, meliputi evaluasi target dan realisasi kinerja kegiatan pada program serta tingkat realisasi capaian program, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program “Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor”.

Program ini terdiri dari 7 Kegiatan dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 30,00%, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 11 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 6 Dokumen.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 5 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 5 Dokumen.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pengadaan.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 3 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan.
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

2. Realisasi Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja program "Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian".

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 90%. dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
- b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan ASN.
- c) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

- d) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 1 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
3. Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja program “Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 45%.
- a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 2 Dokumen, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.
  - b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 2 Laporan, realisasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah masih dalam proses pelaksanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga diukur terhadap prakiraan realisasi capaian target program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, yang meliputi target kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, realisasi capaian kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2004, dan target capaian kinerja Renja Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah**  
**sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III			IV		13=9+10+11+12		14=13/8x100%			15=7+13		16=15/6x100%					
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17						
		5						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																												
		5	0	3				KEPEGAWAIAN																												
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5	0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	39.702.120.882	100	8.148.703.782	100	9.722.008.231	1	1.364.941.860	3	3.252.800.157	0	0	0	0	0	0	5	4.617.742.017	50	47	1	12.766.445.799	15	32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5	0	0	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55	20.365.893	22	2.167.500	11	2.311.300	4	0	2	474000	0	0	0	-	6	474.000	55	21	2	2.641.500	51	13					
		5	0	0	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	2	1.227.600	1	0								1	0	50	0								





	5	03	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	14 Dokumen	22.829.000	8 Dokumen	14.444.300	0	0	3	3.970.000	0	0	0	0	3	3.970.000	38 %	27 %															
	5	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	119.179.083	12 Laporan	81.076.000	3	33.191.380	0	0	0	0	0	0	3	33.191.380	25 %	41 %															
	5	3	1	2,05	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	51.702.600	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100 %	0%																
	5	3	1	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	50.502.506	2 Laporan	119.765.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0%	2	119.765.000	40 %	23 %											
	5	3	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	119.765.000	10 Unit	94.187.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%															
	5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan	2.020.100.250	6 Laporan	1.405.407.405	1	152.050.370	0	220.348.940	0	-	-	-	1	372.399.310	100 %	43 %															
	5	03	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	20.008.100	12 Laporan	11.565.600	3	0	3	3.648.100	0	0	0	0	6	3.648.100	50 %	32 %															

		5	0	0	2,	00	Penyediaan	Jumlah			24	572.78	12	434.73	3	84.42	3	113.1	0	0	0	0	6	197.6	50	45										
		3	1	8	0	02	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Lapo ran	4.241	Lapo ran	2.200		4.699		76.42 0						01.11 9	%	%										
		5	0	0	2,	00	Penyediaan	Jumlah			24	812.61	12	414.63	3	67.62	3	103.5	0	0	0	0	6	171.1	50	41										
		3	1	8	0	04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Lapo ran	5.064	Lapo ran	2.856		5.671		24.42 0						50.09 1	%	%										
		5	0	0	2,		Pemeliharaan	Jumlah	25	462.139	10	509.86	1	271.35	0	4.785	0	75.86	0	0	0	0	0	80.65	0%	30	10	590.52	40	12						
		3	1	9	0		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Lapo ran	.455	Lapo ran	8.202	Lapo ran	9.046		613		8.917						4.530	%	%	%	2.732	%	%						
		5	0	0	2,	01	Penyediaan	Jumlah			8	161.54	4	46.639	1	4.785	3	16910	0	0	0	0	4	21.69	100	47										
		3	1	9	0		Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8.572	Unit	000	Unit	000		613		581						6.194	%	%										
		5	0	0	2,	09	Pemeliharaan	Jumlah			4	348.31	2	224.72	0	0	1	58.95	0	0	0	0	1	58.95	50	26										
		3	1	9	0		/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ D irehabilitasi	Unit	9.630	Unit	9.630	Unit	0.046		0	1	8.336						8.336	%	%										

2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumenep	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	65	11.409.063.891	65,63	2.837.675.367	90	1.943.241.500	15	59.281.085	25	382.770.235	0	0	0	0	0	0	0	40	442.051.320	44%	23%	105,63	3.279.726.687	163%	29%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5 Laporan	5.920.913.180	2 Laporan	771.060.288	1 Laporan	519.791.600	0,25	4.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	25%	4.280.000	25%	1%	2,25	775.340.288	45%	13%		
		5	03	02	2,01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 Dokumen	39.189.455	2 Dokumen	17.565.100	1	0	0	0	9.268.300	0	0	0	0	0	0	0	1	9.268.300	50%	53%							
		5	03	02	2,01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	460.106.123	2 Dokumen	306.139.200	0	0	0	0	35.915.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.915.550	0%	12%						







		5	0	0	2,	00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			2	Dokumen	40.364.400	1	Dokumen	32.483.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	0	0	2,	00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi						20	Orang	98.572.800	3		16.767.200	0		14.175.000	0	0	0	0	0	3	30.942.200	15%	31%						
		5	0	0	2,	00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5	Laporan	6.264.099.820	2	Laporan	1509440620	1	Laporan	474.712.900	0	2.050.000	0	161.165.000	0	5	0	5	0	1	163.215.000	100%	34%	3	1.672.655.620	60%	27%			

		5	0	0	2	2,	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			8	Lapo	1.476.2	4	Lapo	450.27	0	2.050.	0	159.7	0	0	0	0	0	0	161.7	0%	35,9																							
		4	0	0	2	0	08	Pembinaan, Pengeoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			4	Dok	33.146.	2	Dok	24.437.	0	0	0	1.417.	0	0	0	0	0	0	1.417.	0%	6%																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																											54	34																									
Predikat kinerja																											Ren	San																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Dukungan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta Pelaporan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep; 2. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama internal yang solid antara pegawai BKPSDM Kabupaten Sumenep 3. Proses Bisnis di BKPSDM Kabupaten Sumenep dari hulu ke hilir (proses rekrutmen sampai dengan pension) saling terhubungn dengan Baik.																																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Adanya anggaran kegiatan yg realisasi capaiannya tergantung dari Pemerintah Pusat seperti Pengadaan ASN (Kemenpan RB dan BKN); 2. Kegiatan Diklatpim PKN II, administrator dan Pengawas tergantung dengan Pihak Ketiga (BPSDM Provinsi Jawa Timur)																																																					
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan brikutnya : Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait																																																					
Tidak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :																																																					

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.943.241.500,00 terealisasi sebesar Rp. 442.051.320,00 dengan persentase sebesar 23%. Didalam Program Kepegawaian Daerah terdapat Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan anggaran sebesar Rp. 306.139.200,00 baru terealisasi Rp. 35.915.550,00 dengan persentase sebesar 12% dikarenakan bersifat penyediaan menunggu jadwal pengadaan ASN oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center dengan anggaran sebesar Rp. 247.818.000,00 baru terealisasi Rp. 3.162.000,00 dengan persentase 1%. Untuk Pengelolaan Assesment kegiatan sudah dilaksanakan tinggal proses administrasi keuangan dengan Pihak Ketiga.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 605.768.700,00 terealisasi sebesar Rp. 194.157.200,00 dengan persentase sebesar 32%., didalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan anggaran Rp. 450.275.600,00 baru terealisasi Rp. 161.797.800,00 dengan persentase sebesar 36% kegiatan tersebut antara lain pendidikan Latihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Administrator, Pengawas dan Orientasi PPPK.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.859.257.095,00 terealisasi sebesar Rp. 4.617.742.017,00 dengan persentase sebesar 43%.  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berisikan kegiatan dan sub kegiatan rutin yang menunjang kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## **BAB III**



# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Sumenep sejak tahun 2021 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain ;
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan antara lain ;
  - 5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## 2. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
  - 1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
  - 1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
  - 1.4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
  - 1.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - 1.6 Pengelolaan Data Kepegawaian;
  
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 2.1 Pengelolaan Mutasi ASN;
  - 2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
  - 2.3 Pengelolaan Promosi ASN.
  
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 3.1 Pengelolaan Assesment Center
  - 3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
  - 3.3 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN;
  - 3.4 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
  - 3.5 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
  
- 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  - 4.2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
  - 4.3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
  - 4.4 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
  - 4.5 Pembinaan Disiplin ASN;
  - 4.6 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
  - 4.7 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
  - 4.8 Evaluasi Disiplin ASN.

### **3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 1.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
  - 1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
  
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan antara lain :
  - 2.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
  - 2.3 Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

#### **3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Perubahan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5	03				KEPEGAWAIAN																	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor					100 %	100 %			9.722.008.231	10.913.062.009					10.471.709.367
	5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					11 Dokumen	11 Dokumen			2.311.300	2.311.300				8 Dokumen	4.094.588
	5	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			2 Dokumen	2 Dokumen			1.227.600	1.227.600	Dana Transfer Umum-DAU			2 Dokumen	3.000.000

	5	0	0	2,0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			3 laporan	3 laporan			1.083.700	1.083.700	Dana Transfer Umu m-DAU			3 laporan	1.094.588
	5	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan			8.064.445.029	8.791.377.977					8.791.377.977
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			75 orang/bulan	69 orang/bulan			8.063.174.529	8.790.107.477	Dana Transfer Umu m-DAU			69 orang/bulan	8.790.107.477
	5	0	0	2,0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			5 laporan	5 laporan			1.270.500	1.270.500	Dana Transfer Umu m-DAU			5 Laporan	1.270.500
	5	0	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan			102.655.326	72.655.326					95.750.000
	5	0	0	2,0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 paket	1 paket			72.655.326	72.655.326	Dana Transfer Umu m-DAU			1 Paket	75.750.000

	5	0	0	2,0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			5 orang				30.000.000				2 orang	20.000.000	
	5	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan			326.119.600	439.775.840					315.040.756
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Paket	1 Paket			33.328.900	33.328.900	Dana Transfer Umum-DAU			1 Paket	35.703.096
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Paket	1 Paket			71.687.700	100.054.305	Dana Transfer Umum-DAU			1 Paket	65.616.367
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Paket	1 Paket			53.230.100	68.230.100	Dana Transfer Umum-DAU			1 Paket	67.169.949
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Paket	1 Paket			20.650.000	20.650.000	Dana Transfer Umum-DAU			1 Paket	19.460.074
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			8 Dokumen	8 Dokumen			14.444.300	14.444.300	Dana Transfer Umum-DAU			8 Dokumen	12.846.190

	5	0	0	2,0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			12 Laporan	12 Laporan			81.076.000	144.230.000	Dana Transfer Umum-DAU			12 Laporan	54.245.080
	5	0	0	2,0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			51.702.600	58.838.235	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokumen	60.000.000
	5	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan			94.187.274	100.292.274					101.000.000
	5	0	0	2,0	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor				1 Unit				6.105.000	Dana Transfer Umum-DAU			1 Unit	6.105.000
	5	0	0	2,0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			10 Unit	10 Unit			94.187.274	94.187.274	Dana Transfer Umum-DAU			10 Unit	101.000.000
	5	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan			860.930.656	860.930.656					869.768.818
	5	0	0	2,0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			12 Laporan	12 Laporan			11.565.600	11.565.600	Dana Transfer Umum-			12 Laporan	11.363.056

																		DAU				
5	0	0	2,0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor					12 Lapora n	12 Lapora n			434.732. 200	434.732.2 00	Dana Tran sfer Umu m- DAU				434.732.200
5	0	0	2,0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor					12 Lapora n	12 Lapora n			414.632. 856	414.632.8 56	Dana Tran sfer Umu m- DAU			12 Lapora n	423.673.562
5	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1 Lapora n	1 Lapora n			271.359. 046	645.718.6 36					294.677.228
5	0	0	2,0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor					13 Unit	13 Unit			46.639.0 00	93.890.68 0	Dana Tran sfer Umu m- DAU			13 Unit	51.627.160
5	0	0	2,0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor					2 Unit	2 Unit			224.720. 046	551.827.9 56	Dana Tran sfer Umu m- DAU			2 Unit	243.050.068

2	5	0	0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian					50%	50%							1.905.955.200	2.095.171.500					2.135.049.467
	5	0	0	2,0		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1 Lapora n	1 Lapora n							519.791.600	519.791.600					520.149.111
	5	0	0	2,0	00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			2 dokume n	2 dokume n							17.565.100	17.565.100	Dana Transfer Umum-DAU			2 dokume n	17.735.600
	5	0	0	2,0	00	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 dokume n	1 dokume n							306.139.200	306.139.200	Dana Transfer Umum-DAU			1 dokume n	306.139.200
	5	0	0	2,0	00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokum en	1 Dokum en							31.629.100	31.629.100	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokum en	31.816.111
	5	0	0	2,0	00	Fasilitas Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Lemba ga	1 Lemba ga							35.079.000	35.079.000	Dana Transfer Umum-DAU			1 Lemba ga	35.079.000
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokum en	1 Dokum en							54.872.150	54.872.150	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokum en	54.872.150

	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			74.507.050	74.507.050	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokumen	74.507.05
	5	0	0	2,0		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN					1 Laporan	1 Laporan			499.727.200	521.085.700					564.492.58
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			272.371.300	293.729.800	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokumen	322.695.00
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1.700 Dokumen	1.700 Dokumen			71.477.600	71.477.600	Dana Transfer Umum-DAU			1.700 Dokumen	81.825.15
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			155.878.300	155.878.300	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokumen	159.972.43
	5	0	0	2,0		Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN					1 Laporan	1 Laporan			519.180.600	687.038.400					683.151.97
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			231.890.200	247.818.000	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokumen	234.062.96
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			75 orang	75 orang			24.229.800	176.159.800	Dana Transfer Umum-DAU			75 orang	176.159.80

	5	0	0	2,0	00	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			20 orang	20 orang			109.076.200	109.076.200	Dana Tran sfer Umu m- DAU			20 orang	110.390.475	
	5	0	0	2,0	00	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 dokume n	1 dokume n			98.570.500	98.570.500	Dana Tran sfer Umu m- DAU			1 dokume n	99.558.730	
	5	0	0	2,0	00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			100 orang	100 orang			55.413.900	55.413.900	Dana Tran sfer Umu m- DAU			100 orang	62.980.000	
	5	0	0	2,0		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Lapora n	1 Lapora n			367.255.800	367.255.800						367.255.800
	5	0	0	2,0	00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokum en	1 Dokum en			29.807.000	29.807.000	Dana Tran sfer Umu m- DAU			1 Dokum en	29.807.00	
	5	0	0	2,0	00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Lapora n	1 Lapora n			28.103.600	28.103.600	Dana Tran sfer Umu m- DAU			1 Lapora n	28.103.60	
	5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			90 orang	90 orang			19.996.900	119.996.900	Dana Tran sfer Umu m- DAU			90 orang	119.996.90	

5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	150 orang	150 orang	46.348.300	46.348.300	Dana Transfer Umu m-DAU	150 orang	46.348.300
5	0	0	2,0	00	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	500 orang	500 orang	80.632.700	80.632.700	Dana Transfer Umu m-DAU	500 orang	80.632.700
5	0	0	2,0	00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	30 Laporan	30 Laporan	27.459.500	27.459.500	Dana Transfer Umu m-DAU	30 Laporan	27.459.500
5	0	0	2,0	00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	30 Dokumen	30 Dokumen	18.084.900	18.084.900	Dana Transfer Umu m-DAU	30 Dokumen	18.084.900
5	0	0	2,0	00	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	1 Laporan	1 Laporan	16.822.900	16.822.900	Dana Transfer Umu m-DAU	1 Laporan	16.822.900
5	0				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
5	0	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal</b>		<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>605.768.700</b>	<b>647.108.700</b>			<b>647.108.700</b>
5	0	0	2,0		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN		2 Dokumen	2 Dokumen	131.055.800	131.055.800			131.055.800

5	0	0	2,0	00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			32.483.000	32.483.000	Dana Transfer Umum-DAU			1 Dokumen	32.483.000
5	0	0	2,0	00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			20 orang	20 orang			98.572.800	98.572.800	Dana Transfer Umum-DAU			20 orang	98.572.800
5	0	0	2,0		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan			474.712.900	516.052.900					516.052.900
5	0	0	2,0	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Laporan	1 Laporan			450.275.600	491.615.600	Dana Transfer Umum-DAU			1 Laporan	491.615.600

						Kepemimpinan, dan Prajabatan		Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
	5	0	0	2,	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama		Kabupaten Sumenep, Kota Sumenep, Kolor			1 Dokumen	1 Dokumen			24.437.300	24.437.300		Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	24.437.300
<b>JUMLAH TOTAL</b>																12.233.732.131	13.655.342.209					13.253.867.534	

## **BAB IV**



## **PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalannya lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama aparatur dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala sesuatu yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagaimana diharapkan dapat diwujudkan, Aamiin.

Sumenep, 31 Juli 2024



**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMENEP**

**ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA P PERUBAHAN SKPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA P-SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA P-SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA P-SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD .

Dengan demikian RENJA P-SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA P-SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Renja 2025 terdiri atas Undang-undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Informasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
11. KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab Sumenep Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Sumenep No. 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep;
14. Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2021 tentang Renstra kab Sumenep Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep

#### 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD adalah untuk :

- a) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- d) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
- e) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;
- f) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latarbelakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Faktor pendorong, Faktor Penghambat, Tindak Lanjut.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

#### FORMULIR E.81

#### EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Sampai dengan Triwulan II tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangka t Daerah Penang g Jawab
					6		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = 13/8x10 0%		15 = 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			Realisasi Tujuan Koperasi & UMKM																						
			Realisaasi Sasaran Koperasi & UMKM							1,411 ,702, 079			4,530, 105,6 42												
	Meningkat nya capaian kinerja Perangkat Daerah	2 1 0 7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 0 0 %	20,48 2,161, 882	1 0 0 %	11,109 ,831,5 57	2 5 %	1,388 ,710, 379	2 5 %	3,747, 342,2 42					1 0 0 %	5,136 ,052, 621	10 0 %	4 6 %	1 0 0 %	5,136 ,052, 621	10 0.0 0	0.3	
		2 1 0 2 0 7 1 1 1 1	Perencanaan , Penggagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggara n dan evakuasi perangkat daerah	1 8	dok ume n 65,88 4,500	1 8	dok ume n 19,534 ,000	5	dok ume n 297,0 00	1 0	dok ume n 1,612, 000					1 5	dok ume n 1,909 ,000	83 %	1 0 %	1 5	dok ume n 1,909 ,000	83. 33	2.9	
		2 1 0 2 0 0 7 1 1 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 0	dok ume n 9,412, 071	1 0	dok ume n 14,291 ,000	1	dok ume n	4	dok ume n 1,315, 000					5	dok ume n 1,315 ,000	50 %	9 %	5	dok ume n 1,315 ,000	50. 00	14. 0	

















		3	3	0	2	0	0	0		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda daftar Gudang	2	Dokumen	2	Dokumen	15,999,900		Dokumen	1	Dokumen	240,000																		
		3	3	0	2	2	0	0		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	45	Unit	15,999,900	0	Unit	1	Unit	240,000																		
		3	3	0	3					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar	15	%	15	%	14,123,291,732	851,458,700	15	%	11,510,400	34,050,000					15	45,560,400	100%	5%	15	0	45,560,400	100%	0.3					
		3	3	0	3	2	0	1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	47	Unit	47	Unit	13,823,291,732	851,458,700	4	Unit	11,510,400	34,050,000					15	45,560,400	32%	5%	15	0	45,560,400	31.91	0.3					
		3	3	0	3	2	0	0	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	Unit	2	Unit	13,623,291,732	609,992,000		Unit	38,610,350						1	38,610,350	50%	6%	1	0	38,610,350	50.00	0.3					
		3	3	0	3	2	0	0	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	45	Unit	45	Unit	200,000,000	241,466,700	4	Unit	11,510,400	34,050,000					14	45,560,400	31%	19%	14	0	45,560,400	31.11	22.8					
	Terjaminnya akses terhadap kebutuhan Pokok	3	3	0	4					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabil	95	%	85	%	239,900,285	92,571,720	0	%	7,452,750						1	7,452,750	1%	8%	1	0	7,452,750	1.05	3.1					
		3	3	0	4	2	0	1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	36	Laporan	36	Laporan	89,900,285	24,505,920	0	Laporan	960,000						1	960,000	3%	4%	1	0	960,000	2.78	1.1					





			Realisasi Sasaran Bidang Perindustrian									20,491,140			106,033,761																
		331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									20,491,140			106,033,761				0						126,524,901		126,524,901				
Meningkatnya pertumbuhan sektor PDRB industri pengolahan		330312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri	100%		3,836,162,143	100%		4,954,047,622	0%		20,491,140	60%		106,033,761			60						126,524,901	60%	360	0	126,524,901	60.00	3.3
		330000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	35 dok		3,836,162,143	8 dok		4,954,047,622	0 dok		20,491,140	3 Dok		106,033,761			3						126,524,901	38%	33	0	126,524,901	8.57	3.3
		330200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	10 dok		436,162,143	2 dok		3,248,884,716	0 dok		6,495,720	1 Dok		52,698,577			1						59,194,297	50%	21	0	59,194,297	10.00	13.6



## 2.1 Faktor pendorong

LAPORAN MONEV DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP  
 TRIWULAN II TAHUN 2024

	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target (Triwulan)				Realisasi (Triwulan)				Faktor Pendorong
	Uraian	Indikator	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tujuan	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Kontribusi Perdagangan Daerah pada Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustri terhadap PDRB	0	0	0	10.9	0	0	-	-	1. Pemasaran produk UM melalui online, Penggunaan teknologi pada proses produksi 2. Bertambahnya wilayah keanggotaan koperasi, Variasi usaha koperasi 3. Fasilitas perdagangan yang memenuhi syarat meningkatkan transaksi perdagangan masyarakat 4. Beberapa investor mengembangkan industrinya di daerah
Sasaran	Meningkatnya Pendapatan Koperasi dan UM	persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi  persentase Peningkatan Pendapatan UM	0 0	0 0	0 0	20 8	0 0	0 0	-	-	faktor pendorong : kompetensi umkm dan bantuan dari pemerintah
Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UM	Persentase UM Naik Kelas Persentase Koperasi Aktif	0 0	0 0	0 0	0 85	0 0	0 0	-	-	faktor pendorong : fasilitasi bantuan dari pemerintah dan adanya penghargaan dari pemerintah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi dan UM	Jumlah Koperasi yang di Monev Jumlah UM yang dibina	16 0	38 0	35 0	9 0	16 0	30 0	-	-	Faktor pendorong : Tersedianya data koperasi aktif dan tidak aktif

Sasaran Sub Kegiatan	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UM	Jumlah Koperasi dan UM yang berkembang Usahanya	18	38	35	9	16	30	-	-	Faktor pendorong : tersedianya data koperasi yang akan dilakukan pengawasan,
Sasaran Sub Kegiatan	Meningkatnya Variasi Usaha Koperasi dan UM	Jumlah Koperasi dan UM yang meningkat Jenis Usahanya	2	3	3	2	0	0	-	-	Faktor pendorong : Tersedianya data koperasi aktif dan tidak aktif
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi dan UM	Persentase Pelaku Usaha Koperasi Tersertifikasi  Persentase Pelaku Usaha UM Tersertifikasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelaku Koperasi dan UM	Jumlah Pelatihan/ Diklat	0	0	0	0	0	0	-	-	Pelaksanaan pelatihan dan pelatihan belum tersedia pagu anggaran
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Studi Banding bagi Koperasi dan UM	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	0	0	0	0	-	-	-	-	Pelaksanaan study banding belum tersedia pagu anggaran
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Perijinan Usaha Pelaku Koperasi dan UM	Persentase Koperasi yang berijin Persentase UM yang berijin	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya perijinan yang mudah dan cepat	Jumlah ijin yang diterbitkan untuk Koperasi dan UM	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia

Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan UM	Jumlah Sosialisasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Program	Meningkatnya Fasilitas Usaha terhadap Koperasi dan UM	Persentase UM difasilitasi  Persentase Koperasi difasilitasi	0 0	0 0	0 0	8 6	0 0	0 0	-	-	Faktor pendorong : Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti fasilitas pembinaan dan pendampingan yang diberikan  pendorong : -koperasi penerima bantuan memenuhi syarat yang ditentukan -koperasi yang diberdayakan koperasi yang sedang aktif
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Persentase Pelaku Koperasi yang terfasilitasi Sarana dan Prasarananya  Persentase Pelaku UM yang terfasilitasi Sarana dan Prasarananya	0	0	0	8	0	8	-	-	'pendorong : Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti fasilitas pembinaan dan pendampingan yang diberikan
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Peralatan	Jumlah UM yang mendapatkan Bantuan Peralatan	0	64	0	1,881,893,223	0	0	-	-	pendorong : Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti fasilitas pembinaan dan pendampingan yang diberikan
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Produk	Jumlah Produk UM yang tersertifikasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Produk belum tersedia pagu anggaran
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Lokasi Pemasaran dan Platform Digital Pemasaran	Jumlah Lokasi/Platform Pemasaran yang disediakan bagi Koperasi dan UM	0	0	0	1	0	0	-	-	Faktor pendorong : adanya data pelaku usaha yang disediakan

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Permodalan Usaha	Persentase Pelaku UM yang terfasilitasi Permodalan  Persentase Pelaku Koperasi yang terfasilitasi Permodalan	0	0	0	6	0	0	-	-	Faktor pendorong : -koperasi penerima bantuan memenuhi syarat yang ditentukan -koperasi yang diberdayakan koperasi yang sedang aktif
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Permodalan Pemerintah	Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi	8	0	0	0	0	8	-	-	Faktor Pendorong : -koperasi penerima bantuan memenuhi syarat yang ditentukan -koperasi yang diberdayakan koperasi yang sedang aktif
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya CSR / Kemitraan Permodalan	Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi	12	15	20	0	20	7	-	-	Faktor pendukung : adanya data pelaku usaha yang disediakan
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	0	0	0	5.2	0	0	-	-	faktor pendorong : Meningkatnya transaksi perdagangan antar daerah dan bertambahnya nilai ekspor
Sasaran Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak	Persentase Sarana Pra Sarana yang Terstandarisasi	0	0	0	15	0	0	-	-	Faktor Pendorong : Pasar merupakan sarana perdagangan utama bagi masyarakat desa/ terpencil
Sasaran Kegiatan	Optimalnya Penyediaan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan Aktif	0	2	0	0	0	0	-	-	Faktro Pendorong : anggaran tersedia dan pembangunan didukung masyarakat
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perdagangan	0	0	2	0	0	0	-	-	Faktor Pendorong : anggaran tersedia dan pembangunan didukung masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perdagangan	0	0	1	0	0	0	-	-	Faktor Pendorong : anggaran tersedia dan Rehap didukung masyarakat
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan yang dikelola	5	10	16	2	5	10	-	-	Faktor Pendorong : Penanggung jawab pasar sudah sangat paham tentang pengelolaan pasar
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Data Pengelolaan Sarana Perdagangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	0	1	0	1	0	1	-	-	Faktro Pendorong : Penanggung jawab pasar sudah sangat paham tentang pengelolaan pasar
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola Pasar	Jumlah Pengelola Pasar yang difasilitasi	5	10	16	2	-	-	-	-	Pendorong : Penanggung jawab pasar sudah sangat paham tentang pengelolaan pasar
Sasaran Program	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Pasar Daerah	Jumlah omset perdagangan per kurun waktu	0	0	0	3.459.902	0	0	-	-	Pendorong : Tersedianya data distributor dan pedagang besar, tenaga pendata harga harian, dukungan intervensi pemerintah
Sasaran Kegiatan	Terciptanya stabilitas harga	Persentase Fluktuasi Harga Bapokti	0	0	0	14.6	0	0	-	-	Faktor Pendorong : Pendataan stok barang dilakukan setiap hari dan koordinasi dengan provinsi apabila memerlukan intervensi pemerintah
Sasaran Sub Kegiatan	Terpantaunya Ketersediaan dan Harga Bapokti	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	0	1	0	1	0	1	-	-	Faktor Pendorong : didukung dan diampu oleh beberapa opd yg bekerja sinergis serta pengendalian dilakukan rutin secara periodik
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Operasi Pasar	Jumlah Operasi Pasar	0	1	0	1	0	1	-	-	Faktor Pendorong : dukungan dan intervensi dari pemerintah provinsi dan BUMN
Sasaran Kegiatan	Terciptanya Keamanan Transaksi Perdagangan dan Tertib Niaga	Persentase Peningkatan UTTP yang diawasi dan rekomendasi ijin	0	0	0	5	0	0	-	-	Faktor Pendorong : peralatan yang memadai dan tersedianya lab tera di opd

Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Perijinan yang diterbitkan	0	0	0	5	0	0	-	-	Faktro Pendorong : Tersedianya tenaga pendata dan adanya sinergitas dengan DPMPTSP
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diawasi	0	800	0	800	0	500	-	-	Faktor Pendorong : peralatan yang memadai dan tersedianya lab tera di opd
Sasaran Sub Kegiatan	Terpantaunya Peredaran Bahan Berbahaya di Daerah	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Fasilitasi Promosi	1	1	1	1	1	1	-	-	Pendorong : produk unggulan daerah banyakdan variatif, daerah pemasaran masih lokal
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Kerjasama Kemitraan dengan Retail, Jasa dan Hotel	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi melalui Event dan Marketplace	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	1	1	0	0	1	1	-	-	Faktro Pendorong : banyaknya even yang diselenggarakan oleh pemerintah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ekspor Produk Unggulan Daerah	Jumlah Komoditas Ekspor	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Misi Dagang bagi Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Ekspor yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Pameran bagi Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Ekspor yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Branding Produk Ekspor	Jumlah Produk yang di branding	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	0	0	0	5.7	0	0	-	-	Faktor pendorong : Pertumbuhan sentra industri baru di berbagai wilayah
Sasaran Program	Meningkatnya IKM yang berkembang	Persentase IKM yang	0	0	0	100	0	0	-	-	Fakor Pendorong : tumbuhnya industri2 yang dinamis dan variatif

		berkembang usahanya									
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Produksi IKM	Jumlah IKM yang naik produksinya	0	0	0	40	0	0	-	-	Pendorong : tenaga verifikator dan pendamping tersedia, adana data IKM
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Peralatan	Jumlah IKM yang mendapat bantuan	0	26	0	0	-	-	-	-	Faktor Pendorong : tenaga verifikator dan pendamping tersedia, adana data IKM
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Bahan Baku	Jumlah IKM yang mendapat bantuan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Produk IKM	Jumlah Produk yang tersertifikasi	0	0	0	10	0	0	-	-	Faktor Pendorong : sangat menunjang dari aktifitas sentra industri, tenaga pendamping yang kompeten
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Produk	Jumlah Produk yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Fasilitas Legalitas dan Paten Produk	Jumlah Produk yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Faktor Pendorong : tenaga pendamping yang kompeten, regulasi aturan telah disusun
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya fasilitas teknologi dan peralatan	Jumlah IKM yang difasilitasi	0	100	0	0	0	0	-	-	Faktor Pendorong : tenaga pendamping yang kompeten, regulasi aturan telah disusun
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemasaran Produk IKM	Persentase Produk yang dipasarkan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Meningkatnya Produk IKM yang dipasarkan melalui platform digital	Jumlah produk IKM	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya showroom produk IKM	Jumlah produk IKM yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Program	Meningkatnya Sebaran Perwilayahan Industri	Persentase Pertumbuhan Perwilayahan Industri	0	0	0	6.4	0	0	-	-	Pendorong : tumbuhnya industri2 yang dinamis dan variatif

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	Jumlah Kawasan Industri yang dibangun	0	0	0	1	0	0	-	-	Faktor Pendorong : tenaga pendamping yang kompeten, regulasi aturan telah disusun
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Lahan Kawasan Industri	Jumlah Lahan Peruntukan Industri	0	0	0	1	0	0	-	-	Pendorong : tenaga pendamping yang kompeten, regulasi aturan telah disusun
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Perijinan	Jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembentukan Sentra Industri	Jumlah Sentra yang Dibentuk	0	2	0	0	0	0	-	-	Faktor Pendorong : tenaga verifikator dan pendamping tersedia, adana data IKM
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksanakannya Bantuan sarana dan prasarana sentra Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi	0	2	0	0	0	0	-	-	Faktor Pendorong : sangat menunjang dari aktifitas sentra industri, tenaga pendamping yang kompeten
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Kelembagaan Sentra	Jumlah sentra yang berbadan usaha	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia

## 2.2 Faktor Penghambat

	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target (Triwulan)				Realisasi (Triwulan)				Faktor Penghambat
	Uraian	Indikator	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tujuan	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Kontribusi Perdagangan Daerah pada Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustri terhadap PDRB	0	0	0	10.9	0	0	-	-	faktor penghambat : 1.Persaingan usaha sejenis dengan permodalan yang lebih besar 2.Besarnya tunggakan dan permodalan yang kecil 3.Terjadinya inflasi dan turunnya daya beli masyarakat 4. Belum adanya peraturan yang mengatur pembangunan industri untuk kepastian bagi investor
Sasaran	Meningkatnya Pendapatan Koperasi dan UM	persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi  persentase Peningkatan Pendapatan UM	0 0	0 0	0 0	20 8	0 0	0 0	-	-	-faktor penghambat : banyaknya anggota yang mengundurkan diri dan Koperasi mengalami kerugian  -faktor penghambat : kapasitas usaha yg tidak berkembang
Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UM	Persentase UM Naik Kelas Persentase Koperasi Aktif	0 0	0 0	0 0	0 85	0 0	0 0	-	-	-faktor penghambat : kapasitas usaha yg tidak berkembang  -faktor penghambat : banyaknya anggota yang mengundurkan diri dan Koperasi mengalami kerugian

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi dan UM	Jumlah Koperasi yang di Monev Jumlah UM yang dibina	16 0	38 0	35 0	9 0	16 0	30 0	-	-	Penghambat : sulinya menjangkau lokasi koperasi yang akan dilakukan penilaian kesehatan  Pada triwulan 2 Sasaran meningkatnya Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi dan UM Urusan bidang UMKM belum tersedia pagu anggarannya
Sasaran Sub Kegiatan	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UM	Jumlah Koperasi dan UM yang berkembang Usahanya	18	38	35	9	16	30	-	-	Faktor Penghambat :sulinya menjangkau lokasi koperasi yang akan dilakukan Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Sasaran Sub Kegiatan	Meningkatnya Variasi Usaha Koperasi dan UM	Jumlah Koperasi dan UM yang meningkat Jenis Usahanya	2	3	3	2	0	0	-	-	Faktor Penghambat : sulinya menjangkau lokasi koperasi yang akan dilakukan penilaian kesehatan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi dan UM	Persentase Pelaku Usaha Koperasi Tersertifikasi  Persentase Pelaku Usaha UM Tersertifikasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelaku Koperasi dan UM	Jumlah Pelatihan/ Diklat	0	0	0	0	0	0	-	-	Pelaksanaan pelatihan dan pelatihan belum tersedia pagu anggaran
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Studi Banding bagi Koperasi dan UM	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	0	0	0	0	-	-	-	-	Pelaksanaan study banding belum tersedia pagu anggaran

Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Perijinan Usaha Pelaku Koperasi dan UM	Persentase Koperasi yang berijin Persentase UM yang berijin	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	- -	- -	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya perijinan yang mudah dan cepat	Jumlah ijin yang diterbitkan untuk Koperasi dan UM	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Usaha bagi Koperasi dan UM	Jumlah Sosialisasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Program	Meningkatnya Fasilitas Usaha terhadap Koperasi dan UM	Persentase UM difasilitasi  Persentase Koperasi difasilitasi	0 0	0 0	0 0	8 6	0 0	0 0	- -	- -	Faktro penghambat :bantuan peralatan yang diminta susah untuk didapatkan dipasaran  Faktor penghambat : sulitnya verifikasi lokasi koperasi yang susah dijangkau
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Persentase Pelaku Koperasi yang terfasilitasi Sarana dan Prasarananya  Persentase Pelaku UM yang terfasilitasi Sarana dan Prasarananya	0	0	0	8	0	8	-	-	Faktor penghambat :bantuan peralatan yang diminta susah untuk didapatkan dipasaran
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Peralatan	Jumlah UM yang mendapatkan Bantuan Peralatan	0	64	0	1,881,893,223	0	0	-	-	Faktor penghambat :bantuan peralatan yang diminta susah untuk didapatkan dipasaran
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Produk	Jumlah Produk UM yang tersertifikasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Produk belum tersedia pagu anggaran

Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Lokasi Pemasaran dan Platform Digital Pemasaran	Jumlah Lokasi/Platform Pemasaran yang disediakan bagi Koperasi dan UM	0	0	0	1	0	0	-	-	Faktor Penghambat :sulitnya mencari lokasi para pelaku usaha
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Permodalan Usaha	Persentase Pelaku UM yang terfasilitasi Permodalan  Persentase Pelaku Koperasi yang terfasilitasi Permodalan	0	0	0	6	0	0	-	-	Faktor penghambat : sulitnya verifikasi lokasi koperasi yang susah dijangkau
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Permodalan Pemerintah	Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi	8	0	0	0	0	8	-	-	Faktor penghambat : sulitnya verifikasi lokasi koperasi yang susah dijangkau
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya CSR / Kemitraan Permodalan	Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi	12	15	20	0	20	7	-	-	Penghambat :sulitnya mencari lokasi para pelaku usaha
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	0	0	0	5.2	0	0	-	-	-faktor penghambat : Masih sedikitnya pelaku usaha ekspor
Sasaran Program	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Layak	Persentase Sarana Pra Sarana yang Terstandarisasi	0	0	0	15	0	0	-	-	Faktro Penghambat : kondisi pasar yg kurang strategis dan kurang layak membuat pedagang merugi
Sasaran Kegiatan	Optimalnya Penyediaan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan Aktif	0	2	0	0	0	0	-	-	Faktor Penghambat : aset yang disediakan sebagian bukan milik pemerintah

Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perdagangan	0	0	2	0	0	0	-	-	Faktor Penghambat : aset yang disediakan sebagian bukan milik pemerintah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Prasarana Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perdagangan	0	0	1	0	0	0	-	-	faktor Penghambat : aset yang disediakan sebagian bukan milik pemerintah
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan yang dikelola	5	10	16	2	5	10	-	-	Faktor Penghambat : Jumlah penjab pasar tidak sebanding dengan jumlah pasar yg dikelola
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Data Pengelolaan Sarana Perdagangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	0	1	0	1	0	1	-	-	Faktor Penghambat : Jumlah penjab pasar tidak sebanding dengan jumlah pasar yg dikelola
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola Pasar	Jumlah Pengelola Pasar yang difasilitasi	5	10	16	2	-	-	-	-	Faktor Penghambat : Jumlah penjab pasar tidak sebanding dengan jumlah pasar yg dikelola
Sasaran Program	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Pasar Daerah	Jumlah omset perdagangan per kurun waktu	0	0	0	3.459.902	0	0	-	-	Faktor Penghambat : regulasi yang mengatur perdagangan dan kecurangan pedagang besar
Sasaran Kegiatan	Terciptanya stabilitas harga	Persentase Fluktuasi Harga Bapokti	0	0	0	14.6	0	0	-	-	Faktor Penghambat : adanya kelangkaan barang pada waktu yg bersamaan dengan daerah sekitar
Sasaran Sub Kegiatan	Terpantaunya Ketersediaan dan Harga Bapokti	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	0	1	0	1	0	1	-	-	Faktor Penghambat : pedagang dan distributor yang patuh aturan perdagangan pemerintah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Operasi Pasar	Jumlah Operasi Pasar	0	1	0	1	0	1	-	-	Faktro Penghambat : Intervensi operasi pasar yang tidak tepat sasaran
Sasaran Kegiatan	Terciptanya Keamanan Transaksi Perdagangan dan Tertib Niaga	Persentase Peningkatan UTTP yang diawasi dan rekomendasi ijin	0	0	0	5	0	0	-	-	Faktor Penghambat : tenaga penera sangat terbatas, sehingga tidak bisa melayani semua wilayah

Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Perijinan yang diterbitkan	0	0	0	5	0	0	-	-	Faktor Penghambat : kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin gudang
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diawasi	0	800	0	800	0	500	-	-	Faktor Penghambat : kesadaran pedagang dan pelaku usaha sangat kurang
Sasaran Sub Kegiatan	Terpantaunya Peredaran Bahan Berbahaya di Daerah	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Fasilitasi Promosi	1	1	1	1	1	1	-	-	Faktor Penghambat : kualitas produk masih rendah
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Kerjasama Kemitraan dengan Retail, Jasa dan Hotel	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi melalui Event dan Marketplace	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	1	1	0	0	1	1	-	-	Faktor Penghambat : jumlah produk yang layak untuk dipromosikan masih terbatas
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ekspor Produk Unggulan Daerah	Jumlah Komoditas Ekspor	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Misi Dagang bagi Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Ekspor yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Pameran bagi Pelaku Ekspor	Jumlah Pelaku Ekspor yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Branding Produk Ekspor	Jumlah Produk yang di branding	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	0	0	0	5.7	0	0	-	-	-faktor penghambat : Beberapa sentra industri masih belum bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya

Sasaran Program	Meningkatnya IKM yang berkembang	Persentase IKM yang berkembang usahanya	0	0	0	100	0	0	-	-	Faktor Penghambat : Belum tersusunnya aturan tentang industri
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Produksi IKM	Jumlah IKM yang naik produksinya	0	0	0	40	0	0	-	-	Faktor Penghambat : lokasi yang berupa kepulauan, beberapa ikm tidak memenuhi syarat
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Peralatan	Jumlah IKM yang mendapat bantuan	0	26	0	0	-	-	-	-	Faktor Penghambat : lokasi yang berupa kepulauan, beberapa ikm tidak memenuhi syarat
Sasaran Sub Kegiatan	Tersalurkannya Bantuan Bahan Baku	Jumlah IKM yang mendapat bantuan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Produk IKM	Jumlah Produk yang tersertifikasi	0	0	0	10	0	0	-	-	Faktor Penghambat : sarana yang tidak sesuai kapasitas dan kebutuhan
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Produk	Jumlah Produk yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Fasilitas Legalitas dan Paten Produk	Jumlah Produk yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Faktor Penghambat : kondisi perwilayahan industri yang terpencar dan tidak sesuai RIPIK
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya fasilitas teknologi dan peralatan	Jumlah IKM yang difasilitasi	0	100	0	0	0	0	-	-	Faktor Penghambat : kondisi perwilayahan industri yang terpencar dan tidak sesuai RIPIK
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemasaran Produk IKM	Persentase Produk yang dipasarkan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di kegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Meningkatnya Produk IKM yang dipasarkan melalui platform digital	Jumlah produk IKM	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya showroom produk IKM	Jumlah produk IKM yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Program	Meningkatnya Sebaran Perwilayahan Industri	Persentase Pertumbuhan Perwilayahan Industri	0	0	0	6.4	0	0	-	-	Faktor Penghambat : Belum tersusunnya aturan tentang industri

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	Jumlah Kawasan Industri yang dibangun	0	0	0	1	0	0	-	-	Faktor Penghambat : kondisi perwilayahan industri yang terpencar dan tidak sesuai RIPIK
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Lahan Kawasan Industri	Jumlah Lahan Peruntukan Industri	0	0	0	1	0	0	-	-	Faktor Penghambat : kondisi perwilayahan industri yang terpencar dan tidak sesuai RIPIK
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Perijinan	Jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembentukan Sentra Industri	Jumlah Sentra yang Dibentuk	0	2	0	0	0	0	-	-	Faktor Penghambat : lokasi yang berupa kepulauan, beberapa ikm tidak memenuhi syarat
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksanakannya Bantuan sarana dan prasarana sentra Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi	0	2	0	0	0	0	-	-	Faktor Penghambat : sarana yang tidak sesuai kapasitas dan kebutuhan
Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Kelembagaan Sentra	Jumlah sentra yang berbadan usaha	0	0	0	0	0	0	-	-	Pagu anggaran di subkegiatan belum tersedia

## 2.3 Tindak Lanjut

2.3.1 Tindak Lanjut Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

a) Akses Pemasaran dan permodalan

Akses Pemasaran yang lebih luas kepada UMKM dan IKM masih dibutuhkan mengingat banyaknya persyaratan dan sertifikasi pada produk yang dihasilkan. salah satunya berupa fasilitasi sertifikat halal dan Kerjasama dengan pelaku usaha ekspor. Selain itu juga sangat dibutuhkan akses permodalan yang bersifat kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah.

b) Keberadaan Sarana Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan yang ada kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada. Fasilitas yang ada kondisinya kurang layak dan tidak mencukupi. beberapa butuh pembangunan dan beberapa membutuhkan revitalisasi.

c) Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kualitas kelembagaan koperasi masih banyak yang tidak jelas bentuknya. baik dari jenis usahanya maupun keanggotaannya. akhirnya saat ini banyak terjadi penipuan yang berkedok koperasi dimana apabila sdh banyak memperoleh dana dari anggotanya mereka akan membubarkan diri.

d) Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Penting

Kabupaten Sumenep termasuk salah satu Kabupaten dengan angka inflasi yang tinggi yang disebabkan adanya disparitas harga yang terjadi di beberapa pasar. Hal ini membutuhkan pemantauan harga yang bersifat terus menerus dan disertai adanya intervensi dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan melalui operasi pasar.

e) Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)

Tingginya angka produksi rokok illegal di Kabupaten Sumenep menyebabkan kerugian pemerintah terhadap penerimaan negara dari pajak. Pembentukan KIHT adalah salah satu solusi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk mempermudah pengawasan terhadap industri-industri rokok illegal yang terintegrasi dengan Bea Cukai.

Sedangkan hambatan dan permasalahan internal yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Aparatur konsultasi lapangan di tingkat Kecamatan belum tersedia. Integritas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan. Mekanisme kerja antar unit organisasi belum bersinergi dengan baik. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait belum optimal. Sarana dan prasarana operasional organisasi masih terbatas. Jumlah Aparatur Sipil Negara secara kuantitas tidak mencukupi.

2.3.2 Tindak Lanjut sasaran strategis tahun 2021 - 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep adalah tentang capaian indikator kinerja melalui beberapa indikator :

- a) Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkatkan
- b) Persentase Koperasi yang Pendapatannya
- c) Persentase pertumbuhan sektor PDRB Industri pengolahan
- d) Persentase fluktuasi harga Bapokti
- e) Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran
- f) Persentase capaian kinerja PD



						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00			Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					8 Dokumen	8 Dokumen	806.700,00	677.900,00			677.900,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00				Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	5 Laporan	1.389.300,00	1.167.200,00			1.167.200,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	3.140.500,00	2.638.200,00			2.638.200,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun					8 Laporan	8 Laporan	8.323.289.367,00	8.458.186.167,00			7.807.996.194,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pegawai Lingkup Diskoperindag		13.491.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	8.307.294.967,00	8.443.491.667,00			7.793.301.694,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan			13.456.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN



2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																							
										2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00							Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																							
										2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00							Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.111.100,00	1.111.100,00			1.111.100,00						-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pegawai Lingkup Diskoperindag			22.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																							
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00							Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																							
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.111.100,00	1.111.100,00			1.111.100,00				Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang disediakan				90%	90%	41.000.000,00	41.000.000,00			31.000.000,00						-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pegawai Lingkup Diskoperindag			146.085.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																							
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00							Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan				6.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																														
																					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.557.200,00	7.557.200,00	10.651.000,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																														
																					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.740.300,00	5.740.300,00	5.740.300,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				2.393.249.804,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																														
																					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																														
																					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	51.095.536,00	63.983.686,00	63.983.686,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				561.224.136,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																														
																					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	18.713.500,00	18.713.500,00	18.713.500,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				39.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																														
																					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	22.612.000,00	22.612.000,00	38.612.000,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				29.282.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																														

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	216.648.000,00	216.648.000,00	271.630.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			415.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			41.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan				50 unit	50 unit	55.973.155,00	55.973.155,00	52.012.362,00			-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pegawai Lingkup Diskoperindag		2.550.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			49.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	55.973.155,00	55.973.155,00	52.012.362,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



2	17	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.034.268.170,00	2.034.268.170,00	2.034.268.170,00		Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan					760.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			46 unit	46 unit	293.563.755,00	293.563.755,00	316.890.723,00				-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pegawai Lingkup Diskoperindag				541.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan					60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				55 Unit	55 Unit	208.159.075,00	208.159.075,00	232.409,075,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan					245.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13.400.000,00	13.400.000,00	22.540.000,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan					15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2,09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																				
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	-		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan					6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	61.096.980,00	61.096.980,00	51.033.948,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																			
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi					650 Ha	650 Ha	10.907.700,00	10.907.700,00	10.907.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	2	17	2		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-					-	-	0,00	0,00	-							190.000.000,00		
						Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	-					Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0					Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

						Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa				21%	21%	50.942.000,00	50.942.000,00	50.942.000,00							310.070.314,00	
	2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	50.942.000,00	50.942.000,00	50.942.000,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Koperasi dan Masyarakat		310.070.314,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	3	2.01	3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																	
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.070.314,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				100 Unit Usaha	99 Unit Usaha	50.942.000,00	50.942.000,00	50.942.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat				7.00%	7.00%	49.058.000,00	49.057.800,00	49.057.800,00							697.381.249,00	
	2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	49.058.000,00	49.057.800,00	49.057.800,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Koperasi dan Masyarakat		697.381.249,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			670.881.249,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	4	2.01	3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																	

						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	96 Unit Usaha	49.058.000,00	49.057.800,00	49.057.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			26.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta yang Lulus Dengan Predikat Baik				85%	85%	0,00	0,00	-							55.198.980,00	
	2	17	5	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				200 orang	200 orang	0,00	0,00	-				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Koperasi dan Masyarakat		55.198.980,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.198.980,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi				6.00%	6.00%	725.000.000,00	725.000.000,00	1.249.999.932,00							802.682.880,00	
	2	17	6	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				2 Dok	2 Dok	725.000.000,00	725.000.000,00	1.249.999.932,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Koperasi dan Masyarakat		802.682.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	6	2.01	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																
						Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			76.682.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	6	2.01	4	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																

						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	224.999.932,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			81.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	725.000.000,00	725.000.000,00	1.025.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	6	2.01	6	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	6	2.01	7	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	6	2.01	8	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	6	2.01	9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
7	2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Difasilitasi Usahanya				8%	8%	59.999.700,00	59.999.700,00	304.999.500,00								1.777.326.530,00	

2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Pemberdayaan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			350 Unit Usaha	350 Unit Usaha	59.999.700,00	59.999.700,00		304.999.500,00							1.777.326.530,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	29.999.800,00	29.999.800,00		274.999.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						183.074.167,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00		0	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						163.818.906,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00		0	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						157.535.690,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			100 Orang	100 Orang	29.999.900,00	29.999.900,00		29.999.900,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						192.897.767,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	7	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																		
						Jumlah Usaha Mikro yang Terasiliasi			100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00		-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	8	Pemulihan Usaha Mikro																		

						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	9	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
						Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi					50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	10	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro																		
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	12	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah																		
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	13	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																		
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		

						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																			
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			480.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
8	2	17	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Dikembangkan Usahanya				5.50%	5.50%	1.970.723.893,00	1.970.723.723,00	2.090.582.922,00									844.000.000,00	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.970.723.893,00	1.970.723.723,00	2.090.582.922,00					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	UMKM dan Masyarakat			844.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2	17	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro																			
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	8	2.01	3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																			
						Jumlah yang Difasilitasi				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	8	2.01	4	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjangka																			
						Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				100 Lembaga	100 Lembaga	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			154.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	
2	17	8	2.01	5	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																			

						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN				
2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																							
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.970.723.893,00	1.970.723.723,00	2.090.582.922,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal		Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								8.897.356.022,00	5.772.527.622,00	7.715.374.106,00											23.778.427.092,00		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								920.000.000,00	1.320.000.000,00	1.887.480.767,00												18.483.478.835,00	
9	3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-					-	-	15.999.900,00	15.999.900,00	15.999.900,00										2.920.000.000,00			
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-					-	-	0,00	0,00	-						Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN			
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																							
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00				Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN			
3	30	2	2.01	2	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik																							
						Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik					2 laporan	2 laporan	0,00	0,00	0				Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN		
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-					-	-	15.999.900,00	15.999.900,00	15.999.900,00						Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN			

3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					2 Dokumen	2 Dokumen	15.999.900,00	15.999.900,00	15.999.900,00		Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri	-	-			-	-	0,00	0,00	0					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.03	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.03	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.03	3	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.03	4	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik					1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	30	2	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-	690.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	2	2.04	1	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri															
					Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep ,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.04	2	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri															
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep ,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.04	3	Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik															
					Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep ,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.04	4	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik															
					Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik					1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep ,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	2	2.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C															

							Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.05	2	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C																		
							Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0				-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Perusahaan		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.06	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
							Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMMK Berbasis Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3	30	2	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA															
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10	3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar				15%	15%	411.458.700,00	811.458.700,00	1.049.599.789,00				14.089.929.143,00		
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			47 Unit	47 Unit	411.458.700,00	811.458.700,00	1.049.599.789,00			Pedagan Pasar	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	13.789.929.143,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan															
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					2 Unit	2 Unit	209.992.000,00	609.992.000,00	808.133.089,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	13.239.929.143,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					45 Unit	45 Unit	201.466.700,00	201.466.700,00	241.466.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.01	3	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota															
					Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang					2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produk Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.01	4	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota															

						Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang				2 laporan	2 laporan	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-			2 dokumen	2 dokumen	0,00	0,00						Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pedagan Pasar		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11	3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Jumlah Bapokti Yang Harganya Stabi				85%	85%	92.571.720,00	92.571.720,00	92.571.520,00								230.388.432,00	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			36 Laporan	36 Laporan	24.505.920,00	24.505.920,00	24.505.920,00					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pedagan Pasar		80.388.432,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			30.388.432,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	24.505.920,00	24.505.920,00	24.505.920,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota				25 Laporan	25 Laporan	33.634.000,00	33.634.000,00	33.634.000,00					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pedagan Pasar		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	33.634.000,00	33.634.000,00	33634000		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum	Insentif Fiskal	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				8 Laporan	8 Laporan	34.431.800,00	34.431.800,00	34.431.600,00					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis	Agen/Distributor Pupuk		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





						Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
14	3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri			30%	30%	299.969.680,00	299.969.680,00	599.969.658,00							369.035.398,00			
	3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota			5 UMKM	5 UMKM	299.969.680,00	299.969.680,00	299.969.680,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Usaha		369.035.398,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	7	2.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	7	2.01	5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	299.969.680,00	299.969.680,00	599.969.658,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			149.035.398,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	7	2.01	6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				2 UMKM	2 UMKM	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						7.977.356.022,00	4.452.527.622,00	5.827.893.339,00										
15	3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Pembangunan Industri			100%	100%	7.977.356.022,00	4.452.527.622,00	5.827.893.339,00										
	3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota			8 Dok	8 Dok	7.977.356.022,00	4.452.527.622,00	5.827.893.339,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	IKM dan Masyarakat		4.472.948.257,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					2 Dokumen	2 Dokumen	5.247.364.716,00	2.747.364.716,00	3.719.229.501,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			332.948.257,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	475.171.600,00	482.092.450,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen	1.229.991.306,00	1.229.991.306,00	1.626.571.388,00	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-	Kab. Sumenep Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		

						Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0,00	0,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	2.01	8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																				
						Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	2.01	9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri																				
						Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri					2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	2.01	10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri																				
						Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri					0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	0,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
16	3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-					-	-	0,00	0,00										375.000.000,00	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-					-	-	0,00	0,00					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				375.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00		Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan				175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	



							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00			Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-- Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan an dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			100.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
J U M L A H													23.112.374.426,00	20.134.334.406,00	22.448.289.719,00						49.876.487.985,00				

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dan diperkirakan maju tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Awal OPD tahunan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang didalamnya mencakup penjabaran Visi. Misi. Tujuan. Sasaran. Kebijakan. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah. bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat. akurat. transparan dan adil.

Akhinya dengan segala kemampuan yang ada. Kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. semoga bermanfaat bagi kita semua. khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep. Agustus 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMENEP**



**MOH. RAMLI, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 198903 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DLH Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan DLH Kabupaten Sumenep ini dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada DLH Kabupaten Sumenep serta menjadi arahan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang oleh Pimpinan serta seluruh staf DLH Kabupaten Sumenep, yang akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja DLH Kabupaten Sumenep.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor lingkungan di Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUMENEP



**ARIE SUSANTO, AP., M.Si**

Penyumbang Muda

NIP. 19750831 199412 1 001



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I   PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Dokumen Renja Perubahan.....	5
BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH s/d TRIWULAN II TAHUN 2024	
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja DLH berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024	
BAB III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH.....	36
BAB IV   PENUTUP.....	50



---

# BAB I

---

## PENDAHULUAN

---

RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024  
DLH KABUPATEN SUMENEP

---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mempunyai Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berisi kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan Renstra DLH Kabupaten Sumenep 2021-2026, Dokumen RKPD, Renja Provinsi dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Perubahan Renja OPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilaksanakan berkaitan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya dan belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep,



sehingga terjadinya pergeseran anggaran, target kinerja serta perubahan kelompok sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep dilaksanakan berdasar pada Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang mengacu pada RKPD dan Renstra DLH Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis tentang lingkungan yang ada di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2024.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan DLH Kabupaten Sumenep untuk tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan DLH Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah menjadi arahan dan panduan bagi perencanaan program kegiatan DLH Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024
- b. Memberikan gambaran kinerja yang akan dilaksanakan dan target kinerja yang akan dicapai
- c. Meningkatkan kinerja penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* yang ditandai dengan peningkatan peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja ini diawali memperhatikan realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang selanjutnya mereview Renja Tahun 2023 dan 2024 dengan memperhatikan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Sumenep dan memperhatikan usulan pemangku kepentingan dari semua stake holder, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan DLH Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja ini terdiri dari beberapa bagian yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

.1.1 Latar Belakang

.1.2 Dasar Hukum

.1.3 Maksud dan Tujuan

.1.4 Sistematika Dokumen Renja Perubahan

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB IV PENUTUP



---

# BAB II

---

EVALUASI PELAKSANAAN  
RENJA DLH TAHUN 2024

---

RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024  
DLH KABUPATEN SUMENEP

---



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja DLH Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang terpenting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan yaitu :

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi.** Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.
- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.** Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- **Pengumpulan data.** Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- **Pengolahan dan analisis data.** Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan *gap*. Besar *gap* akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- **Pelaporan hasil evaluasi.** Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.



Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep didukung 10 Program 19 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi
  - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
- 3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3



- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan
- 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
  - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
  - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Uraian evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, termuat pada tabel 2.1. sebagaimana terlampir.



**TABEL 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realis asi Capai an Kinerj a Renstr a Peran gkat Daera h sampa i denga n Renja Peran gkat Daera h Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab								
					K	Rp			I	II	III	IV	9	10	11	12						13=9+10+11+12	14=13/8x100%	15=7+13	16=15/6x100%	17			
2																													
2																													
2																													
2	1	0																											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2																										



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

				2	1	0	2	00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								4 Dokumen	7.132.800	1	2.237.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	2.237.250	25,00%	31,37%	1 Dokumen	2.237.250				
				2	1	0	2	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4 Laporan	2.492.900	1	1.078.000	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	1.078.000	25,00%	43,24%	1 Laporan	1.078.000					
				2	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	5 laporan	50.994.721.809						1 laporan	10.466.769.761	1	1.699.901.879	0	0	0	0	0	0	1 laporan	1.699.901.879	100,00%	16,24%	1 laporan	1.699.901.879	20,00%	3,33%				
				2	1	0	2	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								115 Orang/bulan	10.453.861.561	100	1.695.620.879	0	0	0	0	0	0	100 Orang/bulan	1.695.620.879	86,96%	16,22%	100 Orang/bulan	1.695.620.879						
				2	1	0	2	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								1 Laporan	1.256.100	1	660.000	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	660.000	100,00%	52,54%	1 Laporan	660.000						
				2	1	0	2	00	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								12 Laporan	7.928.500	3	1.980.000	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	1.980.000	25,00%	24,97%	3 Laporan	1.980.000						
				2	1	0	2	00	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								1 Dokumen	3.723.600	1	1.641.000	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.641.000	100,00%	44,07%	1 Dokumen	1.641.000						



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

					2	1	0	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	5 laporan	367.800.574								1 laporan	56.555.800	1	50.741.627	0	0	0	0	0	0	0	0	1 laporan	50.741.627	100,00%	89,72%	1 laporan	50.741.627	20,00%	13,80%		
					2	1	0	2	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	50 Dokumen	44.315.800	12	4.813.000	0	0	0	0	0	0	0	12 Dokumen	4.813.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Dokumen	4.813.000	24,00%	10,86%	12 Dokumen	4.813.000				
					2	1	0	2	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.240.000	1	45.928.627	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	45.928.627	100,00%	375,23%	1 Dokumen	45.928.627					1 Dokumen	45.928.627								
					2	1	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0											30.832.820	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0,00%	0	0		0,00%			
					2	1	0	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2	1	0	2	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	100 Orang	13.832.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2	1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	500 jenis	1.171.10.532	30	67.163.072	0	0	0	0	0	0	0	30 jenis	67.163.072	30,00%	18,38%	30 jenis	67.163.072	6,00%	5,73%												
					2	1	0	2	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	13.381.000	2	1.800.000	0	0	0	0	0	0	2 Paket	1.800.000	20,00%	13,45%	2 Paket	1.800.000					2 Paket	1.800.000									
					2	1	0	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27.955.300	2	5.592.000	0	0	0	0	0	0	2 Paket	5.592.000	20,00%	20,00%	2 Paket	5.592.000					2 Paket	5.592.000									
					2	1	0	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

			2	1	0	2	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	29.650.000	2	6.292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Paket	6.292.000	20,00%	21,22%	2 Paket	6.292.000				
			2	1	0	2	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	16.173.600	2	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Paket	4.000.000	20,00%	24,73%	2 Paket	4.000.000				
			2	1	0	2	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					15 Dokumen	51.560.000	2	5.124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	5.124.000	13,33%	9,94%	2 Dokumen	5.124.000				
			2	1	0	2	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	213.655.710	20	44.355.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 Laporan	44.355.072	20,00%	20,76%	20 Laporan	44.355.072				
			2	1	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan	90%	120.953.857			90%	78.321.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0,00%	0,00%	0%	0	0,00%	0,00%			
			2	1	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	78.321.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0,00%	0,00%	0 Unit	0					
			2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan	90%	2.343.161.217			90%	612.132.831	25	482.725.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%	482.725.828	27,78%	78,86%	25%	482.725.828	27,78%	20,60%			
			2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	324.132.831	9	242.725.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 Laporan	242.725.828	25,00%	74,88%	9 Laporan	242.725.828					



## RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

		2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	288.000.000	3	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3	240.000.000	25,00%	83,33%	3	240.000.000					
		2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	90%	1.081.123.724		90%	265.783.575	27	76.009.430	0	0	0	0	0	0	27%	76.009.430	30,00%	28,60%	27%	76.009.430	30,00%	7,03%				
		2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20	178.864.975	5	47.073.430	0	0	0	0	0	0	5	47.073.430	25,00%	26,32%	5	47.073.430						
		2	1	0	2	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10	36.918.600	3	12.302.000	0	0	0	0	0	0	3	12.302.000	30,00%	33,32%	3	12.302.000						
		2	1	0	2	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10	50.000.000	1	16.634.000	0	0	0	0	0	0	1	16.634.000	10,00%	33,27%	1	16.634.000						
		2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Air	85,5%	3.171.083.374		79,2%	6.009.813.270	22,12	656.864.452	0	0	0	0	0	0	22,12%	656.864.452	27,93%	10,93%	22,12%	656.864.452	25,87%	20,71%			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	1	0	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90%	2.356.972.094		85,95%	945.855.250	21	140.605.498	0	0	0	0	0	0	21%	140.605.498	24,43%	14,87%	21%	140.605.498	23,33%	5,97%				



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022**

	2	1	0		00	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		10 Titik	4.468.378.020	2	424.631.875	0	0	0	0	0	0	0	2 Titik	424.631.875	20,00%	9,50%	2 Titik	424.631.875			
	2	1	0	2		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	76%	814.111.280	73,6%	183.602.900	20	63.969.879	0	0	0	0	0	0	20%	63.969.879	27,17%	34,84%	20%	63.969.879	26,32%	7,86%	
	2	1	0	2	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		10 Dokumen	16.927.600	0	42.522.629	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	42.522.629	0,00%	251,20%	0 Dokumen	42.522.629			
	2	1	0	2	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		50 Kegiatan	166.675.300	12	21.447.250	0	0	0	0	0	0	0	12 Kegiatan	21.447.250	24,00%	12,87%	12 Kegiatan	21.447.250			
	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	100%	572.963.723	58,3%	4.917.337.910	22	856.412.312	0	0	0	0	0	0	22%	856.412.312	37,74%	17,42%	22%	856.412.312	22,00%	149,47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen penyimpanan sementara limbah B3	5 Laporan	0	1 Laporan	523.932.900	0	64.122.627	0	0	0	0	0	0	0 Laporan	64.122.627	0,00%	12,24%	0 Laporan	64.122.627	0,00%	0,00%	







## RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

2	1	0	2	00	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	35 Doku men	136.801.140	5	90.579.180	0	0	0	0	0	0	0	5 Doku men	90.579.180	14,29%	66,21%	5 Doku men	90.579.180						
2	1	0	2	00	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	10 Orang	25.790.400	5	7.834.000	0	0	0	0	0	0	0	5 Orang	7.834.000	50,00%	30,38%	5 Orang	7.834.000						
2	1	0	2	00	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	57 Lembaga	315.387.350	13	75.542.725	0	0	0	0	0	0	0	13 Lembaga	75.542.725	22,81%	23,95%	13 Lembaga	75.542.725						
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																			27,67%	17,46%										
<b>Predikat kinerja</b>																			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>										



---

# BAB III

---

RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN DLH  
TAHUN 2024

---

RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024  
DLH KABUPATEN SUMENEP

---



### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action) karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

Berikut Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	<b>11.665.913.645</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	<b>9.625.700</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	7.132.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.492.900
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 laporan	<b>10.230.687.640</b>



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	115 orang	10.217.779.440
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.256.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	7.928.500
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	3.723.600
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	1 laporan	<b>56.555.800</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	50 Dokumen	44.315.800
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	12.240.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	<b>30.832.820</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	17.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	13.832.820
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	1 laporan	<b>365.473.610</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	10 paket	13.381.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 paket	27.955.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.098.000



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	10 paket	29.650.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 paket	16.173.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	15 dokumen	51.560.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 laporan	213.655.710
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan	1 laporan	<b>94.821.669</b>
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		16.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	78.321.669
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	1 laporan	<b>612.132.831</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	36 laporan	324.132.831
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsourcing yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	12 laporan	288.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	1 laporan	<b>265.783.575</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	20 unit	178.864.975
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	36.918.600



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	50.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Pemenuhan standart Kualitas Air  Persentase Pemenuhan Standart Kualitas Udara  Persentase Pemenuhan Standart Kualitas Lahan	83 %	<b>8.827.755.270</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 laporan	<b>945.855.250</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pemantauan sampel media tanah, air, udara dan laut	36 dokumen	302.643.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	127.962.100
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan sampel pada titik penataan kegiatan industri/usaha	400 dokumen	515.249.650
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 laporan	<b>7.698.297.120</b>
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah media informasi yang terpasang	27 laporan	150.807.700
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	4 Lokasi	261.169.400



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	13 titik	7.286.320.020
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 laporan	<b>183.602.900</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan / atau Provinsi dan / atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	25 dokumen	16.927.600
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	50 Kegiatan	166.675.300
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola	37.5 %	<b>8.587.276.910</b>
<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Jumlah dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 laporan	<b>523.932.900</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	475.000.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi dalam penyusunan Izin PPLH	10 laporan	48.932.900
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	<b>8.063.344.010</b>



Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	3.924.321.210
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dokumen	4.139.022.800
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	15 kelompok	<b>477.978.890</b>
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 laporan	<b>477.978.890</b>
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	35 Dokumen	136.801.140
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	36 Orang	25.790.400



RENCANA KERJA PERUBAHAN DLH TAHUN 2022

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	57 Lembaga	315.387.350
---	---	------------	-------------



---

# BAB IV

---

## P E N U T U P

---

RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024  
DLH KABUPATEN SUMENEP

---



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan DLH Kabupaten Sumenep tahun 2024 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan, dimana Rencana Kerja ini digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.

Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya mencakup Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan
2. Upaya Peningkatan Pengelolaan Bidang Persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Upaya Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini bertujuan menjadi pedoman kepada seluruh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan serta tetap mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan, adil dan akuntabel. Diharapkan pelaksanaan program kegiatan nantinya sesuai dengan perencanaan dan program kegiatan yang telah dibuat dan selanjutnya dapat dievaluasi serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

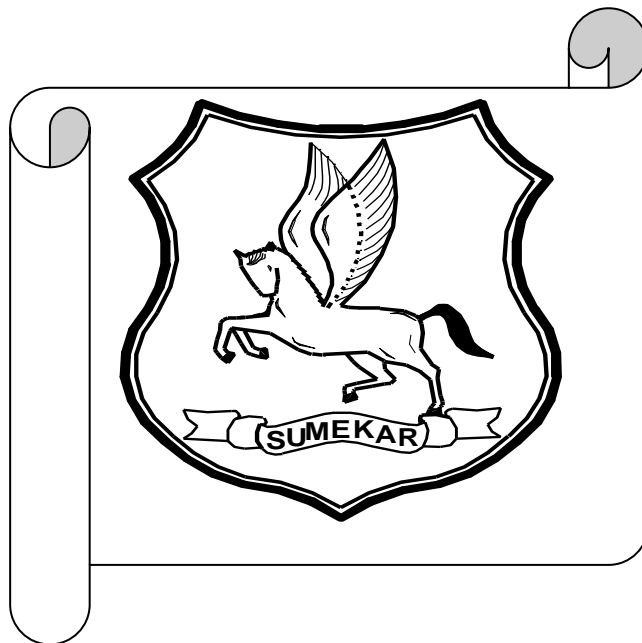


**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUMENEP**

Jl. KH. Mansyur No. 25 Pangarangan Sumenep  
Telp/Fax (0328) 662779  
Email : dlhkabsumenep@gmail.com



# **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMENEP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Ser E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2024);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep;

27. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 33 Tahun 2024).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan dengan kondisi pasca pandemi saat ini yang sudah dilakukan penghapusan oleh Pemerintah, akan tetapi Renja Perubahan disusun untuk merumuskan rencana kerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang perlu dilakukan penyesuaian.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Dasar Hukum Penyusunan
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB. II	:	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II 2024
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024
		2.2 Faktor Pendorong Kinerja Program/Kegiatan
		2.3 Faktor Penghambat Kinerja Program/Kegiatan
		2.4 Tindaklanjut atas Evaluasi Program/Kegiatan
BAB. III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
		3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran
BAB. IV	:	PENUTUP



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) 2024**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024**

Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II 2024**

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								K	Rp	K	Rp	K		Rp		I		II							K	Rp
1	2	3				4	5	6		7		8				9				10		13=9+10+11+12	14=13/8x100 %	15=7+13	16=15/6x100%	17
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
1	Meningkat nya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2	18	01		PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KOT A	Persent ase terpenu hinya kebutuh an sarana dan prasara na kantor	20	39.83 6.384. 605			20	5.734.752.7 90	16, 25	847.414. 349	3,7 5	1.678.56 2.389	20	2.525.97 6.738	100	44,05	20	2.525.97 6.738	100	6,34	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		2	18	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggulangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun						12 Do ku me n	2.808.200	2	1.863.700	2	903.000	4	2.766.700	33,33	98,52	4	2.766.700	6,67	0,40
		2	18	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Do ku me n	1.680.000	3	1.318.700	0	320.000	3	1.638.700	100	97,54	3	1.638.700		
		2	18	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2 Do ku me n	545.000	2	545.000	0	0	2	545.000	100	100,00	2	545.000		
		2	18	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4 Lap ora n	583.200	0	0	4	583.000	4	583.000	100	99,97	4	583.000		
		2	18	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	60 Lap ora n	25.383.351.983				12 Lap ora n	4.806.848.379	3	691.072.107	3	1.449.181.122	6	2.140.253.229	50	44,53	6	2.140.253.229	10,00	8,43

							<i>yang disusun</i>																			
		2	18	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ bulan	4.806.848.379	36	691.072.107	0	1.449.181.122	36	2.140.253.229	90	44,53	36	2.140.253.229			
		2	18	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	507 Unit	4.246.933.841		50 Unit	123.839.600	6	26.083.900	6	15.101.500	12	41.185.400	24	33,26	12	41.185.400	2,3 7	0,97	
		2	18	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				26 Paket	3.179.600	13	1.157.000	3	431.000	16	1.588.000	61,54	49,94	16	1.588.000			
		2	18	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.136.500	3	704.400	3	712.200	6	1.416.600	50	45,16	6	1.416.600			
		2	18	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.209.800	1	507.500	3	4.523.500	4	5.031.000	33,33	12,51	4	5.031.000			
		2	18	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6.449.200	2	2.162.000	1	201.000	3	2.363.000	8,33	36,64	3	2.363.000			

		2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan					365 Dokumen	4.536.000	91	780.000	91	880.000	182	1.660.000	49,86	36,60	182	1.660.000			
		2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					131 Laporan	52.172.000	9	20.773.000	45	8.353.800	54	29.126.800	41,22	55,83	54	29.126.800			
		2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4 Dokumen	14.156.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0			
		2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	382 unit	2.655.606.861			78 unit	69.341.145	0	0	8	68.842.905	8	68.842.905	10,26	99,28	8	68.842.905	2,09	2,59	
		2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 unit	69.341.145	0	0	8	68.842.905	8	68.842.905	100	99,28	8	68.842.905			
		2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	15 Layanan	3.651.073.973			3 Layanan	521.011.412	2	120.183.897	1	89.909.034	3	210.092.931	100,00	40,32	3	210.092.931	20,00	5,75	
		2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4111 Laporan	1.814.000	0	0	490	597.000	490	597.000	11,9192411	32,91	490	597.000			

		2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	233.561.712	3	48.775.017	3	41.706.114	6	90.481.131	50	38,74	6	90.481.131		
		2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	285.635.700	3	71.408.880	3	47.605.920	6	119.014.800	50	41,67	6	119.014.800		
		2	18	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis barang yang dipelihara</i>	100	2.407.970.877			5 jenis	210.904.054	2	8.210.745	3	54.624.828	5	62.835.573	100	29,79	5	62.835.573	5	2,61
		2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					37 Unit	45.910.000	2	5.158.484	2	11.565.783	4	16.724.267	10,81	36,43	4	16.724.267		
		2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					64 Unit	19.080.000	11	3.052.261	20	3.830.000	31	6.882.261	48,44	36,07	31	6.882.261		
		2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	145.914.054	0	0	2	39.229.045	2	39.229.045	100	26,89	2	39.229.045		

2	Meningkatnya Iklim Investasi	2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	3,85	1.467.131.066			3,73%	150.004.000	1,27	6.437.200	0,92	5.712.450	2,19	12.149.650	59,67	8,10	2,1900	12.149.650	56,88	0,83	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
		2	18	03	2.01		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Media Promosi Penanaman Modal</i>	25 Media	1.467.131.066			5 Media	150.004.000	0	6.437.200	0	5.712.450	0	12.149.650	0	8,10	0	12.149.650	0,00	0,83		
		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					2 Dokumen	150.004.000	0	6.437.200	0	5.712.450	0	12.149.650	0	8,10	0	12.149.650				
3	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>	3,85	4.000.346.909			3,73%	259.725.582	1,27	6.178.700	0,92	28.857.500	2,19	35.036.200	59,67	13,49	2	35.036.200	56,88	0,88	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
		2	18	04	2.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	37814 NIB	4.000.346.909			6400 NIB	259.725.582	11018	6.178.700	2036	28.857.500	13,054	35.036.200	203,97	13,49	13,054	35.036.200	34,522	0,88		

		2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					2000	Pelaku Usaha	144.314.800	11018	5.090.700	2036	26.504.000	13.054	31.594.700	652,70	21,89	13.054	31.594.700		
		2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					12	pelaku usaha	15.410.900	2	1.088.000	2	2.353.500	4	3.441.500	33,33	22,33	4	3.441.500		
		2	18	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota					27	kegiatan usaha	99.999.882	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0		

							bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha																					
4	Meningkatnya penerbitan layanan yang lebih cepat dan tepat	2	18	05			PROGRAM PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha berizin yang Beroperasi Sesuai dengan Izin Usaha	31856PelakuUsaha	1.607.413.661			6400PelakuUsaha	607.892.506	11018	17.269.445	2036	51.873.732	13.054	69.143.177	203,97	11,37	13.054	69.143.177	40,98	4,30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan	31856PelakuUsaha	1.607.413.661			6400PelakuUsaha	607.892.506	11018	17.269.445	2036	51.873.732	13.054	69.143.177	203,97	11,37	13.054	69.143.177	40,98	4,30		
		2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9KegiatanUsaha	72.688.196	2	5.517.650	1	0	3	5.517.650	33,33	7,59	3	5.517.650								

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko												287 Pelaku Usaha	308.015.510	0	6.958.995	0	26.032.632	0	32.991.627	0,00	10,71	0	32.991.627						
		2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																													
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha													17 Kegiatan Usaha	227.188.800	2	4.792.800	2	25.841.100	4	30.633.900	23,53	13,48	4	30.633.900					
		2	18	05	2.01	03	Pengawasan Penanaman Modal																													
																					6.752.374.878					2.642.305.765	39,13									

## **2.2. Faktor Pendorong Kinerja pada Program/Kegiatan, sebagai berikut :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyediaan anggaran rutin sesuai dengan anggaran kas
  - b. Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah bersifat penyediaan sehingga disesuaikan dengan kebutuhan
2. Program Promosi Penanaman Modal
  - a. Pelaksanaan kegiatan sumenep investment summit (SIS) pada bulan September sesuai dengan kalender event sumenep 2024.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Tersedianya anggaran peningkatan digitalisasi system online dan website dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis risiko terintegrasi.
4. Program Pengendalian Penanaman Modal
  - a. Penyediaan anggaran sesuai dengan anggaran kas
  - b. Perencanaan kegiatan telah disusun sesuai dengan kondisi saat ini.

## **2.3. Faktor Penghambat Kinerja pada Program/Kegiatan, sebagai berikut :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pada kegiatan administrasi umum, terdapat sub kegiatan yang pelaksanaannya masih di semester II dan juga terdapat sub kegiatan yang akan dilakukan perubahan/pergeseran anggaran pada Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) disesuaikan dengan kondisi saat ini.
2. Program Promosi Penanaman Modal
  - a. Penyusunan I-PRO masih tahap pengumpulan dokumen dan survey lokasi bersama pihak ketiga untuk penentuan locus I-PRO sebagai bahan promosi investasi pada pelaksanaan SIS.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Terdapat sub kegiatan yang baru direncanakan pada anggaran mendahului, yaitu sub kegiatan pemantauan.
  - b. Sub kegiatan penyediaan pelayanan perizinan terdapat belanja digitalisasi system terintegrasi masih belum dilakukan penentuan penyedia.
4. Program Pengendalian Penanaman Modal
  - a. Masih belum terdapat data hasil identifikasi pelaku usaha/investor yang mengalami permasalahan terhadap kegiatan usahanya.

- b. Pelaksanaan pengawasan pelaporan LKPM masih belum maksimal, karena pelaku usaha kecil kurang menjadi perhatian.

#### **2.4. Tindaklanjut atas Evaluasi Program/Kegiatan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Program penunjang urusan pemerintah, dimana program tersebut merupakan penunjang program prioritas OPD telah mendongkrak realisasi anggaran OPD, dan telah sesuai rencana kegiatan dan bersifat penyediaan serta akan dilakukan percepatan realisasi terhadap kegiatan penyediaan.
2. Program Promosi Penanaman Modal
  - a. Program Promosi penanaman modal, penyusunan I-PRO sebagai pilot project sector investasi sedang melakukan identifikasi dan survey lokasi sehingga hasil I-PRO tersebut akan disampaikan pada saat Sumenep Investment Summit (SIS) pada minggu kedua bulan September 2024.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Program pelayanan penanaman modal, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan digitalisasi system terintegrasi dan peningkatan website DPMPTSP dengan melihat kualifikasi dan menunjuk pihak ketiga yang berkompeten dibidangnya.
4. Program Pengendalian Penanaman Modal
  - a. Program pengendalian penanaman modal, pengendalian dan pengawasan penanaman modal terhadap pelaporan LKPM tidak hanya berfokus pada pelaku usaha non UMK tapi untuk juga UMK guna mendongkrak peningkatan pelaporan LKPM setiap bulannya, serta identifikasi dan analisis pelaku usaha terhadap kegiatan usahanya



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN**  
**PERANGKAT DAERAH 2024**

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2024 mengalami perubahan menyesuaikan kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan Program Prioritas OPD dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dengan melakukan pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan yang pada tahun ini diperkirakan tidak akan dilaksanakan dikarenakan tidak akan memenuhi target pada tahun ini, hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

**Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
																					16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									5.415.623.508,00	6.130.692.414,00	6.925.783.349,00	1.510.159.841,00						42.137.626.887,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.415.623.508,00	6.130.692.414,00	6.925.783.349,00	1.510.159.841,00						41.945.996.516,00		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								5.415.623.508,00	6.130.692.414,00	6.925.783.349,00	1.510.159.841,00						19.526.314.969,00		

1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				20 %	20 %	5.156.045.508,00	5.213.070.208,00	5.888.164.561,00	732.119.053,00						16.986.549.128,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	3.021.500,00	2.808.200,00	2.808.200,00	213.300,00		-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	ASN DPMPPT SP dan Tenaga Kerja		167.727.249,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan		29.282.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																	wirausaha wan muda				
2.18.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				4 Dokumen	2 Dokumen	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda		14.641.000 .00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2.18.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>			4 Laporan	4 Laporan	796.500,00	583.200,00	583.200,00	- 213.300,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			6.676.249,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	4.177.183.797,00	4.285.165.797,00	4.695.004.462,00	517.820.665,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda	ASN DPMPT SP dan Tenaga Kerja	13.562.127.053,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.177.183.797,00	4.285.165.797,00	4.695.004.462,00	517.820.665,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda		13.547.486.053,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>			12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda		14.641.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>			5 Layanan	5 Layanan	0,00	0,00	36.230.400,00	36.230.400,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	ASN DPMPPT SP dan Tenaga Kerja	284.673.279,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			10.248.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	71 Paket	0,00	0,00	36.230.400,00	36.230.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			207.029.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda			21.961.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda			30.792.951,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			32 Orang	32 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda		14.641.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			50 Unit	50 Unit	124.583.600,00	123.839.600,00	156.225.400,00	31.641.800,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda	ASN DPMPPT SP dan Tenaga Kerja	944.864.532,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	3.179.600, 00	3.179.600, 00	5.209.200, 00	2.029.600, 00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda			26.207.453 ,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.136.500, 00	3.136.500, 00	3.376.500, 00	240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda			128.185.77 5,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	40.209.800,00	40.209.800,00	58.372.400,00	18.162.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			267.402.903,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	6.449.200,00	6.449.200,00	6.483.400,00	34.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			28.105.224,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365Dokumen	365Dokumen	5.280.000,00	4.536.000,00	4.536.000,00	-744.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			146.792.716,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				131 Laporan	131 Laporan	52.172.000,00	52.172.000,00	64.112.000,00	11.940.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			221.154.208,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	14.156.500,00	14.156.500,00	14.135.900,00	-20.600,00	Kab. Sumenep, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda		127.016.253,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan			76 Unit	76 Unit	69.341.145,00	69.341.145,00	284.433.393,00	215.092.248,00				-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Sarana dan Prasarana ASN DPMPPT SP dan Tenaga Kerja	604.542.895,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	37.573.500 ,00	37.573.500 ,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda			275.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				67 Unit	67 Unit	0,00	0,00	24.574.734 ,00	24.574.734 ,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda			202.157.78 6,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	8 Unit	69.341.145,00	69.341.145,00	222.285,159,00	152.944,014,00	Kab. Sumenep, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda		127.385,109,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan			3 Layanan	3 Layanan	521.011.412,00	521.011.412,00	558.720,332,00	37.708,920,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Sarana dan Prasarana ASN DPMPPT SP dan Tenaga Kerja	835.193,289,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4111 Laporan	4111 Laporan	1.814.000, 00	1.814.000, 00	2.215.400, 00	401.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda		5.753.159, 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	233.561.71 2,00	233.561.71 2,00	233.561.71 2,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirausaha wan muda		423.957.55 3,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	285.635.70 0,00	285.635.70 0,00	322.943.22 0,00	37.307.520 ,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda		405.482.57 7,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang dipelihara			7 jenis	5 jenis	260.904.05 4,00	210.904.05 4,00	154.742.37 4,00	- 106.161.68 0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Sarana dan Prasarana ASN DPMPPT SP dan Tenaga Kerja	587.420.83 1,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				37 Unit	37 Unit	45.910.000,00	45.910.000,00	61.354.000,00	15.444.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda			174.411.791,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				87 Unit	87 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda			40.241.338,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	19.080.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			47.056.760,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	195.914.054,00	145.914.054,00	74.308.374,00	-121.605.680,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			325.710.942,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal				10 %	10 %	0,00	0,00	0,00	0,00						380.038.32 0,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00		-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda	Pelaku Usaha di Kabupaten Sumenep		146.410.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda		73.205.000 ,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																			n keterampil an wirusaha wan muda
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirusaha wan muda Penguatan Kompeten si tenaga kerja dan akses terhadap kesempata n kerja serta peningkata n keterampil an wirusaha wan muda			73.205.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Potensi dan Peluang Usaha				4 Potensi dan Peluang Usaha	4 Potensi dan Peluang Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Pelaku Usaha di Kabupaten Sumenep	233.628.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda		73.205.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda		160.423.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor			3,67 %	3,67 %	150.004.000,00	150.004.000,00	150.004.000,00	0,00						264.531.099,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal			5 Media	5 Media	150.004.000,00	150.004.000,00	150.004.000,00	0,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda	Pelaku Usaha/Investor di Kabupaten Sumenep	264.531.099,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	150.004.00 0,00	150.004.00 0,00	150.004.00 0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda			183.003.86 2,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda			81.527.237 ,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)			3,67 %	3,67 %	109.574.00 0,00	159.725.70 0,00	259.725.58 2,00	150.151.58 2,00						1.443.481. 060,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan			6400 NIB	6400 NIB	109.574.00 0,00	159.725.70 0,00	259.725.58 2,00	150.151.58 2,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda	Masyarakat/Pe-laku Usaha di Kabupa-ten Sumenep		1.443.481. 060,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda			36.602.500 ,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																		wirusaha wan muda				
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	100.323.100,00	150.474.800,00	144.314.800,00	43.991.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda			1.331.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																				
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	9.250.900,00	9.250.900,00	15.410.900,00	6.160.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha wan muda			9.290.227,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

																serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda				
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				27 Kegiatan Usaha	27 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	99.999.882,00	99.999.882,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahaan muda			66.588.333,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Pelaku Usaha Berizin yang Beroperasi sesuai Izin Usahnya				90 Prosentase	90 Prosentase	0,00	607.892.506,00	607.892.506,00	607.892.506,00							416.376.424,00	

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Yang Beroperasi Sesuai Dengan Izin Yang Diterbitkan				6400Pelaku Usaha	6400Pelaku Usaha	0,00	607.892.506,00	607.892.506,00	607.892.506,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Masyarakat/Pe-laku Usaha di Kabupaten Sumenep	416.376.424,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	0,00	72.688.196,00	72.688.196,00	72.688.196,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda		81.527.237,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	

			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				287 Pelaku Usaha	287 Pelaku Usaha	0,00	308.015.51 0,00	308.015.51 0,00	308.015.51 0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			183.003.86 2,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.000 6	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				17 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	0,00	227.188.80 0,00	227.188.80 0,00	227.188.80 0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausaha muda			151.845.32 5,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				89,00 %	89,00 %	0,00	0,00	19.996.700,00	19.996.700,00						35.338.938,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu				100 %	100 %	0,00	0,00	19.996.700,00	19.996.700,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda	Masyarakat/Pe-laku Usaha di Kabupaten Sumenep		35.338.938,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	19.996.700,00	19.996.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan kewirausahaan muda			35.338.938,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															wirausaha wan muda				
	JUMLAH								5.415.623. 508,00	6.130.692. 414,00	6.925.783. 349,00	1.510.159. 841,00					42.137.626 .887,00		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perubahan SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA Perubahan SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyesuaikan situasi dan kondisi terkini saat ini. RENJA Perubahan juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA Perubahan sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

3. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan.
4. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sumenep, Agustus 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMENEP



**Dr. R. ABD. RAHMAN RIYADI, SE., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jl. Dr. Soetomo No. 03 Pajagalan Kec. Kota Sumenep Telp. (0328) 662133  
Email : dinas.pudantataruang.sumenep@gmail.com, Website: dinasputr.com



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA PERUBAHAN)

**2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 343. Kami sadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini masih kurang sempurna, maka sikap aditif dan responsif serta kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini.

Diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan Infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang.

Sumenep, Juni 2024

KEPALA DINAS PU. DAN TATA RUANG  
KABUPATEN SUMENEP



## DAFTAR ISI RENJA PERUBAHAN SKPD 2024

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Dokumen Renja Perubahan.....	5
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	 6
2.1 Faktor Pendorong.....	7
2.2 Faktor Penghambat.....	8
2.3 Tindak Lanjut.....	8
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	10
BAB IV : PENUTUP .....	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Kebijakan system pembangunan harus berjalan secara selaras dan saling mendukung

Untuk melaksanakan amanat tersebut agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar perencanaan pembangunan satu tahun. Adapun SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Renja Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2024. yang berisikan kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan umum dan tata ruang dan perencanaan serta kegiatan-kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470).
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja SKPD ini disusun untuk pedoman dan informasi bagi pengambil keputusan melalui landasan yang kuat dan sistematis dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sumenep dan membuat komitmen pada Program Prioritas yang bersifat lintas bidang.

Perubahan Renja SKPD juga bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketepatan, dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024, sehingga sasarannya lebih kearah pengendalian kegiatan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

Perubahan renja Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangkapendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran

#### **1.4. Sistematika Dokumen Renja Perubahan**

Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I       PENDAHULUAN**

1.1       Latar Belakang

1.2       Dasar Hukum

1.3       Maksud dan Tujuan

1.4       Sistematika Dokumen Renja Perubahan

**BAB II       EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN 2024**

**BAB III      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB IV      PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **TAHUN BERKENAAN**

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep adalah :

- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepulauan yang Merata.

- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepulauan yang Merata.
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepulauan yang Merata.
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepulauan yang Merata.
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata.
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata.
- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Tersedianya Dokumen Penataan Ruang.

Adapun indikator kinerja/keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

## **2.1 Faktor Pendorong**

Faktor-faktor yang mendorong pelayanan Dinas PUTR Kabupaten Sumenep terhadap pencapaian visi, misi dan program Bapak Bupati adalah sebagai berikut sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu :

- a. Telah terbitnya Perda Kab. Sumenep No. 8 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Sumenep 2023 – 2043, sebagai kepastian hukum sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sumenep,
- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,
- c. Rencana Strategis Dinas PUTR Kabupaten Sumenep 2021-2026,

- d. Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas PUTR Kabupaten Sumenep,
- e. Ketersediaan Sumber Daya Dinas PUTR Kabupaten Sumenep.

## 2.2 Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat pada pencapaian visi, misi dan program Bapak Bupati adalah sebagai berikut sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu :

- a. Terbatasnya kemampuan anggaran,
- b. Banyaknya aspirasi/ daftar usulan untuk lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur,
- c. Kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan,
- a. Kondisi Infrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang belum mantap di beberapa lokasi.

## 2.3 Tindak Lanjut

Untuk menanggulangi hal yang menghambat pada pencapaian visi, misi dan program Bapak Bupati pada Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas PUTR Kabupaten Sumenep ini kami menyusun arah kebijakan untuk mengatasinya sebagaimana berikut (tabel arah kebijakan).

Tujuan	2024	Sasaran	Strategi	2024	Arah Kebijakan	2024
	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata			75,00%		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata

		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung	76,69%	Melaksanakan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas	93,42%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	63,38%	Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengawasan untuk peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	63,38%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepulauan yang Merata	5,74%	Melaksanakan Penyediaan Air Minum di wilayah dengan isu Kekeringan, Stunting dan Kemiskinan.	5,74%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepulauan yang Merata	93,00%	Melaksanakan Penyediaan Infrastruktur Sistem Drainase di wilayah perkotaan	93,00%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepulauan yang Merata	62,46%	Melaksanakan penyediaan infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepulauan yang Merata	71,96%
		Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Merumuskan dan menyusun Dokumen Tata Ruang	28,57%	Menyusun Dokumen Tata Ruang (RRTR) dengan prioritas Untuk Kecamatan di daerah pusat pemerintahan	28,57%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepulauan yang Merata	peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepulauan yang Merata	52,64%	Melaksanakan Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepulauan yang Merata	52,64%

**BAB III****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Adapun Kegiatan lanjutan dan Perubahan Anggaran untuk Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut (terlampir)

**USULAN RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024**

No	Kode					Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ berkurang
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	2					3	4		5		6
							K	Rp	K	Rp	
2						URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	#					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	0	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>100</b>	<b>19.099.286.297</b>	<b>100</b>	<b>19.253.341.496</b>	
1	0	0	2,0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	100	6.732.300	100	5.832.300	
1	0	0	2,0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1.219.700	1	1.219.700	
1	0	0	2,0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	843.300	1	843.300	
1	0	0	2,0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	843.300	1	543.300	
1	0	0	2,0	0		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	843.300	1	543.300	

1	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	843.300	1	543.300
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	919.700	1	919.700
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1.219.700	1	1.219.700
1	03	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14.915.720.559</b>	<b>100%</b>	<b>15.125.597.489</b>
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14.911.984.459	14	15.121.861.389
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.025.800	1	1.025.800
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	1.910.600	18	1.910.600
1	03	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	799.700	12	799.700
1	03	01	2,03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.162.400</b>	<b>100</b>	<b>2.162.400</b>
1	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	618.800	1	618.800
1	03	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.543.600	1	1.543.600
1	03	01	2,04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.429.000</b>	<b>100</b>	<b>1.429.000</b>
1	03	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1.429.000	1	1.429.000
1	03	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>61.515.700</b>	<b>100</b>	<b>64.039.700</b>

1	03	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	807.900	1	807.900
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
1	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	2.335.800	1	2.335.800
1	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	58.372.000	10	60.896.000
1	03	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.299.866.790</b>	<b>100</b>	<b>2.309.831.270</b>
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	11.115.651	1	20.457.855
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1.339.438.322	1	1.339.361.066
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	143.132.417	1	153.408.891
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	47.197.200	1	33.441.858
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	158.340.000	20	156.970.400
1	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	24.000.000	1	14.400.000
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	575.828.000	1	590.976.000
1	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	815.200	1	815.200
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>46.374.690</b>	<b>100</b>	<b>300.829.425</b>
1	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel				74.081.067
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	46.374.690	30	226.748.358

1	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	302.618.100	100	302.618.100
1	03	10	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.961.100	1	1.961.100
1	03	10	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	299.739.000	12	299.739.000
1	03	10	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	918.000	5	918.000
1	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.462.866.758	100	1.141.001.812
1	03	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92	597.502.344	92	637.782.024
1	03	01	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4	302.560.248	4	302.560.248
1	03	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	82.761.600	20	91.619.400
1	03	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	480.042.566	6	109.040.140
1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>51,36%</b>	<b>7.978.354.384</b>	<b>#### #</b>	<b>9.380.631.290</b>
1	03	02	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kabupaten/kota	44,28% dan 34,94%	1.498.641.873	44,28% dan 34,94%	2.184.520.487
1	3	2	201	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	-	-
1	3	2	201	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman pantai lainnya	-	-	-	-

	1	3	2	20 1	3 4	Peningkatan Tanggul Sungai	-	-	-	-	
	1	3	2	20 1	4 6	Normalisasi/Restorasi Sungai	-	-	-	-	
	1	3	2	20 1	5 3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2	998.650.698	3	1.233.650.699	
	1	3	2	20 1	8 7	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman pantai lainnya				66.307.838	
	1	3	2	20 1	8 9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	5	499.991.175		884.561.950	
	1	0 3	0 2	2.0 2		<b>Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>60,10%</b>	<b>6.479.712.511</b>	<b>#### #</b>	<b>7.196.110.803</b>	
	1	3	2	20 2	1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,3	4.229.909.746	3	4.489.909.109	
	1	3	2	20 2	1 9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	3	499.991.122	3	499.991.122	
	1	3	2	20 2	2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1	1.199.894.643	1	1.506.410.013	
	1	3	2	20 2	2 2	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2	549.917.000	2	549.917.000	
	1	3	2	20 2	2 6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah				149.883.559	
	1	0 3	0 3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>5,63%</b>	<b>10.360.755.000</b>	<b>5,63 %</b>	<b>12.935.057.34 3</b>	
	1	0 3	0 3	2.0 1		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,63%</b>	<b>10.360.755.000</b>	<b>5,63 %</b>	<b>12.935.057.34 3</b>	

	1	3	3	20 1	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	75	10.360.755.000	-	-	
			3	20 1	2 8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			75	7.835.718.343	
			3	20 1	3 2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				5.099.339.000	
	1	0 3	0 4			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	57,41	-	57,41	230.002.939	
	1	0 3	0 4	2.0 1		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	230.002.939	
	1	3	4	20 1	0 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	230.002.939	
	1	3	4	20 1	0 5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	-	
	1	0 3	0 5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	57,41	17.513.489.042	57,41	19.646.673.206	
	1	0 3	0 5	2.0 1		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	57,41	17.513.489.042	57,41	19.646.673.206	
	1	0 3	0 5	2.0 1	0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	

1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	-	-	-	-
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	-	-
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	-	-	-
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	-	-	-	-
1	03	05	2.01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1	113.995.200	1	385.722.994
1	03	05	2.01	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	75	2.404.996.842	75	4.266.453.212
1	03	05	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	250	14.994.497.000	250	14.994.497.000
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>92%</b>	<b>4.583.310.996</b>	<b>92%</b>	<b>5.504.767.578</b>
1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92%</b>	<b>4.583.310.996</b>	<b>92%</b>	<b>5.504.767.578</b>
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	300	3.197.853.887	350	3.776.436.098
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	300	1.385.457.109	350	1.728.331.480
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>74,76</b>	<b>65.935.825.159</b>	<b>74,76</b>	<b>68.499.626.459</b>

							<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	92.62 %	65.935.825.159	92.62 %	68.499.626.459	
	1	3	8	2.01	2		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
	1	3	8	2.01	12		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	
	1	3	8	2.01	21		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	65.935.825.159	1	68.499.626.459	
	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>66.51 %</b>	<b>74.570.959.926</b>	<b>66.51 %</b>	<b>86.397.212.281</b>	
								<b>88,92%</b>	<b>2.945.825.608</b>	<b>#### #</b>	<b>7.196.340.397</b>	
	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>2,01</b>			<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>66,51%</b>	<b>74.570.959.926</b>	<b>#### #</b>	<b>86.397.212.281</b>	
								<b>88,92%</b>	<b>2.945.825.608</b>	<b>#### #</b>	<b>7.196.340.397</b>	
	1	03	10	2,01	32		Pembangunan Jalan	4	9.033.699.109	8	11.121.119.763	
	1	03	10	2,01	33		Rekonstruksi Jalan	3	21.686.913.322	4	25.327.573.388	
	1	03	10	2,01	34		Pemeliharaan Berkala Jalan	1	1.499.878.164	2	5.870.704.329	
	1	03	10	2,01	37		Pelebaran Jalan Menuju Standar	1	37.449.086.000	1	37.449.086.000	
	1	03	10	2,01	38		Pemeliharaan Rutin Jembatan	25	452.477.959	25	1.302.678.948	
	1	03	10	2,01	40		Pembangunan Jembatan	2	2.493.347.649	4	5.893.661.449	
	1	03	10	2,01	43		Survey Kondisi Jalan/Jembatan				199.800.000	
	1	03	10	2,01	46		Pemeliharaan Rutin Jalan	8	4.901.383.331	9	6.428.928.801	

						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>58.25 %</b>	<b>1.524.927.905</b>	<b>58.25 %</b>	<b>1.525.195.710</b>	
	1	3	1	##	##	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>12,76%</b>	<b>1.524.927.905</b>	<b>#### #</b>	<b>1.525.195.710</b>	
	1	3	1	##	##	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	25	1.524.927.905	25	1.525.195.710	
	1	3	1	##	##	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	
	1	3	1	##	##	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas	-	-	-	-	
	1	3	1	.02	.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	-	-	-	-	
	1	3	1	.02	.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	
	1	0	3	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>28.57 %</b>	<b>1.225.455.802</b>	<b>28.57 %</b>	<b>1.680.545.793</b>	
	1	0	3	1	2	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>28,57%</b>	<b>40.356.896</b>	<b>#### #</b>	-	
	1	3	1	2	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRWKabupaten/Kota	-	40.356.896	-	-	
	1	3	1	2	0	0	-	-	-	-	

	1	03	12	2.01		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</b>	28,57%	1.056.854.306	#### #	1.407.471.997	
	1	3	12	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3	29.554.700	3	302.068.391	
	1	3	12	2.01	05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	3	1.027.299.606	3	1.056.299.606	
	1	3	12	2.01	06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang					3
	1	3	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	28,57%	128.244.600	#### #	209.452.296	
	1	3	12	2.03	01	Pelaksanaan Persetujuan Program Pemanfaatan Ruang	1	128.244.600	1	64.356.896	
			12	2.03	05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				145.095.400	
	1	3	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	28,57%	-	#### #	63.621.500	
	1	3	12	2.04	08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK			1	63.621.500	
						<b>TOTAL</b>		<b>205.738.190.119</b>		<b>232.249.394.492</b>	

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan yang mendeskripsikan rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang di Kabupaten Sumenep. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara berencana dan bertahap melalui sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep.

Maka kemitraan dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat secara jujur, transparan, adil demokratis dan penuh tanggung jawab perlu dikembangkan sehingga hasil-hasil pembangunan daerah dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep berharap agar Perubahan Renja Tahun 2024 yang telah disusun ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan mewujudkan Visi dan Misi organisasi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, Juni 2024

KEPALA DINAS PU. DAN TATA RUANG  
KABUPATEN SUMENEP



**KABUPATEN SUMENEP**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>				
<b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>				
<b>PUTR</b>		<b>47.125.000.000,00</b>	<b>68.348.000.000,00</b>	<b>21.223.000.000,00</b>
<b>[ # ] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>-</b>	<b>15.233.000.000,00</b>	<b>15.233.000.000,00</b>
<b>[ - ] 1</b>		<b>-</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Duko	Duko	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] DRAINASE</b>		<b>-</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.400.000.000,00</b>
Banaresep Timur	Banaresep Timur	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Brakas	Brakas	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Bunbarat	Bunbarat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Duko	Duko	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gayam	Gayam	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kasengan	Kasengan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Manding Daya	Manding Daya	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Padike	Padike	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Poteran	Poteran	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sambakati	Sambakati	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sumbernangka	Sumbernangka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sumbernangka	Sumbernangka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Tambaagung Barat	Tambaagung Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Irigasi</b>		<b>-</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>
Bataal Barat	Bataal Barat	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Bataal Barat	Bataal Barat	-	200.000.000,00	200.000.000,00

Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Ketawang Karay	Ketawang Karay	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Makadam</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Kerta Timur	Kerta Timur	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Pekerjaan Lapisan Penetrasi / Lapen</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Banasare	Banasare	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Drainase</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Jalan, Jl Raya Gapura - Dsn Batangan</b>		-	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
Gapura Tengah	Gapura Tengah	-	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Jalan Makadam</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Montorna	Montorna	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Tangkis Laut</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Sakala	Sakala	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan TPT</b>		-	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>
Keles	Keles	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Meddelan	Meddelan	-	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>[ - ] Penahan tebing</b>		-	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>
Basoka	Basoka	-	125.000.000,00	125.000.000,00
<b>[ - ] PENGADAAN AIR BERSIH</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Masalima	Masalima	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] PENGASPALAN</b>		-	<b>2.200.000.000,00</b>	<b>2.200.000.000,00</b>
Bakeong	Bakeong	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Billapora Barat	Billapora Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Essang	Essang	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	200.000.000,00	200.000.000,00

Gapurana	Gapurana	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Payudan Daleman	Payudan Daleman	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Payudan Karangsokon	Payudan Karangsokon	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sambakati	Sambakati	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Sambakati	Sambakati	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sawah Sumur	Sawah Sumur	-	-	-
Sawah Sumur	Sawah Sumur	-	-	-
Tambuko	Tambuko	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] Pengaspalan Jalan</b>		<b>-</b>	<b>2.103.000.000,00</b>	<b>2.103.000.000,00</b>
Bantelan	Bantelan	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Batuan	Batuan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadu Timur	Gadu Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gedang-Gedang	Gedang-Gedang	-	203.000.000,00	203.000.000,00
Gedang-Gedang	Gedang-Gedang	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Gedang-Gedang	Gedang-Gedang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Guluk Manjung	Guluk Manjung	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Jambuir	Jambuir	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kalianget Barat	Kalianget Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kapedi	Kapedi	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kebunagung	Kebunagung	-	-	-
Kebunagung	Kebunagung	-	-	-
Kebunagung	Kebunagung	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lapa Taman	Lapa Taman	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lapa Taman	Lapa Taman	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakandangan Barat	Pakandangan Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pancor	Pancor	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Pancor	Pancor	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pancor	Pancor	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Pengaspalan Jalan</b>		<b>-</b>	<b>3.465.000.000,00</b>	<b>3.465.000.000,00</b>
Alas Malang	Alas Malang	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Bangkal	Bangkal	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Bantelan	Bantelan	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Batang-batang Laok	Batang-batang Laok	-	100.000.000,00	100.000.000,00

Belluk Raja	Belluk Raja	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Bulla'an	Bulla'an	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Cangkrenng	Cangkrenng	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Duko	Duko	-	110.000.000,00	110.000.000,00
Galis	Galis	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gedang-Gedang	Gedang-Gedang	-	155.000.000,00	155.000.000,00
Gedugan	Gedugan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gelugur	Gelugur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Jenangger	Jenangger	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kalebengan	Kalebengan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kalawang	Kalawang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lapa Taman	Lapa Taman	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Larangan Perreng	Larangan Perreng	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lebeng Barat	Lebeng Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Legung Barat	Legung Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lombang	Lombang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Manding Daya	Manding Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Manding Laok	Manding Laok	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Meddelan	Meddelan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Nyabakan Timur	Nyabakan Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Padangdangan	Padangdangan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakamban Laok	Pakamban Laok	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pancor	Pancor	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	-	-
Prancak	Prancak	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Rajun	Rajun	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Pengeboran Air dan Tandon</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Prancak	Prancak	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Peningkatan Jalan</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Banasare	Banasare	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] PERBAIKAN JALAN DAN JEMBATAN</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Tambaagung Timur	Tambaagung Timur	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] perpipaan/jaringan air bersih dan instalasi listrik</b>		-	-	-
Rosong	Rosong	-	-	-

Rosong	Rosong	-	-	-
<b>[ - ] PIPA SALURAN AIR</b>		-	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
Lapa Taman	Lapa Taman	-	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>[ - ] PLENGSENGAN</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Banuaju Timur	Banuaju Timur	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] REHAB MASJID NURUL IMAN</b>		-	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	-	190.000.000,00	190.000.000,00
<b>[ - ] Rehab Plengsengan</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Kolor	Kolor	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Tangkis Laut</b>		-	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>
Banbaru	Banbaru	-	-	-
Banbaru	Banbaru	-	-	-
Ketupat	Ketupat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Ketupat	Ketupat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lapa Laok	Lapa Laok	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Tebing Penguat Tanah (TPT)</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Langsar	Langsar	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Meddelan	Meddelan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] TEMBOK PENAHAN TANAH</b>		-	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
Banuaju Barat	Banuaju Barat	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Batang-batang Laok	Batang-batang Laok	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Bringin	Bringin	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Bukabu	Bukabu	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Lenteng Timur	Lenteng Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Tambaagung Barat	Tambaagung Barat	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] TPT</b>		-	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>
Aeng Baja Kenek	Aeng Baja Kenek	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Alas Malang	Alas Malang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadu Barat	Gadu Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gunggung	Gunggung	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Pordapor	Pordapor	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Saur Saebus	Saur Saebus	-	100.000.000,00	100.000.000,00

<b>[ - ] TPT / Jalan usaha tani</b>		-	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
Kasengan	Kasengan	-	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>[ # ] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>8.237.238.922,00</b>	<b>6.587.238.922,00</b>	<b>- 1.650.000.000,00</b>
<b>[ - ] PENGASPALAN</b>		<b>8.237.238.922,00</b>	<b>6.587.238.922,00</b>	<b>- 1.650.000.000,00</b>
Banaresep Timur	Banaresep Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Bantelan	Bantelan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Basoka	Basoka	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Batuputih Laok	Batuputih Laok	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Belluk Kenek	Belluk Kenek	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Belluk Kenek	Belluk Kenek	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Bulla'an	Bulla'an	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Bulla'an	Bulla'an	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Dasuk Laok	Dasuk Laok	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Essang	Essang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Essang	Essang	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gadu Barat	Gadu Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Gadu Barat	Gadu Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gadu Timur	Gadu Timur	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Gapurana	Gapurana	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gapurana	Gapurana	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Gedang-Gedang	Gedang-Gedang	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Gendang Barat	Gendang Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Gendang Barat	Gendang Barat	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Guluk-guluk	Guluk-guluk	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Guluk-guluk	Guluk-guluk	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
Guluk-guluk	Guluk-guluk	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gunggung	Gunggung	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Jambuir	Jambuir	75.000.000,00	75.000.000,00	-

Kaduara Timur	Kaduara Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Kalimook	Kalimook	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kalinganyar	Kalinganyar	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kalinganyar	Kalinganyar	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Kalawang	Kalawang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Kasengan	Kasengan	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Kasengan	Kasengan	250.000.000,00	-	- 250.000.000,00
Kebundadap Timur	Kebundadap Timur	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Kerta Barat	Kerta Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kolpo	Kolpo	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Lapa Taman	Lapa Taman	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Lebeng Timur	Lebeng Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Lembung Timur	Lembung Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Longos	Longos	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Masalima	Masalima	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Meddelan	Meddelan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
Nyamplong	Nyamplong	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Pakamban Daya	Pakamban Daya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Poreh	Poreh	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Poteran	Poteran	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pragaan Daya	Pragaan Daya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Prenduan	Prenduan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Sergang	Sergang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Somber	Somber	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Talaga	Talaga	37.238.922,00	37.238.922,00	-
<b>[ # ] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>38.887.761.078,00</b>	<b>32.947.761.078,00</b>	<b>- 5.940.000.000,00</b>
<b>[ - ] Bor Air Bersih</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>-</b>
Prancak	Prancak	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tambaagung Tengah	Tambaagung Tengah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] DRAINASE</b>		<b>2.760.000.000,00</b>	<b>2.560.000.000,00</b>	<b>- 200.000.000,00</b>

Alas Malang	Alas Malang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Alas Malang	Alas Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Bragung	Bragung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Campor Barat	Campor Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Dasuk Timur	Dasuk Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Grujugan	Grujugan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Jadung	Jadung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Jambuir	Jambuir	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Jambuir	Jambuir	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Karangnangka	Karangnangka	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Karang Tengah	Karang Tengah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Karang Tengah	Karang Tengah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kolpo	Kolpo	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Lebeng Barat	Lebeng Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Lebeng Timur	Lebeng Timur	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Nyamplong	Nyamplong	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Poteran	Poteran	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Rosong	Rosong	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Rosong	Rosong	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sambakati	Sambakati	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sumbernangka	Sumbernangka	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tambaagung Ares	Tambaagung Ares	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tambaagung Timur	Tambaagung Timur	110.000.000,00	110.000.000,00	-
<b>[ - ] DRAINASE JALAN DESA</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Basoka	Basoka	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Hippam</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Pragaan Daya	Pragaan Daya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Irigasi</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	- <b>450.000.000,00</b>
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Ganding	Ganding	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Gunggung	Gunggung	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00

Ketawang Daleman	Ketawang Daleman	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Montorna	Montorna	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
<b>[ - ] JALAN PAVING</b>		<b>1.050.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>- 100.000.000,00</b>
Bancamara	Bancamara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Guluk Manjung	Guluk Manjung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Romben Barat	Romben Barat	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Romben Guna	Romben Guna	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sabunten	Sabunten	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Sabunten	Sabunten	400.000.000,00	400.000.000,00	-
<b>[ - ] Jaringan Air Bersih</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>-</b>
Sokaramme Timur	Sokaramme Timur	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Tarebung	Tarebung	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Tarebung	Tarebung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] LAPEN</b>		<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>-</b>
Gedang-Gedang	Gedang-Gedang	125.000.000,00	125.000.000,00	-
<b>[ - ] Makadam</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>
Keles	Keles	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Montorna	Montorna	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Overpain</b>		<b>175.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>-</b>
Pragaan Daya	Pragaan Daya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sukajeruk	Sukajeruk	75.000.000,00	75.000.000,00	-
<b>[ - ] PALENGSINGAN</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 100.000.000,00</b>
Batang-batang Laok	Batang-batang Laok	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
<b>[ - ] PAVING</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>
Banra"as	Banra"as	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gapurana	Gapurana	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Paving masjid Al Itqon</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>
Ketawang Larangan	Ketawang Larangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
<b>[ - ] PAVINGSTONE</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>-</b>
Prenduan	Prenduan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Drainase 2</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>-</b>
Poteran	Poteran	100.000.000,00	100.000.000,00	-

<b>[ - ] Pekerjaan : Drainase</b>		<b>100.000.000,00</b>	-	<b>- 100.000.000,00</b>
Poteran	Poteran	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
<b>[ - ] Pekerjaan : Jalan Paving</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Romben Guna	Romben Guna	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Paving 2</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Gapurana	Gapurana	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Paving</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Gapurana	Gapurana	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Pembangunan Paving</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	-
Matanair	Matanair	75.000.000,00	75.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Pembangunan TPT</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>- 100.000.000,00</b>
Kapedi	Kapedi	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Pakandangan Barat	Pakandangan Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan</b>		<b>1.625.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>- 725.000.000,00</b>
Gadu Barat	Gadu Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gapurana	Gapurana	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gunggung	Gunggung	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Kebundadap Timur	Kebundadap Timur	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
Pragaan Daya	Pragaan Daya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Talaga	Talaga	75.000.000,00	-	- 75.000.000,00
Talang	Talang	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Talang	Talang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan Jalan 2</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	-
Gapurana	Gapurana	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Kalawang	Kalawang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan Jalan 2</b>		<b>525.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>- 325.000.000,00</b>
Gendang Barat	Gendang Barat	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Talaga	Talaga	75.000.000,00	-	- 75.000.000,00
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan Jalan 3</b>		<b>350.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>- 150.000.000,00</b>

Gapurana	Gapurana	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan Jalan 4</b>		<b>150.000.000,00</b>	-	<b>- 150.000.000,00</b>
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan Jalan 5</b>		<b>150.000.000,00</b>	-	<b>- 150.000.000,00</b>
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
<b>[ - ] Pekerjaan : Pengaspalan Jalan</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	-
Dungkek	Dungkek	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gendang Barat	Gendang Barat	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kalinganyar	Kalinganyar	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kalawang	Kalawang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pakandangan Sangra	Pakandangan Sangra	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pekerjaan : TPT</b>		<b>400.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>- 100.000.000,00</b>
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Billapora Rebba	Billapora Rebba	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Kalebengan	Kalebengan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pemagaran Kuburan</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Banasare	Banasare	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Tambaagung Tengah	Tambaagung Tengah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Tanamerah	Tanamerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Air Bersih</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Saur Saebus	Saur Saebus	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Bronjong</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Ambunten Timur	Ambunten Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Drainase</b>		<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	-
Aeng Baja Raja	Aeng Baja Raja	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Bunbarat	Bunbarat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gayam	Gayam	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Kalebengan	Kalebengan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Karang Tengah	Karang Tengah	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Nyamplong	Nyamplong	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Pancor	Pancor	75.000.000,00	75.000.000,00	-

<b>[ - ] Pembangunan Jalan</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Mandala	Mandala	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Jalan Paving</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Mandala	Mandala	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Jaringan Air Bersih</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	-
Sokaramme Timur	Sokaramme Timur	75.000.000,00	75.000.000,00	-
<b>[ - ] PEMBANGUNAN MCK MUSHOLLA DARUL ABROR</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Angkatan	Angkatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] PEMBANGUNAN MUSHALLA</b>		<b>200.000.000,00</b>	-	- <b>200.000.000,00</b>
Kasengan	Kasengan	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Pagar Kuburan</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Aeng Baja Raja	Aeng Baja Raja	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Paving</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	-
Matanair	Matanair	75.000.000,00	75.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Pavingstone</b>		<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	-
Aeng Baja Raja	Aeng Baja Raja	110.000.000,00	110.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Plengsengan</b>		<b>550.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	-
Aeng Baja Raja	Aeng Baja Raja	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Banaresep Timur	Banaresep Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Moncek Barat	Moncek Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Saluran drainase</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	-
Ellak Daya	Ellak Daya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Parsanga	Parsanga	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Tangkis Laut</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	-
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Sabunten	Sabunten	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Sakala	Sakala	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Saseel	Saseel	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Saur Saebus	Saur Saebus	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan Tebing Jalan</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Pragaan Daya	Pragaan Daya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Pembangunan TPT</b>		<b>1.100.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	- <b>300.000.000,00</b>
Kapedi	Kapedi	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Lobuk	Lobuk	100.000.000,00	100.000.000,00	-

Pakandangan Barat	Pakandangan Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Poreh	Poreh	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Talang	Talang	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Tambaagung Ares	Tambaagung Ares	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tambaagung Barat	Tambaagung Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tambaksari	Tambaksari	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pemb. Paving Ponpes Islamiyah</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Pakondang	Pakondang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pemb. Ruang Ponpes Al Fadly</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Tambaksari	Tambaksari	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Pemb. Saluran Drainase</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	-
Lebeng Timur	Lebeng Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tambaksari	Tambaksari	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pemb. Saluran Irigasi</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Meddelan	Meddelan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pemeliharaan Jalan Aspal</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Banasare	Banasare	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] PENGASPALAN</b>		<b>1.037.761.078,00</b>	<b>1.037.761.078,00</b>	-
Talaga	Talaga	37.761.078,00	37.761.078,00	-
Talang	Talang	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Talang	Talang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Talango	Talango	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Talango	Talango	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Tamidung	Tamidung	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Tanah Merah	Tanah Merah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pengaspalan Jalan</b>		<b>8.375.000.000,00</b>	<b>7.775.000.000,00</b>	- <b>600.000.000,00</b>
Alas Malang	Alas Malang	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Angon-angon	Angon-angon	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Arjasa	Arjasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Banuaju Barat	Banuaju Barat	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Basoka	Basoka	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Belluk Raja	Belluk Raja	200.000.000,00	200.000.000,00	-

Bicabbi	Bicabbi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Bluto	Bluto	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Brakas	Brakas	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Bunbarat	Bunbarat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Cabbiya	Cabbiya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Cangkrenng	Cangkrenng	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Daramista	Daramista	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Duko	Duko	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Dungkek	Dungkek	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Dungkek	Dungkek	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gendang Barat	Gendang Barat	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gendang Barat	Gendang Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Gendang Barat	Gendang Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Grujugan	Grujugan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Guluk-guluk	Guluk-guluk	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Guluk Manjung	Guluk Manjung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kaduara Timur	Kaduara Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kaduara Timur	Kaduara Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kalebengan	Kalebengan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kalianget Barat	Kalianget Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kalinganyar	Kalinganyar	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Kalawang	Kalawang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kambingan Timur	Kambingan Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Kapedi	Kapedi	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Karangnangka	Karangnangka	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Karduluk	Karduluk	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Keles	Keles	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Langsar	Langsar	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Langsar	Langsar	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Lobuk	Lobuk	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Longos	Longos	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Mandala	Mandala	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Meddelan	Meddelan	200.000.000,00	200.000.000,00	-

Montorna	Montorna	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Nyapar	Nyapar	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pakamban Laok	Pakamban Laok	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Pakandangan Barat	Pakandangan Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pakandangan Barat	Pakandangan Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Pakondang	Pakondang	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Pancor	Pancor	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Poreh	Poreh	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Pragaan Daya	Pragaan Daya	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Pragaan Daya	Pragaan Daya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Prancak	Prancak	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Rosong	Rosong	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sawah Sumur	Sawah Sumur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sentol Laok	Sentol Laok	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Soddara	Soddara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Taman Sare	Taman Sare	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tarebung	Tarebung	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tarebung	Tarebung	75.000.000,00	75.000.000,00	-
<b>[ - ] PENGASPALAN JALAN,</b>		<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	-
Tanamerah	Tanamerah	160.000.000,00	160.000.000,00	-
<b>[ - ] PENGASPALAN JALAN DESA (TAMBAL SULAM)</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Montorna	Montorna	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] PENGASPALAN(Peningkatan)</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Rombiya Timur	Rombiya Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Pengerasan Jalan</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Paseraman	Paseraman	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Peningkatan Jalan</b>		<b>400.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	- 200.000.000,00
Campaka	Campaka	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Lebeng Timur	Lebeng Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Peningkatan Jalan Aspal</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Ellak Daya	Ellak Daya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Permohonan TPT</b>		<b>200.000.000,00</b>	-	- 200.000.000,00
Lenteng Barat	Lenteng Barat	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00

<b>[ - ] PLENGSENGAN</b>		<b>200.000.000,00</b>	-	<b>- 200.000.000,00</b>
Kalikatak	Kalikatak	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
<b>[ - ] Rabat Beton</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	-
Batuputih Laok	Batuputih Laok	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pagerungan Besar	Pagerungan Besar	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Prambanan	Prambanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Sabunten	Sabunten	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Saur Saebus	Saur Saebus	300.000.000,00	300.000.000,00	-
<b>[ - ] REHAB JALAN ASPAL</b>		<b>850.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>- 450.000.000,00</b>
Bakeong	Bakeong	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
Pakondang	Pakondang	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Tambaksari	Tambaksari	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Rehab Masjid Almunawwaroh</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Keles	Keles	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Rehab Tambat Labuh</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Saur Saebus	Saur Saebus	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Saluran Air</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Batang-Batang Daya	Batang-Batang Daya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gadding	Gadding	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] TAMBAL SULAM</b>		<b>290.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>- 190.000.000,00</b>
Campaka	Campaka	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Prancak	Prancak	190.000.000,00	-	- 190.000.000,00
<b>[ - ] Tangkis Laut</b>		<b>1.750.000.000,00</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>- 500.000.000,00</b>
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Guwa-Guwa	Guwa-Guwa	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kangayan	Kangayan	200.000.000,00	-	- 200.000.000,00
Sabunten	Sabunten	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Saseel	Saseel	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Saur Saebus	Saur Saebus	300.000.000,00	300.000.000,00	-
Saur Saebus	Saur Saebus	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Timur Jang-Jang	Timur Jang-Jang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Torjek	Torjek	300.000.000,00	-	- 300.000.000,00

<b>[ - ] Tangkis Penahan Tebing (TPT)</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Keles	Keles	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Tebing Jalan</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	-
Pragaan Daya	Pragaan Daya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Pragaan Daya	Pragaan Daya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Saronggi	Saronggi	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Tebing Penguat Tanah dijalan Desa</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	-
Mandala	Mandala	50.000.000,00	50.000.000,00	-
<b>[ - ] TEBING PENGUAT TANAH JALAN DESA (TPT)</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Prancak	Prancak	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] Tebing Sungai</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Pajanangger	Pajanangger	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] Tembok Penahan</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-
Batang-Batang Daya	Batang-Batang Daya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ - ] Tembok Penahanan Tebing /TPT</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	-
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Duko	Duko	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] TPT</b>		<b>3.980.000.000,00</b>	<b>3.530.000.000,00</b>	- <b>450.000.000,00</b>
Aengmerah	Aengmerah	125.000.000,00	125.000.000,00	-
Alas Malang	Alas Malang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Ambunten Tengah	Ambunten Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Belluk Ares	Belluk Ares	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Billapora Rebba	Billapora Rebba	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Bukabu	Bukabu	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Cangkrenng	Cangkrenng	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Gadu Barat	Gadu Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Gendang Timur	Gendang Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Gunggung	Gunggung	150.000.000,00	-	- 150.000.000,00
Guwa-Guwa	Guwa-Guwa	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Jelbudan	Jelbudan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kalebengan	Kalebengan	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Kapedi	Kapedi	100.000.000,00	-	- 100.000.000,00
Kropoh	Kropoh	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Larangan Perreng	Larangan Perreng	100.000.000,00	100.000.000,00	-

Lobuk	Lobuk	250.000.000,00	250.000.000,00	-
Nyamplong	Nyamplong	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pajanangger	Pajanangger	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Prancak	Prancak	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Prancak	Prancak	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Rubaru	Rubaru	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Saroka	Saroka	200.000.000,00	200.000.000,00	-
Sendir	Sendir	125.000.000,00	125.000.000,00	-
Talang	Talang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Tambaagung Timur	Tambaagung Timur	130.000.000,00	130.000.000,00	-
Tambaksari	Tambaksari	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Tanamerah	Tanamerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Tanjung	Tanjung	200.000.000,00	200.000.000,00	-
<b>[ - ] TPT / Jalan usaha tani</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	-
Braji	Braji	150.000.000,00	150.000.000,00	-
<b>[ - ] TPT Tembok Penahan Tanah</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-
Banjar Timur	Banjar Timur	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Kropoh	Kropoh	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>[ # ] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>		-	<b>13.580.000.000,00</b>	<b>13.580.000.000,00</b>
<b>[ - ] 2 Unit Sumur Bor</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Kalinganyar	Kalinganyar	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] BREAK WATER/PEMECAH GELOMBANG</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Masalima	Masalima	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] DRAINASE</b>		-	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>
Gayam	Gayam	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Grujugan	Grujugan	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Marengan Daya	Marengan Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] HIPPAM</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Irigasi</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Nyabakan Barat	Nyabakan Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Makadam</b>		-	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>

Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] MCK (KAWASAN WISATA)</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Lombang	Lombang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] PAVING</b>		-	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
Bluto	Bluto	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadding	Gadding	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakondang	Pakondang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Paving BK Desa</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Sabunten	Sabunten	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Drainase</b>		-	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
Mandala	Mandala	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sabunten	Sabunten	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Jalan</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Grujugan	Grujugan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Jalan Aspal</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan Paving</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Lombang	Lombang	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Pembangunan TPT</b>		-	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>
Basoka	Basoka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Cangkrenng	Cangkrenng	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Keles	Keles	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Talang	Talang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] PENGASPALAN #</b>		-	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>
Aeng Panas	Aeng Panas	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Babbalan	Babbalan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Banmaleng	Banmaleng	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Batuputih Laok	Batuputih Laok	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Juluk	Juluk	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Mantajun	Mantajun	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakamban Laok	Pakamban Laok	-	200.000.000,00	200.000.000,00

Panaongan	Panaongan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Tambaagung Barat	Tambaagung Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Tenonan	Tenonan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] PENGASPALAN</b>		<b>-</b>	<b>4.075.000.000,00</b>	<b>4.075.000.000,00</b>
Bakeong	Bakeong	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Banaresep Timur	Banaresep Timur	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Bulla'an	Bulla'an	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Bulla'an	Bulla'an	-	250.000.000,00	250.000.000,00
Cangkrenng	Cangkrenng	-	300.000.000,00	300.000.000,00
Daramista	Daramista	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Duko	Duko	-	75.000.000,00	75.000.000,00
Ellak Daya	Ellak Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gadding	Gadding	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gapurana	Gapurana	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gingging	Gingging	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gingging	Gingging	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Jaba'an	Jaba'an	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Jambu	Jambu	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kaduara Timur	Kaduara Timur	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Kebundadap Timur	Kebundadap Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kebundadap Timur	Kebundadap Timur	-	250.000.000,00	250.000.000,00
Kebundadap Timur	Kebundadap Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lapa Taman	Lapa Taman	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Lembung Barat	Lembung Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Manding Daya	Manding Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakamban Laok	Pakamban Laok	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Pancor	Pancor	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Pancor	Pancor	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Rombiya Timur	Rombiya Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Sawah Sumur	Sawah Sumur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Talang	Talang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Talang	Talang	-	100.000.000,00	100.000.000,00

Tanah Merah	Tanah Merah	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Pengaspalan Jalan</b>		-	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>
Banasare	Banasare	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Gedungan	Gedungan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kapedi	Kapedi	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakamban Daya	Pakamban Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Talang	Talang	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Dasuk Timur	Dasuk Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Jelbudan	Jelbudan	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Karang Nangka	Karang Nangka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kombang	Kombang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Poteran	Poteran	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Peningkatan Jalan</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Rombiya Timur	Rombiya Timur	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Perkerasan Jalan</b>		-	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Bantelan	Bantelan	-	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>[ - ] Rabat Beton</b>		-	<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>
Bilis-bilis	Bilis-bilis	-	150.000.000,00	150.000.000,00
Sabunten	Sabunten	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Saobi	Saobi	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Sumberangka	Sumberangka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Torbang	Torbang	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Sumur Bor</b>		-	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
Basoka	Basoka	-	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>[ - ] Tambal Sulam Aspal</b>		-	<b>280.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>
Masalima	Masalima	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Tambaagung Barat	Tambaagung Barat	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] Tambat Labuh</b>		-	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Saur Saebus	Saur Saebus	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] TANGKIS LAUT #</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Kramian	Kramian	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Masalima	Masalima	-	-	-
Masalima	Masalima	-	-	-
<b>[ - ] Tangkis Laut</b>		-	<b>700.000.000,00</b>	<b>700.000.000,00</b>

Gendang Timur	Gendang Timur	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Kramian	Kramian	-	-	-
Kramian	Kramian	-	-	-
Masalima	Masalima	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Paliat	Paliat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Paliat	Paliat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Tanjung Kiaok	Tanjung Kiaok	-	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>[ - ] TEBING Penguat Tanah Jalan Desa</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Basoka	Basoka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] Tembok Penahan Tebing #</b>		-	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
Tamidung	Tamidung	-	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>[ - ] TPT</b>		-	<b>1.725.000.000,00</b>	<b>1.725.000.000,00</b>
Alas Malang	Alas Malang	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Alas Malang	Alas Malang	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Banuaju Barat	Banuaju Barat	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Batuputih Kenek	Batuputih Kenek	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Belluk Ares	Belluk Ares	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Bluto	Bluto	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Guluk-guluk	Guluk-guluk	-	75.000.000,00	75.000.000,00
Gunung Kembar	Gunung Kembar	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Pakandangan Tengah	Pakandangan Tengah	-	100.000.000,00	100.000.000,00
Payudan Nangger	Payudan Nangger	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	250.000.000,00	250.000.000,00
Pragaan Daya	Pragaan Daya	-	100.000.000,00	100.000.000,00

**DAFTAR USULAN JARING ASPIRASI MASYARAKAT**  
**POKOK-POKOK PIKIRAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	PENGUSUL	NAMA LEMBAGA/POKMAS	PROGRAM/KEGIATAN	DUSUN	DESA	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BANTUAN SOSIAL										
TOTAL BANTUAN								-	-	
BANTUAN HIBAH UANG										
TOTAL BANTUAN HIBAH								-	-	
BANTUAN HIBAH BARANG										
TOTAL BANTUAN HIBAH								-	-	
TOTAL BK DESA										
1	H.SUBAIDI, SE.MM	BK DESA	PENGASPALAN		BANARESEP TIMUR	LENTENG		150.000.000	150.000.000	
2	H.SUBAIDI, SE.MM	BK DESA	PENGASPALAN		POREH	LENTENG		150.000.000	150.000.000	
3	H.SUBAIDI, SE.MM	BK DESA	PENGASPALAN		LEMBUNG TIMUR	LENTENG		150.000.000	150.000.000	

4	H.SUBAIDI, SE.MM	BK DESA	PENGASPALAN		MEDELAN	LENTENG		100.000.000	100.000.000	
5	H. MAS'UD ALI	BK DESA	DRAINASE		GENDANG TIMUR	GAYAM		150.000.000	150.000.000	
6	H. MAS'UD ALI	BK DESA	PENGASPALAN		GENDANG TIMUR	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
7	H. MAS'UD ALI	BK DESA	PENGASPALAN		PRAMBANAN	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
8	H. MAS'UD ALI	BK DESA	PENGASPALAN		PRAMBANAN	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
9	H. MAS'UD ALI	BK DESA	DRAINASE		KARANG TENGAH	GAYAM		150.000.000	150.000.000	
10	H. MAS'UD ALI	BK DESA	PENGASPALAN		GENDANG BARAT	GAYAM		150.000.000	150.000.000	
11	M.SYUKRI,S.H	BK DESA	PENGASPALAN		GENDANG TIMUR	GAYAM		200.000.000	200.000.000	
12	M.SYUKRI,S.H	BK DESA	PENGASPALAN		NYAMPLONG	GAYAM		200.000.000	200.000.000	
13	M.SYUKRI,S.H	BK DESA	PENGASPALAN		TANAMERAH	NONGGUNONG		200.000.000	-	Dihapus
14	M.SYUKRI,S.H	BK DESA	PENGASPALAN		PRAMBANAN	GAYAM		200.000.000	200.000.000	
15	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	DRAINASE		LEBENG TIMUR	PASONGSONGAN		100.000.000	-	Dihapus
16	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	TPT	GALIS	AMBUNTEN TENGAH	AMBUNTEN		200.000.000	200.000.000	
17	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	TAMBAL SULAM	PRANCAK	PRANCAK	PASONGSONGAN		190.000.000	-	Dihapus
18	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	TPT	NAIKAN	TAMBAAGUNG TIMUR	AMBUNTEN		130.000.000	130.000.000	
19	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	DRAINASE	NAIKAN	TAMBAAGUNG TIMUR	AMBUNTEN		110.000.000	110.000.000	
20	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	TPT	BILOROS	KALEBENGAN	RUBARU		100.000.000	-	Dihapus
21	DRS. MOH. WASHIL	BKD	PENGASPALAN		GULUK-GULUK TIMUR	GULUK-GULUK		150.000.000	-	Dihapus
22	JUHARI,S.Ag	BK DESA	DRAINASE		GRUJUGAN	GAPURA		200.000.000	200.000.000	
23	JUHARI,S.Ag	BK DESA	PENGASPALAN JALAN		GRUJUGAN	GAPURA		200.000.000	200.000.000	
24	JUHARI,S.Ag	BK DESA	PENGASPALAN JALAN		LONGOS	GAPURA		100.000.000	100.000.000	
25	GUNAIFY SYARIF ARRODHY	BK DESA	REHAB JALAN ASPAL		NYABAKAN BARAT	BATANG BATANG		200.000.000	200.000.000	
26	GUNAIFY SYARIF ARRODHY	BK DESA	REHAB JALAN ASPAL		NYABAKAN BARAT	BATANG BATANG		150.000.000	150.000.000	
27	GUNAIFY SYARIF ARRODHY	BK DESA	TPT		GUNG GUNG	BATUAN		150.000.000	150.000.000	
28	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	Pembangunan Plengsengan	Talaga	Banaresep Timur	Lenteng		200.000.000	200.000.000	
29	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	Pengaspalan Jalan	Poreh Laok	Poreh	Lenteng		200.000.000	-	Dihapus

30	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	Pembangunan TPT	Daleman	Poreh	Lenteng		200.000.000	-	Dihapus
31	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	Pembangunan TPT		Talang	Saronggi		200.000.000	200.000.000	
32	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	Pembangunan Pavingstone	Pongkeng	Aengbajaraja	Bluto		110.000.000	110.000.000	
33	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	Pembangunan Pagar Kuburan	Pongkeng	Aengbajaraja	Bluto		200.000.000	200.000.000	
34	MOHAMAD IMRAN	BKDESA	Pembangunan Plengsengan	Ambaan	Aengbajaraja	Bluto		250.000.000	250.000.000	
35	MOHAMAD IMRAN	BKDESA	Pembangunan Drainase	Pongkeng	Aengbajaraja	Bluto		250.000.000	250.000.000	
36	MOHAMAD IMRAN	BKDESA	Peningkatan Jalan		Lebeng Timur	Pasongsongan		200.000.000	200.000.000	
37	MOHAMAD IMRAN	BKDESA	Peningkatan Jalan		Campaka	Pasongsongan		200.000.000	-	Dihapus
38	SITI HOSNA,M,hum	BK Desa	TPT		Larangan Perreng	Pragaan		100.000.000	100.000.000	
39	SITI HOSNA,M,hum	BK Desa	Rehab Jalan Aspal	Serbung	Bakeong	Guluk-Guluk		100.000.000	-	Dihapus
40	Drs. H. SYAIFUL HASAN	BK Desa	Tangkis Penahan Tebing (TPT)		Keles	Ambunten		100.000.000	100.000.000	
41	Drs. H. SYAIFUL HASAN	BK Desa	Makadam		Keles	Ambunten		100.000.000	100.000.000	
42	Drs. H. SYAIFUL HASAN	BK Desa	Pengaspalan		Lebbeng Timur	Pasongsongan		150.000.000	150.000.000	
43	Drs. H. SYAIFUL HASAN	BK Desa	Irigasi		Ambunten Tengah	Ambunten		100.000.000	100.000.000	
44	H. SUROYO, SE.	BK DESA	PENGASPALAN	BUABU	LONGOS	GAPURA		100.000.000	100.000.000	
45	H. SUROYO, SE.	BK DESA	PENGASPALAN	LAOK SONGAI	TAMIDUNG	BATANG-BATANG		200.000.000	200.000.000	
46	HOLIK, S.Pd.I	BK DESA	PENGASPALAN		TALANG	SARONGGI		200.000.000	200.000.000	
47	HOLIK, S.Pd.I	BK DESA	PENGASPALAN		TALANG	SARONGGI		200.000.000	200.000.000	
48	HOLIK, S.Pd.I	BK DESA	PENGASPALAN		KEBUNDADAP TIMUR	SARONGGI		200.000.000	200.000.000	
49	HOLIK, S.Pd.I	BK DESA	PENGASPALAN		KEBUNDADAP TIMUR	SARONGGI		200.000.000	200.000.000	
50	HOLIK, S.Pd.I	BK DESA	PENGASPALAN		TALANG	SARONGGI		100.000.000	100.000.000	
51	JUBRIYANTO, S.Pd.I	BK DESA	PENGASPALAN JALAN		PRAGAAN DAYA	PRAGAAN		150.000.000	150.000.000	
52	JUBRIYANTO, S.Pd.I	BK DESA	PEMBANGUNAN TEBING JALAN		PRAGAAN DAYA	PRAGAAN		150.000.000	150.000.000	
53	JUBRIYANTO, S.Pd.I	BK DESA	TPT		PAJENANGGER	ARJASA		150.000.000	150.000.000	
54	JUBRIYANTO, S.Pd.I	BK DESA	TPT		BILLAPORA REBBA	LENTENG		100.000.000	-	Dihapus
55	JUBRIYANTO, S.Pd.I	BK DESA	TPT		BILLAPORA REBBA	LENTENG		100.000.000	-	Dihapus

56	NURUS SALAM	BK Desa	drainase	Jamaleng	Poteran	Talango		100.000.000	100.000.000	
57	NURUS SALAM	BK DESA	IRIGASI	GUNGGUNG TIMUR	GUNGGUNG	BATUAN		100.000.000	100.000.000	
58	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	JALAN PAVING		GULUK MANJUNG	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
59	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PENGASPALAN JALAN		GULUK MANJUNG	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
60	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	TPT		KAPEDI	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
61	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PENGASPALAN JALAN		KAPEDI	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
62	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PEMBANGUNAN TPT		KAPEDI	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
63	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PEMBANGUNAN TPT		KAPEDI	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
64	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PEMBANGUNAN TPT		PAKANDANGAN BARAT	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
65	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PEMBANGUNAN TPT		PAKANDANGAN BARAT	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
66	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PENGASPALAN JALAN		PAKANDANGAN SANGRA	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
67	AFRIAN MUKHLAS GZ, S. ST	BKDESA	PEMBANGUNAN TPT		LOBUK	BLUTO		100.000.000	100.000.000	
68	Hj. NUR AINI	BK DESA	DRAINASE JALAN DESA	BASOKA TENGAH	BASOKA	RUBARU		200.000.000	200.000.000	
69	H. MASDAWI	BK Desa	Pengaspan jalan	Buddagan	Bicabi	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
70	H. MASDAWI	BK Desa	Jaln paving	Pabengkon	romben guna	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
71	H. MASDAWI	BK Desa	Jaln paving	Blimbing	Romben barat	Dungkek		100.000.000	-	Dihapus
72	H. MASDAWI	BK Desa	Jaln paving	Peape	Bancamara	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
73	H. MASDAWI	BK Desa	PAVING	Raas barat	Banraas	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
74	H. MASDAWI	BK Desa	Pengaspan jalan	Gunung	Taman sare	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
75	H. MASDAWI	BK Desa	Pengaspan jalan	Jurang	Banuaju barat	Batang batang		200.000.000	-	Dihapus
76	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PEMBANGUNAN DRAINASE	RT 14 DUSUN GAYAM	GAYAM	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
77	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PEMBANGUNAN DRAINASE	TONGGUNG	PANCOR	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
78	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PENGASPALAN		GENDANG TIMUR	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
79	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PENGASPALAN		GENDANG BARAT	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
80	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PEMBANGUNAN DRAINASE		KARANG TENGAH	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
81	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PEMBANGUNAN DRAINASE		NYAMPLONG	GAYAM		75.000.000	75.000.000	

82	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PENGASPALAN		JAMBUIR	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
83	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PENGASPALAN		KALOWANG	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
84	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	JARINGAN AIR BERSIH		TAREBUNG	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
85	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	DRAINASE	BERJATI	PRAMBANAN	GAYAM		75.000.000	75.000.000	
86	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	DRAINASE		ROSONG	NONGGUNONG		75.000.000	75.000.000	
87	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PENGASPALAN		SUMBER	NONGGUNONG		75.000.000	75.000.000	
88	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	PENGASPALAN		TELAGA	NONGGUNONG		75.000.000	75.000.000	
89	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	JARINGAN AIR BERSIH		SUKARAMI TIMUR	NONGGUNONG		75.000.000	75.000.000	
90	Drs.H . AKHMAD ZAINUR RAKHMAN	BK DESA	TPT		ALAS MALANG	RA'AS		100.000.000	100.000.000	
91	INDRA WAHYUDI, SE. M.Si	BK DESA	DRAINASE		LEBENG BARAT	PASONGSONGAN		100.000.000	100.000.000	
92	INDRA WAHYUDI, SE. M.Si	BK DESA	TPT		AMBUNTEN TENGAH	AMBUNTEN		200.000.000	200.000.000	
93	INDRA WAHYUDI, SE. M.Si	BK DESA	DRAINASE		TAMBAAGUNGB ARES	AMBUNTEN		100.000.000	100.000.000	
94	INDRA WAHYUDI, SE. M.Si	BK DESA	DRAINASE		CAMPOR BARAT	AMBUNTEN		100.000.000	100.000.000	
95	Drs. AKHMAD JASULI	BK DESA	IRIGASI		DALEMAN	GANDING		100.000.000	100.000.000	
96	Drs. AKHMAD JASULI	BK DESA	DRAINASE		BERAGUNG	GULUK-GULUK		100.000.000	100.000.000	
97	Drs. AKHMAD JASULI	BK DESA	IRIGASI		GANDING	GANDING		100.000.000	-	Dihapus
98	Drs. AKHMAD JASULI	BK DESA	PENGASPALAN		GADU TIMUR	GANDING		100.000.000	-	Dihapus
99	Drs. AKHMAD JASULI	BK DESA	PENGASPALAN		GULUK-GULUK	GULUK-GULUK		100.000.000	-	Dihapus
100	Drs. AKHMAD JASULI	BK DESA	PENGASPALAN		GADU BARAT	GANDING		100.000.000	100.000.000	
101	DARUL HASYIM FATH	BKDESA	PENGASPALAN		MASALIMA	MASALEMBU		100.000.000	100.000.000	
102	DARUL HASYIM FATH	BKDESA	TPT		RUBARU	RUBARU		100.000.000	100.000.000	
103	DARUL HASYIM FATH	BKDESA	TPT		BELUK ARES	AMBUNTEN		100.000.000	100.000.000	
104	H. ZAINAL ARIFIN	BK DESA	Rehab Jalan Aspal		Pakondang	Rubaru		200.000.000	200.000.000	
105	H. ZAINAL ARIFIN	BK DESA	Pemb. Saluran Drainase		Tambaksari	Rubaru		200.000.000	200.000.000	
106	H. ZAINAL ARIFIN	BK DESA	Pemb. TPT		Tambaksari	Rubaru		200.000.000	200.000.000	
107	H. ZAINAL ARIFIN	BK DESA	Rehab Jalan Aspal		Tambaksari	Rubaru		200.000.000	200.000.000	

108	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	PENGASPALAN JALAN	GALIS	GENDANG BARAT	GAYAM		150.000.000	150.000.000	
109	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	TPT	TALON	GENDANG TIMUR	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
110	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	DRAINASE		JAMBUIR	GAYAM		150.000.000	150.000.000	
111	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	TPT	NYAMPLONG	NYAMPLONG	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
112	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	PENGASPALAN JALAN	GELUGUR TIMUR	KALOWANG	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
113	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	PENGASPALAN JALAN	KALADI	PANCOR	GAYAM		100.000.000	100.000.000	
114	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	PENGASPALAN JALAN	BARAT EMBONG	BRAKAS	RAAS		100.000.000	100.000.000	
115	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	DRAINASE	ALASMALANG	ALASMALANG	RAAS		100.000.000	100.000.000	
116	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	DRAINASE	POTERAN	POTERAN	RAAS		100.000.000	-	Dihapus
117	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	TPT	JATI	KROPOH	RAAS		150.000.000	150.000.000	
118	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	TPT	GUWA TENGAH	GUWA-GUWA	RAAS		150.000.000	150.000.000	
119	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	PENGASPALAN JALAN	KARANGNANGKA	KARANGNANGKA	RAAS		100.000.000	-	Dihapus
120	SYAIFUL BAHRI	BK DESA	DRAINASE	ROSONG BARAT	ROSONG	NONGGUNONG		100.000.000	100.000.000	
121	H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH	BKDesa Mandala	TPT (Tebing Penguat Tanah ) dijalan Desa		Mandala	Rubaru	1	50.000.000	50.000.000	
122	H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH	BKDesa	Pembangunan Tangkis Laut	Lebak	Ambunten tengah	Ambunten	1 paket	200.000.000	200.000.000	
123	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	Pengaspalan		Bantelan	Batuputih		100.000.000	100.000.000	
124	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	Pengaspalan		Bulla'an	Batuputih		100.000.000	100.000.000	
125	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	Pengaspalan		Kerta Barat	Dasuk		100.000.000	100.000.000	
126	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	Pengaspalan		Dasuk Laok	Dasuk		100.000.000	100.000.000	
127	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	Pengaspalan		Sergang	Batuputih		100.000.000	100.000.000	
128	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	Pengaspalan		Batuputih Kenek	Batuputih		100.000.000	100.000.000	
129	M. MUHRI,S.Th.I	BK DESA	saluran air		Gadding	Manding		100.000.000	100.000.000	
130	H. FADLI OKTAVIARI	BKD.Torjak	Tangkis Laut		Torjak	Kangayan		300.000.000	300.000.000	
131	H. FADLI OKTAVIARI	BKD.Saur Saebus	Tangkis Laut		Saur Saebus	Sapeken		150.000.000	150.000.000	
132	H. FADLI OKTAVIARI	BKDESA	PENGASPALAN JALAN	BAKOAN	GENDANG BARAT	GAYAM		200.000.000	200.000.000	
133	H. FADLI OKTAVIARI	BKDESA	PENGASPALAN JALAN	GENDANG	GENDANG BARAT	GAYAM		100.000.000	100.000.000	

134	H. DULSIAM, S.Ag., M.Pd	BKD.Sabuntan	Jalan Paving		Sabuntan	Sapeken		400.000.000	400.000.000	
135	H. DULSIAM, S.Ag., M.Pd	BKD.Sabuntan	Tangkis Laut		Sabuntan	Sapeken		300.000.000	300.000.000	
136	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	BKDESA	PENGASPALAN	GUNGGUNG TIMUR	GUNGGUNG	BATUAN		200.000.000	200.000.000	
137	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	BKDESA	PENGASPALAN	CANCANGAN	GUNGGUNG	BATUAN		200.000.000	200.000.000	
138	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	BKDESA	PENGASPALAN	Karengan	TALANGO	TALANGO		200.000.000	200.000.000	
139	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	BKDESA	PENGASPALAN	BERU	TALANGO	TALANGO		100.000.000	100.000.000	
140	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	BKDESA	PENGASPALAN JALAN	GALIS	GENDANG BARAT	GAYAM		200.000.000	200.000.000	
141	H. HERMAN DALI KUSUMA, MH	BKDESA	PENGASPALAN JALAN	KENGGANG	GENDANG BARAT	GAYAM		200.000.000	200.000.000	
142	H.RISNAWI,SH	BKD.KOLPO	DRAINASE	TRI TINGGI	KOLPO	BATANG BATANG		100.000.000	100.000.000	
143	H.RISNAWI,SH	BKD.BATANG BATANG	SALURAN AIR		BATANG-BATANG	BATANG BATANG		100.000.000	100.000.000	
144	H.RISNAWI,SH	BKD.KOLPO	PENGASPALAN	KAYU	KOLPO	BATANG BATANG		200.000.000	200.000.000	
145	H.RISNAWI,SH	BKD.BATANG BATANG	TEMBOK PENAHAN	JERUK POROT	BATANG-BATANG	BATANG BATANG		100.000.000	100.000.000	
146	ACH. NAUFIL MS, S.Sy.	BK. Desa	Pengaspalan (Peningkatan)		Rombiya Timur	Ganding		200.000.000	200.000.000	
147	KH. SAMI'ODDIN, S.Pd.	BK Desa	Palengsingan	Pajagalan	Batang-Batang Laok	Batang-Batang		100.000.000	100.000.000	
148	KH. SAMI'ODDIN, S.Pd.	BK Desa	Jln Paving	Tengah	Rombek Guna	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
149	KH. SAMI'ODDIN, S.Pd.	BK Desa	Drainase	Sokon	Jadung	Dungkek		100.000.000	100.000.000	
150	KH. SAMI'ODDIN, S.Pd.	BK Desa	TPT.Tembok Penahan Tanah	Asta	Banjar Timur	Gapura		100.000.000	100.000.000	
151	UMAR	BK DESA	PLENGSENGAN	LAMBENG DEJE	KALIKATAK	ARJASA		200.000.000	200.000.000	
152	UMAR	BK DESA	PENGASPALAN JALAN		DUNGKEK	DUNGKEK		100.000.000	100.000.000	
153	UMAR	BK DESA	Rehab Masjid Almunawwaroh		Keles	Ambunten		150.000.000	150.000.000	
154	UMAR	BK DESA	Bor Air Bersih		Tambaagung Tengah	Ambunten		150.000.000	150.000.000	
155	AKIS JASULI, S. IP., M. Hub. Int.	BK Desa Saur Saebus	Pembangunan Tangkis Laut	Sumur Kembar	Saur Saebus	Sapeken		200.000.000	200.000.000	
156	AKIS JASULI, S. IP., M. Hub. Int.	BK Desa Saur Saebus	Pembangunan Air Bersih		Saur Saebus	Sapeken		200.000.000	200.000.000	
157	AKIS JASULI, S. IP., M. Hub. Int.	BK Desa Sakala	Pembangunan Tangkis Laut		Sakala	Sapeken		200.000.000	200.000.000	
158	AKIS JASULI, S. IP., M. Hub. Int.	BK Desa Saur Saebus	Rehab Tambat Labuh		Saur Saebus	Sapeken		200.000.000	200.000.000	
159	H. SAEFUDDIN ARIF	BK Desa Basoka	Pengaspalan	Gunung Togel	Basoka	Rubaru		100.000.000	100.000.000	

160	H. SAEFUDDIN ARIF	BK Desa Kalinganyar	Pengaspalan		Kalinganyar	Arjasa		200.000.000	200.000.000	
161	M. RAMZI, S. IP	BK Desa Pragaan Daya	Pengaspalan		Pragaan Daya	Pragaan		200.000.000	200.000.000	
162	M. RAMZI, S. IP	BK Desa Pragaan Daya	Tebing Jalan		Pragaan Daya	Pragaan		150.000.000	150.000.000	
163	M. RAMZI, S. IP	BK Desa Pragaan Daya	Hippam		Pragaan Daya	Pragaan		150.000.000	150.000.000	
164	M. RAMZI, S. IP	BK Desa Kaduara Timur	Pengaspalan		Kaduara Timur	Pragaan		200.000.000	200.000.000	
165	M. RAMZI, S. IP	BK Desa Guluk-guluk	Pengaspalan		Guluk-guluk	Guluk-guluk		200.000.000	200.000.000	
166	Hj. MELLY SUFIANTI, S. Pd.	BK Desa Gedang-gedang	Pengaspalan	Tanjung	Gedang-gedang	Batuputih		300.000.000	300.000.000	
167	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Beringinan	Gapurana	Talango		200.000.000	200.000.000	
168	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Gapurana Laok	Gapurana	Talango		200.000.000	200.000.000	
169	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Pangdagang	Gapurana	Talango		200.000.000	200.000.000	
170	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Palasa	Gapurana	Talango		200.000.000	200.000.000	
171	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Paving	Somor Alem I	Gapurana	Talango		100.000.000	100.000.000	
172	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Paving	Saro'an Laok	Gapurana	Talango		100.000.000	100.000.000	
173	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Gapurana	Paving	Saro'an Laok	Gapurana	Talango		100.000.000	100.000.000	
174	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Essang	Pengaspalan	Guntong	Essang	Talango		100.000.000	100.000.000	
175	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Essang	Pengaspalan	Pangmaleng	Essang	Talango		200.000.000	200.000.000	
176	WIWID HARJO YUDANTO, SE	BK Desa Poteran	Pengaspalan	Addun	Poteran	Talango		100.000.000	100.000.000	
177	MUHAMMAD YUSUF, SE	BK Desa Kasengan	Pengaspalan		Kasengan	Manding		200.000.000	-	Dihapus
178	MUHAMMAD YUSUF, SE	BK Desa Kasengan	Pembangunan Mushalla		Kasengan	Manding		200.000.000	-	Dihapus
179	ROZAH KAUTSAR ARDHI	BK Desa Ambunten Tengah	Tangkis Laut		Ambunten Tengah	Ambunten		200.000.000	200.000.000	
180	ROZAH KAUTSAR ARDHI	BK Desa Batuputih Kenek	Pengaspalan		Batuputih Kenek	Batuputih		200.000.000	200.000.000	
181	H.RISNAWI,SH	BKDESA	PENGASPALAN		TANAH MERAH	SARONGGI		300.000.000	160.000.000	
182	H.RISNAWI,SH	BKDESA	TPT		TANAH MERAH	SARONGGI		300.000.000	150.000.000	
183	ROZAH KAUTSAR ARDHI	BKDESA	PENGASPALAN		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK
184	ROZAH KAUTSAR ARDHI	BKDESA	TPT		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK
185	ROZAH KAUTSAR ARDHI	BKDESA	IRIGASI		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK

186	ROZAH KAUTSAR	ARDHI	BKDESA	PENGASPALAN		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK
187	ROZAH KAUTSAR	ARDHI	BKDESA	PENGASPALAN		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK
188	ROZAH KAUTSAR	ARDHI	BKDESA	IRIGASI		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK
189	ROZAH KAUTSAR	ARDHI	BKDESA	TPT		GADU BARAT	GANDING		-	100.000.000	PAK
190	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos		BKDESA	PENGASPALAN JALAN	GUNUNG PAPAN 1	GEDANG-GEDANG	BATUPUTIH		-	203.000.000	PAK
191	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos		BKDESA	PENGASPALAN JALAN		GEDANG-GEDANG	BATUPUTIH			100.000.000	PAK
192	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos		BKDESA	PENGASPALAN JALAN	GUNUNG PAPAN	GEDANG-GEDANG	BATUPUTIH			200.000.000	PAK
193	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos		BKDESA	PENGASPALAN JALAN	PACUNG	BANTELAN	BATUPUTIH		-	200.000.000	PAK
194	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos		BKDESA	PENGASPALAN JALAN	TANJUNG	GEDANG-GEDANG	BATUPUTIH		-	155.000.000	PAK
195	JUBRIYANTO, S.Pd.I		BKDESA	PENGASPALAN JALAN	TALONDANG	BANTELAN	BATUPUTIH		-	200.000.000	PAK
196	SYAIFUL BAHRI		BKDESA	PENGASPALAN JALAN		JAMBUIR	GAYAM		-	100.000.000	PAK
197	SYAIFUL BAHRI		BKDESA	TANGKIS LAUT		KETUPAT	RA'AS		-	100.000.000	PAK
198	H. MASDAWI		BKDESA	TANGKIS LAUT	BURAJA	LAPA LAOK	DUNGKEK		-	150.000.000	PAK
199	M.SYUKRI,S.H		BKDESA	PENGASPALAN JALAN		PANCOR	GAYAM		-	100.000.000	PAK
200	M.SYUKRI,S.H		BKDESA	PENGASPALAN JALAN		PANCOR	GAYAM		-	100.000.000	PAK
201	BADRUL AINI		BKDESA	DRAINASE	TENGAH	SUMBER NANGKA	ARJASA		-	100.000.000	PAK
202	BADRUL AINI		BKDESA	DRAINASE	TIMUR	SUMBER NANGKA	ARJASA		-	100.000.000	PAK
203	BADRUL AINI		BKDESA	RABAT BETON	TENGAH	SUMBER NANGKA	ARJASA		-	100.000.000	PAK
204	MUH. YUSUF, SE / RIMBUN HIDAYAT		BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Bunis	Gapurana	Talango		-	200.000.000	PAK
205	MUH. YUSUF, SE / RIMBUN HIDAYAT		BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Bunis	Gapurana	Talango		-	200.000.000	PAK
206	MUH. YUSUF, SE / RIMBUN HIDAYAT		BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Palasa	Gapurana	Talango		-	200.000.000	PAK
207	MUH. YUSUF, SE / RIMBUN HIDAYAT		BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Saro'an Daya	Gapurana	Talango		-	100.000.000	PAK
208	MUH. YUSUF, SE / RIMBUN HIDAYAT		BK Desa Gapurana	Pengaspalan	Gapurana Laok	Gapurana	Talango		-	100.000.000	PAK
209	MUH. YUSUF, SE / RIMBUN HIDAYAT		BK Desa Essang	Pengaspalan	Saba	Essang	Talango		-	200.000.000	PAK
210	SUHARINOMO, SH		BK DESA SAKALA	PEMBANGUNAN TANGKIS LAUT		SAKALA	SAPEKEN		-	200.000.000	PAK
211	SUHARINOMO, SH		BK DESA	IRIGASI	SUMBER PAYUNG	BATAAL BARAT	GANDING		-	200.000.000	PAK

212	SUHARINOMO, SH	BK DESA	IRIGASI	SUMBER PAYUNG	BATAAL BARAT	GANDING	-	200.000.000	PAK
213	SUHARINOMO, SH	BK DESA	TPT		GUNG GUNG	BATUAN	-	200.000.000	PAK
214	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	PERBAIKAN JALAN DAN JEMBATAN		TAMBAAGUNG TIMUR	AMBUNTEN	-	200.000.000	PAK
215	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BK DESA	TPT		BELUK ARES	AMBUNTEN	-	100.000.000	PAK
216	MOHAMAD IMRAN	BKDESA	PENINGKATAN JALAN		BANASARE	RUBARU	-	200.000.000	PAK
217	Drs. H. MOHAMMAD HANAFI, MM	BKDESA	PENGASPALAN	SOMOR ANYAR	SAMBAKATI	ARJASA	-	200.000.000	PAK
218	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	PENGASPALAN JALAN	KEMBANGSOKA	PRANCAK	PASONGSONGAN	-	200.000.000	PAK
219	H. FAISAL MUHLIS, S.Ag	BKDESA	PEMBANGUNAN TPT		MEDDELAN	LENTENG	-	300.000.000	PAK
220	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BKDESA	REHAB MASJID NURUL IMAN		AMBUNTEN TENGAH	AMBUNTEN	-	190.000.000	PAK
221	KH. SYAIFUL BARI,S.Pd	BKDESA	DRAINASE		DUKO	RUBARU	-	100.000.000	PAK
TOTAL BK DESA							26.040.000.000	28.808.000.000	
BELANJA MODAL									
1	DRS. MOH. WASHIL	CV. TERANG JAYA	TPT		BAKEONG	GULUK-GULUK	50.000.000	-	Dihapus
2	DRS. MOH. WASHIL	CV. TERANG JAYA	PENGASPALAN		BAKEONG	GULUK-GULUK	100.000.000	-	Dihapus
3	GUNAIFY SYARIF ARRODHY	KONTRAKTUAL	IRIGASI		DAPENDA	BATANG BATANG	50.000.000	50.000.000	
4	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos	CV Widuri Karya	Rabat Beton	Duko	Ketawang Laok	Guluk-Guluk	100.000.000	-	Dihapus
5	AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos	CV Widuri Karya	Drainase Jalan Kabupaten	Jln Raya Guluk-Guluk	Guluk-Guluk	Guluk-Guluk	100.000.000	-	Dihapus
TOTAL BELANJA MODAL							400.000.000	50.000.000	
JUMLAH TOTAL							26.440.000.000	28.858.000.000	

# **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



***SEKRETARIAT DAERAH***

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
2024**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024** merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Rencana kerja Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Pembagian tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu tahunan, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran sampai pelaksanaannya sehingga memudahkan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya pada kita sekalian.

Sumenep,

2024

Pengguna Anggaran  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sumenep



**Ir. EDY RASİYADI, M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024** merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Rencana kerja Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Pembagian tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu tahunan, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran sampai pelaksanaannya sehingga memudahkan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya pada kita sekalian.

Sumenep,

2024

Pengguna Anggaran  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sumenep



**Ir. EDY RASIYADI, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

## DAFTAR ISI

<b>BAB I .....</b>	<b>3</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 LATAR BELAKANG .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024</b>	<b>9</b>
<b>2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1. <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024</i> .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>15</b>
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>20</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>20</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep untuk periode 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sumenep, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026, dengan diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Posisi Renja dalam alur perencanaan Daerah menurut UU 25/2004

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Sumenep ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Sumenep.

## **1.1 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep;
- k. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,
- d. Terwujudnya Penganggaran, serta evaluasi kegiatan yang baik.
- e. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

## **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II 2024**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan  
Triwulan II Tahun 2024

**BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**BAB IV. Penutup**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Sumenep adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah.

##### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja pada Triwulan sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Adapun penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing dapat disajikan dalam tabel berikut. **Sekretariat Daerah pada tahun 2024 melaksanakan 3 Program dan 21 Kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan total anggaran belanja sebesar Rp 58.002.520.640,00 terbagi ke dalam anggaran belanja 9 Bagian.**

Dibawah ini diuraikan evaluasi secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
KABUPATEN/KOTA  
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan</p> <p>% OPD yang menindaklanjuti Monev, peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja</p> <p>% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi</p> <p>% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana</p> <p>% Layanan Keprotokolanan yang terpenuhi</p>	45.769.629.746	18.424.784.441	40,26%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	26.638.800	2.165.200	8,13%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.451.000	0	0,00%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.198.600	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.925.800	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.699.400	2.165.200	46,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.495.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.179.500	0	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.689.500	0	0,00%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi</b>	<b>24.464.147.220</b>	<b>11.482.635.513</b>	<b>46,96%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24.399.190.820	11.482.635.513	47,06%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.610.500	0	0,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.206.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.663.100	0	0,00%
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.917.800	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.496.300	0	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Mulai Januari sampai Desember	5.062.700	0	0,00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi BMD setda yang dipenuhi</b>	<b>73.146.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.954.700	0	0,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.305.900	0	0,00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.886.000	0	0,00%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>	<b>7.782.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.782.400	0	0,00%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>5.147.765.160</b>	<b>1.947.673.091</b>	<b>37,84%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	385.342.100	156.642.090	40,65%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.095.958.760	511.192.335	46,64%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	343.528.700	18.315.625	5,33%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lokasi dipenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.190.600	34.000.000	35,72%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.201.472.000	1.227.523.041	38,34%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.273.000	0	0,00%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan</b>	<b>1.189.733.656</b>	<b>362.790.000</b>	<b>30,49%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.189.733.656	362.790.000	30,49%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemd yang disediakan</b>	<b>3.824.820.445</b>	<b>1.647.727.078</b>	<b>43,08%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.282.409.322	619.105.278	48,28%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.542.411.123	1.028.621.800	40,46%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara</b>	<b>3.563.763.757</b>	<b>707.841.027</b>	<b>19,86%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	502.800.000	278.387.627	55,37%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.057.939.550	376.848.400	35,62%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214.020.000	52.605.000	24,58%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.789.004.207	0	0,00%
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi</b>	<b>1.872.472.128</b>	<b>392.993.823</b>	<b>20,99%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.099.472.128	92.993.823	8,46%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	153.000.000	0	0,00%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	0	0
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	300.000.000	50,00%
	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kerumahtanggaan Setda yang difasilitasi</b>	<b>3.805.352.680</b>	<b>1.473.632.750</b>	<b>38,73%</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	440.797.000	246.464.550	55,91%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	263.060.080	141.886.700	53,94%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3.101.495.600	1.085.281.500	34,99%
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan</b>  <b>Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi</b>  <b>Persentase OPD yang dibina yang mengikuti KIPP</b>  <b>Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP</b>	<b>803.807.600</b>	<b>195.464.800</b>	<b>24,32%</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	296.608.100	15.051.700	5,07%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	292.839.500	113.565.700	38,78%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	141.531.000	46.486.900	32,85%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	72.829.000	20.360.500	27,96%
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan</b>	<b>1.000.199.300</b>	<b>211.861.159</b>	<b>21,18%</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	487.867.000	129.034.159	26,45%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	324.614.100	32.735.500	10,08%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	187.718.200	50.091.500	26,68%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)
1	2	3	4	5	6
2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan % indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan % Kerjasama Daerah yang difasilitasi % Harmonisasi Produk Hukum Daerah % Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	10.148.742.974	3.276.682.865	32,29%
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Persentase Laporan PPD Kabupaten tepat waktu	874.952.404	325.425.000	37,19%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	289.235.400	8.762.500	3,03%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	399.060.004	249.709.550	62,57%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	186.657.000	66.952.950	35,87%
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, Pendidikan, dan Kepemudaan, Kesehatan dan Kemasyarakatan</b>	<b>8.360.085.350</b>	<b>2.519.659.390</b>	<b>30,14%</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.942.268.050	2.406.315.390	34,66%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	348.689.600	28.485.000	8,17%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1.069.127.700	84.859.000	7,94%
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase pendampingan Hukum dan Penyusunan Produk Hukum yang terselesaikan</b>	<b>846.176.420</b>	<b>413.303.705</b>	<b>48,84%</b>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	204.385.800	112.095.425	54,85%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	388.026.800	195.208.380	50,31%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	253.763.820	105.999.900	41,77%
	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi</b>	<b>67.528.800</b>	<b>18.294.770</b>	<b>27,09%</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	67.528.800	18.294.770	27,09%
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah % Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah % Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam % perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	2.084.147.920	676.452.228	32,46%
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>588.862.100</b>	<b>222.903.721</b>	<b>37,85%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	365.262.700	150.868.183	41,30%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	107.737.900	39.264.500	36,44%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	115.861.500	32.771.038	28,28%
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan</b>	<b>888.170.400</b>	<b>280.774.535</b>	<b>31,61%</b>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	624.285.100	213.955.035	34,27%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	159.011.600	6.188.000	3,89%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	104.873.700	60.631.500	57,81%
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik</b>	<b>363.195.520</b>	<b>88.958.610</b>	<b>24,49%</b>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	233.503.000	48.794.330	20,90%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50.402.520	18.047.100	35,81%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	79.290.000	22.117.180	27,89%
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam</b>	<b>243.919.900</b>	<b>83.815.362</b>	<b>34,36%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Asistensi dan Monitoring kegiatan urusan DBHCHT	80.370.300	26.435.862	32,89%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	80.639.900	34.546.800	42,84%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	82.909.700	22.832.700	27,54%

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan perangkat daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	PAGU			KET
				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan  % OPD yang menindaklanjuti Monev, peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja  % Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi  % OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana  % Layanan Keprotokolanan yang terpenuhi	100%	40.303.746.402	45.769.629.746	5.465.883.344	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	26.638.800	26.638.800	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.451.000	5.451.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.198.600	4.198.600	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.925.800	3.925.800	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	4.699.400	4.699.400	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.495.000	2.495.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.179.500	4.179.500	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1.689.500	1.689.500	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi	100%	21.014.028.696	24.454.147.220	3.440.118.524	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	20.959.072.296	24.399.190.820	3.440.118.524	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	17.610.500	17.610.500	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	7.206.000	7.206.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	11.663.100	11.663.100	0	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	PAGU			KET
				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.917.800	3.917.800	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	9.496.300	9.496.300	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Mulai Januari sampai Desember	1	5.062.700	5.062.700	0	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi BMD setda yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>73.146.600</b>	<b>73.146.600</b>	<b>0</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	11.954.700	11.954.700	0	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	49.305.900	49.305.900	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	11.886.000	11.886.000	0	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>7.782.400</b>	<b>7.782.400</b>	<b>0</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	7.782.400	7.782.400	0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>4.110.270.660</b>	<b>5.147.765.160</b>	<b>1.037.494.500</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	335.396.100	385.342.100	49.946.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	1.045.271.560	1.095.958.760	50.687.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	405.680.400	343.528.700	(62.151.700)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lokasi dipenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	321	78.090.600	95.190.600	17.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	2.219.559.000	3.201.472.000	981.913.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500	26.273.000	26.273.000	0	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>259.331.030</b>	<b>1.189.733.656</b>	<b>930.402.626</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	259.331.030	1.189.733.656	930.402.626	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>4.223.419.255</b>	<b>3.824.820.445</b>	<b>(398.598.810)</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.525.925.522	1.282.409.322	(243.516.200)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.697.493.733	2.542.411.123	(155.082.610)	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>3.718.141.253</b>	<b>3.563.763.757</b>	<b>(154.377.496)</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	502.800.000	502.800.000	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	982.859.550	1.057.939.550	75.080.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	158.520.000	214.020.000	55.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	2.073.961.703	1.789.004.207	(284.957.496)	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	PAGU			KET
				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	1.902.472.128	1.872.472.128	(30.000.000)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1.099.472.128	1.099.472.128	0	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	153.000.000	153.000.000	0	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	50.000.000	20.000.000	(30.000.000)	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	600.000.000	600.000.000	0	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Setda yang difasilitasi	100%	3.528.012.680	3.805.352.680	277.340.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4	380.497.000	440.797.000	60.300.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	244.360.080	263.060.080	18.700.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	9	2.903.155.600	3.101.495.600	198.340.000	
	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Persentase OPD yang dibina yang mengikuti KIPP Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP	100%	678.807.600	803.807.600	125.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107	262.267.200	296.608.100	34.340.900	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	259.135.600	292.839.500	33.703.900	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	14	107.578.200	141.531.000	33.952.800	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55	49.826.600	72.829.000	23.002.400	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100%	761.695.300	1.000.199.300	238.504.000	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	289.363.000	487.867.000	198.504.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14	284.614.100	324.614.100	40.000.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	187.718.200	187.718.200	0	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	PAGU			KET
				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan  % indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan  % Kerjasama Daerah yang difasilitasi  % Harmonisasi Produk Hukum Daerah  % Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	100%	8.882.850.974	10.148.742.974	1.265.892.000	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan PPD Kabupaten tepat waktu	98%	714.952.404	874.952.404	160.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	189.235.400	289.235.400	100.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	339.060.004	399.060.004	60.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	186.657.000	186.657.000	0	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, Pendidikan, dan Kepemudaan, Kesehatan dan Kemasyarakatan</b>	100%	7.344.141.350	8.360.085.350	1.015.944.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	6.124.318.050	6.942.268.050	817.950.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	248.695.600	348.689.600	99.994.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	971.127.700	1.069.127.700	98.000.000	
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase pendampingan Hukum dan Penyusunan Produk Hukum yang terselesaikan</b>	100%	756.228.420	846.176.420	89.948.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5	195.985.800	204.385.800	8.400.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	296.578.800	388.026.800	91.448.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	699	263.663.820	253.763.820	(9.900.000)	
	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi</b>	100%	67.528.800	67.528.800	0	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21	67.528.800	67.528.800	0	
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah  % Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah  % Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam  % perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan  Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan	100%	1.588.778.220	2.084.147.920	495.369.700	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan</b>	100%	488.972.300	588.862.100	99.889.800	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	265.372.900	365.262.700	99.889.800	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA	PAGU			KET
				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	107.737.900	107.737.900	0	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	115.861.500	115.861.500	0	
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>592.470.500</b>	<b>888.170.400</b>	<b>295.699.900</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	381.813.200	624.285.100	242.471.900	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	128.283.600	159.011.600	30.728.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	82.373.700	104.873.700	22.500.000	
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>263.415.520</b>	<b>363.195.520</b>	<b>99.780.000</b>	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	75	123.663.000	233.503.000	109.840.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	60.462.520	50.402.520	(10.060.000)	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5	79.290.000	79.290.000	0	
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam</b>	<b>100%</b>	<b>243.919.900</b>	<b>243.919.900</b>	<b>0</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dolumen Koordinasi, Sinkronisasi, Asistensi dan Monitoring kegiatan urusan DBHCHT	1	80.370.300	80.370.300	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	80.639.900	80.639.900	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	82.909.700	82.909.700	0	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 maka Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada SKPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada beberapa dokumen yaitu: 1) rancangan awal RKPD; 2) Renstra SKPD; 3) hasil evaluasi dan masalah yang dihadapi dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Renja SKPD dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku serta diturunkan dalam bentuk Rencana Aksi yang memberikan *guideline* pelaksanaan program dan kegiatan. **Renja SKPD akan menjadi pedoman bagi SKPD untuk Menyusun RKA dan DPA SKPD.** Dengan demikian, pelaksanaan anggaran berpedoman kepada DPA TA berkenaan tersebut. Secara periodik akan dilakukan evaluasi baik atas pencapaian target maupun penyerapan anggaran. Dengan demikian, keseluruhan permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti serta akan dijadikan bahan penyusunan Renja tahun berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN  
SUMENEP 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumenep.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun 2024.

Perumusan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengakomodir program-program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk tahun 2024 diwajibkan menyusun Rencana Kerja OPD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan rencana kerja berpedoman pada peraturan tersebut, yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Renja Perubahan Perangkat Daerah dijadikan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Sumenep.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di ubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

### **1.3. MAKSUD & TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

1. Menjadi Pedoman dalam penyusunan rancanfan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk

dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024,

2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
3. Sebagai Sarana Pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2024,
4. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan dan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.3. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

**Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

**Bab IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas dinamika kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Visi Kepala Daerah adalah :

**“SUMENEP UNGGUL MANDIRI SEJAHTERA.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
- 4) Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan berkearifan lokal.

- 5) Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep melaksanakan misi ketiga yaitu : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat”**.

Untuk mewujudkan misi ketiga tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep melaksanakan tujuan yakni meningkatkan kualitas layanan publik. Sedangkan sasaran yang akan dicapai yaitu **sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**.

Guna mencapai sasaran Sekretariat DPRD dimaksud, dapat dipenuhi melalui **indikator Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Sekretariat DPRD**. Dalam hal ini, responden yang akan menilai kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yakni Pimpinan dan Anggota DPRD serta elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan pengaduan ke gedung DPRD.

Pimpinan dan Anggota DPRD akan menilai pelayanan fasilitasi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan elemen masyarakat akan menilai pelayanan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam menerima kunjungan audiensi maupun aksi unjuk rasa kelompok masyarakat. Melalui survey yang dilakukan terhadap responden tersebut nantinya akan diketahui tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berupa kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD.
2. Pembahasan kebijakan anggaran.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Peningkatan kapasitas DPRD.
5. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.
6. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD.
7. Pembahasan kerjasama daerah.
8. Fasilitasi tugas DPRD.

Disamping itu, ditopang pula melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berupa kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Adminsitration keuangan perangkat daerah.
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
4. Administrasi umum perangkat daerah.
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
8. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD.
9. Layanan administrasi DPRD.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Pencapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun					Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	<b>Indikator Sasaran :</b>												
	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD</b>												
	Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD			80,65	81,15	81,65	82,15	82,65	80,71	81,27	81,70	82,20	
2	<b>Indikator Program :</b>												
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>												
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%	98,54	99,38	95,00	-	
	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>												
	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	89,57	96,25	95,00		

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep mengatur secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi:
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Kelompok jabatan fungsional
- c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :
  1. Kelompok jabatan fungsional
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas:
  1. Kelompok jabatan fungsional
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan fungsinya meliputi :

- a. Pemberian dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Pemberian dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.
- c. Pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.
- d. Pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berjumlah 64 orang pegawai yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 4 (empat) orang Kepala Bagian
3. 1 (satu) orang Kasubbag
4. 11 (sebelas) orang jabatan Fungsional
5. 45 (empat puluh tujuh) orang pelaksana/staf
6. 2 (dua) orang PPPK

Selain dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

- a. Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebanyak 4 (empat) orang
- b. Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 7 (tujuh) orang
- c. Tenaga K-II sebanyak 1 (satu) orang
- d. Tenaga Outsourcing yang terdiri dari Tenaga Pengamanan Dalam sebanyak 10 (sepuluh) orang, Tenaga Kebersihan sebanyak 10 (sepuluh) orang, Tenaga Sopir sebanyak 8 (delapan) orang.
- e. Tenaga Keamanan Satpol PP sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Disamping dukungan sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kabupaten Sumenep dengan lokasi di Jalan Trunojoyo Nomor 124 Sumenep.

1. Gedung DPRD
2. Gedung Sekretariat DPRD

Direncanakan untuk Pembangunan Gedung DPRD Kab. Sumenep yang baru akan ditempati pada tahun 2025 yang berlokasi di Jalan Raya Sumenep Pamekasan.

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1063 m<sup>2</sup>, terdiri dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
  - Ruang Komisi Komisi
  - Ruang Wakil Ketua
  - Ruang Fraksi Fraksi
  - Ruang Resepsionis
  - Toilet
- Lantai 2
  - Ruang Ketua DPRD
  - Ruang VVIP
  - Ruang Graha Paripurna
  - Ruang Badan Musyawarah
  - Ruang Badan Kehormatan
  - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - Toilet

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2023 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda 4 : 14 unit
- Kendaraan roda 2 : 27 unit

2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

Genset, CCTV, Televisi, Pompa air dan tandon.

## **2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA SEKRETARIAT DPRD KAB. SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : SID TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Pemanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan																												
Bekasat DPRD																												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	4 02 01	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	497,00	43.345.747.512	489,84	44.856.335.030	1.396,00	47.565.554.223	418,00	10.119.195.154	76,00	11.881.913.435			1.283	35.372.528.607	1.684,00	22.021.813.589	37,70	31,71	175,80	86.432.448.585			Sekretariat DPRD	
		4 02 01 2.01	Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan realisasi kinerja Perangkat daerah	18	274.969.714	18	116.754.150	18	66.964.100	6	1.260.000	2	5.215.284	0	0	0	6.415.284	44,44	9,71	26	117.168.634						
		4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4	57.969.510	4	9.283.099	4	5.726.100	2	1.200.000	0	0	0	0	2	1.200.600	50,00	20,96	6	10.483.000						
		4 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	Jumlah Dokumen RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	10.976.400	1	4.861.550	1	1.047.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	4.861.550						
		4 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD	1	16.946.810	1	4.437.410	1	916.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	4.437.410						
		4 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	22.811.540	1	4.416.050	1	626.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	4.406.000						
		4 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	16.723.820	1	4.439.574	1	911.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	4.439.574						
		4 02 01 2.01 0006	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4	126.638.810	4	79.860.412	4	52.967.100	3	0	0	5.215.284	0	0	0	5.215.284	75,00	9,85	7	85.165.604						
		4 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	22.941.684	6	3.386.055	6	3.575.000	1	2	0	0	0	0	3	0	50,00	0,00	9	3.386.055						
		4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	189	6.472.246.281	189	6.855.987.335	962	7.714.342.895	288	1.178.888.129	348	2.528.629.485	0	0	0	546	3.858.829.614	96,33	47,94	657	18.355.827.348					
		4 02 01 2.02 0001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	6.442.789.783	65	6.645.058.907	910	7.688.421.341	195	1.170.800.128	323	2.516.684.985	0	0	0	520	3.880.465.114	97,14	48,00	685	10.335.554.021					
		4 02 01 2.02 0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	12	10.256.296	3	3.480.000	0	0	0	0	6	3.460.000	50,00	22,52	6	3.460.000						

4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44	29.471.500	44	10.078.835	44	10.022.548	10		12	5.874.500	0					22	5.874.500	50,00	55,20	06	16.613.228						
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	18	222.432.000	18	283.985.448	18	223.746.568	0	12.638.960	0		0						0	12.638.960		5,05	19	296.145.448					
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Alat/Buku Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Alat/Buku Kelengkapannya	2		3	128.598.240	2	104.172.580	0		0	0	0								0,00	3	128.598.240						
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	222.652.000	16	154.913.200	16	119.576.000	0	12.638.000	0			0								16,57	10	107.549.200					
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	47	444.643.196	47	838.815.344	47	445.888.508	18	65.714.960	4	33.564.980	0							14	93.281.809	29,19	22,28	61	455.618.919				
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	10	26.038.340	10	30.386.600	10	23.648.900	1		0	10.757.000	0							1	10.757.000	10,00	46,48	11	41.153.500				
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	5		5	427.575.484	5	101.415.000	0		0	0	0									0,00	5	427.575.484					
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Bekalan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Bekalan dan Pengadaan yang Disediakan	8	157.878.800	8	99.191.350	6	69.408.700	0		0	0	0									0,00	8	99.191.350					
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralengkapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	183.448.000	12	181.072.000	12	148.007.000	0		4	22.807.800	0							4	22.807.800	33,33	15,25	18	201.679.800				
4	02	01	2.06	0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	102.508.000	14	191.580.000	14	101.180.000	9	65.734.000	0		0							9	65.734.000	64,28	64,71	23	167.314.000				
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	16	185.434.308	28	259.816.732	29	325.095.689	0		0	54.328.960	0							0	54.328.960		17,21	24	316.138.732				
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	16	895.484.260	28	269.816.732	29	325.095.689	0		0	56.320.000	0										17,77	28	316.138.732				
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	28	1.191.348.114	28	1.382.483.528	28	1.311.191.702	18	246.573.663	6	317.197.508	0							18	582.681.193	57,14	41,69	44	1.265.144.712				
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.781.408	12	3.890.417	12	3.804.600	3	17.500	3	990.000	0							5	1.027.500	50,00	26,48	18	4.887.917				
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	483.045.000	12	458.222.800	12	465.893.352	3	99.700.704	3	10.820.160	0							8	181.520.824	50,00	36,62	18	659.743.124				
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	724.541.196	4	840.550.212	4	812.293.150	4	154.895.413	0		225.297.340	0						4	388.152.759	100,00	46,81	8	1.220.700.071				
4	02	01	2.08		Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	113	804.612.112	113	929.997.277	113	838.724.976	22	249.326.212	28	154.238.544	0							51	484.461.856	65,13	48,19	164	1.333.598.133				

4	02	01	2.09	000	Persediaan Jasa pereliharaan biaya pemeliharaan dan Pakai Kenderaan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan-Pajaknya	41	625.216.000	41	642.356.840	41	618.778.000	7	154.428.387	8	96.400.094	0	0	0	0	16	252.823.481	38.02	40.88	51	886.177.321
4	02	01	2.09	0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5		5	16.889.200	5	8.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5	16.889.200	
4	02	01	2.09	0000	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	128.704.912	5	211.113.237	5	185.470.676	5	90.946.915	0	37.982.495	0	0	0	0	5	128.832.320	100,00	77,74	16	338.865.557
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62	58.891.200	62	56.114.000	62	45.760.000	10	4.750.000	20	17.853.055	0	0	0	0	30	22.893.055	48,39	48,41	92	61.717.055
4	82	81	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	127	28.580.878.929	186	29.542.819.817	756	38.524.575.283	156	7.382.987.777	297	7.135.643.821	0	0	0	0	447	14.487.951.686	58,13	67,58	552	44.838.371.425
4	02	01	2.15	000	Penyediaan Anggaran Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65	27.964.128.105	50	28.411.800.897	700	29.394.841.903	150	7.334.908.787	250	6.585.428.707	0	0	0	0	400	14.000.337.414	57,14	47,53	450	42.411.708.111
4	02	01	2.15	0000	Persediaan Pakan Dinas dan Abut DPRD	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Abut DPRD yang disediakan	12	471.547.100	6	951.255.500	6	553.081.000	0	2.785.000	0	20.213.000	0	0	0	0	0	22.998.000	4,18	8	8	974.253.500
4	02	01	2.15	0000	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	145.195.724	50	179.303.020	50	576.640.300	0	24.614.070	47	450.982.124	0	0	0	0	47	474.616.194	84,00	82,31	87	953.919.814
4	02	01	2.15		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	21	4.649.871.848	21	4.871.471.086	21	6.104.546.346	4	1.811.827.254	6	1.578.786.898	0	0	0	0	18	2.881.824.244	47,62	43,93	31	7.633.259.258
4	02	01	2.15	0000	Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	4.193.586.400	20	4.771.023.740	20	5.804.679.080	3	679.878.710	6	1.596.184.950	0	0	0	0	6	2.576.183.380	45,00	49,93	29	7.347.767.100
4	02	01	2.15	0004	Persediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	1	355.275.440	1	199.867.295	1	199.867.295	1	31.048.544	0	74.912.340	0	0	0	0	1	105.860.884	100,00	53,87	2	305.528.150
4	82	82			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	294,80	27.589.899.888	299,80	24.278.567.927	299,80	24.524.275.547	185,80	4.696.515.348	39,80	8.844.992.678	0	0	0	0	184,80	13.351.508.818	48,92	53,46	188	37.631.679.945
4	82	81	2.81		Pembentukan Penda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen pembentukkan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	15	8.846.639.648	15	6.514.267.888	15	8.488.354.368	8	1.088.955.288	1	4.481.343.158	8	0	0	0	8	1.482.288.358	68,88	84,83	24	12.856.588.238
4	02	01	2.81	000	Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Penda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Penda	1	4.327.387.520	1	3.373.966.300	1	1.324.218.000	1	108.652.550	0	1.105.940.000	0	0	0	0	1	1.214.601.550	100,00	91,72	2	4.588.197.850
4	02	01	2.81	0000	Pembahasan Rancangan Penda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	2.529.418.120	8	2.228.421.200	8	2.806.728.400	3	705.588.700	1	1.500.961.200	0	0	0	0	4	2.207.458.000	50,00	78,82	12	4.435.881.100
4	02	01	2.81	0000	Penyenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	1	573.865.320	1	348.634.880	1	430.572.560	0	147.188.960	0	111.348.950	0	0	0	0	0	258.537.650	0,00	0,00	1	608.172.820
4	02	01	2.81	0004	Facilitas Penyusunan/Melaksanakan Kegiatan Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan/Melaksanakan Kegiatan Akademik	4	605.814.000	4	605.887.800	4	3.907.886.200	4	118.515.050	0	1.983.184.000	0	0	0	0	4	1.801.688.050	100,00	48,10	8	2.407.386.850
4	02	01	2.81	0000	Penyusunan Tata Tertib DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	10.043.798,00	1	16.947.800	1	16.942.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1	16.947.800	
4	82	81	2.82		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	5	3.369.875.448	5	4.226.193.250	5	4.951.772.750	8	187.579.542	1	1.333.724.448	8	0	0	0	1	2.181.384.838	26,88	42,44	6	6.327.487.288
4	02	01	2.82	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1.182.719.880	1	785.901.400	1	786.881.200	0	0	0	11.874.500	0	0	0	0	0	11.874.500	1,48	1	1	797.775.900
4	02	01	2.82	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1	335.943.680	1	1.021.285.350	1	791.688.060	0	0	0	31.883.000	0	0	0	0	0	31.883.000	0,00	4,62	1	1.053.152.350
4	02	01	2.82	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	249.068.180	1	757.807.800	1	98.088.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1	757.807.800	

4	02	01	2.09	000	Persediaan Jasa perantara, biaya perantara dan Pengkondisian/Perorang Dina atau Jabatan	Jumlah Kerdanan Perorang Dina atau Kerdanan Dina jabatan yang Diadana dan Diayarkan Pakainya	41	625.216.000	41	642.364.643	41	918.178.030	7	154.433.387	0	68.490.234	0	0	0	10	152.820.401	38,02	48,88	51	865.177,521
4	02	01	2.09	000	Perawatan Pesalidan dan Lainya	Jumlah Perawatan dan Lainya yang Dipelihara	5		5	18.889.283	5	8.728.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5	18.889,230
4	02	01	2.09	000	Perawatan/Perab Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara/Perabkansi	5	120.704.912	5	211.153.237	5	105.072.670	5	60.648.815	0	37.982.405	0	0	0	5	128.832.320	100,00	17,14	10	388.865,151
4	02	01	2.09	000	Perawatan/Perab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara/Perabkansi	82	58.891.200	82	59.114.002	82	45.752.030	10	4.793.200	20	17.853.255	0	0	0	30	22.833.955	48,38	48,41	82	81.717,855
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	122	28.589.876.528	106	29.542.819.817	704	38.524.576.265	590	7.362.367.777	297	7.125.643.821	0	0	0	447	14.497.361.698	98,13	43,58	333	44.828.974,425
4	02	01	2.15	000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Mencair Hak Keuangan DPRD	85	27.994.128.108	89	28.411.682.887	100	29.394.847.925	150	7.324.688.737	250	6.962.428.737	0	0	0	403	14.066.227.414	57,14	43,63	460	42.411.798,111
4	02	01	2.15	000	Persediaan Pakuan Dina dan April DPRD	Jumlah Paket Pakuan Dina dan April DPRD yang Diadana	12	471.547.100	6	851.255.883	6	955.061.000	0	2.785.000	0	20.212.000	0	0	0	0	22.988.000	4,88	0	0	974.251,830
4	02	01	2.15	000	Perawatan Medial Check up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medial Check Up DPRD	50	185.196.724	50	170.303.623	50	578.648.280	0	24.614.070	47	450.682.124	0	0	0	47	474.616.184	94,30	82,31	87	983.819,814
4	02	01	2.15		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	21	4.549.871.244	21	4.931.471.906	21	4.184.546.346	4	1.811.027.254	6	1.628.796.988	0	0	0	18	2.881.824.244	47,82	43,80	31	7.833.295,254
4	02	01	2.15	000	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Sarana DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Sarana DPRD	33	4.193.596.400	33	4.771.923.743	33	5.904.679.080	3	678.678.700	6	1.596.184.850	0	0	0	8	2.576.183.580	65,00	45,82	29	7.347.787,103
4	02	01	2.15	000	Persediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan	1	390.270.444	1	190.887.283	1	106.887.285	1	31.048.544	0	74.812.540	0	0	0	1	105.883.884	100,00	92,87	2	305.528,153
4	02	02			Program Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD	Presentase pelaksanaan Tugas dan Tanggung DPRD yang terfektifitas	234,30	27.589.899.288	239,30	24.273.547.927	239,00	24.524.275.347	183,80	4.628.515.342	23,80	8.644.392.678	0	0	0	194,48	13.251.989.810	49,52	53,44	189	37.831.875,945
4	02	01	2.81		Pembelahan Perda dan Perubahan DPRD	Jumlah Dokumen pembelahan perubahan daerah dan Perubahan DPRD	15	8.846.628.088	15	6.514.287.800	15	4.489.354.368	0	1.990.955.298	1	4.481.343.108	0	0	0	1	5.482.288.350	60,88	84,93	24	12.836.596,238
4	02	01	2.81	000	Perencanaan dan Pembekalan Program Pembekalan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pembekalan Program Pembekalan Perda	1	4.327.387.520	1	3.323.968.283	1	1.324.218.030	1	106.682.550	0	1.195.948.000	0	0	0	1	1.214.891.542	100,00	91,72	2	4.586.167,853
4	02	01	2.81	000	Perencanaan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Rancangan Perda dan Daerah	8	2.520.418.120	8	2.230.421.293	8	2.906.328.400	3	706.588.700	1	1.590.881.200	0	0	0	4	2.207.466.960	87,53	79,82	12	4.425.881,160
4	02	01	2.81	000	Penyelenggaraan Kajian Pendukung Undang-undang	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Undang-undang	1	573.865.320	1	340.634.683	1	436.672.580	0	147.188.600	0	111.248.950	0	0	0	0	256.937.660	44,78	80,35	1	938.172,620
4	02	01	2.81	000	Facilitasi Penyusunan/Revisi/Modifikasi Peraturan/Keterangan/Kelembagaan/Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan/Revisi/Modifikasi Peraturan/Keterangan/Kelembagaan/Kelembagaan	4	805.914.000	4	805.987.603	4	3.007.085.220	4	118.515.500	0	1.990.184.600	0	0	0	4	1.891.069.060	100,00	46,10	8	2.437.396,663
4	02	01	2.81	000	Perencanaan Tata Tertib DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	10.042.700,00	1	10.947.603	1	18.042.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1	18.047,603
4	02	01	2.82		Pembelahan/Modifikasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil pembelahan/Modifikasi anggaran yang terfektifitas	5	3.358.875.444	5	4.224.193.256	5	4.951.722.756	0	767.575.542	1	1.323.724.468	0	0	0	1	2.161.584.038	28,88	42,44	4	6.127.487,288
4	02	01	2.83	000	Perubahan KUJ dan PPKG	Jumlah Dokumen Hasil Perubahan KUJ dan PPKG	1	1.192.718.980	1	785.061.483	1	756.881.230	0	0	0	1.874.502	0	0	0	0	1.874.500	1,56	0	1	797.775,900
4	02	01	2.83	000	Perubahan KUJ dan PPKG Peradilan	Jumlah Dokumen Hasil Perubahan/Perbaikan KUJ dan PPKG	1	335.942.660	1	1.321.288.250	1	791.688.850	0	0	0	31.883.000	0	0	0	0	31.883.000	9,52	0	1	1.833.152,350
4	02	01	2.83	000	Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Perubahan APBD	1	249.098.164	1	757.607.800	1	68.688.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1	757.607,800

4	02	01	2.07	0003	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	30	718.214.000	40	572.241.000	40	421.750.800	9	92.400.000	24	128.600.000	0	-	0	-	32	231.000.000	69,67	54,77	85	803.341.600
4	02	01	2.08		Facilitas Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas DPRD	19	1.721.522.100	17	3.467.751.932	17	3.610.928.000	3	1.051.818.200	4	1.114.029.800	0	-	0	-	7	2.163.043.300	41,16	59,89	24	5.823.695.272
4	02	01	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7	-	5	1.577.067.063	5	1.914.482.000	1	533.889.130	2	560.078.000	0	-	0	-	3	1.144.867.930	69,06	65,80	8	2.721.935.023
4	02	01	2.08	0003	Facilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	1.721.522.100	12	1.890.896.838	12	1.696.028.000	2	467.929.180	2	623.050.250	6	-	0	-	4	1.620.678.410	33,33	80,20	19	2.911.870.249
Rata-rata capaian kinerja (%)																					43,65%	42,56%				
Predikat kinerja																					Sangat Baik	Sangat Buruk				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tidak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :																										

Disusun  
Sumenep, Juni 2024  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMENEP

**YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.Pi, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19800111 200604 1 011

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

KETERANGAN RUMUS	RUMUS
KOLOM 13	PENJUMLAHAN TRIWULAN
KOLOM 14	RUMUS=(KOLOM 13/KOLOM
KOLOM 15	RUMUS =KOLOM 13
KOLOM 16	RUMUS=(KOLOM 15/KOLOM
RATA RATA CAPAIAN	RUMUS =(CAPAIAN
PREDIKAT KINERJA	RUMUS =IF(KOLOM RATA RATA

Dievaluasi  
Sumenep, Januari 2024  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP

**ARIF FIRMANO, S.TP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

## 2.3 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dimana dilihat dari latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang administrasi, hukum, perencanaan dan keuangan belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yaitu tenaga notulensi dan tenaga akuntansi yang dimiliki pegawai juga masih sangat terbatas.

b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD. Dimana belum terselenggaranya fasilitasi dukungan keahlian bagi DPRD berupa penyediaan tenaga ahli/kelompok pakar maupun staf ahli yang mempunyai tugas melakukan pendampingan dalam kegiatan pembahasan guna memenuhi kebutuhan substansif DPRD.

c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian sehingga berdampak pada masih terbatasnya penyediaan kebutuhan literatur peraturan perundangan yang sesuai dengan perkembangan

d. Masih terbatasnya sarana/prasarana perkantoran termasuk konstruksi bangunan Gedung DPRD saat ini yang mengalami kegagalan struktur bangunan sangat tidak layak ditempati untuk kegiatan rapat-rapat DPRD, namun diperkirakan untuk Tahun 2025 direncanakan akan menempati Gedung baru yang berlokasi di Raya Sumenep Pamekasan.

e. Masih terbatasnya pendukung IT untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang sedang dilakukan DPRD serta memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara *online*

## 2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, akar masalah, faktor faktor pendorong, faktor faktor penghambat, dan memperhatikan pula Visi Misi Bupati Sumenep, Renstra Kementerian/Lembaga, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah maka dapat disajikan secara rinci, isu isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada tabel dibawah ini.

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Perlunya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai agar pencapaian target fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terpenuhi.	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.
2	Pentingnya prasarana gedung DPRD yang layak dan representatif dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kegiatan kedewanan.	Pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Sumenep
3	Perlunya fasilitasi dalam rangka menampung aspirasi/pengaduan masyarakat melalui DPRD dengan memberikan kemudahan akses masyarakat melalui media on line yang dapat memberikan ruang pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.	Serap aspirasi masyarakat melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi yang handal.
4	Perlunya peningkatan kualitas kebijakan DPRD berupa produk rekomendasi, produk keputusan DPRD dan produk peraturan daerah	Pemberian dukungan substansif keahlian kepada DPRD melalui penyediaan tenaga ahli/kelompok pakar yang berkompeten di bidangnya.

	yang kualitatif.	
5	Perlunya penguatan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.	Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi peningkatan pembangunan yang melibatkan segenap elemen masyarakat di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif, pers dan unsur unsur lainnya.
6	Pentingnya juknis atau pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD yang mengatur secara spesifik pelaksanaan tugas di lapangan.	Penerapan dan pengembangan standar pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam uraian ini juga akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 yang menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah sebagai berikut :

**a. Rekomendasi**

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Sumenep.

**b. Kebijakan Strategis**

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola,
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian,
3. Menyempurnakan sistem dan metode ( tata laksana ) operasional organisasi,
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional,
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial,
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi,
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua

Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD,

8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan,
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan

**BAB III**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN**  
**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMENEP**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD dari APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 64.861.376.095,- dan pada triwulan pertama ada usulan Perubahan Mendahului APBD Tahun 2024 yaitu penambahan sebesar Rp. 7.618.454.075,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 72.479.830.170,-. Untuk Perubahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2024 menjadi Rp. 80.609.054.474,- ada penambahan sebesar Rp. 15.747.678.379,- Hal ini disebabkan karena adanya usulan penambahan anggaran pada masing-masing Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini dilaksanakan oleh dua Bagian yakni Bagian Program dan Keuangan serta Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, pada anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 45.448.555.948,- pada anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 50.241.430.507,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 4.792.874.559,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 66.064.100,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 130.759.100,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 64.695.000,-. Yaitu untuk penambahan belanja SKM Sekretariat DPRD Kab. Sumenep Semester II dan Perdin Luar daerah dalam provinsi.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 6.345.395.830,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 7.714.342.985,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.368.951.155,- untuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 6.345.391.830,- tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan 2024.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 445.660.600,- pada perubahan Renja menjadi Rp. 541.995.600,- ada penambahan anggaran sebesar Rp. 96.335.000,- yaitu pada belanja Cetak dan Penggandaan yaitu Penyediaan Kalender dan Alat Tulis Kantor serta Penambahan untuk Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kab. Sumenep.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 326.095.689,- pada kegiatan ini tidak mengalami perubahan Renja 2024.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 1.286.807.282,- pada perubahan Renja menjadi Rp. 1.361.797.702,- ada penambahan anggaran sebesar Rp. 74.990.420,- yaitu anggaran mendahului PAK untuk penambahan Instalasi Listrik dan Perubahan Renja 2024 yaitu Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD periode 2024-2029 dianggarkan selama 4 bulan
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 838.724.976,- mengalami perubahan renja bertambah sebesar Rp. 908.184.880,- Penambahan sebesar Rp. 69459.904,- penambahan ini terjadi pada Belanja jasa Pemeliharaan Gedung kantor dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 30.394.765.265,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 31.079.596.265,- mengalami penambahan sebesar Rp. 684.831.000,- Penambahan terjadi pada belanja Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD sebanyak 2 stel untuk Anggota DPRD Periode 2024-2029, Penambahan Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Periode 2024-2029 selama 4 bulan dan Pergeseran Anggaran untuk Kegiatan Medical Chek Up sesuai Paket MCU 2024.
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 4.233.751.666,- mengalami perubahan renja sebesar Rp. 4.989.886.266,- bertambah sebesar Rp. 756.134.600,- Penambahan ini terjadi pada Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini dilaksanakan oleh dua Bagian yakni Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, pada anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 19.412.820.147,- pada anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 31.113.434.096,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 11.700.613.949,- Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 5.089.995.760,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 10.377.997.660,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 5.288.001.900,-. Penambahan terjadi pada belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pansus Tatib dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Honor Narasumber dan Sewa tempat, dan Perdin Komisi-komisi.
2. Kegiatan pembahasan kebijakan anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 3.910.913.150,- pada perubahan Renja menjadi sebesar Rp. 5.945.845.550,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 2.034.932.400,- . Penambahan anggaran diusulkan melalui Mendahului PAK terjadi pada belanja Pembahasan KUA PPAS yaitu penyesuaian Perdin sesuai Perbub Nomor 45 Tahun 2023, Pembahasan KUA PPAS Perubahan yaitu penyesuaian Perdins sesuai Perbub Nomor 45 Tahun 2023, Pembahasan APBD pada belanja Perdin Banggar 3 DP dan 1 LP, Pembahasan APBD perubahan yaitu penambahan Perdin 1 LP untuk Badan Anggaran , Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yaitu Penambahan Perdin Banggar.
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 1.405.346.820,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 1.441.928.820,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 36.582.000,-. Penambahan terjadi pada belanja Jasa Sewa Perahu untuk Kegiatan Pengawasan Kepulauan serta Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK yaitu penyesuaian Perdin sesuai Perbub Nomor 45 Tahun 2023.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 3.346.536.772,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 4.039.825.912,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.

693.289.140,-. Penambahan terjadi pada belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendalaman Tugas DPRD sebanyak 1 kali dan Belanja Reklame dan Advetorial.

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 1.484.102.845,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 2.597.856.154,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 1.113.763.309,-. Penambahan terjadi pada belanja Pelaksanaan Reses.
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 874.205.600,- pada perubahan Renja tidak mengalami perubahan anggaran.
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 421.750.800,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 562.232.400,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 140.481.600,-. Penambahan terjadi pada belanja Honorarium dan makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Forum komunikasi Peningkatan pembangunan.
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 2.879.968.400,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 5.273.532.000,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 2.393.563.600,-. Penambahan terjadi pada belanja Perjalanan Dinas Komisi-komisi DPRD dan Badan Musyawarah DPRD.

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD										64.861.376.095	80.606.992.646					88.667.691.911	
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										45.448.555.948	49.493.558.550					54.442.914.405	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										66.064.100	130.759.100					143.835.010	
4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	5.726.100	5.726.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	6.298.710

4 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	0 1 Dokumen	100 %	100 %	1.042.000	1.042.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	1.146.200
4 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 1 Dokumen	100 %	100 %	916.600	916.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	1.008.260
4 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	926.200	926.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	1.018.820

4 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah		100	101 %	Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	911.100	911.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	1.002.210
4 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	52.967.100	117.662.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	129.428.310

4 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	3.575.000	3.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	3.932.500
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6.345.391.830	7.541.536.408			8.295.690.049		
4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	910 Org/bln	910 Org/bln	100 %	100 %	6.319.470.186	7.515.614.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	8.267.176.240
4 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	15.299.296	15.299.296	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	16.829.226

4 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	10.622.348	10.622.348	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	11.684.583
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											223.746.560	223.746.560			246.121.216		
4 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	104.170.560	104.170.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	114.587.616
4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	119.576.000	119.576.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	131.533.600
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											445.660.600	541.995.600			596.195.160		

4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	23.649.900	23.649.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	26.014.890
4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	101.415.000	101.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	111.556.500
4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	69.408.700	114.408.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	125.849.570
4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUn dangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	149.607.000	149.607.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	164.567.700

4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangslok	100 %	100 %	14 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	101,580,000	152.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	168.206.500
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											326.095.689	326.095.689		358.705.258		
4 02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangslok	100 %	100 %	29 unit	29 unit	100 %	100 %	326.095.689	326.095.689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	358.705.258
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.286.807.282	1.361.797.702		1.497.977.472		
4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangslok	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	3.804.600	3.804.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	4.185.060
4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangslok	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	470.708.932	495.699.352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	545.269.287

4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	812.293.750	862.293.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	948.523.125
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											838.724.976	908.184.880		999.003.368		
4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	41 Unit	41 Unit	100 %	100 %	618,778,000	618,778,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	660.655.800
4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	8.726.000	8.726.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	9.598.600
4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	165,470,976	200.570.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	220.627.968

4 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	62 unit	62 unit	100 %	100 %	45.750.000	80.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	88.121000
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											30.394.765.265	31.079.596.265			34.187.555.892	
4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terpenuhiya Layanan Administrasi DPRD	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	700 Org/bln	700 Org/bln	100 %	100 %	29.394.847.905	29.634.847.905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	32.598.332.696
4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Terpenuhiya Layanan Administrasi DPRD	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %	100 %	423.271.000	868.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	954.912.200
4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terpenuhiya Layanan Administrasi DPRD	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	576.646.360	576.646.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	634.310.996
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD											5.521.299.646	7.379.846.346			8.117.830.981	

4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	20 Laporan	20 Laporan	100 %	100 %	5.321.432.380	7.179.979.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	7.897.976.988
4 02 01 2.16 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	199,867,266	199,867,266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	100 %	219.853.993
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											19.412.820.147	31.113.434.096			34.224.777.506		
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											5.089.995.760	10.377.997.660			11.415.797.426		
4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.120.060.800	1.756.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	1.931.965.200
4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Bangselok	100 %	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	1.090.684.000	3.516.302.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	3.867.932.970

															si			
4 02 02 2.01 0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	352.245.760	430.572.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	473.629.816
4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	2.510.063.000	4.657.848.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	5.123.633.020
4 02 02 2.01 0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	16.942.200	16.942.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	18.636.420
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran												3.910.913.150	5.945.845.550		6.540.430.105		

4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	769.204.200	796.881.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	876.569.320
4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	747.024.360	791.698.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	870.868.856
4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	68.868.600	1.062.941.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	1.169.235.540
4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	780.761.000	1.047.816.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	1.152.597.600
4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.545.054.990	2.246.507.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	2.471.158.789
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											1.405.346.820	1.441.928.820			1.586.121.702		

4 02 02 2.03 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	244.061.000	276.461.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	304.107.100
4 02 02 2.03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	390.793.080	390.793.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	429.872.388
4 02 02 2.03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	371.904.280	371.904.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	409.094.708
4 02 02 2.03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	16 Laporan	16 Laporan	100 %	100 %	347.942.460	347.942.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	382.736.706
4 02 02 2.03 0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50.646.000	54.828.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	60.310.800
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD											2,787,485,180	3,712,438,980			4.443.808.503	

4 02 02 2.04 0001	Orientasi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	498.885.000	498.885.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	548.773.500
4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1.493.220.000	1.838.724.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	2.022.596.400
4 02 02 2.04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	18 Orang	18 Orang	100 %	100 %	102,080,436	102,080,436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	111.601.301
4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	7 Orang	7 Orang	100 %	100 %	177.547.524	177.547.524	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	195.302.276
4 02 02 2.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1.036.300	1.036.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	1.139.300
4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1.074.392.220	1.422.177.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	1.564.395.096

4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										1.484.102.845	2.597.866.154					2.857.652.769	
4 02 02 2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	50 Dokumen	50 Dokumen	100 %	100 %	57.234.918	57.234.918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	62.958.410
4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1.426.867.927	2.540.631.236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	2.794.694.360
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										874.205.600	874.205.600					961.626.160	
4 02 02 2.06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	874.205.600	874.205.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	961.626.160
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah											421.750.800	562.232.400					618.455.640
4 02 02 2.07 0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Terlaksananya Pembahasan Kerjasama Daerah	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	36 Dokumen	48 Dokumen	100 %	100 %	421.750.800	562.232.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	618.455.640

4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD											2.879.968.400	5.273.532.000					5.800.885.200
4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	1.560.669.600	3.002.064.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	3.302.270.400
4 02 02 2.08 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	1.319.298.800	2.271.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	100 %	2.498.614.800
TOTAL												64.861.376.095	80.606.992.646				88.667.691.9113	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024. Fungsi Renja ini sebagai Pedoman dalam Penyusunan RKA Perubahan dan DPPA Sekretariat DPRD tahun 2024.

Sumenep, Juli 2024

SEKRETARIS DPRD KAB. SUMENEP



**YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.PI, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19800111 200604 1 011



# **RENJA** 2024 **Perubahan**



**INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**

Jalan Kamboja Nomor 31 Sumenep  
email : [jks\\_inspektorat@sumenepkab.go.id](mailto:jks_inspektorat@sumenepkab.go.id)  
Website : [inspektorat.sumenepkab.go.id](http://inspektorat.sumenepkab.go.id)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap organisasi dikarenakan proses ini mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis terhadap tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi, selain itu perencanaan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dari langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan sehingga harus disusun secara konsisten dengan memperhatikan lingkungan strategis organisasi baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah dan guna menjawab tantangan dan hambatan organisasi dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan yang sinergis dan terintegrasi. Rencana Kerja merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini memudahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dan melaksanakan pemerintahan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian atas capaian indikator program / kegiatan / sub. Kegiatan
- b. Penyesuaian atas perubahan sasaran tujuan Pokin Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep hasil Asistensi Menpan RB.
- c. Menjabarkan Rencana Strategis OPD
- d. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada Triwulan I dan Triwulan II (Semester I) Tahun berjalan.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD
- f. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan II**

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat melalui perkembangan capaian kinerja dan capaian anggaran selama 6 (enam) bulan berjalan Tahun 2024 berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini (terlampir)

Secara umum pada tahun 2024, Inspektorat Daerah kabupaten Sumenep pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan hingga triwulan II program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024  
(sesuai Permendagri No. 86 / Tahun 2017)**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Satuan	Target Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Inspektorat)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Itdakab Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Itdakab Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Itdakab yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Itdakab Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Itdakab s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Itdakab s/d Tahun 2024		Unit Itdakab Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = (13/8*100%)		15 = (13+7)		16 = (15/6*100%)		17
		INSPEKTORAT DAERAH				69.118.529.096	91,8	14.218.061.768	100	17.553.488.387		2.625.597.712		4.879.227.345													
1	Meningkatnya Kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			100	49.680.601.163	100	12.018.768.558	100	14.241.998.960		2.244.617.832		4.307.504.324					0	6.552.122.156	0	46	100	18.570.890.714	100	37,38	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Prosentase	100	381.168.221	100	5.568.000	100	16.762.900	10,00	2.400.000	5	6.208.000					15	8.608.000	15	51	115	14.176.000	115	3,72	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	51.224.652	2	960.000	2	2.959.900	1	800.000	1	1.788.000					2	2.588.000	100	87	4	3.548.000	40	6,93	



		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Prosentase	100	33.551.777.161		8.418.950.564	100	10.774.656.674	12,35	1.330.343.991							12,3469734	4.913.738.264	12,3469734	46	12,3469734	13.332.688.828	12,34697338	39,74	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3900	33.431.123.842	780	8.412.870.564	780	10.766.659.074	213	1.329.543.991	213	3.581.249.273					426	4.910.793.264	54,6153846	46	1206	13.323.663.828	30,92307692	39,85	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	12.241.490	1	960.000	1	2.005.000	0	0	0	930.000					0	930.000	0	46	1	1.890.000	20	15,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	29.492.181	1	800.000	1	1.372.000	0	0	0	-					0	-	0	-	1	800.000	20	2,71	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	41.184.138	1	3.360.000	1	2.578.100	0	0	0	1.215.000					0	1.215.000	0	47	1	4.575.000	20	11,11	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	37.735.509	2	960.000	2	2.042.500	1	800.000	0	-					1	800.000	50	39	3	1.760.000	30	4,66	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	500	215.687.342	100	-	100	13.971.100	5,73	800.000						5,72 6106 03	1.120.000	5,72 6106 03	8	105, 7261 06	1.120.000	21,1 4522 121	0,52
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	115.129.240	1	-	1	4.954.000	0	320.000	0					0	480.000	0	10	1	480.000	20	0,42
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	73.470.744	1	-	1	4.374.000	0	320.000	0	0				0	320.000	0	7	1	320.000	20	0,44
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	27.087.358	1	-	1	4.643.100	0	160.000	0					0	320.000	0	7	1	320.000	20	1,18
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mempunyai keterampilan dan keahlian	ASN	500	3.297.137.630	100	509.636.072	100	621.457.675	8,43	52.403.700						8,43 2384 39	163.045.580	8,43 2384 39	26	108, 4323 84	672.681.652	21,6 8647 688	20,4 0
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	325	166.560.895	65	82.425.000	65	35.322.975	65	34.875.000	0					65	34.875.000	100	99	130	117.300.000	40	70,4 2

		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	325	96.472.735	65	3.554.000	65	2.968.800	0	640.000	0	0	0	640.000	0	22	65	4.194.000	20	4,35
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	325	34.104.000	65	-	65	6.681.000	0	0	0	0	0	-	0	-	65	-	20	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	175	3.000.000.000	35	423.657.072	35	576.484.900	0	16.888.700	110.641.880	0	127.530.580	0	22	35	551.187.652	20	18,37	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>475</b>	<b>4.475.715.635</b>	<b>95</b>	<b>1.472.998.574</b>	<b>95</b>	<b>1.322.029.683</b>		<b>269.117.565</b>	<b>295.226.084</b>		<b>0</b>	<b>564.343.649</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>95</b>	<b>2.037.342.223</b>	<b>20</b>	<b>45,52</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	75	356.047.442	15	57.124.870	15	25.364.610	0	0	5	5.587.500	5	5.587.500	33,333333	22	20	62.712.370	26,666667	17,61
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	215.199.033	20	60.919.950	20	49.513.992	0	5.598.000	5	14.361.000	5	19.959.000	25	40	25	80.878.950	25	37,58

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	1.750.000.000	10	755.485.726	10	782.878.841	0	127.285.800	2	156.738.984					2	284.024.784	20	36	12	1.039.510.510	24	59,40
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Barang	100	257.191.220	20	28.781.000	20	80.190.840	0	2.397.600	3	17.500.800					3	19.898.400	15	25	23	48.679.400	23	18,93
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	75	562.000.000	15	122.125.000	15	107.246.400	0	7.235.000	2	30.995.000					2	38.230.000	13,333333	36	17	160.355.000	22,666667	28,53
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	549.459.000	10	55.567.500	10	57.276.000	0	23.157.600	0	-					0	23.157.600	0	40	10	78.725.100	20	14,33
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	225	635.300.000	45	392.994.528	45	205.314.000	3	101.203.565	20	69.722.800					23	170.926.365	51,111111	83	68	563.920.893	30,222222	88,76
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	87.239.579	2	-	2	6.245.000	0	1.440.000	0	160.000					0	1.600.000	0	26	2	1.600.000	20	1,83

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	63.279.362	1	-	1	8.000.000	0	800.000	0	160.000	0	960.000	0	12	1	960.000	20	1,52
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi</b>	<b>Prosentase</b>	<b>490</b>	<b>481.509.237</b>	<b>98</b>	<b>457.840.000</b>	<b>98</b>	<b>448.126.980</b>		<b>415.760.000</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>415.760.000</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>873.600.000</b>	<b>20</b>	<b>181,43</b>
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	322.776.637	1	24.000.000	1	58.097.400	1	57.500.000	0	-	1	57.500.000	100	99	2	81.500.000	40	25,25
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	158.732.600	1	303.780.000	1	390.029.580	1	358.260.000	0	-	1	358.260.000	100	92	2	662.040.000	40	417,08
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Unit				116.560.000	0	-	0	0	0	-	0							
		Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarpras	Paket				13.500.000	0	-	0	0	0	-	0							

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase jasa penunjang yang laik fungsi</b>	<b>Prosentase</b>	475	2.194.620.312	95	437.713.149	95	422.718.624		85.174.576						0	196.257.763	0	46	95	633.970.912	20	28,89
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1600	223.076.886	3200	43.618.400	3200	19.030.600	600	1.520.500	200	573.000				800	2.093.500	25	11	4000	45.711.900	25	20,49
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1.666.288.426	1	188.908.141	1	198.496.664	0	49.455.516	0	42.113.067				0	91.568.583	0	46	1	280.476.724	20	16,83
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	305.255.000	1	205.186.608	1	205.191.360	0	34.198.560	0	68.397.120				0	102.595.680	0	50	1	307.782.288	20	100,83
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>5.082.985.625</b>	<b>95</b>	<b>716.062.199</b>	<b>95</b>	<b>622.275.324</b>		<b>88.618.000</b>		<b>200.630.900</b>				<b>0</b>	<b>289.248.900</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>1.005.311.099</b>	<b>95</b>	<b>19,78</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	5	3.193.620.312	1	358.469.699	1	389.843.100	0	51.427.000	0	102.526.400				0	153.953.400	0	39	1	512.423.099	20	16,05

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Peralatan	5	223.076.886	1	49.876.000	1	132.589.500	0	25.117.000	0	30.054.000	0	55.171.000	0	42	1	105.047.000	20	47,09		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana/Prasarana	5	1.666.288.426	1	301.096.500	1	99.842.724	0	12.074.000	0	68.050.500	0	80.124.500	0	80	1	381.221.000	20	22,88		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	paket			1	6.620.000		-	0	0	0	-	0									
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>11.406.379.454</b>	<b>100</b>	<b>1.469.146.400</b>	<b>100</b>	<b>2.575.893.150</b>		<b>352.099.080</b>		<b>453.781.721</b>		<b>0</b>	<b>805.880.801</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>2.275.027.201</b>	<b>100</b>	<b>19,95</b>	<b>Urban III</b>
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelesaian pengawasan internal	Prosentase	100	9.585.346.310	100	1.148.770.000	100	2.174.457.600		316.299.080		420.901.721		0	737.200.801	0	34	100	1.885.970.801	100	19,68	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	495	1.209.292.224	130	218.780.000	130	571.172.000		81.640.000		61.550.000		0	143.190.000	0	25	130	361.970.000	26.262626	29,93	

		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Laporan	650	2.649.622.881	130	386.940.000	130	677.432.000		49.760.000					0	144.000.000	0	21	130	530.940.000	20	20,04
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	280	2.583.793.145	56	164.368.500	56	403.268.600		28.080.080					0	112.744.801	0	28	56	277.113.301	20	10,73
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	5	463.839.510	1	49.110.000	1	62.920.000		40.499.000					0	40.499.000	0	64	1	89.609.000	20	19,32
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	300	1.492.869.550	60	236.826.600	60	352.078.000		116.320.000					0	289.306.000	0	82	60	526.132.600	20	35,24
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	20	318.850.915	4	42.555.000	4	46.812.000		0					0	-	0	-	4	42.555.000	20	13,35
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	867.078.084	2	50.189.900	2	60.775.000		0					0	7.461.000	0	12	2	57.650.900	20	6,65

		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah dan PDFT	Prosentase	100	1.821.033.144		320.376.400	2	401.435.550		35.800.000						2	68.680.000	100	17	2	389.056.400	2	21,36	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	65	558.836.190	14	29.992.600	14	37.604.000		1.160.000						0	7.400.000	0	20	14	37.392.600	21,53846154	6,69	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	90	1.262.196.954	18	290.383.800	18	363.831.550		34.640.000						0	61.280.000	0	17	18	351.663.800	20	27,86	
		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Prosentase	100	<b>8.031.548.479</b>		<b>730.146.810</b>		<b>735.596.277</b>		<b>28.880.800</b>						0	146.822.100	#DIV/0!	20	0	876.968.910	0	10,92	<b>Urban Investigasi dan Dumas</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan	laporan	129	<b>2.199.638.848</b>		<b>86.051.400</b>		<b>78.290.000</b>		-						0	27.015.800	#DIV/0!	35	0	113.067.200	0	5,14	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomen	65	552.090.126	13	27.497.650	13	18.280.000		0						0	-	0	-	13	27.497.650	20	4,98	

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	rekomen	65	1.647.548.723	3	58.553.750	3	60.010.000	0	27.015.800	0	27.015.800	0	45	3	85.569.550	4,61 5384 615	5,19		
		<b>Pendampingan dan Asistansi</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistansi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas</b>	Prosentase	100	<b>5.831.909.631</b>		<b>644.095.410</b>		<b>657.306.277</b>		<b>28.880.800</b>		<b>90.925.500</b>	0	119.806.300	#DIV/0!	18	0	763.901.710	0	13,10
		Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	PD	120	99.838.735	24	1.920.000	24	19.200.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	13	24	4.320.000	20	4,33		
		Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	PD	90	383.719.063	18	10.560.000	18	12.440.600	7.680.000	-	0	7.680.000	0	62	18	18.240.000	20	4,75		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg	105	3.814.073.133	19	458.501.350	19	516.844.145	4.490.000	69.670.000	0	74.160.000	0	14	19	532.661.350	18,0 9523 81	13,97		
		Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	125	1.534.278.700	20	173.114.060	20	108.821.532	16.710.800	18.855.500	0	35.566.300	0	33	20	208.680.360	16	13,60		



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep merupakan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan tahun 2024 memuat uraian disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana sampai dengan akhir tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

## Usulan Pagu Indikatif Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan TA 2024

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN AWAL 2024	ANGGARAN PAK MURNI 2024	Bertambah / (berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
06:01	INSPEKTORAT DAERAH				17.553.488.387	17.632.943.465	79.455.078
06:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	14.241.998.960,00	14.539.296.868,00	297.297.908
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasikinreja perangkat daerah	Dokumen	19	16.762.900,00	12.472.200,00	-4.290.700
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.959.900,00	2.959.900,00	0
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	870.800,00	420.800,00	-450.000
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	780.500,00	280.500,00	-500.000

6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	780.500,00	280.500,00	-500.000
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	780.500,00	280.500,00	-500.000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.749.700,00	6.970.000,00	-779.700
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	2.841.000,00	1.280.000,00	-1.561.000
6.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>10.774.656.674,00</b>	<b>10.853.914.029,00</b>	<b>79.257.355</b>
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PNS	65	10.766.659.074,00	10.848.495.429,00	81.836.355
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.005.000,00	960.000,00	-1.045.000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.372.000,00	280.500,00	-1.091.500

6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.578.100,00	2.578.100,00	0
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2.042.500,00	1.600.000,00	-442.500
6.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>13.971.100,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>-6.771.100</b>
6.01.01.2.03.01	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	4.954.000,00	2.880.000,00	-2.074.000
6.01.01.2.03.05	<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.374.000,00	2.400.000,00	-1.974.000
6.01.01.2.03.06	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.643.100,00	1.920.000,00	-2.723.100
6.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>621.457.675,00</b>	<b>602.670.725,00</b>	<b>-18.786.950</b>
6.01.01.2.05.02	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	35.322.975,00	35.322.975,00	0
6.01.01.2.05.03	<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	65	2.968.800,00	2.400.000,00	-568.800

6.01.01.2.05.05	<b>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	65	6.681.000,00	2.400.000,00	-4.281.000
6.01.01.2.05.09	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	35	<b>576.484.900,00</b>	<b>562.547.750,00</b>	<b>-13.937.150</b>
6.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya Administarsi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>1.322.029.683,00</b>	<b>1.546.052.242,00</b>	<b>224.022.559</b>
6.01.01.2.06.01	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	25.364.610,00	25.364.610,00	0
6.01.01.2.06.02	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	49.513.992,00	45.700.032,00	-3.813.960
6.01.01.2.06.04	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	<b>782.878.841,00</b>	<b>744.194.971,00</b>	<b>-38.683.870</b>
6.01.01.2.06.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	barang	20	80.190.840,00	122.759.229,00	42.568.389
6.01.01.2.06.06	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	107.246.400,00	151.246.400,00	44.000.000
6.01.01.2.06.08	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	57.276.000,00	57.276.000,00	0

6.01.01.2.06.09	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	<b>205.314.000,00</b>	<b>386.516.000,00</b>	<b>181.202.000</b>
6.01.01.2.06.10	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	6.245.000,00	4.995.000,00	-1.250.000
6.01.01.2.06.11	<b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	8.000.000,00	8.000.000,00	0
6.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>448.126.980,00</b>	<b>448.126.980,00</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	58.097.400,00	58.097.400,00	0
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	390.029.580,00	390.029.580,00	0
6.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan jasa penunjang Urusan PD</b>	<b>Laporan</b>	<b>3202</b>	<b>422.718.624,00</b>	<b>418.513.024,00</b>	<b>-4.205.600</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3200	19.030.600,00	14.025.600,00	-5.005.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	198.496.664,00	199.296.064,00	799.400

6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	205.191.360,00	205.191.360,00	0
6.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>622.275.324,00</b>	<b>650.347.668,00</b>	<b>28.072.344</b>
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	389.843.100,00	361.482.600,00	-28.360.500
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	1	132.589.500,00	132.589.500,00	0
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	99.842.724,00	156.275.568,00	56.432.844
<b>06:01:02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Peosentase Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>2.575.893.150,00</b>	<b>2.359.539.000,00</b>	<b>-216.354.150</b>
6.01.02.2.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase penyelesaian pengawasan internal</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>2.174.457.600,00</b>	<b>2.050.459.000,00</b>	<b>-123.998.600</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	130	571.172.000,00	529.372.000,00	-41.800.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Laporan	130	677.432.000,00	663.032.000,00	-14.400.000

6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	56	403.268.600,00	383.032.000,00	-20.236.600
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	62.920.000,00	62.920.000,00	0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	60	352.078.000,00	352.078.000,00	0
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	4	46.812.000,00	0,00	-46.812.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	60.775.000,00	60.025.000,00	-750.000
6.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Laporan</b>	<b>32</b>	<b>401.435.550,00</b>	<b>309.080.000,00</b>	<b>-92.355.550</b>
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	14	37.604.000,00	30.840.000,00	-6.764.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	18	363.831.550,00	278.240.000,00	-85.591.550
<b>06:01:02</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>735.596.277,00</b>	<b>734.107.597,00</b>	<b>-1.488.680</b>

6.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>14</b>	<b>78.290.000,00</b>	<b>78.290.000,00</b>	<b>0</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	13	18.280.000,00	18.280.000,00	0
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	60.010.000,00	60.010.000,00	0
6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas</b>	<b>Prosentase</b>	<b>100</b>	<b>657.306.277,00</b>	<b>655.817.597,00</b>	<b>-1.488.680</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	24	19.200.000,00	14.400.000,00	-4.800.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	18	12.440.600,00	23.040.000,00	10.599.400
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	19	516.844.145,00	499.316.065,00	-17.528.080
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	20	108.821.532,00	119.061.532,00	10.240.000

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = Rp. 2.959.900,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
2. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 450.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 500.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
4. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 500.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
5. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 500.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
6. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 779.700,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
7. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 1.561.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
8. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Mendapatkan Tambahan Anggaran yang berasal dari BKAD Kabupaten Sumenep melalui

PAK sebesar = Rp. 81.836.355,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;

9. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 1.045.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
10. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 1.091.500,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
11. Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 442.500,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
12. Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 2.074.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
13. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 1.974.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
14. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 2.723.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
15. Sub Kegiatan : Pendataan dan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 568.800,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
16. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tusi terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 13.937.150.000,00 Sisa

- anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
17. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 3.813.960,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  18. Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Kantor terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 38.683.870,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  19. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 42.568.389,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  20. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 44.000.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  21. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 181.202.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  22. Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 1.250.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  23. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 5.005.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;
  24. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 799.400,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi ± 98% pada bulan Desember 2024;

25. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 28.360.500,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
26. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 56.432.844,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
27. Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 41.800.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
28. Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 14.400.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
29. Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 20.236.600,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
30. Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal terdapat pengurangan pagu anggaran secara keseluruhan melalui PAK sebesar = Rp. 46.812.000,00 Sub. Kegiatan ini adalah kegiatan telaah sejawat antar APIP yang dilaksanakan berdasarkan surat dari AAIP dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Karena tahun ini tidak ada surat dari BPKP terkait kegiatan telaah sejawat antar APIP.
31. Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan APIP terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 750.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
32. Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 6.764.000,00 Sisa anggaran

- mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
33. Sub Kegiatan : Pengawasam dengan Tujuan Tertentu terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 85.591.550,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
  34. Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 4.800.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
  35. Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 10.599.400,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
  36. Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terdapat pengurangan anggaran PAK sebesar = Rp. 17.528.080,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;
  37. Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas terdapat penambahan anggaran PAK sebesar = Rp. 10.240.000,00 Sisa anggaran mencukupi s/d Desember 2024. Kegiatan masih berjalan pada triwulan III dan IV, dan akan terealisasi  $\pm$  98% pada bulan Desember 2024;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja Perubahan Tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Beberapa harapan dengan adanya Renja Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten.
3. Mengakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik- baiknya.

Sumenep, Juli 2024

**Plt. Inspektur Daerah**



**Nurul Jamil, S.Sos, M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680325 199003 1 003



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA  
PERUBAHAN  
( RKP )  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
GAYAM**

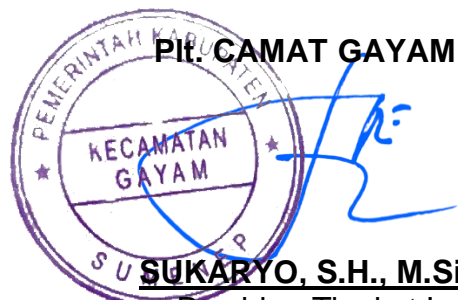
## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan serta pendanaannya.

Rencana Kerja ini juga merupakan amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada Tahun 2024 yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Sumenep, Juni 2023

  
**Pit. CAMAT GAYAM**  
**SUKARYO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196612311994021008

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I     PENDAHULUAN .....	4
1.1.   Latar Belakang .....	4
1.2.   Landasan Hukum .....	5
1.3.   Maksud dan Tujuan .....	8
1.4.   Sistematika Penulisan .....	9
BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .....	10
2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	10
2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.3.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4.   Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....	34
2.5.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	41
BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	54
3.1.   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	54
3.2.   Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	54
3.3.   Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Prakiraan Maju .....	56
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	64
BAB V     PENUTUP .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gayam. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gayam dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Sumenep.

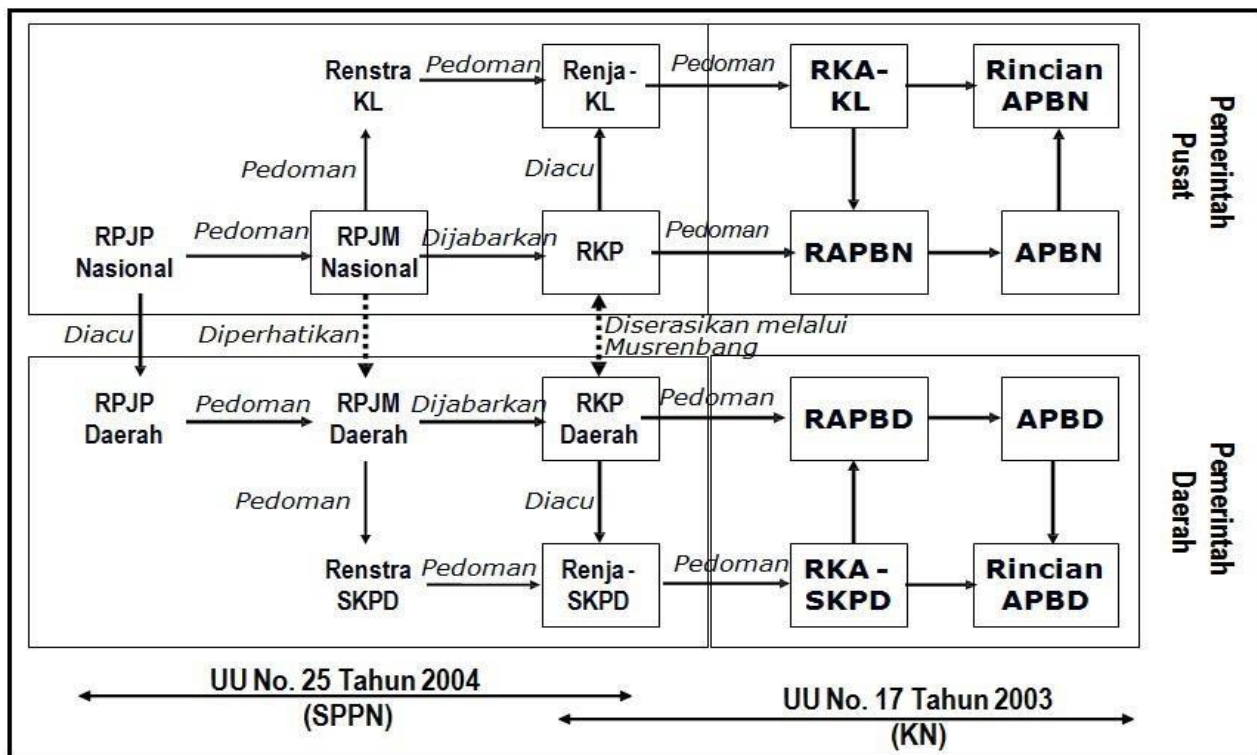
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,

- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 Tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Repeblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

050-3708 Tahun 2020 dan telah dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 01);;
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 45).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan

permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Gayam Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gayam Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Prakiraan maju

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan  
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Gayam digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Gayam dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Gayam dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gayam Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023  
Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep  
disajikan pada Tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1  
Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)  
Perangkat Daerah Kecamatan Gayam

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.20	KECAMATAN GAYAM									
7.01.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	100,00%	100,00%	97,10%	97,10%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
7.01.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	-	-	-
7.01.20.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
7.01.20.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
7.01.20.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
7.01.20.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01.20.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah'	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100,00%
7.01.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
7.01.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
7.01.20.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	20 Laporan	20 Laporan	100,00%
7.01.20.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	1 Jenis	100,00%
7.01.20.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	27 Stel	27 Stel	27 Stel	27 Stel	100,00%	27 Stel	27 Stel	100,00%
7.01.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	21,882 Jenis	72 Jenis	72 Jenis	72 Jenis	100,00%	21,882 Jenis	21,882 Jenis	100,00%
7.01.20.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	220 Jenis	220 Jenis	220 Jenis	100,00%	192 jenis	192 jenis	100,00%
7.01.20.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	115 Jenis	115 Jenis	115 Jenis	100,00%	152 unit	152 unit	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01.20.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	786 jenis	238 Jenis	238 Jenis	238 Jenis	100,00%	786 jenis	786 jenis	100,00%
7.01.20.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20500 paket	18500 Lembar	18500 Lembar	18500 Lembar	100,00%	20500 paket	20500 paket	100,00%
7.01.20.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang- undangan yang disediakan	12 jenis	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00%	12 jenis	12 jenis	100,00%
7.01.20.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	240 kali	102 Kali	102 Kali	102 Kali	100,00%	240 kali	240 kali	100,00%
7.01.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	3 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100,00%	3 Unit	3 Unit	100,00%
7.01.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00%	3 Unit	3 Unit	100,00%
7.01.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	36 Layanan	36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	100,00%	36 Layanan	36 Layanan	100,00%
7.01.20.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100,00%	36 Rekening	36 Rekening	100,00%
7.01.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	53 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100,00%	53 Unit	53 Unit	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01.20.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	17 unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100,00%	17 unit	17 unit	100,00%
7.01.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00%	35 unit	35 unit	100,00%
7.01.20.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%
7.01.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	-	-	-	-	4 Kali	4 Kali	100,00%
7.01.20.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	-	-	-	-	4 Kali	4 Kali	100,00%
7.01.20.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01.20.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Yang Dilaksanakan		1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%			
7.01.20.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	60 Dokumen	-	-	-	-	60 Dokumen	60 Dokumen	100,00%
7.01.20.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 Dokumen	-	-	-	-	500 Dokumen	500 Dokumen	100,00%
7.01.20.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	1 Kali	1 Kali	100,00%
7.01.20.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100,00%	10 Desa	10 Desa	100,00%
7.01.20.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	13 Lembaga	-	-	-	-	13 Lembaga	13 Lembaga	100,00%
7.01.20.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	12 Kali	-	-	-	-	12 Kali	12 Kali	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
	Kemasyarakatan	kecamatan								
7.01.20.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	10 Kelompok/ Lembaga	-	-	-	-	10 Kelompok/ Lembaga	10 Kelompok/ Lembaga	100,00%
7.01.20.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%	99,76%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100,00%	13 Kali	13 Kali	100,00%
7.01.20.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	12 Kali	12 Kali	100,00%
7.01.20.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,00%	1 Kali	1 Kali	100,00%
7.01.20.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.20.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Kali	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%	14 Kali	14 Kali	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01.20.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%
7.01.20.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	100,00%	12 Kali	12 Kali	100,00%
7.01.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.01.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%
7.01.20.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100,00%	-	-	-
7.01.20.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100,00%	10 Desa	10 Desa	100,00%
7.01.20.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	10 Kali/Buah	-	-	-	-	10 Kali/Buah	10 Kali/Buah	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
7.01.20.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100,00%	10 Desa	10 Desa	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, pada Tabel 2.1.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.2**  
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Kode	Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat	Keterangan
7.01.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
7.01.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan adanya mutasi dan promosi jabatan	-

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.3**  
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Kode	Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Keterangan
7.01.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
7.01.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan target kinerja berpedoman dengan regulasi	-
7.01.20.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kedisiplinan Kinerja Aparatur Sipil Negara	-
7.01.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penganggaran yang sesuai dengan Analisis Standart Biaya	-
7.01.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana didukung penganggarannya	-
7.01.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	-

Kode	Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Keterangan
7.01.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelayakan potensi pemanfaatan barang milik daerah	-
7.01.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
7.01.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat	-
7.01.20.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemerintah Kabupaten	-
7.01.20.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
7.01.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	-
7.01.20.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal	-
7.01.20.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
7.01.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Forum Pimpinan Kecamatan	-
7.01.20.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
7.01.20.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemerintah Kabupaten	-
7.01.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
7.01.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kerjasama dan dukungan masyarakat desa	-

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1.2, dan Tabel 2.1.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih focus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian Indikator Kinerja Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Proyeksi Tahun Ke-						Catatan Analisis
					2021	2023	2024	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2024	2025	2026	2021	2023	2024	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100	Nilai SKM Kecamatan	81	82	83	84	85	85	81	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	100%	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	-
1.1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	100	100	Nilai SKM Kecamatan	81	82	83	84	85	85	81	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	100%	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	-
1.2.	Meningkatkan fasilitas dan kordinasi Desa	100%	100%	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	100%	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	-
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A	A	SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	A	A	A	B	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	60,86	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	-
2.1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	Prosentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	100%	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian	-

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan umum masyarakat Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep selama 1 (satu) Tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dan peluang dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep 1 (satu) Tahun kedepan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Lingkup	Tantangan	Peluang
1	Internal	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur	Petensi kualitas pendidikan aparatur sangat memadai
		Pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Potensi tingkat pendidikan masyarakat sangat memadai
		Publikasi dan sosialisasi tentang program-program kegiatan pemerintah	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi cukup memadai
		Perhatian dari Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kecamatan	Sinergitas Perangkat Desa yang sangat handal
		Dukungan Anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
		Pedoman pelaksanaan kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Kegiatan	Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
		2	Eksternal
Perkembangan teknologi yang semakin cepat	Sumber daya manusia yang ada di masyarakat		
Dinamika masyarakat yang semakin berkembang	Kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat		
Unsur legislatif yang kritis konstruktif	Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan		
Keterbukaan Informasi Publik	Potensi sumber daya alam yang memikat		

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2023 supaya seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan;
2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Pembinaan dan Monitoring serta evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara rutin

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan amanat antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
  - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati.

Maksud dari pelimpahan urusan tersebut adalah :

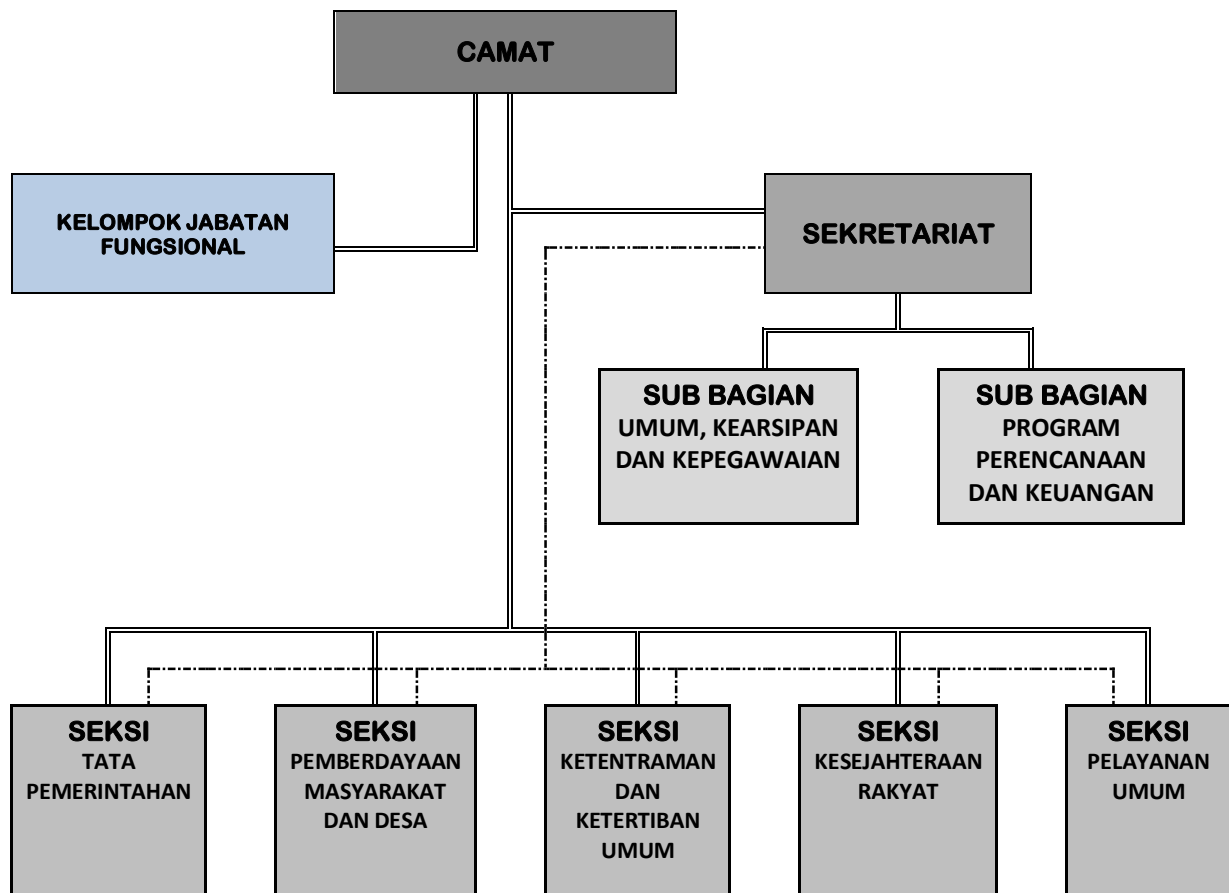
1. Melaksanakan pelimpahan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan criteria :
  - a. Proses sederhana;
  - b. Objek perizinan berskala kecil;
  - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks;
  - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
2. Pelayanan perizinan dimaksud dapat melalui pelayanan terpadu;
3. Pelayanan non perizinan dilaksanakan dengan kriteria :
  - a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
  - b. Kegiatan berskala kecil;
  - c. Pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin.
4. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat, dengan Eselon III.A
- b. Sekretariat Kecamatan, dengan Eselon III.B dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - ✓ Sub Bagian Umum, Kearsipan, dan Kepegawaian, dengan Eselon IV.B;
  - ✓ Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan, dengan Eselon IV.B;
- c. Seksi Tata Pemerintahan, dengan Eselon IV.A;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Eselon IV/a;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Eselon IV/a;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dengan Eselon IV/a;
- g. Seksi Pelayanan Umum, dengan Eselon IV/a;

Dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, adalah sebagai berikut :



Sedangkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, adalah :

## **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan, dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas Sekretariat;
- b. Penyelenggara administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **1.1. Sub Bagian Umum, Kearsipan, dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum, Kearsipan, dan Kepegawaian, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **1.2. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan**

Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;

- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sisial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep mempunyai 2 (dua) Urusan tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun 2 (dua) Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi khusus pelayanan publik belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh Pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki Pegawai juga masih sangat terbatas;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran termasuk bangunan loket pelayanan yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Kecamatan.

3. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas administrasi kependudukan, bergesernya sebagian aktivitas masyarakat menjadi berbasis industri dan perdagangan serta bertambahnya jumlah permasalahan sosial ekonomi yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pelayanan yang ada sangatlah berdampak kurang baik untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat dan ini merupakan problem yang perlu dicari solusinya untuk dipecahkan dan diselesaikan dengan cepat dan tuntas.
4. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan era modern ini harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan publik di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep sehingga peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal dan maksimal.

Adapun pendidentifikasian masalah dari masing-masing urusan pada Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut :

**a. Urusan Pelayanan**

- Tingkat koordinasi antara instansi terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang;
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi setiap seksi yang ada di Kecamatan;
- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sarana pendukung Perangkat Daerah yang kurang memadai dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal.

**b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang kurang maksimal;
- Banyak Program Pemberdayaan Masyarakat yang belum tersentuh/tertangani;
- Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep;
- Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten dengan di Kecamatan;
- Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat;
- Belum adanya spot-spot penunjang roda perekonomian di Wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal;
2. Rendahnya sumber daya manusia aparatur pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep;
3. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, antara lain:

1. Kurangnya personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
2. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;

Langkah-langkah strategi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia;
2. Melakukan pembinaan dan mengikutkan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap para aparatur pelayanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun penyajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel 2.3.1. di bawah ini :

Tabel 2.3.1  
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gayam

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Sarana dan Prasarana		
	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Anggaran kegiatan yang tersedia	Tambahan anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
2	Sumber Daya Manusia		
	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah	Pembinaan dan motivasi Pegawai secara kesinambungan	Pendidikan dan Pelatihan-Pelatihan bagi Pegawai
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan	Pembinaan dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintah	Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait

Berdasarkan uraian berkaitan permasalahan utama diatas maka perlu diidentifikasi secara rinci akar permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan permasalahan utama. Berikut merupakan identifikasi akar masalah dari tiap permasalahan, dapat dilihat pada Tabel 2.3.2. di bawah ini :

Tabel 2.3.2  
Telaah Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Pelayanan, informasi dan pengaduan masyarakat belum berfungsi maksimal	Pemahaman peraturan tentang pelayanan publik, standar operasional prosedur dalam pelayanan dan informasi publik belum memadai	Terbatas dan belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia
	Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan minim
	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan relatif rendah	Kurang sinerginya hubungan antara kecamatan dan desa

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.1 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024**  
**Perangkat Daerah Kecamatan Gayam**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				3.112.205.677	UNSUR KEWILAYAHAN				2.559.568.826	
7.01.20	Kecamatan Gayam				3.112.205.677	Kecamatan Gayam				2.559.568.826	
7.01.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayam	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.920.836.077	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayam	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	2.436.393.528	
7.01.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	13.974.720	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6.499.500	
7.01.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.329.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.722.100	-
7.01.20.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.329.120	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	624.100	-
7.01.20.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.329.120	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	566.400	-
7.01.20.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.329.120	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	566.400	-
7.01.20.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.329.120	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	566.400	-
7.01.20.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah'	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.329.120	Evaluasi kinerja perangkat daerah'	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.454.100	-
7.01.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	2.509.229.777	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	1.915.571.426	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	2.087.320.657	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	1.909.568.826	-
7.01.20.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	6.120.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	6.002.600	-
7.01.20.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	23.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	22.471.950	-
7.01.20.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	23.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	22.471.950	-
7.01.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	252.386.640	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	88787 Jenis	250.353.800	-
7.01.20.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.564.680	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	178 Paket	8.344.200	-
7.01.20.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.425.160	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	124 Paket	10.318.000	-
7.01.20.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	33.200.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15616 Paket	29.327.200	-
7.01.20.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.120.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gayam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10800 Paket	7.080.000	-
7.01.20.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.556.000	-
7.01.20.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566 Laporan	120.882.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471 Laporan	118.662.000	-

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	6 Unit	49.149.540	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	5 Unit	41.358.822	
7.01.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	49.149.540	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	41.358.822	-
7.01.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah layanan jasa yang disediakan	7 Jenis	70.867.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah layanan jasa yang disediakan	7 Jenis	55.255.920	
7.01.20.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	13.267.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24.055.920	-
7.01.20.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	57.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	31.200.000	-
7.01.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	12 Unit	138.228.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	16 Unit	109.650.408	
7.01.20.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	2 Unit	46.851.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	5 Unit	37.250.000	-
7.01.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.090.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.360.000	-
7.01.20.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	88.287.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	67.040.408	-
7.01.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayam	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	25.195.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayam	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	6.693.200	
7.01.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	17.084.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Laporan	4.245.600	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.20.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	17.084.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	4.245.600	-
7.01.20.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	8.111.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	2.447.600	
7.01.20.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.111.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	2.447.600	-
7.01.20.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayam	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	16.367.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayam	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	22.687.600	
7.01.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	10 Laporan	6.191.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	10 Laporan	2.687.600	
7.01.20.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.191.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	2.687.600	-
7.01.20.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	11 Laporan	10.176.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	-	-	
7.01.20.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Keluarga	10.176.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	Penyesuaian Regulasi
7.01.20.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	-	-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	11 Laporan	20.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.20.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Gayam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Gayam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11 Keluarga	20.000.000	Penyesuaian Regulasi
7.01.20.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayam	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	35.028.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayam	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	13.860.800	
7.01.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Laporan	35.028.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	14 Laporan	13.860.800	
7.01.20.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.732.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.245.600	-
7.01.20.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	9.296.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	9.615.200	-
7.01.20.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayam	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	74.331.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayam	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	86.309.000	
7.01.20.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Laporan	74.331.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayam	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Laporan	86.309.000	
7.01.20.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gayam	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	43.785.400	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gayam	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	49.617.800	-
7.01.20.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	30.546.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	36.691.200	-

Kode	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gayam	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	40.448.200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gayam	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	27.922.800	
7.01.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Laporan	40.448.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	27.922.800	
7.01.20.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	7.379.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	6.207.600	-
7.01.20.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	4.611.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	3.107.600	-
7.01.20.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10 Dokumen	21.079.200	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Gayam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10 Dokumen	18.607.600	-

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisilain dalam era globalisasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, Lembaga Sosial Masyarakat, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

Dalam Tahun 2024` ini terdapat program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat ditampung melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi. Dengan demikian Rencana Kerja ini tidak hanya memenuhi Satuan Kerja Perangkat Daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sumenep untuk Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel 2.5.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5.1  
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61ee81b227836	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak ( bantuan bibit ternak sapi, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	para petani desa kami mengharap bantuan jagung hibrida	Desa Pancor Kecamatan Gayam, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Sementara tetap diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee8de1a06ec	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Perindustrian	Koord., Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ( bantuan alat pertukangan dan mebel, alat perbengkelan, KUE DAN KERUPUK, ALAT - ALAT USAHA TEKSTIL, PERALATAN MESIN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Banyak pemuda di desa kami yang telah lulus sekolah masih bingung mencari pekerjaan karena keterbatasan modal alat kerja seperti alat pertukangan, mebel dan mesin jahit.	Dusun Pancor Desa Pancor Kec. Gayam, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rekomendasi : DITERUSKAN DENGAN CATATAN AGAR DIPERJELAS JENIS USULANYA Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee8ee1757b0	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan (kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving)	Kebutuhan masyarakat terhadap jalan paving dengan harapan mempermudah akses perekonomian dan lalulintas jalan dusun	Dusun Sabungbung RT 2 Desa Pancor Kecamatan Gayam Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee9146e33dc	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (pembangunan drainase)	Ketika musim penghujan tiba, air tidak mempunyai saluran pembuangan yang berakibat banjir dan merusak jalan coolmix yang sudah dibangun	Dusun Wakduwak depan Koramil Sapudi, Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 2 dari program pembangunan drainase Volume 500x0,6m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Forum SKPD
61ee92141c3f0	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan (kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving)	Kelancaran Lalulintas jalan dan perekonomian di topang oleh sarana jalan yang baik, karenanya kami mohon pavingisasi jalan di dusun kami	Dusun Kaladi RT 3 Desa Pancor Kec. Gayam - Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61ee92e1bb450	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	Dusun Tanacelleng hampir secara keseluruhan berada di daerah pantai, sehingga sering mengalami kesulitan akses jalan dalam mengangkut hasil tangkapan nelayan	Dusun Tanacelleng RT 1 Desa Pancor Kecamatan Gayam - Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee94bcc5de9	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Bantuan pengadaan sistem Penyediaan Air Minum)	Pengurus Kelompok Hippam menginginkan merubah sistem permesinan sebagai penyedot air namun menggunakan arus listrik dan grundfos serta rumah pompa agar lebih efisien dan efektif	Dusun toggung Desa Pancor Kecamatan Gayam - Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee958702e74	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pertanian	pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Pertanian lainnya ( pembangunan embung pertanian, Jalan usaha tani, jaringan irigasi)	Para petani mengharapkan pembangunan jalan usaha tani agar mempermudah akses pengeloaan pertanian mulai dari tanam sampai panen dan akses jalan pertanian	Dusun Ro'korok Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee9626e5b3c	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pertanian	pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Pertanian lainnya ( pembangunan embung pertanian, Jalan usaha tani, jaringan irigasi)	Kebutuhan akan Jaringan Irigasi Pertanian menjadi utama ketika para petani kesulitan mengatur pola aliran air kepada para petani	Dusun kaladi Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61ee9849b8dfd	24-01-2023	HAINUR RAHMAN, S.Sos	Kepala Desa Pancor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan (pembangunan jembatan)	Tahun ini kami mengalami musibah ambruknya jembatan penghubung antar dusun dan akses masyarakat karena sudah sudah berumur puluhan tahun dan saat ini kami menggunakan jembatan alternatif swadaya masyarakat	Dusun Nangger Desa Pancor Kecamatan Gayam - Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 1 dari program jembatan penghubung antar dusun dengan ukuran 6x3m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Forum SKPD

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eec8c23fe22	24-01-2023	ABDURRAHM AN	Kepala Desa Tarebung	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang baik untuk sarana transportasi pengangkutan hasil pertanian	Dusun Tarebung Desa Tarebung, Kab. Sumenep	Gayam	Tarebung	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Terkait jalan pertanian dialihkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec93594f10	24-01-2023	ABDURRAHM AN	Kepala Desa Tarebung	Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Bantuan fish finder, GPS, cool box)	mayoritas warga kami dusun tarebung berprofesi sebagai nealyan sehingga butuh alat yang memadai untuk hasil tangkapan yang maksimal	Dusun Tarebung Desa Tarebung, Kab. Sumenep	Gayam	Tarebung	Kabupaten/ Kota	DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	Rekomendasi : Dilanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
624948fa7da1a	03-04-2023	ABDURRAHM AN	Kepala Desa Tarebung	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	#BKD JALAN DESA	rusak berat	Dusun Gilyan, Kab. Sumenep	Gayam	Tarebung	Provinsi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Validasi Mitra Bappeda
61eec4712e226	24-01-2023	H. AS'RI, S.Pd	Kepala Desa Gayam	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	Butuh akses jalan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat	Dusun Gayam RT. 001 RW.001, Kab. Sumenep	Gayam	Gayam	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec59d0b3e3	24-01-2023	H. AS'RI, S.Pd	Kepala Desa Gayam	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (pembangunan drainase)	Sering terjadi banjir	DUSUN BANSANIK RT.001, Kab. Sumenep	Gayam	Gayam	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec699de0f4	24-01-2023	H. AS'RI, S.Pd	Kepala Desa Gayam	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	Kurangnya alat pertanian untuk warga	DUSUN BANASEM RT.003, Kab. Sumenep	Gayam	Gayam	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eea c26d11b7	24-01-2023	H. SURIYANTO	Kepala Desa Gendang Barat	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	kurangnya peralatan demi menunjang sarana pertanian agar para petani lebih cepat dalam proses pertanian	Dusun Bersere RT/RW 002/001 DESA GENDANG BARAT, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Barat	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eea f5e5c7 c8	24-01- 2023	H. SURIYANTO	Kepala Desa Gendang Barat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin jalan (pemeliharaan rutin jalan, Tebing Penguat Tanah (TPT))	Kondisi Tanah area jalan utama kurang stabil, sehingga bisa mengakibatkan longsor.	Dusun Kenggang Desa Gendang Barat, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Barat	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb 78a31 eef	24-01- 2023	H. SURIYANTO	Kepala Desa Gendang Barat	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	Jalan Dusun Kokon sangatlah memprihatinkan, sehingga bila sudah musim hujan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. sehingga dibutuhkan perkerasan jalan.	Dusun Kokon Desa Gendang Barat, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Barat	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb 89bc4 eb1	24-01- 2023	H. SURIYANTO	Kepala Desa Gendang Barat	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	jalan dusun Gendang sangatlah memprihatinkan, diperlukan perbaikan berupa jalan pekerasan. Agar bisa melancarkan segala aktifitas masyarakat khususnya dusun gendang	Dusun Gendang Desa Gendang Barat, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Barat	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb a1f87 151	24-01- 2023	H. SURIYANTO	Kepala Desa Gendang Barat	Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak ( bantuan bibit ternak sapi, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	Ternak sapi adalah mayoritas bagian dari kehidupan petani, khususnya di Desa gendang Barat. Jadi perlu dikembangkan dengan penanaman modal berupa pembagian bibit sapi yang berkualitas untuk para petani, demi mensejahteraan petani.	Dusun Bakoan Desa Gendang Barat, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Barat	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb bbe28 ff4	24-01- 2023	H. SURIYANTO	Kepala Desa Gendang Barat	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	Dusun Bakoan RT 003 adalah jalur pendidikan, yang mana masih sangat memprihatinkan. bilamana sudah musim hujan tiba, jalan akan menjadi becek, salah satu pemanfaat jalan itu adalah siswa dan siswi SDN GENDANG BARAT III dan PAUD. Jadi sangat perlu di prioritaskan oleh pemerintah.	Dusun Bakoan, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Barat	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 3 dari program jalan makadam dan rabat beton) volume 600x2m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Forum SKPD

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
6245a3dc0c2ff	31-03-2023	JAYA ABADI	Lembaga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#HP PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM	RS623f2fa0aeee1_karena masyarakat kesulitan air bersih	Tarebung, Kab. Sumenep	Gayam	Tarebung	Provinsi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Rekomendasi : Usulan dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Forum SKPD
61eeb2d418f50	24-01-2023	MARIANI	Kepala Desa Prambanan	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	Masyarakat Butuh akses jalan yang baik untuk sarana perekonomian masyarakat	Dusun Jambusuk RT. 002 Desa Prambanan, Kab. Sumenep	Gayam	Prambanan	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 5 dari program jalan makadam dan rabat beton) volume 600x2m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Forum SKPD
61eec0e43388c	24-01-2023	MARIANI	Kepala Desa Prambanan	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	Akses jalan pertanian kurang baik	Dusun Sumber Jati RT. 001, Kab. Sumenep	Gayam	Prambanan	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Terkait jalan pertanian di alihkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec22fe75f5	24-01-2023	MARIANI	Kepala Desa Prambanan	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap ( bantuan perahu, alat tangkap udang, pengadaan mesin perahu, cool box di perahu)	kurangnya sarana tangkap ikan	Desa Prambanan, Kab. Sumenep	Gayam	Prambanan	Kabupaten/ Kota	DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	Rekomendasi : Dilanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec2c8bf0c0	24-01-2023	MARIANI	Kepala Desa Prambanan	Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak ( bantuan bibit ternak sapi, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	minimnya ternak sapi di desa prambanan	Desa Prambanan, Kab. Sumenep	Gayam	Prambanan	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec3e3aae36	24-01-2023	MARIANI	Kepala Desa Prambanan	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	kurangnya sarana pertanian	Desa Prambanan, Kab. Sumenep	Gayam	Prambanan	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eeb ddf34 b3f	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin jalan (pemeliharaan rutin jalan, Tebing Penguat Tanah (TPT))	jalannya terkikis air , masyarakat membutuhkan tpt	dusun jati, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb e95d1 2eb	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin jalan (pemeliharaan rutin jalan, Tebing Penguat Tanah (TPT))	jalan terkikis air	dusun polaseng, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec 08448 8f2	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	mudahkan akses transportasi masyarakat desa	dusun koattas, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec 1afe0 3d6	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap ( bantuan perahu, alat tangkap udang, pengadaan mesin perahu, cool box di perahu)	untuk memudahkan untuk membeli ikan	dusun talon, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	Rekomendasi : Dilanjutkan dengan Catatan agar diperjelas jenis bantuannya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec 3013f 65b	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	untuk memudahkan peningkatan pertanian masyarakat desa	dusun jati, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec 3c163 71d	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	untuk memudahkan pertanian	dusun ombereh, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec 44dfe 15	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	untuk memudahkan pertanian	dusun talon, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eec51fdd a65	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak ( bantuan bibit ternak sapi, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	untuk memudahkan pertanian yang tanahnya bebatuan	dusun koattas, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Usulan lebih fokus dan jelas apa yang diminta Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec67b8f 8dd	24-01-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah (Rehab Saluran Irigasi tersier)	untuk memudahkan alirannya air	dusun jati, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Lokasi kegiatan bukan merupakan kewenangan Dinas PUTR Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
62495a424b 3d0	03-04-2023	MASHADI	Kepala Desa Gendang Timur	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	#BKD JALAN DESA	lokasi sangat rusak parah dibutuhkan pembangunan jalan	Dusun Ombaran, Kab. Sumenep	Gayam	Gendang Timur	Provinsi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Validasi Mitra Bappeda
61eeb55dc6 968	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Pertanian	pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Pertanian lainnya ( pembangunan embung pertanian, Jalan usaha tani, jaringan irigasi)	tidak ada saluran pembuangan air hujan, sehingga saat hujan air membajiri areal pertanian yang berakibat pada rusaknya tanaman pertanian warga	RT 001 RW. 001 Dusun Guder Laok, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb770a2 fe4	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Perindustrian	Koord., Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ( bantuan alat pertukangan dan mebel, alat perbengkelan, KUE DAN KERUPUK, ALAT - ALAT USAHA TEKSTIL, PERALATAN MESIN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN)	kelompok masih menggunakan peralatan pertukangan tradisional sehingga hasil produksi kurang maksimal	RT.002 RW.001 Dusun Guder Laok, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rekomendasi : TERUSKAN Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eebbae56 d86	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (pelatihan dan bantuan alat)	banyaknya kaum muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga membutuhkan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan mereka	RT. 01 RW. 02 Dusun Guder Daja, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eebd3a93478	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Desa belum mempunyai Gapura sebagai batas Desa dengan Desa Tetangga. makanya sangat dibutuhkan pembangunan Gapura Batas Desa	RT. 01 RW. 01 Dusun Guder Laok, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rekomendasi : Melalui dana desa Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eecd26501fd5	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni)	kondisi rumah tidak layak huni, sementara pemilik rumah masuk dalam daftar DTKS	RT.002 RW.003 Dusun Nyamplong, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Rekomendasi : dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eecd2eb8b3d0	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni)	kondisi rumah tidak layak huni, sementara pemilik rumah masuk dalam daftar DTKS	RT. 001 RW.003 Dusun Nyamplong, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Rekomendasi : dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eecd36c299a9	24-01-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni)	kondisi rumah tidak layak huni, sementara pemilik rumah masuk dalam daftar DTKS	RT.001 RW.002 Dusun Guder Daja, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Kabupaten/ Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Rekomendasi : dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
624ab544a9373	04-04-2023	MUTAWA	Kepala Desa Nyamplong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	#BKD DRAINASE	memerlukan bangunan drainase karna untuk mengarahkan jalannya air besar supaya tidak merusak jalan dan genangan air	Dusun Guder Daya, Kab. Sumenep	Gayam	Nyamplong	Provinsi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Validasi Mitra Bappeda
62413ac35a55e	28-03-2023	MWC NU KECAMATAN GAYAM	Lembaga	Sekretariat Daerah	#HP PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG ORGANISASI / YAYASAN	RS6240b7765390f_M elanjutkan Pembangunan Gedung Orgasisai, Kantor MWC Nu Kec. Gayam Kab. Sumenep karena tidak selesainya pembangunan Gedung Organisasi yang ada	Jln. Raya Gayam Sapudi, Kab. Sumenep	Gayam	Pancor	Provinsi	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				Validasi Mitra Bappeda

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eea95d31439	24-01-2023	RAHMATUL MAULA, S.Pd.	Kepala Desa Kalowang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Bantuan pengadaan sistem Penyediaan Air Minum)	Masyarakat Kami Membutuhkan PIPANISASI untuk perluasan jaringan dan pengembangan konsumen / pemakai air	Dusun Gelugur Barat dan Gelugur Timur, Kab. Sumenep	Gayam	Kalowang	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeac8c1530d	24-01-2023	RAHMATUL MAULA, S.Pd.	Kepala Desa Kalowang	Perindustrian	Koord., Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ( bantuan alat pertukangan dan mebel, alat perbengkelan, KUE DAN KERUPUK, ALAT - ALAT USAHA TEKSTIL, PERALATAN MESIN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN)	meminimalisasi biaya untuk panen padi	Dusun Palotanan, Kab. Sumenep	Gayam	Kalowang	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : DITERUSKAN DARI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KE DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (SASARAN KELOMPOK TANI) CATATAN AGAR DIPERJELAS JENIS USULAN NYA Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeae688dc0e	24-01-2023	RAHMATUL MAULA, S.Pd.	Kepala Desa Kalowang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan (kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving)	Masyarakat sangat membutuhkan Pengaspalan Jalan	Kelbuk Timur, Kab. Sumenep	Gayam	Kalowang	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 4 dari program kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving) 800x2,5m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Forum SKPD
61eeafbcebe9d	24-01-2023	RAHMATUL MAULA, S.Pd.	Kepala Desa Kalowang	Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak ( bantuan bibit ternak sapi, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	Masyarakat di Dusun Kami rata-rata memelihara Kambing, sehingga butuh pengembangan usaha ternak kambing	Kelbuk Barat, Kab. Sumenep	Gayam	Kalowang	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eeb3b4cdbf7	24-01-2023	RAHMATUL MAULA, S.Pd.	Kepala Desa Kalowang	Pertanian	pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Pertanian lainnya (pembangunan embung pertanian, Jalan usaha tani, jaringan irigasi)	Untuk memudahkan Para petani dalam proses transportasi hasil tani	Dusun Palotanan, Kab. Sumenep	Gayam	Kalowang	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb aa92b8ba	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	sulit untuk di akses masyarakat pengguna motor	dusun jambuir rt/rw 02/03, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb d9424ac5	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin jalan (pemeliharaan rutin jalan, Tebing Penguat Tanah (TPT))	mudah terkikis air	desa jambuir, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb ee04126f	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Pertanian	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak ( bantuan bibit ternak sapi, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik)	untuk meningkatkan perekonomian masyarakat jambuir	desa jambuir, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eeb fbe9561c	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	sulit untuk di aksek anak sekolah	dusun palotanan, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 6 dari program kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving) 500x2,5m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec 0ffa2ee7	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	jalan licin banyak masyarakat yang jatuh	dusun palotanan 02/01, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 6 dari program kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving) 500x2,5m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eec20bc1fbf	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan (kegiatan pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving)	sulitnya akses jalan ke makam	dusun palotanan 02/01, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec3931ad0b	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	kurangnya ke efektifan masyarakat menanam pady	dusun palotanan 02/01, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec46821a61	24-01-2023	RASIB	Kepala Desa Jambuir	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	sulit untuk di akses	dusun palotanan 02/01, Kab. Sumenep	Gayam	Jambuir	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Agar dilengkapi dengan ukuran panjang dan lebar jalan yang di usulkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Rekomendasi : merupakan prioritas 6 dari program pembangunan jalan, hibah, Pembangunan paving) 500x2,5m Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eebd3aed800	24-01-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (pemeliharaan makam)	masyarakat kami membutuhkan perumahan yang layak huni	Dusun Perreng Bato Desa Karang tengah, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Kabupaten/ Kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Rekomendasi : dialihkan dari DLH ke Perkimhub Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eebe98d0f67	24-01-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja ( jalan makadam dan rabat beton)	masyarakat sangat membutuhkan akses jalan yang baik untuk lancarnya pemasaran hasil pertanian warga	Dusun Perreng Bato Desa Karang tengah, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rekomendasi : Terkait jalan pertanian dialihkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eebf5f108a7	24-01-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (bantuan roda tiga, handtraktor, Power Thresher, Corn seller, Selip Jagung)	mayoritas masyarakat kami mata pencahariaannya adalah petani jadi kami mohon bantuan handtraktor	Dusun Pereng Bato Desa Karang tengah, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rekomendasi : Lanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi Kecamatan	Status
61eec08ec50cb	24-01-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (pembangunan sumur bor)	Kebutuhan akan air minum sangat sulit kami dapatkan mengingat tidak ada sumur pompa di dusun kami	Dusun Pereng Bato Desa Karang Tengah Kecamatan Gayam Sumenep, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan ke proses selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec22b7dba2	24-01-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (pembangunan sumur bor)	kekurangan air sangat kami rasakan warga dusun kengkang dan dusun karang tengah maka kami mohon pengadaan pembangunan rumah pompa beserta perangkatnya	Dusun Karang Tengah dan Dusun kengkang Desa Karang tengah, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Kabupaten/ Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Rekomendasi : Lokasi kegiatan merupakan kewenangan desa Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
61eec36c33479	24-01-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap ( bantuan perahu, alat tangkap udang, pengadaan mesin perahu, cool box di perahu)	kelompok nelayan dusun perrreng bato berusaha menjamin ketersediaan bantuan jaring nelayan untuk kelancaran penangkapan ikan di desa kami	Dusun Perrreng Bato Desa Karang tengah, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Kabupaten/ Kota	DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	Rekomendasi : Dilanjutkan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0		Diteruskan ke Musrenbang Kecamatan
624964ea16839	03-04-2023	SOEHARA	Kepala Desa Karang Tengah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	#BKD JALAN DESA	jalan sangat rusak parah	Dusun Perrreng Batu, Kab. Sumenep	Gayam	Karang Tengah	Provinsi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Validasi Mitra Bappeda

Sumber Data :

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tersebut diatas, Data Rekapitulasi Usulan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2024 Kecamatan Gayam.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien serta fasilitasi forum kerukunan antar umat bergama dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah "Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif;
4. Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal;
5. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah	100 100 100
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	100
		Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai sakiP 2. Opini atas Audit BPK 3. Tingkat Maturitas SPIP	B 100 100

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayam serta tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, maka rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Target Tahun 2024
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	83
1.1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	83
1.2.	Meningkatkan fasilitasi dan kordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	B
2.1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja perangkat daerah	100%

### 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Prakiraan Maju

Dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep disusun dan diselaraskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 agar semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki sasaran yang sama. Pada Tahun 2024 ini program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep terdiri dari :

1. 06 (enam) Program;
2. 14 (empat belas) Kegiatan, dan
3. 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan.

Secara terinci dapat dilihat dalam Tabel 3.3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Perangkat Daerah Kecamatan Gayam**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN								2.559.568.826						3.365.251.044
7.01.20	Kecamatan Gayam								2.559.568.826						3.365.251.044
7.01.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.402.095.426						3.178.815.444
7.01.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.499.500						13.974.720
7.01.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	1.722.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.329.120	
7.01.20.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	624.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.329.120	
7.01.20.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	566.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.329.120	
7.01.20.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	566.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.329.120	
7.01.20.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	566.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.329.120	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7.01.20.01. 2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah'	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	1 Laporan	6 Dokumen	2.454.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.329.120
7.01.20.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.915.571.426					2.764.180.144
7.01.20.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	27 Orang/Bulan	20 Laporan	1.909.568.826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2.742.271.024
7.01.20.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gayam	100%	20 Laporan	20 Laporan	6.002.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	21.909.120
7.01.20.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								22.471.950					27.000.000
7.01.20.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Jenis layanan Kepegawaian	Kecamatan Gayam	100%	27 Paket	1 Jenis	22.471.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	27.000.000
7.01.20.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								251.287.400					112.386.640
7.01.20.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	100%	178 Paket	24756 Jenis	8.344.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	4.564.680
7.01.20.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	100%	124 Paket	24756 Jenis	10.318.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	24.425.160

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7.01.20.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	100%	15616 Paket	24756 Jenis	29.327.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	47.046.800
7.01.20.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	100%	10800 Paket	24756 Jenis	7.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	10.524.000
7.01.20.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	100%	12 Dokumen	24756 Jenis	2.556.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	1.944.000
7.01.20.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayam	100%	471 Laporan	24756 Jenis	193.662.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	23.882.000
7.01.20.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								41.358.822					49.149.540
7.01.20.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gayam	100%	5 Unit	5 Unit	41.358.822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	49.149.540
7.01.20.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.255.920					44.467.200
7.01.20.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gayam	100%	36 Laporan	7 Jenis	24.055.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	13.267.200
7.01.20.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gayam	100%	48 Laporan	7 Jenis	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	31.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7.01.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								109.650.408					152.942.700
7.01.20.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gayam	100%	5 Unit	16 Unit	37.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	46.851.200
7.01.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gayam	100%	8 Unit	16 Unit	5.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	3.090.000
7.01.20.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gayam	100%	3 Unit	16 Unit	67.040.408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	117.716.000
7.01.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								6.693.200					25.195.000
7.01.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4.245.600					17.084.000
7.01.20.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayam	100%	6 Laporan	6 Laporan	4.245.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	17.084.000
7.01.20.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2.447.600					8.111.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7.01.20.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Tersusnya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayam	100%	12 Laporan	12 Laporan	2.447.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	8.111.000
7.01.20.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								22.687.600					26.191.000
7.01.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								2.687.600					6.191.000
7.01.20.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusnya laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Gayam	100%	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Laporan	2.687.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	6.191.000
7.01.20.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								20.000.000					20.000.000
7.01.20.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Tersusnya Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kecamatan Gayam	100%	11 Keluarga	11 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	20.000.000
7.01.20.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								13.860.800					35.028.000
7.01.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								13.860.800					35.028.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7.01.20.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gayam	100%	6 Laporan	12 Laporan	4.245.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	25.732.000
7.01.20.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gayam	100%	2 Laporan	2 Laporan	9.615.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	9.296.000
7.01.20.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							86.309.000						74.331.400
7.01.20.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							86.309.000						74.331.400
7.01.20.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gayam	100%	100 Orang	2 Laporan	49.617.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	43.785.400
7.01.20.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gayam	100%	12 Dokumen	14 Laporan	36.691.20	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	30.546.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7.01.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								27.922.800					25.690.200
7.01.20.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								27.922.800					25.690.200
7.01.20.06. 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gayam	100%	10 Dokumen	4 Laporan	6.207.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	-
7.01.20.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gayam	100%	10 Dokumen	4 Laporan	3.107.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	4.611.000
7.01.20.06. 2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gayam	100%	10 Dokumen	4 Laporan	18.607.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	21.079.200

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disertai dengan indicator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1. yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Sumenep  
Perangkat Daerah Kecamatan Gayam

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				2.559.568.826		
7.01.20	Kecamatan Gayam				2.559.568.826		
7.01.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Gayam	100%	2.402.095.426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Gayam	6 Dokumen	6.499.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	1 Dokumen	1.722.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayam	1 Dokumen	624.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayam	1 Dokumen	566.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Gayam	1 Dokumen	566.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01.20.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayam	1 Dokumen	566.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah'	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayam	1 Dokumen	2.454.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kecamatan Gayam	20 Laporan	1.915.571.426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayam	20 Orang/Bulan	1.909.568.826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gayam	20 Laporan	6.002.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Kecamatan Gayam	2 Jenis	22.471.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Gayam	50 Paket	22.471.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Gayam	27201 Jenis	251.287.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gayam	178 Paket	8.344.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gayam	124 Paket	10.318.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gayam	15616 Paket	29.327.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Gayam	10800 Paket	7.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Gayam	12 Dokumen	2.556.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayam	471 Laporan	193.662.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kecamatan Gayam	5 Unit	41.358.822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Gayam	5 Unit	41.358.822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Kecamatan Gayam	7 Jenis	55.255.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Gayam	36 Laporan	24.055.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gayam	48 Laporan	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kecamatan Gayam	16 Unit	109.650.408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Gayam	5 Unit	37.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Gayam	8 Unit	5.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01.20.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Gayam	3 Unit	67.040.408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Kecamatan Gayam	100%	6.693.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayam	6 Laporan	4.245.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayam	6 Laporan	4.245.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayam	12 Laporan	2.447.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Gayam	12 Laporan	2.447.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Gayam	100%	22.687.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.01.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Gayam	10 Laporan	2.687.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Gayam	10 Lembaga Kemasyarakatan	2.687.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kecamatan Gayam	12 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Gayam	11 Keluarga	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Kecamatan Gayam	100%	13.860.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gayam	14 Laporan	13.860.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Gayam	12 Laporan	4.245.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan					
7.01.20.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gayam	2 Laporan	9.615.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Kecamatan Gayam	100%	86.309.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gayam	14 Laporan	86.309.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gayam	100 Orang	49.617.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gayam	12 Dokumen	36.691.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Kecamatan Gayam	100%	27.922.800	Dana Transfer Umum-Dana	

Kode	Unsur Kewilayahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
						Alokasi Umum	
7.01.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gayam	3 Laporan	27.922.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7.01.20.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Gayam	10 Dokumen	6.207.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gayam	10 Dokumen	3.107.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7.01.20.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Gayam	10 Dokumen	18.607.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Sumenep, Juni 2023

  
**Plt. CAMAT GAYAM**  
**SUKARYO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196612311994021008

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas PerkenanNya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan 67, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Manding pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, Juli 2024



**NASAH BANDY, SE, KP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700907 199703 1 006

## DAFTAR ISI

	Halam an
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang .....	3
2. Landasan Hukum .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	7
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	12
BAB IV PENUTUP .....	24

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manding merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Manding Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan kedua Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Kecamatan Manding, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 65)
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Manding adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Manding Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

##### **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

##### **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Manding sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Manding mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manding.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran dan kinerja Kecamatan Manding masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

##### **➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target : 12 Laporan                      Realisasi : 6 Laporan                      Capaian : 45,32%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target : 12 Laporan                      Realisasi : 6 Laporan                      Capaian : 46,85%

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target : 30 Jenis                      Realisasi : 29 Jenis                      Capaian : 96,08%

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target : 192 Jenis                      Realisasi : 52 Jenis                      Capaian : 35,25%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target : 5 Unit                              Realisasi : 4 Unit                              Capaian : 86,82%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 12 Laporan                      Realisasi : 6 Jenis                              Capaian : 38,85%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 20 Unit                              Realisasi : 10 Unit                              Capaian : 29,63%

**b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Target : 1 Laporan                      Realisasi : 0 Laporan                      Capaian : 00,00%

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Target : 1 Laporan                      Realisasi : 1 Laporan                      Capaian : 99,97%
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Target : 11 Laporan                      Realisasi : 3 Laporan                      Capaian : 30,20%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Target : 0 Laporan                      Realisasi : 0 Laporan                      Capaian : 00,00%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target : 12 Laporan                      Realisasi : 0 Laporan                      Capaian : 00,00%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target : 1 Laporan                      Realisasi : 1 Laporan                      Capaian : 98,46%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Target : 1 Laporan                      Realisasi : 0 Laporan                      Capaian : 00,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

FORMULIR E.81  
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
 RENCANA KERJA KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP  
 PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6	7	7	8	9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6x100%		15=7+13		16=15/6x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
UNSUR KEWILAYAHAN																												
KECAMATAN																												
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	7.578.101.277		100	6.490.779.206			76	2.253.110.864	25	386.467.547	100	2.639.578.411	100%	48%	100	2.639.578.411	100%	#VALUE!	Kecamatan Mending				
		7 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	5.000.000		12	5.714.900	4	960.000	6	2.590.000			10	3.550.000	83%	62%	10	3.550.000	83%	71%					
		7 01 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	12	6.000.000		12	5.714.900	4	960.000	6	2.590.000			10	3.550.000	83%	62%	10	3.550.000	83%	59%					
		7 01 01 2 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12	1.850.000.000		12	2.403.102.493	0	0		1.230.090.805			0	1.230.090.805	0%	51%	0	1.230.090.805	0	75%					
		7 01 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	1.650.000.000		14	2.387.982.393	3	426.749.974	4	1.230.090.805			7	1.656.840.779	50%	69%	7	1.656.840.779	50%	100%					
		7 01 01 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang tersusun	12	20.000.000		12	5.120.100	4	0	4	240.000			8	240.000	67%	5%	8	240.000	67%	1%					
		7 01 01 2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	20	16.100.000		30	19.620.000	0	0	29	18.850.000			29	18.850.000	97%	96%	29	18.850.000	145%	117%					
		7 01 01 2.1 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beretika Atribut Kelembagaannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	60	16.100.000		30	19.620.000	0	0	29	18.850.000			29	18.850.000	97%	96%	29	18.850.000	48%	117%					
		7 01 01 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6	128.000.000		6	107.488.200	0	0		0			0	0	0%	0%	0	0	0	0					
		7 01 01 2.1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192	12.000.000		192	6.758.000	0	0	52	3.325.000			52	3.325.000	27%	49%	52	3.325.000	27%	28%					
		7 01 01 2.1 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	7.200.000		7	9.265.200	1	3.050.000	3	4.475.000			4	7.525.000	57%	81%	4	7.525.000	57%	105%					
		7 01 01 2.1 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	5	59.000.000		5	27.961.800	1	2.657.000	2	8.657.000			3	11.314.000	60%	40%	3	11.314.000	60%	19%					
		7 01 01 2.1 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	200	10.000.000		200	14.450.000	0	2.400.000	50	2.400.000			50	4.800.000	25%	33%	50	4.800.000	25%	48%					
		7 01 01 2.1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perkertan	Jumlah bahan bacaan dan perkertan yang disediakan	12	4.200.000		12	2.683.200	0	0	4	900.000			4	900.000	33%	34%	4	900.000	33%	21%					
		7 01 01 2.1 09	Perencanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	240	36.200.000		240	46.370.000	30	6.400.000	60	18.080.000			90	24.480.000	38%	53%	90	24.480.000	38%	68%					

	7	01	01	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2	51.000.000		5	52.629.700	1	0	5	45.695.000					6	45.695.000	120%	87%	6	45.695.000	300%	90%		
	7	01	01	2.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2	263.148.500		5	52.629.700	1	0	4	45.695.000					5	45.695.000	100%	87%	5	45.695.000	250%	17%	
	7	01	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	36	41.696.000		36	8.339.200	9	0	9	66.530.426					18	66.530.426	50%	798%	18	66.530.426	50%	160%	
	7	01	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24	10.500.000		24	14.887.200	6	3.542.179	6	7.310.426					12	10.852.605	50%	73%	12	10.852.605	50%	103%	
	7	01	01	2.1	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	12	48.000.000		12	148.016.850	3	22.755.000	3	59.220.000					6	81.975.000	50%	55%	6	81.975.000	50%	171%	
	7	01	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40	110.000.000		40	142.425.370	20	6.000.000	10	42.200.000					30	48.200.000	75%	34%	30	48.200.000	75%	44%	
	7	01	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5	45.000.000		5	36.630.000	2	6.000.000	1	12.000.000					3	18.000.000	60%	49%	3	18.000.000	60%	40%	
	7	01	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	8.300.000		12	8.160.000	0	0	3	1.500.000					3	1.500.000	25%	18%	3	1.500.000	25%	18%	
	7	01	01	2.1	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	56.400.000		3	97.635.370	0	0	1	28.700.000					1	28.700.000	33%	29%	1	28.700.000	33%	51%	

2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	36.123.640		100	4.591.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Mending		
		7	01	02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		2	36.123.640		2	4.591.600		0	0		0		0		0	0	0				
		7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	36.123.640		2	4.591.600	0	0	0		0		0		0	0	0			
		7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	34.500.000		100	26.391.400	0	6.390.000			0	6.390.000	0%	24%	0	6.390.000	0%	19%	Kecamatan Mending		
		7	01	03	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	11	3.800.000		11	6.391.600	0	6.390.000	11	6.390.000		11	12.780.000	100%	200%	11	12.780.000	100%	336%		
		7	01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	11	3.800.000		11	6.391.600	0	6.390.000	11	6.390.000		11	12.780.000	100%	200%	11	12.780.000	100%	336%	
		7	01	03	2		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang diperdayakan	11	11.000.000		11	19.999.800	0	2120000	6	6.040.000		6	8.160.000	55%	41%	6	8.160.000	55%	74%	
		7	01	03	2	02	Peningkatan Keluhan Pangan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK yang di bina	11	11.000.000		11	19.999.800	0	2120000	6	6.040.000		6	8.160.000	55%	41%	6	8.160.000	55%	74%	
		7	01	04		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	7.500.000		100	5.941.600	0	0	1	5.850.000		1	5.850.000	1%	98%	1	5.850.000	1%	78%	Kecamatan Mending	
		7	01	04	2	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1	7.500.000		1	5.941.600	0	0	1	5.850.000		1	5.850.000	100%	98%	1	5.850.000	100%	78%	

## Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep

7	01	05		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMUH</b>	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	154.000.000		100	57.330.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Manding	
7	01	05	2		Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12	154.000.000		12	16.766.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	100	38.500.000		100	40.584.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	34.500.000		100	15.423.700	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Manding
7	01	06	2		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12	34.500.000		12	15.423.700	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	
7	01	06	2	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	10	23.500.000		10	15.423.700	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					55%	56%	
Predikat kinerja																					Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :																							

Disusun  
Sumenep, 02 Mei 2024  
**CAMAT MANDING**  
KABUPATEN SUMENEP  
  
NASAH BANDY, SE, Kp. M.Si  
Pembina TKJ  
NIP. 19700907 199703 1 006

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dievaluasi  
Sumenep, ..... 2024  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
KABUPATEN SUMENEP

**ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si**  
Pembina Ulama Muda  
NIP. 19780518 200501 1 010

KETERANGAN RUMUS	RUMUS
KOLOM 13	$PENJUMLAHAN\ TRIWULAN = \sum(KOLOM 13)$
KOLOM 14	$RUMUS = (KOLOM 13 / KOLOM 6) * 100\%$
KOLOM 15	$RUMUS = KOLOM 13$
KOLOM 16	$RUMUS = (KOLOM 15 / KOLOM 6) * 100\%$
RATA RATA CAPAIAN	$RUMUS = \frac{CAPAIAN\ PROGRAM\ CAPAIAN\ PROGRAM\ LUMUH\ PROGRAM}{Jumlah\ Program}$
PREDIKAT KINERJA	$CAPAIAN >= 91\% \rightarrow$ Sangat Tinggi $76\% \leq CAPAIAN < 91\% \rightarrow$ Tinggi $66\% \leq CAPAIAN < 76\% \rightarrow$ Sedang $51\% \leq CAPAIAN < 66\% \rightarrow$ Rendah $CAPAIAN < 51\% \rightarrow$ Sangat Rendah

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Manding Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 dibawah ini/terlampir :

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN MANDING KAB. SUMENEP  
TAHUN 2024**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakir aan Capaian Targ et RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasi onal	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Kecamatan Manding								3.011.981.471,00	3.011.903.113,00	3.290.403.510,00							3.279.074.267,00		
	7								3.011.981.471,00	3.011.903.113,00	3.290.403.510,00							3.279.074.267,00			
	7	01							3.011.981.471,00	3.011.903.113,00	3.290.403.510,00							3.279.074.267,00			
1	7	01	01				100 %	100 %	2.827.302.271,00	2.902.223.913,00	3.170.724.310,00							3.056.571.087,00			
	7	01	01	2.01					36 Dokumen	36 Dokumen	7.261.700,00	5.714.900,00	5.714.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah dokumen perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6.120.660,00	KECAMATAN MANDING	
	7	01	01	2.01	00	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.261.700, 00	5.714.900, 00	5.714.900, 00	Kab. Sume nep, Mandi ng, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmoni dan adaptif			6.120.660, 00	KECAM ATAN MANDI NG
	7	0 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	-			20 Dokumen	20 Dokumen	2.403.178. 093,00	2.403.102. 493,00	2.403.102. 493,00			-	Peningka tan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah laporan administr asi keuangan perangkat daerah yang disusun		2.657.311. 070,00	KECAM ATAN MANDI NG
	7	0 1	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bul an	15 Orang/bul an	2.397.982. 393,00	2.397.982. 393,00	2.666.497. 786,00	Kab. Sume nep, Mandi ng, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmoni dan adaptif			2.651.513. 390,00	KECAM ATAN MANDI NG
	7	0 1	0 1	2. 02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.195.700, 00	5.120.100, 00	5.120.100, 00	Kab. Sume nep, Mandi ng, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningka tan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmoni dan adaptif			5.797.680, 00	KECAM ATAN MANDI NG
	7	0 1	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi Pegawai Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	19.620.000 ,00	19.620.000 ,00	19.620.000 ,00			-	Peningka tan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Jenis layanan kepegawa ian yang disediaka n		19.222.960 ,00	KECAM ATAN MANDI NG

	7	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		1	1	05	02		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00	Kab. Sumenep, Mending, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			19.222.960,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	107.488.200,00	107.488.200,00	107.488.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi		110.441.048,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		1	1	06	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.758.000,00	6.758.000,00	6.758.000,00	Kab. Sumenep, Mending, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.485.155,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		1	1	06	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.265.200,00	9.265.200,00	9.265.200,00	Kab. Sumenep, Mending, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.960.753,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
		1	1	06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.961.800,00	27.961.800,00	27.961.800,00	Kab. Sumenep, Mending, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni			31.721.340,00	KECAMATAN MANDING

														esa	Dana Alokasi Umum		dan adaptif									
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
		1	1	06	05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.348.000,00	KECAM ATAN MANDING			
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
		1	1	06	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.683.200,00	2.683.200,00	2.683.200,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.158.000,00	KECAM ATAN MANDING			
	7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		1	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	46.370.000,00	46.370.000,00	46.370.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			44.767.800,00	KECAM ATAN MANDING			
	7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang yang dibeli	-			12 Unit	12 Unit	52.629.700,00	52.629.700,00	52.629.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		46.401.870,00	KECAM ATAN MANDING			
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
		1	1	07	06																					

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	52.629.700,00	52.629.700,00	52.515.984,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			46.401.870,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor	-		12 Bulan	12 Bulan	96.243.250,00	171.243.250,00	171.243.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah layanan jasa yang disediakan		100.306.094,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	2000 Laporan	8.339.200,00	8.339.200,00	8.339.200,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.006.841,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.887.200,00	14.887.200,00	22.285.920,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			15.631.560,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	73.016.850,00	148.016.850,00	148.016.850,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			76.667.693,00	KECAMATAN MANDING

																	Umum																			
	7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang dipelihara	-			256 M2	256 M2	140.881.328,00	142.425.370,00	142.425.370,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara							116.767.385,00	KECAMATAN MANDING								
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	44.550.000,00	36.630.000,00	29.330.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif							46.777.500,00	KECAMATAN MANDING									
	7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif							6.184.500,00	KECAMATAN MANDING									
	7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	88.171.328,00	97.635.370,00	97.635.370,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif							63.805.385,00	KECAMATAN MANDING									

2	7	0	0			PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	"Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan"				100 %	100 %	4.591.600, 00	4.591.600, 00	4.591.600, 00					4.551.435, 00		
	7	0	0	2.		Penyelengga raan Urusan Pemerintah an yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	undefined	-			12 Dokumen	12 Dokumen	4.591.600, 00	4.591.600, 00	4.591.600, 00			-	Peningka tatan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmon i dan adaptif	Pelaksana an Urusan Pemerint ahan yang Dilimpahk an kepada Camat	4.551.435, 00	KECAM ATAN MANDI NG
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.591.600, 00	4.591.600, 00	4.591.600, 00	Kab. Sume nep, Mandi ng, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitun gan Anggara n Tahun Sebelum nya	-	Peningka tatan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmon i dan adaptif		4.551.435, 00	KECAM ATAN MANDI NG
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan				100 %	100 %	26.391.400 ,00	26.391.400 ,00	26.391.400 ,00						27.458.970 ,00	
	7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	Jumlah pendampingan dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa	-			11 Desa	11 Desa	6.391.600, 00	6.391.600, 00	6.391.600, 00			-	Peningka tatan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmon i dan adaptif	Jumlah pelaksana an pemberd aryaan desa yang dilaksana kan	6.277.110, 00	KECAM ATAN MANDI NG
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyar akatan	11 Lembaga Kemasyar akatan	6.391.600, 00	6.391.600, 00	6.391.600, 00	Kab. Sume nep, Mandi ng, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitun gan Anggara n Tahun Sebelum nya	-	Peningka tatan Tata Kelola Pemerin tahan yang harmon i dan adaptif		6.277.110, 00	KECAM ATAN MANDI NG

	7	0	0	2.		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	undefined	-			11 Keluarga	11 Keluarga	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21.181.860,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																
		1	3	06	03		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				9 Keluarga	9 Keluarga	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	Kab. Sumenep, Manding, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		21.181.860,00	KECAMATAN MANDING
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana			100 %	100 %	80.941.600,00	5.941.600,00	5.941.600,00							5.032.860,00	
	7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi ketentraman dan ketertiban umum	-			2 Kali	2 Kali	80.941.600,00	5.941.600,00	5.941.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	5.032.860,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
		1	4	01	01																	

						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN MANDING	
	7	0	0	2.	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
		1	4	01	02	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5.941.600,00	5.941.600,00	5.941.600,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.032.860,00	KECAMATAN MANDING	
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan			100 %	100 %	57.330.900,00	57.330.900,00	57.330.900,00							152.263.440,00		
	7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.330.900,00	57.330.900,00	57.330.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		152.263.440,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
	1	5	01	01																			

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			80 Orang	80 Orang	40.564.500,00	40.564.500,00	40.564.500,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			31.500.000,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
		1	5	01	08		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	12 Dokumen	16.766.400,00	16.766.400,00	16.766.400,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			120.763.440,00	KECAMATAN MANDING
6	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan		100 %	100 %	15.423.700,00	15.423.700,00	25.423.700,00							33.196.475,00	
	7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan, Monev dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11 Desa	11 Desa	15.423.700,00	15.423.700,00	15.423.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan		33.196.475,00	KECAMATAN MANDING
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
		1	6	01	09																

						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			8.925.000,00	KECAMATAN MANDING	
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
		1	6	01	16	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15.423.700,00	15.423.700,00	15.423.700,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			13.271.475,00	KECAMATAN MANDING	
	7	0	0	2.	00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
		1	6	01	17	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	11 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Manding, Semu Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.000.000,00	KECAMATAN MANDING	
<b>J U M L A H</b>												<b>3.011.981.471,00</b>	<b>3.011.903.113,00</b>	<b>3.290.403.510,00</b>								<b>3.279.074.267,00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Manding Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep

Perubahan Renja Kecamatan Manding disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Manding ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Manding.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Tahun 2023 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

Sumenep, Juli 2024

  
**CAMAT MANDING**

**NASAH BANDY, SE, KP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700907 199703 1 006





**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
( RKP )  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN SAPEKEN**

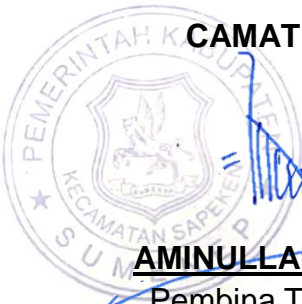
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Sapeken, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Sapeken pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, Juli 2024

  
**CAMAT SAPEKEN**  
**AMINULLAH, S.Pd., M.Si.**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 196706021987031003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
CAMAT SAPEKEN .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A.    PENDAHULUAN.....	3
B.    DASAR HUKUM .....	4
C.    MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D.    SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN .....	7
BAB II.....	8
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	8
FORMULIR E.81.....	13
BAB III.....	22
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	22
BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Penata Tingkat I masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan

jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Sapeken telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sapeken dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sapeken Tahun 2024 yang akan

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II   Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024.

##### **BAB III   Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2023, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran.

##### **BAB IV   Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumenep Kepada Camat di Kabupaten Sumenep. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, meliputi :

**1) Pelayanan Perizinan meliputi :**

- Rekomendasi Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera;
- Rekomendasi Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi.

**2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :**

- Pelayanan Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk);
- Surat Keterangan Pindah;
- Rekomendasi Bantuan;
- Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan);
- Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum;
- Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja;
- Pertimbangan Pengangkatan Kepala Desa;
- Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja;
- Penata Tingkat I dan Pegawai Negeri Sipil lingkup wilayah kerja;
- Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan;
- Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman;

- Penata Tingkat I dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan tingkat capaian kinerja sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**b. Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan  
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat I dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
  - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**c. Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat I dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa.

**d. Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

**Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Penata Tingkat I dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

**e. Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**f. Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel FORMULIR E.81 berikut :

**FORMULIR E.81**

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENCANA KERJA KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangk at Daerah sampai dengan Renja Perangk at Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab									
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9				10				11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
		7																												
		7	01																											
		7	01	01																										
		7	01	01	2.0																									
		7	01	01	2.0																									
		7	01	01	2.0																									
		7	01	01	2.0																									

							Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
		7	01	01	2.0 1	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
							1 Dokumen	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	01	01	2.0 1	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																		
							1 Dokumen	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	01	01	2.0 1	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							1 Laporan	535.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 Dokumen	7.806.435.438																
							20 Dokumen	1.763.058.798	15,20	294.787.073	31,00	601.012.614	0	0	0	0	0	0	46,2 %	895.799.687	231,00 %	50,81 %	46,2 Dokumen	895.799.687	46,20 %	11,48 %
		7	01	01	2.0 2	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																		
							80 Orang/bula n	1.762.743.195	20	294.787.073	20	600.697.014	0	0	0	0	0	0	40 Orang/bula n	895.484.087	50,00 %	50,80 %	40 Orang/bula n	895.484.087		
		7	01	01	2.0 2	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD																		
							1 Laporan	315.603	0	0	1	315.600	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	315.600	100,00 %	100,00 %	1 Laporan	315.600		
		7	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Pemenuhan Administrasi	60 Bulan	41.985.000																
							1 Bulan	14.777.500	0	0	99,39	14.687.500	0	0	0	0	0	0	99,39 Bulan	14.687.500	99,939,0 0%	99,39 %	99,39 Bulan	14.687.500	165,65 %	34,98 %



1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100 %		17	
		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7	01	01	2,0 6	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.683.200	900000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900000 Dokumen	900.000	3.750.000, 00 %	33,54 %	900000 Dokumen	900.000		
		7	01	01	2,0 6	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				204 Laporan	27.690.000	5280000	5.280.000	3520000	3.520.000	0	0	0	0	0	0	8800000 Laporan	8.800.000	4.313.725, 49 %	31,78 %	8800000 Laporan	8.800.000		
		7	01	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	48 Unit	60.031.400		8 Unit	110.714.900	42,95	47.560.000	56,83	62.930.000	0	0	0	0	0	0	99,78 Unit	110.490.000	1.247,25 %	99,80 %	99,78 Unit	110.490.000	207,88 %	184,05 %
		7	01	01	2,0 7	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	75.561.100	2	47.560.000	2	27.800.000	0	0	0	0	0	0	4 Unit	75.360.000	100,00 %	99,73 %	4 Unit	75.360.000		
		7	01	01	2,0 7	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.153.800	0	0	4	35.130.000	0	0	0	0	0	0	4 Unit	35.130.000	100,00 %	99,93 %	4 Unit	35.130.000		
		7	01	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor	60 Bulan	332.906.946		12 Bulan	148.865.903	14,99	22.320.000	32,37	48.190.500	0	0	0	0	0	0	47,36 Bulan	70.510.500	394,67 %	47,37 %	47,36 Bulan	70.510.500	78,93 %	21,18 %
		7	01	01	2,0 8	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	19.045.500	1	0	2	9.480.000	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	9.480.000	50,00 %	49,78 %	3 Laporan	9.480.000		
		7	01	01	2,0 8	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	129.820.403	1	22.320.000	2	38.710.500	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	61.030.500	50,00 %	47,01 %	3 Laporan	61.030.500		
		7	01	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan BBM Kendaraan Dinas Operasional	60 Bulan	7.522.310		12 Bulan	115.497.690	52,62	78.465.000	2,55	3.810.000	0	0	0	0	0	0	55,17 Bulan	82.275.000	459,75 %	71,24 %	55,17 Bulan	82.275.000	91,95 %	1.093,75 %





7	01	03	2,0	00	gan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						8.287.109	0			8.277.200	0				8.277.200	%	99,88%		8.277.200															
7	01	03	2,0	06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0			21.516.500	0			10.566.000	0				10.566.000		49,11%		10.566.000											0,00%				
7	01	03	2,0	00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110 Keluarga			0		0	0	0	110	10.566.000	0	0	0	0	110 Keluarga	100,00%	49,11%	110 Keluarga	10.566.000															
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	39.429.575			100%	12.092.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0	0,00%	0,00%										KECAMATAN SAPEKEN			
7	01	04	2,0	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	60 Laporan	39.429.575			2 Laporan	12.092.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Laporan	0,00%	0,00%	0 Laporan	0	0,00%	0,00%													
7	01	04	2,0	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan					12.092.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Laporan	0,00%	0,00%	0 Laporan	0	0,00%	0,00%													
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemantapan wawasan kebangsaan dan sosialisasi layanan public	100%	172.107.407			100%	65.782.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%	0%	0	0,00%	0,00%											KECAMATAN SAPEKEN		
7	01	05	2,0	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala				0			65.782.500	0			0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0,00%												0,00%			



7	01	06	2,01	00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			4 Dokumen	32.463.200	0	0	2	7.903.500	0	0	0	0	2 Dokumen	7.903.500	50,00 %	24,35 %	2 Dokumen	7.903.500		
---	----	----	------	----	--	--	--	--	-----------	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--	--

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12	14=13/8x100 %	15=7+13		16=15/6x100 %					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1																														
		7	01	06	2,01	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			4 Dokumen	7.903.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	0
		7	01	06	2,01	00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4 Dokumen	8.288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	0

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep disebabkan oleh penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024  
KECAMATAN SAPEKEN**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Kecamatan Sapeken												2.665.93 9.912,00				
7						UNSUR KEWILAYAHAN												2.665.93 9.912,00				
7	0					KECAMATAN												2.665.93 9.912,00				
7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	2.180.19 1.176,00	2.255.03 9.276,00	2.464.21 2.815,00						2.476.81 6.212,00	
7	0	0	2.			Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	-			36 Dokumen	36 Dokumen	3.213.00 0,00	3.213.00 0,00	3.213.00 0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat	2.678.55 0,00	KECAMATAN SAPEKEN

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	t Daerah yang disusun			EN		
7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	1	0	01					2	2	535.500,00	535.500,00	535.500,00	Kab. Sumpen, Sapeken, Semu Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			535.710,00	KECAMATAN SAPEKEN		
			1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen	Dokumen													
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	1	1	0	02					1	1	0,00	535.500,00	535.500,00	Kab. Sumpen, Sapeken, Semu Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			535.710,00	KECAMATAN SAPEKEN		
			1		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen	Dokumen													
7					NON URUSAN							2.466.74	2.466.59	2.652.16								2.665.93	
												3.194,00	1.294,00	4.833,00								9.912,00	
7	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.466.74	2.466.59	2.652.16								2.665.93	
	1											3.194,00	1.294,00	4.833,00								9.912,00	
7	0	0			PROGRAM	Persentase			100 %	100 %	2.180.19	2.255.03	2.464.21								2.476.81		

	1	1			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah					1.176,00	9.276,00	2.815,00						6.212,00		
7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	-			36 Dokumen	36 Dokumen	3.213.000,00	3.213.000,00	3.213.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2.678.550,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
7	1	1	0	02	UNSUR KEWILAYAHAN																
												2.466.743.194,00	2.466.591.294,00	2.652.164.833,00					2.665.939.912,00		
7	0				KECAMATAN																
	1											2.466.743.194,00	2.466.591.294,00	2.652.164.833,00					2.665.939.912,00		
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	2.180.191.176,00	2.255.039.276,00	2.464.212.815,00					2.476.816.212,00		
	1	1			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	-			36 Dokumen	36 Dokumen	3.213.000,00	3.213.000,00	3.213.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2.678.550,00	KECAMATAN SAPEKEN
	1	1	0	1	UNSUR KEWILAYAHAN																

					Kinerja Perangkat Daerah													ntahan yang harmoni dan adaptif	yang disusun								
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																						
	1	1	0	03				1	1	535.500,00	535.500,00	535.500,00	Kab. Sume nep, Sapeken, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m-Dana Alokasi Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif			535.710,00	KECA MATA N SAPEK EN							
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																						
	1	1	0	04				1	1	535.500,00	535.500,00	535.500,00	Kab. Sume nep, Sapeken, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m-Dana Alokasi Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif			535.710,00	KECA MATA N SAPEK EN							
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																						
	1	1	0	05																							

						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	535.500,00	535.500,00	535.500,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Peme ri ntahan yang harmo ni dan adaptif			535.710,00	KECA MATA N SAPEK EN	
7	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	1	0	07						2 Laporan	2 Laporan	535.500,00	535.500,00	535.500,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m-Dana Alokas i Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Peme ri ntahan yang harmo ni dan adaptif			0,00	KECA MATA N SAPEK EN	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
7	0	0	2.		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			20 Dokumen	20 Dokumen	1.763.058.798,00	1.763.058.798,00	1.763.058.798,00			-	Pening katkan Tata Kelola Peme ri ntahan yang harmo ni dan adaptif	Jumlah Laporan Perangka t Daerah yang disusun			2.078.002.823,00	KECA MATA N SAPEK EN
7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	1	0	01																			

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.762.743.195,00	1.762.743.195,00	1.938.316.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.077.687.123,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	07
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	315.603,00	315.603,00	315.603,00	Kab. Sumpen, Sapeken, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			315.700,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.		Administra	Jumlah Pemenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	14.777.500,00	14.777.500,00	14.777.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmo	Jumlah Pemenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah		15.118.740,00	KECAMATAN SAPEKEN



7					NON URUSAN					2.466.74	2.466.59	2.652.16								2.665.93		
										3.194,00	1.294,00	4.833,00								9.912,00		
7	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.466.74	2.466.59	2.652.16								2.665.93		
	1									3.194,00	1.294,00	4.833,00								9.912,00		
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	2.180.19	2.255.03	2.464.21						2.476.81		
	1	1										1.176,00	9.276,00	2.815,00						6.212,00		
7	0	0	2.		Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor	-			12 Bulan	12 Bulan	98.942.1	98.911.4	98.911.4			-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif	Jumlah Pemenu han Administ rasi umum Perangka t Daerah	99.267.7	KECA MATA N SAPEK EN	
	1	1	0									85,00	85,00	85,00					95,00			
	6		00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			01																			
			6																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.466.74	2.466.59	2.652.16									2.665.93	
										3.194,00	1.294,00	4.833,00									9.912,00	
7	0				KECAMATAN					2.466.74	2.466.59	2.652.16									2.665.93	
	1									3.194,00	1.294,00	4.833,00									9.912,00	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan				100 %	100 %	2.180.19	2.255.03	2.464.21						2.476.81		
	1	1										1.176,00	9.276,00	2.815,00						6.212,00		

				AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pemerintah daerah																
7	0	0	2.	Administra	Jumlah	-			12 Bulan	12 Bulan	98.942.185,00	98.911.485,00	98.911.485,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah		99.267.795,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.228.400,00	3.228.400,00	3.228.400,00	Kab. Sumpen, Sapeken, Semu Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.230.850,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	0,00	55.092.385,00	55.092.385,00	Kab. Sumpen, Sapeken, Semu a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang			55.093.260,00	KECAMATAN SAPEKEN

													Kel/D esa	i Umu m	harmo ni dan adaptif						
7					NON URUSAN					2.466.74 3.194,00	2.466.59 1.294,00	2.652.16 4.833,00							2.665.93 9.912,00		
7	0 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.466.74 3.194,00	2.466.59 1.294,00	2.652.16 4.833,00							2.665.93 9.912,00		
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah			100 % 100 %	2.180.19 1.176,00	2.255.03 9.276,00	2.464.21 2.815,00						2.476.81 6.212,00			
7	0 1	0 1	2. 0 6		Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor	-		12 Bulan 12 Bulan	98.942.1 85,00	98.911.4 85,00	98.911.4 85,00			-	Pening katkan Tata Kelola Pemerit ntahan yang harmo ni dan adaptif	Jumlah Pemenu han Administ rasi umum Perangka t Daerah	99.267.7 95,00	KECA MATA N SAPEK EN		
7	0 1	0 1	2. 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.466.74 3.194,00	2.466.59 1.294,00	2.652.16 4.833,00							2.665.93 9.912,00		
7	0 1				KECAMATAN					2.466.74 3.194,00	2.466.59 1.294,00	2.652.16 4.833,00							2.665.93 9.912,00		
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah			100 % 100 %	2.180.19 1.176,00	2.255.03 9.276,00	2.464.21 2.815,00						2.476.81 6.212,00			

				DAERAH KABUPATE N/KOTA	daerah																						
7	0	0	2.		Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor	-			12 Bulan	12 Bulan	98.942.1 85,00	98.911.4 85,00	98.911.4 85,00			-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif	Jumlah Pemenu han Administ rasi umum Perangka t Daerah		99.267.7 95,00	KECA MATA N SAPEK EN					
7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																						
	1	1	0	05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4700 Paket	4700 Paket	6.000.80 0,00	6.000.80 0,00	6.000.80 0,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif			6.000.00 0,00	KECA MATA N SAPEK EN					
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
	1	1	0	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokume n	24 Dokume n	2.683.20 0,00	2.683.20 0,00	2.683.20 0,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo			2.855.16 0,00	KECA MATA N SAPEK EN					



															esa	Umu		ni dan							
																um		adaptif							
7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
	1	1	0	06						14 Unit	14 Unit	35.153.800,00	35.153.800,00	35.153.800,00	Kab. Sume nep, Sapeken, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif			3.075.030,00	KECA MATA N SAPEK EN			
7	0	0	2.		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemer intan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor	-			12 Bulan	12 Bulan	73.985.903,00	148.865.903,00	148.865.903,00			-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif	Jumlah Penyedia an Jasa Penunjan g Kebutuh an Kantor		83.758.815,00	KECA MATA N SAPEK EN			
	1	1	0	8																					
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
	1	1	0	02																					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	19.045.500,00	19.045.500,00	19.045.500,00	Kab. Sume nep, Sapeken, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umu m- Dana Alokas i Umu m	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif			19.150.740,00	KECA MATA N SAPEK EN			

														esa	Umu		ni dan									
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
	1	1	0	04																						
			8			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	12	54.940.4	129.820.	129.820.	Kab.	Dana	-	Pening			64.608.0	KECA			
										Laporan	Laporan	03,00	403,00	403,00	Sume	Transf		katkan				75,00	MATA			
															ep,	er		Tata								
															Sape	Um		Kelola								
															en,	m-		Pemeri								
															Semu	Dana		ntahan								
															a	Alokas		yang								
															Kel/D	i		harmo								
															esa	Um		ni dan								
																	adaptif									
7	0	0	2.		Pemelihara	Jumlah Jasa	-			12	12	115.497.	115.497.	115.497.			-	Pening	Jumlah		164.914.	KECA				
	1	1	0		an Barang	Pemeliharaan,				Bulan	Bulan	690,00	690,00	690,00				katkan	Aset		459,00	MATA				
			9		Milik	Pajak, dan BBM												Tata	yang							
					Daerah	Kendaraan Dinas												Kelola	dipelihar							
					Penunjang	Operasional												Pemeri	a							
					Urusan													ntahan								
					Pemerinta													yang								
					han													harmo								
					Daerah													ni dan								
																	adaptif									
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
	1	1	0	01																						
			9			Jumlah				6	6	29.200.0	29.200.0	29.200.0	Kab.	Dana	-	Pening				33.600.0	KECA			
						Kendaraan				Unit	Unit	00,00	00,00	00,00	Sume	Transf		katkan				00,00	MATA			
						Perorangan									ep,	er		Tata								
						Dinas									Sape	Um		Kelola								
						atau									en,	m-		Pemeri								
						Kendaraan									Semu	Dana		ntahan								
						Dinas									a	Alokas		yang								
						Jabatan									Kel/D	i		harmo								
						yang																				
						Dipelihara																				
						dan																				
						dibayarkan																				
						Pajaknya																				

														esa	Umu		ni dan					
															m		adaptif					
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
1	1	1	0	06					2 Unit	2 Unit	7.830.00	7.830.00	7.830.00	Kab.	Dana	-	Pening			8.040.00	KECA	
			9		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						0,00	0,00	0,00	Sume	Transf	katkan			0,00	MATA		
														nep,	er	Tata					N	
														Sapek	Um	Kelola					SAPEK	
														en,	m-	Pemeri					EN	
														Semu	Dana	ntahan						
														a	Alokas	yang						
														Kel/D	i	harmo						
														esa	Um	ni dan						
															m	adaptif						
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
1	1	1	0	09					20 Unit	1 Unit	78.467.6	78.467.6	112.067.	Kab.	Dana	-	Pening			123.274.	KECA	
			9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						90,00	90,00	690,00	Sume	Transf	katkan			459,00	MATA		
														nep,	er	Tata					N	
														Sapek	Um	Kelola					SAPEK	
														en,	m-	Pemeri					EN	
														Semu	Dana	ntahan						
														a	Alokas	yang						
														Kel/D	i	harmo						
														esa	Um	ni dan						
															m	adaptif						
7	0	0			PROGRAM	Persentase			100 %	100 %	15.416.1	15.416.1	15.416.1							15.415.6		
1	2				PENYELE	Pelayanan Publik					06,00	06,00	06,00							80,00		
					NGARAAN	yang																
					PEMERINT	diselenggarakan																
					AHAN DAN	di Kecamatan																
					PELAYANA																	
					N PUBLIK																	

7	0	0	2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			12 Laporan	12 Laporan	10.762.303,00	10.762.303,00	10.762.303,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.762.920,00	KECA MATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
	1	2	0	01		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.762.303,00	10.762.303,00	10.762.303,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebelu mnya	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		10.762.920,00	KECA MATAN SAPEKEN
7	0	0	2.		Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat	-	-			-	-	4.653.803,00	4.653.803,00	4.653.803,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	4.652.760,00	KECA MATAN SAPEKEN

					Daerah yang Ada di Kecamatan														Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
	1	2	0	03					1 Laporan	1 Laporan	4.653.803,00	4.653.803,00	4.653.803,00	Kab. Sumenep, Sapeken, Semu Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.652.760,00	KECAMATAN SAPEKEN	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga & Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan			100 %	100 %	36.006.312,00	36.006.312,00	36.006.312,00							33.730.410,00		
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-		12 Laporan	12 Laporan	6.202.703,00	6.202.703,00	6.202.703,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		4.441.710,00	KECAMATAN SAPEKEN	
	1	3	0	1																		



						Masyarakat									en, Semu a Kel/D esa	Angga ran Tahun Sebelu mnya		Pemeri ntahan yang harmo ni dan adaptif				EN
7	0	0	2.		Pemberda yaan dan Kesejahter aan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	21.516.5 00,00	21.516.5 00,00	21.516.5 00,00			-	Pening katkan Tata Kelola Pemeri ntahan yang harmo ni dan adaptif	Jumlah Keluarga yang Mengiku ti Peningka tan Ketahana n Pangan Keluarga		21.000.4 20,00	KECA MATA N SAPEK EN		
7	0	0	2.	00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
1	1	3	0	03		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				110 Keluarga	110 Keluarga	21.516.5 00,00	21.516.5 00,00	21.516.5 00,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebelu mnya	-	Pening katkan Tata Kelola Pemeri ntahan yang harmo ni dan adaptif			21.000.4 20,00	KECA MATA N SAPEK EN
7	0	0			PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana Persentase koordinasi yang				100 %	100 %	87.092.3 00,00	12.092.3 00,00	12.092.3 00,00							12.693.2 00,00	

						dilaksanakan di tingkat kecamatan																
7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-			12 Laporan	12 Laporan	87.092.300,00	12.092.300,00	12.092.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		12.693.200,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
1	4	0	1	02		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	87.092.300,00	12.092.300,00	12.092.300,00	Kab. Sumenep, Sapeken, Semu Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.693.200,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Prosentase Peningkatan pementapan wawasan				100 %	100 %	65.782.500,00	65.782.500,00	65.782.500,00							66.300.000,00	

					PEMERINTAH UMUM	kebangsaan dan sosialisasi layanan public																
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	65.782.500,00	65.782.500,00	65.782.500,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		66.300.000,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
				01		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan				1 Orang	1 Orang	31.462.500,00	31.462.500,00	31.462.500,00	Kab. Sumanep, Sapeken, Semu Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			31.500.000,00	KECAMATAN SAPEKEN

						dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
	1	5	0	08																			
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.320.000,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kab. Sume nep, Sapeken, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Anggaran Tahun Sebelu mnya	-	Pening katkan Tata Kelola Pemer intahan yang harmo ni dan adaptif			34.800.000,00	KECA MATAN SAPEK EN	
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase tingkat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	82.254.800,00	82.254.800,00	58.654.800,00								60.984.410,00	

7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-			12 Dokumen	12 Dokumen	82.254.800,00	82.254.800,00	82.254.800,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	60.984.410,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
	1	6	0	06		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Kab. Sumelep, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa Kab. Sumelep, Sapeken, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		0,00	KECAMATAN SAPEKEN
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
	1	6	0	09																	

						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	32.463.200,00	32.463.200,00	32.463.200,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebelu mnya	-	Pening katkan Tata Kelola Peme ri ntahan yang harmo ni dan adaptif			32.463.270,00	KECA MATA N SAPEK EN
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																	
	1	6	0	12		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.903.500,00	7.903.500,00	7.903.500,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebelu mnya	-	Pening katkan Tata Kelola Peme ri ntahan yang harmo ni dan adaptif			9.232.860,00	KECA MATA N SAPEK EN
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
	1	6	0	16		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	8.288.100,00	8.288.100,00	8.288.100,00	Kab. Sume nep, Sapek en, Semu a Kel/D esa	Sisa Lebih Perhit ungan Angga ran Tahun Sebelu mnya	-	Pening katkan Tata Kelola Peme ri ntahan yang harmo ni dan adaptif			8.288.280,00	KECA MATA N SAPEK EN
7	0	0	2.	00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	

1	6	0	17																		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	-	0,00	0,00	10.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.000.000,00	KECAMATAN SAPEKEN
<b>J U M L A H</b>											<b>2.466.74</b>	<b>2.466.59</b>	<b>2.652.16</b>						<b>2.665.93</b>		
											<b>3.194,00</b>	<b>1.294,00</b>	<b>4.833,00</b>						<b>9.912,00</b>		


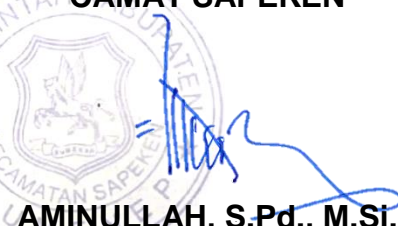
## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Juli 2024

  
**CAMAT SAPEKEN**  
  
**AMINULLAH, S.Pd., M.Si.**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 196706021987031003





**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
(RKP)  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN NONGGUNONG**

**Jl. Raya Pelabuhan sokaramme Paseser**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Nonggunong pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, 12 Juni 2024

**CAMAT NONGGUNONG**



**ROBI FIRMANSYAH WIJAYA, SE.MM**

Penata Tk. I

NIP. 1970926 199703 1 009

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	9
2.1. Faktor Pendorong .....	15
2.2. Faktor Penghambat .....	15
2.3. Tindak Lanjut.....	15
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB IV PENUTUP.....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	26
1. Keputusan Camat Nonggunong, Nomor 188/21/KEP/435.303/2024, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.....	27
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong .....	31
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong .....	32
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Penata Tk. I masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diamanatkan itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Nonggunong telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021- 2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-

- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
  15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Nonggunong dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Dearah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Untuk melakukan penyesuaian rencana Program dan Kegiatan karena adanya pergeseran dan penambahan anggaran serta penyesuaian kinerja yang tertuang pada RKPD Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

### **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

### **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

### **BAB IV Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024**

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Target : 6 Dokumen      Realisasi : 4 Dokumen      Capaian : 66,67%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Target : 14 Laporan      Realisasi : 8 Laporan      Capaian : 57,14%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Target : 2 Jenis      Realisasi : 2 Jenis      Capaian : 100%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target : 72 Jenis      Realisasi : 36 Jenis      Capaian : 50,00%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target : 8 Unit      Realisasi : 2 Unit      Capaian : 25,00%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 48 Laporan      Realisasi : 24 Jenis      Capaian : 50,00%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 20 Unit      Realisasi : 11 Unit      Capaian : 55,00%

**b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Target : 2 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 50,00%

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Target : 1 Laporan                  Realisasi : 1 Laporan                  Capaian : 100,00%
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
Target : 1 laporan                  Realisasi : 1 Laporan                  Capaian : 100%
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Target : 3 Laporan                  Realisasi : 2 Laporan                  Capaian : 66,67%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 12 Laporan                  Realisasi : 6 Laporan                  Capaian : 50,00%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Target : 12 Laporan                  Realisasi : 6 Laporan                  Capaian : 50,00%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 2 Laporan                  Realisasi : 1 Laporan                  Capaian : 50,00%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Target : 12 Laporan                  Realisasi : 6 Laporan                  Capaian : 50,00%
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Target : 2 Laporan                  Realisasi : 1 Laporan                  Capaian : 50,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6			7		8		9		10				11		12			13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
UNSUR KEWILAYAHAN																														
KECAMATAN																														
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	9.238.177.345		100 %	2.254.701.882	15	317.350.051	30	711.950.733	0	0	0	0	45 %	1.029.300.784	45,00 %	45,65 %	45 %	1.029.300.784	45,00 %	11,14 %	KECAMATAN NONGGUNONG				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98 %	29.805.452		98 %	10.570.400	0	0	6	640.000	0	0	0	0	6 %	640.000	6,12 %	6,05 %	6 %	640.000	6,12 %	2,15 %					
7	01	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	1.836.800	1	0	1	0	0	0	0	0	2 Dokumen	0	50,00 %	0,00 %	2 Dokumen	0							
7	01	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1.833.600	1	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	0							
7	01	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1.725.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	100,00 %	0,00 %	1 Dokumen	0							
7	01	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.725.000	1	0	0	320.000	0	0	0	0	0 Dokumen	320.000	0,00 %	18,55 %	0 Dokumen	320.000							
7	01	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.725.000	0	0	1	160.000	0	0	0	0	1 Dokumen	160.000	100,00 %	9,28 %	1 Dokumen	160.000							
7	01	01	2.01	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1.725.000	0	0	1	160.000	0	0	0	0	1 Laporan	160.000	100,00 %	9,28 %	1 Laporan	160.000							
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	98 %	8.192.431.516		98 %	1.835.854.200	15	260.745.901	33	553.941.533	0	0	0	0	48 %	814.687.434	48,98 %	44,38 %	48 %	814.687.434	48,98 %	9,94 %				
7	01	01	2.02	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	1.828.320.600	15	259.525.901	15	551.921.533	0	0	0	0	15 Orang/bulan	811.447.434	100,00 %	44,38 %	15 Orang/bulan	811.447.434							
7	01	01	2.02	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD			12 Laporan	7.533.600	3	1.220.000	3	2.020.000	0	0	0	0	6 Laporan	3.240.000	50,00 %	43,01 %	6 Laporan	3.240.000							
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	98 %	55.972.165		98 %	17.860.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0 %	0	0,00 %	0,00 %					

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17		
		7 01 01 2.05 00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	17.860.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00 %	0,00 %	1 Paket	0				
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	96 %	338.761.550	96 %	232.574.560	17	39.722.900	23	55.409.500	0	0	0	0	0	0	0	0	40 %	95.132.400	40,82 %	40,90 %	40 %	95.132.400	40,82 %	28,08 %	
		7 01 01 2.06 00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15 Paket	2.237.800	0	908.200	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Paket	908.200	66,67 %	40,58 %	10 Paket	908.200			
		7 01 01 2.06 00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	2.954.200	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Paket	0	70,00 %	0,00 %	7 Paket	0			
		7 01 01 2.06 00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			26 Paket	74.506.560	7	14.700.000	7	20.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 Paket	35.400.000	53,85 %	47,51 %	14 Paket	35.400.000			
		7 01 01 2.06 00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			204 Laporan	152.876.000	43	24.114.700	58	34.709.500	0	0	0	0	0	0	0	0	101 Laporan	58.824.200	49,51 %	38,48 %	101 Laporan	58.824.200			
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	96 %	109.318.844	96 %	26.638.400	0	0	99	28.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99 %	28.620.000	101,02 %	99,94 %	99 %	28.620.000	101,02 %	26,18 %	
		7 01 01 2.07 00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	28.638.400	0	0	4	28.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 Unit	28.620.000	100,00 %	99,94 %	4 Unit	28.620.000			
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	96 %	125.467.799	96 %	43.650.712	15	6.706.250	8	3.802.200	0	0	0	0	0	0	0	0	23 %	10.508.450	23,47 %	24,07 %	23 %	10.508.450	23,47 %	8,38 %	
		7 01 01 2.08 00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	13.276.600	3	3.096.600	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 Laporan	3.096.600	50,00 %	23,32 %	6 Laporan	3.096.600			
		7 01 01 2.08 00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	30.374.112	3	3.609.650	3	3.802.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 Laporan	7.411.850	50,00 %	24,40 %	6 Laporan	7.411.850			
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	96 %	386.420.019	96 %	85.553.110	11	10.175.000	81	69.537.500	0	0	0	0	0	0	0	0	92 %	79.712.500	93,88 %	93,17 %	92 %	79.712.500	93,88 %	20,63 %	
		7 01 01 2.09 00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			13 Unit	5.840.000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 Unit	0	46,15 %	0,00 %	6 Unit	0			
		7 01 01 2.09 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	79.713.110	0	10.175.000	2	69.537.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Unit	79.712.500	100,00 %	100,00 %	2 Unit	79.712.500			
		7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>38.779.529</b>	<b>100 %</b>	<b>10.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>KECAMATAN NONGGUNONG</b>
		7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			0	10.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %		
		7 01 02 2.02 00	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	10.860.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	100,00 %	0,00 %	1 Laporan	0			

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV															
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17				
		7	01	03	PROGRAM PEMBERSAYAAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100 %	263.123.541			100 %	37.215.400	0	320.000	22	8.200.000	0	0	0	0	22 %	8.520.000	22,00 %	22,89 %	22 %	8.520.000	22,00 %	3,24 %	KECAMATAN NONGGUNONG	
		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	98 %	158.532.522			98 %	11.465.400	2	320.000	4	480.000	0	0	0	0	6 %	800.000	6,12 %	6,98 %	6 %	800.000	6,12 %	0,50 %	
		7	01	03	2.01	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8 Lembaga Kemasyarakatan	7.680.000	4	320.000	4	480.000	0	0	0	0	8 Lembaga Kemasyarakatan	800.000	100,00 %	10,42 %	8 Lembaga Kemasyarakatan	800.000				
		7	01	03	2.01	00	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	3.785.400	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	100,00 %	0,00 %	1 Laporan	0				
		7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	25.750.000			0	7.720.000					7.720.000		29,98 %		7.720.000			0,00 %		
		7	01	03	2.06	00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			120 Keluarga	20.000.000	30	0	30	7.720.000	0	0	0	0	60 Keluarga	7.720.000	50,00 %	38,60 %	60 Keluarga	7.720.000				
		7	01	03	2.06	00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			50 Keluarga	5.750.000	13	0	13	0	0	0	0	0	26 Keluarga	0	52,00 %	0,00 %	26 Keluarga	0				
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	64.769.754			100 %	23.050.000	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0,00 %	0,00 %	0 %	0	0,00 %	0,00 %	KECAMATAN NONGGUNONG	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Yang Dausun	98 %	64.389.681			98 %	23.050.000	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0,00 %	0,00 %	0 %	0	0,00 %	0,00 %		
		7	01	04	2.01	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	10.750.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	100,00 %	0,00 %	1 Laporan	0				
		7	01	04	2.01	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan	12.300.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	50,00 %	0,00 %	1 Laporan	0				
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	36.283.682			100 %	79.228.100	0	0	10	8.200.000	0	0	0	10 %	8.200.000	10,00 %	10,35 %	10 %	8.200.000	10,00 %	22,60 %	KECAMATAN NONGGUNONG
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				0	79.228.100			0	8.200.000					8.200.000		10,35 %		8.200.000			0,00 %		

No	Sasaran	Kode	Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1 Dokumen	12.490.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	100,00 %	0,00 %	1 Dokumen	0				
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					8 Dokumen	12.774.300	2	1.920.000	2	1.440.000	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	3.360.000	50,00 %	26,30 %	4 Dokumen	3.360.000				
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																		14,67 %	42,39 %											
<b>Predikat kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah											
<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</b>																														
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</b>																														
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</b>																														
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :</b>																														
1. Mengadakan monitoring dan Evaluasi terhadap semua pegawai di Kecamatan Nonggunong untuk lebih baik lagi rencana kerjanya.																														

		7 01 06 2.01	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	96 %	422.815.007			96 %	83.255.100	3	2.820.000	8	6.000.000	0	0	0	0	0	0	11 %	8.820.000	11,22 %	10,59 %	11 %	8.820.000	11,22 %	2,09 %		
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					8 Dokumen	11.302.700	0	0	8	1.440.000	0	0	0	0	0	0	8 Dokumen	1.440.000	100,00 %	12,74 %	8 Dokumen	1.440.000				
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					8 Dokumen	11.682.700	0	0	8	1.120.000	0	0	0	0	0	0	8 Dokumen	1.120.000	100,00 %	9,59 %	8 Dokumen	1.120.000				
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					8 Dokumen	7.932.700	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	0	50,00 %	0,00 %	4 Dokumen	0				
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					8 Dokumen	8.832.700	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	0	50,00 %	0,00 %	4 Dokumen	0				
		7 01 06 2.01 00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					8 Dokumen	8.240.000	2	900.000	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	2.900.000	50,00 %	35,19 %	4 Dokumen	2.900.000				



Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

2.1. Faktor Pendorong Keberhasilan

- a. SDM yang berkualitas
- b. Adanya motivasi dari pimpinan

2.2. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya SDM
- b. Perencanaan yang kurang matang

2.3. Tindak lanjut

- a. Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan.
- b. lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Nonggunong Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Adapun pergeseran anggaran program dan kegiatan di Kecamatan Nonggunong dapat dilihat pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan sebagai berikut

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**

**KECAMATAN NONGGUNONG KAB. SUMENEP**

**TAHUN 2024**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakirasan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Prakirasan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Setelah								Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Kecamatan Nonggunong							2.256.595.709,00	2.256.595.674,00	2.488.310.482,00							2.597.736.372,00		
		UNSUR KEWILAYAHAN							2.256.595.709,00	2.256.595.674,00	2.488.310.482,00							2.597.736.372,00		
		KECAMATAN							2.256.595.709,00	2.256.595.674,00	2.488.310.482,00							2.597.736.372,00		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor			100%	100%	2.032.987.103,00	2.032.987.074,00	2.254.701.882,00							2.378.820.337,00		
	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun/jumlah dokumen perencanaan, perancangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		98%	98%	10.570.400,00	10.570.400,00	10.570.400,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong		22.852.750,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	01	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	1.836.800,00	1.836.800,00	1.836.800,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		3.969.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.833.600,00	1.833.600,00	1.833.600,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		3.969.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		3.969.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		3.969.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		2.976.750,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		4.000.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			98%	98%	1.614.129.312,00	1.614.129.312,00	1.614.129.312,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong	2.040.076.516,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.606.595.712,00	1.606.595.712,00	1.828.320.600,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		2.031.454.525,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20 Laporan	20 Laporan	1.533.600,00	1.533.600,00	1.533.600,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		8.621.931,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan				98%	98%	17.860.500,00	17.860.500,00	17.860.500,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong	15.177.456,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.05	000	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	17.860.500,00	17.860.500,00	17.860.500,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		15.177.456,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi			98%	98%	218.844.560,00	232.574.560,00	232.574.560,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong	145.614.341,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	01	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15 Paket	15 Paket	2.237.800,00	2.237.800,00	2.237.800,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		2.476.215,00	KECAMATAN NONGGUNONG

3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di	100 %	100 %	37.215.400,00	37.215.400,00	37.215.400,00							Anggaran Tahun						46.200.675,00			
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	98 %	98 %	11.465.400,00	11.465.400,00	11.465.400,00										Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong			13.483.575,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	7	01	03	2.01	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				6.467.200,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	7	01	03	2.01	000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.785.400,00	3.785.400,00	3.785.400,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				5.016.375,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	7	01	03	2.0	6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	120 keluarga	120 keluarga	25.750.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00				-					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong			22.717.100,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	7	01	03	2.0	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				23.417.100,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	7	01	03	2.0	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				5.300.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
4	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	100 %	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00														18.632.250,00		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Yang Disusun	98 %	98 %	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00											Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong			18.632.250,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	7	01	04	2.01	000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				4.410.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
	7	01	04	2.01	000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				14.222.250,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
5	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat	100 %	100 %	19.228.100,00	19.228.100,00	19.228.100,00															10.380.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pewawasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	98 %	98 %	19.228.100,00	19.228.100,00	19.228.100,00											Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong			10.380.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG
	7	01	05	2.01	000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarumi Pasaser	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				33.075.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	

Kecamatan dan Kecamatan										Anggaran Tahun										
7	01	05	2.01	000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intru Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intru Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	6.028.100,00	6.028.100,00	6.028.100,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			6.100.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	05	2.01	000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			27.000.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
6	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	73.255.100,00	73.255.100,00	83.255.100,00							74.453.675,00		
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	88 %	88 %	73.255.100,00	73.255.100,00	73.255.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kecamatan Nonggunong			74.453.675,00	KECAMATAN NONGGUNONG
7	01	06	2.01	000	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	1.302.700,00	1.302.700,00	1.302.700,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.027.400,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	000	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	1.682.700,00	1.682.700,00	1.682.700,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.243.375,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	000	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendsynggunaan Asst Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendsynggunaan Asst Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	1.932.700,00	1.932.700,00	1.932.700,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.243.375,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	000	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	8.832.700,00	8.832.700,00	8.832.700,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.426.375,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	000	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dsarah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dsarah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.084.600,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	001	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.430.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.000.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	001	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	12.774.300,00	12.774.300,00	12.774.300,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Sokarami Pasezer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.415.350,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
7	01	06	2.01	001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	-	2 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Nonggunong, Semus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN NONGGUNONG	
<b>J U M L A H</b>									<b>2.256.535.709,00</b>	<b>2.256.535.674,00</b>	<b>2.488.310.482,00</b>							<b>2.537.736.972,00</b>		



## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 10 Juli 2024

**CAMAT NONGGUNONG**



**ROBI FIRMANSYAH WIJAYA, SE.MM**

Penata Tk. I

NIP. 1970926 199703 1 009

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATA NONGGUNONG**  
Jl. Raya Nonggunong No. 01 Telp. (0328) 663538  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69471

KEPUTUSAN CAMAT NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/20/KEP/435.303/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP

CAMAT NONGGUNONG

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Nonggunong Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupate Sumenep

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.


Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Nonggunong.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

-----  
**CAMAT NONGGUNONG**  
  
**ROBI FIRMANSYAH WIJAYA, SE.MM**  
Penata Tk. I  
NIP. 1970926 199703 1 009

Lampiran : Keputusan Camat Nonggunong  
Nomor :  
188/20/KEP/435.303/2024  
Tanggal : 03 Juli 2024

-----

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Nonggunong
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Nonggunong
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Nonggunong;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Nonggunong;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Nonggunong;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Nonggunong</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Nonggunong;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Nonggunong;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Nonggunong</li></ol>

Sumenep, 03 Juli 2024

**CAMAT NONGGUNONG**



**ROBI FIRMANSYAH WIJAYA, SE.MM**

Penata Tk.

NIP. 1970926 199703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN NONGGUNONG**

Jl. Raya Nonggunong No. 01 Tlp. (0328) 663538

**SUMENEP**

Kode Pos : 69471

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/20/BA/435.303/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Nonggunong Kabupaten Sumenep, Tanggal 03 Juli 2024, Nomor : 188/20/KEP/435.303/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 03 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP

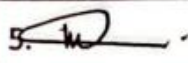
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ROBI FIRMANSYAH WIJAYA, SE,MM	KETUA	1.
2	EDI KASMANTO, S.kom	SEKRETARIS	2.
3	SIRAT, SE,MM	ANGGOTA	3.
4	WAHIT, SH	ANGGOTA	4.
5	MOH. ISMAIL HAKIM, S.kom	ANGGOTA	5.
6	HAIRUDDIN, SH	ANGGOTA	6.
7	MATWAN, S.A.P	ANGGOTA	7.

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

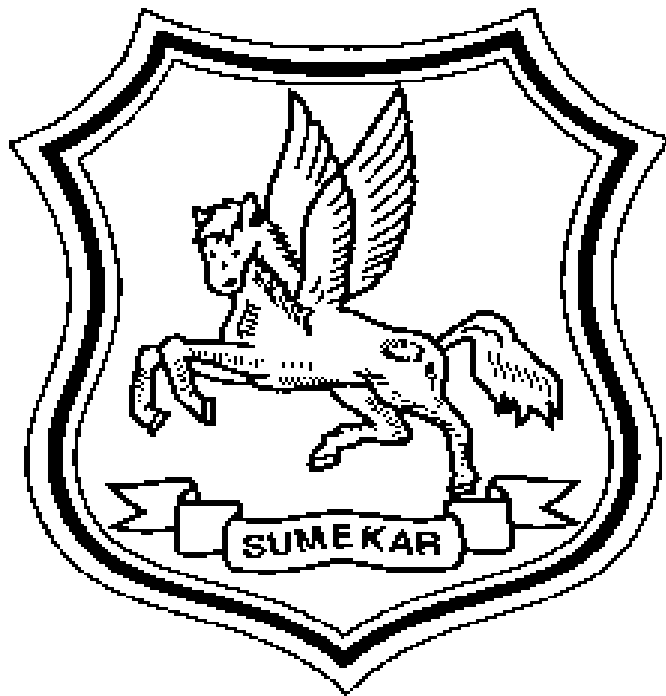
TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ROBI FIRMANSYAH WIJAYA, SE,MM	KETUA	1. 
2	EDI KASMANTO, S.kom	SEKRETARIS	2. 
3	SIRAT, SE,MM	ANGGOTA	3. 
4	WAHIT, SH	ANGGOTA	4. 
5	MOH. ISMAIL HAKIM, S.kom	ANGGOTA	5. 
6	HAIRUDDIN, SH	ANGGOTA	6. 
7	MATWAN, S.A.P	ANGGOTA	7. 

**PHOTO DOKUMENTASI**  
PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI RABU, TANGGAL 03 Juli 2024



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**



**TAHUN 2024**

**KECAMATAN SARONGGI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan SARONGGI.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi perangkat daerah kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyusunan rencana kerja ini.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024.

Ditetapkan di: SARONGGI  
Pada Tanggal : Januari 2024

**CAMAT SARONGGI**



**Kusyadi, S. Sos, M.Si.**

Nip. 19670410 198903 1 009

## BAB IPENDAHULUAN

### 1.1 LATARBELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan SARONGGI tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan eluruhaspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan SARONGGI sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Camat SARONGGI tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kantor Camat SARONGGI tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, periode 2021-2025, menetapkan visi yang akan menjadi

arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam lima tahun kedepan, adalah:

***BISMILLAH MELAYANI* “ SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA “**

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Unggul**

Sejahtera yang menjadi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Berperiode 2021-2025 mempunyai arti bahwa masyarakat Kabupaten Sumenep dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Sumenep.

Sumenep yang sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep meliputi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sumenep, penurunan angka kemiskinan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan daya beli.

**2. Mandiri**

Penjabaran Visi Mandiri yang dimaksud adalah mengandung pengertian bahwa wilayah Kabupaten Sumenep memiliki Sumber Daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya, untuk menciptakan Sumenep yang Handal dan sejahtera merupakan suatu usaha untuk menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, papan dan kualitas hidup masyarakat yang meningkat secara lahir dan batin menuju masyarakat yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik. Sumenep yang Handal memiliki maksud Sumenep sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya daerah yang didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia, potensi sosial ekonomi dan pariwisata Kabupaten Sumenep sebagai kawasan wisata terpadu.

### 3. Sejahtera

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulannya secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat untuk memberikan standar hidup bagi masyarakat. Berdaya saing juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk menghadapi tantangan persaingan di masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sejahtera dan Berbudhi Luhur.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berbudi luhur, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Sumenep. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan outcome yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupannya meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menganggulangi penyakit masyarakat (narkoba, perzinahan dan lain-lain)

Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Sumenep yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kabupaten Sumenep adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dan asidengansikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kabupaten Sumenep secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

**2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan Optimalisasi sektor hilir Sumber Daya Alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.**

Meningkatkan Ekonomi masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumenep dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Sumenep harus memerhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, peran koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Sumenep. Peran koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Kabupaten Sumenep meningkat.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan, salah satunya

di bidang perekonomian. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik, antara lain melalui koperasi. Keberadaan koperasi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti keberadaan koperasi perkebunan dalam program kemitraan dengan perkebunan besar swasta (PBS) yang berkembang di beberapa kecamatan. Begitu juga dengan sektor lainnya, seperti koperasi di bidang pertanian, perikanan, maupun koperasi unit desa dengan berbagai jenis usahanya. Pengembangan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menggalipotensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang memengaruhi perekonomian masyarakat adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan taraf ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam yang diimbangi dengan sumber daya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Sumenep.

Pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan didorong untuk berkembang. Didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling serta perluasan lapangan pekerjaan. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan

memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Sumenep akan terwujud.

### **3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.**

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumenep. Hal ini yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor keseluruhan pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan memengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memerhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan men- gomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

#### **4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Sumenep. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa men- gedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu.

Persoalan disparitas antar sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Sumenep, maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi dari kepala daerahnya, adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan SARONGGI adalah misi Keempat dari Kepala daerah yaitu “ **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel**”

Dalam mencapai tujuan dari misi Kabupaten Sumenep yang Keempat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan SARONGGI yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas, disiplin, motivasi kerja dan kinerja aparatur Kecamatan SARONGGI untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, cepat dan tangga, ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan publik
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan prima yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada aparat kampung dan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberikan atau memfasilitasi aparat kecamatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, diklat, dll dalam rangka mempercepat pelayanan prima.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. SE Bersama Meneg.PPN/Ka.Bappenas dan Mendagri No.0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ Tentang Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan MUSRENBANG tahun 2007.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
10. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumenep

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Kantor SARONGGI adalah tersedianya suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan SARONGGI, Dengan demikian Rencana Kerja Kantor Camat SARONGGI ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi Camat SARONGGI selaku Pimpinan SKPD Kecamatan SARONGGI dan seluruh perangkat Kantor Camat SARONGGI dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun ruang lingkup dari Rencana Kerja SKPD Kecamatan SARONGGI meliputi aspek pemerintahan umum dengan fungsi pelayanan umum sub fungsi lembaga eksekutif dan legislative, Rencana Kerja SKPD Kecamatan SARONGGI memuat penataan dan peningkatan kemampuan lembaga and tingkat nagari dalam rangka

mewujudkan pemerintah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Kecamatan SARONGGI 2024 ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

##### BAB PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millennium Development Goals), Tantangan dan peluang serta

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program dan Kegiatan

### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SARONGGI TAHUN 2023

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEPD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRAS KEPD

Rencana Kerja Kecamatan SARONGGI adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan SARONGGI ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan SARONGGI selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahap sebagai berikut:

##### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Tahun 2023 Kecamatan SARONGGI sebesar **3.003.117.051,-** dengan **6 program dan 34 kegiatan**. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp. 2.263.328.938,-** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **99.17%**.

### Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan usulan sebesar **Rp. 2,859,446,259,-** terurai dalam **6 program** dan **36 kegiatan**, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari tahun 2023 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPd maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan SARONGGI dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan SARONGGI tahun 2021-2025, maka strategi dan kebijakannya yang akan ditempuh Kecamatan SARONGGI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### ➤ STRATEGI

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan Pelayanan Prima/Pelayanan umum kepada masyarakat
3. Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat.
4. Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
5. Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur kampung.
7. Mengikuti sertakan aparatur Kecamatan untuk mendapat klatteknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
8. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan SARONGGI untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
9. Memfasilitas kerja sama lembaga/organisasi masyarakat dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
10. Memfasilitas kegiatan lembaga dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat

➤ **KEBIJAKAN**

1. Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung.
2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

**Arah Kebijakan Kantor Camat SARONGGI**

STRATEGI	ARAHKEBIJAKAN
Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung
Meningkatkan Pelayanan Prima /Pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung
Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung
Menciptakan sumber-sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
Menciptakan terjadinya komitmen pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapat diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung
Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan SARONGGI untuk mendukung	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan

terciptanya kondisi	dan agama
---------------------	-----------

lingkunganyangbersih,aman,tertib,stabil,dinamis.	untukpeningkatanSDMMasyarakatuntukmendukunglingkunganyangbersih,aman,tertib,stabil,dinamisdanertatarapi
Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasikemasyarakatandenganmasyarakat dalam rangka mewujudkanlingkungan yang sehat dan tertata rapidan serasi.	Mengupayakankerjasamadenganinstansiterkaitdanlembaga-lembagapendidikan,kesehatandanagamauntukpeningkatanSDMMasyarakatuntukmendukunglingkunganyangbersih,aman,tertib,stabil,dinamisdanertatarapi.
MemfasilitasikegiatankelembagaandalamrangkameningkatkanSDMmasyarakat	Peningkatan Kinerja aparaturKecamatan dan Kampung

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan SARONGGI selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas, Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/ implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dan tingkat pusatkan memperlambat proses perencanaan dalam

rangka memterpadukan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisasecaraoptimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep selakuBadan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkatpusat,provinsidankabupatendalamrangka:

1. Mendukungkoordinasiantarpelakupembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Antara Pusat danDaerah.
3. Menjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan,penganggaran,pelaksanaan,dan pengawasan.
4. Mengoptimalkanpartisipasimasyarakat.
5. Menjamintercapainyapenggunaansumberdayasecaraefesien,efektif,berkeadilanandanberkelanjutan.

### **2.3. ISU-ISUPENTING PENYELENGGARATUGASDAN FUNGSIKPD**

KecamatanSARONGGI dibentukberdasarkanPeraturanDaerahKabupatenSumenep Nomor07Tahun2016tentangPembentukanOrganisasiKecamatandanDesa Kabupaten Sumenep dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa diwilayah Kabupaten Sumenep.

Kedudukan Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya disingkatKecamatanSARONGGIKabupatenSumenep,merupakanwilayahkerjaCamatsebagaiPerangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang dipimpinoleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDaerahmelalui Sekretaris Daerah KabupatenSumenep.

Kecamatan SARONGGI sesuai dengan peraturan tersebut diatas, mempunyaiTugasPokokMemimpin,merumuskan,mengatur,membina,mengendalikan,mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan danpelaksanaankebijakandaerahdibidangperencanaanpembangunan dan statistik, sedangkanfungsinya :

1. Perumusankebijakanteknisperencanaan.
2. Mengkoordinasikanpenyusunanperencanaanpembangunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

#### **1. Camat**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Camat mempunyai nciantugas:

- a. menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran satu ankerja perangkat daerah berdasarkan rencana strategik kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan di kampung/kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggara an ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan satu ankerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara RI;
- i. melakukan koordinasi dengan satu ankerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

- j. melakukankoordinasidenganpihakswastadalampelaksanaanpemeliharaanprasaranadanfasilitaspelayananumum;
- k. melakukankoordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerjaperangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintah kampung dan natau kelurahan;
- m. memberikan bimbingan supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan natau kelurahan;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung dan natau lurah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan/atau kelurahan;
- p. melakukan percepatan pencapaian SPM (standar pelayanan Minimal) di wilayah kecamatan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai rencana strategik dan program kerja kecamatan;
- s. melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan program kerja kecamatan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para KepalaSub Bagian agarpekerjaanSekretariatdapatdilaksanakandenganbaikdanbenarsesuaiiperaturan yangberlaku;
- d. mempelajariperaturanperundang-undangan,kebijakanteknis,pedomandan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasSekretariatmelaluiinformasidansumberdatayangadauntukmeningkatkanpengetahuan danketerampilankerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat denganberpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapatdigunakan sebagaidasar dalammelaksanakanpekerjaan;
- f. mengoordinasikanpelayananteknisadministratifbaikinternKecamatanmaupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
- g. mengoordinasikanpenyelenggaraanpengelolaandanbimbinganadministrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkunganKecamatangunatertibadministrasi;
- h. merencanakan,mengaturdanmengawasiterseleenggaranyapengelolaansurat-menysurat,perlengkapanrumah tangga, inventaris, humasdanprotokolsertaurusanumum;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, StandarOperasionalProsedur(SOP)sertadokumenpelayananpublikKecamatan agar penyusunan dokumen tersebutselesai dengan baik dantepatwaktusesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku;
- j. mengevaluasidanmenilaikinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagaibahan pembinaankepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatanSekretariat berdasarkan rencanadanrealisasinyauntukmengetahuitingkatpencapaianprogramdanpermasalahanyangdihadapi, sertapemecahanmasalah;
- l. melaporkankegiatanSekretariatberdasarkanhasilpelaksanaantugasesebagai bahan informasidanpertanggungjawaban pelaksanaantugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakanyangperlu diambil sesuaidenganbidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atas dan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### 3. SubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan dan Keuangan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KepalaSubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan danKeuangan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja SubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan danKeuangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas SubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan danKeuangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan SubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan danKeuangan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas SubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan danKeuangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan SubBagianPenyusunanProgram,Perencanaan danKeuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Kecamatan;
- g. mempelajari dan menganalisis setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;

- h. mempelajari dan menganalisis tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada data dan bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan;
- n. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Kecamatan;
- o. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Kecamatan;
- p. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuansatuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- q. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- r. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masuk dan risatuan organisasi di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- t. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- u. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- w. melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- x. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
  - f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selaluterciptasuasana aman, bersih dan tertib;
  - g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyerurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
  - h. mengontrol proses administrasi perjalanan pegawai di lingkungan Kecamatan unjangan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
  - j. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan /diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
  - k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
  - l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
  - m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
  - n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## 5. Seksi Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah;
- g. mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan;
- h. melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon;
- i. menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah;
- l. memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan;
- m. memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasannya dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan;
- g. mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk mendapat tanggapan serta penyelesaian;
- h. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
- i. merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin;
- j. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan di lingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket;
- k. mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustisial bersama instansi terkait;
- l. mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah melalui operasi yustisi bersama dengan instansi terkait;
- m. merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

- f. membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan dengan cara memintal laporan/masukan dari masing-masing Kepala Kampung/Lurah;
- g. membimbing pengumpulan/pengolahan dan evaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja Kecamatan
- h. mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- i. mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana prasarana di lingkungan;
- k. membimbing pelaksanaan fasilitas umum karyat tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat Kecamatan;
- l. mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugasteknisnya;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- n. mengevaluasi dan menilaikinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



## 8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. membimbing Monitoring dan distribusi bantuan Raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan;
- i. mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- j. mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah Kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dari swasta;
- k. membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial;

- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **9. Seksi Pelayanan Umum**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

- f. membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan umum;
- i. mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan umum;
- j. menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum;
- n. mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan SARONGGI berdasarkan RKPD Kabupaten Sumenep sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Sumenep yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan SARONGGI.

Rancangan Awal Prioritas Pembangunan di Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahun pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan SARONGGI dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sumenep **“MEWUJUDKAN SUMENEP MAJU SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN**

**SEJAHTERA UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”** adalah letak geografis Kecamatan SARONGGI yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep termasuk wilayah pengembangan lingkar luar Kota Sumenep sehingga pertumbuhan Kota Sumenep mengarah ke Kecamatan SARONGGI baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 1 (terlampir).

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan

kepada masyarakat. Untuk mendapat capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk
- d. Tingkat Kemiskinan
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan)
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan dan tingkat Kecamatan selama tahun 2016 sampai dengan 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi Kecamatan itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun. Antaralain:

1. Pembangunan Bidang Pendidikan
2. Pembangunan Bidang Kesehatan
3. Pembangunan Bidang Ekonomi
4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

### 3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan SARONGGI Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sumenep.

Kedudukan Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan Visi adalah **“MEWUJUDKAN SUMENEP MAJU SEJAHTER ADENGANSU MBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN SEJAHTER UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”** Memperhatikan Visi Kabupaten Sumenep tersebut di atas, proses perencanaan yang Transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi dalam kebijakan tersebut, dan gankatalain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 34 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's);
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan system indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integritas dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada definisi organisasi, disusun berdasarkan

berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan SARONGGI yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetapkankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK sesuai dengan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur "Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya."

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan SARONGGI adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan SARONGGI diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan SARONGGI adalah sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan Tepat Sasaran Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kecamatan SARONGGI Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Umum/Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- ✓ Menyusun program strategi yang mendukung pencapaian Visi dan Misi.
- ✓ Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi program dan kegiatan Kecamatan SARONGGI.

Program/kegiatan yang direncanakan dan dibiayai tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan SARONGGI Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan SARONGGI Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga,
- 2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya,
- 3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
- 4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan petap permasalahan pemerintah tingkat dibawahnya,
- 5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

### **PROGRAM**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan SARONGGI maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **KEGIATAN**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan,

Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**, meliputi kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bilanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Atribut dan Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pengadaan Aset Tetap lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

**II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
  - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi kegiatan:**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
  - a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

**IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**, meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, meliputi kegiatan:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
  - c. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - d.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan SARONGGI, dapat dilihat pada tabel 2 (terlampir):

---

---

**BAB**

**IVPENUT****UP****4.1. KAIDAHPELAKSANAAN**

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan SARONGGI Tahun 2024 merupakan acuan bagi pegawai dilingkungan pemerintah Kecamatan SARONGGI sehingga

tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seksi-Seksi maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat serta pegawai/karyawan yang ada dilingkungan Pemerintah Kecamatan SARONGGI berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan SARONGGI Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan SARONGGI Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Seksi-Seksi, maupun kasubbag-kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan SARONGGI perlu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerjanya tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
  - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap seksi-seksi dan kasubbag-kasubbag di sekretariat Pemerintah Kecamatan SARONGGI wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi

anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

#### 4.2. KESIMPULAN

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Kecamatan SARONGGI menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan SARONGGI Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 menjelaskan :

1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2024 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi.
2. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah.
3. Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2024 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah kecamatan SARONGGI akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagai manayang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024, Dalam kaitan itu makas seluruh lembaga pemerintah maupun swasta masyarakat yang menjadi bagian wilayah kecamatan SARONGGI perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin di semua pihak.

Ditetapandi : SARONGGI  
Pada Tanggal : Januari 2021

CAMAT SARONGGI



**Kusyadi, S. Sos, M.Si.**

Nip. 19670410 198903 1 009

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
Sumenep

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan SARONGGI

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN SARONGGI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KERJA TAHUN 2024			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	4.915.900	APBD Kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Dokumen RKA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	712.200	APBD Kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan u Perubahan A - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	632.800	APBD Kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Dokumen DPA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	687.200	APBD Kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Dokumen Perubahan DPA Yang Disusun Sesuai Ketentuan	658.100	APBD Kabupaten
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan	710.822	APBD Kabupaten
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Tersusun	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Tersusun	4.014.000	APBD Kabupaten

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
Sumenep**

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan SARONGGI

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas ASN	19.451.400	APBD Kabupaten

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KERJA TAHUN 2024			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis/Item Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Jenis/Item Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	7.226.600	APBD Kabupaten
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4.496.600	APBD Kabupaten
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Yang Disediakan		Terpenuhinya Jenis ATK Yang Disediakan	21.552.000	APBD Kabupaten
Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	7.784.800	APBD Kabupaten
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Peserta Sosialisasi	1.610.400	APBD Kabupaten
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	49.562.000	APBD Kabupaten
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Kecamatan SARONGGI			APBD Kabupaten

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
Sumenep**

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan SARONGGI

Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Mebel Yang Diadakan	6.800.200	APBD Kabupaten
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	28.463.800	APBD Kabupaten

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KERJA TAHUN 2024			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>					APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24.316.320	APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat Yang Dibayarkan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	11.375.600	APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan Kantor Yang Terpenuhi	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Jasa Peralatan Kantor	8.810.000	APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Yabg Dibayarkan	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.516.980	APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dikelola	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dikelola	3.613.500	APBD Kabupaten
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.550.000	APBD Kabupaten
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	Kecamatan SARONGGI	Terpenuhinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	67.206.678	APBD Kabupaten
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
Sumenep**

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan SARONGGI

<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</i>					
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>					
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	5.325.200	APBD Kabupaten
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	9.325.200	APBD Kabupaten
<b>RENCANA KERJA TAHUN 2024</b>					
<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>TARGET CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DESA</b>					APBD Kabupaten
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					
Peningkatan, Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	5.335.200	APBD Kabupaten
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
Sumenep**

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan SARONGGI

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	3.823.600	
<b><i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i></b>					
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	21.993.100	
<b><i>PROGRAM KOORDINASI KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i></b>					
<b><i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i></b>					
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	4.610.400	APBD Kabupaten
<b><i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN UMUM</i></b>					
<b><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i></b>					
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	25.800.000	APBD Kabupaten
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	50.078.600	APBD Kabupaten

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA KERJA TAHUN 2024			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PA	SUMBER DANA

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten  
Sumenep**

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan SARONGGI

				<b>GU INDIKATIF</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	4.125.200	APBD Kabupaten
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	5.205.200	APBD Kabupaten
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Kecamatan SARONGGI	Terlaksananya Kegiatan Yang Dilaksanakan	6.945.200	APBD Kabupaten



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
( RKP )  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
ARJASA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Arjasa, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Arjasa pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, Juni 2024



# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
SURAT PENGANTAR .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Landasan Hukum .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	8
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	10
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	19
BAB IV PENUTUP .....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	28
1. Keputusan Camat Arjasa No. 188/14/KEP/435.324/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.....	29
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Arjasa.....	33
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Arjasa.....	34
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Arjasa.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Penata Tingkat I masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Arjasa telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **C. DASAR HUKUM**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Arjasa dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Arjasa Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

## **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

## **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2023, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

## **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024**

Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumenep Kepada Camat di Kabupaten Sumenep. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, meliputi :

#### **1) Pelayanan Perizinan meliputi :**

- Rekomendasi Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera;
- Rekomendasi Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi.

#### **2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :**

- Pelayanan Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk);
- Surat Keterangan Pindah;
- Rekomendasi Bantuan;
- Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan);
- Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum;
- Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja;
- Pertimbangan Pengangkatan Kepala Desa;
- Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja;
- Penata Tingkat I dan Pegawai Negeri Sipil lingkup wilayah kerja;
- Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan;
- Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman;
- Penata Tingkat I dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan tingkat capaian kinerja sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah'.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

- PROGRAM PENATA TINGKAT IAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat Ian dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
    - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
  2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
    - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- PROGRAM PENATA TINGKAT IAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat Ian dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa.

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Penata Tingkat I dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
  2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			UNSUR KEWILAYAHAN																								
		7 01	KECAMATAN																								
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	7.030.430.502		100%	1.688.293.838	19,06	268.870.650	24,71	433.023.373	0	0	0	0	43,77%	701.894.023	43,77%	41,57%	43,77%	701.894.023	43,77%	9,98%	KECAMATAN ARJASA	
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	30 Dokumen	47.448.668		5 Dokumen	14.749.055	1	2.939.100	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	2.939.100	20,00%	19,93%	1 Dokumen	2.939.100	3,33%	6,19%		
		7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan				1 dokumen	2.949.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0				
		7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan				1 dokumen	2.949.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0				
		7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan				1 dokumen	2.949.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0				
		7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan				1 dokumen	2.949.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	0				
		7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah				1 kali	2.949.811	1	2.939.100	0	0	0	0	0	0	1 kali	2.939.100	100,00%	99,64%	1 kali	2.939.100				
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	60 Laporan	5.335.252.671		12 Laporan	1.393.925.649	3	174.864.540	3	363.533.775	0	0	0	0	6 Laporan	538.398.315	50,00%	38,62%	6 Laporan	538.398.315	10,00%	10,09%		
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	1.363.795.300	3	168.476.440	3	355.572.675	0	0	0	0	6 bulan	524.049.115	50,00%	38,43%	6 bulan	524.049.115				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									I		II		III		IV												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				20 laporan	30.130.349	5	6.388.100	3	7.961.100	0	0	0	0	8 laporan	14.349.200	40,00 %	47,62 %	8 laporan	14.349.200				
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	15 Jenis	42.041.490		1 Jenis	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Jenis	0	0,00 %	0,00 %	0 Jenis	0	0,00 %	0,00 %		
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN				20 stel	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 stel	0	0,00 %	0,00 %	0 stel	0				
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	30 Jenis	497.325.067		24265 Jenis	150.910.390	6686	34.788.000	5432	36.616.000	0	0	0	0	12118 Jenis	71.404.000	49,94 %	47,32 %	12118 Jenis	71.404.000	40.393,33 %	14,36 %		
		7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan				192 jenis	7.826.944	48	1.941.000	48	1.941.000	0	0	0	0	96 jenis	3.882.000	50,00 %	49,60 %	96 jenis	3.882.000				
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				152 unit	26.059.208	38	6.405.000	38	6.405.000	0	0	0	0	76 unit	12.810.000	50,00 %	49,16 %	76 unit	12.810.000				
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan				786 jenis 4320 paket	50.401.038	192 1080	11.798.000	195 1080	12.456.000	0 0	0 0	0 0	0 0	387 jenis 2160 paket	24.254.000	49,24 % 50,00 %	48,12 %	387 jenis 2160 paket	24.254.000				
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan				22800 paket	10.368.000	6350	2.885.000	5050	2.005.000	0	0	0	0	11400 paket	4.890.000	50,00 %	47,16 %	11400 paket	4.890.000				
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan				12 jenis	1.843.200	3	459.000	3	459.000	0	0	0	0	6 jenis	918.000	50,00 %	49,80 %	6 jenis	918.000				
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				323 kali	54.412.000	55	11.300.000	98	13.350.000	0	0	0	0	153 kali	24.650.000	47,37 %	45,30 %	153 kali	24.650.000				
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	35 Unit	578.021.532		11 Unit	29.400.250	1	9.152.000	10	20.243.000	0	0	0	0	11 Unit	29.395.000	100,00 %	99,98 %	11 Unit	29.395.000	31,43 %	5,09 %		
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				11 unit	29.400.250	1	9.152.000	10	20.243.000	0	0	0	0	11 unit	29.395.000	100,00 %	99,98 %	11 unit	29.395.000				
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	25 Layanan	43.588.615		36 Layanan	13.478.400	9	3.340.010	9	3.335.098	0	0	0	0	18 Layanan	6.675.108	50,00 %	49,52 %	18 Layanan	6.675.108	72,00 %	15,31 %		
		7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet				36 rekening	13.478.400	9	3.340.010	9	3.335.098	0	0	0	0	18 rekening	6.675.108	50,00 %	49,52 %	18 rekening	6.675.108				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I		II		III		IV																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp							
1	2	3		4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17				
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	75 Unit	466.752.459			50 Unit	73.030.094	9	43.787.000	8	9.295.500	0	0	0	0	17 Unit	53.082.500	34,00 %	72,69 %	17 Unit	53.082.500	22,67 %	11,37 %	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola					18 unit	40.900.000	4	17.400.000	5	8.137.500	0	0	0	0	9 unit	25.537.500	50,00 %	62,44 %	9 unit	25.537.500			
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					31 unit	7.134.000	4	1.392.000	3	1.158.000	0	0	0	0	7 unit	2.550.000	22,58 %	35,74 %	7 unit	2.550.000			
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit	24.996.094	1	24.995.000	0	0	0	0	0	0	1 unit	24.995.000	100,00 %	100,00 %	1 unit	24.995.000			
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	24.026.948			100%	6.788.200	59,26	4.023.000	13,49	916.000	0	0	0	0	72,75%	4.939.000	72,75 %	72,76 %	72,75%	4.939.000	72,75%	20,56 %	KECAMATAN ARIJASA
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Kali	19.221.558			4 Kali	3.671.040	1	916.000	1	916.000	0	0	0	0	2 Kali	1.832.000	50,00 %	49,90 %	2 Kali	1.832.000	10,00%	9,53 %	
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan					4 Kali	3.671.040	1	916.000	1	916.000	0	0	0	0	2 Kali	1.832.000	50,00 %	49,90 %	2 Kali	1.832.000			
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	300 Dokumen	4.805.390			60 Dokumen	3.117.160	60	3.107.000	0	0	0	0	0	0	60 Dokumen	3.107.000	100,00 %	99,67 %	60 Dokumen	3.107.000	20,00%	64,66 %	
		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan					500 dokumen	3.117.160	500	3.107.000	0	0	0	0	0	0	500 dokumen	3.107.000	100,00 %	99,67 %	500 dokumen	3.107.000			
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	237.809.638			100%	15.654.640	16,02	2.508.000	31,52	4.934.000	0	0	0	0	47,54%	7.442.000	47,54 %	47,54 %	47,54%	7.442.000	47,54%	3,13 %	KECAMATAN ARIJASA
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	20 Kali	47.470.797			1 Kali	2.488.760	0	0	1	2.426.000	0	0	0	0	1 Kali	2.426.000	100,00 %	97,48 %	1 Kali	2.426.000	5,00%	5,11 %	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa					4 Desa	2.488.760	0	0	4	2.426.000	0	0	0	0	4 Desa	2.426.000	100,00 %	97,48 %	4 Desa	2.426.000			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
									6		7		8		9							10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga masyarakat yang diberdayakan	25 Lembaga	119.718.792		13 Lembaga	13.165.880	3	2.508.000	3	2.508.000	0	0	0	0	6 Lembaga	5.016.000	46,15 %	38,10 %	6 Lembaga	5.016.000	24,00 %	4,19 %											
		7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Penata Tingkat Ian lembaga masyarakat yang dilaksanakan kecamatan			12 Kali	10.053.120	3	2.508.000	3	2.508.000	0	0	0	0	6 Kali	5.016.000	50,00 %	49,89 %	6 Kali	5.016.000														
		7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi			4 Kelompok/Lembaga	3.112.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0													
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	159.354.248		100%	23.276.400	9,23	2.148.000	30,22	7.034.000	0	0	0	0	39,45%	9.182.000	39,45 %	39,45 %	39,45 %	9.182.000	39,45 %	5,76 %	KECAMATAN ARIJASA										
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	75 Kali	159.354.248		13 Kali	23.276.400	3	2.148.000	4	7.034.000	0	0	0	0	7 Kali	9.182.000	53,85 %	39,45 %	7 Kali	9.182.000	9,33 %	5,76 %											
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan			12 Kali	8.613.120	3	2.148.000	3	2.148.000	0	0	0	0	6 Kali	4.296.000	50,00 %	49,88 %	6 Kali	4.296.000														
		7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan			1 Kali	14.663.280	0	0	1	4.886.000	0	0	0	0	1 Kali	4.886.000	100,00 %	33,32 %	1 Kali	4.886.000														
		7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	126.740.053		100%	78.350.432	8,83	6.918.000	8,83	6.918.000	0	0	0	0	17,66%	13.836.000	17,66 %	17,66 %	17,66 %	13.836.000	17,66 %	10,92 %	KECAMATAN ARIJASA										
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penata Tingkat Ian wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	41 Kali	155.074.510		14 Kali	78.350.432	3	6.918.000	3	6.918.000	0	0	0	0	6 Kali	13.836.000	42,86 %	17,66 %	6 Kali	13.836.000	14,63 %	8,92 %											
		7 01 05 2.01 01	Penata Tingkat Ian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan			2 Kegiatan	50.657.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0														
		7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan			12 Kali	27.693.120	3	6.918.000	3	6.918.000	0	0	0	0	6 Kali	13.836.000	50,00 %	49,96 %	6 Kali	13.836.000														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6			7		8		9		10		11			12		13		14=13/8x100%			15=7+13		16=15/6x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		7 01 06	PROGRAM PENATA TINGKATAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	234.553.710		100%	24.900.200	38,47	9.579.400	18,70	4.656.000	0	0	0	0	57,17%	14.235.400	57,17 %	57,17 %	57,17%	14.235.400	57,17%	6,07 %	KECAMATAN ARJASA			
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat lan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, Penata Tingkat lan dan pengawasanyang dilaksanakan	15 Kegiatan	234.553.710		3 Kegiatan	24.900.200	2	9.579.400	1	4.656.000	0	0	0	0	3 Kegiatan	14.235.400	100,00 %	57,17 %	3 Kegiatan	14.235.400	20,00%	6,07 %				
		7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam				4 Desa	3.430.560	4	3.408.000	0	0	0	0	0	0	4 Desa	3.408.000	100,00 %	99,34 %	4Desa	3.408.000						
		7 01 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan				4 kali/buah	3.112.760	0	0	4	3.056.000	0	0	0	0	4 kali/buah	3.056.000	100,00 %	98,18 %	4 kali/buah	3.056.000						
		7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD				4 desa	18.356.880	4	6.171.400	0	1.600.000	0	0	0	0	4 desa	7.771.400	100,00 %	42,34 %	4 desa	7.771.400						
Rata-rata capaian kinerja (%)																			46,39 %	40,90 %									
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :																													

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep disebabkan oleh penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Arjasa**  
**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Arjasa**

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	Kecamatan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						2.840.623.570	2.840.623.570	3.352.208.094	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						7.431.200	7.431.200	7.431.200	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.945.200	1.945.200	1.945.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	673.200	673.200	673.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	673.200	673.200	673.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	673.200	673.200	673.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	673.200	673.200	673.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	2.793.200	2.793.200	2.793.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						2.338.422.528	2.338.422.528	2.850.007.052	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 ASN	28 ASN	28 ASN	2.332.060.328	2.332.060.328	2.843.644.852	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	6.362.200	6.362.200	6.362.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Stel	28 Stel	28 Paket	24.393.000	24.393.000	24.393.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						181.212.400	181.212.400	181.212.400	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	192 Jenis	192 Jenis	192 Paket	8.043.400	8.043.400	8.043.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	152 Jenis	152 Jenis	152 Paket	9.530.800	9.530.800	9.530.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	786 Jenis	786 Jenis	786 Paket	21.965.200	21.965.200	21.965.200	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang diadakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22800 Lembar	22800 Lembar	22800 Paket	11.680.000	11.680.000	11.680.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Dokumen	1.278.000	1.278.000	1.278.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Kali	240 Kali	240 Laporan	128.715.000	128.715.000	128.715.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						26.241.900	26.241.900	26.241.900	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	26.241.900	26.241.900	26.241.900	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						142.430.000	142.430.000	142.430.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Rekening	2 Rekening	24 Laporan	26.960.000	26.960.000	26.960.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar Setiap Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	115.470.000	115.470.000	115.470.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						120.492.542	120.492.542	120.492.542	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	18 Unit	14.600.000	14.600.000	14.600.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	31 Unit	6.580.000	6.580.000	6.580.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	146 M2	146 M2	1 Unit	99.312.542	99.312.542	99.312.542	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						8.038.400	8.038.400	8.038.400	
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						4.267.200	4.267.200	4.267.200	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Kali	4 Kali	4 Laporan	4.267.200	4.267.200	4.267.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang</b>						3.771.200	3.771.200	3.771.200	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Dilimpahkan kepada Camat	Dilimpahkan kepada Camat									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	500 Dokumen	500 Dokumen	1 Laporan	3.771.200	3.771.200	3.771.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						25.291.200	25.291.200	25.291.200	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						5.291.200	5.291.200	5.291.200	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Desa	19 Desa	19 Lembaga Kemasyarakan	5.291.200	5.291.200	5.291.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penata Tingkat I lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Kali	12 Kali	20 Lembaga Kemasyarakan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						10.489.600	10.489.600	10.489.600	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>						10.489.600	10.489.600	10.489.600	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	12 Laporan	4.267.200	4.267.200	4.267.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kali	2 Kali	2 Laporan	6.222.400	6.222.400	6.222.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						83.041.800	83.041.800	83.041.800	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						83.041.800	83.041.800	83.041.800	
		Penata Tingkat Ian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penata Tingkat Ian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Penata Tingkat Ian Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang	46.307.400	46.307.400	46.307.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rakor forkopimcam yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kali	12 Kali	12 Dokumen	36.734.400	36.734.400	36.734.400	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PENATA TINGKAT IAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM PENATA TINGKAT IAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						39.553.600	39.553.600	39.553.600	
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat lan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tingkat lan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						39.553.600	39.553.600	39.553.600	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	8.511.200	8.511.200	8.511.200	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	19 Desa	19 Desa	19 Desa	3.711.200	3.711.200	3.711.200	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	19 Desa	19 Desa	19 Desa	27.331.200	27.331.200	27.331.200	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				Pemberdayaan Masyarakat Desa Permusyawaratan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
<b>TOTAL</b>									3.007.038.170	3.007.038.170	3.518.622.694	

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Juni 2024

  
**CAMAT ARJASA**  
**AYNIZAR SUKMA, S.STP., M.A.P.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 199111182012061002



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
( RKP )  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
MASALEMBU**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Masalembu, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Masalembu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, Juni 2024

  
**KAMAT MASALEMBU**  
*Achmad Auza'i Rahman*  
**ACHMAD AUZA'I RAHMAN**  
Pembina  
NIP. 197208301998031006

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
SURAT PENGANTAR .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Landasan Hukum .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	8
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	10
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	19
BAB IV PENUTUP .....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	28
1. Keputusan Camat Masalembu No. 188/14/KEP/435.324/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.....	29
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu.....	33
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu.....	34
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Masalembu telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **C. DASAR HUKUM**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Masalembu dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Masalembu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

## **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

## **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

## **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2023, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

## **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024**

Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumenep Kepada Camat di Kabupaten Sumenep. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, meliputi :

#### **1) Pelayanan Perizinan meliputi :**

- Rekomendasi Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera;
- Rekomendasi Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi.

#### **2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :**

- Pelayanan Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk);
- Surat Keterangan Pindah;
- Rekomendasi Bantuan;
- Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan);
- Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum;
- Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja;
- Pertimbangan Pengangkatan Kepala Desa;
- Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja;
- Pembinaan Pegawai Negeri Sipil lingkup wilayah kerja;
- Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan;
- Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman;
- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan tingkat capaian kinerja sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah'.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
    - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
  2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
    - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa.

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
  2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp		K	Rp	I		II		III			IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		7			UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	01		KECAMATAN																									
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7	01	01																								KECAMATAN MASALEMBU		
		7	01	01																										
		7	01	01	2.01																									
		7	01	01	2.01	02																								
		7	01	01	2.01	03																								
		7	01	01	2.01	04																								
		7	01	01	2.01	05																								
		7	01	01	2.01	07																								
		7	01	01	2.02																									
		7	01	01	2.02	01																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun				20 laporan	30.130.349	5	6.388.100	3	7.961.100	0	0	0	0	8 laporan	14.349.200	40,00 %	47,62 %	8 laporan	14.349.200			
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	15 Jenis	42.041.490		1 Jenis	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Jenis	0	0,00 %	0,00 %	0 Jenis	0	0,00 %	0,00 %	
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN				20 stel	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 stel	0	0,00 %	0,00 %	0 stel	0			
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	30 Jenis	497.325.067		24265 Jenis	150.910.390	6686	34.788.000	5432	36.616.000	0	0	0	0	12118 Jenis	71.404.000	49,94 %	47,32 %	12118 Jenis	71.404.000	40.393,33 %	14,36 %	
		7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi/listrik yang disediakan				192 jenis	7.826.944	48	1.941.000	48	1.941.000	0	0	0	0	96 jenis	3.882.000	50,00 %	49,60 %	96 jenis	3.882.000			
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				152 unit	26.059.208	38	6.405.000	38	6.405.000	0	0	0	0	76 unit	12.810.000	50,00 %	49,16 %	76 unit	12.810.000			
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan				786 jenis 4320 paket	50.401.038	192 1080	11.798.000	195 1080	12.456.000	0 0	0 0	0 0	0 0	387 jenis 2160 paket	24.254.000	49,24 % 50,00 %	48,12 %	387 jenis 2160 paket	24.254.000			
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan				22800 paket	10.368.000	6350	2.885.000	5050	2.005.000	0	0	0	0	11400 paket	4.890.000	50,00 %	47,16 %	11400 paket	4.890.000			
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan				12 jenis	1.843.200	3	459.000	3	459.000	0	0	0	0	6 jenis	918.000	50,00 %	49,80 %	6 jenis	918.000			
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				323 kali	54.412.000	55	11.300.000	98	13.350.000	0	0	0	0	153 kali	24.650.000	47,37 %	45,30 %	153 kali	24.650.000			
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	35 Unit	578.021.532		11 Unit	29.400.250	1	9.152.000	10	20.243.000	0	0	0	0	11 Unit	29.395.000	100,00 %	99,98 %	11 Unit	29.395.000	31,43 %	5,09 %	
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				11 unit	29.400.250	1	9.152.000	10	20.243.000	0	0	0	0	11 unit	29.395.000	100,00 %	99,98 %	11 unit	29.395.000			
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	25 Layanan	43.588.615		36 Layanan	13.478.400	9	3.340.010	9	3.335.098	0	0	0	0	18 Layanan	6.675.108	50,00 %	49,52 %	18 Layanan	6.675.108	72,00 %	15,31 %	
		7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet				36 rekening	13.478.400	9	3.340.010	9	3.335.098	0	0	0	0	18 rekening	6.675.108	50,00 %	49,52 %	18 rekening	6.675.108			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I		II		III		IV																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3		4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17				
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	75 Unit	466.752.459			50 Unit	73.030.094	9	43.787.000	8	9.295.500	0	0	0	0	17 Unit	53.082.500	34,00 %	72,69 %	17 Unit	53.082.500	22,67 %	11,37 %	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola					18 unit	40.900.000	4	17.400.000	5	8.137.500	0	0	0	0	9 unit	25.537.500	50,00 %	62,44 %	9 unit	25.537.500			
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					31 unit	7.134.000	4	1.392.000	3	1.158.000	0	0	0	0	7 unit	2.550.000	22,58 %	35,74 %	7 unit	2.550.000			
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit	24.996.094	1	24.995.000	0	0	0	0	0	0	1 unit	24.995.000	100,00 %	100,00 %	1 unit	24.995.000			
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7	01	02			<b>PROGRAM PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	24.026.948			100%	6.788.200	59,26	4.023.000	13,49	916.000	0	0	0	0	72,75%	4.939.000	72,75 %	72,76 %	72,75%	4.939.000	72,75%	20,56 %	KECAMATAN MASALEMBU
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Kali	19.221.558			4 Kali	3.671.040	1	916.000	1	916.000	0	0	0	0	2 Kali	1.832.000	50,00 %	49,90 %	2 Kali	1.832.000	10,00%	9,53 %	
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan					4 Kali	3.671.040	1	916.000	1	916.000	0	0	0	0	2 Kali	1.832.000	50,00 %	49,90 %	2 Kali	1.832.000			
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	300 Dokumen	4.805.390			60 Dokumen	3.117.160	60	3.107.000	0	0	0	0	0	0	60 Dokumen	3.107.000	100,00 %	99,67 %	60 Dokumen	3.107.000	20,00%	64,66 %	
		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan					500 dokumen	3.117.160	500	3.107.000	0	0	0	0	0	0	500 dokumen	3.107.000	100,00 %	99,67 %	500 dokumen	3.107.000			
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	237.809.638			100%	15.654.640	16,02	2.508.000	31,52	4.934.000	0	0	0	0	47,54%	7.442.000	47,54 %	47,54 %	47,54%	7.442.000	47,54%	3,13 %	KECAMATAN MASALEMBU
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	20 Kali	47.470.797			1 Kali	2.488.760	0	0	1	2.426.000	0	0	0	0	1 Kali	2.426.000	100,00 %	97,48 %	1 Kali	2.426.000	5,00%	5,11 %	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa					4 Desa	2.488.760	0	0	4	2.426.000	0	0	0	0	4 Desa	2.426.000	100,00 %	97,48 %	4 Desa	2.426.000			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									I		II		III		IV													
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17	
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	25 Lembaga	119.718.792			13 Lembaga	13.165.880	3	2.508.000	3	2.508.000	0	0	0	0	6 Lembaga	5.016.000	46,15 %	38,10 %	6 Lembaga	5.016.000	24,00 %	4,19 %		
		7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan				12 Kali	10.053.120	3	2.508.000	3	2.508.000	0	0	0	0	0	6 Kali	5.016.000	50,00 %	49,89 %	6 Kali	5.016.000				
		7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi				4 Kelompok/Lembaga	3.112.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0				
		7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>159.354.248</b>		<b>100%</b>	<b>23.276.400</b>	<b>9,23</b>	<b>2.148.000</b>	<b>30,22</b>	<b>7.034.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,45%</b>	<b>9.182.000</b>	<b>39,45 %</b>	<b>39,45 %</b>	<b>39,45%</b>	<b>9.182.000</b>	<b>39,45%</b>	<b>5,76 %</b>	<b>KECAMATAN MASALEMBU</b>	
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	75 Kali	159.354.248		13 Kali	23.276.400	3	2.148.000	4	7.034.000	0	0	0	0	0	7 Kali	9.182.000	53,85 %	39,45 %	7 Kali	9.182.000	9,33%	5,76 %		
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan				12 Kali	8.613.120	3	2.148.000	3	2.148.000	0	0	0	0	0	6 Kali	4.296.000	50,00 %	49,88 %	6 Kali	4.296.000				
		7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan				1 Kali	14.663.280	0	0	1	4.886.000	0	0	0	0	0	1 Kali	4.886.000	100,00 %	33,32 %	1 Kali	4.886.000				
		7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>126.740.053</b>		<b>100%</b>	<b>78.350.432</b>	<b>8,83</b>	<b>6.918.000</b>	<b>8,83</b>	<b>6.918.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,66%</b>	<b>13.836.000</b>	<b>17,66 %</b>	<b>17,66 %</b>	<b>17,66%</b>	<b>13.836.000</b>	<b>17,66%</b>	<b>10,92 %</b>	<b>KECAMATAN MASALEMBU</b>	
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	41 Kali	155.074.510		14 Kali	78.350.432	3	6.918.000	3	6.918.000	0	0	0	0	0	6 Kali	13.836.000	42,86 %	17,66 %	6 Kali	13.836.000	14,63%	8,92 %		
		7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan				2 Kegiatan	50.657.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0				
		7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan				12 Kali	27.693.120	3	6.918.000	3	6.918.000	0	0	0	0	0	6 Kali	13.836.000	50,00 %	49,96 %	6 Kali	13.836.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								8		9		10		11									12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	234.553.710		100%	24.900.200	38,47	9.579.400	18,70	4.656.000	0	0	0	0	57,17%	14.235.400	57,17%	57,17%	14.235.400	57,17%	6,07%	KECAMATAN MASALEMBU								
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	234.553.710		3Kegiatan	24.900.200	2	9.579.400	1	4.656.000	0	0	0	0	3Kegiatan	14.235.400	100,00%	57,17%	3Kegiatan	14.235.400	20,00%	6,07%								
		7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam				4Desa	3.430.560	4	3.408.000	0	0	0	0	0	0	4Desa	3.408.000	100,00%	99,34%	4Desa	3.408.000										
		7 01 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan				4kali/buah	3.112.760	0	0	4	3.056.000	0	0	0	0	4kali/buah	3.056.000	100,00%	98,18%	4kali/buah	3.056.000										
		7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD				4desa	18.356.880	4	6.171.400	0	1.600.000	0	0	0	0	4desa	7.771.400	100,00%	42,34%	4desa	7.771.400										
Rata-rata capaian kinerja (%)																			46,39%	40,90%													
Predikat kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :																																	

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep disebabkan oleh penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Masalembu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Masalembu

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	Kecamatan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						1.743.049.405	1.743.049.405	1.743.049.405	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						5.884.600	5.884.600	5.884.600	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.076.700	2.076.700	2.076.700	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	631.800	631.800	631.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	352.800	352.800	352.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	512.800	512.800	512.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	559.900	559.900	559.900	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1.982.800	1.982.800	1.982.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1.238.785.00</b>	<b>1.238.785.00</b>	<b>1.435.260.951</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN	10 ASN	10 ASN	1.233.034.805	1.233.034.805	1.429.510.751	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	5.750.200	5.750.200	5.750.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Stel	20 Stel	20 Paket	8.325.000	8.325.000	8.325.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>200.042.600</b>	<b>200.042.600</b>	<b>200.042.600</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	192 Jenis	192 Jenis	192 Paket	7.779.400	7.779.400	7.779.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	152 Jenis	152 Jenis	152 Paket	9.619.200	9.619.200	9.619.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	786 Jenis	786 Jenis	786 Paket	26.398.000	26.398.000	26.398.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang diadakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22800 Lembar	22800 Lembar	22800 Paket	7.080.000	7.080.000	7.080.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Dokumen	2.556.000	2.556.000	2.556.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Kali	240 Kali	240 Laporan	146.610.000	146.610.000	146.610.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>58.969.638</b>	<b>58.969.638</b>	<b>58.969.638</b>	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	58.969.638	58.969.638	58.969.638	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>92.568.000</b>	<b>92.568.000</b>	<b>92.568.000</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	3 Rekening	36 Laporan	13.368.000	13.368.000	13.368.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibayar Setiap Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	79.200.000	79.200.000	79.200.000	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>138.474.562</b>	<b>138.474.562</b>	<b>138.474.562</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	18 Unit	48.200.000	48.200.000	48.200.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	31 Unit	4.140.000	4.140.000	4.140.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	146 M2	146 M2	1 Unit	86.134.562	86.134.562	86.134.562	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>6.482.800</b>	<b>6.482.800</b>	<b>6.482.800</b>	
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>4.202.400</b>	<b>4.202.400</b>	<b>4.202.400</b>	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Kali	4 Kali	4 Laporan	4.202.400	4.202.400	4.202.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang</b>						<b>2.280.400</b>	<b>2.280.400</b>	<b>2.280.400</b>	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Dilimpahkan kepada Camat	Dilimpahkan kepada Camat									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	500 Dokumen	500 Dokumen	1 Laporan	2.280.400	2.280.400	2.280.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>22.680.400</b>	<b>22.680.400</b>	<b>22.680.400</b>	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						<b>2.680.400</b>	<b>2.680.400</b>	<b>2.680.400</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Desa	4 Desa	4 Lembaga Kemasyarakan	2.680.400	2.680.400	2.680.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Kali	12 Kali	12 Lembaga Kemasyarakan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>16.926.000</b>	<b>16.926.000</b>	<b>16.926.000</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>						<b>16.926.000</b>	<b>16.926.000</b>	<b>16.926.000</b>	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	12 Kali	12 Laporan	7.924.800	7.924.800	7.924.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Kali	3 Kali	3 Laporan	9.001.200	9.001.200	9.001.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>84.294.600</b>	<b>84.294.600</b>	<b>84.294.600</b>	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>84.294.600</b>	<b>84.294.600</b>	<b>84.294.600</b>	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang	47.689.800	47.689.800	47.689.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rakor forkopimcam yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kali	12 Kali	12 Dokumen	36.604.800	36.604.800	36.604.800	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						<b>8.541.600</b>	<b>8.541.600</b>	<b>18.541.600</b>	
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						<b>8.541.600</b>	<b>8.541.600</b>	<b>18.541.600</b>	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	3.080.400	3.080.400	3.080.400	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	900.400	900.400	900.400	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4.560.800	4.560.800	4.560.800	Penyesuaian Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				Pemberdayaan Masyarakat Desa Permusyawaratan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang diberikan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Desa	4 Desa	4 Dokumen	0	0	10.000.000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
<b>TOTAL</b>									<b>1.881.974.80</b>	<b>1.881.974.80</b>	<b>2.078.450.751</b>	

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Juni 2024

  
**CAMAT MSALEMBU**  
  
**ACHMAD AUZA'I RAHMAN**  
Pembina  
NIP. 197208301998031006

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN MASALEMBU**  
Jalan Raya Kafilah, Nomor 01, Telepon (0327) 611001  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69492

KEPUTUSAN CAMAT MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/14/KEP/435.324/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP

CAMAT MASALEMBU

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Masalembu Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
  2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.
- Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :
- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
  - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
  - c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
  - d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
  - e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  - f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
  - g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
  - i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
  - j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Masalembu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 04 Juni 2024



Lampiran : Keputusan Camat Masalembu  
Nomor : 188/14/KEP/435.324/2024  
Tanggal : 04 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Masalembu
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Masalembu
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Masalembu;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Masalembu;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Masalembu;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Masalembu</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Masalembu;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Masalembu;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Masalembu</li></ol>

Sumenep, 04 Juli 2024

  
**CAMAT MASALEMBU**  
*Achmad Auza'i Rahman*  
**ACHMAD AUZA'I RAHMAN**  
Pembina  
NIP. 197208301998031006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN MASALEMBU**  
 Jalan Raya Kafilah, Nomor 01, Telepon (0327) 611001  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69492

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/04/BA/435.324/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Masalembu Kabupaten Sumenep, Tanggal 04 Juli 2024, Nomor : 188/14/KEP/435.324/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 12 Juni 2024

TIM PENYUSUN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ACHMAD AUZA'I RAHMAN	Ketua	1.
2	AINUL YAKIN, S.T.	Sekretaris	2..
3	ZAINUL HASAN	Anggota	3..
4	MOH. IDRIS, S.Sos.	Anggota	4..
5	RASIDI, S.H.	Anggota	5..
6	HARIYADI, S.E.	Anggota	6..
7	TAUFIKUR RAHMAN, A.Md.	Anggota	7..
8	MOHAMMAD ASKAR, S.H., M.Si.	Anggota	8..


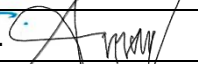


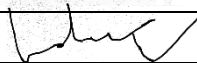

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 12 Juni 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP

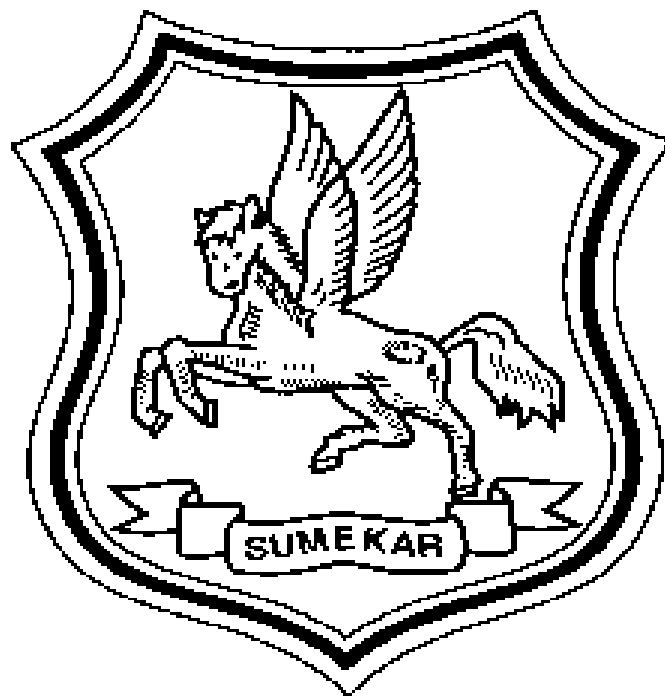
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ACHMAD AUZA'I RAHMAN	Ketua	1. 
2	AINUL YAKIN, S.T.	Sekretaris	2.. 
3	ZAINUL HASAN	Anggota	3.. 
4	MOH. IDRIS, S.Sos.	Anggota	4.. 
5	RASIDI, S.H.	Anggota	5.. 
6	HARIYADI, S.E.	Anggota	6.. 
7	TAUFIKUR RAHMAN, A.Md.	Anggota	7..
8	MOHAMMAD ASKAR, S.H., M.Si.	Anggota	8..

**PHOTO DOKUMENTASI**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP**  
**PADA HARI SELASA, TANGGAL 12 JULI 2024**





# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**



**TAHUN 2024**

**KECAMATAN RAAS**

## **Penyajian Dokumen Perubahan Renja**

Penyajian rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN  
II TAHUN BERKENAAN**

- Menggunakan Lampiran SIMPEL disertai penjelasannya

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menggunakan lampiran SIPD

**BAB IV. PENUTUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Raas merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Dokumen perubahan Renja Kecamatan Raas Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan ketiga Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Kecamatan Raas, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
  14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumenep Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 65)

15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Raas adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Raas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika**

Sistematika Perubahan Renja Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan  
Triwulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB IV Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Raas sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Raas mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Raas.

Sampai dengan triwulan III penyerapan anggaran dan kinerja Kecamatan Raas masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Raas sampai dengan triwulan III Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dibawah ini/terlampir.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Raas Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan III dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 dibawah ini/terlampir :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan III tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Raas Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep

Perubahan Renja Kecamatan Raas disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Raas ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Raas.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

**CAMAT RAAS**  
**KABUPATEN SUMENEP**



**WIBI AKTO, S.H., M.H.**  
Pejabat Tingkat I

NIP. 19712302007011009

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 2024

## PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAAS KAB. SUMENEP TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>KECAMATAN RAAS</b>																
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>						
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>						
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	1.621.814.905,00	1.696.352.573,00	1.943.169.281,00	200.172.873,00						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	3.100.100,00	2.910.000,00	2.910.000,00	-190.100,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	602.300,00	557.300,00	557.300,00	-45.000,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	539.300,00	497.300,00	497.300,00	-42.000,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	514.100,00	499.600,00	499.600,00	-14.500,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	512.900,00	494.900,00	494.900,00	-18.000,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	931.500,00	860.900,00	860.900,00	-70.600,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN ADMINISTRASI</b>							<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	1.248.119.705,00	1.247.860.805,00	1.480.673.013,00	232.553.308,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.241.511.905,00	0,00	0,00	-1.241.511.905,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>						
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN ADMINISTRASI</b>							<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>						
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>						
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.607.800,00	6.348.900,00	6.348.900,00	-258.900,00	Kab. Sumenep, Ra'as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			6.069.000,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi				6 Jenis	6 Jenis	149.325.300,00	224.325.300,00	238.390.400,00	89.065.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi		147.975.093,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				192 Paket	192 Paket	7.942.900,00	7.942.900,00	7.942.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			7.949.130,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				152 Paket	152 Paket	27.716.500,00	27.716.500,00	27.716.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			27.090.714,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				786 Paket	786 Paket	51.748.900,00	51.748.900,00	54.370.000,00	2.621.100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			51.522.009,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	8.406.000,00	8.406.000,00	8.406.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			8.421.000,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	-2.556.000,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			1.825.740,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	240 Laporan	50.955.000,00	125.955.000,00	139.955.000,00	89.000.000,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			51.166.500,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan				7 Unit	7 Unit	52.936.800,00	52.936.800,00	52.876.200,00	-60.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan		18.140.850,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	52.936.800,00	52.936.800,00	52.876.200,00	-60.600,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			18.140.850,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan				5 Layanan	5 Layanan	16.729.200,00	16.729.200,00	16.729.200,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Jumlah layanan jasa yang disediakan		16.737.840,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	16.729.200,00	16.729.200,00	16.729.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			16.737.840,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	136.078.800,00	136.065.468,00	136.065.468,00	-13.332,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		201.024.260,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	55.500.000,00	47.580.000,00	47.580.000,00	-7.920.000,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			41.028.750,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			8.715.000,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	71.878.800,00	79.785.468,00	79.785.468,00	7.906.668,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			151.280.510,00	KECAMATAN RAAS
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan				100 %	100 %	12.631.600,00	12.631.600,00	12.631.600,00	-3.943.145,00							8.688.455,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Kali	4 Kali	7.902.400,00	7.902.400,00	7.902.400,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Meningkatnya Mutu Layanan Publik		3.958.080,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	7.902.400,00	7.902.400,00	7.902.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			3.958.080,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.729.200,00	4.729.200,00	4.729.200,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		4.730.375,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	4.729.200,00	4.729.200,00	4.729.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			4.730.375,00	KECAMATAN RAAS
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan				100 %	100 %	28.182.800,00	28.182.800,00	28.178.300,00	1.002.000,00							29.184.800,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				9 Kali	9 Kali	2.855.600,00	2.855.600,00	2.855.600,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		2.875.100,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.855.600,00	2.855.600,00	2.855.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			2.875.100,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan				10 Lembaga	10 Lembaga	5.327.200,00	5.327.200,00	5.327.200,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan		5.328.000,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				9 Laporan	9 Laporan	5.327.200,00	5.327.200,00	5.327.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Ra"as, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif			5.328.000,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	19.995.500,00	-4.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang harmoni dan adaptif	"Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat"		20.981.700,00	KECAMATAN RAAS
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LO
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				9 Keluarga	9 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	19.995.500,00	-4.500,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
3.	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>107.361.200,00</b>	<b>32.801.200,00</b>	<b>18.801.200,00</b>	<b>-95.598.600,00</b>	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan</i>				5 Kali	5 Kali	107.361.200,00	32.801.200,00	18.801.200,00	-88.560.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	100.025.600,00	25.025.600,00	11.025.600,00	-89.000.000,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				1 Laporan	1 Laporan	7.335.600,00	7.775.600,00	7.775.600,00	440.000,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
4.	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90.945.700,00</b>	<b>90.945.700,00</b>	<b>90.945.700,00</b>	<b>98.513.500,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i>				8 Kali	8 Kali	90.945.700,00	90.945.700,00	90.945.700,00	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				100 Orang	100 Orang	54.038.500,00	54.038.500,00	54.038.500,00	0,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	36.907.200,00	36.907.200,00	36.907.200,00	0,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
5.	<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>30.575.700,00</b>	<b>30.575.700,00</b>	<b>40.575.700,00</b>	<b>11.056.100,00</b>	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.575.700,00	30.575.700,00	40.575.700,00	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.100,00	5.000.100,00	5.000.100,00	0,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga											
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.322.000,00	5.322.000,00	5.322.000,00	0,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa											
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.253.600,00	20.253.600,00	20.253.600,00	0,00	Kab. Su Ra"as, Kel/De

	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				-	9 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Su Ra <sup>as</sup> , Kel/De
	<b>J U M L A H</b>								<b>1.891.511.905,00</b>	<b>1.891.489.573,00</b>	<b>2.134.301.781,00</b>	<b>242.789.876,00</b>	





**RANCANGAN AKHIR  
RENJA PERUBAHAN**

**2024**

## **Penyajian Dokumen Perubahan Renja**

Penyajian rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat  
Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- Menggunakan Lampiran SIMPEL disertai penjelasannya

## **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menggunakan lampiran SIPD

## **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batuan merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dokumen perubahan Renja Kecamatan Batuan Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan ketiga Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Kecamatan Batuan, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 65)

15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Batuan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batuan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika**

Sistematika Perubahan Renja Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB IV Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batuan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Batuan mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batuan.

Sampai dengan triwulan III penyerapan anggaran dan kinerja Kecamatan Batuan masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024

dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batuan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dibawah ini/terlampir.

FORMULIR E-1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENTAN BUDIDAYA/ASATJK/KECAMATAN BATUAN
PERIODE PELAKSANAAN : SO TRIMULAN I TAHUN 2024

Main table with columns for No, Sasaran, Kode, Uraian/Isi Program, Indikator, Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Realisasi Capaian Kinerja, Target Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Anggaran, Target Capaian Kinerja, and Uraian Perangkat Daerah.

Detailed table with columns for No, Sasaran, Kode, Uraian/Isi Program, Indikator, Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Realisasi Capaian Kinerja, Target Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Anggaran, Target Capaian Kinerja, and Uraian Perangkat Daerah.

Dikusun
Sumenep, 02 Juli 2024
Pl. CABAY
KABUPATEN SUMENEP
WIDYASTRIO, S.P., M.Si
Pembina TA. 1700
NP. 19707041934121001

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
0% - Sangat Tinggi
10% - Tinggi
20% - Sedang
30% - Rendah
40% - Sangat Rendah

BETERANGAN RUMUS
RUMUS 13
RUMUS 14
RUMUS 15
RUMUS 16
RUMUS 17
RUMUS 18
RUMUS 19

Dievaluasi
Sumenep, ... 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Batuan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan III dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 dibawah ini/terlampir :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD											
Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Batuan																					
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N								Tahun + 1								
					Sebelum				Setelah												
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbagi	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbagi		Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
Kecamatan Batuan																					
2	01																				
2	01																				
2	01	01																			
2	01	01	2.01																		
2	01	01	2.01	0001																	
2	01	01	2.02																		
2	01	01	2.02	0001																	
2	01	01	2.03																		
2	01	01	2.03	0002																	
2	01	01	2.03																		
2	01	01	2.03	0001																	
2	01	01	2.03	0002																	
2	01	01	2.03	0004																	
2	01	01	2.03	0006																	
2	01	01	2.03	0009																	
2	01	01	2.07																		

Table with 16 columns: Kode, Uraian, Sumber Dana, Lokasi, Tahun - 1, and Tahun N (Sebelum, Sesudah). Rows include details for various programs like 'PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)' and 'PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN'.

Table with 16 columns: Kode, Uraian, Sumber Dana, Lokasi, Tahun - 1, and Tahun N (Sebelum, Sesudah). Rows include details for programs like 'Strategis dengan Kapitalisasi Negara Republik Indonesia' and 'Peningkatan Keterampilan Masyarakat'. Includes a final summary row and footer text like 'Kab. Sumenep, PI. Camat Batuan'.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan III tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Batuan Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep

Perubahan Renja Kecamatan Batuan disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Batuan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Batuan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

**Pt. CAMAT BATUAN**

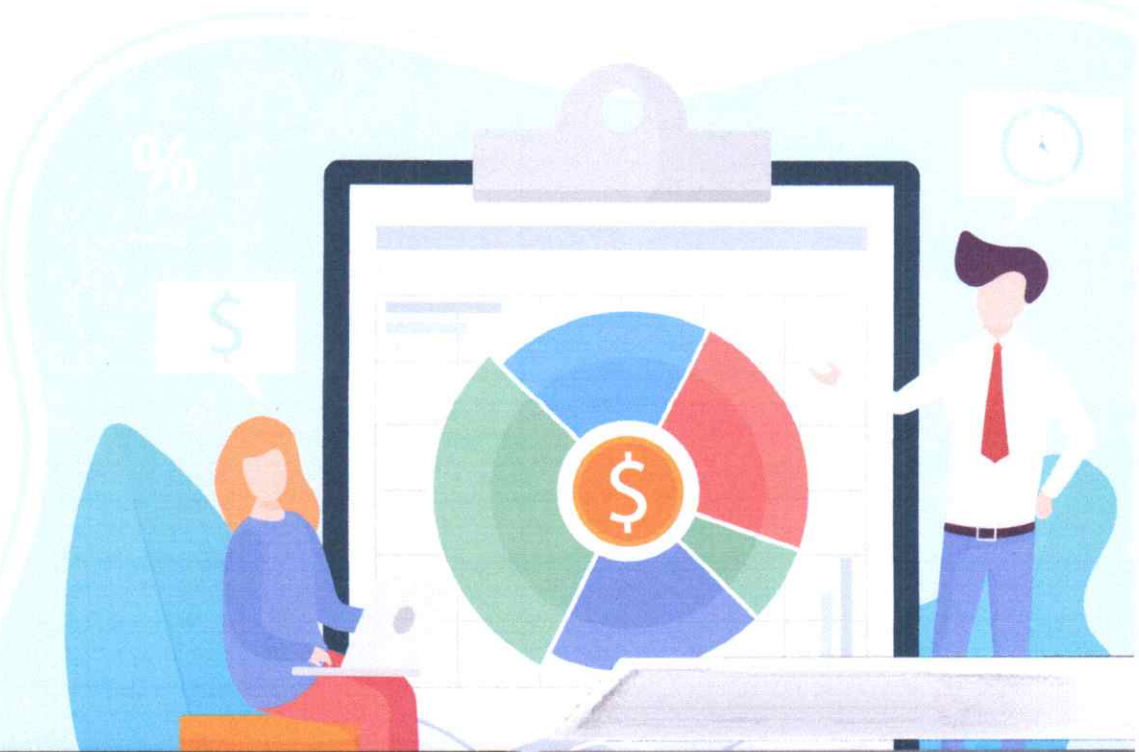


**JOKO Satrio, SIP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197607041994121001



# PERUBAHAN RENJA

## KECAMATAN BLUTO



TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan Kecamatan Bluto telah disusun. Rencana Kerja Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode akhir tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Kecamatan Bluto memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Harapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, akan menjadi arah dan pedoman aparatur pemerintah Kecamatan Bluto dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01).

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Kecamatan Bluto Tahun 2024, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bluto pada Tahun 2024

Sumenep, Juli 2024  
**CAMAT BLUTO**



**Ir. BAMBANG KARYANTO, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680624 199303 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024 ..	10
2.1. Faktor Pendorong .....	18
2.2. Faktor Penghambat .....	20
2.3. Tindak Lanjut .....	22
BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	25
BAB IV.PENUTUP .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi sebagai penerjemah perencanaan strategis lima tahunan yang dicantumkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam hal ini, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Kecamatan Bluto, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja merupakan acuan memasukkan perubahan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perubahan mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bluto Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bluto Tahun 2024 dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7);

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
32. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bluto adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Bluto untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bluto Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan / pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bluto Tahun 2024 Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

2.1. Faktor Pendorong

2.2. Faktor Penghambat

2.3. Tindak Lanjut

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA**

### **TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan penyusunan anggaran Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bluto sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditandai dengan indikator kinerja, yaitu nilai IKM. Adapun nilai IKM yang diperoleh pada triwulan I : 84 dan pada triwulan II : 88,02 dari target tahun 2024 yaitu : 86

2. Meningkatnya pelayanan terpadu kecamatan

Proses penyelesaian pelayanan administrasi dengan tepat waktu berlangsung setiap hari kerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Total layanan yang diselesaikan pada triwulan I sebanyak 130 dari 130 layanan yang masuk, dan pada triwulan II sebanyak 177 dari 177 layanan yang masuk dengan target pada masing-masing triwulan sejumlah 125 layanan.

3. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa

Fasilitasi dan Koordinasi desa di Kecamatan Bluto berlangsung sepanjang tahun dan sampai dengan triwulan II sudah berjalan sesuai dengan target.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 Kecamatan Bluto memperoleh nilai sebesar 77,90 dengan kategori BB (sangat baik), sedangkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 82,00 dengan kategori A (memuaskan) dari target yang tercantum pada Renstra, yaitu B (baik).

5. Meningkatnya capaian kinerja

Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang kebutuhan perangkat daerah yang disediakan sampai dengan triwulan II sebesar 44,79% dari target 98% dan dengan realisasi Rp 1.302.299.614 dari total pagu anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebesar Rp 2.907.269.086

Selain capaian kinerja sasaran strategis, capaian kinerja Kecamatan Bluto pada masing-masing program sampai pada akhir triwulan II terdapat pada tabel di bawah ini :

TUJUAN / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				REALISASI		KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	
Meningkatnya pelayanan prima	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi	25	25	25	25	25	25	Proses kegiatan pelayanan umum berlangsung setiap hari dengan total layanan yang diselesaikan pada triwulan I sebanyak 130 dari 130 layanan yang masuk, dan

TUJUAN / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				REALISASI		KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	
								pada triwulan II sebanyak 177 dari 177 layanan yang masuk.
Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	25	25	25	25	25	25	Koordinasi desa di Kecamatan Bluto berlangsung sepanjang tahun dan sampai dengan triwulan II sudah berjalan sesuai dengan target.
Meningkatnya fasilitasi desa	Persentase desa yang terfasilitasi	25	25	25	25	25	25	Fasilitasi desa di Kecamatan Bluto berlangsung sepanjang tahun dan sampai dengan triwulan II sudah berjalan sesuai dengan target.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Rasio layanan penanganan gangguan yang teratasi	25	25	25	25	25	25	Setiap layanan pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban yang masuk ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Total layanan penanganan gangguan yang teratasi sejumlah 5 kejadian pada 3 desa
Meningkatnya partisipasi desa	Rasio desa yang berpartisipasi	25	25	25	25	25	25	Penyelenggaraan peningkatan partisipasi desa berlangsung sepanjang tahun sesuai dengan target yang ditentukan.

Sedangkan untuk hasil kinerja secara menyeluruh, dapat disimpulkan pada tabel di bawah ini :

**FORMULIR E.81  
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA KECAMATAN BLUTO  
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Uraian Kegiatan Pencapaian	Indikator Kinerja Program Kuantitatif	Tingkat Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Revisi 2024 (Rp. dan %)				Realisasi Kinerja pada Triwulan Revisi 2024 (Rp. dan %)				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Revisi 2024 (Rp. dan %)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi 2024 (Rp. dan %)	Unit Perangkat Daerah
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%		
<b>KASUB</b>																		
<b>KEMAJATAN</b>																		
1	Mempluainya Kinerja Perangkat Daerah	7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100,00 %	2.841.118.000,00	100,00 %	21.813.000,00	38,00 %	979.812.100,00	51,87 %	1.297.886.246,00	51,07 %	1.256.882.298,00	92,13 %	15-7+13	17	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 01	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	24 Desumen	9.656.000,00	0 Desumen	0	0 Desumen	0	0	0 Desumen	0	0 Desumen	0	0	0	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 02	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	12 Desumen	4.978.300,00	0 Desumen	0	0 Desumen	0	0	0 Desumen	0	0 Desumen	0	0	0	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 03	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1 Desumen	4.978.300,00	0 Desumen	0	0 Desumen	0	0	0 Desumen	0	0 Desumen	0	0	0	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 04	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	20 Desumen	2.295.937,00	3 Desumen	299.800,30	9 Desumen	86.848.494,00	2	1.515.657.795,00	60,00 %	531.520.902,00	47 Desumen	48,66	48,66	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 05	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	30 Orang / Bulan	2.093.170.000,00	2 Orang / Bulan	285.249,30	21 Orang / Bulan	86.123.494,00	42	1.148.772.795,00	108,00 %	54,78				
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 06	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	12 Laporan	36.449.971,00	3 Laporan	1.560.000,00	3 Laporan	313.000,00	6	4.885.000,00	50,00 %	3,40				
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 07	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	22 Bulan	16.484.056,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0,00 %	0,00	36	Paket	36,59	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 08	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	30 Paket	16.484.056,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0,00 %	0,00	42	Bulan	82,93	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 09	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	12 Bulan	94.755.800,00	3 Bulan	6.258.000,00	3 Bulan	140.000,00	6	20.268.500,00	50,00 %	21,39	70	Bulan	82,93	
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 10	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1 Paket	2.259.400,00	0 Paket	0	0 Paket	806.500,00	1	806.500,00	100,00 %	36,54				
7 0 1	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	7 0 1 11	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1 Paket	2.259.400,00	0 Paket	3.250.000,00	1 Paket	2.400.000,00	1	5.990.000,00	100,00 %	25,55				



No	Sasaran	Kode	Unsurat Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (2024) yang dianggarkan		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah		
					K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1		3		5	1. Laporan	10.500.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %		
3	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Desa	7 01 03	PEKERJAAN Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Kewenangan Lain yang Diampun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diampun	100,00 %	42.363.500,00	16,87 %	7.148.000,00	3,78 %	1.600.000,00	0	20,65 %	20,65 %	20,65 %	71.473.600,00	45,38 %	28,18	Kecamatan Bluto	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELURAHAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan di Kecamatan	100,00 %	42.363.500,00	16,87 %	7.148.000,00	3,78 %	1.600.000,00	0	20,65 %	20,65 %	20,65 %	71.473.600,00	45,38 %	28,18	Kecamatan Bluto	
7 01 03 2.01		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00 %	11.971.500	10	Laporan	5.548.000	0	Laporan	0	46,34 %	46,34 %	33.610.500	64	Laporan	67,39	
7 01 03 2.01 01		2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00 %	11.971.500	10	Lembaraga Kemasyara katan	5.548.000	0	Lembaraga Kemasyara katan	10	50,00 %	50,00 %	5.548.000,00	50,00 %	46,34		
7 01 03 2.03		2.03	Pembentukan Kelompok Kerja Kecamatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diberdayakan Tingkat Kecamatan	100,00 %	10.500.000	0	Lembaraga Kemasyara katan	0	0	Lembaraga Kemasyara katan	0	0,00 %	0,00 %	0	0	Lembaraga Kemasyara katan	0,00	
7 01 03 2.03 04		2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100,00 %	10.500.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00 %	0,00 %	0	0	Lembaraga Kemasyara katan	0,00	
7 01 03 2.06		2.06	Kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100,00 %	19.862.000	0	Laporan	1.600.000	0	Laporan	0	16,09 %	16,09 %	37.863.300	26	Laporan	137,21	
7 01 03 2.06 03		2.06 03	Peningkatan Kualitas Pangan Keluarga	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Pangan Keluarga	100,00 %	19.862.000	10	keluarga	1.600.000	10	keluarga	20	16,09 %	16,09 %	37.863.300	26	Laporan	137,21	
4	Meningkatnya Capaian Dalam Memelihara Kelestarian dan Ketertiban Umum	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Peranangan Dalam Memelihara Kelestarian dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100,00 %	9.700.000	0 %	0	50 %	4.850.000	0	50,00 %	50,00 %	34.931.500	122	%	83,38	Kecamatan Bluto	
7 01 04 2.01		2.01	Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang Dibicarakan	100,00 %	9.700.000	0	Laporan	0	6	Laporan	0	50,00 %	50,00 %	34.931.500	35	Laporan	83,38	
7 01 04 2.01 02		2.01 02	Memorasi Keluaran dengan Touch Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang Dibicarakan	100,00 %	9.700.000	0	Laporan	0	1	Laporan	0	50,00 %	50,00 %	34.931.500	35	Laporan	83,38	
5	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	7 01 05	PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Diaksanakan di Tingkat Kecamatan	100,00 %	80.128.000,00	6,74 %	5.460.000,00	3,37 %	2.700.000,00	0	10,11 %	10,11 %	107.803.000,00	82,30 %	78,27	Kecamatan Bluto		

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemertanian	Indikator Kinerja Program (Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Program Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Program Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Program Daerah		Unit Pengikat Daerah		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	3 Laporan	80.78.000	1 Laporan	5.400.000	1 Laporan	2.700.000	1 Laporan	5.400.000	1 Laporan	8.100.000	1 Laporan	107.803.000	1 Laporan	78,27	Kawajanan Blok
					100 Orang	53.78.000	0 Orang	0	0 orang	0	0 Orang	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0 Orang	0	31,19 %	
6	1	01	Meningkatkan Fasilitas dan Kemampuan Masyarakat dalam Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Desa yang memiliki akses ke fasilitas perikanan	12 Desa	27.000.000	3 Desa	5.400.000	3 Desa	2.700.000	3 Desa	5.400.000	3 Desa	8.100.000	3 Desa	107.803.000	3 Desa	100,00 %	Kawajanan Blok
					100,00 %	62.081.560,00	17,31 %	10.648.800,00	1,84 %	1.168.200,00	10,96 %	19,37 %	19,37 %	19,37 %	19,37 %	19,37 %	39.561.050,00	31,99 %	
7	0	05	Fasilitas Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Fasilitas perikanan yang dimiliki masyarakat	20 Desa	62.401.500	4 Desa	10.960.000	4 Desa	1.168.200	4 Desa	10.960.000	4 Desa	1.176.200	5 Desa	39.561.050,00	20 Desa	100,00 %	Kawajanan Blok
					100,00 %	9.386.200	0 Desa	0	0 Desa	480.000	0 Desa	480.000	5,11 %	19,37 %	20,00 %	39.561.050,00	20,00 %	20,00 %	
7	0	05	Fasilitas Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Fasilitas perikanan yang dimiliki masyarakat	20 Desa	9.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0	200.000	0	0,00 %	Kawajanan Blok
					100,00 %	36.100.000	1 Desa	10.960.000	0	0	10.960.000	100,00 %	30,36 %	30,36 %	30,36 %	10.960.000	100,00 %	30,36 %	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran			Unit Perangkat Daerah				
					K	Rp	%	I	II	III	IV	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp		%			
1		3		5	1 Dokumen	8.115.700	0	Dokumen	0	0	Dokumen	485.600	0	Dokumen	485.600	0,00	5,98													17
<p align="center">Rata-rata capaian kinerja (%)</p> <p align="center">Predikat kinerja</p> <p align="center">Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p align="center">Faktor penghambat pencapaian kinerja :</p> <p align="center">Tindak lanjut yang diperlukan dalam erwujud berikutnya :</p> <p align="center">Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :</p>																														



Disusun  
 Sumenep, ..... Juni 2024  
 BAMBANG HARYANTO, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 1566624199303 1 008

Dievaluasi  
 Sumenep, ..... 2024  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMENEP  
 ARIF FIRMATO, S.TP., M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19780518 200501 1 010

SI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
% ≤ 10	Sangat Tinggi
% ≤ 90	Tinggi
% ≤ 70	Sedang
% ≤ 65	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

KETERANGAN RUMUS	RUMUS
KOLOM 13	PENJUMLAHAN
KOLOM 14	RUMUS
KOLOM 15	RUMUS
KOLOM 16	RUMUS
RATA RATA CAPAIAN	RUMUS
PREDIKAT KINERJA	RUMUS

## 2.1 FAKTOR PENDORONG

Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2024 di Kecamatan Bluto, beberapa faktor pendorong utama perlu diperhatikan. Faktor pertama adalah perencanaan yang berbasis data dan fakta. Dalam menyusun Renja, penting untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan mengenai kebutuhan, sumber daya, dan tantangan yang dihadapi. Analisis data yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi prioritas dan mengarahkan strategi yang tepat, sehingga pelaksanaan Renja dapat lebih terfokus dan efektif.

Faktor kedua yang mendorong suksesnya pelaksanaan Renja 2024 di Kecamatan Bluto adalah dukungan kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang memiliki visi jelas dan mampu menginspirasi tim untuk bekerja menuju tujuan bersama sangat penting. Kepemimpinan yang proaktif dan komunikatif akan membantu dalam memfasilitasi kolaborasi antar departemen, memecahkan masalah dengan cepat, dan memastikan semua pihak tetap berkomitmen pada rencana yang telah ditetapkan. Dengan kepemimpinan yang efektif, tim akan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Ketiga, alokasi sumber daya yang tepat dan efisien juga menjadi faktor penentu kesuksesan. Renja yang sukses membutuhkan alokasi anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selain itu, pemantauan penggunaan sumber daya secara berkala dapat membantu menghindari pemborosan dan memastikan efisiensi.

Keempat, kolaborasi antar unit kerja dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencapai target-target yang sudah

ditetapkan sebelumnya pada Renja Kecamatan Bluto 2024. Komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antara berbagai unit kerja akan meminimalkan tumpang tindih tugas dan mengoptimalkan sinergi. Partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan mitra eksternal, juga penting untuk memastikan bahwa rencana kerja tidak hanya relevan tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Kelima, inovasi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan rencana kerja adalah faktor penting lainnya. Lingkungan kerja yang dinamis dan sering berubah memerlukan pendekatan yang adaptif. Mendorong inovasi dan kreativitas di setiap tingkatan organisasi akan membantu dalam menemukan solusi baru terhadap tantangan yang ada. Fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dan metode pelaksanaan juga penting untuk memastikan bahwa implementasi Renja 2024 di Kecamatan Bluto dapat tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Faktor keenam adalah sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Monitoring yang tepat akan memungkinkan deteksi dini terhadap masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan Renja 2024 di Kecamatan Bluto. Evaluasi berkala tidak hanya membantu dalam menilai kemajuan yang telah dicapai tetapi juga memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di masa depan. Sistem evaluasi yang objektif dan transparan akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berbasis pada hasil dan fakta, bukan asumsi atau kepentingan pribadi.

Terakhir, budaya kerja yang mendukung dan berorientasi pada hasil juga merupakan faktor penting untuk suksesnya pelaksanaan Renja 2024 di Kecamatan Bluto. Budaya kerja yang baik mendorong semangat kerja sama, komitmen, dan dedikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Membangun budaya kerja yang positif, di mana

pegawai merasa dihargai dan didukung, akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dengan demikian, perangkat daerah dapat memastikan bahwa semua anggota tim termotivasi untuk berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan Renja 2024.

## 2.2 FAKTOR PENGHAMBAT

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2024 di Kecamatan Bluto, terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Sering kali, alokasi anggaran yang tidak memadai dan jumlah staf yang terbatas menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal atau bahkan terpaksa ditunda.

Selain itu, rendahnya capaian realisasi kinerja maupun anggaran hingga triwulan kedua di kecamatan Bluto pada tahun anggaran 2024 ini disebabkan karena penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang lebih terfokus pada triwulan ketiga dan keempat. Hal ini mengakibatkan realisasi yang tampak rendah pada paruh pertama tahun anggaran 2024, meskipun sebenarnya kegiatan telah direncanakan dengan baik. Sebagian besar program yang dirancang membutuhkan persiapan yang matang, seperti proses administrasi, perencanaan teknis, dan pengadaan barang dan jasa, yang memerlukan waktu lebih panjang sebelum bisa diimplementasikan.

Penjadwalan yang mengutamakan pelaksanaan di triwulan ketiga dan keempat juga bertujuan untuk menghindari penyerapan anggaran yang terlalu cepat di awal tahun. Dengan melakukan penyerapan anggaran yang lebih besar di paruh kedua tahun

anggaran 2024, Kecamatan Bluto berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang ada, menghindari kesalahan penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Meski demikian, strategi ini memang menyebabkan realisasi kinerja dan anggaran tampak rendah di awal tahun, meskipun telah sesuai dengan rencana yang disusun.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan menjadi penghambat lainnya. Di Kecamatan Bluto, partisipasi aktif dari masyarakat sering kali rendah karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat dari program-program tersebut. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, beberapa kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bluto 2024 tidak dapat dijalankan secara optimal.

Keterbatasan akses informasi dan teknologi juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan Renja 2024 di Kecamatan Bluto. Banyak desa di Kecamatan Bluto yang masih memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas, seperti akses internet yang kurang memadai. Hal ini dapat menghambat proses penyebaran informasi dan pelaporan kegiatan secara real-time. Selain itu, minimnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan ASN Kecamatan Bluto maupun masyarakat setempat juga menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan Bluto menjadi faktor rendahnya capaian realisasi pelaksanaan Renja 2024 di Kecamatan Bluto. Beberapa sarana dan prasarana yang ada juga membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan agar dapat digunakan secara optimal. Karenanya realisasi Renja 2024 hingga triwulan kedua tergolong rendah disebabkan karena beberapa anggaran menunggu jadwal perubahan anggaran untuk salah satunya

digunakan sebagai pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan Bluto pada Tahun Anggaran 2024.

### 2.3 TINDAK LANJUT

Untuk memastikan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2024 di Kecamatan Bluto berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan beberapa tindak lanjut strategis. Pertama, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja dan anggaran hingga triwulan kedua. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program serta mencari solusi yang efektif. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam pelaksanaan program di triwulan berikutnya, memastikan agar target yang belum tercapai dapat segera direalisasikan.

Peningkatan koordinasi antarunit kerja di tingkat kecamatan Kecamatan Bluto sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program. Dengan koordinasi yang lebih baik, setiap unit kerja dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat bekerja secara sinergis dan efisien. Koordinasi yang efektif juga akan meminimalkan tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana. Rapat koordinasi rutin dapat dijadwalkan untuk memonitor kemajuan dan mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tindak lanjut penting dalam pelaksanaan Renja 2024. Dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada pegawai, mereka akan lebih siap dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program pelatihan ini dapat mencakup manajemen proyek, pengelolaan anggaran, dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, pengembangan kapasitas juga harus mencakup peningkatan

pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terbaru, agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat, program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat meningkatkan rasa memiliki, sehingga masyarakat akan lebih mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam pengawasan pelaksanaan program, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kelima, peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendukung di Kecamatan Bluto perlu segera dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Upaya ini bisa mencakup perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan fasilitas kantor, dan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Keenam, perlu dilakukan pengawasan dan monitoring yang terhadap penggunaan anggaran. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa anggaran dapat digunakan setelah melalui perencanaan yang matang pada proses pegeseran anggaran di triwulan ketiga dan keempat pada tahun anggaran 2024.

Fleksibilitas dalam pelaksanaan Renja 2024 di Kecamatan Bluto dibutuhkan mengingat kondisi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga perlu ada kemampuan untuk menyesuaikan program dan anggaran sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Fleksibilitas ini akan memungkinkan Kecamatan Bluto untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang mungkin muncul, memastikan bahwa semua program tetap relevan dan dapat

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan menerapkan semua tindak lanjut ini, dibutuhkan perubahan perencanaan pada Renja Kecamatan Bluto 2024 dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa dampak positif bagi ASN maupun masyarakat di Kecamatan Bluto.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (sampai dengan triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sedangkan kegiatan adalah penjabaran dari program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran dimaksud untuk mencapai visi dan misi dari suatu organisasi.

Adapun perbandingan antara penganggaran awal dan perubahannya pada tahun 2024 tercantum pada tabel berikut :



NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJHET PENCAPAIAN KUALITAS TAHUN 2023	REALISASI PENCAPAIAN KUALITAS TAHUN 2023	PEMBAYARAN TARGET RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2023	CAPAIAN OPERASIONAL DAN KESEHATAN PENDANAAN				PRORITAS				KELOMPOK MASYARAKAT		PRORITAS KAJI RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT PEMANGGUNG JAWAB			
							SEBELUM		TARJHET 2024		RINCIAN PERUBAHAN 2024		BERUBAH/BERTURUNG (19-12)		LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		MELAKUKAKAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11	12	13	14	15								
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.06.0008		Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.07		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.08		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.08.0001		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.08.0002		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.08.0004		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.09		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.09.0001		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.09.0002		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		
7.01.01.2.09.0004		Pengadaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Endogang	Jumlah Cakupan dan Jumlah Pasien yang Diobati yang Diperkirakan	0 Pasien	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000	KECAMATAN BELITO		





Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat selisih penambahan anggaran yang semula berjumlah sebesar Rp 2.746.469.000 menjadi sebesar Rp 3.086.099.280 yang diajukan sebagai RKPD perubahan pada tahun anggaran 2024. Selisih penambahan tersebut sebesar Rp339.630.280 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		SELISIH	KET
	SEBELUM	SESUDAH		
KECAMATAN BLUTO	2.746.469.005	3.086.099.280	339.630.275	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.541.116.005	2.886.834.280	345.718.275	Bertambah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.129.919.978	2.445.549.266	315.629.288	Bertambah
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.093.470.007	2.423.100.281	329.630.274	Bertambah
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	36.449.971	22.448.985	- 14.000.986	Berkurang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.081.301	85.386.306	23.305.005	Bertambah
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	47.170.782	70.475.787	23.305.005	Bertambah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.309.362	156.848.298	1.538.936	Bertambah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.999.262	114.538.198	1.538.936	Bertambah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.608.909	77.853.955	5.245.046	Bertambah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan	32.219.000	28.726.750	- 3.492.250	Berkurang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		SELISIH	KET
	SEBELUM	SESUDAH		
Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6.700.000	9.140.000	2.440.000	Bertambah
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	33.689.909	39.987.205	6.297.296	Bertambah
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	42.363.500	42.275.500	- 88.000	Berkurang
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	19.892.000	19.804.000	- 88.000	Berkurang
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	19.892.000	19.804.000	- 88.000	Berkurang
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	62.601.500	56.601.500	- 6.000.000	Berkurang
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.601.500	56.601.500	- 6.000.000	Berkurang
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	36.100.000	20.100.000	- 16.000.000	Berkurang
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	10.000.000	10.000.000	Bertambah

Dari tabel di atas terdapat penambahan 1 sub kegiatan baru, yaitu : Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya. Sub kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Sasaran Strategis Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 : pengentasan kemiskinan ekstrim. Sedangkan untuk penambahan anggaran terbesar pada sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN adalah bentuk penyesuaian

terhadap bertambahnya jumlah ASN yang masuk ke Kecamatan Bluto. Untuk penambahan/pengurangan jumlah anggaran pada sub kegiatan lainnya merupakan bentuk pergeseran anggaran untuk menutupi kebutuhan maupun mengurangi kelebihan anggaran antar sub kegiatan.

## BAB IV

### PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya manusia. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcome yang dihasilkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bluto Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024.

Sumenep, Juli 2024



**Ir. BAMBANG KARYANTO, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680624 199303 1 008



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
( RKP )  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
PRAGAAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Pragaan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Pragaan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, 01 Juli 2024



INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 197507312005011010

## DAFTAR ISI

	Hal.
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	8
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP .....	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	27
1. Keputusan Camat Pragaan, Nomor 188/21/KEP/312/2024, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;	
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;	
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;	
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan

pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Pragaan telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);

## C. DASAR HUKUM

### 1. MAKSUD

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pragaan dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### 2. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pragaan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

### **BAB II   Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

### **BAB III   Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

### **BAB IV   Penutup**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2023

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat

##### ➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Target : 9 Dokumen      Realisasi : 6 Dokumen      Capaian : 66,67%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Target : 1 Jenis      Realisasi : 0 Jenis      Capaian : 0,00%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target : 27.261 Jenis      Realisasi : 13.644 Jenis      Capaian : 50,05%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target : 5 Unit      Realisasi : 0 Unit      Capaian : 0,00%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 6 Jenis      Realisasi : 6 Jenis      Capaian : 100,00%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 20 Unit      Realisasi : 18 Unit      Capaian : 90,00%

#### b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan

##### ➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Target : 3 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 66,67%

#### c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### ➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Target : 14 Laporan      Realisasi : 0 Laporan      Capaian : 0,00%

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target : 15 Laporan      Realisasi : 8 Laporan      Capaian : 53,33%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target : 14 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 42,86%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target : 3 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 66,67%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Target : 4 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 50,00%

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output/ Sub output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Peninggalan Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1		2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13	14	15	16	17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				11.443.185.567		4.691.308.329		2.707.352.305		278.672.871		847.608.087		1.226.280.958		5.917.589.287		19=15/6x100%						
		0.00.0.00.11	KECAMATAN PRAGAAN				11.443.185.567		4.691.308.329		2.707.352.305		278.672.871		847.608.087		1.226.280.958		5.917.589.287								
1	Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	10.595.914.349	%	38,14%	4.331.345.479	100,00%	2.512.396.705	8,56%	278.672.871	41,52%	870.943.387	50,8%	1.149.816.256	88,22%	5.480.961.737	88,22%	51,78%					Kecamatan Pragaan	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	30	18.909.388	Dokumen	14	10.565.500	9	4.699.700	5	2.471.400	1	595.700	6	3.087.100	20	13.632.600	66,67%	66,67%					Kecamatan Pragaan	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4	1.075.700	4	1.075.700	-	-	4	1.075.700	100,00%		100,00%							
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1	595.700	-	-	1	595.700	1	595.700	100,00%		100,00%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Rensira Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Rensira Perangkat Daerah Tahun (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	544.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	544.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	544.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.395.700	1	1.395.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	60	Laporan	8.512.011.803	3	228.934.471	3	687.634.807	6	914.569.278	6	1.395.700	1	1.395.700	1	1.395.700	1	1.395.700	1	1.395.700	1	1.395.700	1	1.395.700	1	1.395.700
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	Orang/bulan	2.029.352.395	17	225.882.471	17	685.890.307	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778	17	911.772.778

No	Sesaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perang Daerah Pragaung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=7+13	16=15/8x100%	17								
7.01.0		1.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	5.593.000	5	1.032.000	5	1.744.500	-	10	50,00%	-	2.796.500	50,00%	-	-	-	-	50,00%	-	-	-
7.01.0		1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	44	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	Kecamatan Pragaung
7.01.0		1.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawalan yang disediakan	15	87.483.280	1	9.006.651	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	Kecamatan Pragaung
7.01.0		1.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17	9.006.651	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	Kecamatan Pragaung
7.01.0		1.2.06	Administrasi Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	134.990	537.419.502	27.261	141.833.600	11.333	61.864.700	-	13.644	50,55%	-	74.101.700	50,55%	-	-	-	-	50,55%	-	-	Kecamatan Pragaung
7.01.0		1.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Didirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Didirikan	178	7.429.200	38	991.400	58	2.858.700	-	96	53,93%	-	9.850.100	53,93%	-	-	-	-	53,93%	-	-	Kecamatan Pragaung



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Penerimaan Urusan Daerah/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Laku (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perjanjian Tahunan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2024 Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10				11				12				13=(9+10+11+12)		14=(13/8x100%)		15=7+13		16=(15/6x100%)		17
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30	Jumlah layanan jasa yang disediakan	51.933.97	Jenis	13	111.081.670	6	200.136.000	6	8.250.000	-	73.053.180	-	-	-	-	-	-	6	Jenis	81.303.180	6	100.00%	40.62%	19	Jenis	192.384.850	63.33%	370.45%	Kecamatan Pragaan				
7.01.0 1.2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	27.624.000	Laporan	24	27.624.000	6	11.747.180	6	2.050.000	-	11.747.180	-	-	-	-	-	-	12	Laporan	13.797.180	12	50.00%	49.95%	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.0 1.2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	172.512.000	Laporan	96	172.512.000	24	61.309.000	24	6.200.000	-	61.309.000	-	-	-	-	-	-	48	Laporan	67.506.000	48	50.00%	36.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	676.810.945	Unit	64	286.675.000	20	80.252.680	13	28.800.000	5	47.775.000	-	-	-	-	-	-	18	Unit	76.575.000	18	90.00%	95.42%	82	Unit	342.250.000	36.44%	50.57%	Kecamatan Pragaan				
7.01.0 1.2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9.125.000	Unit	5	9.125.000	-	5.475.000	3	5.475.000	-	5.475.000	-	-	-	-	-	-	3	Unit	5.475.000	3	60.00%	60.00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.0 1.2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.800.000	Unit	12	7.800.000	12	7.800.000	-	7.800.000	-	7.800.000	-	-	-	-	-	-	12	Unit	7.800.000	12	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.01.0 1.2.09 0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	63.327.680	Unit	3	63.327.680	1	21.000.000	2	42.300.000	-	42.300.000	-	-	-	-	-	-	3	Unit	63.300.000	3	100.00%	99.96%	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Tingkat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2024		Unit Peringkat Daerah yang Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9-12				13=(9+10+11+12)		14=(13/3)x100%		15=7+13		16=(15/3)x100%		17	
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7.01.02.2.01	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN NON-PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diseleenggarakan di Kecamatan	%	41.732,879	15.707,000	40,00%	100,00%	6.580,000	18,75%	31,25%	5.188,000	-	-	-	-	50,00%	78,84%	90,00%	20.895,000	50,7%	90,0%	Kecamatan Pragaan
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	29.825,300	6.348,800	8	4	2.784,000	-	2	1.392,000	-	-	-	2	50,00%	50,00%	10	7.740,800	25,95%	50,0%	Kecamatan Pragaan
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	-	-	4	4	2.784,000	-	2	1.392,000	-	-	-	2	50,00%	50,00%	-	-	-	-	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Laporan	11.907,579	9.958,200	24	12	3.796,000	3	3	3.796,000	-	-	-	6	50,00%	100,00%	30	13.154,200	110,47%	50,0%	Kecamatan Pragaan
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpenzinaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonpenzinaan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	-	-	12	12	3.796,000	3	3	3.796,000	-	-	-	6	50,00%	100,00%	-	-	-	-	

No	Sastra n	Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trimulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Pengukuran	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=(13/8)x100%	15=7+13	16=15/8x100%	17								
3	Meningkatkan Fasilitas dan Kondisi Desa	7.01.03.2.01	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lomba dan Operansi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00	251.214.664	36,36	42.012,800	100,00	23.196,000	11,54	10.540,700	23,08	10.540,700	23,08	45,44	59,44	52.533,500	59,44	52.533,500	59,44	20,92	Kecamatan Pragaan	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Pembudayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pembudayaan di desa yang dilaksanakan	70	64.478,111	28	6.928,200	14	3.196,000	-	-	-	-	-	0,00	28	6.928,200	28	6.928,200	40,00	10,75	Kecamatan Pragaan	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lomba Kemasayarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					14	3.196,000	-	-	-	-	0,00									
		7.01.03.2.03	Pembudayaan Lembaga Kemasayarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasayarakatan yang diberdayakan	16	30.879,613	16	15.155,000	-	-	-	-	-	-	0,00	16		15.155,000	16	15.155,000	100,00	48,08	Kecamatan Pragaan	
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Kegiatan Pembatalan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang dilaksanakan	20	53.026,994	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			-		-	0,00	0,00	Kecamatan Pragaan	
		7.01.03.2.06	Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pembudayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	48	102.829,946	12	19.929,600	12	20.000,000	3	10.540,700	6	10.540,700	50,00	52,70		30.470,300	18	30.470,300	37,50	28,63	Kecamatan Pragaan	

No	Secara	Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Pengukuran Daerah Penganggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/8x100%	15=7+13	16=15/6x100%	17												
		7.01.0 3.2.06. 0002	Penyediaan Kebutuhan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penilaian Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			15	20.000,00	15	10.540,700	-	-	100,00%	15	10.540,700													
		7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Pemangangan dalam Menelihara Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang terlaksana			18,46%	19.712,00	26,67%	15.368,000	-	-	53,33%	26,67%	15.368,000													
		7.01.0 4.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketertarikan dan keterlibatan umum yang dilaksanakan			12	19.712,00	4	15.368,000	-	-	53,33%	4	15.368,000													
		7.01.0 4.2.01. 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Indonesia, Kepolisian Nasional Indonesia dan instansi terkait di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Nasional Indonesia dan instansi terkait di Wilayah Kecamatan			12	8.352,000	3	4.176,000	-	-	50,00%	3	4.176,000													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemertintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Laju (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perang Daerah Penang gung Jawa		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=(13/8x100%	15=7+13	16=(15/6x100%	17									
7.01.0	4.01.002		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat			3	1	11.192.000	-	-	2	66,67%												
7.01.0	5		PROGRAM PENYELENGSA RAAJN JURUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00%	204.817.800	102.311.600	21,43	25.476.000	-	-	42,86%	24,90%	82,86%	230.293.800	170,41%									Kecamatan Pragaan
7.01.0	5.2.01		Penyelenggaraan Pemertintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	70	135.144.472	102.311.600	3	25.476.000	-	-	6	42,86%	24,90%	230.293.800	170,41%									Kecamatan Pragaan
7.01.0	5.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mernantapkan Pengamalan Pancasila, Paksamaan dalam rangka Mengantapkan Dasarng Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertintahan dan Pemertintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mernantapkan Pengamalan Pancasila, Paksamaan dalam rangka Mengantapkan Dasarng Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertintahan dan Pemertintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia			100					Orang	0,00%	0,00%											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penganggaran Daerah yang bertanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
7.01.0	5.2.01.0009		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugask Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12	3	25.476.000	-	-	Dokumen	6	25.476.000	50,00%	50,00%								
7.01.0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	319.538.053	100,00%																	
7.01.0	6.2.01		Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintahan Desa	17	319.538.053	3	2	20.092.000	-	-	Laporan	2	20.092.000	66,67%	66,67%								
7.01.0	6.2.01.0005		Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			14					Dokumen			0,00%	0,00%								
7.01.0	6.2.01.0009		Fasilitas Sinkronisasi Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa			14	14	4.096.000	-	-	Dokumen	14	4.096.000	100,00%	100,00%								
7.01.0	6.2.01.0016		Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			14	14	15.996.000	-	-	Dokumen	14	15.996.000	100,00%	100,00%								

No	Saasan	Kode	Urutan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkit Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkit Daerah sampai dengan Renja Perangkit Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkit Daerah yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkit Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkit Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkit Daerah Penanggunng Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=13/6x100%	15=7+13	16=15/6x100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rata-rata capaian kinerja (%)												17
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia ASN dan Warga Masyarakat yang memadai dan serta memperhatikan Rencana Aksi serta Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas dan Fungsi ASN</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya Sarana dan Prasarana yang terbatas</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya : Memberikan bimbingan, pembinaan, motivasi dan evaluasi agar tercapainya atas target yang telah ditetapkan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Mengevaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan dan memperhatikan Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta menyediakan Sarana dan Prasarana yang cukup memadai sesuai kebutuhan</p>																								

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep disebabkan oleh pengurangan Pegawai Negeri Sipil yang semula berjumlah 21 (dua puluh satu) Orang menjadi 17 (tujuh belas) Orang yang dikarenakan adanya mutasi dan promosi, meninggal dunia serta batas waktu pensiun. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PRAAGAN KAB. SUMENEP  
TAHUN 2024

NO	KODE	URAIAN/ BIDANG URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	TARGET JANGKA PENJAJARAN RENTAN	PRAKARAWA				PROMOTAS NABAR	DESAH	KELOMPOK SABARAN	TARGET	PAOK INDIKATIF (Rp)	PERMAYAN PANGGUNG JAMIB
					CAPAIAN PRIORITAS DAN KEMAJUAN POKOK									
					TARGET 2024 SEBELUM	REVISI 2024	REVISI 2024	REVISI 2024						
1	2	KECAMATAN PRAAGAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7.01.2.01.0001	Program Dukungan Peningkatan Kualitas Aksesibilitas dan Keberlanjutan Layanan Publik	Program Dukungan Peningkatan Kualitas Aksesibilitas dan Keberlanjutan Layanan Publik	100%	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	KECAMATAN PRAAGAN
7.01.2.01.0002	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	595.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0003	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0004	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0005	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0006	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	1.715.853,32,00	1.715.853,32,00	1.715.853,32,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	1.715.853,32,00	1.715.853,32,00	1.715.853,32,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0007	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	1.710.960,19,00	1.710.960,19,00	1.710.960,19,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	1.710.960,19,00	1.710.960,19,00	1.710.960,19,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0008	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	KECAMATAN PRAAGAN	
7.01.2.01.0009	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Monev dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	9.008.651,00	9.008.651,00	9.008.651,00	0,00	DANA TRANSFER DULUKAWA ALOKASI LAIN	0,00	9.008.651,00	9.008.651,00	9.008.651,00	KECAMATAN PRAAGAN	





NO	KODE	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KEMBARA DAN KERANGKA PERENCANAAN										PRAMUKA / BINA BANGSA / YOUTH LEADERS	KELompok Binaan	DAERAH / DAERAH JAWA		
				TARGET 2023		PAJU INDIKATOR (Rp)		SISWA/PELAKSANA (16-17)		LOKASI		SOURCES DATA					PRIORITAS	
				SEBELUM	BESUDAH	RIFO 2023	APRD 2024	RIFO 2024	APRD 2024	RIFO 2024	APRD 2024	DAENAN	DAENAN				TARGET	PADU INDIKATOR (Rp)
1	7.01.04.2.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Transparansi Pemerintahan	5	100%	25.140.000,00	25.140.000,00	1	1	14	15	16	17	19	20	24.660.000,00	KECAMATAN PRAGAN		
2	7.01.04.2.01.0001	Strategis urbanisasi kawasan di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	8.352.000,00	8.352.000,00	17 Laporan	12 Laporan	16.780.000,00	15.780.000,00	16.780.000,00	15.780.000,00	0,00	14	15.662.000,00	KECAMATAN PRAGAN		
3	7.01.05.2.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Transparansi Pemerintahan	5	100%	102.211.600,00	102.211.600,00	100%	100%	102.211.600,00	102.211.600,00	102.211.600,00	102.211.600,00	47.434.800,00	19	80.776.800,00	KECAMATAN PRAGAN		
4	7.01.05.2.01.0001	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	102.211.600,00	102.211.600,00	100%	100%	102.211.600,00	102.211.600,00	102.211.600,00	102.211.600,00	0,00	19	80.776.800,00	KECAMATAN PRAGAN		
5	7.01.06	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	51.359.000,00	51.359.000,00	100% 100%	100%	51.359.000,00	51.359.000,00	51.359.000,00	51.359.000,00	0,00	19	43.241.000,00	KECAMATAN PRAGAN		
6	7.01.06.2.01	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	47.726.800,00	47.726.800,00	100%	100%	47.726.800,00	47.726.800,00	47.726.800,00	47.726.800,00	5.234.500,00	19	32.471.300,00	KECAMATAN PRAGAN		
7	7.01.06.2.01.0001	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	47.726.800,00	47.726.800,00	100%	100%	47.726.800,00	47.726.800,00	47.726.800,00	47.726.800,00	5.234.500,00	19	32.471.300,00	KECAMATAN PRAGAN		
8	7.01.06.2.01.0002	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	19	0,00	KECAMATAN PRAGAN		
9	7.01.06.2.01.0009	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	100%	100%	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	19	4.200.000,00	KECAMATAN PRAGAN		
10	7.01.06.2.01.0016	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	25.596.000,00	25.596.000,00	100%	100%	25.596.000,00	25.596.000,00	25.596.000,00	25.596.000,00	0,00	19	11.47.500,00	KECAMATAN PRAGAN		
11	7.01.06.2.01.0017	Perbaikan Monev dan Pelaksanaan Program Kerja di Kecamatan Praga, Kecamatan Jember dan Kecamatan Widayana	3	100%	0,00	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0,00	KECAMATAN PRAGAN		
					3.348.340.712,00	3.348.340.712,00			3.348.340.712,00	3.348.340.712,00	3.348.340.712,00	3.348.340.712,00		19	3.348.340.712,00	KECAMATAN PRAGAN		

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 09 Juli 2024



**INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.**

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 197507312005011010

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**KECAMATAN PRAGAAN**

Jalan Raya Sumenep Pamekasan, Nomor : 88, Telpon : 0328-821202

SUMENEP

Kode Pos : 69465

KEPUTUSAN CAMAT PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/21/KEP/312/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

CAMAT PRAGAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pragaan Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Pragaan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 Juli 2024



INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 197507312005011010

Lampiran : Keputusan Camat Pragaan  
Nomor : 188/21/KEP/312/2024  
Tanggal : 02 Juli 2024

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Pragaan
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pragaan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pragaan;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Pragaan;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pragaan;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Pragaan</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pragaan;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pragaan;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pragaan</li></ol>

Sumenep, 02 Juli 2024



INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 197507312005011010



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN PRAGAAN**

Jalan Raya Sumenep Pamekasan, Nomor : 88, Telpon (0328) 821202

SUMENEP

Kode Pos : 69465

BERITA ACARA

Nomor : 050/21/BA/312/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Pragaan Kabupaten Sumenep, Tanggal 02 Juli 2024, Nomor : 188/21/KEP/312/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 09 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.	Ketua	
2	ACHMAD FIKRI, S.Sos., M.M.	Sekretaris	
3	MUSAHWI, S.A.N.	Anggota	
4	MASDUKI	Anggota	
5	MASRAWI	Anggota	
6	ISMAIL MARZUKI, S.Sos., M.M.	Anggota	
7	SUGIANTO, S.H.	Anggota	
8	ARDIANTO, S.T.	Anggota	
9	INNIWATI	Anggota	





**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

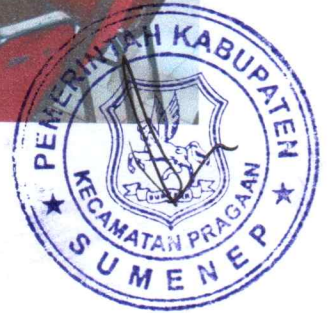
Sumenep, 09 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
 KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.	
2	ACHMAD FIKRI, S.Sos., M.M.	
3	MUSAHWI, S.A.N.	
4	MASDUKI	
5	MASRAWI	
6	ISMAIL MARZUKI, S.Sos., M.M.	
7	SUGIANTO, S.H.	
8	ARDIANTO, S.T.	
9	INNIWATI	



**PHOTO DOKUMENTASI**  
PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI SELASA, TANGGAL 09 JULI 2024



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA PERUBAHAN SKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA**

**2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA P-SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA P-SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA P-SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD .

Dengan demikian RENJA P-SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA P-SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan

### **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 3)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 4)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 5)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 33 Tanggal 14 Juni 2022)
26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 52 Tanggal 06 Juli 2022)
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomer 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebudayaan Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD adalah untuk :

- a) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- c) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- d) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
- e) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;
- f) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA P-OPD) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, Tindak Lanjut

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan

**BAB V : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**  
**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Sumenep**

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I s/d II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7		8		9		10				11		12			13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA																													
1	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	2	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	10%	20.065.067.157	10%	6.158.864.200	0,57%	10.225.300	0,57%	71.832.500	0%	-	0%	-	1%	82.057.800	11,43%	1,33%	1%	82.057.800	11%	0,41%	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA			
		2	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor/wirausaha muda pemuda/pemuda kader yang dibina	3500	15.000.000.000	700	4.653.864.200	4	1200.300	4	26.545.000	-	-	8	27.745.300	1,14%	0,60%	8	27.745.300	0,23%	0,18%					
		2	02	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		25	54.999.500	4	1200.300	4	25.745.000			8	26.945.300	32,00%	48,99%	8	26.945.300	#DIV/0!	#DIV/0!					
		2	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		100 Orang	999.999.900	0	-	0	800.000			0	800.000		0,08%	0	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
		2	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		80 Orang	3.598.864.800	0	-	0	-			0	-		0,00%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
		2	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan/dibina	09	5.065.067.157	21 Organisasi	1.505.000.000	1	9.025.000	1	45.287.500	-	-	2	54.312.500		3,61%	2	54.312.500	2%	1,07%				

19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1dokumen	1505.000.000	1	9.025.000	1	45.287.500					2	54.312.500		3,6%	2	54.312.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga</b>	<b>40%</b>	<b>22.271.534.938</b>	<b>25 %</b>		<b>5.635.967.535</b>	<b>3</b>	<b>2.459.758.350</b>		<b>811.521.500</b>					<b>3</b>	<b>3.146.436.350</b>		<b>55,83%</b>	<b>3</b>	<b>3.146.436.350</b>	<b>750%</b>	<b>14,13%</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>
19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Merajada Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/ Kota yang representatif			<b>4 lokasi</b>		1525.469.962	<b>1</b>	124.843.500	2	271012.200					<b>3</b>	395.855.700		25,95%	<b>3</b>	<b>395.855.700</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/ Kota yang representatif			<b>4 unit</b>		1525.469.962	<b>1</b>	124.843.500	<b>4</b>	271012.200					<b>5</b>	395.855.700		25,95%	<b>5</b>	<b>395.855.700</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan cabang olahraga prestasi yang diselenggarakan	<b>5</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>2 kali</b>		435.440.200	<b>1</b>	33.230.000	<b>2</b>	46.957.000					<b>3</b>	80.187.000		18,42%	<b>3</b>	<b>80.187.000</b>	<b>60%</b>	<b>3%</b>	
19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			<b>2 dokumen</b>		435.440.200	<b>1</b>	33.230.000	<b>2</b>	46.957.000					<b>3</b>	80.187.000		18,42%	<b>3</b>	<b>80.187.000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kejuaraan cabang olahraga tingkat provinsi yang diikuti	<b>50</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>10 kejuaraan</b>		545.468.873	<b>0</b>	41996.850	<b>2</b>	39.197.500					<b>2</b>	81.194.350		14,89%	<b>2</b>	<b>81.194.350</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	
19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			<b>10 orang</b>		545.468.873	<b>0</b>	41996.850		39.197.500					<b>0</b>	81.194.350		14,89%	<b>0</b>	<b>81.194.350</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<b>50</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10 kali</b>		2.453.088.800	<b>0</b>	2.229.800.000	<b>10</b>	201279.500					<b>10</b>	2.431.079.500		99,10%	<b>10</b>	<b>2.431.079.500</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>	
19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			<b>3 organisasi</b>		2.453.088.800	<b>3</b>	2.229.800.000	<b>3</b>	201279.500					<b>6</b>	2.431.079.500		99,10%	<b>6</b>	<b>2.431.079.500</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<b>23</b>	<b>2.071.534.938</b>	<b>5 kali</b>		676.499.700	<b>1</b>	29.888.000	<b>5</b>	524.087.500					<b>6</b>	553.975.500		8189%	<b>6</b>	<b>553.975.500</b>	<b>26%</b>	<b>27%</b>	
19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			<b>2 dokumen</b>		119.999.700	<b>1</b>	21958.000	<b>1</b>	15.425.000					<b>2</b>	37.383.000		315%	<b>2</b>	<b>37.383.000</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Merajada Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/ Kota yang representatif			<b>5 lokasi</b>		556.500.000	<b>1</b>	7.930.000	<b>4</b>	508.662.500	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5</b>	516.592.500		92,83%	<b>5</b>	<b>516.592.500</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	

19	04		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Perentase Lembaga Kepramukaan Yang Terakreditasi	3,7%	1.017.383.688	5 %	556.500.000	0	7.930.000	5%	508.662.500	-	-	5%	516.592.500	92,83%	0	516.592.500	135%	51%	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	135	1.017.383.688	27	556.500.000	0	7.930.000	27	508.662.500	-	-	27	516.592.500	92,83%	27	516.592.500	20%	51%	
19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1	556.500.000	0	7.930.000	1	508.662.500	-	-	1	516.592.500	92,83%	1	516.592.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
22	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	80%	32.885.469.223	80 %	6.640.845.113		1.172.950.981		2.180.802.924	-	-	0	3.353.753.905	50,50%	0	3.353.753.905	0%	10%	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	20	450.000.000	7 Dokumen	21624.900	0	320.000		13.238.700	-	-	0	13.558.700	62,70%	0	13.558.700	0%	3%	
22	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun		1dokumen	15.625.200	0	320.000		13.238.700	-	-	0	13.558.700	86,77%	0	13.558.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 laporan	5.999.700	0	-		-	-	-	0	-	0,00%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	20	24.000.000.000	8 Laporan	4.867.014.341		740.287.521		1.767.015.191	-	-	0	2.507.302.712	5152%	0	2.507.302.712	0%	10%	
22	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 orang	4.843.728.141	41	739.172.521	41	1.764.470.191	-	-	82	2.503.642.712	5169%	82	2.503.642.712	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1dokumen	5.005.000	0	160.000	0	160.000	-	-	0	160.000	3,20%	0	160.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1dokumen	4.590.000	0	505.000	0	1.760.000	-	-	0	2.265.000	49,35%	0	2.265.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen		1dokumen	5.873.000	0	450.000	1	160.000	-	-	1	610.000	10,39%	1	610.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran		1dokumen	7.818.200	0	-	0	625.000	-	-	0	625.000	7,99%	0	625.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	5	450.000.000	1Jenis	9.900.000	-	-	-	240.000	-	-	0	240.000	2,42%	0	240.000	0%	0%	
22	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		43 orang	9.900.000	-	-	1	240.000	-	-	1	240.000	2,42%	1	240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	25	1.300.000.000	9 Jenis	307.879.000	0	78.570.209	0	67.984.415	-	-	0	146.554.624	47,60%	0	146.554.624	0%	11%	
22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		1paket	4.988.500	0	-	0	1.131.000	-	-	0	1.131.000	22,67%	0	1.131.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1paket	9.665.600	0	1427.500	0	2.861.500	-	-	0	4.289.000	44,37%	0	4.289.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1paket	50.746.500	0	8.076.000	0	10.970.000	-	-	0	19.046.000	37,53%	0	19.046.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1paket	10.001400	0	2.07.000	0	4.133.000			0	6.500.000	32,37%	0	6.150.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1dokumen	5.336.000	0	1840.000	0	4.310.000			0	6.500.000	40,10%	0	6.150.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan terseleksi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1laporan	208.111000	0	65.209.709	0	44.578.915			0	109.788.624	52,75%	0	109.788.624	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	25	500.000.000			2 Unit	67.394.316	-	-	-	21200.000			0	21200.000	31,46%	0	21.200.000	0%	4%	
22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 unit	67.394.316	-	-	2	21200.000			2	21200.000	31,46%	2	21.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	5	5.500.000.000			4 Jenis	1203.665.796		225.283.951		297.424.618			0	522.708.569	43,43%	0	522.708.569	0%	10%	
22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1Laporan	143.141700	-	23.856.950	0	35.785.425			0	59.642.375	41,67%	0	59.642.375	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1Laporan	388.859.896	-	89.482.851	0	93.722.968			0	183.205.819	47,10%	0	183.205.819	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1Laporan	418.414.200	-	69.735.700	0	104.603.550			0	174.339.250	41,67%	0	174.339.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1Laporan	253.250.700	-	42.208.450	0	63.312.675			0	105.521.125	41,67%	0	105.521.125	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	25	685.469.223			4 Unit	163.366.760		128.489.300		13.700.000			0	142.189.300	87,04%	0	142.189.300	0%	21%	
22	01	2.09	01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya					4 unit	50.859.000	1	29.712.800	1	13.700.000			2	43.412.800	85,36%	2	43.412.800	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 unit	10.214.160	1	97.576.500	0			1	97.576.500	88,53%	1	97.576.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 unit	2.293.600	2	1.200.000	0			2	1.200.000	52,32%	2	1.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan</b>	<b>60%</b>	<b>8.722.133.190</b>			<b>45%</b>	<b>995.000.000</b>	<b>2,80%</b>	<b>27.570.000</b>	<b>17,5%</b>	<b>174.325.000</b>			<b>0</b>	<b>201.895.000</b>	<b>20,29%</b>	<b>0</b>	<b>201.895.000</b>	<b>34%</b>	<b>2%</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN KEPERUSAHAAN DAN PARIWISATA</b>
22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15	3.722.153.190			3 obyek	995.000.000	3	27.570.000	2	174.325.000			5	201.895.000	20,29%	5	201.895.000	33%	5%	
22	2	2.02	01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					5 obyek	995.000.000	4	27.570.000	6	174.325.000			10	201.895.000	20,29%	10	201.895.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Tradisi dan Nilai Budaya</b>	<b>60%</b>			<b>45%</b>	<b>865.700.000</b>	<b>8,90%</b>	<b>73.748.750</b>	<b>10%</b>	<b>87.460.000</b>			<b>0</b>	<b>161.208.750</b>	<b>18,62%</b>	<b>0</b>	<b>161.208.750</b>	<b>32%</b>	<b>#DIV/0!</b>		
22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival dan Penampilan Seni Budaya	180				30 kali	865.700.000	50	73.748.750	55	87.460.000			105	161.208.750	18,62%	105	161.208.750	58%	#DIV/0!	
22	3	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					26 lembaga	865.700.000	25	73.748.750	30	87.460.000			55	161.208.750	18,62%	55	161.208.750	#DIV/0!	#DIV/0!	

22	04		PROGRAM PEMBIANAAN SEJARAH	Persentase Pembiayaan Sejarah	90%	2.674.871.276	70%	165.000.000	2%	458.900	-	-	0	458.900	0,28%	0	458.900	2%	0%	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
22	04	2.01	Pembiayaan Sejarah Lokal dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembiayaan sejarah lokal	30	2.674.871.276	5 kali	165.000.000	1	458.900	-	-	1	458.900	0,28%	1	458.900	3%	0%		
22	04	2.01	01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ kota yang diberdayakan	100 Orang	180.000.000	3	458.900	3	458.900	-	-	3	458.900	0,35%	3	458.900	# DIV/0!	# DIV/0!		
22	04	2.01	03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat Diakses Masyarakat	6 dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!		
22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman	80%	3.391.164.755	65%	700.000.000	-	-	29%	204.443.800	-	0	204.443.800	29,21%	0	204.443.800	36%	6%	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
22	06	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola di kabupaten	3	3.389.164.755	3 obyek	700.000.000	-	-	2	204.443.800	-	2	204.443.800		2	204.443.800	67%	6%	
22	06	2.01	01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	3 Unit	212.226.785	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!		
22	06	2.01	03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3 Unit	452.227.900	-	-	-	-	2	204.443.800	-	2	204.443.800	45,21%	2	204.443.800	# DIV/0!	# DIV/0!	
22	06	2.01	04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	35.545.315	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																					
26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	5%	5.814.755.459	5 %	1.149.917.532	97.061.300	337.481.700	-	-	0	434.543.000	37,79%	0	434.543.000	0%	7%	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18	1600.000.000	3 Buah	1.149.917.532	97.061.300	337.481.700	-	-	0	434.543.000	37,79%	0	434.543.000	0%	27%		
26	2	2.03	06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kab/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan pengembangan pemertanian)	1laporan	1.149.917.532	1	97.061.300	1	337.481.700	-	-	2	434.543.000	37,79%	2	434.543.000	# DIV/0!	# DIV/0!		
26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5%	2.907.377.731	5 %	572.434.850	16.488.000	37.289.185	-	-	0	45.537.185	7,95%	0	45.537.185	0%	2%	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	15	2.907.377.731	3 kali	307.952.850	8.240.000	77.367.400	-	-	0	85.607.400	27,80%	0	85.607.400	0%	3%		
26	5	2.01	06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	10Orang	174.931.250	-	-	26%	44.941.000	-	-	0	44.941.000	25,69%	0	44.941.000	# DIV/0!	# DIV/0!		
26	5	2.01	11 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Manev Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 laporan	133.021.600	25%	8.240.000	24%	32.426.400	-	-	0	40.666.400	30,57%	0	40.666.400	# DIV/0!	# DIV/0!		
26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	15	2.907.377.731	3 kali	264.482.000	8.248.000	37.289.185	-	-	0	45.537.185	17,22%	0	45.537.185	0%	2%		
26	5	2.02	01 Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	10Orang	264.482.000	5%	8.248.000	14%	37.289.185	-	-	0	45.537.185	17,22%	0	45.537.185	# DIV/0!	# DIV/0!		

## 2.1. FAKTOR PENDORONG

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep meliputi 3 ( tiga ) urusan Pemerintahan :

### ➤ URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga melalui fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga, pendataan kepemudaan dan olahraga serta penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga.

### ➤ URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat, pemberian penghargaan kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Grup Kesenian, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, pengiriman seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan - kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

### ➤ URUSAN PILIHAN KEPARIWISATAAN

melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi, pemasaran dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan / event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata, obyek wisata dan unsur pariwisata serta menumbuhkan wirausahawan muda bidang pariwisata.

## **2.2. FAKTOR PENGHAMBAT**

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan ruang publik bagi pengembangan bakat, minat serta kreativitas pemuda dan keolahragaan serta pelestarian seni budaya tradisional
2. Sistem pembinaan keolahragaan yang belum optimal baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap bangunan cagar budaya
4. Rendahnya minat generasi muda dalam upaya pelestarian seni budaya tradisional
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata yang berstandar pelayanan prima baik secara kuantitas maupun kualitas
6. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata
7. Para pelaku ekonomi kreatif belum memiliki data yang ter Update terkait keberadaannya dan legalitasnya

## **2.3. TINDAK LANJUT**

1. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan Pemuda yang ditandai dengan meningkatnya pemuda yang terserap di pasar kerja baik lokal, nasional
2. Meningkatkan minat dan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat dengan nilai-nilai moral, agama, sosial, dan Wawasan Nasional
3. Menyelenggarakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan, baik bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat
4. Memperkuat sadar wisata di lingkungan aparaturnya pemerintah kota, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat
5. Mempermudah akses transportasi ke berbagai destinasi

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024**  
**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAB. SUMENEP TAHUN 2024																				
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktiran Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata						16.851.676.830,00	23.093.729.230,00	24.701.860.513,00							66.888.106.828,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.126.831.625,00	21.171.376.848,00	21.171.308.305,00							61.668.606.828,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEREMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.891.305.738,00	12.004.931.735,00	10.341.831.735,00							13.425.000.000,00		
1	2	19	02						2.559.999.600,00	6.158.864.200,00	6.449.999.400,00							6.300.000.000,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEREMUDAAN																	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					10 %		10 %										
			Jumlah pemuda pelopor/wirusaha muda pemuda/pemuda kader kabupaten/kota yang dibina					700 Orang	730 Orang		4.054.999.600,00	4.653.864.200,00	4.653.864.200,00					4.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	02	2.01																	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																	
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					25 Orang	25 Orang		64.999.700,00	64.999.500,00	64.999.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0002																
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																	
			Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					100 Orang	100 Orang		999.999.900,00	999.999.900,00	999.999.900,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0003																
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					50 Orang	80 Orang		0,00	3.598.864.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0008																
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																	
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan					25 Orang	25 Orang		0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02																	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan/dibina					22 Organisasi	22 Organisasi		1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00						1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02	0002																
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					1 Dokumen	1 Dokumen		1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	2.295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	2	19	03																	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN																	
			Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga					30 %	30 %		3.764.806.178,00	5.289.467.535,00	6.335.332.335,00						7.325.000.000,00	
2	19	03	2.01																	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1 Organisasi	3 Organisasi		200.808.405,00	1.525.469.962,00	1.525.469.962,00						1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.01	0003																
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan					10 Unit	4 Unit		200.808.405,00	1.525.469.962,00	1.601.334.762,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02																	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota					1 kali	1 kali		435.440.300,00	435.440.200,00	435.440.200,00						900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEREMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	435.440.300,00	435.440.200,00	435.440.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda				400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda				500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				10 kali	10 kali	545.468.873,00	545.468.873,00	545.468.873,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda				250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				10 Orang	10 Orang	545.468.873,00	545.468.873,00	596.468.873,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-						250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-							250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda					150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				10 kali	3 kali	2.253.088.900,00	2.453.088.800,00	2.453.088.800,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.04	0001	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda					0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				21 Organisasi	3 Organisasi	2.253.088.900,00	2.453.088.800,00	3.122.088.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda					4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				5 kali	4 kali	329.999.700,00	329.999.700,00	329.999.700,00			-		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				525.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	2 Dokumen	119.999.700,00	119.999.700,00	119.999.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-							250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda					75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda					200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Terakreditasi				5%	5%	556.500.000,00	556.500.000,00	556.500.000,00			-						800.000.000,00		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				27 perkemahan	27 perkemahan	556.500.000,00	556.500.000,00	556.500.000,00			-	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	556.500.000,00	556.500.000,00	556.500.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengkatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda			800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								8.245.525.827,00	9.366.545.113,00	10.835.676.570,00						20.243.606.828,00		
4	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor					80 %	80 %	6.547.025.827,00	6.640.845.113,00	7.579.976.570,00							15.218.606.828,00	
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun					7 Dokumen	7 Dokumen	24.856.325,00	21.624.900,00	21.624.900,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	16.501.725,00	15.625.200,00	15.625.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	8.354.600,00	5.999.700,00	5.999.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun					8 Dok	8 Dok	4.769.963.630,00	4.867.014.341,00	4.867.014.341,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.839.606.828,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					43 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.746.677.430,00	4.843.728.141,00	5.509.931.598,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			9.569.606.828,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	5.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.873.000,00	5.873.000,00	5.873.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	7.818.200,00	7.818.200,00	7.818.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

2	22	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	43 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	38.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Dok	9 Dok	307.879.000,00	307.879.000,00	307.879.000,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.988.500,00	4.988.500,00	4.988.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.665.600,00	9.665.600,00	9.785.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.746.500,00	50.746.500,00	50.746.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.001.400,00	19.001.400,00	19.001.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		24.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.336.000,00	15.336.000,00	15.336.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	208.141.000,00	208.141.000,00	308.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 Dok	4 Dok	67.394.316,00	67.394.316,00	67.394.316,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	67.394.316,00	67.394.316,00	29.920.866,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	4 Dok	4 Dok	1.203.665.796,00	1.203.665.796,00	1.203.665.796,00				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.360.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	143.141.700,00	143.141.700,00	143.141.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	388.859.196,00	388.859.196,00	396.042.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			760.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	418.414.200,00	418.414.200,00	418.414.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	253.250.700,00	253.250.700,00	253.250.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			5 Dok	5 Dok	163.366.760,00	163.366.760,00	163.366.760,00			-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			660.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	50.859.000,00	50.859.000,00	145.763.472,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-				200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	110.214.160,00	110.214.160,00	190.283.458,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.293.600,00	2.293.600,00	2.293.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
5	22	02	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni Budaya yang Diutamakan				50%	50%	995.000.000,00	995.000.000,00	1.325.000.000,00			-				2.000.000.000,00	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Daerah Kabupaten/ Kota	-			20 orang	20 orang	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			3 objek	3 objek	995.000.000,00	995.000.000,00	995.000.000,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	995.000.000,00	995.000.000,00	1.325.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
6	22	03	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase dan Pembinaan Tradisi dan Nilai Budaya				50%	50%	538.500.000,00	865.700.000,00	915.700.000,00			-				350.000.000,00	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival dan penampilan seni budaya	-			30 kali	55 kali	538.500.000,00	865.700.000,00	865.700.000,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi				12 Sertifikat	12 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				24 Lembaga	26 Lembaga	538.500.000,00	865.700.000,00	915.700.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

7	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah				75 %	75 %	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							575.000.000,00						
				2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal	-			5 kali	5 kali	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00							Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	575.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA			
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	100 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
8	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya				70 %	70 %	0,00	0,00	0,00									850.000.000,00				
				2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	-			2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	0,00									Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terpenuhinya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-			8 objek	8 objek	0,00	0,00	0,00									Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	3 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				7 Objek	7 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-					Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
9	2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman				70 %	70 %	0,00	700.000.000,00	750.000.000,00										1.250.000.000,00			
				2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola di kabupaten	-			3 unit	3 unit	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00										Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

2	22	06	2.01	0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				3 Unit	3 Unit	0,00	212.226.785,00	210.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				3 Unit	3 Unit	0,00	452.227.900,00	449.604.700,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	35.545.315,00	40.395.300,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.724.845.225,00	1.722.352.382,00	3.524.352.208,00							5.219.500.000,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.724.845.225,00	1.722.352.382,00	3.524.352.208,00							5.219.500.000,00	
10	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan				5%	5%	299.928.498,00	1.149.917.532,00	2.021.917.358,00							2.132.500.000,00	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3 Obyek	3 Obyek	99.997.256,00	0,00	0,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			105.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	34.997.064,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				30 Orang	30 Orang	65.000.192,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan				3 Obyek	3 Obyek	99.999.792,00	0,00	0,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		612.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	3 Laporan / Dokumen Lokasi	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	99.999.792,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			57.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dipelihara				3 Lokasi	3 Lokasi	99.931.450,00	1.149.917.532,00	1.149.917.532,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		567.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	99.931.450,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.149.917.532,00	2.021.917.358,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			57.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				5 Jenis	5 Jenis	0,00	0,00	0,00				Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan	Terpenuhinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		352.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				10 Usaha	10 Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKMBerbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

3	26	02	2.04	0008	Facilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				5 Usaha	5 Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		52.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
11	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Pemasaran Pariwisata di Dalam Negeri dan Luar Negeri				75 %	75 %	1.149.917.732,00	0,00	0,00			-			1.175.000.000,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan				266200 orang	266200 orang	1.149.917.732,00	0,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	824.920.100,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Pemerataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	49.999.932,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Pemerataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	4 Promosi	274.997.700,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Pemerataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
12	3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				5 %	5 %	24.999.900,00	0,00	600.000.000,00			-			630.000.000,00	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Kali	1 Kali	24.999.900,00	0,00	0,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	630.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	2.02	0003	Facilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah					1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	04	2.02	0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual					1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.999.900,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
13	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				5%	5%	249.999.095,00	572.434.850,00	802.434.850,00									1.282.000.000,00												
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					3 kali	3 kali	249.999.095,00	307.952.850,00	307.952.850,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1.252.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif					1 Laporan	1 Laporan	49.999.900,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			157.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					1 Orang	1 Orang	0,00	174.931.250,00	174.931.250,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			214.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKN	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKN					24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata					10 Orang	10 Orang	199.999.195,00	0,00	330.000.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					0 Laporan	0 Laporan	0,00	133.021.600,00	133.021.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					10 Orang	10 Orang	0,00	264.482.000,00	264.482.000,00			-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					10 Orang	10 Orang	0,00	264.482.000,00	264.482.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta PenguatanPerdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
<b>J U M L A H</b>													<b>16.851.676.830,00</b>	<b>23.093.729.230,00</b>	<b>24.701.860.513,00</b>																			<b>36.888.106.828,00</b>	

## BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dan diperkirakan maju tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Awal OPD tahunan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep yang didalamnya mencakup penjabaran Visi. Misi. Tujuan. Sasaran. Kebijakan. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah. bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat. akurat. transparan dan adil.

Akhinya dengan segala kemampuan yang ada. Kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep semoga bermanfaat bagi kita semua. khususnya Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, Agustus 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SUMENEP



**MOHAMAD IKSAN, S.Pd, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680716 199903 1 004



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
( RKP )  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
GANDING**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Ganding, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Ganding pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.



Sumenep, 24 Juli 2024

**CAMAT GANDING**

**ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19690210 198903 1 006

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang .....	4
2. Landasan Hukum .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 .....	9
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	22
BAB IV PENUTUP .....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	32
1. Keputusan Camat Gending, Nomor 188/21/KEP/311/2024, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Gending Kabupaten Sumenep.....	33
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Gending.....	37
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Gending.....	38
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Gending.....	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Ganding telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);

## **C. DASAR HUKUM**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Ganding dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Ganding Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

### **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

### **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

### **BAB IV Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024**

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Target : 9 Dokumen      Realisasi : 6 Dokumen      Capaian : 66,67%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Target : 20 Laporan      Realisasi : 8 Laporan      Capaian : 40,00%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Target : 1 Jenis      Realisasi : 0 Jenis      Capaian : 0,00%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target : 27.240 Jenis      Realisasi : 13.625 Jenis      Capaian : 50,02%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target : 7 Unit      Realisasi : 7 Unit      Capaian : 100,00%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 7 Jenis      Realisasi : 7 Jenis      Capaian : 100,00%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 20 Unit      Realisasi : 18 Unit      Capaian : 90,00%

**b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Target : 5 Laporan      Realisasi : 4 Laporan      Capaian : 80,00%

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target : 14 Laporan      Realisasi : 0 Laporan      Capaian : 0,00%

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target : 4 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 50,00%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target : 14 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 42,86%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target : 1 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 100,00%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Target : 4 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 50,00%

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1		7.01	UNSUR KEWILAYAHAN		100.00%	2,405,964,746	-	-	100.00%	2,405,964,746	24.67%	394,404,041	25.50%	815,185,011	0.00%	-	0.00%	-	50.17%	1,209,589,052	50.17%	50.27%	50.17%	1,209,589,052	50.17%	50.27%	
		0.00.0.00.10	KECAMATAN GANDING		100.00%	2,405,964,746	-	-	100%	2,405,964,746	24.67%	394,404,041	25.50%	815,185,011	0.00%	-	0.00%	-	50.17%	1,209,589,052	50.17%	50.27%	50.17%	1,209,589,052	50.17%	50.27%	
1	Tersedia Pemanfaatan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100.00%	2,230,083,946	-	-	100%	2,230,083,946	12.00%	346,948,241	35.00%	776,404,011	0.00%	-	0.00%	-	47.00%	1,123,352,252	47.00%	50.37%	47.00%	1,123,352,252	47.00%	50.37%	KECAMATAN GANDING
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	38 dokumen	2,050,600	-	-	8	2,050,600	0	-	2	559,000	0	-	6	-	8	559,000	100.00%	27.26%	8	559,000	21.05%	27.26%	KECAMATAN GANDING
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1	559,000	-	-	1	559,000	-	-	1	559,000	-	-	-	-	1	559,000	100.00%	100.00%	1	559,000	100.00%	100.00%	KECAMATAN GAND

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100%		17		
			SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																									
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	496,600	-	-	1	496,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%			KECAMATAN GANDING
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	499,000	-	-	1	499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%			KECAMATAN GANDING
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	496,000	-	-	1	496,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%			KECAMATAN GANDING
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	60 Laporan	8.512.011.803	12 Laporan	1.907.487.244	20 Laporan	1.964.008.781	3	320.673.915	5	545.827.798	-	-	-	-	8 Laporan	866.501.713	40,00%	44,12%	20 Laporan	2.773.988.957	33,33%	32,59%			Kecamatan Ganding
		7.01.0	Penyediaan Gaji	Jumlah Orang					21	1.957.277.781	17	320.673.915	-	542.462.298	-	-	-	-	17	863.136.213	80,	44,1							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		1.2.02.01	dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Oran g/ bula n									Oran g/ bula n	95 %	0%							17	
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					20 Lapo ran	6.731.000	5	-	5	3.365.500	-	-	-	10 Lapo ran	3.365.500	50,00 %	50,00 %							
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	134.960 Jenis	537.419.502	24.260 Jenis	151.455.800	27.240 Jenis	152.056.000	38	6.036.000	13.587	71.772.100	-	-	-	13.625 Jenis	77.808.100	50,02 %	51,17%	37.885 Jenis	229.263.900	28,07%	42,66%	Kecamatan Ganding		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					178 Pake t	8.427.800	-	-	86	3.377.600	-	-	-	86 Pake t	3.377.600	48,31 %	40,08%							
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					124 Pake t	8.753.200	-	-	62	4.376.600	-	-	-	62 Pake t	4.376.600	50,00 %	50,00%							
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					15.558 Pake t	30.091.800	-	-	7.779	15.045.900	-	-	-	7.779 Pake t	15.045.900	50,00 %	50,00%							
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang					10.800 Pake t	9.480.000	-	-	5.400	4.740.000	-	-	-	5.400 Pake t	4.740.000	50,00 %	50,00%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Disediakan																						17	
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.663.200	2	276.000	4	552.000	-	-	-	-	6 Dokumen	828.000	50,00%	49,78%						
		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				568 Laporan	93.640.000	36	5.760.000	256	43.680.000	-	-	-	-	292 Laporan	49.440.000	51,41%	52,80%						
		7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	35 Unit	681.645.686	3 Unit	25.771.000	7 Unit	71.871.188	-	-	7	68.113.000	-	-	-	7 Unit	68.113.000	10,00%	94,77%	10 Unit	93.884.000	28,57%	13,77%	Kecamatan Ganding	
		7.01.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	36.095.000	-	-	1	32.350.000	-	-	-	-	1 Unit	32.350.000	10,00%	89,62%						
		7.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	35.776.188	-	-	6	35.763.000	-	-	-	-	6 Unit	35.763.000	10,00%	99,96%						
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	30 Jenis	51.933.397	6 Jenis	16.060.860	7 Jenis	95.040.000	7	15.920.810	-	31.280.000	-	-	-	7 Jenis	47.200.810	10,00%	49,66%	13 Jenis	63.261.670	43,33%	121,81%	Kecamatan Ganding	
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,				24 Laporan	20.640.000	3	3.520.810	4	6.480.000	-	-	-	-	7 Laporan	10.000.810	29,17%	48,45%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																									17
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	74.400.000	2	12.400.000	4	24.800.000	-	-	-	-	6 Laporan	37.200.000	50,00%	50,00%								
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	225 Unit	676.810.945	44 Unit	168.167.000	20 Unit	97.513.022	17	76.770.500	1	8.112.500	-	-	-	-	18 Unit	84.883.000	90,00%	87,05%	62 Unit	253.050.000	27,56%	37,39%	Kecamatan Gandi ng		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	37.250.000	2	16.512.500	1	8.112.500	-	-	-	-	3 Unit	24.625.000	60,00%	66,11%								
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.800.000	12	7.800.000	-	-	-	-	-	-	12 Unit	7.800.000	100,00%	100,00%								
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				3 Unit	52.463.022	3	52.458.000	-	-	-	-	-	-	3 Unit	52.458.000	100,00%	99,99%								
2	Meningkatnya Mutu Layanan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di	100,00%	41.732.879	20,00%	9.205.000	100,00%	6.526.000	18,75	-	31,25	5.139.600	-	-	-	-	50,00%	5.139.600	50,00%	78,76%	70,00%	14.344.600	70,00%	34,37%	Kecamatan Gandi ng		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Publik		PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan																								
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Laporan	29.825.300	4 Laporan	3.600.000	4 Laporan	2.772.800	-	-	2	1.386.400	-	-	-	-	2 Laporan	1.386.400	50,00%	50,00%	6 Laporan	4.986.400	30,00%	16,72%	Kecamatan Ganding	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	2.772.800	-	-	2	1.386.400	-	-	-	-	2 Laporan	1.386.400	50,00%	50,00%							
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Laporan	11.907.579	12 Laporan	5.605.000	12 Laporan	3.753.200	3	-	3	3.753.200	-	-	-	-	6 Laporan	3.753.200	50,00%	100,00%	18 Laporan	9.358.200	30,00%	78,59%	Kecamatan Ganding	
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3.753.200	3	-	3	3.753.200	-	-	-	-	6 Laporan	3.753.200	50,00%	100,00%							
3	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan	100,00%	251.214.664	19,48%	19.490.000	100,00%	22.593.200	11,54	-	11,54	13.621.600	-	-	-	-	23,08%	13.621.600	23,08%	60,29%	42,56%	33.111.600	42,56%	13,18%	Kecamatan Ganding	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				di Kecamatan																											
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	70 Laporan	64.478.111	14 Laporan	4.335.000	14 Laporan	2.593.200	-	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	14 Laporan	4.335.000	20,00%	6,72%	Kecamatan Ganding					
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 Lembaga	2.593.200	-	-	-	-	-	-	-	0 Lembaga	-	0,00%	0,00%											
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	16 Laporan	30.879.613	16 Laporan	15.155.000	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	16 Laporan	15.155.000	100,00%	49,08%	Kecamatan Ganding						
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang dilaksanakan	20 Dokumen	53.026.994	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Ganding						
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	48 Laporan	102.829.946	0 Laporan	-	12 Laporan	20.000.000	3	-	3	13.621.600	-	-	-	6 Laporan	13.621.600	50,00%	68,11%	6 Laporan	13.621.600	12,50%	13,25%	Kecamatan Ganding					
		7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran				15 Keluarga	20.000.000	15	-	-	13.621.600	-	-	-	15 Keluarga	13.621.600	100,00%	68,11%											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100 %		15=7+13		16=15/6x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																									
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100,00%	109.641.140	10,77%	12.670.000	100,00%	7.066.000	-	-	60,00	5.679.600	-	-	-	-	60,00%	5.679.600	60,00%	80,38%	70,77%	18.349.600	70,77%	16,74%			Kecamatan Ganding
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	65 Laporan	109.641.140	7 Laporan	12.670.000	5 Laporan	7.066.000	-	-	3	5.679.600	-	-	-	-	3 Laporan	5.679.600	60,00%	80,38%	10 Laporan	18.349.600	15,38%	16,74%			Kecamatan Ganding
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	2.772.800	-	-	2	1.386.400	-	-	-	-	2 Laporan	1.386.400	50,00%	50,00%							
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan	4.293.200	-	-	1	4.293.200	-	-	-	-	1 Laporan	4.293.200	10,00%	100,00%							
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	100,00%	135.144.472	20,00%	80.535.000	100,00%	179.722.800	21,43	-	21,43	34.859.200	-	-	-	-	42,86%	34.859.200	42,86%	19,40%	97,65%	115.394.200	97,65%	85,39%			Kecamatan Ganding

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6	7	7	8	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%							
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17		
			N UMUM	di tingkat kecamatan																							
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	70 Laporan	135.144.472	14 Laporan	80.535.000	14 Laporan	179.722.800	3	-	3	34.859.200	-	-	-	-	6 Laporan	34.859.200	42,86%	19,40%	20 Laporan	115.394.200	28,57%	85,39%	Kecamatan Ganding
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI					100 Orang	45.604.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Orang	-	0,00%	0,00%					
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	134.118.400	3	-	3	34.859.200	-	-	-	-	6 Dokumen	34.859.200	50,00%	25,99%					
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	319.538.053	17,65%	29.157.250	100,00%	48.556.000	20,00%	4.093.200	60,00%	27.149.600	-	-	-	-	80,00%	31.242.800	80,00%	64,34%	97,65%	60.400.050	97,65%	18,90%	Kecamatan Ganding

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Laporan	319.538.053	3 Laporan	29.157.250	5 Laporan	48.556.000	1	4.093.200	3	27.149.600	-	-	-	-	4 Laporan	31.242.800	80,00%	64,34%	7 Laporan	60.400.050	41,18%	18,90%	Kecamatan Ganding
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	4.833.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%						
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	9.003.200	-	-	3	6.123.200	-	-	-	-	3 Dokumen	6.123.200	100,00%	68,01%						
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				14 Dokumen	5.033.200	-	-	14	5.033.200	-	-	-	-	14 Dokumen	5.033.200	100,00%	100,00%						
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				14 Dokumen	4.093.200	14	4.093.200	-	-	-	-	-	-	14 Dokumen	4.093.200	100,00%	100,00%						
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka				14 Dokumen	25.593.200	-	-	14	15.993.200	-	-	-	-	14 Dokumen	15.993.200	100,00%	62,49%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17																	
			Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					n										n																									
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		42,78%	58,52%																					
																				Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah																					

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep disebabkan oleh pengurangan Pegawai Negeri Sipil yang semula berjumlah 17 (tujuh belas) Orang menjadi 14 (empat belas) Orang yang dikarenakan adanya mutasi dan promosi, meninggal dunia serta mencapai batas waktu pensiun. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ganding**

**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ganding**

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	Kecamatan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	100,00%	100,00%	2,027,992,073	2,027,992,073	2,027,992,073	-
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,081,400	2,081,400	2,081,400	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	559,800	559,800	559,800	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	507,200	507,200	507,200	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	507,200	507,200	507,200	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	507,200	507,200	507,200	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				SKPD								
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	1,844,445,473	1,844,445,473	1,844,445,473	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan	1,837,907,273	1,837,907,273	1,837,907,273	Berkurangnya Jumlah Pegawai Negeri Sipil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	6,538,200	6,538,200	6,538,200	-
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	7.757.790	7.757.790	7.642.350	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	21 Paket	17 Paket	7.757.790	7.757.790	7.642.350	Berkurangnya Jumlah Paket dan Harga Satuan
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27.240 Jenis	27.240 Jenis	27.240 Jenis	152.056.000	152.056.000	152.056.000	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	178 Paket	178 Paket	178 Paket	8.427.800	8.427.800	8.427.800	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15.558 Paket	15.558 Paket	15.558 Paket	30.091.800	30.091.800	30.091.800	-
		Penyediaan Barang Cetak dan	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	10.800	10.800	10.800	9.480.000	9.480.000	9.480.000	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Penggandaan	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	Paket				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.663.200	1.663.200	1.663.200	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568 Laporan	568 Laporan	568 Laporan	93.640.000	93.640.000	93.640.000	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	568 Laporan	568 Laporan	568 Laporan	93.640.000	93.640.000	93.640.000	-
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	<b>71.871.188</b>	<b>71.871.188</b>	<b>71.871.188</b>	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.095.000	36.095.000	36.095.000	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	35.776.188	35.776.188	35.776.188	-
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jumlah layanan jasa yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	<b>95.040.000</b>	<b>95.040.000</b>	<b>95.040.000</b>	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	20.640.000	20.640.000	20.640.000	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.400.000	74.400.000	74.400.000	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				Disediakan								
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	<b>93.226.822</b>	<b>97.513.022</b>	<b>97.513.022</b>	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	37.250.000	37.250.000	37.250.000	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	48.176.822	52.463.022	52.463.022	-
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	<b>10.246.000</b>	<b>6.526.000</b>	<b>6.526.000</b>	-
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	<b>2.772.800</b>	<b>2.772.800</b>	<b>2.772.800</b>	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.772.800	2.772.800	2.772.800	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	<b>7.473.200</b>	<b>3.753.200</b>	<b>3.753.200</b>	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.473.200	3.753.200	3.753.200	-
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	<b>22.593.200</b>	<b>22.593.200</b>	<b>22.593.200</b>	-
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	<b>2.593.200</b>	<b>2.593.200</b>	<b>2.593.200</b>	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	2.593.200	2.593.200	2.593.200	-
		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15 Keluarga	15 Keluarga	15 Keluarga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	100,00%	100,00%	100,00%	<b>7.066.000</b>	<b>7.066.000</b>	<b>7.066.000</b>	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				yang terlaksana	terlaksana							
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	7.066.000	7.066.000	7.066.000	-
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.772.800	2.772.800	2.772.800	-
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.293.200	4.293.200	4.293.200	-
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%	179.722.800	179.722.800	179.722.800	-
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	179.722.800	179.722.800	179.722.800	-
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100 Orang	100 Orang	100 Orang	45.604.400	45.604.400	45.604.400	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI								
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	134.118.400	134.118.400	134.118.400	-
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	100,00%	100,00%	<b>55,275,000</b>	<b>55,275,000</b>	<b>65,275,000</b>	-
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	55,275,000	55,275,000	65,275,000	-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	11,790,000	11,790,000	11,790,000	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6,888,000	6,888,000	6,888,000	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	4,096,000	4,096,000	4,096,000	-
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	16,240,000	16,240,000	16,240,000	-

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				Pihak Ketiga	Pihak Ketiga							
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	16,261,000	16,261,000	16,261,000	-
		-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	Jumlah laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	14 Dokumen	-	-	10,000,000	Ada Penambahan APBD
<b>TOTAL</b>									<b>2,395,964,746</b>	<b>2,395,964,746</b>	<b>2,405,964,746</b>	

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.



Sumenep, 24 Juli 2024

**CAMAT GANDING**

**ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19690210 198903 1 006

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN GANDING**  
Jl. Raya Guluk-Guluk Nomor 06, Telp. (0328) 821513  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69462

KEPUTUSAN CAMAT GANDING KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/21/KEP/311/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP

CAMAT GANDING KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Ganding Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Ganding.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 17 Juli 2024

  
**CAMAT GANDING**  
**ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690210 198903 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Ganding  
Nomor : 188/21/KEP/311/2024  
Tanggal : 17 Juli 2024

-----

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Ganding
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Ganding
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ganding;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Ganding;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ganding;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Ganding</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ganding;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ganding;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Ganding</li></ol>

Sumenep, 17 Juli 2024

**CAMAT GANDING**



**ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19690210 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN GANDING**

Jl. Raya Guluk-Guluk Nomor 06, Telp. (0328) 821513

**SUMENEP**

Kode Pos : 69462

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/21/BA/311/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Ganding Kabupaten Sumenep, Tanggal 17 Juli 2024, Nomor : 188/21/KEP/311/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 24 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
 KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2	R. HENI YULIANTO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3	M. DARUSSALAM, S.AN.	Anggota	3.
4	ARMAYANI	Anggota	4.
5	BUSTAMI	Anggota	5.
6	DODI HARIYANTO, SH., MM.	Anggota	6.
7	AMIR WASIT, S.Sos.	Anggota	7.
8	AKHMAD WAHYUDI	Anggota	8.
9	PAOZAN	Anggota	9.


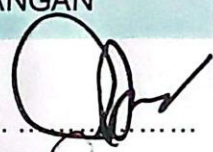



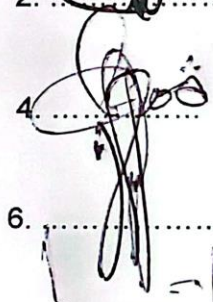
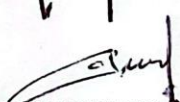


**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksihesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 24 Juli 2024

**TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2	R. HENI YULIANTO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3	M. DARUSSALAM, S.AN.	Anggota	3. 
4	ARMAYANI	Anggota	4. 
5	BUSTAMI	Anggota	5. 
6	DODI HARIYANTO, SH., MM.	Anggota	6. 
7	AMIR WASIT, S.Sos.	Anggota	7. 
8	AKHMAD WAHYUDI	Anggota	8. 
9	PAOZAN	Anggota	9. 

**PHOTO DOKUMENTASI**  
PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI SENIN, TANGGAL 24 JULI 2024





# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

## **KABUPATEN SUMENEP KECAMATAN KANGAYAN**


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan 67, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kangayan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, 02 Juli 2024

**CAMAT KANGAYAN**  
  
**NURULLAH, S.H.,M.H**  
Pembina  
NIP. 19791028 201001 1 002

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang .....	4
2. Landasan Hukum .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	9
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	15
BAB IV PENUTUP .....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	22
1. Keputusan Camat Kandangan, Nomor 188/22/KEP/435.308/2024, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep.....	23
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kandangan.....	27
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kandangan.....	28
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kandangan.....	30

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Pembina Tingkat I masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatukomitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Kangayan telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
  17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kangayan dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Dearah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kangayan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

**BAB II   Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

**BAB III   Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

**BAB IV   Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024**

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

##### ➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Target : 4 Dokumen      Realisasi : 0 Dokumen      Capaian : 0%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Target : 12 Laporan      Realisasi : 8 Laporan      Capaian : 57,14%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target : 72 Jenis      Realisasi : 36 Jenis      Capaian : 50,00%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target : 9 Unit      Realisasi : 1 Unit      Capaian : 11,11%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 48 Laporan      Realisasi : 24 Jenis      Capaian : 50,00%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 20 Unit      Realisasi : 11 Unit      Capaian : 55,00%

#### **b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

##### ➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Target : 2 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 50,00%

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Target : 1 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 100,00%
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Target : 4 Laporan      Realisasi : 3 Laporan      Capaian : 75,00%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 13 Laporan      Realisasi : 7 Laporan      Capaian : 53,85%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 1 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 100,00%

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  
Target : 4 Laporan      Realisasi : 4 Laporan      Capaian : 100,00%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Target : 4 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 50,00%

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Target : 12 Laporan

Realisasi : 6 Laporan

Capaian : 50,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp			K	Rp	K	Rp				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
UNSUR KEWILAYAHAN																								
KECAMATAN																								
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana kantor	100	2.128.600.000		100	2.012.435.760	18,30%	368.187.931	30,57%	751.916.431	0%		55,66	1.120.104.362	55,66	1.120.104.362,00	55,66	1.120.104.362	55,66	1.120.104.362	Kecamatan Lenteng
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4	2.400.000		100	2.053.900	0%	0	0%	0	0	0	0%		0,00		0,00		0,00		
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1	600.000		1	559.600	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0,00		0,00		0,00		
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1	600.000		1	498.500	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0,00		0,00		0,00		
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1	600.000		1	500.000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0,00		0,00		0,00		
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1	600.000		1	495.800	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0,00		0,00		0,00		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	1.608.000.000		100	1.547.463.036	18,55%	287.079.109	21,43%	615.202.159	0	0	58,31	902.281.268	58,31	902.281.268	58,31	902.281.268	58,31	902.281.268	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	1.600.000.000		14	1.542.701.436	3	286.287.109	5	613.907.059	0	0	8	900.194.168	58,35	900.194.168	8,00	900.194.168	57,14	900.194.168	
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12	5.000.000		3	4.761.600	1	792.000	1	1.295.100	0	0	2	2.087.100	43,83	2.087.100	2,00	2.087.100	16,67	2.087.100	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100	76.700.000		100	69.874.900	8,95%	6.254.000	29,44%	18.412.000	0	0	35,30	24.666.000	35,30	24.666.000	35,30	24.666.000	35,30	24.666.000	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen Instalasi Listrik yang disediakan	160	12.500.000		10	8.147.700	0	0	5	4.058.000	0	0	5	4.058.000	49,81	4.058.000	5,00	4.058.000	3,13	4.058.000	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	5	29.000.000		12	28.800.000	1	2.400.000	3	7.200.000	0	0	4	9.600.000	33,33	9.600.000	4,00	9.600.000	80,00	9.600.000	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketetapan Perundang-undangan yang disediakan	12	3.200.000		12	3.067.200	3	660.000	3	660.000	0	0	6	1.320.000	43,04	1.320.000	6,00	1.320.000	50,00	1.320.000	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	240	27.000.000		12	26.992.000	1	2.500.000	2	5.800.000	0	0	3	8.300.000	30,75	8.300.000	3,00	8.300.000	1,25	8.300.000	
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang disediakan	12	5.000.000		12	2.868.000	3	694.000	3	694.000	0	0	6	1.388.000	48,40	1.388.000	6,00	1.388.000	50,00	1.388.000	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2	61.000.000		100	57.338.160	0	0	99,51	57.055.000	0	0	99,51	57.055.000	99,51	57.055.000	99,51	57.055.000	4,975,31	57.055.000	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2	61.000.000		6	57.338.160	0	0	6	57.055.000	0	0	6	57.055.000	99,51	57.055.000	6,00	57.055.000	300,00	57.055.000	

			7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	60	250.000.000			100	212.923.450	16,58	35.311.522	24,52	52.202.272	0			0			41,10	87.513.794	41,10	87.513.794	41,10	87.513.794	68,50	87.513.794			
			7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di sediakan	12	24.500.000		437	23.701.000	95	5.131.500	100	6.501.000							195	11.632.500	49,08	11.632.500	195,00	11.632.500	1.625,00	11.632.500			
			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24	25.000.000		12	22.632.000	2	3.358.800	3	4.265.550							5	7.624.350	33,69	7.624.350	5,00	7.624.350	20,83	7.624.350			
			7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	7.500.000		110	5.338.400			50	2.054.500						50	2.054.500	38,49	2.054.500	50,00	2.054.500	416,67	2.054.500				
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	12	193.000.000		3	161.252.050	1	26.821.222	1	39.981.222							2	66.202.444	41,06	66.202.444	2,00	66.202.444	16,67	66.202.444			
			7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20	133.500.000			100	122.782.314	32,21	39.543.300	7,37	9.045.000	0							39,57	48.588.300	39,57	48.588.300	39,57	48.588.300	197,86	48.588.300		
			7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5	45.000.000		4	37.272.000	1	4.412.000	1	6.975.000							2	11.387.000	30,55	11.387.000	2,00	11.387.000	40,00	11.387.000			
			7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	20.500.000		30	20.460.000	5	3.150.000	4	2.070.000							9	5.220.000	25,51	5.220.000	9,00	5.220.000	75,00	5.220.000			
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	68.000.000		2	65.050.314	1	31.981.300									1	31.981.300	49,16	31.981.300	1,00	31.981.300	33,33	31.981.300			
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik		7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	33.000.000			100	15.347.800	-	10,29	1.579.500								10,29	1.579.500	10,29	1.579.500	10,29	1.579.500	10,29	1.579.500		Kecamatan Lenteng	
			7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	25.000.000		4	12.475.400		0										0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
			7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4	25.000.000		1	12.475.400											0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
			7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	4	8.000.000		60	2.872.400		0	30	1.579.500								30	1.579.500	54,99	1.579.500	30,00	1.579.500	750,00	1.579.500			
			7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	4	8.000.000		286	2.872.400			143	1.579.500							143	1.579.500	54,99	1.579.500	143,00	1.579.500	3.575,00	1.579.500			
			7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	44.000.000			100	40.083.300	32,36	12.972.900	22,43	8.989.400								54,79	21.962.300	54,79	21.962.300	54,79	21.962.300	54,79	21.962.300		
			7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	20	10.000.000		1	6.889.300	1	6.883.500										1	6.883.500	99,92	6.883.500	1,00	6.883.500	5,00	6.883.500			
			7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	20	10.000.000		20	6.889.300	20	6.883.500									20	6.883.500	99,92	6.883.500	20,00	6.883.500	100,00	6.883.500			

		7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	20	34.000.000			100	33.194.000	18,34	6.089.400	27,08	8.989.400					45,43	15.078.800	45,43	15.078.800	45,43	15.078.800	227,13	15.078.800					
		7	01	03	2.06	0007	Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	20	34.000.000		126	33.194.000	23	6.089.400	35	8.989.400					58	15.078.800	45,43	15.078.800	58,00	15.078.800	290,00	15.078.800					
		7	01	04		<b>PROGRAM KOOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>39.000.000</b>		<b>100</b>	<b>37.510.400</b>	<b>31,99</b>	<b>12.000.000</b>	<b>18,00</b>	<b>6.750.000</b>					<b>49,99</b>	<b>18.750.000</b>	<b>49,99</b>	<b>18.750.000</b>	<b>49,99</b>	<b>18.750.000</b>	<b>49,99</b>	<b>18.750.000</b>	<b>49,99</b>	<b>18.750.000</b>				
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2	39.000.000		13	37.510.400	4	12.000.000	4	6.750.000					8	18.750.000	49,99	18.750.000	8,00	18.750.000	400,00	18.750.000						
		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenlra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12	27.500.000		12	27.000.000	3	6.750.000	3	6.750.000					6	13.500.000	50,00	13.500.000	6,00	13.500.000	50,00	13.500.000					
		7	01	04	2.01	0002	Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2	11.500.000		2	10.510.400	1	5.250.000							1	5.250.000	49,95	5.250.000	1,00	5.250.000	50,00	5.250.000					
		7	01	05		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>39.000.000</b>		<b>100</b>	<b>37.591.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12	39.000.000		125	37.591.100	0	0	0	0					0	-	0%	0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Kegiatan Wawasan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	12	39.000.000		125	37.591.100	0	-	-	-					0	-	0%	0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
		7	01	06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100</b>	<b>59.790.000</b>		<b>100</b>	<b>52.539.500</b>	<b>10,25</b>	<b>5.383.500</b>	<b>28,03</b>	<b>14.725.000</b>					<b>38,27</b>	<b>20.108.500</b>	<b>38,27</b>	<b>20.108.500</b>	<b>38,27</b>	<b>20.108.500</b>	<b>38,27</b>	<b>20.108.500</b>	<b>38,27</b>	<b>20.108.500</b>	<b>38,27</b>	<b>20.108.500</b>		
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12	59.790.000		100	52.539.500	10,25	5.383.500	28,03	14.725.000					38,27	20.108.500	38,27	20.108.500	38,27	20.108.500	318,94	20.108.500					
		7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	80	13.590.000		20	11.793.900	10	5.383.500	10	6.400.000					20	11.783.500	99,91	11.783.500	20,00	11.783.500	25,00	11.783.500					
		7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	20	16.000.000		20	12.473.900									0	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		



**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep disebabkan oleh pengurangan Pegawai Negeri Sipil yang semula berjumlah 18 (delapan belas) Orang menjadi 15 (lima belas) Orang yang dikarenakan adanya mutasi dan promosi, serta batas waktu pensiun. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**

**KECAMATAN KANGAYAN KAB. SUMENEP**

**TAHUN 2024**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Kecamatan Kangayan					2.195.701.220,00	2.129.420.159,00	2.288.715.882,00									2.391.154.711,00					
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.195.701.220,00	2.129.420.159,00	2.288.715.882,00									2.391.154.711,00					
7	0	1			KECAMATAN					2.195.701.220,00	2.129.420.159,00	2.288.715.882,00									2.391.154.711,00					
1	7	0	0	1	1	2.0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	2.024.474.520,00	2.012.435.760,00	2.396.358.623,00						2.086.794.246,00	
	7	0	0	1	1	2.0				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			100 %	100 %	2.189.200,00	2.053.900,00	2.053.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah dokumen perencanaan, penanggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2.225.475,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	1	1	2.0	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
											Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	578.500,00	559.600,00	559.600,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		606.375,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	1	1	2.0	000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
											Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	534.800,00	498.500,00	498.500,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		540.015,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	1	1	2.0	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
											Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	539.300,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni		541.905,00	KECAMATAN KANGAYAN



																	harmoni dan adaptif						
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	1	6	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10 Paket	8.619.500,00	8.147.700,00	8.147.700,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.856.200,00	KECAMATAN KANGAYAN	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	1	6	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			30.240.000,00	KECAMATAN KANGAYAN	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.067.200,00	3.067.200,00	3.067.200,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.326.400,00	KECAMATAN KANGAYAN	
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101.992.000,00	26.992.000,00	26.992.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			28.341.600,00	KECAMATAN KANGAYAN	
7	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	1	1	6	0		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.944.450,00	KECAMATAN KANGAYAN	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang yang diadakan			-	100 %	100 %	57.338.160,00	57.338.160,00	57.338.160,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan			42.901.239,00	KECAMATAN KANGAYAN

7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1	1	7	6		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	57.338.160,00	57.338.160,00	57.338.160,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			42.901.239,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	-			100 %	100 %	145.671.050,00	212.923.450,00	212.923.450,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah layanan jasa yang disediakan		146.766.218,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	1	1	8	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				437 Laporan	437 Laporan	24.387.400,00	23.701.000,00	23.701.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			23.609.040,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	1	8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	22.632.000,00	22.632.000,00	22.632.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			17.734.395,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	1	1	8	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				110 Laporan	110 Laporan	5.676.600,00	5.338.400,00	5.338.400,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.798.980,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	1	1	8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	3 Laporan	92.975.050,00	161.252.050,00	161.252.050,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			97.623.803,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			100 %	100 %	126.466.374,00	122.782.314,00	122.782.314,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		128.727.798,00	KECAMATAN KANGAYAN

					Pemerintahan Daerah										harmoni dan adaptif					
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		1	1	9	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			4 Unit	4 Unit	44.550.000,00	37.272.000,00	37.272.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		46.777.500,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		1	1	9	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	30 Unit	20.460.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		21.483.000,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		1	1	9	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	61.456.374,00	65.050.314,00	65.050.314,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		60.467.298,00	KECAMATAN KANGAYAN
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan		100 %	100 %	16.561.600,00	15.347.800,00	15.347.800,00						26.091.660,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	4 kali	4 kali	12.475.400,00	12.475.400,00	12.475.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.748.360,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
		1	2	3	1	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1 Dokumen	1 Dokumen	12.475.400,00	12.475.400,00	12.475.400,00	Kab. Sumenep, Kangayan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		17.748.360,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	-	60 dokumen	60 dokumen	4.086.200,00	2.872.400,00	2.872.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	8.343.300,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

		1	2	4	3																			
										286 Laporan	286 Laporan	4.086.200,00	2.872.400,00	2.872.400,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				8.343.300,00	KECAMATAN KANGAYAN	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana			100 %	100 %	26.892.600,00	40.083.300,00	40.083.300,00									31.079.475,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-		1 kali	1 kali	6.898.600,00	6.889.300,00	6.889.300,00			-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif	Jumlah pelaksanaan pemberdaryaa n desa yang dilaksanakan			10.080.000,00	KECAMATAN KANGAYAN	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	6.898.600,00	6.889.300,00	6.889.300,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				10.080.000,00	KECAMATAN KANGAYAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	undefined	-		20 desa	20 desa	19.994.000,00	33.194.000,00	33.194.000,00			-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			20.999.475,00	KECAMATAN KANGAYAN	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			126 Keluarga	126 Keluarga	19.994.000,00	33.194.000,00	33.194.000,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				20.999.475,00	KECAMATAN KANGAYAN	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana			100 %	100 %	37.510.400,00	37.510.400,00	37.510.400,00									144.369.120,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-		13 kali	13 kali	37.510.400,00	37.510.400,00	37.510.400,00			-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan			144.369.120,00	KECAMATAN KANGAYAN	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				133.350.000,00	KECAMATAN KANGAYAN	
	7	0	0	2.0	000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																2		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	10.510.400,00	10.510.400,00	10.510.400,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				11.019.120,00	KECAMATAN KANGAYAN	
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan			100 %	100 %	37.722.600,00	37.591.100,00	37.591.100,00									31.500.000,00	
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-			1 kali	1 kali	37.722.600,00	37.591.100,00	37.591.100,00			-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional			31.500.000,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0	000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																1		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	37.722.600,00	37.591.100,00	37.591.100,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				31.500.000,00	KECAMATAN KANGAYAN	
6	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan			100 %	100 %	27.888.000,00	27.888.000,00	27.888.000,00									27.888.000,00	
	7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	27.888.000,00	27.888.000,00	27.888.000,00			-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan			27.888.000,00	KECAMATAN KANGAYAN
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																3		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif				0,00	KECAMATAN KANGAYAN	

7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
	1	6	1	5		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	6.411.200,00	6.411.200,00	6.411.200,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			6.411.200,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
	1	6	1	9		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	4.691.200,00	4.691.200,00	4.691.200,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			4.691.200,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																	
	1	6	1	4		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				9 Dokumen	Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	001	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
	1	6	1	6		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	16.785.600,00	16.785.600,00	14.988.900,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			16.785.600,00	KECAMATAN KANGAYAN
7	0	0	2.0	001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
	1	6	1	7		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sumene p, Kangaya n, Ellak Laok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang harmoni dan adaptif			10.000.000,00	KECAMATAN KANGAYAN
<b>J U M L A H</b>												<b>2.195.701.220,00</b>	<b>2.129.420.159,00</b>	<b>2.288.715.882,00</b>						<b>2.391.154.711,00</b>		


  
**CAMAT KANGAYAN**  
  
**NURULLAH, S.H., M.H.**  
 Pembina

NIP. 19791028 201001 1 002

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 02 Juli 2024

  
**CAMAT KANGAYAN**  
  
**NURULLAH, S.H.,M.H.**  
Pembina  
NIP. 19791028 201001 1 002

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN KANGAYAN**  
Jln. Raya Kayuaro Nomor 01 Kangayan Sumenep  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69491

KEPUTUSAN CAMAT KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/12 /KEP/435.326/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP  
CAMAT KANGAYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kangayan Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.

Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Kangayan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 Juli 2024

-----  
  
**CAMAT KANGAYAN**  
**NURULLAH, S.H.,M.H.**  
Pembina  
NIP. 19791028 201001 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Kanyakan  
Nomor : 188/12/KEP/435.326/2024  
Tanggal : 02 Juli 2024

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Kanyakan
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Kanyakan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuanagan Kecamatan Kanyakan;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Kanyakan;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kanyakan;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kanyakan</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kanyakan;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kanyakan;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kanyakan</li></ol>

Sumenep, 02 Juli 2024

**CAMAT KANGAYAN**  
  
**NURULLAH, S.H., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19791028 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN KANGAYAN**

Jln. Raya Kayuaro Nomor 01 Kangayan Sumenep

**SUMENEP**

Kode Pos : 69491

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/22/BA/435.326/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Kangayan Kabupaten Sumenep, Tanggal 02 Juli 2024, Nomor : 188/22/KEP/435.308/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
  2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
  3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
  4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

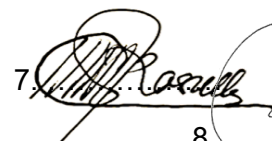
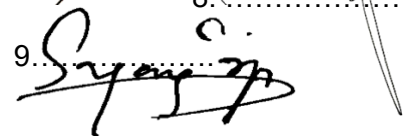
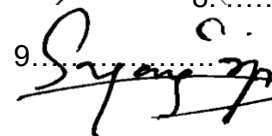
Sumenep, 02 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NURULLAH, S.H.,M.H.	Ketua	1.
2	HAMKA, S.Pi	Sekretaris	2.
3	MOHAMMAD SYAFEI, S.Pd	Anggota	3.
4	H. RAHMATULLAH, ST	Anggota	4.
5	MUTAHRI, A, Ma	Anggota	5.
6	JUHARI	Anggota	6.

- 7 MOH. RASUL  
 8 SYAMSUL ARIFIN  
 9 SITI AISYAH

- Anggota  
 Anggota  
 Anggota

7.   
 8.   
 9. 

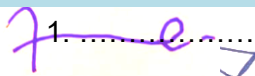
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 02 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NURULLAH, S.H.,M.H.	Ketua	1. 
2	HAMKA, S.Pi	Sekretaris	2. 
3	MOHAMMAD SYAFEI, S.Pd	Anggota	3. 
4	H. RAHMATULLAH, ST	Anggota	4. 
5	MUTAHRI, A, Ma	Anggota	5. 

- |   |                |         |
|---|----------------|---------|
| 6 | JUHARI         | Anggota |
| 7 | MOH. RASUL     | Anggota |
| 8 | SYAMSUL ARIFIN | Anggota |
| 9 | SITI AISYAH    | Anggota |

7. *[Signature]*  
8. *[Signature]*  
9. *[Signature]*

## FOTO DOKUMENTASI

PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 JULI 2024







**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
GAPURA**

## KATA PENGANTAR


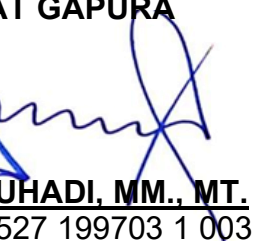
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gapura Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) Tahun ke depan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gapura Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Kecamatan Gapura Tahun 2021-2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gapura Tahun 2024, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gapura pada Tahun 2024.

Sumenep, 09 Juli 2024

  
**CAMAT GAPURA**  
  
**W. IMAM SUHADI, MM., MT.**  
NIP. 19680527 199703 1 003

## DAFTAR ISI

SAMPUL	1	
KATA PENGANTAR	3	
DAFTAR ISI	4	
BAB I	PENDAHULUAN	5
	1.1. Latar Belakang	5
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	10
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	35
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	49
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	49
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
	4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Prakiraan Maju	60
BAB V	PENUTUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gapura. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gapura dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Sumenep.

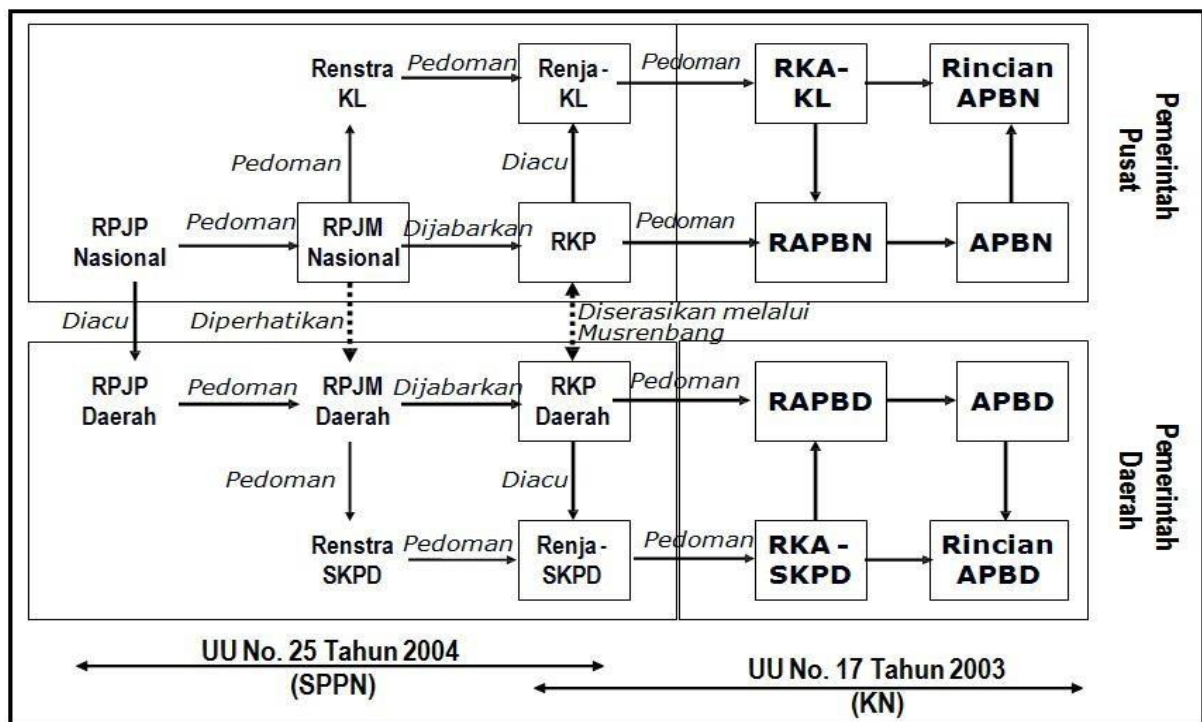
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan perubahan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan Perubahan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir Perubahan, dan

f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 Tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan telah dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura adalah :

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Prakiraan maju

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Gapura digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gapura Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022  
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep  
disajikan pada Tabel TC. 29 berikut :

**Tabel TC - 29**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.**  
**dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2022**  
**Kecamatan Gapura**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Ralisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
At capaian 1	2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4) *100	11
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN GAPURA</b>									
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	100%	<b>100,00%</b>	<b>94,54%</b>	<b>94,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Kelebihan plafon anggaran</b>
<b>7 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	8 dokumen	<b>8 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>96,61%</b>	8 dokumen	<b>7 Dokumen</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	95,70%	12 Laporan	2 Dokumen	100,00 %	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	98,13%	5.961 Jenis	1 Dokumen	100,00%	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.961 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	98,13 %	12 Laporan	1 Dokumen	100,00%	
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	99,86%	12 Laporan			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ yang disusun dengan tepat waktu	24 laporan	1 Laporan	1 Laporan	92,72%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Ralisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
At capaian 1	2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4) *100	11
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,87%	14 Bulan	14 Bulan	100,00%	Kelebihan plafon anggaran
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	94,08%	12 Laporan	2 Dokumen	100,00%	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>98,77%</b>	<b>2 jenis</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Stel	29 Stel	29 Stel	98,77%	29 Stel	29 Stel	100,00%	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>99,25%</b>	<b>5.961 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	99,06%	12 Jenis	12 Jenis	100,00%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,30%	12 bulan	12 bulan	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Ralisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
At capaian 1	2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4) *100	11
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	99,96%	12 Jenis	12 Jenis	100,00%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang- undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	81,02%	12 bulan	12 bulan	100,00%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	214 Kali	214 Kali	214 Kali	99,63%	164 Kali	164 Kali	100,00%	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>96,07%</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.01.2.08.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	92,51%	1 Unit	-	-	Kelebihan plafon anggaran (efisiensi Anggaran)
7.01.01.2.08.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	1 Unit	2 Unit	2 Unit	95,95%	2 Unit	2 Unit	100,00%	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	99,57%	2 Unit	2 Unit	100,00%	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>80,42%</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis luran yang Terbayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	80,42%	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kelebihan plafon anggaran
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>21 Unit</b>	<b>21 Unit</b>	<b>21 Unit</b>	<b>99,22%</b>	<b>15 Unit</b>	<b>21 Unit</b>	<b>100,00%</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Ralisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
At capaian 1	2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4) *100	11
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	6 Unit	6 Unit	6 Unit	99,75%	6 Unit	6 Unit	100,00%	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	96,17%	13 Unit	13 Unit	100,00%	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	99,76%	2 Unit	2 Unit	100,00%	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>	<b>98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>17 Kali</b>	<b>17 Kali</b>	<b>17 Kali</b>	<b>99,03%</b>	<b>17 Kali</b>	<b>17 Kali</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17 Kali	17 Kali	17 Kali	99,03%	17 Kali	17 Kali	100,00%	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,16 %</b>	<b>99,16 %</b>	<b>98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</b>	<b>17 Kali</b>	<b>17 Kali</b>	<b>17 Kali</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 Lembaga kemasyarakatan</b>	<b>17 Kali</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	100,00%	17 Desa	17 Desa	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Ralisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
At capaian 1	2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4) *100	11
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</b>	<b>18 Kegiatan</b>	<b>18 Kegiatan</b>	<b>18 Kegiatan</b>	<b>99,16%</b>	<b>17 Laporan</b>	<b>18 Kegiatan</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95,73%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang diberikan fasilitasi	17 Desa	17 Desa	17 Desa	99,98%	17 Desa	17 Desa	100,00%	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,65%</b>	<b>99,65%</b>	<b>98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan tertiban umum yang dilaksanakan</b>	<b>6 Kali</b>	<b>6 Kali</b>	<b>6 Kali</b>	<b>95,02%</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>6 Kali</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	99,57%	4 Kali	4 Kali	100,00%	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	91,72%	1 Kali	2 Kali	100,00%	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	<b>4 Kali</b>	<b>4 Kali</b>	<b>4 Kali</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>4 Kali</b>	<b>100,00%</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Ralisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
At capaian 1	2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4) *100	11
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100,00%	12 Kali	4 Kali	100,00%	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	99,65%	<b>99,65%</b>	98%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>99,65%</b>	1 laporan	<b>5 Kegiatan</b>	<b>100,00%</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,99%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	99,15%	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	99,81%	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, pada Tabel TC-29, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.2**  
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Kode	Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat	Keterangan
7.01.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
7.01.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan adanya Kelebihan Anggaran	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Efisiensi anggaran pada Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Efisiensi Anggaran pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.3**  
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Kode	Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Keterangan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan target kinerja berpedoman dengan regulasi	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai prosedur dan tepat waktu	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	

Kode	Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Keterangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelayakan potensi pemanfaatan barang milik daerah	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal	
7.01.11.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Forum Pimpinan Kecamatan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemerintah Kabupaten	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kerjasama dan dukungan masyarakat desa	-

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1.2, dan Tabel 2.1.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Adanya efisiensi anggaran dalam proses perencanaan semua anggaran Kegiatan sesuai dengan standart biaya;
2. Perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan target kinerja berpedoman dengan regulasi ;
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian Indikator Kinerja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep disajikan pada tabel berikut:

Tabel TC. 3.0  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Angka/nilai Target IKU,SPM IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-2022	Proyeksi Tahun Ke-		Catatan analisis
			2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	98	98	98	98	98	99%	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum adanya rekapitulasi realisasi anggaran
1.1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	100	98	98	98	98	98	99%	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum adanya rekapitulasi realisasi anggaran
1.2.	Meningkatkan fasilitasi dan kordinasi Desa	17	17	17	17	17	17	17	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum adanya rekapitulasi realisasi anggaran
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A	BB	BB	A	A	A	BB	Belum Terealisasi	Belum ada Penilaian	Belum adanya rekapitulasi realisasi anggaran
2.1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	BB	BB	A	A	A	BB	94,54%	Belum Terealisasi	Belum Terealisasi	Belum adanya rekapitulasi realisasi anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan umum masyarakat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep selama 1 (satu) Tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dan peluang dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep 1 (satu) Tahun kedepan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Lingkup	Tantangan	Peluang
1	Internal	Profesionalisme sumber daya manusia	Potensi kualitas pendidikan aparatur sangat memadai
		Pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Potensi tingkat pendidikan masyarakat sangat memadai
		Publikasi dan sosialisasi tentang program-program kegiatan pemerintah	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi cukup memadai
		Perhatian dari Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kecamatan	Sinergitas Perangkat Desa yang saling mendukung
		Dukungan Anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
		Pedoman pelaksanaan kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Kegiatan	Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
2	Eksternal	Isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi	Regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
		Perkembangan teknologi yang semakin cepat	Sumber daya manusia yang ada di masyarakat
		Dinamika masyarakat yang semakin berkembang	Kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
		Unsur legislatif yang kritis konstruktif	Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan
		Keterbukaan Informasi Publik	Potensi sumber daya alam yang memikat

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2024 supaya seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan pelayanan;
2. Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
3. Pembinaan dan Monitoring serta evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja secara rutin.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan amanat antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

#### **TUGAS DAN KEWENANGAN KECAMATAN**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (SOTK).  
pasal (2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :
  - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

- perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan kelurahan;
  - h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu :

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan, Keuangan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
  - b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
  - c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
  - d. Penyelenggaraan tata usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - e. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa :

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
  - c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta

melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;

- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu : Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

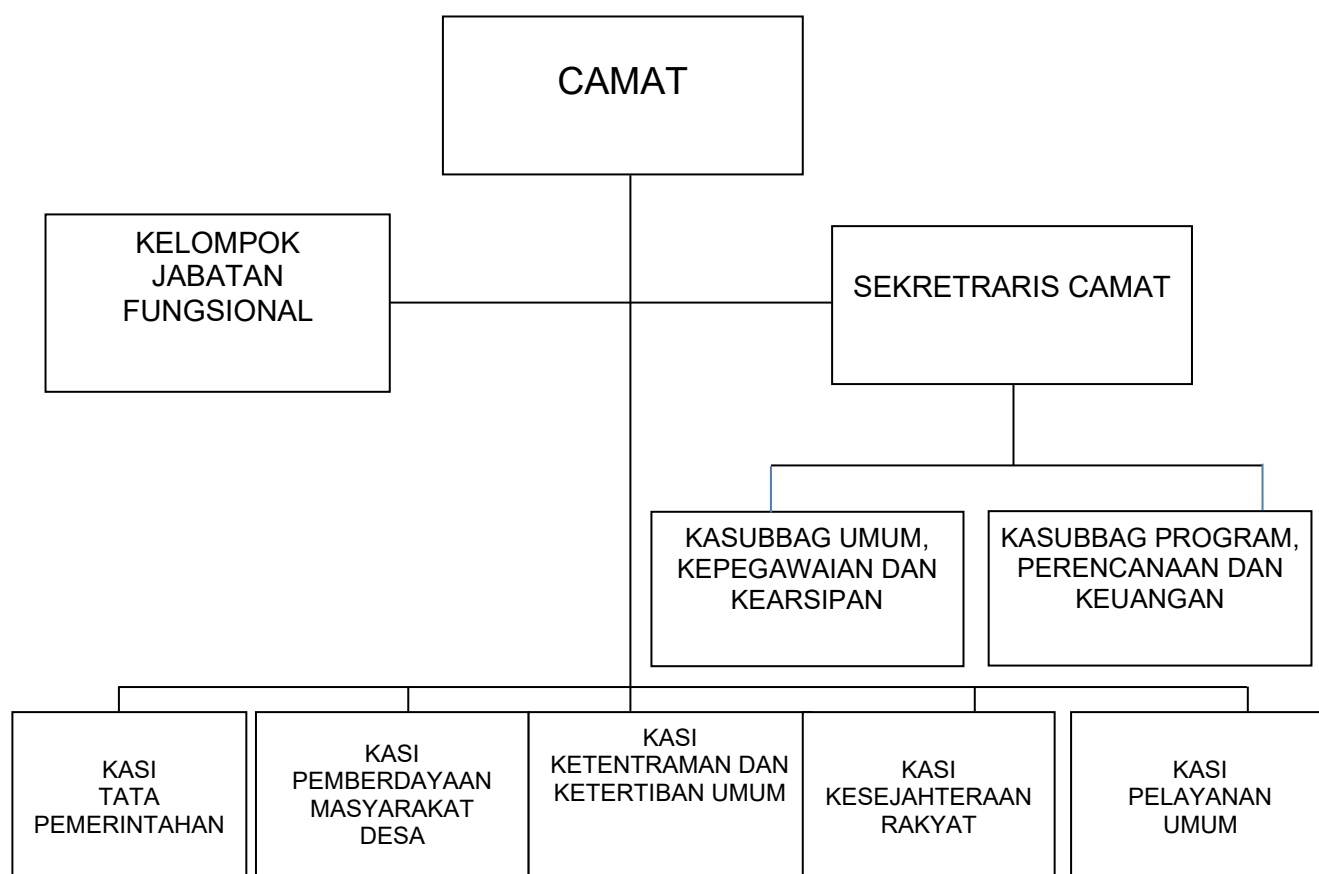
- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c. 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d. 1 (satu) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)



Maksud dari pelimpahan urusan tersebut adalah :

1. Melaksanakan pelimpahan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan criteria :
  - a. Proses sederhana;
  - b. Objek perizinan berskala kecil;
  - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks;
  - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
2. Pelayanan perizinan dimaksud dapat melalui pelayanan terpadu;
3. Pelayanan non perizinan dilaksanakan dengan kriteria :
  - a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
  - b. Kegiatan berskala kecil;

- c. Pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin.
4. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan;
4. Minimnya anggaran yang tersedia.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, antara lain:

1. Kurangnya personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, sehingga ada sebagian tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil Khususnya eselon IV b ;
2. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;

Langkah-langkah strategi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia;
2. adanya permohonan tambahan ASN khususnya eselon IVb;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun penyajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel 2.3.1. di bawah ini :

Tabel 2.3.1  
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gapura

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Sarana dan Prasarana		
	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Anggaran kegiatan yang tersedia	Tambahan anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
2	Sumber Daya Manusia		
	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah	Pembinaan dan motivasi Pegawai secara kesinambungan	Pendidikan dan Pelatihan-Pelatihan bagi Pegawai
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan	Pembinaan dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintah	Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait

Berdasarkan uraian berkaitan permasalahan utama diatas maka perlu diidentifikasi secara rinci akar permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan permasalahan utama. Berikut merupakan identifikasi akar masalah dari tiap permasalahan, dapat dilihat pada Tabel 2.3.2. di bawah ini :

Tabel 2.3.2  
Telaah Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Pelayanan dan informasi	Sarana informasi yang kurang memadai	Terbatasnya Anggaran yang disediakan
	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah	Tingkat Pendidikan ASN yang relative masih rendah yang perlu dilakukan Pelatihan dan Bimbingan Tehnis
	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan relatif rendah	Kurang sinerginya hubungan antara kecamatan dan desa serta stekholder yang ada

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gapura Tahun 2023 Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.1 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024**  
**Perangkat Daerah Kecamatan Gapura**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				2.720.263.428	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				2,856,276,599	
	<b>KECAMATAN GAPURA</b>				2.720.263.428	<b>KECAMATAN GAPURA</b>				2,856,276,599	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>2.465.047.028</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>2,588,299,379</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>3.061.200</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>3,214,260</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	510.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	535,710	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	510.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	535,710	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	510.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	535,710	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	510.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	535,710	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	510.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	535,710	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	510.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	535,710	-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>2.112.087.726</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>2,217,692,112</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gapura	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.108.930.726	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gapura	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2,214,377,262	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	3.157.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	3,314,850	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>14.398.800</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>15,118,740</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	14.398.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	15,118,740	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>6 unit</b>	<b>89.597.900</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>5812 Jenis</b>	<b>94,077,795</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.048.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	98 Paket	4,250,925	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.077.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	122 Paket	3,230,850	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	53.241.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	485 Paket	55,903,260	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.719.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	2,855,160	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan	26.512.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294 Laporan	27,837,600	-
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan</b>	<b>3 Unit</b>	<b>44.121.800</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan</b>	<b>9 Unit</b>	<b>46,327,890</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	29.286.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,750,300	Penyesuaian Kebutuhan Mendesak
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.835.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15,577,590	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>48 Laporan</b>	<b>79.770.300</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>48 Laporan</b>	<b>83,758,815</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	18.238.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	19,150,740	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	61.531.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	64,608,075	-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>23 Unit</b>	<b>122.009.302</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>15 Unit</b>	<b>128,109,767</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gapura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	33.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gapura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	35,280,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	8.040.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8,442,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.369.302	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gapura	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	84,387,767	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>14.681.600</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>15,415,680</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>10.250.400</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>10,762,920</b>	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 kegiatan	10.250.400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 kegiatan	10,762,920--	-
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>4.431.200</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>4,652,760</b>	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 kegiatan	4.431.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 kegiatan	4,652,760	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>32.124.200</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>33,730,410</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 kegiatan	4.230.200	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 kegiatan	4,441,710	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Gapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan	4.230.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Gapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan	4,441,710	-
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	1 kegiatan	7.893.600	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	1 kegiatan	8,288,280	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kegiatan	7.893.600	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 kegiatan	8,288,280	
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang dilaksanakan	120 keluarga	20.000.400	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	120 keluarga	21,000,420	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	120 keluarga	20.000.400	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 keluarga	21,000,420	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Gapura	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	12.693.200	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Gapura	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	13,327,860	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 kegiatan	12.693.200	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Laporan	13,327,860	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 kegiatan	12.693.200	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Gapura	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	13,327,860	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Gapura	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	164.800.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Gapura	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	173,040,000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Laporan	164.800.000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Gapura	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	13 Laporan	173,040,000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gapura	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	30.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Gapura	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	31,500,000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	134.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	141,540,000	-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100 %</b>	<b>30.917.400</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	<b>100 %</b>	<b>32,463,270</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19 Laporan</b>	<b>30.917.400</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Gapura</b>	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>32,463,270</b>	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 kegiatan	8.793.200	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	32,463,270	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan	7.893.600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan	9,232,860	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Desa	14.230.600	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Gapura	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Desa	8,288,280	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisilain dalam era globalisasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, Lembaga Sosial Masyarakat, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

Dalam Tahun 2024` ini terdapat program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat ditampung melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi. Dengan demikian Rencana Kerja ini tidak hanya memenuhi Satuan Kerja Perangkat Daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sumenep untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel 2.5.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5.1  
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		N	I	H	I
				L	

Untuk lebih jelasnya atas Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tersebut diatas, dapat dilihat pada Rekapitulasi Usulan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2024.



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2024 Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah " Meningkatkan SDM berkualitas, membangun karakter bangsa, mengurangi kesenjangan infrastruktur, polhukam, layanan publik dan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs,". dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota dalam RKP Tahun 2024

Tema Pembangunan Nasional	Tema Pembangunan Provinsi	Tema Pembangunan Kabupaten Sumenep
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sdm Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur Yg Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berahlak	Memantapkan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga harmonisasi sosial

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah " Memantapkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmonisasi Sosial" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas dan aksebelitas layanan dasar pendidikan	Indeks Pendidikan		
		2. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat	Indeks kesehatan		
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatkan pendapatan asli daerah	a. Meningkatnya pertumbuhan PAD		
		2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan	a. PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan b. PDRB Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor c. Indeks daya saing Pariwisata d. Incremental capital Output rasio (ICOR)		
3.	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap	a. Pengeluaran Perkapita b. Tingkat pengangguran terbuka		

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
	serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	pembangunan Daerah	c. Indek pembangunan Gender		
4.	Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya layanan public yang inovatif berbasis E- government	a. Indeks SPBE b. Nilai IKM c. Indeks Inovasi Daerah d. Indeks Profesionalisme Aparatur e. Nilai SAKIP f. Opini atas Audit BPK g. Tingkat Maturitas SPIP		
		2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrasrtuktur yang merata	a. Indeks Infrastruktur		
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Indeks kualitas lingkungan hidup		
5.	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan komoditas dan stabilitas sosial dan politik	1. Menurunnya kesenjangan	a. Indeks Gini b. Pendapatan Perkapita		
		2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat	a. Indeks Stabilitas		

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
		3. Meningkatnya solidaritas social di masyarakat	a. Indeks solidaritas sosial		
		4. Terwujudnya nilai - nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat	a. Indeks toleransi		
6.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	1. Meningkatnya layanan public yang inovatif berbasis e-goverment	a. Indek SPBE b. Nilai Sakip c. Nilai IKM d. Indeks Profesionalisme aparaturn e. Opini atas audit BPK f. tingkat Maturitas SPIP		

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gapura serta tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, maka rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2024
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87.30
.		Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	17
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	A
	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Target sasaran PD Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87.30
1.1.	Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	17
1.2.	Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	A
		Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%

### 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Prakiraan Maju

Dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep disusun dan diselaraskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 agar semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki sasaran yang sama. Pada Tahun 2024 ini program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep terdiri dari 6 (enam) Program, 15 (Lima belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan, secara terinci dapat dilihat dalam Tabel 3.3.1. sebagai berikut :

# Tabel 3.3.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Gapura

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								2,856,276,599		
	<b>KECAMATAN GAPURA</b>								2,856,276,599		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								2,588,299,379		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								3,214,260		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
			Dokumen DPA-SKPD	daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Laporan		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2,077,687,123</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	27 Orang/ Bulan		2,077,687,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	20 laporan		3.157.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>15,118,740</b>		

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Jenis layanan Kepegawaian	Kecamatan Gapura	100%	60 Paket		15,118,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>161,008,620</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	15 Paket		4,250,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	10 Paket		3,230,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	26 Paket		58,903,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	4700 paket		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	24 Dokumen		2,855,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	204 Laporan		27,837,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
							18 unit		60.750.300		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	14 Unit		30,750,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	4 Unit		30,000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
									83,758,815		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gapura	100%	12 Laporan		19,150,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gapura	100%	12 Laporan		64,608,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
									122.009.302		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	6 Unit		33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	12 Unit		8.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Unit	20 Unit	80.369.302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>				<b>100%</b>	<b>2 kegiatan</b>		<b>-</b> <b>15,415,680</b>		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 kegiatan		<b>10,762,920</b>		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan	-	10,762,920--	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>			<b>100%</b>	<b>1 kegiatan</b>		<b>4,652,760</b>		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan	-	4,652,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		Kecamatan									
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>							<b>33,730,410</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</b>						<b>4,441,710</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		4,441,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</b>						<b>8,288,280</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersusunnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gapura	100%	1 Kegiatan		8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan</b>						<b>21,000,420</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tersusunnya Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kecamatan Gapura	100%	120 Keluarga		21,000,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>							<b>12.693.200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>							<b>12.693.200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gapura	100%	2 Laporan		12.693.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>								<b>66.300,000</b>		

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>										
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>66.300,000</b>		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gapura	100%	1 Kegiatan		31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gapura	100%	12 Dokumen		34.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>							<b>66,463,270</b>		
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>							<b>66,463,270</b>		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan		32,463,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
			Desa								
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan		9,232,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disertai dengan indicator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1. yaitu sebagai berikut :

**REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN ENAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NAMA PROGRAM KEGIATAN /SUB KEGIATAN PRIORITAS</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>	<b>KETERAN GAN</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	535,710	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	535,710	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	535,710	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	535,710	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	535,710	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	535,710	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2,077,687,123	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.157.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15,118,740	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4,250,925	

	Bangunan Kantor				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	3,230,850	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	58,903,260	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	6,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	2,855,160	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	27,837,600	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	30,750,300	
	Pengadaan Mebel	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	30,000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	19,150,740	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	64,608,075	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	33.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	8.040.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	program penunjang pemerintahan kabupaten/kota	urusan daerah	80.369.302	

	Kantor dan Bangunan Lainnya	kabupaten/kota		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<b>program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	10,762,920	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4,652,760	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	4,441,710	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	8,288,280	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	21,000,420	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<b>program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	12.693.200	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	<b>program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	31,500,000	

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		34.800.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		32,463,270	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		34.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		9,232,860	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		8,288,280	

**Tabel 4.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Gapura**

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								<b>2,856,276,599</b>		
	<b>KECAMATAN GAPURA</b>								<b>2,856,276,599</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>2,588,299,379</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>3,214,260</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Laporan		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2,077,687,123</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	27 Orang/ Bulan		2,077,687,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	20 laporan		3.157.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>15,118,740</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Jenis layanan Kepegawaian	Kecamatan Gapura	100%	60 Paket		15,118,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>161,008,620</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	15 Paket		4,250,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	10 Paket		3,230,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	26 Paket		58,903,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	4700 paket		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	24 Dokumen		2,855,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	204 Laporan		27,837,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>18 unit</b>		<b>60.750.300</b>		

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	14 Unit		30,750,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	4 Unit		30,000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>83,758,815</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gapura	100%	12 Laporan		19,150,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gapura	100%	12 Laporan		64,608,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>122.009.302</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	6 Unit		33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	12 Unit		8.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		kantor									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Unit	20 Unit	80.369.302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>				<b>100%</b>	<b>2 kegiatan</b>		<b>- 15,415,680</b>		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 kegiatan		<b>10,762,920</b>		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan	-	10,762,920--	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>			<b>100%</b>	<b>1 kegiatan</b>		<b>4,652,760</b>		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan	-	4,652,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>							<b>33,730,410</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</b>						<b>4,441,710</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		4,441,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</b>						<b>8,288,280</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersusunnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gapura	100%	1 Kegiatan		8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan</b>	<b>persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang</b>	<b>Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan</b>						<b>21,000,420</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi</b>	

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Kelurahan	terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan							Umum	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tersusunnya Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kecamatan Gapura	100%	120 Keluarga		21,000,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>							<b>12.693.200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>							<b>12.693.200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gapura	100%	2 Laporan		12.693.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>66.300,000</b>		

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>66.300,000</b>		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gapura	100%	1 Kegiatan		31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gapura	100%	12 Dokumen		34.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>							<b>66,463,270</b>		
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>							<b>66,463,270</b>		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan		32,463,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan		9,232,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep  
Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025

Kantor Kecamatan Gapura

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	UNSUR KEWILAYAHAN								2,680,897,035					2.814.941.887
	KECAMATAN GAPURA								2,680,897,035					2.814.941.887
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.468.773.335					2.592.212.002
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,214,260					3,374,973
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	562,496
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	562,496
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan evalusi kinerja perangkat	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	100%	562,496

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
				daerah								kantor		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	562,496
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	1 Dokumen		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	562,496
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evalulasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Laporan		535,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	562,496
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2.184.886.329</b>					<b>2.294.130.646</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	27 Orang/ Bulan		2,077,687,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2,181,571,479
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Gapura	100%	20 laporan		3.157.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	3,314,850

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>15,118,740</b>					<b>15,874,677</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Jenis layanan Kepegawaian	Kecamatan Gapura	100%	27 Paket		15,118,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	15,874,677
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>103.077.795</b>					<b>108.231.685</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	15 Paket		4,250,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	4,463,471
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	10 Paket		3,230,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	3,392,393
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	26 Paket		58,903,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	61,698,423
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	4700 paket		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	6,300,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	24 Dokumen		2,855,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	2,997,918

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gapura	100%	204 Laporan		27,837,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	29,229,480
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>18 unit</b>		<b>60.750.300</b>					<b>63,787,815</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	4 Unit		30,750,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	32,287,815
	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	14 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	31,500,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>83,758,815</b>					<b>87,946,756</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gapura	100%	12 Laporan		19,150,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		20,108,277
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan jasa	Kecamatan Gapura	100%	12 Laporan		64,608,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	67,838,479
														-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>122.009.302</b>					<b>128,109,767</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	6 Unit		33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	35,280,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	12 Unit		8.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	8,442,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kecamatan Gapura	100%	2 Unit		80.369.302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	84,387,767
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>				<b>100%</b>	<b>2 kegiatan</b>		<b>15,415,680</b>					<b>16,186,464</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 kegiatan		<b>10,762,920</b>					11,301,066
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan	-	10,762,920--	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	11,301,066

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100%	1 kegiatan		4,652,760					4,885,398
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan	-	4,652,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	4,885,398
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan							33,730,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		35,416,931
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan						4,441,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		4,663,796
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		4,441,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100%	4,663,796
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan						8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam		8,702,694

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		pembangunan di kecamatan								Umum		pembangunan di kecamatan		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersusunnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gapura	100%	1 Kegiatan		8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		8,702,694
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan						21,000,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		22,050,441
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tersusunnya Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Kecamatan Gapura	100%	120 Keluarga		21,000,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100%	22,050,441
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana							12.693.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	13,327,860
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana							12.693.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	13,327,860

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Gapura	100%	2 Laporan		12.693.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	13,327,860
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>66.300,000</b>					<b>69,615,000</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>66.300,000</b>					<b>69,615,000</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gapura	100%	1 Kegiatan		31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	33,075,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Gapura	100%	12 Dokumen		34.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	36,540,000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan</b>							<b>66,463,270</b>					<b>69,786,434</b>


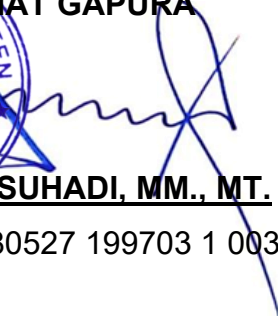
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
		pembekalan												
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>							<b>66,463,270</b>					<b>69,786,434</b>
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan		32,463,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	34,086,434
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	35,700,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	1 kegiatan		9.232.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	9,694,503
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersusunnya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gapura	100%	17 kegiatan		8,288,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	8,702,694

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Perubahan untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Sumenep, 09 Juli 2024

  
**CAMAT GAPURA**  
  
**IR. MAM SUHADI, MM., MT.**  
NIP. 19680527 199703 1 003



RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RKP)

TAHUN 2024

# **KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP**

**Jl. Raya Kaliangget No. 01 Telp. (0328) 663538**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kalianget pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, 12 Juni 2024

  
**CAMAT KALIANGET**  
  
**HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19840118 200412 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	9
2.1. Faktor Pendorong.....	15
2.2. Faktor Penghambat.....	15
2.3. Tindak Lanjut.....	15
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	16
BAB IV PENUTUP .....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	26
1. Keputusan Camat Kalianget, Nomor 188/21/KEP/435.303/2024, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.....	27
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget.....	31
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget.....	32
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Penata Tk. Ian masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatukomitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Kalianget telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-

- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
  15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kalianget dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Dearah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Untuk melakukan penyesuaian rencana Program dan Kegiatan karena adanya pergeseran dan penambahan anggaran serta penyesuaian kinerja yang tertuang pada RKPD Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

### **BAB II   Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

### **BAB III   Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

### **BAB IV   Penutup**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat

##### ➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Target : 6 Dokumen      Realisasi : 4 Dokumen      Capaian : 66,67%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Target : 14 Laporan      Realisasi : 8 Laporan      Capaian : 57,14%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Target : 2 Jenis      Realisasi : 2 Jenis      Capaian : 100%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target : 72 Jenis      Realisasi : 36 Jenis      Capaian : 50,00%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target : 8 Unit      Realisasi : 2 Unit      Capaian : 25,00%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 48 Laporan      Realisasi : 24 Jenis      Capaian : 50,00%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Target : 20 Unit      Realisasi : 11 Unit      Capaian : 55,00%

#### b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan

##### ➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Target : 2 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 50,00%

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Target : 1 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 100,00%
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
Target : 1 laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 100%
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Target : 3 Laporan      Realisasi : 2 Laporan      Capaian : 66,67%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 2 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 50,00%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Target : 12 Laporan      Realisasi : 6 Laporan      Capaian : 50,00%
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Target : 2 Laporan      Realisasi : 1 Laporan      Capaian : 50,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

Tabel 2.1  
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENCANA KERJA KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP  
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan 2 Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8x100%	11=7+9	12=11/6x100%	13
		7	UNSUR KEWILAYAHAN									
		7.01	KECAMATAN									
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	51,18%	51,18%	51,18%	51,18%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	38 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67%	10	26,32%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2		
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	84 Laporan	## Laporan	14 Laporan	8 Laporan	57,14%	22	26,19%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			280 Orang/bulan	160 Orang/bulan	57,14%	160		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	11 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	4	36,36%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			60 Paket	60 Paket	100,00%	60		

		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	741 Jenis	## Jenis	72 Jenis	36 Jenis	50,00%	108	14,57%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			98 Paket	53 Paket	54,08%	53		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			122 Paket	56 Paket	45,90%	56		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			485 Paket	231 Paket	47,63%	231		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4800 Paket	2400 Paket	50,00%	2400		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			13 Dokumen	6 Dokumen	46,15%	6		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			294 Laporan	151 Laporan	51,36%	151		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	84 Unit	5 Unit	8 Unit	2 Unit	25%	7	8,33%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Paket	0 Paket	0,00%	-		
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	0,00%	-		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			3 Unit	2 Unit	66,67%	2		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	288 Jenis	## Jenis	48 Laporan	24 Jenis	50,0%	72	25,00%	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	6 Laporan	50,0%	6		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	18 Laporan	50,0%	18		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	217 Unit	## Unit	20 Unit	11 Unit	55,0%	32	14,75%	KEC. KALIANGET
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	4 Unit	66,67%	4		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	6 Unit	50%	6		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	1 Unit	50%	1		

2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	KEC. KALIANGET
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50%	6	10,00%	KEC. KALIANGET
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal			12 Laporan	6 Laporan	50,00%	6		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Kepastian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	0		2 Laporan	1 Laporan	50,00%	1	50%	KEC. KALIANGET
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	1		
3	Meningkatkan Fasilitasi dan Kordinasi Desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	KEC. KALIANGET
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2	33,33%	KEC. KALIANGET
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	7		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2	25,00%	KEC. KALIANGET
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1		
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	16 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	66,67%	6	37,50%	KEC. KALIANGET
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			180 Keluarga	120 Keluarga	66,67%	120		

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	KEC. KALIANGET
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	82 Laporan	## Laporan	14 Laporan	7 Laporan	50,00%	20	24,39%	KEC. KALIANGET
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%	6		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan	1 Laporan	50,00%	1		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	45,15%	45,15%	45,15%	45,15%	KEC. KALIANGET
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	66 Laporan	## Laporan	13 Laporan	6 Laporan	46,15%	19	28,79%	KEC. KALIANGET
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan			1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	-		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di			12 Dokumen	6 Dokumen	50,00%	6		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	KEC. KALIANGET
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	3	6,38%	KEC. KALIANGET
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	1		

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

2.1. Faktor Pendorong Keberhasilan

- a. SDM yang berkualitas
- b. Adanya motivasi dari pimpinan

2.2. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya SDM
- b. Perencanaan yang kurang matang

2.3. Tindak lanjut

- a. Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan.
- b. lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Kalianget Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Adapun pergeseran anggaran program dan kegiatan di Kecamatan Kalianget dapat dilihat pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**KECAMATAN KALIANGET KAB. SUMENEP**  
**TAHUN 2024**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Kecamatan Kalianget							2.444.500.158,00	2.444.499.958,00	2.673.556.925,00								2.885.131.899,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.444.500.158,00	2.444.499.958,00	2.673.556.925,00								2.885.131.899,00	
	7	0			KECAMATAN							2.444.500.158,00	2.444.499.958,00	2.673.556.925,00								2.885.131.899,00	
1	7	0	0							100 %	100 %	2.310.478.558,00	2.310.597.458,00	2.531.528.825,00								2.690.981.205,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor																	
	7	0	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			12 Laporan 6 Dokumen	12 Laporan 6 Dokumen	4.530.500,00	4.649.400,00	4.649.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Administrasi Penyusunan Renstra, RKA, DPA, LKPJ dan LPPD			5.395.388,00	KECAMATAN KALIANGET
	7	0	0	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.236.900,00	2.821.800,00	2.821.800,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				2.399.800,00	KECAMATAN KALIANGET
	7	0	0	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	551.200,00	541.600,00	541.600,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif				581.123,00	KECAMATAN KALIANGET
	7	0	0	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	510.400,00	455.600,00	455.600,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			525.000,00	KECAMATAN KALIANG ET	
	7	0	0	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.232.000,00	830.400,00	830.400,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.889.465,00	KECAMATAN KALIANG ET	
	7	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			12 Laporan 14 Laporan	12 Laporan 14 Laporan	1.844.500.158,00	1.844.500.158,00	2.063.557.126,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Administrasi Keuangan SKPD dan Aparatur Sipil Negara		2.221.986.360,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	1.844.500.158,00	1.844.500.158,00	2.063.557.126,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.221.986.360,00	KECAMATAN KALIANG ET	
	7	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	-			2 Jenis 3 Jenis	2 Jenis 3 Jenis	37.011.825,00	37.011.825,00	37.011.825,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara Kecamatan		28.113.750,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	37.011.825,00	37.011.825,00	37.011.825,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			28.113.750,00	KECAMATAN KALIANG ET	
	7	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	-			6 Jenis 72 Jenis	6 Jenis 72 Jenis	231.290.700,00	231.290.700,00	229.940.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan		172.291.783,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				98 Paket	98 Paket	3.308.800,00	3.308.800,00	3.308.800,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.400.500,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		1	1			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				122 Paket	122 Paket	5.026.900,00	5.026.900,00	5.026.900,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			551.440,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
		1	1			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				485 Paket	485 Paket	57.939.000,00	57.939.000,00	56.589.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			68.545.953,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
		1	1			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4800 Paket	4800 Paket	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			6.681.150,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
		1	1			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	32.556.000,00	32.556.000,00	32.556.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			36.567.720,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		1	1			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				294 Laporan	294 Laporan	126.400.000,00	126.400.000,00	126.400.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			56.545.020,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	-		11 Unit	11 Unit	39.191.325,00	39.191.325,00	39.191.325,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Sarana dan Prasarana Operasional Aparatur Sipil Negara Kecamatan		96.813.745,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
		1	1			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.765.557,00	10.765.557,00	10.765.557,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			22.876.875,00	KECAMATAN KALIANG ET

	7	0	0	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		1	1			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.610.720,00	2.610.720,00	2.610.720,00	Kab. Sumenep, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			36.926.000,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		1	1			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	25.815.048,00	25.815.048,00	25.815.048,00	Kab. Sumenep, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			37.010.870,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	-		1 Kali	1 Kali	36.047.200,00	36.047.200,00	36.047.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Kecamatan Sebagai Pengung Sumber Daya		42.938.436,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		1	1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.784.000,00	15.784.000,00	15.784.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.942.789,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		1	1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	20.263.200,00	20.263.200,00	20.263.200,00	Kab. Sumenep, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			21.995.647,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang dipelihara	-		15 Unit	15 Unit	117.906.850,00	117.906.850,00	121.131.249,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Sarana dan Prasarana Operasional Aparatur Sipil Negara Kecamatan		123.441.743,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		1	1			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	40.900.000,00	32.980.000,00	32.980.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			41.068.125,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		1	1			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.120.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.894.133,00	KECAMATAN KALIANG ET



7	0	0	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-			1 Laporan 21 Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan 21 Lembaga Kemasyarakatan	9.588.700,00	9.588.700,00	9.588.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		11.435.020,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.588.700,00	9.588.700,00	9.520.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.435.020,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	-			1 Laporan	1 Laporan	6.698.100,00	6.698.100,00	6.698.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat		7.386.750,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	6.698.100,00	6.698.100,00	6.698.100,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.386.750,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang dilaksanakan	-			4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah Dan Elemen Masyarakat		4.762.800,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.05	0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																	
						Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.762.800,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	-			4 Laporan	4 Laporan	20.000.100,00	20.000.100,00	20.000.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	TP-PKK Kecamatan dan Desa		26.250.000,00	KECAMATAN KALIANG ET
7	0	0	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				60 Keluarga	60 Keluarga	20.000.100,00	20.000.100,00	20.000.100,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			26.250.000,00	KECAMATAN KALIANG ET

4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana			100 %	100 %	20.461.600,00	20.342.500,00	19.292.500,00						74.389.020,00	
	7	0	0	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-		13 Laporan14 Laporan	13 Laporan14 Laporan	20.461.600,00	20.342.500,00	19.292.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat	74.389.020,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	13.170.000,00	13.170.000,00	13.170.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		53.389.020,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan	2 Laporan	7.291.600,00	7.172.500,00	6.122.500,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		21.000.000,00	KECAMATAN KALIANG ET
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan			100 %	100 %	57.029.000,00	57.029.000,00	57.029.000,00						31.500.000,00	
	7	0	0	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-		13 Laporan 1 Kegiatan	13 Laporan 1 Kegiatan	57.029.000,00	57.029.000,00	57.029.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat	31.500.000,00	KECAMATAN KALIANG ET
	7	0	0	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	25 Orang	4.058.400,00	4.058.400,00	4.058.400,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.500.000,00	KECAMATAN KALIANGET
	7	0	0	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	52.970.600,00	52.970.600,00	52.970.600,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			21.000.000,00	KECAMATAN KALIANGET
6	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan				100 %	100 %	9.806.700,00	9.806.700,00	19.806.700,00							21.525.000,00	
	7	0	0	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			2 Dokumen 4 Laporan	2 Dokumen 4 Laporan	9.806.700,00	9.806.700,00	9.806.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa		21.525.000,00	KECAMATAN KALIANGET
	7	0	0	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	9.806.700,00	9.806.700,00	9.806.700,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Kalianget Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.025.000,00	KECAMATAN KALIANGET
	7	0	0	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Kalianget, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.500.000,00	KECAMATAN KALIANGET
<b>J U M L A H</b>													<b>2.444.500.158,00</b>	<b>2.444.499.958,00</b>	<b>2.673.556.925,00</b>						<b>2.885.131.899,00</b>		



## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 10 Juli 2024

  
**CAMAT KALIANGET**  
  
**HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19840118 200412 1 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN KALIANGET**  
Jl. Raya Kalianget No. 01 Telp. (0328) 663538  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69471

KEPUTUSAN CAMAT KALIANGET KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/20/KEP/435.303/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

CAMAT KALIANGET

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kalianget Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Kalianget.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 03 Juli 2024



**HAKKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP.**

Penata Tk. I

NIP. 19840118 200412 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kalianget  
Nomor :  
188/20/KEP/435.303/2024  
Tanggal : 03 Juli 2024

-----

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Kalianget
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Kalianget
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kalianget;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Kalianget;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kalianget;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalianget</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalianget;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kalianget;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kalianget</li></ol>

Sumenep, 03 Juli 2024



**HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP.**

Penata Tk. I

NIP. 19840118 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN KALIANGET**  
Jl. Raya kalianget No. 01 Tlp. (0328) 663538  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69471

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/20/BA/435.303/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Kalianget Kabupaten Sumenep, Tanggal 03 Juli 2024, Nomor : 188/20/KEP/435.303/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 03 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH. S.STP.	Ketua	1.
2	RB.M.NUR ARIFIN ,SH, MH	Sekretaris	2.
3	MOHAMMAD TABRANI	Anggota	3.
4	MEIDARTA, S.AN	Anggota	4.
5	RB. HIDAYATUR RAHMAN, S.Sos	Anggota	5.
6	SYAMSUL ARIFIN, S.AN	Anggota	6.
7	HARIYANTO, S.AN	Anggota	7.
8	HAIRUL ANWAR, S.Kom	Anggota	8.

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 03 Juli 2024

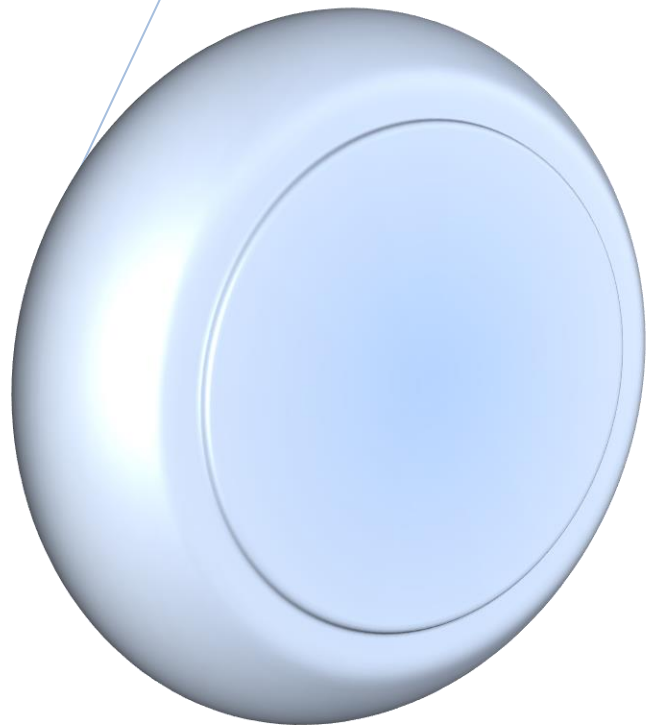
TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH. S.STP.	Ketua	1.
2	RB.M.NUR ARIFIN ,SH, MH	Sekretaris	2.
3	MOHAMMAD TABRANI	Anggota	3.
4	MEIDARTA, S.AN	Anggota	4.
5	RB. HIDAYATUR RAHMAN, S.Sos	Anggota	5.
6	SYAMSUL ARIFIN, S.AN	Anggota	6.
7	HARIYANTO, S.AN	Anggota	7.
8	HAIRUL ANWAR, S.Kom	Anggota	8.

**PHOTO DOKUMENTASI**  
PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI RABU, TANGGAL 03 Juli 2024



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024



**KECAMATAN DUNGKEK  
KABUPATEN SUMENEP**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.3.1 Maksud .....	8
1.3.2 Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024 .....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	28
a. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2024 .....	28
b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2024 .....	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD .....	33
3.3 Program dan Kegiatan .....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....	41
BAB V PENUTUP .....	58

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja P-SKPD) untuk Tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja P-SKPD) Tahun 2024 Kecamatan Dungkek tersebut sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan dalam rangka kesesuaian usulan program kegiatan antara yang bersifat Button Up dan Top Down yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka ditindaklanjuti dengan adanya Surat Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep tentang Permintaan Rancangan Renja SKPD tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan Data Rancangan Renja SKPD Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 Kepada Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

Bahwa buku ini disusun sehubungan akan direncanakannya program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024, dengan harapan dapat memberikan informasi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang aspiratif dalam menunjang kepentingan, kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Dungkek.

Akhirnya Kami menyampaikan ucapan terima kasih semoga dapat bermanfaat.

Sumenep, Agustus 2024



**KECAMATAN DUNGKEK**  
**QADIR Bedy Iskandar, S.H., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19730320 199503 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULU**

### **AN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep di Kecamatan Dungkek dalam rangka mencapai Sumenep “Unggul, Mandiri dan Sejahtera” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah per-tahun. Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh*

*pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”.*

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

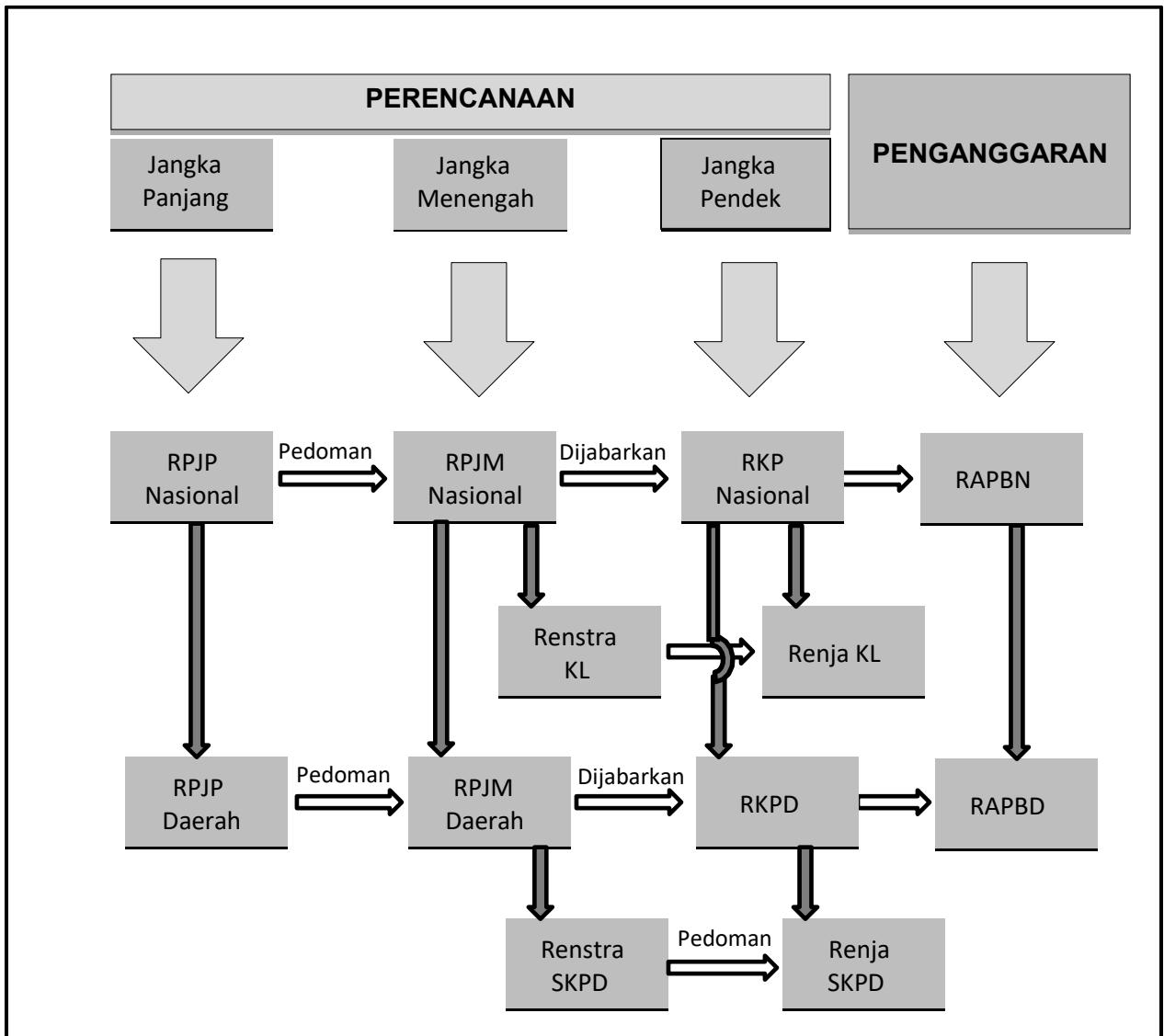
Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.

**Bagan 1.1**

**Kaitan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**



**1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja P-SKPD) Kecamatan Dungkek Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Pada dasarnya maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dungkek Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan, program dan kegiatan berserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan, sebagai dasar dan acuan satuan unit kerja perangkat daerah Kecamatan Dungkek dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun secara khusus maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Dungkek Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Dungkek pada Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Dungkek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
4. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Dungkek yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2024;
5. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi anggaran pembangunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Dungkek;
4. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Kecamatan Dungkek;

5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Kecamatan serta indikator kinerja Kecamatan Dungkek yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Dungkek Tahun 2024 adalah sebagaiberikut

:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dungkek Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2024 dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 yang sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan, Analisis Kinerja Pelayanan, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dungkek.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab III ini memuat mengenai Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dungkek serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab IV ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Dungkek Tahun 2024.

**BAB V PENUTUP**

Terakhir Bab V ini berisi uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran dan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Kecamatan Dungkek Tahun 2024.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Dungkek mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.280.917.845,00 dan dialokasikan untuk Belanja Operasional Rp. 2.280.917.845,00.

Untuk penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu ditentukan indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian. Adapun program, kegiatan serta indikator Kerja yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

NO	URUSAN	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET / SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET / SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET / SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	KE T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KECAMATAN	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	451.100	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	584.700	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	569.900	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	569.700	

*Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	454.900		
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	289.800		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.618.329.611		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	8.091.900		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.083.900		
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.297.400		
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.560.000		

*Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.089.800	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.495.100	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	6 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	51.014.000	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	3 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	17.080.000	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	36.014.443	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.000.985	

*Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.600.000	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10.320.000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	93.890.446	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	27.160.000	

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8.338.700	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembanguna n di kecamatan	100%	Pemberdayaa n dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Desa dan Kelurahan	8 Keluar ga	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	4 Keluarga	20.786.400	
										Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	264 Keluar ga	2.528.000	

*Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2 Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14.833.600	
										Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.779.200	

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	66.573.000		
										Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	137.200.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah n desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiat an	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	4.060.000		

*Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

										Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	4.188.000	
										Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	4.060.000	
												<b>Jumlah</b>	<b>2.280.917.845</b>	

Sedangkan perkiraan capaian pelaksanaan Renja SKPD pada Tahun Anggaran 2024 di Satuan kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dungkek dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.280.917.845,00 dialokasikan untuk Belanja Operasional Rp. 2.280.917.845,00

Untuk penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu ditentukan indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian. Adapun program, kegiatan serta indikator Kerja yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 sebagai mana berikut :

Renja OPD Kecamatan Dungek Tahun 2024

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

NO	URUSAN	KINERJA URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET / SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET/ SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET/ SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KECAMATAN	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	416.500	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	581.700	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	569.700	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	569.700	

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	454.800		
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	269.500	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.766.428.489	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	17.092.800	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.879.100	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.297.000	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.560.000	

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.063.300		
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.823.200		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	5 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	57.953.500	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	3 Jenis	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	6.440.455	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.000.985	

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.600.000	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10.640.000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	93.889.860	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	35.840.000	

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	9.398.300
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100%	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Desa dan Kelurahan	546 Keluarga	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	486 Keluarga	20.780.400
										Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	4.925.500

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2 Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14.868.250	
										Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.488.250	

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	69.691.700		
										Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	120.600.000		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	4.060.000		
										Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	8 Dokumen	4.185.500		

*Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

											Partisipatif			
										Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	4.060.000	
												Jumlah	2.280.917.845,-	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

### a) Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Agar adanya tolak ukur yang jelas serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang ingin dicapai, maka dari sasaran dan indikator sasaran tersebut ditetapkan rencana tingkat capaian (target), realisasi dan persentase pencapaian dari rencana tingkat capaian, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dalam rangkameningkatkan daya beli masyarakat miskin, indikator sasarannya terdiri atas :
  - a) Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan
  - b) Berkembangnya desa mandiri
  - c) Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan sinergitas pemerintah daerah, indikator sasarannya terdiri atas :
  - a) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
  - b) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
  - c) Meningkatnya disiplin aparatur
  - d) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemerintahdesa
  - e) Terlaksananya sinergitas perencanaan dan pembangunan daerah

### b) Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam Analisis Kinerja mengukur Pencapaian Sasaran Kecamatan DungkekTahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran pertama : Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat
  - Kebijakan : a. Pemeliharaan fasilitas pelayanan  
b. Pelayanan prima kepada masyarakat
  - Program : a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
  - Kegiatan : a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2. Sasaran Kedua : Terciptanya koordinasi dan kemitraan sinergis antar stakeholders dalam menunjang pembangunan Desa.
- Kebijakan : a. Pemeliharaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat  
b. Pelayanan prima kepada masyarakat Desa
- Program : a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
b. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
d. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (PATEN)  
b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
d. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan perkiraan Analisis Kinerja dalam mengukur Pencapaian Sasaran Kecamatan Dungkek Tahun 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran pertama : Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat
- Kebijakan : a. Pemeliharaan fasilitas pelayanan  
b. Pelayanan prima kepada masyarakat
- Program : a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- Kegiatan : a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Sasaran Kedua : Terciptanya koordinasi dan kemitraan sinergis antar stakeholders dalam menunjang pembangunan Desa.
- Kebijakan : a. Pemeliharaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat  
 b. Pelayanan prima kepada masyarakat Desa Program
- : a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
 b. Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum  
 c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
 d. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (PATEN)  
 b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
 d. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

#### MATRIKS ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

TUJUAN	SASARAN	ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Rendahnya Kesadaran Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat dalam Membangun Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
			Sub Kegiatan : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

		Sub Kegiatan : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
<p><b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel</b></p>	<p><b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Belum optimal</b></p>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Dan Untuk kegiatan di Kecamatan Dungkek dalam mencapai sasaran mendapat masalah atau kendala antara lain :

- a. Keterbatasan dan Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relative masih kurang.
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi,  
Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Mensosialisasikan program-program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi Kecamatan Dungkek dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal.
2. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait .

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah " *Meningkatkan SDM berkualitas, membangun karakter bangsa, mengurangi kesenjangan infrastruktur, polhukam, layanan publik dan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs* " dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi serta  
Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota dalam RKP Tahun 2024

Tema Pembangunan Nasional	Tema Pembangunan Provinsi	Tema Pembangunan Kabupaten/Kota
<i>Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</i>	<i>Peningkatan daya saing SDM dan percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Transformasi ekonomi inklusif menuju masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berahlak.</i>	<i>Memantapkan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga harmonisasi sosial</i>

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dungkek

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah " *Memantapkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmonisasi Sosial*" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	1. Meningkatkan kualitas dan aksebelitas layanan dasar pendidikan	Indeks Pendidikan		
		2. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat	Indeks kesehatan		
2.	Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatkan pendapatan asli daerah	a. Meningkatnya pertumbuhan PAD		
		2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector unggulan	a. PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan b. PDRB Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor c. Indeks daya saing Pariwisata d. Incremental capital Output rasio (ICOR)		
3.	Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerjaserta peningkatan keterampilan wirausahawan muda	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan Daerah	a. Pengeluaran Perkapita b. Tingkat pengangguran terbuka c. Indek pembangunan Gender		

Renja OPD Kecamatan Talango Tahun 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
4.	Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yangberwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan layanan public yang inovatif berbasis E- goverment	a. Indeks SPBE b. Nilai IKM c. Indeks Inovasi Daerah d. Indeks Profesionalisme Aparatur e. Nilai SAKIP f. Opini atas Audit BPK g. Tingkat Maturitas SPIP		
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrasrtuktur yang merata	a. Indeks Infrastruktur		
		3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Indeks kualitas lingkungan hidup		
5.	Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan komoditas dan stabilitas sosial dan politik	1. Menurunnya kesenjangan	a. Indeks Gini b. Pendapatan Perkapita		
		2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat	a. Indeks Stabilitas		
		3. Meningkatnya solidaritas social di masyarakat	a. Indeks solidaritas sosial		
		4. Terwujudnya nilai - nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat	a. Indeks toleransi		
6.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	1. Meningkatkan layanan public yang inovatif berbasis e-goverment	a. Indek SPBE b. Nilai Sakip c. Nilai IKM d. Indeks Profesionalisme aparatur e. Opini atas audit BPK f. tingkat Maturitas SPIP		

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah	100 100 100
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	100
		Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai saki 2. Opini atas Audit BPK 3. Tingkat Maturitas SPIP	B 100 100

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dungkek serta tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, maka rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Dungkek**

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Target Tahun 2024
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87.45
1.1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	87.45
1.2.	Meningkatkan fasilitasi dan kordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB
2.1.	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja perangkat daerah	100%

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dungkek Tahun 2024 memuat program dan kegiatan yang tercantum dalam tabel berikut ini :

**RANCANGAN AWAL RENJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2024**

**USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKATIF ANGGARAN**

NO	KODE (PN/ PP)	RPJMN 2020-2024			RKPD 2024					
		PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PN (PRIORITAS NASIONAL)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Layanan Publik								
	PP (PROGRAM PRIORITAS)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	80	Unsur Kewilayahan/ Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.769.600	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.110.000	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.993.900	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.008.400	

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	454.800	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.500	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.605.944.738	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.092.800	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.879.100	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.297.000	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.560.000	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.063.300	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.823.200	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.953.500	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.440.455	

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000		
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.000.985		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.600.000		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.640.000		
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.889.860		
									-		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.840.000	
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.398.300	
									-		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20.780.400	

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

								Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	4.925.500	
									-	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.868.250	
								Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.488.250	
									-	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.691.700	
								Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	120.600.000	
									-	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.060.000	

Renja Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024

						DESA	Pengawasan Pemerintahan Desa			
								Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.185.500	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.060.000	
<b>Jumlah</b>									<b>2.280.917.845</b>	

**BAB. IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dungkek Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Dungkek Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN DUNGKEK KAB. SUMENEP  
TAHUN 2024**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kecamatan Dungkek							2.280.917.845,00	2.280.917.845,00	2.451.401.596,00								2.706.600.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.280.917.845,00	2.280.917.845,00	2.451.401.596,00								2.706.600.000,00	
	7 01					KECAMATAN							2.280.917.845,00	2.280.917.845,00	2.451.401.596,00								2.706.600.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor				100 %	100 %	2.066.781.745,00	2.064.212.545,00	2.224.696.296,00								2.431.600.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			25 Dokumen	25 Dokumen	18.853.600,00	16.915.300,00	16.915.300,00								14.800.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.729.600,00	5.769.600,00	5.769.600,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							1.250.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							3.750.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.025.000,00	1.993.900,00	1.993.900,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							2.300.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.192.000,00	2.008.400,00	2.008.400,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							2.500.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.177.000,00	1.933.400,00	1.933.400,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.250.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.750.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	-		24 Laporan	24 Laporan	1.608.976.143,00	1.609.042.338,00	1.609.042.338,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kelompok ASN Kecamatan		2.003.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.605.918.143,00	1.605.944.738,00	1.766.428.489,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.000.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	2 Laporan	3.058.000,00	3.097.600,00	3.097.600,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Kepegawaian yang disediakan	-		2 Jenis	2 Jenis	80.841.300,00	21.180.000,00	21.180.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kelompok ASN Kecamatan		37.500.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			20 Paket	20 Paket	80.841.300,00	21.180.000,00	21.180.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			37.500.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	-		4 Unit	4 Unit	216.506.600,00	108.148.600,00	108.148.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kelompok ASN		140.300.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	8.241.000,00	8.241.000,00	8.241.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			13.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			28 Paket	28 Paket	25.175.600,00	25.175.600,00	25.175.600,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			26.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	60.862.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			57.500.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Diediakan				2 Paket	2 Paket	5.532.000,00	5.532.000,00	5.532.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.800.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	114.056.000,00	44.560.000,00	44.560.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah yang diadakan	-			7 Unit	7 Unit	31.826.142,00	39.652.286,00	39.652.286,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kelompok ASN Kecamatan		50.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	31.826.142,00	39.652.286,00	39.652.286,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			50.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	-			2 Jenis	2 Jenis	29.286.000,00	174.183.000,00	174.183.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Kelompok Masyarakat		62.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	29.286.000,00	36.246.000,00	36.246.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			23.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	137.937.000,00	137.937.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			39.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Pelihara	-			4 Unit	4 Unit	80.491.960,00	95.091.021,00	95.091.021,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kelompok ASN		124.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	44.550.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			47.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15.850.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			16.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024

										2 Unit	2 Unit	20.091.960,00	64.631.021,00	64.631.021,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					61.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan			100 %	100 %	4.239.200,00	4.239.200,00	4.239.200,00									14.000.000,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	-		14 Dokumen	14 Dokumen	4.239.200,00	4.239.200,00	4.239.200,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Kelompok Masyarakat			14.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			14 Dokumen	14 Dokumen	4.239.200,00	4.239.200,00	4.239.200,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					14.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan			100 %	100 %	38.759.000,00	38.759.000,00	38.759.000,00									39.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-		15 Desa	15 Desa	15.959.000,00	15.959.000,00	15.959.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Kelompok Masyarakat Desa			18.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					9.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6 Laporan	6 Laporan	3.159.000,00	3.159.000,00	3.159.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					9.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelompok Keluarga	-		45 Keluarga	45 Keluarga	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Seluruh Kelompok Masyarakat			21.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			75 Keluarga	75 Keluarga	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif					21.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan ketertiban Umum yang terlaksana			100 %	100 %	18.000.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00									58.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-		15 Kali	15 Kali	18.000.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-			58.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		



*Renja OPD Kecamatan Dungkek Tahun 2024*

						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	15.475.000,00	15.454.800,00	15.454.800,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			19.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	15 Desa Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				11.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	J U M L A H											2.280.917.845,00	2.280.917.845,00	2.451.401.596,00								2.706.600.000,00	

## BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kecamatan Dungkek Tahun 2024 ini disusun berdasarkan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dungkek yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Dungkek untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja P-SKPD) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dungkek selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kecamatan Dungkek dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dungkek Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dungkek dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pro rakyat guna menciptakan *Good Governance*.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga senantiasa melimpahkan taburan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.

Sumenep, Januari 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN DUNGKEK  
DADANG Bedy ISKANDAR, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 19730320 199503 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN GILIGENTING KAB. SUMENEP  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>KECAMATAN GILIGENTING</b>							2.152.999.320,00	2.152.973.290,00	2.304.786.291,00	151.786.971,00								2.801.520.222,00	
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							2.152.999.320,00	2.152.973.290,00	2.304.786.291,00	151.786.971,00								2.801.520.222,00	
7.01		<b>KECAMATAN</b>							2.152.999.320,00											2.801.520.222,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	2.152.973.290,00	2.304.786.291,00	151.786.971,00	649.348.602,00							2.641.555.722,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	5.798.500,00	5.548.900,00	5.548.900,00	-249.600,00							11.509.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	1.918.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	1.918.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	1.918.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	1.918.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	1.918.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	1.918.200,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	1.558.749.520,00	1.558.749.520,00	1.701.387.521,00	142.638.001,00							2.192.946.902,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	2.177.038.102,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	15.908.800,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00							15.000.000,00	KECAMATAN GILIGENTING	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			15.000.000,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				27249 Jenis	27249 Jenis	238.431.000,00	168.502.100,00	180.742.100,00	-57.688.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan		175.211.920,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				178 Paket	178 Paket	7.779.400,00	7.779.400,00	7.779.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.311.920,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				124 Paket	124 Paket	9.619.200,00	9.577.900,00	9.577.900,00	-41.300,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			45.381.600,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15616 Paket	15616 Paket	27.766.400,00	27.748.800,00	27.748.800,00	-17.600,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			47.446.400,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10800 Paket	10800 Paket	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			9.486.000,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			1.944.000,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				519 Laporan	519 Laporan	183.630.000,00	113.760.000,00	126.000.000,00	-57.630.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			65.642.000,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan				3 Unit	3 Unit	35.529.657,00	35.529.657,00	35.529.657,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Sarana dan Prasarana Operasional Aparatur Sipil Negara Kecamatan		36.672.600,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35.529.657,00	35.529.657,00	35.529.657,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			36.672.600,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis	52.320.000,00	127.320.000,00	114.255.000,00	61.935.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Kecamatan Sebagai Pengguna Sumber Daya		57.374.400,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			18.974.400,00	KECAMATAN GILIGINTING
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	38.400.000,00	113.400.000,00	100.335.000,00	61.935.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			38.400.000,00	KECAMATAN GILIGINTING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara				16 Unit	16 Unit	92.498.443,00	100.285.313,00	100.285.313,00	7.786.870,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Sarana dan Prasarana Operasional Aparatur Sipil Negara Kecamatan		152.840.700,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			47.214.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.962.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	49.888.443,00	57.675.313,00	57.675.313,00	7.786.870,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			97.664.700,00	KECAMATAN GILIGENTING
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan				100 %	100 %	6.642.800,00	6.642.800,00	6.642.800,00	15.980.200,00							22.623.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	4.202.400,00	4.202.400,00	4.202.400,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kepuasan Pelayanan Umum Masyarakat		17.484.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	4.202.400,00	4.202.400,00	4.202.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			17.484.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12 Laporan	12 Laporan	2.440.400,00	2.440.400,00	2.440.400,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kepuasan Pelayanan Umum Masyarakat		5.139.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	2.440.400,00	2.440.400,00	2.440.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.139.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan				100 %	100 %	22.440.400,00	25.690.000,00	25.690.000,00	1.688.600,00							24.129.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				8 Laporan	8 Laporan	2.440.400,00	2.440.400,00	2.440.400,00	0,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		4.129.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.440.400,00	2.440.400,00	2.440.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.129.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	23.249.600,00	23.249.600,00	3.249.600,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	TP-PKK Kecamatan dan Desa		20.000.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				9 Keluarga	9 Keluarga	20.000.000,00	23.249.600,00	23.249.600,00	3.249.600,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			20.000.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana				100 %	100 %	14.203.200,00	11.503.200,00	11.503.200,00	2.364.800,00							16.568.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				14 Laporan	14 Laporan	14.203.200,00	11.503.200,00	11.503.200,00	-2.700.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Kecamatan		16.568.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	4.202.400,00	4.202.400,00	4.202.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			9.312.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	10.000.800,00	7.300.800,00	7.300.800,00	-2.700.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			7.256.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan				100 %	100 %	88.044.600,00	88.300.600,00	88.300.600,00	-16.326.000,00							71.718.600,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				14 Laporan	14 Laporan	88.044.600,00	88.300.600,00	88.300.600,00	256.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat		71.718.600,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	49.039.800,00	49.295.800,00	49.295.800,00	256.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			40.752.600,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	39.004.800,00	39.004.800,00	39.004.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			30.966.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan				100 %	100 %	29.461.200,00	16.021.200,00	26.021.200,00	-4.535.300,00							24.925.900,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3 Laporan	3 Laporan	29.461.200,00	16.021.200,00	26.021.200,00	-3.440.000,00			-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat		24.925.900,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	5.320.400,00	5.320.400,00	5.320.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	2.700.400,00	2.700.400,00	2.700.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			3.536.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	21.440.400,00	8.000.400,00	8.000.400,00	-13.440.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.289.900,00	KECAMATAN GILIGENTING
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	100 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Giliginting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.100.000,00	KECAMATAN GILIGENTING
			<b>J U M L A H</b>						<b>2.152.999.320,00</b>	<b>2.152.973.290,00</b>	<b>2.304.786.291,00</b>	<b>151.786.971,00</b>							<b>2.801.520.222,00</b>	



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**



## **KABUPATEN SUMENEP KECAMATAN LENTENG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Lenteng pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, 02 Juli 2024

**CAMAT LENTENG**  
  
**IL. SUPARDI, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690418 199701 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang .....	4
2. Landasan Hukum .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	9
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	15
BAB IV PENUTUP .....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	22
1. Keputusan Camat Lenteng, Nomor 188/22/KEP/435.308/2024, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.....	23
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng.....	27
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng.....	28
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan Pembina Tingkat I masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Lenteng telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 01);
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
  17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Lenteng dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Dearah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Lenteng Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

## **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

## **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2024, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

## **BAB IV Penutup**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024

Tingkat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2024 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat

##### ➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target : 4 Dokumen                      Realisasi : 0 Dokumen                      Capaian : 0%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target : 12 Laporan                      Realisasi : 8 Laporan                      Capaian : 57,14%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target : 72 Jenis                      Realisasi : 36 Jenis                      Capaian : 50,00%

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target : 9 Unit                      Realisasi : 1 Unit                      Capaian : 11,11%

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target : 48 Laporan                      Realisasi : 24 Jenis                      Capaian : 50,00%

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target : 20 Unit                      Realisasi : 11 Unit                      Capaian : 55,00%

#### b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan

##### ➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target : 2 Laporan                      Realisasi : 1 Laporan                      Capaian : 50,00%

#### c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Target : 1 Laporan            Realisasi : 1 Laporan            Capaian : 100,00%
  2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  
Target : 4 Laporan            Realisasi : 3 Laporan            Capaian : 75,00%

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 13 Laporan            Realisasi : 7 Laporan            Capaian : 53,85%
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Target : 12 Laporan            Realisasi : 6 Laporan            Capaian : 50,00%

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Target : 1 Laporan            Realisasi : 1 Laporan            Capaian : 100,00%
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  
Target : 4 Laporan            Realisasi : 4 Laporan            Capaian : 100,00%

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Target : 4 Laporan            Realisasi : 2 Laporan            Capaian : 50,00%
  2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Target : 12 Laporan            Realisasi : 6 Laporan            Capaian : 50,00%

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **2.1** berikut :

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan 2 Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8x100%	11=7+9	12=11/6x100%	13
		7	UNSUR KEWILAYAHAN									
		7.01	KECAMATAN									
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	51,18%	51,18%	51,18%	51,18%	KEC. LENTENG
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	38 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0	0,00%	KEC. LENTENG
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	84 Laporan	## Laporan	14 Laporan	8 Laporan	57,14%	22	26,19%	KEC. LENTENG
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			210 Orang/bulan	120 Orang/bulan	57,14%	120		
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun			3 Laporan	2 Laporan	66,67%	2		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	741 Jenis	## Jenis	58 Jenis	24 Jenis	41,38%	96	12,96%	KEC. LENTENG
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	5 Paket	50,00%	5		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	4 Paket	33,33%	4		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Paket	6 Paket	50,00%	6		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			12 Paket	3 Paket	25,00%	3		
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang di sediakan			12 Dokumen	6 Dokumen	50,00%	6		

		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	55 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	12	21,82%	KEC. LENTENG
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	6 Unit	100,00%	6		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	988 Jenis	## Jenis	449 Laporan	252 Jenis	56,1%	701	70,95%	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			437 Laporan	195 Laporan	44,6%	195		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	5 Laporan	41,7%	5		
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			110 Laporan	50 Laporan	45,5%	50		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan			3 Laporan	2 Laporan	66,7%	2		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	217 Unit	## Unit	36 Unit	11 Unit	30,6%	47	21,66%	KEC. LENTENG
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	2 Unit	50,00%	2		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	9 Unit	30%	9		
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	1 Unit	50%	1		
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	0,5	50%	KEC. LENTENG
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20 kali		1 Laporan	0 Laporan	0%	0	0,00%	KEC. LENTENG
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1 Laporan	0 Laporan	0,00%	0		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Kepastian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	300 dokumen		60 Laporan	30 Laporan	50,00%	30	50%	KEC. LENTENG
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			60 Dokumen	30 Dokumen	50,00%	30		

3	Meningkatkan Fasilitasi dan Kordinasi Desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	80%	80%	0,8	80%	KEC. LENTENG
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 Lembaga Kemasyarakatan	## Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	40	40,00%	KEC. LENTENG
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%	20		
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	252 Keluarga	## Keluarga	126 Keluarga	58 Keluarga	46,03%	184	73,02%	KEC. LENTENG
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			126 Keluarga	58 Keluarga	46,03%	58		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	100%	100%	50%	50%	0,5	50%	KEC. LENTENG
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	65 Laporan	## Laporan	14 Laporan	7 Laporan	50,00%	21	32,31%	KEC. LENTENG
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%	6		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 Laporan	1 Laporan	50,00%	1		

		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	45,15%	45,15%	0,4515	45,15%	KEC. LENTENG
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	66 Laporan	## Laporan	150 Laporan	0 Laporan	0,00%	150	227,27%	KEC. LENTENG
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan			150 orang	0 Kegiatan	0,00%	0		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	100%	100%	50%	50%	0,5	50%	KEC. LENTENG
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	275 Laporan	## Laporan	55 Laporan	22 Laporan	40,00%	77	28,00%	KEC. LENTENG
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	20		
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			20 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0		
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			5 Dokumen	2 Dokumen	40,00%	2		

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

2.1 Faktor Pendorong Keberhasilan

- a. SDM yang berkualitas
- b. Adanya motivasi dari pimpinan

2.2 Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya SDM
- b. Perencanaan yang kurang matang

2.2 Tindak lanjut

- a. Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan.

lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep disebabkan oleh pengurangan Pegawai Negeri Sipil yang semula berjumlah 18 (delapan belas) Orang menjadi 15 (lima belas) Orang yang dikarenakan adanya mutasi dan promosi, serta batas waktu pensiun. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**

**KECAMATAN LENTENG KAB. SUMENEP**

**TAHUN 2024**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					Kecamatan Lenteng							2.195.701.220,00	2.195.507.860,00	2.579.430.723,00				
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.195.701.220,00	2.195.507.860,00	2.579.430.723,00				
	7	0	1		KECAMATAN							2.195.701.220,00	2.195.507.860,00	2.579.430.723,00				
1	7	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	2.024.474.520,00	2.012.435.760,00	2.396.358.623,00			
	7	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			100 %	100 %	2.189.200,00	2.053.900,00	2.053.900,00			-
	7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6 Dokumen	1 Dokumen	578.500,00	559.600,00	559.600,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
	7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
						Jumlah Dokumen					6 Dokumen	1 Dokumen	534.800,00	498.500,00	498.500,00	Kab.	PENDAPAT	-

																	a	Umum-Dana Alokasi Umum				
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
		1	1	1	5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	536.600,00	495.800,00	495.800,00		Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			100 %	100 %	1.547.463.036,00	1.547.463.036,00	1.547.463.036,00				-			
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		1	1	2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.542.701.436,00	1.542.701.436,00	1.926.624.299,00		Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			
	7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
		1	1	2	7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.761.600,00	4.761.600,00	4.761.600,00		Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			
	7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00				-			

7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
1	1	1	6	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10 Paket	8.619.500,00	8.147.700,00	8.147.700,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
1	1	1	6	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
1	1	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.067.200,00	3.067.200,00	3.067.200,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
1	1	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101.992.000,00	26.992.000,00	26.992.000,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		
7	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
1	1	1	6	0		Jumlah Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	Kab.	PENDAPAT	-		





		1	2	4	3													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				286 Laporan	286 Laporan	4.086.200,00	2.872.400,00	2.872.400,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana				100 %	100 %	26.892.600,00	40.083.300,00	40.083.300,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-			1 kali	1 kali	6.898.600,00	6.889.300,00	6.889.300,00			-
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	6.898.600,00	6.889.300,00	6.889.300,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	undefined	-			20 desa	20 desa	19.994.000,00	33.194.000,00	33.194.000,00			-
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				126 Keluarga	126 Keluarga	19.994.000,00	33.194.000,00	33.194.000,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-
4	7	0	0			PROGRAM	Persentase Kerjasama				100 %	100 %	37.510.400,00	37.510.400,00	37.510.400,00			

						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	
	7	0	0	2.0	000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
		1	4	1	2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	10.510.400,00	10.510.400,00	10.510.400,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan			100 %	100 %	37.722.600,00	37.591.100,00	37.591.100,00				
	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-			1 kali	1 kali	37.722.600,00	37.591.100,00	37.591.100,00			-
	7	0	0	2.0	000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika												
		1	5	1	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				125 Orang	125 Orang	37.722.600,00	37.591.100,00	37.591.100,00	Kab. Sumene p, Lenteng, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumny a	-	
6	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan			100 %	100 %	52.539.500,00	52.539.500,00	52.539.500,00				
	7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang	-			100 %	100 %	52.539.500,00	52.539.500,00	52.539.500,00			-

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	12.473.900,00	12.473.900,00	12.473.900,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												9
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	3.278.900,00	3.278.900,00	3.278.900,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	
	7	0	0	2.0	001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga												4
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				5 Dokumen	5 Dokumen	10.003.900,00	10.003.900,00	10.003.900,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	
	7	0	0	2.0	001	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												6
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	14.988.900,00	14.988.900,00	14.988.900,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Semua Kel/Des a	Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun Sebelumnya	-	
	7	0	0	2.0	001	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												7
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	200	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumene p, Lenteng , Ellak Laok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
											<b>J U M L A H</b>	<b>2.195.701.220,00</b>	<b>2.195.507.860,00</b>	<b>2.579.430.723,00</b>				

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 02 Juli 2024

**GAMAT LENTENG**  
  
**I. SUPARDI, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690418 199701 1 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN LENTENG**

Jln. Raya Lenteng Nomor 45 Lenteng Sumenep

**SUMENEP**

Kode Pos : 69461

KEPUTUSAN CAMAT LENTENG KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/22 /KEP/435.308/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

CAMAT LENTENG

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lenteng Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 20243 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :

- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
- c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
- j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Lenteng.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 Juli 2024

-----

**CAMAT LENTENG**



**SUPARDI, M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690418 199701 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Lenteng  
Nomor : 188/22/KEP/435.308/2024  
Tanggal : 02 Juli 2024

-----

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Lenteng
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Lenteng
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuanagan Kecamatan Lenteng;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Lenteng;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Lenteng;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Lenteng</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lenteng;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lenteng;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lenteng</li></ol>

Sumenep, 02 Juli 2024



NIP. 19690418 199701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN LENTENG**

Jln. Raya Lenteng Nomor 45 Lenteng Sumenep

**SUMENEP**

Kode Pos : 69471

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/22/BA/435.308/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Lenteng Kabupaten Sumenep, Tanggal 02 Juli 2024, Nomor : 188/22/KEP/435.308/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 02 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. SUPARDI, M.M.	Ketua	1. ....
2	RP. ACHMAD JUNAIDI, S.Sos	Sekretaris	2. ....
3	MULYADI, S.A.N	Anggota	3. ....
4	SALAMET HARIYANTO, S.A.N	Anggota	4. ....
5	ACHMAD SUFANDI, SE	Anggota	5. ....
6	ACH. JUFRI, SE	Anggota	6. ....
7	ABD. RAZAK, SP	Anggota	7. ....
8	SUCIPNO, S.Sos	Anggota	8. ....

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 02 Juli 2024

**TIM PENYUSUN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. SUPARDI, M.M.	Ketua	1. ....
2	RP. ACHMAD JUNAIDI, S.Sos	Sekretaris	2. ....
3	MULYADI, S.A.N	Anggota	3. ....
4	SALAMET HARIYANTO, S.A.N	Anggota	4. ....
5	ACHMAD SUFANDI, SE	Anggota	5. ....
6	ACH. JUFRI, SE	Anggota	6. ....
7	ABD. RAZAK, SP	Anggota	7. ....
8	SUCIPNO, S.Sos	Anggota	8. ....
9	ZAINI, SE	Anggota	9. ....

## PHOTO DOKUMENTASI

PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP  
PADA HARI SELASA, TANGGAL 02 JULI 2024



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sampai dengan triwulan II di Tahun 2024 serta menganalisis perubahan anggaran untuk triwulan III dan IV di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2021– 2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Rubaru, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak khususnya Kecamatan Rubaru.

Sumenep, Juli 2024

**CAMAT RUBARU**



**TABRANI, S.T.P**

Pembina

NIP.19710414 200604 1 012

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Landasan Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	7
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	13
BAB IV PENUTUP .....	17

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rubaru merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dokumen perubahan Renja Kecamatan Rubaru Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan kedua Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Kecamatan Rubaru, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 65)
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

## **C. MAKSUD dan TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Rubaru adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

## **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rubaru Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai Triwulan II

### **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 3.1 Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024

### **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rubaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Rubaru mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rubaru. Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran dan kinerja Kecamatan Rubaru masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Rubaru sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah ini.

FORMULIR E-31  
 DWILUANG TERPADU BAGI RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
 RENJA KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP  
 PERIODE PELAKSANAAN : 5/2 TRIMULAN I TAHUN 2024

No	Sektor	Kode	Unitas/ Bidang Unitas Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (juzurnal dan Wajutan Output/ Sub Kegiatan)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024-2025		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah Tahun Derjalan (2024) yang diawakal		Realisasi Kinerja pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah yang diawakal		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah yang diawakal (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah aid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja Perangkat Daerah Aid Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					6		7		8		9		10		11		12		13(9+10+11+12)		14(13x100%)		15(7+13)		16(15/100%)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			7,01	UNSUR KECWALYANJIAN		2.397.045.553		2.197.355.043		2.390.244.772		204.530.673						204.530.673							2.411.896.368									
			8,00.8,00.11	KECAMATAN RUBARU		2.397.045.553		2.197.355.043		2.390.244.772		204.530.673						204.530.673							2.411.896.368									
1			7.01.01	PROGRAM PEMUKJIAN LURUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Perawatan terapannya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00 %	2.118.268.753	100,00 %	1.861.980.743	100,00 %	2.001.648.172	34,80	204.600.673					24,88 %	204.600.673	24,86%	14,29%				134,80 %	2.158.851.418	134,80%	101,91%	Kecamatan Rubaru					
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	4 Dokumen	2.134.000	4 Dokumen	2.134.000	6 Dokumen	2.503.600	4	2.907.600					4 Dokumen	2.907.600	68,67%	52,30%				8 Dokumen	5.831.600	200,00%	236,68%	Kecamatan Rubaru					
			7.01.01.2.01.000.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.907.600	2	2.907.600						2 Dokumen	2.907.600	100,00%	100,00%													
			7.01.01.2.01.000.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-GKPD	Jumlah Dokumen RKA-GKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-GKPD				1 Dokumen	522.000	-	-						- Dokumen	-	0,00%	0,00%													
			7.01.01.2.01.000.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-GKPD	Jumlah Dokumen RKA-GKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-GKPD					528.000																								
			7.01.01.2.01.000.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-GKPD	Jumlah Dokumen DPA-GKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-GKPD				1 Dokumen	682.200	-	-						- Dokumen	-	0,00%	0,00%													
			7.01.01.2.01.000.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-GKPD	Jumlah Dokumen DPA-GKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-GKPD					596.400																								
			7.01.01.2.01.000.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	318.400	2	-						2 Dokumen	-	100,00%	0,00%													
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diawakal	12 Laporan	1.736.345.164	12 Laporan	1.498.954.751	24 Laporan	1.662.305.524	3	216.563.573						3 Laporan	216.563.573	12,50%	13,83%				15 Laporan	1.716.518.324	125,00%	98,80%	Kecamatan Rubaru				
			7.01.01.2.02.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				204 Orang	1.655.268.224	60	214.452.073							60 Orang	214.452.073	28,41%	12,96%												
			7.01.01.2.02.000.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diawakal				12 Laporan	7.019.300																								
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepigawaiin Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepigawaiin yang diawakal	100 %	20.941.600	100 %	15.576.500	2 Jenis	10.348.800	2	-						2 Jenis	-	100,00%	0,00%				102 Jenis	15.576.500	100,00%	74,31%	Kecamatan Rubaru				
			7.01.01.2.05.000.2	Pengadaan Pakuan Linas beaseta Akibat Kealngkapannya	Jumlah Paket Pakuan Linas beaseta Akibat Kealngkapannya				2 Paket	10.348.800	2	-							2 Paket	-	100,00%	0,00%												
			7.01.01.2.06	Administrasi Lulusan Perangkat Daerah	Jumlah peletakan dan penempatan kantor yang diawakal	100 %	95.803.700	100 %	95.101.242	72 Jenis	153.045.800	18	21.578.800							18 Jenis	21.578.800	25,00%	14,05%				118 Jenis	116.881.043	118,00%	121,66%	Kecamatan Rubaru			
			7.01.01.2.06.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diawakal				9 Paket	6.408.500	25	1.583.900								25 Paket	1.583.900	277,78%	24,67%											
			7.01.01.2.06.000.2	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang diawakal				12 Paket	6.096.000	-	-								- Paket	-	0,00%	0,00%											
			7.01.01.2.06.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diawakal				12 Paket	27.423.800	121	5.575.900								121 Paket	5.575.900	1008,33%	20,33%											
			7.01.01.2.06.000.5	Penyediaan Bidang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bidang Cetakan dan Penggandaan yang diawakal				2 Paket	10.000.000	-	-								- Paket	-	0,00%	0,00%											
			7.01.01.2.06.000.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diawakal				34 Dokumen	2.558.000	3	450.000								3 Dokumen	450.000	13,50%	17,61%											
			7.01.01.2.06.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	101.126.000	74	13.960.000								74 Laporan	13.960.000	74,00%	13,81%											
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah/Pemangaj Unitas Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diawakal	3 Unit	35.471.800	3 Unit	35.488.000	5 Unit	50.858.318	-	-							- Unit	-	0,00%	0,00%				3 Unit	35.430.000	100,00%	98,80%	Kecamatan Rubaru			
			7.01.01.2.07.000.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Perabtan dan Mesin Lainnya yang diawakal				4 Unit	11.328.000	-	-								- Unit	-	0,00%	0,00%											
			7.01.01.2.07.000.6	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabtan dan Mesin Lainnya yang diawakal				1 Unit	36.530.318	-	-								- Unit	-	0,00%	0,00%											

**FORMULIR 0.01**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA KECAMATAN TALANG KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : 2024 TRIWULAN I TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024-2025		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 yang direvisasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah aid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah aid Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					G		T		A		I		II		III		IV		10(9+10+11+12)		14=13a+100%		15=7+13		16=15a+100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.003	Penyediaan Jasa Penangkep Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100 %	137.325.010	100 %	136.196.190	48 Laporan	136.296.000	10	7.024.700							12 Jenis	7.026.700	25,00%	6,02%	112 Jenis	133.316.450	102,00%	98,75%	Kecamatan Rabau		
		7.01.01.2.003.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					12 Laporan	26.073.610	3	3.682.500							3 Laporan	3.892.500	25,00%	13,33%							
		7.01.01.2.003.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					36 Laporan	90.196.400	6	3.164.200							6 Laporan	3.164.200	25,00%	3,90%							
		7.01.01.2.003	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penangkep Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangun milik daerah yang dipelihara	7 Unit	90.685.456	7 Unit	90.074.500	20 Unit	70.988.000	5	40.550.000							5 Unit	40.550.000	25,00%	65,89%	13 Unit	127.334.500	171,43%	161,32%	Kecamatan Rabau		
		7.01.01.2.003.000.1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	26.208.000	2	7.240.000							2 Unit	7.240.000	33,33%	27,63%							
		7.01.01.2.003.000.6	Pemeliharaan Pelebaran dan Melebar Lainnya	Jumlah Pelebaran dan Melebar Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	10.270.000	2	910.000							2 Unit	910.000	16,67%	8,00%							
		7.01.01.2.003.000.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	34.360.000	1	36.400.000							1 Unit	36.400.000	50,00%	111,66%							
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Layanan Publik yang dilaksanakan di Kecamatan	100,00 %	17.773.200	100,00 %	17.048.000	100,00 %	54.966.400	-	1.350.000							- %	1.350.000	0,00%	0,00%	100,00 %	18.398.000	100,00%	103,52%	Kecamatan Rabau		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500 Dokumen	17.773.200	500 Dokumen	17.048.000	14 Laporan	51.303.500	3	1.350.000							3 Laporan	1.350.000	0,00%	0,00%	503 Laporan	18.398.000	100,00%	103,52%	Kecamatan Rabau		
		7.01.02.2.01.000.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	5.468.700	3	1.350.000							3 Laporan	1.350.000	0,00%	0,00%							
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperencanaan pada urusan Pemerintahan						3.503.800		0																	
		7.01.02.2.04.000.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperencanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperencanaan pada urusan Pemerintahan						3.503.800	0	0																	
3	Meningkatkan Fasilitas dan Kondisi Desa	7.01.03	PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00 %	40.800.400	100,00 %	36.341.500	100,00 %	29.673.000	9	8.520.000							9,09 %	8.520.000	9,09%	28,71%	108,09 %	44.861.550	109,99%	108,62%	Kecamatan Rabau		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan	1 Kegiatan	14.597.000	1 Kegiatan	14.597.000	11 Laporan	6.917.000	1	4.800.000							1 Laporan	4.800.000	9,09%	68,39%	3 Laporan	16.317.000	200,00%	132,84%	Kecamatan Rabau		
		7.01.03.2.01.000.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					11 Lembaga Kemasyarakatan	6.917.000	11	4.800.000							11 Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000	100,00%	68,39%							
		7.01.03.2.00	Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikut Pembudayaan dan Kesejahteraan keluarga di	1 Kegiatan	26.354.000	1 Kegiatan	21.744.500	11 Laporan	22.706.000	1	3.720.000							1 Laporan	3.720.000	9,09%	16,35%	3 Laporan	25.438.900	200,00%	90,72%	Kecamatan Rabau		
		7.01.03.2.00.000.7	Pembudayaan Kesehatan Keluarga dalam Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesehatan Keluarga dalam Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat					111 Keluarga	22.706.000	60	3.720.000							60 Keluarga	3.720.000	54,05%	16,35%							
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERANGAN UMUM	Peningkatan Kegiatan Pengawasan dalam Menertibkan Ketertambahan dan Keterbatasan Umum yang terakumulasi	100,00 %	154.200.000	100,00 %	131.227.900	100,00 %	19.828.000	-	-							- %	-	0,00%	0,00%	100,00 %	131.227.900	100,00%	85,10%	Kecamatan Rabau		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertambahan dan Keterbatasan Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketertambahan dan keterbatasan umum yang dilaksanakan	12 Kml	154.200.000	12 Kml	131.227.900	3 Laporan	19.828.000	-	-							- Laporan	-	0,00%	0,00%	12 Laporan	131.227.900	100,00%	85,10%	Kecamatan Rabau		
		7.01.04.2.01.000.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	19.828.000	-	-							- Laporan	-	0,00%	0,00%							
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00 %	30.000.000	100,00 %	29.987.000	100,00 %	43.053.800	-	-							- %	-	0,00%	0,00%	100,00 %	29.987.000	100,00%	99,90%	Kecamatan Rabau		

**FORMULIR C.11**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIMULAN I TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Uraian Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (jumlah) dan Kegiatan (jumlah) Sub Kegiatan (jurnal)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2025		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Derjatan (2024) yang direalisasi		Realisasi Kinerja pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direalisasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah a/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah a/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
					6		7		8		9		10		11		12		13(9+10+11+12)		14(13x100%)		15(7+13)		16(15x100%)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
		7.01.00.2.01	Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan urusan kabupaten dan kecamatan nasional	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	26.907.000	3 Laporan	43.053.000	-	-							- Laporan	-	0,00%	0,00%	1 Laporan	26.907.000	100,00%	99,96%	Kecamatan Rubaru																			
		7.01.00.2.01.000.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan NKRI				100 Orang	63.053.000	-	-								- Kegiatan	-	0,00%	0,00%																								
		7.01.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAHAN PEMERINTAHAN DEGA	Pembinaan pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00 %	34.636.900	100,00 %	27.759.500	100,00 %	51.154.400	-	-							- %	-	0,00%	0,00%	100,00 %	27.759.500	100,00%	79,60%	Kecamatan Rubaru																			
		7.01.00.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	100 %	34.636.900	100 %	27.759.500	3 Laporan	51.154.400	-	-							- Laporan	-	0,00%	0,00%	100 Laporan	27.759.500	100,00%	79,60%	Kecamatan Rubaru																			
		7.01.00.2.01.000.1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					11 Dokumen	4.725.400	-	1.355.400							- Dokumen	1.355.400	0,00%	28,03%																								
		7.01.00.2.01.000.2	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.026.100																																				
		7.01.00.2.01.000.3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa						2.317.400	-	-							- Dokumen	-	0,00%	0,00%																								
		7.01.00.2.01.000.4	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.096.500																																				
		7.01.00.2.01.000.1	Facilitasi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Keaktifan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Kelembagaan dan Keaktifan Umum						10.403.500																																				
		7.01.00.2.01.000.4	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						5.736.500																																				
		7.01.00.2.01.000.5	Facilitasi Perencanaan, Penyediaan, dan Penyediaan Ruang Desa serta Pemertapan dan Pengawasan Sempadan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan, Penyediaan, dan Penyediaan Ruang Desa serta Pemertapan dan Pengawasan Sempadan Desa						10.004.000																																				
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																						5,60%	7,17%																							
<b>Prediksi Kinerja</b>																						Sedang	Tinggi																							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:

Dikusun  
Sumenep, 22 April 2024  
  
TAMBAH S STP  
Kecamatan Rubaru  
NIP. 19710614.2006041.012

Divalidasi  
Sumenep, April 2024  
**PI. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
  
Drs. YUYUK NURWATIYUDI, M.Si.  
Pendidik Utama Kelas II  
NIP. 1966010919680210027

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep khususnya urusan kewilayahan pada tahun 2024 melaksanakan 2 urusan, 6 program, dan 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Rubaru, jumlah realisasi kinerja sampai triwulan II sudah mencapai 48,17 %, hal ini dapat di kategorikan kurang maksimal, disebabkan karena beberapa sub kegiatan masih belum terlaksana sampai dengan Triwulan II, baru akan akan terlaksana di Triwulan III atau Triwulan IV.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Rubaru, jumlah realisasi kinerja sampai Triwulan II sudah 54,41 %, hal ini disebabkan karena pada sebagian sub kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III maupun Triwulan IV.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kecamatan Jumlah realisasi kinerja sampai Triwulan II mencapai 65,97 %, hal ini dapat di kategorikan lumayan baik pelaksanaan kinerjanya, hal ini dikarenakan lebih banyak sub kegiatan dilaksanakan pada saat triwulan I dan II sedangkan sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

**4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Rubaru, jumlah realisasi kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 68 %, hal ini dapat dikategorikan sudah baik, karena sebagian besar sub kegiatan telah dilaksanakan di triwulan I dan II dan sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rubaru jumlah realisasi kinerja sampai triwulan II masih mencapai 21,84%, hal ini dapat dikategorikan kurang baik pelaksanaan kinerjanya, hal ini dikarenakan sebagian besar sub kegiatan anggaran kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Rubaru, Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 30,41 %, hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan anggaran kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

Secara keseluruhan capaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sampai dengan triwulan II sudah mencapai 48,41%, hal ini merupakan capaian yang kurang maksimal dikarenakan beberapa sub kegiatan masih akan terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya. Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan Kecamatan Rubaru dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan maksimal dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Rubaru Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 di bawah ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKOT DAERAH (RENKOR OPD)**  
**KABUPATEN RUBARU KOTA SUMENEP**  
**TAHUN 2024**

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Periode Rencana Kerja OPD Tahun 2024	Realisasi Capaian RENKOR OPD Tahun 2023	Pembinaan Capaian Target RENKOR OPD	Capaian Kinerja dan Gerencio Pemanduan						Sumber Dana	Prioritas	Kategori Kegiatan	Pembinaan Uraji Rencana Tahun 2024		Peningkatan Daerah Perangkoat Daerah		
							Target 2024		Rencana Awal (Rp)		Rencana Perubahan 2024					Lokasi	Mekanism		Target	Rencana Awal (Rp)
							Sebelum	Setelah	KRPI 2024	RPD 2024	KRPD Perubahan 2024	18								
7		Keasmatan Rakyat																		
7	01	URUSAN KEBUDAYAAN																		
7	01	01	PROBLEMA PERKULIAHAN																	
7	01	01	01	Perencanaan, Pengembangan, dan Realisasi Kinerja Perangkoat Daerah																
7	01	01	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkoat Daerah															
7	01	01	01	0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkoat Daerah															
7	01	01	01	0001	Keasmatan dan Penguasaan Dokumen KGI-OPD															
7	01	01	01	0001	Jumlah Dokumen KGI-OPD dan Laporan Hasil Keasmatan Penguasaan Dokumen KGI-OPD															
7	01	01	01	0001	Keasmatan dan Penguasaan Dokumen Perubahan KGI-OPD															
7	01	01	01	0001	Jumlah Dokumen Perubahan KGI-OPD dan Laporan Hasil Keasmatan Penguasaan Dokumen Perubahan KGI-OPD															
7	01	01	01	0001	Keasmatan dan Penguasaan DPO-OPD															
7	01	01	01	0001	Jumlah Dokumen DPO-OPD dan Laporan Hasil Keasmatan Penguasaan Dokumen DPO-OPD															
7	01	01	01	0001	Keasmatan dan Penguasaan Perubahan DPO-OPD															
7	01	01	01	0001	Jumlah Dokumen Perubahan DPO-OPD dan Laporan Hasil Keasmatan Penguasaan Dokumen Perubahan DPO-OPD															
7	01	01	01	0001	Keasmatan dan Penguasaan Laporan															
7	01	01	01	0001	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Hasil Keasmatan Penguasaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)															
7	01	01	01	0001	Administrasi Keuangan Perangkoat Daerah															
7	01	01	01	0001	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkoat Daerah yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pemeliharaan BAJ dan Turuntema JAV															
7	01	01	01	0001	Jumlah Orang yang Menerima BAJ dan Turuntema JAV															
7	01	01	01	0001	Keasmatan dan Penguasaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
7	01	01	01	0001	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Keasmatan Penguasaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
7	01	01	01	0001	Administrasi Kegiatan Perangkoat Daerah															
7	01	01	01	0001	Jumlah Jenis Kegiatan Perangkoat Daerah yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan															
7	01	01	01	0001	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan															
7	01	01	01	0001	Administrasi Umum Perangkoat Daerah															
7	01	01	01	0001	Jumlah Jenis Kegiatan Perangkoat Daerah yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pemeliharaan Sampakan Instansi Daerah															
7	01	01	01	0001	Jumlah Pakaian Sampakan Instansi Daerah yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor															
7	01	01	01	0001	Jumlah Pakaian Fasilitas dan Perlengkapan Kantor yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pemeliharaan Bahan Legistik Kantor															
7	01	01	01	0001	Jumlah Pakaian Bahan Legistik Kantor yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengoperasian															
7	01	01	01	0001	Jumlah Pakaian Barang Cetak dan Pengoperasian yang Disajikan															
7	01	01	01	0001	Pemeliharaan Bahan Besam dan Peralatan Perangkoat															
7	01	01	01	0001	Jumlah Dokumen Bahan Besam dan Peralatan Perangkoat yang Disajikan															

7	01	01	0.03	0009	Peningkatan Raga Geasindal dan Geasindal SCPD	Jumlah Legan Peningkatan Raga Geasindal dan Geasindal SCPD	100 Legan	100 Legan	101.110.000,00	101.110.000,00	101.110.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		18.380.000,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Famarintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadalan	8 Unit	8 Unit	30.889.898,00	30.889.818,00	30.889.818,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	30.889.870,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.07	0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Paken Mebel yang Diadalan	7 Unit	7 Unit	11.830.000,00	11.830.000,00	11.830.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		11.830.300,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.07	0003	Pengadaan Peralatan dan Meah Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Meah Lainnya yang Diadalan	1 Unit	1 Unit	89.878.898,00	89.889.818,00	89.889.818,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		89.881.830,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.07	0010	Pengadaan Barana dan Peralana Bedung Gantar atau Banguan Lainnya	Jumlah Unit Barana dan Peralana Bedung Gantar atau Banguan Lainnya yang Diadalan	-	1 Unit	0,00	0,00	8.300.834,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Kubaru	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		8.300.000,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08		Pengadaan Jasa Penunjang Ususan Famarintah Daerah	Jumlah Legan Jasa yang Diadalan	2 Jaha	2 Jaha	108.370.080,00	108.370.080,00	108.370.080,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	88.187.880,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08	0001	Pengadaan Jasa (Gumukal) Bembu Daya Air dan Listrik	Jumlah Legan Pelayanan Jasa (Gumukal) Bembu Daya Air dan Listrik yang Diadalan	12 Legan	12 Legan	18.078.910,00	18.078.910,00	18.078.910,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		18.051.380,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08	0001	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Gantar	Jumlah Legan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Gantar yang Diadalan	12 Legan	12 Legan	70.341.000,00	80.180.400,00	80.180.400,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		78.780.000,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Famarintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	70.890.000,00	70.890.000,00	70.890.000,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	681.881.780,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08	0001	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan, Baga Pemeliharaan dan Pakaj Gendaraan Perawatan Dinas atau Gendaraan Dinas Jekatan yang Dipelihara dan diparkiran Pakajnya	Jumlah Gendaraan Perawatan Dinas atau Gendaraan Dinas Jekatan yang Dipelihara dan diparkiran Pakajnya	0 Unit	0 Unit	88.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		41.884.330,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08	0003	Pemeliharaan Peralatan dan Meah Lainnya	Jumlah Peralatan dan Meah Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	10.370.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		11.378.080,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.08	0003	Pemeliharaan (Kekabih) Bedung Gantar dan Banguan Lainnya	Jumlah Bedung Gantar dan Banguan Lainnya yang Dipelihara (Kekabih)	8 Unit	8 Unit	84.880.000,00	84.880.000,00	84.880.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dana Transfer Umum-Dana Dikabel Umum	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		807.800.048,00	CEASVATAN KUBARU
3	7	01	01		PROGRAM PEBERSEKALAN PEBERNTAHAN DAN PEBERNTAHAN PUBLIC	Pemasasa Layanan Publik yang diadalan di Geasmetan	100 Ik	100 Ik	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00			-			178.889.384,00	
7	01	01	0.01		Geasindal Peningkatan Gagasan Famarintah di Tingkat Geasmetan	Jumlah Legan Pelaksanaan Geasindal Peningkatan Gagasan Famarintah di Tingkat Geasmetan	4 Legan	4 Legan	11.831.300,00	11.831.300,00	11.831.300,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	108.000.000,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.01	0001	Geasindal (Zinar) Pemasasan dan Pelaksanaan Gagasan Famarintah dengan Peningkatan Daerah dan (Inal) Variabel Terbak	Jumlah Legan (Geasindal) (Zinar) Pemasasan dan Pelaksanaan Gagasan Famarintah dengan Peningkatan Daerah dan (Inal) Variabel Terbak	4 Legan	4 Legan	11.831.300,00	11.831.300,00	11.831.300,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dua Lebih Perhungan Janggan Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		108.000.000,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.01		Pelaksanaan Ususan Famarintah yang Ditingkatkan kepada Geasmetan	Jumlah Legan Pelaksanaan Ususan Famarintah yang Ditingkatkan kepada Geasmetan	12 Legan	12 Legan	8.338.800,00	8.338.800,00	8.338.800,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	6.318.780,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	01	0.01	0001	Pelaksanaan Ususan Famarintah yang Terbak dengan Ususan Famarintah	Jumlah Legan Pelaksanaan Ususan Famarintah yang Terbak dengan Ususan Famarintah	12 Legan	12 Legan	8.338.800,00	8.338.800,00	8.338.800,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dua Lebih Perhungan Janggan Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		6.318.780,00	CEASVATAN KUBARU
4	7	01	08		PROGRAM PEBERSEKALAN MASYARAKAT DESA DAN CEASVATAN	Pemasasa Lembaga dan Organel Masyarakat yang Terbak dalam Pambangunan di Geasmetan	100 Ik	100 Ik	28.878.000,00	28.878.000,00	28.878.000,00			-			31.072.800,00	
7	01	08	0.01		Geasindal Gagasan Pambudayaan Desa	Jumlah Legan pelaksanaan pambudayaan desa yang dilaksanakan	11 Legan	11 Legan	8.817.000,00	8.817.000,00	8.817.000,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	8.872.800,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	08	0.01	0001	Peningkatan Perhungan Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemasasan Pambangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berperhungan dalam Forum Masyarakat Pemasasan Pambangunan di Desa	11 Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	8.817.000,00	8.817.000,00	8.817.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dua Lebih Perhungan Janggan Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		8.872.800,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	08	0.03		Pambudayaan dan Geasmetan Galanga Tingkat Geasmetan dan Geasmetan Kabupaten	Jumlah Legan Galanga yang mengahului Pambudayaan dan Geasmetan Kabupaten di Tingkat desa dan bawahan	11 Legan	11 Legan	11.738.000,00	11.738.000,00	11.738.000,00			-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit	Geasmetan Kubaru	16.100.000,00	CEASVATAN KUBARU
7	01	08	0.03	0001	Pembentukan Geasmetan Galanga dan Perhungan Galanga dan (Inal) dengan Masyarakat Perhungan Habaq Berbak dan Sahat	Jumlah Galanga yang mengahului Pembentukan Geasmetan Galanga dalam Peningkatan Daerah Geasmetan Galanga dan (Inal) dengan Masyarakat Perhungan Habaq Berbak dan Sahat	11 Galanga	11 Galanga	11.738.000,00	11.738.000,00	11.738.000,00	Gab. Sumenep, Kubaru, Samudra Gaj/Deas	Dua Lebih Perhungan Janggan Tahun Sebelumnya	-	Peningkatan Tete Galala Famarintah yang harmoni dan adygit		16.100.000,00	CEASVATAN KUBARU
4	7	01	04		PROGRAM GEASINDAL ENTERTAINMENT DAN ENTERTAINMENT UMUM	Pemasasa Geasmetan Pemasasan Geasmetan dan Geasmetan Umum yang berhikasa	100 Ik	100 Ik	18.838.000,00	18.838.000,00	18.838.000,00			-			21.032.100,00	



## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Rubaru Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Perubahan Renja Kecamatan Rubaru disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Rubaru ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Rubaru.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh *stakeholder*.

Sumenep, Juli 2024



**CAMAT RUBARU**

**TABRANI, S.T.P**

Pembina

NIP. 19710414 200604 1 012

# Rencana Kerja (Renja) Perubahan

**Tahun Anggaran 2024**



**KECAMATAN KOTA SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Sumenep Tahun Anggaran 2024 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2024 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Renstra dan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Diharapkan nantinya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024

Akhirnya besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kota Sumenep ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kecamatan Kota Sumenep.

Sumenep, 26 Juli 2024

**CAMAT KOTA SUMENEP**  
  
**YUDI NURSUKMADYANTO, S.STP., MM**  
Pembina  
NIP. 19850222 200312 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1    LATAR BELAKANG .....	3
1.2    DASAR HUKUM .....	3
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	8
2.1    FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA .....	8
2.2    FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA .....	8
2.3    TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA .....	9
BAB. III .....	24
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	24
KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP .....	24
BAB IV .....	89
PENUTUP.....	89

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan untuk perubahan renja disesuaikan dengan RKPD Perubahan.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten sumenep Tahun 2024.
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Renja Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2024 disusun dengan maksud :

- a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kecamatan Kota Sumenep khususnya di Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan perubahan renja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renja Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi dan tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan Faktor Pendorong dan Penghambat serta Tindak Lanjut Pelaksanaan Triwulan / RKPD Berikutnya

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Kecamatan Kota Sumenep adalah penjabaran Perencanaan dan Rencana Strategis Kecamatan Kota Sumenep. Tercapai tidaknya pelaksanaannya kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Kota Sumenep ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Sumenep selama tahun 2024 dan prakiraan tahun 2024.

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatannya meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### 2.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa faktor pendorong dalam rangka Pencapaian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan.
- b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Camat dengan Bupati Sumenep, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.
- c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

#### 2.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kota Sumenep dalam rangka pencapaian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya konsistensi dalam menyusun perencanaan, yaitu judul kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta DPA sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- b. Kurang optimalnya penyerapan anggaran karena kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun DPA serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- d. Terbatasnya pengetahuan dan jumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang ada di Kelurahan sebagai pelaksana kegiatan Swakelola tipe IV pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lama.

### **2.3 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA**

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat seperti yang telah diuraikan di atas, maka tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan / RKPD berikutnya adalah :

- a. Melakukan penyesuaian antara dokumen renstra dengan RKPD / Renja Perubahan Kecamatan Kota Sumenep.
- b. Melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik ketika menyusun RKA dan anggaran kas.
- c. Pembinaan tata kelola SDM untuk mengatasi keterbatasan SDM.
- d. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja.
- e. Permohonan pendampingan kepada perangkat daerah pengampu kebijakan.

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan 2 Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Ket
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10=9/8x100%	11=7+9	12=11/6x100%	13
		7						UNSUR KEWILAYAHAN									
		7	01					KECAMATAN									
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Sumenep	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	85%	85%	48%	48%	48%	56%	KEC. KOTA SUMENEP	
		7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diadakan	85%	85%	48%	48%	48%	56%		
		7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen			



			7	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN			9 paket	9 paket	100 %	9 paket		
			7	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN			15 paket	15 paket	100%	15 paket		
			7	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN			15 paket	15 paket	100%	15 paket		
			7	01	01	2.1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	85%		85 %	50 %	59 %	50 %	59%	
			7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 paket	4 paket	50%	8 paket		
			7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 paket	4 paket	50%	8 paket		
			7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	2 paket	50%	4 paket		
			7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			14 paket	7 paket	50%	14 paket		
			7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9 paket	4 paket	40%	9 paket		

		7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	1 paket	30%	3 paket		
		7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	1 paket	30%	3 paket		
		7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	1 paket	30%	3 paket		
		7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	1 paket	30%	3 paket		
		7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	1 paket	50%	2 paket		
		7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	1 paket	50%	2 paket		
		7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	1 paket	50%	2 paket		
		7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	1 paket	50%	2 paket		

		7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	1 paket	50%	2 paket			
		7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	2 paket	50%	4 paket			
		7	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			3 dokumen	1,5 dokumen	50 %	3 dokumen			
		7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 laporan	1 laporan	50 %	2 laporan			
		7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang di adakan	85%		85 %	50 %	59 %	50 %	59%		
		7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6 paket	6 paket	100%	6 paket			
		7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 paket	0 paket	0%	2 paket			
		7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 paket	0 paket	0%	3 paket			
		7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6 paket	6 paket	100%	6 paket			
		7	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	3 unit	50%	6 unit			
		7	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 unit	100%	3 unit			
		7	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	3 unit	50%	6 unit			



		7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	85%		85%	42%	49%	42%	49%	
		7	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	1 unit	100%	1 unit		
		7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 unit	1 unit	50%	2 unit		
		7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 unit	1 unit	50%	2 unit		
		7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 unit	2 unit	66%	3 unit		
		7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11 unit	5 unit	55%	11 unit		
		7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 unit	3 unit	50%	6 unit		

		7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 unit	3 unit	50%	6 unit		
		7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 unit	2 unit	66%	5 unit		
		7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 unit	10 unit	50%	20 unit		
		7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	1 unit	50%	1 unit		
		7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	100%	1 unit		
		7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	100 %	1 unit		
		7	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	1 unit	50%	2unit		
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	85%		100%	50%	50%	50%	59%	KEC. KOTA SUMENEP
		7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	100 %		100%	50 %	50%	50%	50%	

		7	01	02	2	04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan			12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan		
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota Sumenep	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	85%		85%	48%	48%	48%	56%	KEC. KOTA SUMENEP
		7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan	85%		85%	48%	48%	48%	56%	
		7	01	03	2	02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan		
		7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 unit	2 unit	50%	4 unit		
		7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			5 unit	2 unit	40%	5 unit		
		7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 unit	2 unit	50%	4 unit		
		7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 unit	5 unit	50%	10 unit		



		7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan			12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan		
		7	01	04	2	01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 laoran	1 laporan	50%	1 laporan		
		7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	85%		85%	48%	48%	48%	56%	KEC. KOTA SUMENEP
		7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disusun	85%		85%	48%	48%	48%	56%	
		7	01	05	2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			30 orang	0 orang	0%	30 orang		
		7	01	05	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen		
		7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	85%		85%	48%	48%	48%	56%	KEC. KOTA SUMENEP
		7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	85%		85%	48%	48%	48%	56%	

			7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen				
			7	01	06	2	01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen				
			7	01	06	2	01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan				
															<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>		<b>56%</b>			
															<b>Predikat kinerja</b>		<b>Cukup Baik</b>			

**BAB. III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kota Sumenep.

Seiring perkembangan situasi telah terjadi pergeseran anggaran yaitu sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN KOTA SUMENEP								8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00		
	7.01	KECAMATAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.379.561.811,00	6.454.252.705,00	7.294.894.425,00	1.701.738.189,00							8.081.300.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.600.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-120.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		3.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000,00	420.000,00	420.000,00	-60.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000,00	420.000,00	420.000,00	-60.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI 1 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		450.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.054.841.080,00	5.054.841.080,00	5.914.037.800,00	859.196.720,00		-	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		6.500.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.054.841.080,00	5.054.841.080,00	5.914.037.800,00	859.196.720,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			6.500.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	53.443.500,00	52.314.900,00	52.314.900,00	-1.128.600,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		53.800.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI 1 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				30 Paket	30 Paket	24.000.000,00	22.871.400,00	22.871.400,00	-1.128.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			21.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	452.261.595,00	453.318.299,00	463.243.299,00	10.981.704,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		579.600.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI 1 CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.891.800,00	5.891.800,00	5.891.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	11.089.600,00	11.089.600,00	11.089.600,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			12.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			16.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.293.800,00	14.293.800,00	14.293.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			14.300.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			3.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	0,00	10.240.000,00	10.240.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	230.884.926,00	229.768.932,00	217.655.102,00	-13.229.824,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			296.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	138.211.095,00	138.211.095,00	82.097.265,00	-56.113.830,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			82.300.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																n Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.197.946,00	337.197.946,00	325.555.816,00	63.357.870,00				-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		265.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	34.636.000,00	34.636.000,00	27.753.870,00	-6.882.130,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		34.700.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.963.975,00	183.963.975,00	179.203.975,00	70.240.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			121.700.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.332.764,00	324.331.548,00	319.607.508,00	-3.725.256,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			383.100.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.600.000,00	33.600.000,00	25.710.000,00	-7.890.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			35.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13.860.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00	-100.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			20.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	120.648.302,00	120.648.302,00	123.814.262,00	3.165.960,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			86.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.631.500,00	3.631.500,00	3.631.500,00	10.368.500,00							14.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.631.500,00	3.631.500,00	3.631.500,00	0,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		14.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.631.500,00	3.631.500,00	3.631.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.761.406.651,00	2.440.063.078,00	2.439.936.593,00	3.213.643.349,00							4.975.050.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	-		0,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.741.523.251,00	2.420.259.678,00	2.420.133.193,00	678.609.942,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		4.941.550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					4 Laporan	4 Laporan	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		9.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	12 Desa dan 4 Kelurahan		0,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12				13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-					-	-	19.883.400,00	19.803.400,00	19.803.400,00	-80.000,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			33.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				264 Keluarga	264 Keluarga	19.883.400,00	19.803.400,00	19.803.400,00	-80.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			33.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																tenaga Pendidikan dan Kesehatan				
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	9.836.800,00	9.782.900,00	9.782.900,00	4.063.200,00							13.900.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	9.836.800,00	9.782.900,00	9.782.900,00	-53.900,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		13.900.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.513.400,00	5.513.400,00	5.513.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan			7.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan					
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	4.323.400,00	4.269.500,00	4.269.500,00	-53.900,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			6.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	172.614.200,00	99.094.200,00	161.334.200,00	7.585.800,00							180.200.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	172.614.200,00	99.094.200,00	161.334.200,00	-11.280.000,00				-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana,			180.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
															kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan					
7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				30 Orang	30 Orang	42.234.200,00	42.234.200,00	56.934.200,00	14.700.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			36.700.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				-	100 Orang	0,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			0,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	130.380.000,00	56.860.000,00	92.320.000,00	-38.060.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan			143.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																tenaga Pendidikan dan Kesehatan				
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	29.603.400,00	29.549.500,00	39.549.500,00	9.696.600,00							39.300.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	29.603.400,00	29.549.500,00	39.549.500,00	9.946.100,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		39.300.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	17.440.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas			22.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan				
	7.01.06.2.01.001 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	3.523.400,00	3.469.500,00	3.469.500,00	-53.900,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			5.300.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.06.2.01.001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	8.640.000,00	8.640.000,00	18.640.000,00	10.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta			11.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN KEPANJIN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00								13.303.750.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00		
	7.01	KECAMATAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.379.561.811,00	6.454.252.705,00	7.294.894.425,00	1.701.738.189,00							8.081.300.000,00		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	53.443.500,00	52.314.900,00	52.314.900,00	-1.128.600,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		53.800.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	452.261.595,00	453.318.299,00	463.243.299,00	10.981.704,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		579.600.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	108.924.543,00	108.924.543,00	108.924.543,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dan Kesehatan				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.849.000,00	6.849.000,00	6.849.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	230.884.926,00	229.768.932,00	217.655.102,00	-13.229.824,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		296.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Pendidikan dan Kesehatan				
	7.01.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	12.833.438,00	12.833.438,00	12.833.438,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		32.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	11.159.940,00	11.159.940,00	22.159.940,00	11.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		24.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.197.946,00	337.197.946,00	325.555.816,00	63.357.870,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		265.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	20.083.920,00	20.083.920,00	20.083.920,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kapanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			23.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.332.764,00	324.331.548,00	319.607.508,00	-3.725.256,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		383.100.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				2 Unit	2 Unit	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			9.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		62.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.499.100,00	15.499.100,00	15.499.100,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		16.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	1.761.406.651,00	2.440.063.078,00	2.439.936.593,00	3.213.643.349,00							4.975.050.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	1.741.523.251,00	2.420.259.678,00	2.420.133.193,00	678.609.942,00				-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-	4.941.550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	260.030.600,00	373.263.200,00	373.263.200,00	113.232.600,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			750.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 0	0 0	173.420.190,00	230.159.490,00	230.159.490,00	56.739.300,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kepanjin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			600.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
		<b>KELURAHAN PAJAGALAN</b>								8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00						13.303.750.000,00	
	7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00	
	7.01	<b>KECAMATAN</b>							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00							13.303.750.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.379.561.811,00	6.454.252.705,00	7.294.894.425,00	1.701.738.189,00							8.081.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	53.443.500,00	52.314.900,00	52.314.900,00	-1.128.600,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		53.800.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	15.142.500,00	15.142.500,00	15.142.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			13.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	452.261.595,00	453.318.299,00	463.243.299,00	10.981.704,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		579.600.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.173.000,00	3.173.000,00	3.173.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			4.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	3.283.800,00	3.283.800,00	3.283.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			7.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	70.985.892,00	72.117.188,00	72.117.188,00	1.131.296,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			90.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.087.500,00	3.087.500,00	3.087.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	230.884.926,00	229.768.932,00	217.655.102,00	-13.229.824,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			296.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	3.268.839,00	3.268.839,00	3.268.839,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			9.700.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	19.318.995,00	19.318.995,00	30.318.995,00	11.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			31.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.197.946,00	337.197.946,00	325.555.816,00	63.357.870,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		265.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	19.548.000,00	19.548.000,00	19.548.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			19.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.332.764,00	324.331.548,00	319.607.508,00	-3.725.256,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		383.100.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	3 Unit	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			13.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
												8	9	10				11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	8.080.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			4.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	46.783.526,00	46.783.526,00	46.783.526,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			62.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.761.406.651,00	2.440.063.078,00	2.439.936.593,00	3.213.643.349,00							4.975.050.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.741.523.251,00	2.420.259.678,00	2.420.133.193,00	678.609.942,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		4.941.550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	238.116.432,00	378.184.680,00	378.184.680,00	140.068.248,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			732.300.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	195.369.160,00	224.116.660,00	224.116.660,00	28.747.500,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Pajagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			448.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
		KELURAHAN BANGSELOK							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00						13.303.750.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00						13.303.750.000,00		
	7.01	KECAMATAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00						13.303.750.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.379.561.811,00	6.454.252.705,00	7.294.894.425,00	1.701.738.189,00							8.081.300.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	53.443.500,00	52.314.900,00	52.314.900,00	-1.128.600,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		53.800.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	9 Paket	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			10.800.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	452.261.595,00	453.318.299,00	463.243.299,00	10.981.704,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		579.600.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.021.300,00	1.021.300,00	1.021.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		3.100.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68.006.946,00	67.932.354,00	67.932.354,00	-74.592,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			88.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.980.000,00	5.980.000,00	5.665.000,00	-315.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	230.884.926,00	229.768.932,00	217.655.102,00	-13.229.824,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			296.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			28.700.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	23.435.319,00	22.319.325,00	33.319.325,00	9.884.006,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangslok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			33.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.197.946,00	337.197.946,00	325.555.816,00	63.357.870,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			265.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.016.800,00	27.016.800,00	27.016.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			29.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	34.957.251,00	34.957.251,00	34.957.251,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			24.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.332.764,00	324.331.548,00	319.607.508,00	-3.725.256,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			383.100.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.510.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.059.836,00	23.238.620,00	23.238.620,00	1.178.784,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselo k	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			37.500.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.761.406.651,00	2.440.063.078,00	2.439.936.593,00	3.213.643.349,00							4.975.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.741.523.251,00	2.420.259.678,00	2.420.133.193,00	678.609.942,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-		4.941.550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	188.763.805,00	318.362.684,00	318.236.199,00	129.472.394,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			710.650.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	244.694.104,00	285.092.104,00	285.092.104,00	40.398.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Bangselok	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			490.900.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
		KELURAHAN KARANGDUAK							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00								13.303.750.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00								13.303.750.000,00	
	7.01	KECAMATAN							8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	1.592.474.756,00								13.303.750.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.379.561.811,00	6.454.252.705,00	7.294.894.425,00	1.701.738.189,00								8.081.300.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	452.261.595,00	453.318.299,00	463.243.299,00	10.981.704,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan	-			579.600.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Kesehatan				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	127.628.414,00	127.628.414,00	127.628.414,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																tenaga Pendidikan dan Kesehatan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	230.884.926,00	229.768.932,00	217.655.102,00	-13.229.824,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		296.200.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3.712.900,00	3.712.900,00	3.712.900,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangdua k	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		44.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	18.944.400,00	18.944.400,00	29.944.400,00	11.000.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.197.946,00	337.197.946,00	325.555.816,00	63.357.870,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			265.400.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.992.000,00	16.992.000,00	16.992.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			14.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.332.764,00	324.331.548,00	319.607.508,00	-3.725.256,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			383.100.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya				3 Unit	3 Unit	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangdua k	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana- Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan		10.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	8.760.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	-80.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.572.000,00	14.572.000,00	14.572.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.761.406.651,00	2.440.063.078,00	2.439.936.593,00	3.213.643.349,00							4.975.050.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.741.523.251,00	2.420.259.678,00	2.420.133.193,00	678.609.942,00			-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			4.941.550.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	260.323.900,00	380.229.300,00	380.229.300,00	119.905.400,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			900.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	173.125.060,00	223.171.560,00	223.171.560,00	50.046.500,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Karangduak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	KECAMATAN KOTA SUMENEP
J U M L A H									8.356.654.362,00	9.036.373.883,00	9.949.129.118,00	777.713.426.186,00					13.303.750.000,00			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Perubahan Renja Kecamatan Kota Sumenep ini disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Kota Sumenep ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kota Sumenep.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh *stakeholder*.

Sumenep, 26 Juli 2024  
**CAMAT KOTA SUMENEP**



**YUDI NURSUKMADYANTO, S.STP., MM**  
Pembina  
NIP. 19850222 200312 1 001



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP**

**(RENJA)  
RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN  
BATANG-BATANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**KECAMATAN BATANG-BATANG**  
Jalan Raya Cemara Udang No. 09 ☎ (0328) 511101

**SUMENEP**

Kode Pos : 69473

Sumenep, 12 Juli 2024

Nomor : 050/ /435.312/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rencana Kerja (RENJA)  
Perubahan TA. 2024  
-----

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Sumenep  
Melalui  
Sdr. Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Sumenep  
Di  
SUMENEP

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

TEMBUSAN :  
Yth. Sdri. Inspektur Kabupaten Sumenep  
-----

**CAMAT BATANG-BATANG**  
  
**M. H. B. S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19730716 199602 1 001


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Batang-batang, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Batang-batang pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya.

Sumenep, 12 Juli 2024

**CAMAT BATANG-BATANG**  
  
**M. J. B. S. Sps, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19730716 199602 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	1
SURAT PENGANTAR .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Landasan Hukum .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	8
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan .....	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	10
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	22
BAB IV PENUTUP .....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	32
1. Keputusan Camat Batang-batang Nomor 188/14/KEP/435.312/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.....	33
2. Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang.....	37
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang.....	38
4. Photo Dokumentasi Pembahasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatukomitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, Kecamatan Batang-batang telah menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Batang-batang Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Rencana Kerja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
13. PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 67 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
20. Peraturan Bupati Sumenep NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Batang-batang dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Batang-batang Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

### **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

Bab ini Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2024

### **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2021, penggeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran

### **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAI II TAHUN 2024**

Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sumenep Kepada Camat di Kabupaten Sumenep. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, meliputi :

#### **1) Pelayanan Perizinan meliputi :**

- Rekomendasi Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera;
- Rekomendasi Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi.

#### **2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :**

- Pelayanan Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk);
- Surat Keterangan Pindah;
- Rekomendasi Bantuan;
- Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan);
- Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum;
- Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja;
- Pertimbangan Pengangkatan Kepala Desa;
- Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja;
- Pembinaan Pegawai Negeri Sipil lingkup wilayah kerja;
- Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan;
- Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman;
- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan tingkat capaian kinerja sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat**

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah'.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

#### **b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Tata Pemerintahan**

- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
  - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
  2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
    - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa.

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

**e) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**f) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pelayanan Umum**

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
  2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Adapun Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, dapat dirincikan sebagaimana Tabel **FORMULIR E.81** berikut :

**FORMULIR E.81**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (s/d Triwulan 2 Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	Ket
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10=9/8x100%	11=7+9	12=11/6x100%	13
		7				UNSUR KEWILAYAHAN								
		7	01			KECAMATAN								
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor							KECAMATAN BATANG-BATANG
		7	01	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	30 Dokumen	6 Dokumen					
		7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen		



		7	01	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan			192 jenis	95 jenis	49,48 %	95 jenis		
		7	01	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			152 unit	74 unit	48,68 %	74 unit		
		7	01	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan			12 jenis 12 paket	5 jenis 6 paket	41,67 % 50,00 %	5 jenis 6 paket		
		7	01	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			22800 paket	11399 paket	50,00 %	11399 paket		
		7	01	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan			12 jenis	6 jenis	50,00 %	6 jenis		
		7	01	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			318 kali	143 kali	44,97 %	143 kali		
		7	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	35 Unit		7 Unit	7 Unit	100,00 %	7 Unit	20,00 %	
		7	01	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit		
		7	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	25 Layanan		5 Layanan	2 Layanan	40,00 %	2 Layanan	8,00 %	

		7	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet		12 rekening	6 rekening	50,00 %	6 rekening		
		7	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	75 Unit	15 Unit	8 Unit	53,33 %	8 Unit	10,67 %	
		7	01	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola		5 unit	0,5 unit	10,00 %	0,5 unit		
		7	01	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		52 unit					
		7	01	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		2 unit	1 unit	50,00 %	1 unit		
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	69 %	69,00 %	69 %	69,00 %	KECAMATAN BATANG-BATANG
		7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Kali	4 Kali	1 Kali	25,00 %	1 Kali	5,00 %	

							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan																	
		7	01	02	2	01					4 Kali	1 Kali	25,00 %	1 Kali											
		7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	300 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	100,00 %	60 Dokumen	20,00 %										
		7	01	02	2	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan			500 dokumen	500 dokumen	100,00 %	500 dokumen											
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100 %		100 %	44 %	44,00 %	44 %	44,00 %										KECAMATAN BATANG- BATANG
		7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	80 Kali		16 Kali	0 Kali	0,00 %	0 Kali	0,00 %										
		7	01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa			16 Desa	0 Desa	0,00 %	0 Desa											
		7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	85 Lembaga		17 Lembaga	8 Lembaga	47,06 %	8 Lembaga	9,41 %										
		7	01	03	2	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan			6 Kali	1 Kali	16,67 %	1 Kali											

		7	01	03	2	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi			16 Kelompok/Lembaga	16 Kelompok/Lembaga	100,00 %	16 Kelompok/Lembaga		
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %		100 %	80 %	80,00 %	80 %	80,00 %	KECAMATAN BATANG-BATANG
		7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	80 Kali		16 Kali	0 Kali	0,00 %	0 Kali	0,00 %	
		7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan			6 Kali	4 Kali	66,67 %	4 Kali		
		7	01	04	2	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan			1 Kali	1 Kali	100,00 %	1 Kali		
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %		100 %	20 %	20,00 %	20 %	20,00 %	KECAMATAN BATANG-BATANG
		7	01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	41 Kali		8 Kali	4 Kali	50,00 %	4 Kali	9,76 %	

							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan								
		7	01	05	2	01				8 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0 Kegiatan			
		7	01	05	2	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan		12 Kali	4 Kali	33,33 %	4 Kali			
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	47 %	47,00 %	47 %	47,00 %	KECAMATAN BATANG-BATANG	
		7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	3 Kegiatan						
		7	01	06	2	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam		16 Desa	16 Desa	100,00 %	16 Desa			

						1 4	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan			16 kali/buah	0 kali/buah	0,00 %	0 kali/buah		
						1 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD			16 desa	8 desa	50,00 %	8 desa		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													<b>50,67 %</b>			
<b>Predikat kinerja</b>													<b>Sangat Rendah</b>			

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep disebabkan oleh penyesuaian atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batang-batang**

**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batang-batang**

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	Kecamatan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						2.766.487.142	2.766.487.142	3.088.828.946	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						4.546.300	4.546.300	4.546.300	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	916,783	916,783	916,783	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	916,783	916,783	916,783	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	916,783	916,783	916,783	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	916,783	916,783	916,783	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	916,783	916,783	916,783	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>2.167.391.359</b>	<b>2.167.391.359</b>	<b>2.476.645.763</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN	24 ASN	21 ASN	2,347,214,709	2,347,214,709	2,169,272,250	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	15,659,197	15,659,197	13,223,256	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.587.400</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Stel	28 Stel	13 Paket	0	0	12.587.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>170.602.322</b>	<b>170.602.322</b>	<b>170.602.322</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	192 Jenis	192 Jenis	192 Paket	6,603,984	6,603,984	6,726,280	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	152 Jenis	152 Jenis	152 Paket	34,761,720	34,761,720	43,513,700	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	786 Jenis	786 Jenis	786 Paket	49,192,210	49,192,210	37,643,692	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang diadakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22800 Lembar	22800 Lembar	22800 Paket	8,748,000	8,748,000	8,748,000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Dokumen	2,592,000	2,592,000	2,592,000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318 Kali	318 Kali	318 Laporan	53,402,000	53,402,000	53,402,000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>38.265.500</b>	<b>38.265.500</b>	<b>38.265.500</b>	
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	10,141,200	10,141,200	10,141,200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>15,025.224</b>	<b>15,025.224</b>	<b>15,025.224</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Rekening	6 Rekening	72 Laporan	15,889,920	15,889,920	15,889,920	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						133.165.932	133.165.932	133.165.932	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Unit	5 Unit	18 Unit	13,204,596	13,204,596	13,204,596	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115,844,376	115,844,376	123.258.736	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	45,780,000	45,780,000	45,780,000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	853 M2	853 M2	4 Unit	10,860,000	10,860,000	10,860,000	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/ Dipelihara	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/ Dipelihara				59,204,376	59,204,376	59,204,376	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.386.000	11.386.000	11.386.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.388.800	8.388.800	8.388.800	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Kali	4 Kali	4 Laporan	8.388.800	8.388.800	8.388.800	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						<b>6,271,360</b>	<b>6,271,360</b>	<b>5,705,700</b>	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	500 Dokumen	500 Dokumen	1 Laporan	6,271,360	6,271,360	6,271,360	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						<b>15.102.500</b>	<b>15.102.500</b>	<b>15.102.500</b>	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						<b>2.097.200</b>	<b>2.097.200</b>	<b>2.097.200</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Desa	14 Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	2.097.200	2.097.200	2.097.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						<b>3.005.300</b>	<b>3.005.300</b>	<b>3.005.300</b>	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksana	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	6 Kali	6 Kali	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.005.300	3.005.300	3.005.300	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
				kan kecamatan	Kapasitasnya							Tahun 2021
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Laporan	5,974,360	5,974,360	5,974,360	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>17.524.800</b>	<b>17.524.800</b>	<b>17.524.800</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>						<b>17.524.800</b>	<b>17.524.800</b>	<b>17.524.800</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Kali	6 Kali	6 Laporan	5.383.200	5.383.200	5.383.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kali	1 Kali	1 Laporan	12.141.600	12.141.600	12.141.600	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>174.802.800</b>	<b>174.802.800</b>	<b>174.802.800</b>	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>174.802.800</b>	<b>174.802.800</b>	<b>174.802.800</b>	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Orang	40.636.400	40.636.400	40.636.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rakor forkopimcam yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kali	12 Kali	12 Dokumen	134.166.400	134.166.400	134.166.400	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						<b>18.674.400</b>	<b>18.674.400</b>	<b>18.674.400</b>	
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						<b>18.674.400</b>	<b>18.674.400</b>	<b>18.674.400</b>	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbangcam	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Desa	14 Desa	14 Dokumen	4.197.200	4.197.200	4.197.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerja sama dilaksanakan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	16 kali/buah	14 Desa	14 Dokumen	14.477.200	14.477.200	14.477.200	Penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
<b>TOTAL</b>									<b>2.766.497.142</b>	<b>2.766.497.142</b>	<b>3.088.328.946</b>	



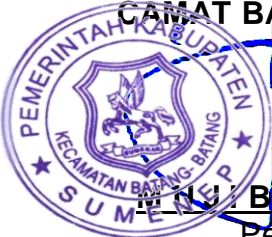
## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama Tahun 2024, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep selama Tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung-jawaban kepada Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 12 Juli 2024

**CAMAT BATANG-BATANG**  
  
**B. S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19730716 199602 1 0012

# LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN BATANG-BATANG**  
Jalan Raya Cemara Udang No. 09 ☎ (0328) 511101  
**SUMENEP**

Kode Pos : 69473

KEPUTUSAN CAMAT BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 188/ /KEP/435.317/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

CAMAT BATANG-BATANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Batang-batang Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sebagaimana

- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
1. Membuat dan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
  2. Merumuskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.
- Ketiga : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sebagaimana Diktum Kedua dimaksud mempunyai tugas (dengan memperhatikan) :
- a. Data target dan hasil capaian indikator kinerja, indikator program, kegiatan, sub kegiatan periode sebelumnya;
  - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
  - c. Data time series selama 1 Tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
  - d. Telaah atas relevansi indikator kinerja terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
  - e. Identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  - f. Data dan informasi, analisis gambaran Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
  - g. Rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - h. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
  - i. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala camat;
  - j. Sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Batang-batang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

-----

 **CAMAT BATANG-BATANG**  
**B. S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19730716 199602 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Batang-batang  
Nomor 188/ /KEP/435.317/2024  
Tanggal : 04 Juli 2024

-----

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua	Camat Batang-batang
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Batang-batang
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Batang-batang;</li><li>2. Kepala Sub Bagian Umum, Arsip dan Kepegawaian Kecamatan Batang-batang;</li><li>3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Batang-batang;</li><li>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Batang-batang</li><li>5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Batang-batang;</li><li>6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Batang-batang;</li><li>7. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Batang-batang</li></ol>

Sumenep, 04 Juli 2024



**W. J. S. Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19730716 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**KECAMATAN BATANG-BATANG**  
Jalan Raya Cemara Udang No. 09 ☎ (0328) 511101

**SUMENEP**

Kode Pos : 69473

**BERITA ACARA**

Nomor : 050/04/BA/435.317/2024

VERIFIKASI RANCANGAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat Batang-batang Kabupaten Sumenep, Tanggal 04 Juli 2024, Nomor : 188/14/KEP/435.312/2024, telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
3. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
4. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

Masing-masing sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, sebagai bahan perbaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 12 Juli 2024

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUJIB, S.Sos, M. Si.	Ketua	1
2	Catur Wendra Setiady, S. Pd, M. Si	Sekretaris	2
3	Wawan Wahyudi, SE, M. Si.	Anggota	3
4	Taufik Rahman, SH.	Anggota	4
5	Nur Hartatik	Anggota	5
6	Cholid Mawardi, A. Ma		6
7	RB. Agus Setia Budi, SE, M. Si	Anggota	7
8	Moh. Sutikno, S. AP.	Anggota	8
9	Fathor Rahman, SE.	Anggota	9
10	Moro	Anggota	10

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√	-	-	-
2.	Pengolahan Data dan Informasi.	√	-	-	-
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√	-	-	-
4.	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.	√	-	-	-
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
6.	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√	-	-	-
7.	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√	-	-	-
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√	-	-	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√	-	-	-
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten.	√	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√	-	-	-

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai Surat Edaran Kepala Daerah.	√	-	-	-
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√	-	-	-
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√	-	-	-
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√	-	-	-
14.	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang telah disahkan.	√	-	-	-

Sumenep, 12 Juli 2024

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUJIB, S.Sos, M. Si.	Ketua	1
2	Catur Wendra Setiady, S. Pd, M. Si	Sekretaris	2
3	Wawan Wahyudi, SE, M. Si.	Anggota	3
4	Taufik Rahman, SH.	Anggota	4
5	Nur Hartatik	Anggota	5
6	RB. Agus Setia Budi, SE, M. Si	Anggota	6
7	Cholid Mawardi, A. Ma	Anggota	7
8	Moh. Sutikno, S. AP.	Anggota	8
9	Fathor Rahman, SE.	Anggota	9
10	Moro	Anggota	9

**PHOTO DOKUMENTASI**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP**  
**PADA HARI SELASA, TANGGAL 12 JULI 2024**





# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN PASONGSONGAN



 [kec\\_pasongsongan](#)

 [Kecamatan Pasongsongan](#)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

*Pasongsongan, Agustus 2024*

  
**CAMAT PASONGSONGAN**  
**FARIZ AULIA UTOMO, S.STP., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP.19870520 200602 1 004

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>20</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Periode Pelaksanaan : S/D Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahun daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

4. Pergeseran pagu kegiatan. penghapusan kegiatan. penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif. penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasongsongan merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Dokumen perubahan Renja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan kedua Tahun 2024

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum. khususnya Kecamatan Pasongsongan. dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587). sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep;
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);

19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 26)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pasongsongan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pasongsongan dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

### **1.4. Sistematika**

Sistematika Perubahan Renja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB IV Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasongsongan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pasongsongan Tahun 2021 – 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasongsongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024. selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pasongsongan mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasongsongan.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran dan kinerja Kecamatan Pasongsongan masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dibawah ini:



No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian		Unit Perangkat Daerah	
					6		7		8		9		10		13-9+10+11+12		14-13/8x100%		15-7+13		16-15/6x100%		17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7 01 01 2.1	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	19.230.570	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%	0	0					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	790 unit	384.901.956	128 unit	74.404.300	169 Unit	71.118.300	25	14.655.000	32	15.058.131	57	29.713.131	36,54%	41,78%	57	29.713.131	7%	42%		Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	3.494.400	3	1.704.500	0	0	3	1.704.500	33,33%	48,78%	3	1.704.500					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.180.600	3	1.545.000	0	0	3	1.545.000	25,00%	25,00%	3	1.545.000					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.070.200	3	6.000.000	3	4.486.000	6	10.486.000	50,00%	43,56%	6	10.486.000					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.495.500	0	1.380.000	1	1.620.000	1	3.000.000	50,00%	28,58%	1	3.000.000					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	3.220.800	6	804.000	6	804.000	12	1.608.000	50,00%	49,93%	12	1.608.000					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 Laporan	21.420.000	10	2.760.000	22	7.566.631	32	10.326.631	33,33%	48,21%	32	10.326.631					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	2.236.800	500	461.500	500	581.500	1000	1.043.000	50,00%	46,63%	1000	1.043.000					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	72 Unit	321.701.074	21 Unit	55.167.000	25 Unit	60.344.282	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0%			Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	12.059.262	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	48.285.020	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	10 Jenis	223.552.288	2 Jenis	46.830.594	2 Jenis	130.288.400	0	19.506.322	1	30.482.088	1	49.988.410	50,00%	38,37%	1	49.988.410	10%	38%			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 01 2.1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.288.400	3	5.706.322	3	4.082.088	6	9.788.410	50,00%	56,62%	6	9.788.410					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	113.000.000	3	13.800.000	3	26.400.000	6	40.200.000	50,00%	35,58%	6	40.200.000					Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 01 2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	115 Unit	471.982.040	23 Unit	146.950.975	23 Unit	194.994.000	2	81.750.000	6	92.760.000	8	174.510.000	38,10%	89,50%	8	174.510.000	7%	89%			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 01 2.1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	17.425.000	1	1.750.000	3	4.000.000	4	5.750.000	66,67%	33,00%	4	5.750.000					Kecamatan Pasongsongan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian		Unit Perangkat Daerah
					6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 01 2.1 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					14 Unit	9.569.000	0	0	1	760.000	1	760.000	7,14%	7,94%	1	760.000			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 01 2.1 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	168.000.000	1	80.000.000	2	88.000.000	3	168.000.000	100%	100%	3	168.000.000			Kecamatan Pasongsongan
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan</b>	100 %	60.147.756	100 %	7.269.000	100%	7.686.400	11%	779.500	15%	1.132.000	25%	1.911.500	25%	25%	25,45%	1.911.500	25%	25%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 02 2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Kali	24.087.625	4 Kali	4.410.000	4 Laporan	3.954.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 02 2 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 Laporan	3.954.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 02 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	60 Laporan	36.060.131	Dokumen	2.859.000	12 laporan	3.732.400	3	779.500	3	1.132.000	6	1.911.500	50,00%	51,21%	6	1.911.500	10%	51%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 02 2 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					12 laporan	3.732.400	3	779.500	3	1.132.000	6	1.911.500	50,00%	51,21%	6	1.911.500			Kecamatan Pasongsongan
3	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan</b>	100%	123.102.691	100 %	54.035.000	100%	60.154.000	0	0	0	6.250.000	10%	6.250.000	10,39%	10,39%	0	6.250.000	0%	10%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 03 2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 Laporan	69.755.136	Kegiatan	5.900.000	10 Laporan	6.070.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 03 2 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10 L. Kemasyaralatan	6.070.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 03 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	60 Laporan	54.111.645	100 %	48.135.000	1 Laporan	34.084.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 03 2 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1 Laporan	34.084.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 03 2.1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan					10 Laporan	20.000.000	0	0	250	6.250.000	250	6.250.000	50%	31,25%	250	6.250.000			Kecamatan Pasongsongan

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian		Unit Perangkat Daerah
					6		7		8		9		10		13-9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13-9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
		7 01 03 2.1 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					500 Keluarga	20.000.000	0	0	250	6.250.000	250	6.250.000	50%	31,25%	250	6.250.000			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>	100%	305.490.648	100%	16.460.000	100%	16.318.000	33%	3.505.000	33%	3.505.000	67%	7.010.000	66,67%	42,96%	1	7.010.000	1%	43%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 04 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	15 Laporan	305.490.648	3 Kali	16.460.000	3 Laporan	16.318.000	1	3.505.000	1	3.505.000	2	7.010.000	66,67%	42,96%	2	7.010.000	13%	43%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 04 2 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3 Laporan	16.318.000	1	3.505.000	1	3.505.000	2	7.010.000	66,67%	42,96%	2	7.010.000			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan</b>	100%	92.897.841	100%	45.870.000	100%	55.167.800	23%	7.850.000	23%	13.450.000	46%	21.300.000	46,15%	38,61%	46,15%	21.300.000	46%	39%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 05 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Laporan	92.897.841	Kegiatan	45.870.000	13 Laporan	55.167.800	3	7.850.000	3	13.450.000	6	21.300.000	46,15%	38,61%	6	21.300.000	8%	39%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 05 2 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	12.567.800	0	0		0	0	0,00%	0,00%	0	0			Kecamatan Pasongsongan	
		7 01 05 2 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	42.600.000	3	7.850.000	3	13.450.000	6	21.300.000	50,00%	50,00%	6	21.300.000			Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan</b>	100%	512.375.801	100%	67.326.250	100%	64.675.800	13%	6.485.000	16%	8.570.000	29%	15.055.000	28,57%	23,28%	28,57%	15.055.000	29%	23%	Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500 Laporan	512.375.801	100%	67.326.250	70 Laporan	64.675.800	9	6.485.000	11	8.570.000	20	15.055.000	28,57%	23,28%	20	15.055.000	4%	23%	Kecamatan Pasongsongan

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian		Unit Perangkat Daerah
					6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 01 06 2	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					10 Dokumen	7.634.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10 Dokumen	7.632.500	0	0	10	7.220.000	10	7.220.000	100%	94,60%	10	7.220.000		Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10 Dokumen	19.257.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10 Dokumen	8.247.500	9	6.485.000	1	1.350.000	10	7.835.000	100%	95,00%	10	7.835.000		Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10 Dokumen	8.712.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga					10 Dokumen	7.973.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		Kecamatan Pasongsongan
		7 01 06 2	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					10 Dokumen	5.218.300	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		Kecamatan Pasongsongan
											2.326.349.159						1.101.251.399				Kecamatan Pasongsongan		
											Rata-rata capaian kinerja (%)						35,14%		47,34%				
											Predikat kinerja						Sangat Rendah		Sangat Rendah				

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok. Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep khususnya urusan Kewilayahan pada tahun 2024 melaksanakan 6 program. dan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Pasongsongan. Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II mencapai 34 % dengan Tingkat Capaian Kinerja Renja mencapai 34 %. hal ini dapat di kategorikan sangat rendah. Adapun hal ini dikarenakan beberapa sub Kegiatan anggaran Kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II masih mencapai 25 % dengan Tingkat Capaian Kinerja Renja mencapai 25 %. hal ini dapat di kategorikan sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait belum terealisasi sampai dengan Triwulan II.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- 3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II baru mencapai 10 % dengan Tingkat Capaian Kinerja Renja mencapai 10 %. hal ini dapat di kategorikan sangat rendah pelaksanaan kinerjanya kerana beberapa sub Kegiatan belum terealisasi sampai dengan Triwulan II. Adapun Sub Kegiatan yang belum terealisasi ini dikerenakan beberapa sub Kegiatan anggaran Kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV. sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

#### **4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 67 % dengan Tingkat Capaian Kinerja Renja mencapai 67%. hal ini dapat di kategorikan cukup baik. dikerenakan beberapa sub Kegiatan telah sesuai dengan anggaran Kasnya.

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II mencapai 46% dengan Tingkat Capaian Kinerja Renja mencapai 46%. hal ini dapat di kategorikan sangat rendah pelaksanaan kinerjanya. Hal tersebut dikarenakan Sub Kegiatan yang belum terealisasi ini dikerenakan beberapa sub Kegiatan anggaran Kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV. sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya. . Adapun Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai anggaran Kas akan terlaksana pada Triwulan III

#### **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1) Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 29% dengan Tingkat Capaian Kinerja Renja mencapai 29%. hal ini dapat di kategorikan sangat rendah pelaksanaan kinerjanya. Adapun Sub Kegiatan yang belum terealisasi ini dikerenakan beberapa sub Kegiatan anggaran Kasnya masih

terrealisasi pada triwulan III atau triwulan IV. sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

Secara Keseluruhan capaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sampai dengan triwulan II sudah mencapai 35,14%. hal ini merupakan capaian yang kurang baik sampai dengan Triwulan II. Berdasarkan Hasil Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2024 s.d Triwulan II tentunya muncul hal-hal yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat pencapaian kinerja Kecamatan Pasongsongan. Adapun faktor pendorong dan penghambat tersebut adalah :

### **2.1 FAKTOR PENDORONG**

Berikut faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Kecamatan Pasongsongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, antara lain :

1. Kerjasama yang baik dan kekompakan tim intenal Kecamatan Pasongsongan, baik internal seksi/sub bagian maupun antar seksi/ sub bagian;
2. Komitmen Pimpinan dan seluruh stakeholder lingkungan Kecamatan Pasongsongan terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan;

### **2.2 FAKTOR PENGHAMBAT**

Berikut faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Kecamatan Pasongsongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, antara lain :

1. Capaian kinerja Kecamatan Pasongsongan masih cukup rendah karena menyesuaikan dengan Anggaran Kas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. sehingga dari segi capaian kinerja masih rendah namun dari ketepatan realisasi anggaran KAS sudah cukup baik.
2. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering kali berubah – ubah.

### **2.3 TINDAK LANJUT**

Tindak lanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal, maka ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Memperhatikan kembali indikator dan target dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasongsongan;
2. Melakukan reuiu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
3. Menentukan terget secara realistis dan berdasar sesuai dengan perumusan perhitungan pencapaian targetnya;
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor sehingga implementasi kegiatan dapat berjalan dengan lancar

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Pasongsongan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasongsongan Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR / SUB INDIKATOR	TARGET AKHIR PERIODE BERTASARU (SP)	REALISASI CAPAIAN BELA DPC TAHUN 2023	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET BELA DPC TAHUN 2024	CAPAIAN KIBERLA DAN KIBERAKSI PENDANAAN										KELUMPURAN SAHABAT	PERUBAHAN RENCANA KEBERLA 2024		PENCANAIAN SAKSIAN PERUBAHAN JAWAB
							TARGET 2024		PADA INDIKATOR (RU)		Berkembang/Berkurang (19-22)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PADA INDIKATOR (Rp)	
							SEBELUM	SEBESAR	2023	2024	2023	2024			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>KECAMATAN PASONGSONG</b>							2.182.281.736,00	2.182.281.736,00	2.203.860.888,00	121.412.121,00							2.203.799.888,00	
		<b>UMUM KEBERKHAMPIRAN</b>							2.182.281.736,00	2.182.281.736,00	2.203.860.888,00	121.412.121,00							2.203.799.888,00	
		<b>KECAMATAN</b>							2.182.281.736,00	2.182.281.736,00	2.203.860.888,00	121.412.121,00							2.203.799.888,00	
1	7.01.01	<b>PROGRAM PENYUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	Peningkatan kesejahteraan masyarakat umum dan pemerataan akses	100 %	100 %	1.876.249.736,00	1.876.249.736,00	2.029.861.888,00	153.612.152,00										2.184.122.152,00	
	7.01.01.2.01	Penyusunan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	6.272.249,00	6.272.249,00	6.272.249,00	-	0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					6.117.852,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.701.249,00	1.701.249,00	1.701.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					2.201.600,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.01.0002	Realisasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD (SPP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan APBD (SPP) dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Dokumen APBD (SPP)	1 Dokumen	1 Dokumen	665.249,00	665.249,00	665.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					1.147.852,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.01.0003	Realisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Perubahan APBD (SPP)	Jumlah Dokumen Perubahan APBD (SPP) dan Laporan Hasil Realisasi Perubahan Dokumen Perubahan APBD (SPP)	1 Dokumen	1 Dokumen	665.249,00	665.249,00	665.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					1.147.852,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.01.0004	Realisasi dan Pengawasan Perubahan APBD (SPP)	Jumlah Dokumen Perubahan APBD (SPP) dan Laporan Hasil Realisasi Perubahan Dokumen Perubahan APBD (SPP)	1 Dokumen	1 Dokumen	665.249,00	665.249,00	665.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					1.147.852,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.01.0005	Realisasi dan Pengawasan Perubahan APBD (SPP)	Jumlah Dokumen Perubahan APBD (SPP) dan Laporan Hasil Realisasi Perubahan Dokumen Perubahan APBD (SPP)	1 Dokumen	1 Dokumen	665.249,00	665.249,00	665.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					1.147.852,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.01.0006	Realisasi dan Pengawasan Laporan Laporan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja (SKP)	Jumlah Laporan Kinerja Realisasi dan Laporan Realisasi Kinerja (SKP) dan Laporan Hasil Realisasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasongsongan (SKP)	4 Laporan	4 Laporan	1.201.249,00	1.201.249,00	1.201.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					1.201.600,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah yang Disusun	24 Laporan	24 Laporan	1.467.852.736,00	1.467.852.736,00	1.668.412.647,00	111.412.621,00										1.708.911.676,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.02.0001	Manajemen dan Tata Kelola Anggaran APBD	Jumlah Urang yang Beres dan Laporan Anggaran APBD	13 Urang yang Beres	13 Urang yang Beres	1.466.241.736,00	1.466.241.736,00	1.668.412.647,00	111.412.621,00										1.668.241.600,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.02.0002	Realisasi dan Pengawasan Laporan Realisasi Anggaran (Laporan Realisasi Anggaran)	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Anggaran, SPP dan Laporan Hasil Realisasi Pelaksanaan Laporan Penganggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (SPP)	12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00		0,00									7.745.000,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.03	Administrasi Pengawasan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	66.249.249,00	66.249.249,00	66.249.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					66.438.100,00	KELOMPOK PUSKESMAS
	7.01.01.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Dinas dan/atau Bidang Kecamatan	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Dinas dan/atau Bidang Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	66.249.249,00	66.249.249,00	66.249.249,00		0,00			Mengajukan Anggaran	Publikasi dan Transparansi Pemerintah					66.438.100,00	KELOMPOK PUSKESMAS

No	Kode	Uraian / Deskripsi Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Proses Rencana OPD	Realisasi Capaian Kerja OPD Tahun 2023	Pembayaran Capaian Kerja OPD Tahun 2023	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kelompok Anggaran	Pembayaran Mula Rencana Tahun 2023		Pembuat Anggaran / Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Rencana/Berimbang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perimbangan 2024				Sesional	Nasional						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7.01.01.2.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dan perlengkapan kantor yang disediakan				100 unit	172 unit	345.119.500,00	71.119.300,00	60.730.300,00	40.380.000,00			Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				60.130.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM	
7.01.01.2.00.0001		Persediaan Barang Inventaris Lada/Persediaan Dengan Kantor	Jumlah Paket Pengisian Bundles Lada/Persediaan yang disediakan				0 Paket	0 Paket	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Lada Hasil Perkebunan yang harmonis dan sejalan				0.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0002		Persediaan Paket dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralengkapan Peralengkapan Kantor yang disediakan				12 Paket	12 Paket	0.180.000,00	0.180.000,00	0.180.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				7.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0003		Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 Paket	10 Paket	24.070.000,00	24.070.000,00	24.070.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				24.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0004		Persediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				12.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0005		Persediaan Bahan Baku dan Peralatan Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Baku dan Peralatan Perkebunan yang disediakan				24 Dikawatir	24 Dikawatir	0.200.000,00	0.200.000,00	0.200.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Lada Hasil Perkebunan yang harmonis dan sejalan				0.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0006		Persediaan Bahan Baku Kebutuhan (Bahan Baku)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerja Kebutuhan (Bahan Baku)				100 Laporan	112 Laporan	90.430.000,00	21.430.000,00	21.430.000,00	40.340.000,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				23.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0007		Persediaan Bahan Baku (Bahan Baku)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerja (Bahan Baku)				2000 Dikawatir	2000 Dikawatir	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				2.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0008		Persediaan Barang Mula Dikawatir Pengawasan Peralengkapan Kantor	Jumlah Barang Mula Dikawatir yang disediakan				25.000	25.000	60.344.000,00	60.344.000,00	60.344.000,00	0,00				Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				61.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0009		Persediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan yang disediakan				11.000	11.000	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				11.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0010		Persediaan Peralatan dan Mesin Lada	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lada yang disediakan				14.000	14.000	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				39.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00		Persediaan dan Pengingat Laporan Perencanaan Daerah	Jumlah Laporan yang disediakan				2.000	2.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00			Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				10.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM	
7.01.01.2.00.0020		Persediaan dan Kebutuhan Bahan Baku dan Lada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerja Bahan Baku dan Lada yang disediakan				10.000	10.000	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00		Rib. Sumatera, Penganggaran, Sumber Asli Dana	UMDA TRANSFORMASI LADA (UMDA) ALORAGI (UMDA)	Mengikuti realisasi Penerimaan Asli Daerah	Penggunaan Tabung Penerimaan Asli Daerah yang harmonis dan sejalan				17.000.000,00	KECAMBATAN PAKSOKROKIDAM
7.01.01.2.00.0021		Persediaan dan Pengingat Laporan Kantor																				





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET TAHAP PERIODE REKORD OPD	REALISASI CAPAIAN REKORD OPD TAHAP 2021	PERUBAHAN CAPAIAN TARGET REKORD OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELUMPURAN SALURAN	PRAKARSA BAKU RENCANA TAHAP 2021		PERINGKAT SALURAN PENGKONDISI JERAS					
							TARGET 2021		PADU INDIKATIF (Rp)				Berubah/Berkurang (19-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PADU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD PERUBAHAN 2021						NASIONAL	DAERAH		
			Jumlah Dukumen yang dikembangkan sebagai Peningkatan Kualitas Desa dan Pembangunan Desa Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	10.207.300,00	10.207.300,00	10.207.300,00	0,00	Rab. Sumenep, Peningkatan, Sembako/KelDesa	BUSA / DESA PERKOTAAN/AGRI AGRI/UMUM UMUM/UMUM UMUM/UMUM	Mempertah kan Pembangunan (Des Kendaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif		22.975.150,00	KECABATAWU PENGKONDISI JERAS	
7.01.06.2.01.009		Fasilitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Desa dan Pengembangan Desa																		
			Jumlah Dukumen Strategis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	8.247.500,00	8.247.500,00	8.247.500,00	0,00	Rab. Sumenep, Peningkatan, Sembako/KelDesa	BUSA / DESA PERKOTAAN/AGRI AGRI/UMUM UMUM/UMUM	Mempertah kan Pembangunan (Des Kendaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif		10.700.000,00	KECABATAWU PENGKONDISI JERAS	
7.01.06.2.01.011		Fasilitas Pengembangan Konektivitas dan Konektivitas Lintas																		
			Jumlah Dukumen Fasilitas jalan rangka Peningkatan Konektivitas dan Konektivitas Lintas				10 Dokumen	10 Dokumen	8.712.500,00	8.712.500,00	8.712.500,00	0,00	Rab. Sumenep, Peningkatan, Sembako/KelDesa	BUSA / DESA PERKOTAAN/AGRI AGRI/UMUM UMUM/UMUM	Mempertah kan Pembangunan (Des Kendaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif		11.446.250,00	KECABATAWU PENGKONDISI JERAS	
7.01.06.2.01.014		Fasilitas Konektivitas Antar Desa dan Konektivitas Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dukumen Fasilitas jalan rangka Konektivitas Antar Desa dan Konektivitas Desa dengan Pihak Ketiga				10 Dokumen	10 Dokumen	7.973.000,00	7.973.000,00	7.973.000,00	0,00	Rab. Sumenep, Peningkatan, Sembako/KelDesa	BUSA / DESA PERKOTAAN/AGRI AGRI/UMUM UMUM/UMUM	Mempertah kan Pembangunan (Des Kendaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif		11.300.000,00	KECABATAWU PENGKONDISI JERAS	
7.01.06.2.01.015		Fasilitas Perumahan, Pemukiman, dan Pengembangan Ruang Desa serta Perumahan dan Peningkatan Desa Desa																		
			Jumlah Dukumen Fasilitas jalan rangka Perumahan dan Pengembangan Ruang Desa serta Perumahan dan Peningkatan Desa Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	5.216.300,00	5.216.300,00	5.216.300,00	0,00	Rab. Sumenep, Peningkatan, Sembako/KelDesa	BUSA / DESA PERKOTAAN/AGRI AGRI/UMUM UMUM/UMUM	Mempertah kan Pembangunan (Des Kendaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif		11.300.000,00	KECABATAWU PENGKONDISI JERAS	
7.01.06.2.01.017		Konektivitas Pembangunan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Konektivitas Pembangunan Desa di Wilayahnya				-	10 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Rab. Sumenep, Peningkatan, Sembako/KelDesa	DANA TRANSKIPER UMUM/UMUM UMUM/UMUM	Mempertah kan Pembangunan (Des Kendaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif Peningkatan Tata Rencana Pembangunan yang harmonis dan adaptif		11.000.000,00	KECABATAWU PENGKONDISI JERAS	
<b>J U M L A H</b>									<b>2.160.291.740,00</b>	<b>2.160.291.040,00</b>	<b>2.363.663.000,00</b>	<b>777.210.426.100,00</b>							<b>2.200.700.000,00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Pasongsongan Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep

Perubahan Renja Kecamatan Pasongsongan disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Pasongsongan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Pasongsongan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

  
**KECAMAT PASONGSONGAN**

**FARIZ AULIA UTOMO, S.STP., M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19870520 200602 1 004

KEC. DUNGKEK

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN DUNGKEK  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dungkek Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dungkek Tahun 2025 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Renstra dan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Diharapkan nantinya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025

Akhirnya besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Dungkek ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kecamatan Dungkek.

Sumenep, Juni 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN DUNGKEK  
**DADANG Bedy ISKANDAR, S.H., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19730320 199503 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1    LATAR BELAKANG.....	3
1.2    DASAR HUKUM.....	3
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	8
2.1    FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA.....	8
2.2    FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	8
2.3    TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA.....	9
BAB. III.....	24
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	24
KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP.....	24
BAB IV.....	26
PENUTUP.....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dungkek Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dan untuk perubahan renja disesuaikan dengan RKPD Perubahan.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dungkek Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten sumenep Tahun 2025.
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Renja Kecamatan Dungkek Tahun 2025 disusun dengan maksud :

- a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kecamatan Dungkek khususnya di Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan perubahan renja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Renja Kecamatan Dungkek Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi dan tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **I.3 Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

### **I.4 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

### **I.5 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan Faktor Pendorong dan Penghambat serta Tindak Lanjut Pelaksanaan Triwulan / RKPD Berikutnya

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Rencana Kerja Kecamatan Dungkek adalah penjabaran Perencanaan dan Rencana Strategis Kecamatan Dungkek. Tercapai tidaknya pelaksanaannya kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Dungkek ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Dungkek selama tahun 2025 dan prakiraan tahun 2025.

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatannya meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### 2.1 FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa faktor pendorong dalam rangka Pencapaian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan.
- b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Camat dengan Bupati Sumenep, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.
- c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

#### 2.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Kecamatan Dungkek dalam rangka pencapaian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya konsistensi dalam menyusun perencanaan, yaitu judul kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta DPA sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- b. Kurang optimalnya penyerapan anggaran karena kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun DPA serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- d. Terbatasnya pengetahuan dan jumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang ada di Kelurahan sebagai pelaksana kegiatan Swakelola tipe IV pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih lama.

### **2.3 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA**

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat seperti yang telah diuraikan di atas, maka tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan / RKPD berikutnya adalah :

- a. Melakukan penyesuaian antara dokumen renstra dengan RKPD / Renja Perubahan Kecamatan Dungkek.
- b. Melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik ketika menyusun RKA dan anggaran kas.
- c. Pembenahan tata kelola SDM untuk mengatasi keterbatasan SDM.
- d. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja.
- e. Permohonan pendampingan kepada perangkat daerah pengampu kebijakan.

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**  
**RENJA KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP**  
**PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7			UNSUR KEWILAYAHAN																						
		7	01		KECAMATAN																						
		7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor	100	8.955.853,294	100	2.203.592,875	30	317.326,324	-	0	-	0	-	0	30	317.326,324	#VAL UE!	14	30	317.326,324	#VAL UE!	4	KECAMATAN DUNGKEK
		7	01	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	125 Dokumen	51.250.000	100	39.043,400	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#VAL UE!	-	-	-	#VAL UE!	-	
		7	01	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	20.000.000	2 Dokumen	8.680,500	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
		7	01	01	2	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	1 Dokumen	6.302,100	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	#DIV/0!	-		



					0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	35,000,000			15 Paket	16,248,600	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VAL UE!	-			
					7 01 01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi	20 Unit	457,582,665				108,970,800	2	4,786,100	0	0	0	0	0	0	2	4,786,100	-	4	2	4,786,100	-	-	-	-	-	-	#VAL UE!	1		
					0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	11,489,300	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	-		
					0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	25,287,900	1	1,486,100	0	0	0	0	0	1	1,486,100	-	6	1	1,486,100	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	148,610, 000		
					0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	24,000,000	1	2,200,000	0	0	0	0	0	1	2,200,000	-	9	1	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	220,000, 000		
					0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	6,129,600	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	-		
					0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2,640,000	1	300,000	0	0	0	0	0	1	300,000	-	11	1	300,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	30,000,0 00		
					0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	39,424,000	1	800,000	0	0	0	0	0	1	800,000	-	2	1	800,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	80,000,0 00		
					7 01 01 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik Daerah yang yang diadakan	35 Unit	65,175,000				55,222,323	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VAL UE!	-		
					0 0 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	6,419,907	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	-		
					0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	48,802,416	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	-		

7	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang disediakan	10 Jenis	44,250,000			140,280,000	0	2,853,900	0	0	0	0	0	0	0	-	2,853,900	-	2	-	2,853,900	#VAL UE!	6	
7	01	01	2	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22,125,000		12 Laporan	26,418,000	6	2,853,900	0	0	0	0	0	0	6	2,853,900	-	11	6	2,853,900	#DIV/0!	13		
7	01	01	2	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		22,125,000		12 Laporan	113,862,000	9	-	0	0	0	0	0	9	-	-	-	9	-	-	#DIV/0!	-		
7	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Pelihara	20 Unit	187,000,000			63,745,600	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	#VAL UE!	-		
7	01	01	2	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				3 Unit	14,601,600	2	-	0	0	0	0	0	2	-	-	-	2	-	-	#DIV/0!	-		
7	01	01	2	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	17,080,000	5	-	0	0	0	0	0	5	-	-	-	5	-	-	#DIV/0!	-		
7	01	01	2	0 0 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32,064,000	1	-	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	-	-	#DIV/0!	-		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	75,836,798		100 %	7,310,600	25	-	0	0	0	0	0	25	-	-	-	25	-	-	#VAL UE!	-	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	750 Dokumen	34,738,000			7,310,600	4	-	0	0	0	0	0	4	-	-	-	4	-	-	#VAL UE!	-		
7	01	02	2	0 0 0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	7,310,600	4	-	0	0	0	0	0	4	-	-	-	4	-	-	#DIV/0!	-		

Renja Perubahan TA. 2025 Kecamatan Dungkek

7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	83,434,687			100 %	18,436,000	50	-	0	0	0	0	0	0	0	50	-	-	-	50	-	#VAL UE!	-	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	03	2			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	15 Desa	49,349,940				18,436,000	4	-	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-	-	4	-	#VAL UE!	-	
7	01	03	2	0 0 0 1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1			30 Lembaga Masyarakat	8,200,000	15	-	0	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	15	-	#DIV/0!	-	
7	01	03	2	0 0 0 3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1			2 Laporan	10,236,000	3	-	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	3	-	#DIV/0!	-	
7	01	03	2			Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	75 Keluarga	1				22,800,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	#VAL UE!	-		
7	01	03	2	0 0 0 6		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1			30 Keluarga	22,800,000	15	-	0	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	15	-	#DIV/0!	-	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	107,319,870			100 %	28,400,000	30	-	0	0	0	0	0	0	0	30	-	-	-	30	-	#VAL UE!	-	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	04	2			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	75 Kali	107,319,870				28,400,000	4	-	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-	-	4	-	#VAL UE!	-	

7	01	04	2	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	12 Laporan	14,400,000	3	-	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	3	-	#DIV/0!	-		
7	01	04	2	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	2 Laporan	14,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	79,112,270	100 %	64,189,800	25	-	0	0	0	0	0	0	25	-	-	-	25	-	#VALUE!	-	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	10 Kegiatan	1	2 Kegiatan	64,189,800	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	#VALUE!	-		
7	01	05	2	0001	#####	#####	1	30 Orang	40,589,800	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
7	01	05	2	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	12 Dokumen	23,600,000	1	-	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	-	#DIV/0!	-		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	124,896,108	100 %	76,227,500	20	320,000	0	0	0	0	0	0	20	320,000	-	0	20	320,000	#VALUE!	0	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	100 %	124,896,108	100 %	76,227,500	25	320,000	0	0	0	0	0	0	25	320,000	-	0	25	320,000	#VALUE!	0	
7	01	06	2	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	30 Dokumen	18,057,000	15	-	0	0	0	0	0	0	15	-	-	-	15	-	#DIV/0!	-		
7	01	06	2	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25,000,000	15 Dokumen	18,297,500	3	320,000	0	0	0	0	0	0	3	320,000	-	2	3	320,000	#DIV/0!	1		
7	01	06	2	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	15 Dokumen	23,473,000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
7	01	06	2	0006	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	15 Dokumen	16,400,000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#VAL UE!	9750%					
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program dan Kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)																											

Faktor penghambat pencapaian kinerja : faktor sistem kinerja dan kapasitas SDM serta pengaruh eksternal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pemberdayaan dan kompetensi SDM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya : ppengalokasian penambahan Personil yang cukup dan berkompeten.

1. Perlu dukungan dari pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan terutama perlu adanya penambahan personil

Disusun

**Sumenep, Juni 2025**

**Pit. CAMAT DUNGKEK**

**KABUPATEN SUMENEP**

**DADANG DEDY ISKANDAR, SH, MH**

Pembina

NIP. 19730320 199503 1 002

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN DUNGKEK**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Dungkek Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Dungkek.

Seiring perkembangan situasi telah terjadi pergeseran anggaran yaitu sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN DUNGKEK KAB. SUMENEP  
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kecamatan Dungkek							2.420.956.775,00	2.420.154.399,00	2.321.305.875,20							2.797.000.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.420.956.775,00	2.420.154.399,00	2.321.305.875,20							2.797.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							2.420.956.775,00	2.420.154.399,00	2.321.305.875,20							2.797.000.000,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						2.203.592.875,00	2.202.790.499,00	2.177.727.275,20							2.382.000.000,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						39.043.400,00	39.043.400,00	39.043.400,00			-	-			95.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	8.680.500,00	8.680.500,00	607.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	6.302.100,00	6.302.100,00	595.200,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	6.848.000,00	6.848.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	6.410.000,00	6.410.000,00	448.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.192.000,00	4.192.000,00	274.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.610.800,00	6.610.800,00	1.294.800,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.780.082.152,00	1.780.082.152,00	1.780.082.152,00			-	-					1.665.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.774.660.052,00	1.774.660.052,00	1.869.279.106,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					1.650.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.422.100,00	5.422.100,00	521.100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	16.248.600,00	0,00	0,00			-	-					35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	16.248.600,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	108.970.800,00	111.370.800,00	111.370.800,00			-	-					180.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.489.300,00	11.489.300,00	7.080.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.287.900,00	25.287.900,00	18.618.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					40.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.000.000,00	26.400.000,00	16.800.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.129.600,00	6.129.600,00	2.966.400,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39.424.000,00	39.424.000,00	22.592.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	55.222.323,00	68.268.547,00	68.268.547,00			-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	6.419.907,00	6.419.907,00	6.419.907,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	48.802.416,00	61.848.640,00	33.481.008,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	140.280.000,00	140.280.000,00	140.280.000,00			-	-	-		205.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.418.000,00	26.418.000,00	23.509.054,20	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.862.000,00	113.862.000,00	111.649.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				63.745.600,00	63.745.600,00	63.745.600,00			-	-			130.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	14.601.600,00	14.601.600,00	11.811.600,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	17.080.000,00	17.080.000,00	15.075.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	9 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Dungkek, Semua Kel/Desa	-	-		Penguatan Pemerataan Infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan		0,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	32.064.000,00	32.064.000,00	32.064.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
2	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	7.310.600,00	7.310.600,00	4.916.100,00							35.000.000,00	

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00							20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	7.310.600,00	7.310.600,00	7.310.600,00			-	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			12 Dokumen	12 Dokumen	7.310.600,00	7.310.600,00	4.916.100,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	41.236.000,00	41.236.000,00	35.076.000,00								75.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	18.436.000,00	18.436.000,00	18.436.000,00			-	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	8.200.000,00	8.200.000,00	5.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				25.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	10.236.000,00	10.236.000,00	7.156.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				15.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK

	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00						35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK		
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	30 Keluarga	22.800.000,00	22.800.000,00	22.320.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	28.400.000,00	28.400.000,00	23.600.000,00							55.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00							55.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	9.200.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	64.189.800,00	64.189.800,00	23.835.000,00							90.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	64.189.800,00	64.189.800,00	64.189.800,00							90.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	

	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					30 Orang	30 Orang	40.589.800,00	40.589.800,00	2.235.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				55.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	23.600.000,00	23.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-			-	-	76.227.500,00	76.227.500,00	56.151.500,00								160.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	76.227.500,00	76.227.500,00	76.227.500,00				-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	18.057.000,00	18.057.000,00	7.740.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	18.297.500,00	18.297.500,00	8.557.500,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	23.473.000,00	23.473.000,00	23.454.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					35.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Sumenep, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					20.000.000,00	KECAMATAN DUNGKEK
												<b>J U M L A H</b>	<b>2.420.956.775,00</b>	<b>2.420.154.399,00</b>	<b>2.321.305.875,20</b>							<b>2.797.000.000,00</b>			

## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Dungkek Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Perubahan Renja Kecamatan Dungkek ini disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Dungkek ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2025 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh *stakeholder*.

Sumenep, Juni 2025

  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN DUNGKEK  
**DADANG Bedy ISKANDAR, S.H., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19730320 199503 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sampai dengan triwulan II di Tahun 2024 serta menganalisis perubahan anggaran untuk triwulan III dan IV di Tahun 2024. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2021– 2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Talango, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak khususnya Kecamatan Talango.

Sumenep, Juli 2024

**CAMAT TALANGO**



**NUR HABIBI, S.STP., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19850222 200312 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Landasan Hukum.....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perubahan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	7
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB IV PENUTUP.....	23

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Talango merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Dokumen perubahan Renja Kecamatan Talango Tahun 2024 dilakukan dan disusun melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai triwulan kedua Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja yang disusun Perangkat Daerah secara umum, khususnya Kecamatan Talango, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 65)
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

## **C. MAKSUD dan TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Talango adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

## **2. TUJUAN**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talango Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai Triwulan II

### **BAB III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 3.1 Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024

### **BAB IV Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Talango sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Talango mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talango. Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran dan kinerja Kecamatan Talango masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talango sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah ini.



No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
									I		II		III		IV																		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17							
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	10 Jenis	82.175.000			2 Jenis	17.092.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %			
	7	01	01	2.05	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Palet Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				23 Palet	17.092.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	20 Jenis	538.813.944			5 Jenis	47.622.600	1	10.317.500	2	15.108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Jenis	25.425.500	60,00 %	53,39 %	3 Jenis	25.425.500	15,00 %	4,72 %	
	7	01	01	2.06	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Palet Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadalkan				2 Palet	9.879.100	1	3.739.000	0	2.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Palet	6.099.000	50,00 %	61,74 %	1 Palet	6.099.000			
	7	01	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Palet Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadalkan				2 Palet	11.297.000	1	3.938.500	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Palet	5.988.500	50,00 %	53,01 %	1 Palet	5.988.500			
	7	01	01	2.06	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Palet Bahan Logistik Kantor yang Diadalkan				2 Palet	10.560.000	0,5	2.640.000	0,5	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Palet	5.280.000	50,00 %	50,00 %	1 Palet	5.280.000			
	7	01	01	2.06	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Palet Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadalkan				3 Palet	12.063.300	0	0	1	6.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Palet	6.150.000	33,33 %	50,98 %	1 Palet	6.150.000			
	7	01	01	2.06	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diadalkan				1 Dokumen	3.823.200	1	0	0	1.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.908.000	100,00 %	49,91 %	1 Dokumen	1.908.000			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	55 Unit	159.052.100			5 Unit	82.830.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %		
	7	01	01	2.07	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadalkan				5 Unit	82.830.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	15 Jenis	21.073.500			3 Jenis	122.578.300	0	15.130.680	1	17.634.560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Jenis	32.765.240	33,33 %	26,73 %	1 Jenis	32.765.240	6,67 %	155,48 %	
	7	01	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadalkan				24 Laporan	5.440.455	4	845.680	7	1.634.560	0	0	0	0	0	0	0	0	11 Laporan	2.480.240	45,83 %	45,59 %	11 Laporan	2.480.240			
	7	01	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadalkan				24 Laporan	36.000.000	4	6.000.000	8	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Laporan	18.000.000	50,00 %	50,00 %	12 Laporan	18.000.000			

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Laku (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV			K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17			
		7 01 01 2.08 00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diaudikan				12 Laporan	81.135.845	3	8.285.000	3	4.000.000	0	0	0	0	6 Laporan	12.285.000	50,00 %	15,14 %	6 Laporan	12.285.000							
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	150 Unit	450.325.575		21 Unit	115.714.800	2	6.080.000	10	56.740.000	0	0	0	0	12 Unit	62.820.000	57,14 %	54,29 %	12 Unit	62.820.000	8,00 %	13,95 %					
		7 01 01 2.09 00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.135.600	0,25	4.250.000	0,25	4.300.000	0	0	0	0	0,5 Unit	8.550.000	50,00 %	49,90 %	0,5 Unit	8.550.000							
		7 01 01 2.09 00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	10.640.000	3	1.830.000	4	2.840.000	0	0	0	0	7 Unit	4.670.000	43,75 %	43,89 %	7 Unit	4.670.000							
		7 01 01 2.09 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	87.939.200	0	0	2	49.600.000	0	0	0	0	2 Unit	49.600.000	50,00 %	56,40 %	2 Unit	49.600.000							
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	95.776.600		100 %	51.228.300	25	8.440.000	25	13.954.000	0	0	0	0	50 %	22.394.000	50,00 %	43,71 %	50 %	22.394.000	50,00 %	23,38 %	KECAMATAN TALANGO				
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 Laporan	0		1 Laporan	41.830.000	0	8.440.000	0	9.400.000	0	0	0	0	0 Laporan	17.840.000	0,00 %	42,85 %	0 Laporan	17.840.000	0,00 %	0,00 %					
		7 01 02 2.01 00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	41.830.000	3	8.440.000	3	9.400.000	0	0	0	0	6 Laporan	17.840.000	50,00 %	42,85 %	6 Laporan	17.840.000							
		7 01 02 2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan usuran pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 Laporan	0		1 Laporan	9.398.300	0	0	0	4.554.000	0	0	0	0	0 Laporan	4.554.000	0,00 %	48,46 %	0 Laporan	4.554.000	0,00 %	0,00 %					
		7 01 02 2.04 00	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan				12 Laporan	9.398.300	3	0	3	4.554.000	0	0	0	0	6 Laporan	4.554.000	50,00 %	48,46 %	6 Laporan	4.554.000							

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		I				II				III				IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100 %	51.540.432			100 %	25.705.900	25	6.138.000	20	4.800.000	0	0	0	0	45 %	10.938.000	45,00 %	42,55 %	45 %	10.938.000	45,00 %	21,22 %	KECAMATAN TALANGO								
		7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	2730 Laporan	0	546 Laporan	25.705.900	146	6.138.000	100	4.800.000	0	0	0	0	0	246 Laporan	10.938.000	45,05 %	42,55 %	246 Laporan	10.938.000	9,01 %	0,00 %										
		7 01 03 2.06 00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			486 Keluarga	20.780.400	146	6.138.000	100	4.800.000	0	0	0	0	246 Keluarga	10.938.000	50,62 %	52,64 %	246 Keluarga	10.938.000													
		7 01 03 2.06 00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeposisi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeposisi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			60 Keluarga	4.925.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Keluarga	0	0,00 %	0,00 %	0 Keluarga	0													
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRIBUTAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum yang terlaksana	100 %	25.207.998			100 %	20.356.500	25	0	25	3.687.500	0	0	0	50 %	3.687.500	50,00 %	18,11 %	50 %	3.687.500	50,00 %	14,63 %	KECAMATAN TALANGO									
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum	Jumlah laporan kerjasama penanganan dalam memelihara keterlambatan dan keterlambatan umum yang terlaksana	10 Laporan	0	2 Laporan	20.356.500	0	0	1	3.687.500	0	0	0	0	1 Laporan	3.687.500	50,00 %	18,11 %	1 Laporan	3.687.500	10,00 %	0,00 %											
		7 01 04 2.01 00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	14.868.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Laporan	0	0,00 %	0,00 %	0 Laporan	0													
		7 01 04 2.01 00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Laporan	5.488.250	0	0	0	0	3.687.500	0	0	0	0 Laporan	3.687.500	0,00 %	67,19 %	0 Laporan	3.687.500													

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		I				II				III				IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	191.291.647			100 %	115.291.700	25	3.000.000	25	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 %	22.800.000	50,00 %	19,78 %	50 %	22.800.000	50,00 %	11,82 %	KECAMATAN TALANGO					
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Usuran Peremintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	10 Kegiatan	0			2 Kegiatan	115.291.700	0	3.000.000	0	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	19,78 %	0 Kegiatan	22.800.000	0,00 %	0,00 %						
7	01	05	2.01	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	69.691.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0 Orang	0									
7	01	05	2.01	00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	45.600.000	3	3.000.000	3	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22.800.000	50,00 %	50,00 %	6 Dokumen	22.800.000								
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	57.426.505			100 %	22.718.500	25	4.155.000	25	4.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 %	8.215.000	50,00 %	36,16 %	50 %	8.215.000	50,00 %	14,31 %	KECAMATAN TALANGO					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	57.426.505			3 Dokumen	22.718.500	1	4.155.000	1	4.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.215.000	66,67 %	36,16 %	2 Dokumen	8.215.000	40,00 %	14,31 %						
7	01	06	2.01	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	4.060.000	0	0	8	4.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4.060.000	100,00 %	100,00 %	8 Dokumen	4.060.000								
7	01	06	2.01	00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				8 Dokumen	4.185.500	8	4.155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4.155.000	100,00 %	99,27 %	8 Dokumen	4.155.000								
7	01	06	2.01	00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	14.473.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0 Laporan	0								
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		48,33 %	42,55 %													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</b>																									
1. Koordinasi yang baik antara stakeholder di kantor kecamatan talango, perangkat desa serta masyarakat Talango																									
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</b>																									
1. Belum adanya penyedia yang sesuai																									
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</b>																									
1. Rapat koordinasi dan evaluasi semua stakeholder kantor kecamatan Talango																									
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya :</b>																									
1. Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih baik lagi terhadap rencana kerja di Kecamatan Talango																									

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep khususnya urusan kewilayahan pada tahun 2024 melaksanakan 2 urusan, 6 program, dan 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Talango, jumlah realisasi kinerja sampai triwulan II sudah mencapai 48,17 %, hal ini dapat di kategorikan kurang maksimal, disebabkan kerena beberapa sub kegiatan masih belum terlaksana sampai dengan Triwulan II, baru akan akan terlaksana di Triwulan III atau Triwulan IV.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Talango, jumlah realisasi kinerja sampai Triwulan II sudah 54,41 %, hal ini disebabkan kerena pada sebagian sub kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III maupun Triwulan IV.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kecamatan Jumlah realisasi kinerja sampai Triwulan II mencapai 65,97 %, hal ini dapat di kategorikan lumayan baik pelaksanaan kinerjanya, hal ini dikerenakan lebih banyak sub kegiatan dilaksanakan pada saat triwulan I dan II sedangkan sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

**4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Talango, jumlah realisasi kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 68 %, hal ini dapat dikategorikan sudah baik, karena sebagian besar sub kegiatan telah dilaksanakan di triwulan I dan II dan sisanya akan dilaksanakan di triwulan III dan IV.

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Talango jumlah realisasi kinerja sampai triwulan II masih mencapai 21,84%, hal ini dapat dikategorikan kurang baik pelaksanaan kinerjanya, hal ini dikarenakan sebagian besar sub kegiatan anggaran kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Talango, Jumlah realisasi Kinerja sampai Triwulan II sudah mencapai 30,41 %, hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan anggaran kasnya masih terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya.

Secara keseluruhan capaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sampai dengan triwulan II sudah mencapai 48,41%, hal ini merupakan capaian yang kurang maksimal dikarenakan beberapa sub kegiatan masih akan terealisasi pada triwulan III atau triwulan IV, sehingga capaian kinerja pada beberapa kegiatan belum maksimal realisasinya. Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan Kecamatan Talango dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan maksimal dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kecamatan Talango Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program dan kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 di bawah ini :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. SUMENEP  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN TALANGO								2.382.910.364,00	2.382.910.364,00	2.514.127.061,00	131.216.697,00							2.705.238.644,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.382.910.364,00	2.382.910.364,00	2.514.127.061,00	131.216.697,00							2.705.238.644,00		
	7.01	KECAMATAN							2.382.910.364,00	2.382.910.364,00	2.514.127.061,00	131.216.697,00							2.705.238.644,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	2.089.012.464,00	2.164.012.464,00	2.278.826.161,00	307.633.384,00							2.396.645.848,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penaggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	2.861.900,00	2.861.900,00	2.861.900,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Talango		3.004.995,00	KECAMATAN TALANGO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	416.500,00	416.500,00	416.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		437.325,00	KECAMATAN TALANGO		
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	581.700,00	581.700,00	581.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		610.785,00	KECAMATAN TALANGO		
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	569.700,00	569.700,00	569.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		598.185,00	KECAMATAN TALANGO		
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	569.700,00	569.700,00	569.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		598.185,00	KECAMATAN TALANGO		

7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	454.800,00	454.800,00	454.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			477.540,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Laporan	5 Laporan	269.500,00	269.500,00	269.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			282.975,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	1.768.910.364,00	1.768.910.364,00	1.890.127.061,00	121.216.697,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	ASN Kecamatan Talango		2.034.246.918,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.768.910.364,00	1.768.910.364,00	1.890.127.061,00	121.216.697,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			2.034.246.918,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	17.092.800,00	17.092.800,00	17.092.800,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	ASN Kecamatan Talango		17.947.440,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapannya				23 Paket	23 Paket	17.092.800,00	17.092.800,00	17.092.800,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			17.947.440,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	47.622.600,00	47.622.600,00	47.622.600,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Talango		50.003.730,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.879.100,00	9.879.100,00	9.879.100,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			10.373.055,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.297.000,00	11.297.000,00	11.297.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.861.850,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.088.000,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.063.300,00	12.063.300,00	12.063.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			12.066.465,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.823.200,00	3.823.200,00	3.823.200,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.014.360,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan				5 Unit	5 Unit	57.953.500,00	74.417.900,00	62.830.700,00	24.877.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Kantor Kecamatan Talango		63.782.900,00	KECAMATAN TALANGO



NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16 Unit	10.640.000,00	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			11.172.000,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	93.889.860,00	93.889.860,00	87.939.200,00	-5.950.660,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			98.384.353,00	KECAMATAN TALANGO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan				100 %	100 %	45.238.300,00	45.238.300,00	51.228.300,00	2.261.915,00							47.500.215,00	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 laporan	1 laporan	35.840.000,00	35.840.000,00	41.830.000,00	5.990.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Se Kecamatan Talango		37.632.000,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	35.840.000,00	35.840.000,00	41.830.000,00	5.990.000,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			37.632.000,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 laporan	1 laporan	9.398.300,00	9.398.300,00	9.398.300,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Se Kecamatan Talango		9.868.215,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	9.398.300,00	9.398.300,00	9.398.300,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			9.868.215,00	KECAMATAN TALANGO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan				100 %	100 %	25.705.900,00	25.705.900,00	25.705.900,00	1.285.295,00							26.991.195,00	

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikut Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Desa dan Kelurahan				546 Keluarga	546 Keluarga	25.705.900,00	25.705.900,00	25.705.900,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Se Kecamatan Talango		26.991.195,00	KECAMATAN TALANGO
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				486 Keluarga	486 Keluarga	20.780.400,00	20.780.400,00	20.780.400,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			21.819.420,00	KECAMATAN TALANGO
	7.01.03.2.06.0008	Pembinaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				60 Keluarga	60 Keluarga	4.925.500,00	4.925.500,00	4.925.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.171.775,00	KECAMATAN TALANGO
4.	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>20.356.500,00</b>	<b>20.356.500,00</b>	<b>20.356.500,00</b>	<b>1.017.826,00</b>							<b>21.374.326,00</b>	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Linfas Sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	20.356.500,00	20.356.500,00	20.356.500,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Se Kecamatan Talango		21.374.326,00	KECAMATAN TALANGO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.868.250,00	14.868.250,00	14.868.250,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			15.011.003,00	KECAMATAN TALANGO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5.488.250,00	5.488.250,00	5.488.250,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			5.762.663,00	KECAMATAN TALANGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
a.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan				100 %	100 %	190.291.700,00	115.291.700,00	115.291.700,00	9.514.585,00							199.806.285,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				2 Kegiatan	2 Kegiatan	190.291.700,00	115.291.700,00	115.291.700,00	-75.000.000,00			-	Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Masyarakat Se Kecamatan Talango		199.806.285,00	KECAMATAN TALANGO	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	69.691.700,00	69.691.700,00	69.691.700,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			73.176.285,00	KECAMATAN TALANGO	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	120.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	-75.000.000,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			126.630.000,00	KECAMATAN TALANGO	
d.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan				100 %	100 %	12.305.500,00	12.305.500,00	22.718.500,00	615.275,00							12.920.775,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3 Kegiatan	3 Kegiatan	12.305.500,00	12.305.500,00	22.718.500,00	10.413.000,00			-	Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Desa Se Kecamatan Talango		12.920.775,00	KECAMATAN TALANGO	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peringkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif			4.263.000,00	KECAMATAN TALANGO	

7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		4.263.000,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				8 Dokumen	8 Dokumen	4.185.500,00	4.185.500,00	4.185.500,00	0,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		4.394.775,00	KECAMATAN TALANGO
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	4.060.000,00	4.060.000,00	14.473.000,00	10.413.000,00	Kab. Sumenep, Talango, Talango	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif		4.263.000,00	KECAMATAN TALANGO
<b>J U M L A H</b>								<b>2.382.910.364,00</b>	<b>2.382.910.364,00</b>	<b>2.514.127.061,00</b>	<b>777.713.426.186,00</b>						<b>2.705.238.644,00</b>	

## BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Talango Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Sumenep, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Perubahan Renja Kecamatan Talango disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja Kecamatan Talango ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Talango.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh *stakeholder*.

Sumenep, Juli 2024



**NUR HABIBI, S.STP., M.H.**

Pembina

NIP. 19850222 200312 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pada hakikatnya rencana kerja tahunan adalah satu kesatuan system perencanaan nasional dengan tujuan tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, penganggaran sampai dengan pengendalian perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karenanya Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra OPD.

Dari regulasi tersebut diatas dapat dilihat bagaimana Renja OPD dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga renja diharapkan dapat dijadikan alat ukur bagaimana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun ini Rencana kerja Kecamatan Guluk-Guluk masih dilakukan perubahan menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini setelah masa pandemic, akan tetapi Rencana Kerja tersebut disusun mengacu pada target kinerja rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2022-2026, Rencana kerja Kecamatan Guluk-Guluk 2024 dilakukan perubahan dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran pada kegiatan tertentu, sehingga menyebabkan terdapat beberapa program/kegiatan yang harus menyesuaikan dengan keadaan

tersebut, maka dengan pemberlakuan hal tersebut ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan penghapusan/pergeseran ke kegiatan lain serta menyesuaikan dengan target kinerja yang baru guna pencapaian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelayanan masyarakat.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan dengan kondisi pandemic saat ini yang sudah landai, akan tetapi Renja Perubahan disusun untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **b. Tujuan**

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Perubahan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB. II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II 2024
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan urusan hingga Triwulan II Tahun 2023
- BAB. III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2024, Pergeseran, Penghapusan, Penambahan, Pengurangan Target dan Pagu, Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran
- BAB. IV : PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

Capaian kinerja Kecamatan Guluk-Guluk hasil pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumenep 2022-2026 dimana realisasi capaian kinerja Kecamatan Guluk-Guluk tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel capaian kinerja tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Guluk-Guluk	Indeks IKM	-	82	82,21	100%
2.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	Persentase kelompok masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	-	80%	80%	100%
3.	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil musrembangcam disetujui di tingkat Kabupaten	-	81%	81%	100%
4.	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	-	23%	23%	100%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diselesaikan	-	85%	85%	100%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	-	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Kinerja 2023		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
		Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sector	-	100%	100%	100%

Capaian target indicator Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2023 dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target yang direncanakan mengindikasikan bahwa Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep didalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan telah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan top down and bottom up, sehingga dokumen perencanaan yang telah disusun semakin terarah dan konsisten serta tetap melihat kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu inovasi dan koordinasi sangat dibutuhkan didalam menyempurnakan proses dan pola penyusunan dokumen perencanaan sehingga kedepan diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih sempurna dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dilakukan menjadi 6 Program dan 14 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rincian tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja berdasarkan Urusan Hingga Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut ini :

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN**

#### **PERANGKAT DAERAH 2024**

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang mengalami perubahan/pergeseran anggaran pada program/kegiatan, dimana terdapat program/kegiatan yang harus di rubah pagu anggarannya menyesuaikan dengan kebutuhan/ peraturan yang terbaru, sedangkan Renja Perubahan Kecamatan Guluk-Guluk Tahun 2024 dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### **3.1. Prioritas Perangkat Daerah**

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan perubahan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan tetap Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta melihat tingkat kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan public, maka akan dilakukan pergeseran anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2024 antara lain :

1. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, **Sub Kegiatan** Pengadaan Mebel *dilakukan pergeseran anggaran* pada **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, **Sub Kegiatan** Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, **Sub Kegiatan** Pengadaan Mebel *dilakukan pergeseran anggaran* pada **Kegiatan** -

Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

3. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, **Sub Kegiatan** Pengadaan Mebel *dilakukan pergeseran anggaran* pada **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebagaimana tabel 3.1 berikut :

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2024 berisikan materi program/kegiatan yang dilakukan penyesuaian/pergeseran pagu anggaran dengan sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, akan tetapi program/kegiatan yang lain akan dilaksanakan dengan target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja Perubahan diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas yang dapat memacu kinerja seluruh personil Kecamatan Guluk-Guluk untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban terhadap tupoksi mengarah pada obyektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2024 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.

  
**MUNAMAD SIDQI ZN, SE, MM**  
Pembina  
NIP. 19680607 199303 1 005